BI INSTITUTE

Seri Buku Sejarah & Heritage

MEMBANGUN KEMAKMURAN DI PEDALAMAN

BANK INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KEDIRI

Membangun Kemakmuran di Pedalaman

Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri

MEMBANGUN KEMAKMURAN DI PEDALAMAN

BANK INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KEDIRI

TIM PENYUSUN

Nawiyanto, Handinoto, Rita Krisdiana, Sofwan Kurnia, Wihujeng Rengganis, Aryni Ayu Widiyawati, Allan Akbar

EDITOR

Gusti Asnan

BANK INDONESIA INSTITUTE
BANK INDONESIA
2022

Membangun Kemakmuran di Pedalaman
Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri

Penanggung Jawab Produksi:
Yoga Affandi

Kepala Produksi:
Arlyana Abubakar

Tim Penyusun:
Nawiyanto, Handinoto, Rita Krisdiana, Sofwan Kurnia, Wihujeng Rengganis, Aryni Ayu Widiyawati, Allan Akbar

Editor:
Gusti Asnan

Kontributor:
Hardini Swastiana, Yusuf Wicaksono, Ginisita Dofany, Sintya Aprina, Nur Fadhilah

Cetakan Pertama, Agustus 2022
xxviii + 511 hlm, 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-623-5662-27-5
978-623-5662-28-2 (EPUB)

Bank Indonesia Institute
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
http://www.bi.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA

Keberhasilan Kediri menjadi kota industri skala besar di Jawa Timur saat ini, tidak terlepas dari perjalanan sejarah ekonomi yang panjang. Kediri dengan kekayaan alamnya yang melimpah, maraknya industrialisasi, serta keragaman entitas masyarakatnya, merupakan fakta menarik untuk diulas. Bahkan muncul anggapan Kediri sebagai "harta karun Jawa" yang berkembang dari kekaguman akan peran historis dan strategis kawasan ini sejak masa prakolonial. Awal perkembangan kawasan Kediri sendiri banyak dipengaruhi oleh kebijakan kolonial, terutama sejak integrasi Kediri ke dalam wilayah kekuasaan Belanda di masa Sistem Tanam Paksa tahun 1830an.

Perkembangan kawasan dan perekonomian wilayah ini menjadi kunci yang melatarbelakangi keputusan Direksi De Javasche Bank (DJB) untuk mendirikan kantor cabangnya, yaitu DJB *Agentschap* Kediri pada 2 Juli 1923. Alam Kediri yang subur dengan posisinya yang berada di pedalaman, telah memiliki peran penting dalam percaturan perdagangan global sebagai produsen komoditas yang menopang kebutuhan pasar internasional. Berbagai budidaya komoditas komersial berhasil tumbuh dan berkembang pesat, di antaranya adalah kopi, tebu, indigo, lada, dan kayu manis, memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah Kediri. Produk-produk ekspor yang dihasilkan dari wilayah Kediri mengalir dalam volume besar ke Surabaya sebagai gerbang ekspor dari pedalaman Jawa Timur menuju pasar dunia.

Kehadiran DJB Agentschap Kediri saat itu memiliki peran penting, ekspansi kredit yang dilakukannya menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan, dan turut mengantarkan ekonomi Kediri menuju masa kejayaan di era kolonial.

Masa berganti, setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, upaya untuk menegakkan kedaulatan ekonomi menjadi bagian dari agenda utama bangsa ini. Salah satunya adalah kebutuhan yang mendesak untuk segera mendirikan bank sentral milik Republik Indonesia. Rangkaian proses persiapan, pertimbangan dan negosiasi yang berliku, akhirnya bermuara pada kesepakatan untuk dilakukan dengan menasionalisasi DJB. Akhirnya melalui UU No. 11 Tahun 1953, ditetapkanlah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Menjadi dampak dari nasionalisasi ini adalah beralihnya beberapa eks kantor cabang DJB yang berada di berbagai daerah menjadi kantor cabang Bank Indonesia. Salah satunya adalah DJB Agentschap Kediri, yang sekarang dikenal sebagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri.

Dinamika tantangan dan kendala ekonomi yang terjadi di wilayah Kediri, sejak masa revolusi, mewarnai perjalanan panjang sejarah yang turut mengubah pola perekonomian Kediri. Dan didalamnya KPwBI Kediri turut mengawal dinamika perekonomian tersebut. Seiring dengan peran dan fungsi yang mengalami mengalami evolusi kelembagaan sebagai bank sentral modern, maka cakupan tugas dan fungsi sudah yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelum kemerdekaan.

KPwBI Kediri, awalnya mengawal perekonomian daerah melalui perannya dalam menjaga stabilitas rupiah, mengatur kredit dan dana perbankan, mengatur peredaran uang, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkesinambungan. Seiring dengan perkembangan kelembagaan, maka kini KPwBI Kediri hadir dengan tugas untuk mengawal stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran di daerah Kediri. Sinergi menjadi kunci utama, KPwBI Kediri bekerjasama dengan pemerintah daerah, terus berupaya membangun perekonomian daerah. Ekonomi daerah yang awalnya bergantung pada perkebunan, kemudian tumbuh menjadi tiga sektor besar yakni: pertanian, perdagangan, dan industri

Buku berjudul **"Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri"** menjadi rekaman perjalanan sejarah ekonomi Kediri dan peran Bank Indonesia didalamnya. Kehadiran buku ini di tengah pembaca, dapat dinikmati tak hanya sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai rujukan bagi pengambil kebijakan daerah. Buku ini diharapkan dapat melengkapi dan memantik kemunculan karya sejenis tentang pengetahuan sejarah ekonomi untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Buku ini tidak hanya menjadi pengingat sejarah, namun juga menjadi referensi dalam bersama-sama mewujudkan pembangunan ekonomi Kediri yang lebih maju.

Jakarta, Juli 2022

Perry Warjiyo

SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Dalam keterangan sejarah, disebutkan bahwa wilayah Kediri merupakan salah satu daerah di pedalaman Jawa yang kaya dengan sumber daya alam. Topografinya yang subur, dikelilingi oleh Sungai Brantas dan pegunungan aktif, merupakan berkah alam bagi masyarakat tradisional untuk melakukan kegiatan pertanian dan perniagaan. Sehingga sejak era budidaya berbagai komoditas alam pada masa kolonial, Kediri kemudian dikenal sebagai produsen komoditas yang menopang kebutuhan pasar internasional. Ekonomi setempat-pun tumbuh berbasis perkebunan komersial.

Pehatian pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap wilayah Kediri kala itu menorehkan cerita sejarah yang cukup menarik. Kerajaan Kediri sempat menjadi bagian dari hegemoni Kerajaan Mataram, berkat lokasinya yang cukup strategis di pedalaman, dan jauh dari jangkauan ekspansi militer kolonial VOC. Namun, hal ini berakhir akibat Perang Diponegoro yang banyak menguras biaya (1825-30), menyebabkan Kasunanan Surakarta terpaksa melepaskan Kadipaten Kediri dan menyerahkannya kepada Belanda.

Integrasi Kediri dalam wilayah kekuasaan kolonial Belanda memperlihatkan dinamika perjalanan sosial ekonomi yang sarat dengan pengetahuan. Kediri ditetapkan menjadi bagian dari wilayah pendukung eksploitasi ekonomi, dengan penerapan Sistem Tanam Paksa (STP) sejak tahun 1830, dan sembilan puluh tahun setelahnya. Pemerintah Kolonial Belanda berhasil mendapatkan surplus yang besar dari kebijakan ini. Kediri pada

gilirannya menjadi andalan untuk memenuhi beragam komoditas permintaan pasar dunia sejak awal STP, serta menjadi wilayah dengan surplus keuntungan yang tinggi dalam lanskap tata kelola perekonomian wilayah kolonial kala itu.

Pada abad ke-19, peran Kediri sebagai penopang ekonomi Jawa Timur semakin terlihat sejak dimulainya era industrialisasi perkebunan. Kota Surabaya yang sebelumnya menjadi penghubung dalam kegiatan pendanaan dan transaksi keuangan, dinilai tidak lagi menguntungkan bagi Kediri. Hal ini wajar mengingat modal yang diinvestasikan sebagian besar disalurkan melalui lembaga perbankan di Surabaya ke berbagai wilayah pedalaman di Jawa Timur. Dalam perjalanannya untuk meningkatkan potensi dan kegiatan perekonomian setempat, Kediri membutuhkan kehadiran lembaga perbankan yang kredibel untuk menangani transaksi keuangan dengan volume yang lebih besar dan akses keuangan yang lebih cepat. Mecermati hal tersebut, maka Direksi De Javasche Bank (DJB) memutuskan untuk menjadikan wilayah Kediri sebagai wilayah penting bagi pendirian cabangnya. Sehingga DJB Agentschap Kediri secara resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 1923. Perkembangan perekonomian di wilayah Kediri-pun terus mengalami peningkatan, dengan keberadaan DJB Agentschap Kediri yang berperan dalam meningkatkan layanan perbankan, sirkulasi uang, serta melancarkan pemberian kredit untuk menggerakan ekonomi masyarakat. Kediri-pun semakin berkembang pesat sebagai pusat ekonomi unggulan di Jawa Timur pada masa kolonial.

Selepas kemerdekaan, DJB dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia pada tahun 1953. Kehadiran Bank Indonesia di wilayah Kediri di wakili oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengawal dan mendukung perkembangan perekonomian Kediri. Dengan kerja sama yang sinergis bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia terus berupaya mengawal laju perekonomian Kediri. KPwBI Kediri bersinergi dalam melaksanakan berbagai tugas dan program di Kediri, antara lain dengan mendorong peningkatan literasi keuangan, peningkatan akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada perbankan serta berbagai program edukasi yang dilaksanakan secara selaras untuk memajukan Kota Kediri.

Buku berjudul **"Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri"** merupakan salah

satu kontribusi nyata Bank Indonesia dalam kajian akademis terutama dalam bidang sejarah ekonomi. Disajikan secara komprehensif melalui lintasan sejarah Kediri dan interaksinya dengan bank sentral dari masa ke masa. Buku ini sekiranya mampu memberikan gambaran utuh perkembangan ekonomi daerah dengan potensi alam yang melimpah agar dapat dimanfaatkan sebagai kajian perumusan kebijakan di masa depan.

Jakarta, Mei 2022

Dody Budi Waluyo

PENGANTAR
KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE

Bank Indonesia Institute kembali menghadirkan referensi pengetahuan sejarah ekonomi sebagai bagian dari Buku Seri Sejarah dan *Heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Kehadiran buku publikasi Bank Indonesia Institute berjudul **"Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri"** menjadi persembahan Bank Indonesia kepada masyarakat Kediri dan wilayah sekitarnya, untuk memperkaya khazanah kajian akademis terutama dalam bidang sejarah ekonomi Kediri.

Buku ini menjadi sumbangsih Bank Indonesia Institute sebagai upaya untuk melengkapi dokumentasi memori institusi (*institutional memory*) Bank Indonesia. Perekaman memori ini juga ditujukan untuk membangkitkan rasa kepemilikan bersama bagi rakyat Indonesia terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral milik bersama. Di bidang akademis, buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan masyarakat luas, serta menjadi sumber refleksi bagi para pembuat kebijakan di daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan hikmah dan pelajaran masa lalu. Kiranya buku ini juga dapat menjadi bagian dari referensi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi untuk memaknai perjalanan sejarah ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Sebagai sebuah serial buku, maka Buku Seri Sejarah dan *Heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia terbit dalam beberapa judul buku berdasarkan perjalanan kehadiran Bank Indonesia di beberapa daerah yang di awali oleh

De Javasche Bank. Seri buku ini menyajikan rangkaian peristiwa mengenai kiprah bank sentral di beberapa wilayah di Indonesia.

Kami menyadari bahwa dalam menulis sebuah buku, idealnya dapat memenuhi 4 (empat) unsur, yakni *uniqueness* (keunikan); *novelty* (kebaruan); *attractiveness* (menarik); dan *accessibility* (aksesabilitas). Maka, dalam penulisan buku ini, Tim Penulis berupaya mengisi ruang-ruang kosong yang belum banyak dikaji oleh buku-buku sejenis, antara lain dengan memanfaatkan sumber primer berupa arsip masa De Javasche Bank sebagai referensi utama dalam penelitian dan penulisan. Guna memperluas jangkauan pembaca, buku ini ditulis dengan menggunakan gaya penulisan semi populer agar lebih menarik untuk dibaca, di samping juga diterbitkan secara digital melalui link yang tersedia di *website* Bank Indonesia. Diharapkan jangkauan pembaca buku ini tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga masyarakat luas khususnya generasi muda yang menaruh minat terhadap sejarah ekonomi wilayah Kediri.

Buku ini tidak akan terbit tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut aktif terlibat dalam proses penelitian dan penulisan buku ini. Kami berharap informasi yang termuat dalam buku ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi Kediri menuju kemakmuran.

Selamat membaca.

Jakarta, Mei 2022

Yoga Affandi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sungai Brantas di Kediri saat banjir dengan Jembatan Sepanjang 160 Meter di atasnya Tahun 1915 **14**
Gambar 1.2. Jembatan Besi di atas Sungai Brantas di Kediri **17**
Gambar 1.3. Benteng Belanda yang dibangun pada 1834 dan pada 1890 direnovasi Menjadi Kantor Residen Kediri **30**
Gambar 1.4. Pabrik Gula Badas di Timur Laut Keresidenan Kediri Tahun 1912 **40**
Gambar 1.5. Gerobak sapi untuk pengangkutan tebu di perusahaan Badas Timur Laut Kediri Tahun 1912 **41**
Gambar 1.6. Penyiapan Tanaman Kopi di Onderneming Besowo **41**
Gambar 1.7. Panen Perusahaan Kopi Besowoh di Kediri 1910 **42**
Gambar 1.8. Panen Perusahaan Tapioka di Kediri 1927 **48**
Gambar 1.9. Kompleks Pabrik Gula Meritjan Kediri di Pinggir Sungai Brantas Tahun 1925 **65**
Gambar 1.10. Pabrik Pengolahan Kopi Perkebunan Besowo Kediri **66**
Gambar 1.11. Pabrik Genteng di Pare **67**
Gambar 1.12. Trem di Halte Karang Dinajoh pada Rute Pare-Kepung Kediri Tahun 1910 **69**
Gambar 2.1. Perusahaan Pabrik Gula Minggiran Kediri 1920" **97**
Gambar 2.2. Pengangkutan Tebu di Kediri Tahun 1926 **98**
Gambar 2.3. Jalur Kereta Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM) Menuju Stasiun Pare **109**
Gambar 2.4. Personel KSM 1931 **110**
Gambar 2.5. Perusahaan Rokok Kretek Gudang Garam di Kediri **112**
Gambar 3.1. Enji Kihara, Syuucokan Kediri **151**
Gambar 3.2. Patroli Pasukan Belanda di Wilayah Kediri **186**
Gambar 3.3. Pasar di Kediri sekitar Tahun 1949 **206**
Gambar 4.1. Pemimpin Bank Indonesia cabang Kediri Berkebangsaan Belanda yang Terakhir dan Berkebangsaan Indonesia yang Pertama **226**
Gambar 4.2. Personalia Bank Indonesia Kantor cabang Kediri 1958 **227**
Gambar 4.3. Kompleks N.V. Mexolie Maatschappij tot exploitatie van Oliefabrieken te Kediri, Java. 1930-1938 **241**
Gambar 4.4. Tanki Penampung Minyak Mexolie Kediri **242**
Gambar 4.5. Perusahaan Rokok Gudang Garam 1958 **272**
Gambar 6.1. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar Menerima Penghargaan TPID Terbaik Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Bali Tahun 2017 dari Presiden RI, Joko Widodo **364**
Gambar 6.2. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Musni Hardi Menerima Penghargaan TPID Terbaik Kota/ Kabupaten Wilayah Jawa Bali Tahun 2018 **364**
Gambar 6.3. Penghargaan untuk Kabupaten Blitar sebagai TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Jawa Bali Tahun 2020 pada TPID Award 2021 **366**
Gambar 6.4. Pelatihan Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan, 2021 **370**

Gambar 6.5. Kegiatan Pengembangan Klaster dan Bantuan Sarana Prasarana kepada UMKM Omah Kopi **371**
Gambar 6.6. Pelatihan Petani Milenial di Komunitas Ngawi Organik Center (KNOC) yang dibuka langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Tahun 2021 **372**
Gambar 6.7. Pelatihan Pembuatan Produk Turunan Kain Tenun, 2021 **373**
Gambar 6.8 Bantuan Sarana Prasarana Teknologi *Feeder Layer* melalui Program Sosial Bank Indonesia untuk Efisiensi Pakan Ayam di Klaster Telur, Blitar **374**
Gambar 6.9. Peresmian Embung Kebonrejo oleh Anggota Dewan Gubernur BI Bidang VI ADG Rosmaya Hadi, 2018 **375**
Gambar 6.10. Pameran "UMKM Virtual Expo 2020" yang digelar oleh BI Kediri, bekerjasama dengan Pemkot Kediri dan Kadin Kota Kediri, 2020 **378**
Gambar 6.11. Pekan QRIS Nasional dihadiri Anggota DPR, Wali Kota Kediri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Pimpinan Perbankan Kota Kediri, 2020 **383**
Gambar 6.12. *Launching* Kampung Edukasi dan Kampung Digital Kampung Inggris Pare oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, 2021 **383**
Gambar 6.13. Kepala OJK Kediri dan Deputi Ka KPwBI Kediri Berfoto Bersama Peserta Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri, 2020 **387**
Gambar 7.1. Peta Kota Kediri 2012 **392**
Gambar 7.2. Peta Kota Kediri 1913 **397**
Gambar 7.3. Peta Kota Kediri 1938 **398**
Gambar 7.4. Diagram Alun-alun Tradisional dan Perletakan Bangunan di Sekitarnya **400**
Gambar 7.5. Benteng di Mulut Jembatan Kediri 1835 **401**
Gambar 7.6. Rumah Kediaman Bupati Kediri di Alun-alun sekitar tahun 1930 **401**
Gambar 7.7. Alun-alun Kota Kediri sekitar Tahun 1938 **402**
Gambar 7.8. Peta Kota Kediri dan Daerah Sekitarnya **402**
Gambar 7.9. Peta Pola Jalan di Kota Kediri 1913 **404**
Gambar 7.10. Peta Rute Kediri Stoomtram Maatschappij dan Hubungan dengan Daerah Sekitarnya **407**
Gambar 7.11. Tampak Depan Societeit De Brantas yang Terletak di Jalan Semampir Tahun 1938 **409**
Gambar 7.12. Hotel Merdeka Kediri Tahun 2010 **410**
Gambar 7.13. Deretan Toko di Jalan Dhoho Kediri Tahun 1930 **411**
Gambar 7.14. Suasana Jalan Dhoho Kediri 2020 **411**
Gambar 7.15. Taman Kota di Kediri Tahun 1938-1939 **412**
Gambar 7.16. Alun-alun Kediri Tahun 1910 **413**
Gambar 7.17. Halaman Depan Rumah Residen Kediri sekitar Tahun 1892 **413**
Gambar 7.18. Kolam Renang Tirtayasa Kediri Tahun 2010 **414**
Gambar 7.19. Pemandian Pagora Tahun 2010 Kediri **415**
Gambar 7.20. Peta Daerah Pecinan Kediri Tahun 1913 **417**

Gambar 7.21. Rumah Orang Tionghoa Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri **418**
Gambar 7.22. Rumah Tinggal Orang Tionghoa Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri **419**
Gambar 7.23. Detail Penyangga Atap Rumah Orang Tionghoa Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri **419**
Gambar 7.24. Pintu Masuk Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Jalan Yos Sudarso Kediri **420**
Gambar 7.25. Rumah Bekas Orang Tionghoa Kaya di Jalan Yos Sudarso Kediri **420**
Gambar 7.26. Jembatan Sungai Brantas Kediri sekitar Tahun 1922 **423**
Gambar 7.27. Pintu Gerbang antara Jalan Kediri dan Minggiran **424**
Gambar 7.28. Kantor Residen Kediri Tahun 1870 **425**
Gambar 7.29. Rumah Orang Tionghoa Kaya di Jalan Brawijaya Kediri **426**
Gambar 7.30. Gedung Societeit de Brantas yang dibangun pada Abad ke 19 di Kediri **427**
Gambar 7.31. Rumah Sakit Gambiran Kediri Tahun 1875 **428**
Gambar 7.32. Stasiun Kediri didirikan Tahun 1881 pada Tahun 1930 **429**
Gambar 7.33. Situasi Depan Stasiun Kediri yang didirikan Tahun 1881 **429**
Gambar 7.34. Gedung MULO (Sekarang SMAN I) Kediri 1924 **431**
Gambar 7.35. Gedung SMAN I Kediri yang didirikan Tahun 1924 **431**
Gambar 7.36. Gedung DJB Kediri Tahun 1929 **432**
Gambar 7.37. Rumah Jabatan Direktur DJB Kediri Tahun 1929 **433**
Gambar 7.38. Pintu Masuk Ritz Hotel (Sekarang Hotel Merdeka) yang dibangun Tahun 1933 dengan Gaya Arsitektur Modern **434**
Gambar 7.39. Halaman Hotel Merdeka Sekarang (Dahulu Ritz Hotel) dengan Gaya Arsitektur Modern. Gaya Arsitektur *Indische Empire* dengan Kolom-Kolom yang Bercorak Yunani Sudah ditinggalkan **434**
Gambar 7.40. Rumah Direktur Max Olie, Jalan Hayam Wuruk Kediri Tahun 1938 **435**
Gambar 7.42. Rumah Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri. Rumah dengan Model Seperti Ini Sudah Ketinggalan Zaman pada Tahun 1920-an **435**
Gambar 7.41. Rumah Direksi Max Olie Jalan Hayam Wuruk Kediri Tahun 1938 **435**
Gambar 7.43. Kantor Pos Kediri Tahun 1930 **436**
Gambar 7.44. Kantor DPU Kediri Mulai digunakan Tahun 1933 **437**
Gambar 7.45. Toko Surabaya di Jalan Dhoho, Kediri tahun 1934 **438**
Gambar 7.46. Toko Buku Tan Khoen Swie, Kediri tahun 1934 **438**
Gambar 7.47. Pertokoan di Jalan Dhoho Kediri Tahun 1930 **439**
Gambar 7.48. Perempatan Jalan Dhoho Kediri Tahun 1930 **4359**
Gambar 7.49. Masjid Agung Kediri sekitar Tahun 1935 **440**
Gambar 7.50. Kompleks Gereja Pohsarang **441**
Gambar 7.51. Gereja Merah (GPIB) Kediri Tahun 2010 **442**
Gambar 7.52. Gereja Protestan (GPIB) Tahun 1904 **442**
Gambar 7.53. Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri Tahun 2000 **443**
Gambar 7.54. Kelenteng Tjoe Hwie Kiong yang Menghadap ke Sungai Brantas Kediri **444**
Gambar 7.55. PJH Cuypers **446**
Gambar 7.56. Gerard Vissering Presiden Pertama De Javasche Bank **446**
Gambar 7.57. Lambang Biro Arsitek Hulswit, Fermont en Ed. Cuypers **448**

Gambar 7.58. Ir. A.A. Fermont **448**
Gambar 7.59. Eduard Cuypers **448**
Gambar 7.60. M.J. Hulswit **448**
Gambar 7.61. Gedung DJB Lama (1923-1928) **450**
Gambar 7.62. Sketsa Tanah yang dibeli DJB Kediri Tahun 1928 **451**
Gambar 7.63. Sketsa Tanah Milik DJB Jalan Brawijaya Kediri **452**
Gambar 7.64. Gedung DJB Kediri Tahun 1929 **453**
Gambar 7.65. Denah Awal Lantai 1 Gedung DJB Kediri **454**
Gambar 7.66. Denah Awal Lantai 2 Gedung DJB Kediri **455**
Gambar 7.67. Gedung DJB Kediri Tahun 1929 **458**
Gambar 7.68. Suasana Interior Gedung DJB Kediri Tahun 1929 **460**
Gambar 7.69. Model Jendela Gedung DJB Kediri Tahun 1929 **460**
Gambar 7.70. Tampak Depan Rumah Dinas Direktur DJB Kediri Tahun 1929 **461**
Gambar 7.71. Cetak Biru Rumah Dinas Direktur DJB Kediri 1929 **461**
Gambar 7.72. Gedung DJB di Indonesia Tahun 1908-1921 **463**
Gambar 7.73. Gedung DJB di Indonesia Tahun 1923-1929 **463**
Gambar 7.74. Arsitek DJB Kediri Theo Taen (1889-1970) **465**
Gambar 7.75. Pegawai Kantor Arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers di Batavia Tahun 1921-1942 **465**
Gambar 7.76. Sketsa Rencana Gedung DJB Pematangsiantar Tahun 1921 **466**
Gambar 7.77. Gedung DJB Pematangsiantar Tahun 1923 **466**
Gambar 7.78. Sketsa Rencana Gedung DJB Padang Tahun 1921 **466**
Gambar 7.79. Gedung DJB Padang Tahun 1925 **466**
Gambar 7.80. Cetak Biru Tipologi Tampak Depan Gedung DJB Tahun 1925 **468**
Gambar 7.81. Tampak Samping Gedung DJB Kediri Tahun 1929 **469**
Gambar 7.82. Denah Posisi Bangunan Lama dan Baru di Gedung DJB Kediri **470**
Gambar 7.83. Komposisi Tampak Bangunan Baru terhadap Bangunan Lama Gedung DJB Kediri **471**
Gambar 7.84. Denah Gedung DJB Kediri Lantai Dua **472**
Gambar 7.85. Denah Gedung DJB Kediri Lantai Satu **472**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Penduduk Keresidenan Kediri Tahun 1920 **21**
Tabel 1.2. Jumlah Pabrik Gula dan Luas Penanaman di Keresidenan Kediri 1836-1870 (Areal dalam hektar) **34**
Tabel 1.3. Persentase Rumah Tangga yang Terlibat dalam Tanam Paksa di Keresidenan Kediri, 1840-1850 **36**
Tabel 1.4. Perkebunan Tebu Swasta di Keresidenan Kediri, 1875-1900 **37**
Tabel 1.5. Pabrik Gula di Keresidenan Kediri yang Bekerja untuk Pemerintah pada Periode 1870-1890 (Area dalam hektar) **38**

Tabel 1.6. Jumlah dan Area Perkebunan Tebu di Keresidenan Kediri dan Total Jawa 1900-1920 (Area dalam hektar) **39**
Tabel 1.7. Produksi Kopi Cultuur Maatschappij Ngrangkah, 1894-1916 (dalam pikul) **43**
Tabel 1.8. Luas Perkebunan Karet di Keresidenan Kediri, 1913 (dalam *bau*) **45**
Tabel 1.9. Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914 **49**
Tabel 1.10. Jumlah Pembayaran Uang Per Kapita Per Tahun untuk Produk Komersial yang diserahkan kepada Pemerintah pada 1840-an **55**
Tabel 1.11. Luas Tanaman Padi dan Palawija di Keresidenan Kediri 1856-1865 (hektar) **59**
Tabel 1.12. Luas Tanaman dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri 1870-1915 (hektar) **61**
Tabel 1.13. Luas Tanaman Palawija di Keresidenan Kediri, 1880-1915 (x 1000 ha) **62**
Tabel 1.14. Tanaman Palawija yang diusahakan Kaum Petani Kediri, 1903 (hektar) **63**
Tabel 1.15. Jumlah Penumpang KSM Berdasarkan Kelas Tahun 1912-1916 **68**
Tabel 2.1. Personalia De Javasche Bank Agentschap Kediri, 31 Maret 1931 **85**
Tabel 2.2. Jumlah dan Area Perkebunan Tebu di Keresidenan Kediri dan Total Jawa 1920-1929 (dalam hektar) **95**
Tabel 2.3. Produksi Kopi Robusta Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik Tahun 1924-1932 (dalam pikul) **102**
Tabel 2.4. Produksi Karet Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik Tahun 1925-1929 (dalam Kg) **102**
Tabel 2.5. Produksi dan Rata-Rata Harga Tembakau Krosok di Kediri dan Besuki **105**
Tabel 2.6. Luas Tanaman dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri 1923-1929 (hektar) **107**
Tabel 2.7. Luas Panen dan Produksi Palawija di Keresidenan Kediri, 1923-1929 (x 1000 ha, x 1000 ton) **108**
Tabel 2.8. Pendapatan Bersih KSM Periode 1928-1929 **111**
Tabel 2.9. Jumlah Produksi Rokok Kretek di Jawa Timur 1929-1930 (dalam jutaan) **113**
Tabel 2.10. Luas Penanaman Tebu Pabrik-Pabrik Gula di Keresidenan Kediri, 1932-1934 **120**
Tabel 2.11. Produksi Kopi Robusta dan Karet Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik Tahun 1929-1932 **123**
Tabel 2.12. Produksi dan Rata-rata Harga Tembakau Krosok di Kediri dan Besuki **123**
Tabel 2.13. Luas Tanaman dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri, 1929-1940 **125**
Tabel 2.14. Luas Panen Beberapa Tanaman Palawija Utama 1929-1942 (x 1000 hektar) **126**
Tabel 2.15. Volume Barang yang diangkut KSM, 1930-1936 (dalam ton) **127**
Tabel 2.16. Pendapatan Bersih KSM Periode 1928-1936 **128**
Tabel 2.17. Jumlah Perusahaan Kretek Berskala Besar di Keresidenan Kediri, 1929 **129**
Tabel 3.1. Produksi Gula di Keresidenan Kediri, 1942-1944 (dalam ton) **167**
Tabel 3.2. Luas Panen dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri 1941-1945 **170**
Tabel 3.3. Kantor Cabang De Javasche Bank yang dibuka Kembali sebelum Agresi Militer Belanda I, Januari-Juni 1946 **191**

Tabel 3.4. Kantor Cabang De Javasche Bank yang dibuka Kembali Pasca Agresi Militer Belanda II, Desember 1948-Januari 1949 **192**
Tabel 3.5. Tanggungan Pinjaman Relasi DJB Agentschap Kediri untuk Pemberesan, 8 Februari Tahun 1949 **195**
Tabel 3.6. Luas Panen dan Produksi Tanaman Rakyat di Keresidenan Kediri 1945-1946 **201**
Tabel 3.7. Tanaman Ketela Perkebunan Djengkol Kediri Tahun 1951/1952 (dalam hektar) **205**
Tabel 4.1. Daftar Pimpinan DJB/Bank Indonesia Kantor Cabang Kediri 1949-1969 **227**
Tabel 4.2. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia, 1953-1959 (dalam jutaan rupiah) **234**
Tabel 4.3. Perusahaan Penggilingan Tebu di Keresidenan Kediri pada Tahun 1952 **245**
Tabel 4.4. Penyebaran Penggilingan Tebu Mesin Milik Djawatan Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur di Kediri **246**
Tabel 4.5. Lokasi Penggilingan Tebu Mesin Milik Swasta di Kediri **246**
Tabel 4.6. Dukungan Dana dari Bank Indonesia dan Bank-Bank Pemerintah kepada BUMN 1958-1965 **253**
Tabel 4.7. Susunan Perubahan Nama pada Bank Tunggal **254**
Tabel 4.8. Pertumbuhan Bank Swasta Nasional di Provinsi Jawa Timur 1960-1965 **257**
Tabel 4.9. Pertumbuhan Bank Swasta Nasional di Kota-Kota Besar di Provinsi Jawa Timur 1965-1967 **257**
Tabel 4.10. Perkebunan Kopi di Keresidenan Kediri pada Tahun 1962 **267**
Tabel 4.11. Luas Panen dan Produksi Tiga Tanaman Pangan di Keresidenan Kediri 1962-1964 **268**
Tabel 4.12. Rata-Rata Produksi Bahan Pangan Perkapita di Keresidenan Kediri 1962-1964 **269**
Tabel 4.13. Jumlah Pabrik dan Produksi Rokok di Kediri dan Keresidenan Lain di Jawa Tahun 1961 **270**
Tabel 5.1. Jumlah Bank dan Cabang, 1969-1993 **272**
Tabel 5.2. Daftar Pimpinan DJB/Bank Indonesia Kantor Cabang Kediri 1969-1987 **273**
Tabel 5.3. Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri, Periode 1984/1985-1987/1988 (dalam ton) **302**
Tabel 5.4. Penanaman Kedelai di Kabupaten Kediri 1985-1987 (dalam hektar) **304**
Tabel 5.5. Luas Tanaman dan Produksi Tebu di Jawa Timur, 1975-1989 (x 1000) **308**
Tabel 5.6. Penanaman dan Produksi Tebu di Kabupaten Kediri 1984-1987 (dalam ton dan hektar) **308**
Tabel 5.7. Perkebunan dan Komoditas yang diusahakan di Kediri pada Tahun 1973 **309**
Tabel 5.8. Luas Lahan Beberapa Tanaman Perkebunan yang Utama di Kediri pada 1977 dan 1982 (dalam hektar) **310**
Tabel 5.9. Volume Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan di Kediri 1977 dan 1981 **311**

Tabel 5.10. Produksi Kopi di Wilayah Kabupaten Kediri 1984-1987 **312**
Tabel 5.11. Perkebunan Cengkih di Wilayah Kediri Sekitar 1977 (Hektar) **314**
Tabel 5.12. Penanaman dan Produksi Cengkih di Kabupaten Kediri 1984-1987 (dalam ton dan hektar) **315**
Tabel 5.13. Kecamatan Penghasil Tembakau di Kabupaten Kediri pada 1977 (hektar) **317**
Tabel 5.14. Produksi Tembakau di Kediri 1984-1987 (dalam ton) **318**
Tabel 5.15. Perkembangan Unit Industri dan Nilai Produksinya, 1984-1987 **320**
Tabel 5.16. Posisi Perusahaan Gudang Garam dibanding Produsen Rokok Lain pada Tahun 1990 **323**
Tabel 5.17. Data Volume Penjualan Domestik dan Ekspor Tahun 1985-1989 (dalam miliar batang) **326**
Tabel 6.1. Jumlah Jaringan Kantor Wilker KBI Kediri **385**
Tabel 6.2. Perkembangan Kinerja Perbankan Umum di Wilker KBI Kediri (Rp juta) **386**
Tabel 7.1. Kedudukan Kepala Pemerintahan dan Kekuasaan Wilayah Zaman Belanda sampai Tahun 1900 **395**
Tabel 7.2. Daftar Kota-kota yang ditetapkan sebagai Gemeente Tahun 1905 dan 1906 **396**

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Bank Indonesia... v
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia... viii
Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute... xi
Daftar Gambar... xiii
Daftar Tabel... xvi
Daftar Isi... xx
Daftar Istilah... xxii
Daftar Singkatan... xxiv

PROLOG... 1

11 **Bab 1 Pembentukan Panggung Pedalaman**

Geostrategis Kediri... **12**
Masyarakat Kawasan Kediri... **20**
Ekspansi Politik Kolonial Belanda ke Kediri... **27**
Aktivitas Ekonomi Masyarakat... **31**

75 **Bab 2 De Javasche Bank dan Dinamika Perekonomian Kediri**

Pendirian De Javasche Bank Kediri... **76**
Peran DJB dan Perbankan Lainnya Masa Puncak Kejayaan Perkebunan... **89**
Perekonomian Kediri Pada Era Depresi... **117**

145 **Bab 3 Masa Transisi Kekuasaan dan Perbankan**

Transisi Kediri dari Belanda ke Jepang... **146**
Nanpo Kaihatsu Ginko dan Ekonomi Pendudukan... **153**
Kediri Masa Revolusi... **177**

213 **Bab 4 Institusionalisasi Bank Indonesia dan Rekonstruksi Ekonomi**

Nasionalisasi De Javasche Bank dan Terbentuknya Bank Indonesia Kediri... **214**
Rekonstruksi Ekonomi Kediri Pasca Perang... **231**
Implementasi Ekonomi Terpimpin... **249**
Kondisi Sosial-Ekonomi Kediri... **263**

277 **Bab 5 Bank Indonesia Kediri Dalam Era Pembangunan**

Perekonomian Masa Orde Baru... **278**
Perekonomian Kediri Era Pembangunan... **295**
Peran Bank Indonesia dalam... **344**
Membangun Kediri... **344**

351 **Bab 6 Bank Indonesia Kediri Pada Masa Reformasi**

Evolusi Kelembagaan Bank Indonesia... **352**
Peran Bank Indonesia Kediri dalam Menggerakkan Ekonomi... **357**

391 **Bab 7 Morfologi Kota dan Transformasi Gedung Kantor Eks De Javasche Bank Kediri**

Perkembangan Morfologi Kota Kediri... **391**
Perkembangan Arsitektur Di Kediri Pada Zaman Kolonial... **421**
Pemanfaatan dan Upaya Pelestarian Gedung Eks De Javasche Bank Kediri... **469**

EPILOG... 475

DAFTAR PUSTAKA... 487
LAMPIRAN DAFTAR NAMA KEPALA BI KEDIRI... 505
SERI BUKU SEJARAH DAN HERITAGE KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA... 507

DAFTAR ISTILAH

Afdeeling	:	Wilayah administratif masa Hindia Belanda setingkat Kabupaten
Agentschap	:	Kantor cabang
Bau	:	Satuan luas lahan yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Jawa
Bergcultures	:	Perkebunan tanaman pegunungan
Bladtabak	:	Produsen penghasil tembakau kualitas tinggi
Cikar	:	Alat transportasi darat tradisional dari Indonesia yang ditarik oleh dua ekor sapi
Erfpacht	:	Merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.
Europeanen	:	Orang golongan Eropa
Gemeente Raad	:	Dewan kota/DPRD
Gemeente	:	Kota Praja
Gentong	:	Tempat air yang terbuat dari tanah dan ditanam dalam tanah
Gulden	:	Mata uang belanda selama beberapa abad, sebelum digantikan oleh euro
Gun	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Distrik atau Kewedanan
Gunco	:	Kepala/Pimpinan Gun
Gunpyo	:	Uang militer Jepang
Hiperinflasi	:	Inflasi yang tidak terkendali, dimana terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba.
Inlanders	:	Orang Pribumi
Jubileum	:	Perayaan untuk memperingati ulang tahun suatu peristiwa pada bilangan tahun tertentu yang dirayakan secara khusus
Kadipaten	:	Wilayah yang dikuasai oleh adipati yang tunduk pada kerajaan dan juga kesultanan
Kejawen	:	Sebuah keyakinan atau mungkin boleh disebutkan agama yang terutama dianut di pulau Jawa oleh suku Jawa dan sukubangsa lainnya yang menetap di Jawa
Ken	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Kabupaten

Kenco	:	Kepala/Pimpinan Ken
Keprasan	:	Sistem ratun pada penanaman tebu
Ku	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Kelurahan atau Desa
Kunco	:	Kepala/Pimpinan Ku
Mancanegara Wetan	:	Salah satu wilayah yang tunduk pada kerajaan di Wilayah Mataram
Mencatut	:	Upaya pegawai, karyawan dan buruh untuk menambah penghasilan sekecil apapun dengan terlibat dalam perdagangan spekulatif barang-barang dagangan apapun yang dicari pembeli.
Real estate	:	Istilah hukum yang berkaitan dengan sebidang tanah dan lingkungannya beserta bangunan dan proyek yang ada di atas tanah tersebut
Reserves Requirement	:	Cadangan wajib minimum pada bank sentral
Son	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Kecamatan
Sonco	:	Kepala/Pimpinan Son
Stagnasi	:	Keadaan terhenti
Syi	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Kota Praja
Syico	:	Kepala/Pimpinan Syi
Syuu	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Keresidenan
Syuuco	:	Kepala/Pimpinan Syuu
Tegalan	:	Lahan bukan sawah (lahan kering)
Vreemde Oosterlingen	:	Orang Timur asing: termasuk orang Tionghoa, Arab, India dsb. nya
Wijk	:	Kelompok Eropa sebagai kelas penguasa mendiami wilayah khusus, berlaku juga untuk kelompok Timur Asing
Zelfstandig Gemeenschap	:	Kota swapraja, dengan otonomi penuh

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

ABDACOM	: *American British Dutch Australian Command*
AD	: Angkatan Darat
ASEAN	: *Association of Southeast Asian Nations*
AVB	: *Algemeene Volkscredietbank*
BANAS	: Badan Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Belanda
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
BAPHAR	: Badan Pengusahaan Perusahaan Pharmasi
Bapindo	: Bank Pembangunan Indonesia
BAPPIT	: Badan Pengusahaan Industri dan Tambang
BBD	: Bank Bumi Daya
BC	: Bank of China
BDI	: Bukit Dhoho Indah
BDN	: Bank Dagang Negara
BE	: Badan Eksekutif
BEC	: Basic English Course
BEII	: Bank Ekspor Impor Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Bank Industri Negara
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BKTN	: Bank Koperasi Tani dan Nelayan
BMPD	: Badan Musyawarah Perbankan Daerah
BMPK	: Batas Maksimum Pemberian Kredit
BNI	: Bank Negara Indonesia
BOW	: *Burgerlijke Openbare Werken*
BPPC	: Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih
BPRI	: Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BRIMOB	: Brigade Mobil
BUD	: Badan Urusan Dagang
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUNEG	: Bank Umum Negara
CBIAC	: *The Chartered Bank of India, Australia and China*

CEFR	: *Common European Framework of Reference*
CONEFO	: *Conference of the New Emerging Forces*
CTC	: *Candidate of Training Class*
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DEPERNAS	: Dewan Perancang Nasional
DJB	: De Javasche Bank
DPD	: Dewan Pertahanan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPP	: Dinas Peternakan dan Perikanan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
ETPD	: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Exim	: Bank Ekspor Impor
FE-UI	: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Finec	: *Financial Economic Agreement*
GCG	: *Good Corporate Governance*
GDP	: *Gross Domestic Product*
GNI	: Gedung Nasional Indonesia
GPI	: *Gumul Paradise Island*
HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
HCS	: *Holland Chinese School*
HIS	: *Hollandsch Inlandsche school*
HLM	: *High Level Meeting*
HSBC	: *Hongkong and Shanghai Banking Corporation*
HSBI	: Himpunan Seni Budaya Indonesia
HVA	: *Handelsvereeniging Amsterdam*
IGGI	: *Inter-Governmental Group on Indonesia*
IHK	: Indeks Harga Konsumen
INKA	: Industri Kereta Api
IPI	: Ikatan Pelajar Indonesia
IRRI	: International Rice Research Institute
KAD	: Kerjasama Antar Daerah
KBI	: Kantor Bank Indonesia
KC	: Kantor Cabang
KCL	: Potassium Klorida

KCP	: Kantor Cabang Pembantu
Keppres	: Keputusan Presiden
KIK/KMKP	: Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen
KJPU	: Komoditas Jasa Produk Unggulan
KLBI	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
KNIL	: *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger*
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KNOC	: Komunitas Ngawi Organic Center
KODIM	: Komandan Order Distrik Militer
KOWANI	: Kongres Wanita Indonesia
KP	: Kantor Pusat
KPM	: *Koninklijke Paketvaart Maatschappij*
KpwBI	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia
KR	: Kantor Representatif
KSM	: Kediri Stoomtram Maatschappij
KSU	: Koperasi Serba Usaha
KUD	: Koperasi Unit Desa
KUK	: Kredit Usaha Kecil
KUT	: Kredit Usaha Tani
KYC	: *Know Your Customer*
LAAPLN	: Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri
LTT	: *Liem Thien Tjien*
Manipo	: Manifestasi Politik
Monas	: Monumen Nasional
MURI	: Museum Rekor Indonesia
NHM	: *Nederlandsch Handelsmaatschappij*
NICA	: *Nederland Indies Civil Administration*
NIEM	: *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij*
NIHB	: *Nederlandsch Indische Handelsbank*
NILA	: *Natural Learning Ability*
NILM	: *Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij*
NKK	: *Nanpo Kaihatsu Kinko*

OFI	: *Oliefabriek Insulinde Mij*
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OPM	: Operasi Pasar Murni
ORI	: Oeang Repoeblik Indonesia
ORIDA	: Oeang Republik Indonesia Daerah
ORIDAB	: Oeang Kertas Darurat Untuk Daerah Banten
ORIPS	: Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera
OVOP	: *One Village One Product*
PAKTO	: Paket Oktober
Pansela	: Pantai Selatan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pertakina	: Perkumpulan Tenaga Kerja Purna
PETA	: Pembela Tanah Air
PG	: Pabrik Gula
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PPI	: Pasukan Polisi Istimewa
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPN-Baru	: Pusat Perkebunan Negara Baru
PQN	: Pekan QRIS Nasional
PSBI	: Program Sosial Bank Indonesia
PSN	: Proyek Strategi Nasional
PUB	: Padi Unggul Baru
PUN	: Padi Unggul Nasional
PUR	: Pengelolaan Uang Rupiah
RI	: Residen Kediri
RIS	: Republik Indonesia Serikat
Sarbumusi	: Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
SBH	: Survei Biaya Hidup
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Sigaret Kretek Klobot
SKL	: Sigaret Kretek Linting
SKM	: Sigaret Kretek Mesin
SKT	: Sigaret Kretek Tangan

SOP	: *Standard Operating Procedure*
SP	: Sistem Pembayaran
SS	: *Staad Spoorwegen*
TC	: *Training Class*
THKK	: *Tiong Hwa Hwee Kwan*
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKS	: Tingkat Kesehatan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TP2DD	: Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPAKD	: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
TPID	: Tim Pengendali Inflasi Daerah
TRI	: Tebu Rakyat Indonesia
Tritura	: Tiga Tuntutan Rakyat
TSP	: *Triple Phospat*
UKP	: Uang Kertas Pemerintah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UUPMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing
VOC	: *Vereenigde Oost-indische Compagnie*
VUTW I	: *Varietas Unggul Tahan Wereng*
WUBI	: Wira Usaha Bank Indonesia
ZA	: Ammonium Sulfat

PROLOG

Kediri merupakan pedalaman Jawa Timur yang mengalami dinamika sejarah yang sangat panjang dari masa kuno hingga sekarang. Kawasan ini telah tampil dalam panggung sejarah sebagai pusat kekuasaan politik besar di Jawa melalui Kerajaan Kadiri (Kediri). Berdasarkan jejak-jejak arkeologis yang ditinggalkannya, teritori inti Kerajaan Kediri diperkirakan meliputi wilayah yang membentang dari Magetan di sebelah barat hingga Wajak Lor di bagian timur, dan dari Pare di sebelah utara hingga daerah Jepun di bagian selatan.[1] Keberadaannya sebagai pusat kekuasaan politik mengalami kemunduran dengan bangkitnya Dinasti Singhasari yang dibangun Ken Arok yang mampu mengalahkan Kediri pada tahun 1222. Sejak saat itu, peran wilayah Kediri timbul-tenggelam seiring dengan dinamika politik yang terjadi di Tanah Jawa. Kediri mencoba bangkit kembali ketika Kertanegara berkuasa di Singhasari dan berhasil mengalahkannya. Kebangkitannya hanya berlangsung sebentar. Siasat yang dimainkan Raden Wijaya dengan memanfaatkan pasukan Mongolia yang bermaksud menghukum Kertanegara berhasil meruntuhkan kekuasaan Kediri dan menjadi awal kebangkitan Majapahit. Kediri tergeser dari panggung sejarah dan tenggelam dalam bayang-bayang kebesaran Majapahit. Ketika Majapahit melemah, Kediri di bawah Dinasti Girindrawardana bangkit melawan dan menumbangkan hegemoninya (474). Ekspansi Islam ke pedalaman di bawah Sunan Giri berhasil menundukkan kekuasaan Kediri (1527).[2] Kediri kemudian ditaklukkan Mataram dan menjadi wilayah yang dibawahkannya. Dengan status ini

1 Edi Sedyawati, "The State Formation of Kadiri", dalam G.J. Schutte (ed), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden:KITLV Press, 1994), hlm.8-9.

2 Aminuddin Kasdi. "Rona-Rona Sejarah dari Lembah Brantas Masa Kolonial (Abad XIX) dari Kediri" dalam Restu Gunawan (ed), *Sungai sebagai Pusat Peradaban* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, 2008), hlm. 18-20.

Kediri lebih sering disebut dalam hubungan dengan berbagai resistensi yang dilancarkan terhadap hegemoni Mataram.

Kedudukan politis Kediri kembali menguat ketika Mataram mengalami disintegrasi akibat intrik dan konflik internal keluarga istana antara Susuhunan Amangkurat I dengan putera mahkota (Amangkurat II). Trunajaya yang pada mulanya mendukung putera mahkota dalam konflik ini ternyata kemudian menunjukkan ambisi politisnya. Setelah berhasil menyingkirkan Susuhunan Amangkurat I dari istananya dan merampas harta pusaka Mataram di Istana Plered, Trunajaya dengan dukungan orang-orang Madura dan para petualang Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan membangun pusat kekuasaan di Kediri.[3] Lokasi Kediri yang terletak di kawasan pedalaman dengan kompleks pegunungannya dipandang strategis dan lebih aman dari jangkauan militer Kompeni yang mengancam dari kota-kota pesisir Jawa. Di Kediri, Trunajaya membangun istana keraton yang besar dan megah sebagai kedudukan kekuasaannya.[4] Posisi Kediri menyurut kembali dengan penangkapan Trunajaya pada tahun 1679 dan kematiannya pada tahun 1680.[5] Wilayah Kediri pun kembali menjadi bagian dari teritori Kerajaan Mataram. Ketika wilayah Mataram dibelah menjadi dua bagian, (Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta) pada tahun 1755, Kadipaten Kediri menjadi teritori Kasunanan Surakarta. Namun, akibat Perang Diponegoro (1825-1830) yang banyak menghabiskan biaya, Kasunanan Surakarta kemudian menyerahkan Kadipaten Kediri dan menyerahkan kepada Belanda pada tahun 1830.[6]

Integrasi Kediri ke dalam wilayah kekuasaan Belanda secara umum menenggelamkan peran Kediri sebagai pusat kekuasaan politik yang penting. Di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, Kediri ditetapkan sebagai wilayah keresidenan yang meliputi empat *afdeeling*

3 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* 1200-2008 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm.165-166.

4 Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya, Vol 2: Jaringan Asia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 60.

5 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* 1200-2008 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm.168.

6 Aminuddin Kasdi. "Rona-Rona Sejarah dari Lembah Brantas Masa Kolonial (Abad XIX) dari Kediri" dalam Restu Gunawan (ed), *Sungai sebagai Pusat Peradaban* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, 2008), hlm. 27-28.

atau kabupaten, yakni Kediri, Tulungagung, Berbek (Nganjuk), dan Blitar. Integrasi politik wilayah Kediri juga menandai dimulainya penerapan serangkaian kebijakan ekonomi kolonial secara langsung. Tujuan utama kebijakan kolonial adalah menjadikan Kediri sebagai sumber keuntungan secara ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda maupun negeri induk. Implementasi kebijakan kolonial telah menjadikan Kediri sebagai panggung di wilayah pedalaman Jawa Timur yang mementaskan dinamika ekonomi dalam kaitan dengan produksi komoditas berorientasi ekspor dan berbagai implikasi sosiologis yang ditimbulkannya. Proses ini tidak hanya melibatkan prakarsa yang berasal dari pihak pemerintah kolonial saja, melainkan juga melibatkan berbagai kelompok sosial dengan beragam sektor ekonomi, yang bersinergi maupun berkompetisi untuk menggapai mimpi tentang kemakmuran.

Dinamika perekonomian Wilayah Kediri secara umum belum banyak tergambarkan secara historiografi. Gambaran sejarah yang telah dihasilkan mengenai wilayah Kediri sebagian besar berkaitan dengan dimensi politik. Kajian tentang sejarah Kerajaan Kediri telah dihasilkan misalnya oleh sejarawan Belanda, P.W. Palmer van den Broek dalam karya berjudul, *De Geschiedenis van het Rijk Kediri*.[7] Kajian penting yang lain dihasilkan oleh Edi Sedyawati yang memberikan gambaran mengenai formasi Kerajaan Kediri dalam kaitan dengan kedudukan raja, birokrasi kerajaan, struktur masyarakat, dan wilayah kekuasaannya.[8] Tulisan lain dari Soekarto Kartoatmodjo memberi paparan singkat tentang tokoh penguasa Kediri, hubungan penguasa Kediri dengan desa-desa bawahannya, kehidupan keagamaan dan perkembangan kebudayaannya.[9] Capaian-capaian yang mengesankan secara kultural membuat masa Kerajaan Kediri digambarkan sebagai masa keemasan sastra Jawa kuno dan simbol perkembangan intelektual periode klasik.[10]

7 P.W. Palmer van Broek, *De Geschiedenis van het Rijk Kediri* (Leiden: E.J. Brill, 1904).

8 Edi Sedyawati, "The State Formation of Kadiri", dalam G.J. Schutte (ed), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden:KITLV Press, 1994), hlm.7-16.

9 M.M. Sukarto Kartoatmodjo, *Sekitar Masalah Sejarah Kadiri Kuna*, Hari Jadi Kediri (Kediri: Lembaga Javanologi dan Universitas Kadiri, 1985).

10 Aminuddin Kasdi. "Rona-Rona Sejarah dari Lembah Brantas Masa Kolonial (Abad XIX) dari Kediri" dalam Restu Gunawan (ed), *Sungai sebagai Pusat Peradaban* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, 2008), hlm. 17.

Kajian-kajian mengenai Kediri pada masa yang belakangan lebih banyak mengungkap dinamika sosial masyarakat Kediri pada masa kolonial, pendudukan Jepang, transisi kemerdekaan, dan masa transisi ke Orde Baru. Beberapa ilustrasi yang layak disebut misalnya karya-karya Clifford Geertz terutama, *The Social History of an Indonesian Town* dan *Peddlers and Princes.*[11] Meskipun Geertz adalah seorang antropolog, kedua karyanya ini sangat berharga karena menggunakan pendekatan historis dalam pemaparannya dan disusun berdasarkan penelitian lapangan pada awal dekade 1950-an. Contoh lainnya yang mengungkap dimensi sosial-politik Kediri adalah karya Hermawan Sulistyo tentang kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di Kediri dan Jombang pada dekade 1960-an.[12] Karya-karya sejarah yang muncul beberapa waktu belakangan telah memperkaya pemahaman tentang masa lalu Kediri dari aspek sosial, ekonomi, dan politik pada periode waktu yang berbeda. Kajian yang dilakukan M. Saichurrahman membahas perkembangan sistem administrasi dan fasilitas publik di Kota Kediri masa kolonial, sedangkan kajian yang dilakukan Hisbaron mengungkap kondisi sosial-politik Kediri pada masa revolusi kemerdekaan.[13] Sejumlah karya lainnya memperlihatkan minat yang lebih mikroskopis dengan mengkaji bidang tertentu secara spesifik seperti perdagangan candu, penerbitan, perusahaan transportasi, dan beragam perusahaan perkebunan khususnya pabrik gula.[14]

11 Clifford Geertz, *The Social History of an Indonesian Town* (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1965), diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Graffiti Pers, 1986); Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns* (Chicago: The University of Chicago Press, 1963).

12 Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2003).

13 Hisbaron Muryantoro, *Kediri Pada Masa Revolusi 1945-1949*, Jurnal Patrawidya, Vol. 12 No 1 Tahun 2011; M. Saichurrahman, *Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri*, Skripsi (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015).

14 Lihat misalnya, Ahmad Fathoni dan Sarkawi Husain, "Pelaksanaan Opiumpacht: Monopoli Perdagangan Opium Melalui Perantara Bandar di Keresidenan Kediri", 1833-1900, dalam *Lembaran Sejarah,* Vol. 16 No. 1 (2020); Wisnu, *Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri: The Agent of Javanese Culture*, Paramita: Historical Studies Journal, Vol. 29, No. 1, 2019; Belly Isayoga Kristyowidi, *Multikulturalisme Dalam Terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie 1916-1953*, Kenosis, Vol. 6 No. 1 (2020); Siti Nurhadisah Baroroh, *Peningkatan Sistem Produksi Gula Di Pabrik Gula Pesantren-Kediri Tahun 1890-1940*, Tesis (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, 2015); Muhamad Faizin dan Gayung Kesuma, *Dinamika Pabrik Gula Meritjan di Kediri Tahun 1930-1945*, Verleden: Jurnal Kesejarahan, 11(2), 2017; Dian Agustin dan Corry Liana *Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soembar Glatik di Kediri Tahun 1891-1932*, Avatara, Volume 9, No. 2 Tahun 2020.

Terlepas dari kontribusi berharga yang telah diberikan oleh kajian-kajian yang telah ada dalam mengungkap berbagai aspek historis wilayah dan masyarakat Kediri, terdapat kekosongan yang begitu terasa mengenai langkanya kajian tentang dinamika historis perekonomian masyarakat Kediri jangka panjang. Padahal, wilayah Kediri merupakan pedalaman Jawa Timur yang mengalami dinamika perekonomian yang menarik dalam kurun waktu yang panjang. Wilayah ini juga memberi kontribusi penting bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur masa kolonial dan pascakolonial. Demikian pula sebaliknya, perekonomian Kediri juga merasakan pahit getir dan kesukaran yang ditimbulkan oleh guncangan-guncangan eksternal akibat integrasi wilayah ini dalam sistem produksi komersial berorientasi pada jaringan pasar global, selain peluang-peluang besar yang ditawarkan untuk ikut meraup keuntungan dari perkembangan permintaan pasar global sebagai sumber penopang kemakmurannya.

Bertolak dari kekosongan tersebut, buku ini bermaksud memberikan gambaran mengenai dinamika historis perekonomian wilayah Kediri jangka panjang sejak pendirian De Javasche Bank (DJB) Agentschap Kediri, yang kemudian berubah menjadi Bank Indonesia Kediri. Secara khusus buku ini bertujuan untuk mengungkap peran yang dimainkan DJB/BI Kediri dalam mendorong dan memfasilitasi dinamika regional dalam mewujudkan kemakmuran melalui fungsi moneter dan komersial yang dijalankannya. Selain menyuguhkan uraian mengenai peran dan kontribusi DJB/BI Kediri, buku ini juga secara khusus bertujuan membahas *heritage* DJB/Kantor Bank Indonesia Kediri yang masih bertahan hingga sekarang dari perspektif arsitektural dan tata kota.

Ruang lingkup spasial buku ini adalah kawasan yang disebut Keresidenan Kediri. Dalam wilayah administrasi kolonial, Keresidenan Kediri dibagi menjadi empat *afdeeling*/kabupaten, yakni Kediri, Tulungagung, Berbek, dan Blitar. Meskipun demikian, karena alasan praktis terkait ketersediaan sumber sejarah yang menjadi bahan penulisan, pembahasan lebih banyak menggunakan bukti-bukti faktual dari Kabupaten/*Afdeeling* Kediri. Manakala bukti-bukti faktual memungkinkan, pembahasan pada lingkup keresidenan akan dilakukan. Secara umum wilayah Keresidenan Kediri juga merupakan wilayah kerja DJB Agentschap Kediri. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi kolonial di wilayah ini dan peningkatan populasi

orang Barat, Kota Kediri yang menjadi ibukota keresidenan ditingkatkan statusnya menjadi kota praja (*gemeente*) yang dilimpahi wewenang mengatur urusan sendiri pada tahun 1906, bersamaan waktu dengan kota-kota lain di Jawa termasuk Surabaya dan Bandung.[15]

Lingkup temporal buku ini meliputi rentang waktu yang panjang, sejak sekitar 1924 hingga 2020. Tahun 1924 dijadikan tonggak awal inti pembahasan buku berdasarkan pertimbangan bahwa tahun ini DJB Kediri resmi dibuka dan memulai operasinya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih memadai, berbagai perkembangan yang mendahului dirasa penting untuk diberikan sebagai latar belakang yang telah ikut membentuk *setting* arena. Pembahasan buku diakhiri pada tahun 2020 berdasarkan pada alasan praktis agar perkembangan mutakhir dalam kaitan dengan peran BI dalam dinamika perekonomian Kediri dapat diintegrasikan pula dalam uraian. Dalam konteks riset sejarah, penggunaan rentang waktu kajian yang panjang diyakini merupakan cara terbaik agar mampu menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai perekonomian kawasan Kediri dan peranan yang dimainkan Bank Indonesia Kediri, termasuk ketika masih beroperasi dengan nama DJB Agentschap Kediri sebagai cikal bakalnya. Seperti ditegaskan sejarawan terkemuka, Kuntowijoyo, lingkup kajian sejarah yang "memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang" memberi keleluasaan dalam menyajikan uraian terkait "proses dan perkembangan" yang merupakan esensi sejarah, dan hal ini sekaligus menjadi karakteristik yang membedakan sejarah dengan kajian ilmu-ilmu sosial lainnya.[16]

Buku yang mengangkat dinamika perekonomian kawasan Kediri dan peran DJB/Bank Indonesia Kediri ini merupakan salah satu dari seri publikasi sejarah dan *heritage* kantor perwakilan Bank Indonesia yang berjumlah 16 buah. Sebagai buku seri yang terbit dari proyek yang sama, terdapat pola umum yang berlaku pada seluruh seri terbitan, yakni memakai sudut pandang Bank Indonesia. Namun demikian, mengingat konteks lokalitas wilayah operasi yang berbeda dengan kekhasan dan keunikan masing-

15 M. Saichurrohman, *Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri*, Skripsi (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015), hlm. 5-6.

16 Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 1-18. Tentang kausalitas sejarah lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 5.

masing, gambaran sejarah yang dihasilkan berpotensi menghadirkan narasi yang kaya ragam dan warna lokal mengenai dinamika historis dan peran yang dimainkan Bank Indonesia. Keunikan dalam dinamika historis lokal dan peran Bank Indonesia di dalamnya diupayakan untuk ditampilkan dengan menggambarkan perkembangan Kediri sebelum dan sesudah pendirian Kantor De Javasche Bank/Bank Indonesia setempat. Dengan cara demikian, peran yang dimainkan DJB/BI melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya sebagai fasilitator dan dinamisator bagi pemerintah, pelaku ekonomi, dan berbagai pihak terkait dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kediri dapat dijelaskan secara lebih baik.

Dalam konteks seri buku sejarah dan *heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor De Javasche Bank/Bank Indonesia Kediri mempunyai kekhasan dan keunikan yang membuatnya penting dan menarik untuk dikaji. Dari segi lokasi geografisnya, DJB/BI Kediri berdiri di wilayah pedalaman, bukan daerah pesisir seperti De Javasche Bank/Bank Indonesia Surabaya, Semarang, Medan, Makassar atau Pontianak. Dari segi lokasi pendirian dan wilayah operasinya yang ada di pedalaman, De Javasche Bank/Bank Indonesia Kediri mempunyai kesamaan dengan cabang DJB/BI di Surakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Akan tetapi, tidak seperti DJB Yogyakarta atau Surakarta yang pendiriannya juga bermuatan politis untuk menegaskan eksistensi kekuasaan kolonial di kedua pusat kekuasaan Jawa, alasan ekonomi merupakan pertimbangan terpenting dan satu-satunya dalam pendirian Kantor DJB Agentschap Kediri. Alasan pendirian DJB Agentschap Kediri ini juga berbeda dengan DJB Agentschap Bandung yang pendiriannya juga dilandasi pertimbangan politik/pertahanan demi mengamankan aset DJB yang sangat vital bagi pemerintah Hindia Belanda dari ancaman-ancaman musuh dari luar.

Uraian yang tersaji dalam buku ini berusaha menampilkan sebuah sintesis unsur narasi dan unsur eksplanasi sejarah. Aspek narasi tetap dipentingkan di sini karena, seperti dikemukakan Taufik Abdullah, narasi merupakan ciri utama tulisan sejarah.[17] Namun demikian, narasi saja dipandang tidak memadai dalam konteks tren penulisan sejarah baru yang menghendaki kemampuan untuk menerangkan kejadian dan proses sejarah dengan mengungkap berbagai faktor kondisional, kausal, dan kontekstual yang

17 Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 316.

melingkupinya.[18] Dengan sintesis elemen narasi dan eksplanasi dalam uraian, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan memadai mengenai dinamika perekonomian wilayah Kediri dari masa kolonial hingga masa kontemporer. Hal ini juga dipandang penting karena karya-karya terdahulu yang telah dihasilkan, seperti dikemukakan di muka, masih sebatas memberikan gambaran fragmentaris atas masa lalu wilayah dan masyarakat Kediri terkait dengan bidang dan periode waktu tertentu.

Penyusunan buku ini menggunakan sumber sejarah dalam kategori primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan berasal dari koleksi arsip yang tersimpan di Bank Indonesia. Sumber yang digunakan dalam kategori ini meliputi antara lain koleksi *Vertrouwelijk Brieven* periode 1933-1949 berupa himpunan surat-menyurat/korespondensi antara DJB Agentschap Kediri dengan Pimpinan DJB di Batavia, *Laporan Pemimpin Tjabang Surabaya, Malang, Kediri, Djember pada Konperensi Para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat pada tgl. 25 Nopember 1963-30 Nopember 1963, Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965.* Sebagian sumber primer yang digunakan berupa arsip yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia, di antaranya dari Koleksi Algemeen Secretarie (No. 469, No. 471, No. 472, No. 473 dan No. 474), Koleksi Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959 (No. 436 dan No. 1067).

Sumber primer berupa terbitan koran dan majalah sezaman banyak diperoleh dari layanan penyedia data online yang diakses melalui www.delpher.nl/nl/kranten. Koleksi foto sezaman diperoleh dari koleksi KITLV dan Tropenmuseum yang dikumpulkan secara daring. Arsip berupa majalah dan koran sezaman juga berasal dari koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, misalnya laporan tahunan dari Kedirische Landbouw Vereeniging tahun 1896 hingga 1899 dan *Kedirische Courant*. Sebagian sumber lainnya yang dirujuk berupa terbitan naskah sumber sejarah yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan *Memori Serah Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan Tanah Kerajaan* yang diterbitkan Arsip Nasional Republik Indonesia (1978). Sumber

18 Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 1-18. Tentang kausalitas sejarah lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 93-102.

sekunder yang digunakan mencakup buku dan artikel yang diperoleh dari berbagai instansi seperti Perpustakaan Bank Indonesia Institute, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.

Buku ini tersusun atas tujuh bab, selain prolog dan epilog. Bab 1 menguraikan kondisi geo-strategis, masyarakat, integrasi politik kolonial, dan perkembangan kehidupan ekonomi kawasan Kediri sebelum kehadiran De Javasche Bank Agentschap Kediri. Bab ini menjadi pijakan bagi uraian bab-bab selanjutnya. Bab 2 menguraikan pendirian De Javasche Bank Agentschap Kediri, perkembangan perekonomian dan masyarakat Kediri sejak pendirian DJB Kediri pada tahun 1924 hingga runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda. Selain menguraikan perkembangan perekonomian Kediri pada masa kejayaan perkebunan 1920-an dan masa depresi ekonomi 1930-an, peranan DJB Kediri dalam mengawal perekonomian termasuk ketika terjadi guncangan krisis ekonomi 1930-an. Bab 3 menguraikan proses transisi kekuasaan yang terjadi di wilayah Kediri dan implikasinya dalam konteks perbankan dan dinamika perekonomian secara umum di wilayah ini. Selanjutnya Bab 4 membahas proses institusionalisasi Bank Indonesia dan peran yang dimainkan Bank Indonesia melalui agensinya di Kediri dalam proses rekonstruksi perekonomian wilayah Kediri pascaperang revolusi hingga, implementasi ekonomi terpimpin, hingga masa transisi pada masa Orde Baru. Bab 5 memuat bahasan tentang perkembangan ekonomi Orde Baru dengan mengangkat pengalaman wilayah Kediri pada era pembangunan sebagai fokus dan peran yang dimainkan Bank Indonesia dalam pembangunan perekonomian dan masyarakat Kediri. Pada Bab 6 disajikan uraian tentang aktivitas dan peran yang dimainkan Bank Indonesia Kediri melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya dalam mengawal perkembangan perekonomian wilayah Kediri masa Reformasi. Pada Bab 7 secara khusus uraian diarahkan pada pembahasan tentang *heritage* Kantor eks DJB Kediri menyangkut tata kota, gaya arsitektur, pemanfaatan, dan pelestarian gedung eks DJB Kediri. Bagian Epilog sebagai penutup pembahasan buku memuat kesimpulan dan refleksi singkat atas seluruh pembahasan.

BAB 1
Pembentukan Panggung Pedalaman

Wilayah Kediri telah hadir secara menonjol dalam panggung sejarah sejak masa pra-kolonial. Kedudukannya sangat penting ketika menjadi pusat kekuasaan politik pada masa Kerajaan Kediri. Pasang surut kerajaan-kerajaan besar yang berpusat di Jawa dari Singhasari, Majapahit hingga Mataram menempatkan Kediri dalam bayang-bayang hegemoni kekuasaan lain, tetapi Dinasti politik Kediri beberapa kali menyeruak kembali dan menggoncang kemapanan ketika pusat-pusat politik utama tengah digerogoti ancaman disintegrasi.[1] Pengintegrasian Kediri ke dalam wilayah kekuasaan Belanda sejak 1830 membuat perkembangan kawasan Kediri dipengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan kolonial baik menyangkut soal pengadministrasian wilayah maupun kebijakan ekonomi-politik yang dijalankan untuk meraup keuntungan.

Bab ini secara khusus akan menggambarkan kondisi geostrategis, masyarakat, integrasi politik kolonial, dan perkembangan kehidupan ekonomi kawasan Kediri sebelum kehadiran De Javasche Bank Agentschap Kediri (selanjutnya DJB Kediri). Pemaparan ini dimaksudkan sebagai panggung yang nantinya menjadi arena bagi DJB Kediri dalam memainkan perannya, bersama dengan otoritas pemerintahan, para pelaku ekonomi, dan kelompok masyarakat lainnya dalam mewujudkan impian tentang kemakmuran. Perkembangan sosio-ekonomis yang telah terjadi sebelum DJB juga penting sebagai pijakan untuk memahami secara

1 Aminuddin Kasdi. "Rona-Rona Sejarah dari Lembah Brantas Masa Kolonial (Abad XIX) dari Kediri" dalam Restu Gunawan (ed), Sungai sebagai Pusat Peradaban (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, 2008), hlm. 18-20.

baik bagaimana kehadiran dan peran DJB Kediri membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial-ekonomi dan masyarakat wilayah Kediri. Dalam bab ini diargumentasikan bahwa sebelum pendirian DJB Kediri, bermodalkan potensi dan keunggulan geostrategis yang dimiliki dan pengintegrasiannnya ke dalam wilayah kekuasaan kolonial Belanda, Kediri telah menjadi wilayah yang dinamis secara sosio-ekonomis sehingga kehadiran DJB secara lebih dekat di kawasan ini menjadi kebutuhan dan faktor yang dipandang penting untuk menjamin kesinambungan dan akselerasi perkembangan perekonomian dan masyarakat Kediri.

GEOSTRATEGIS KEDIRI

Kediri merupakan "Harta karun Jawa".[2] Anggapan demikian berkembang dari kekaguman akan peran historis dan strategis kawasan ini yang begitu penting sejak masa pra-kolonial. Pada masa kolonial Belanda, Kediri merupakan wilayah di Jawa Timur yang saat menjelang pendirian DJB Agentschap Kediri, mempunyai status administratif sebagai sebuah keresidenan. Secara geografis, Keresidenan Kediri merupakan kawasan pedalaman yang dikelilingi oleh deretan kompleks pegunungan, yang sering dijadikan penanda batas wilayah administratif. Di Kediri bagian selatan membentang dari barat ke timur pegunungan kapur selatan yang membentenginya dari Samudra Hindia. Gunung Wilis (2.563 M) menjulang tinggi di bagian barat Kediri yang menjadi pembatas dengan Keresidenan Madiun. Di bagian timur Kediri menjulang Gunung Kelud (1.731 M), yang memisahkannya dari Keresidenan Malang. Sementara itu, di bagian utara berjajar kompleks Pegunungan Kendeng, yang menjadi pemisah Keresidenan Kediri dengan Keresidenan Bojonegoro.[3]

Kedua kompleks pegunungan yang mengapit wilayah Kediri di sebelah barat dan sebelah timur mempunyai karakteristik berbeda, yakni

2 I Ketut Ardhana, I Ketut Setiawan, Sulanjari, *Religi, Ritual, dan Sistem Kerajaan di Jawa Timur Berdasarkan Tinggalan Arkeologi dan Kesejarahan Masa Raja Erlangga, Laporan Penelitian (*Denpasar: Pusat Kajian Bali Universitas Udayana, 2016), hlm. 80.

3 Sudarno, *Sejarah Pemerintahan Militer dan Pamong Praja di Jawa Timur 1945-1950* (Jakarta: Balai Pustaka 1993), hlm. 86.

Gunung Kelud di sebelah timur yang masih terus aktif bersifat vulkanik, sedangkan Gunung Wilis di sebelah barat Kediri mempunyai sifat non-vulkanik. Geomorfologis wilayah Kediri secara detail terdiri atas 16 jenis bentuk lahan. Sebagian besar (60 persen) bentuk lahan merupakan dataran fluvio-vulkanik yang terbentuk oleh lahar sebagai campuran antara bahan piroklastik dengan air, sedangkan bagian terkecil bentuk lahan berupa perbukitan vulkanik seluas 92 hektar (0,06 persen). Bentuk lahan lainnya yang cukup mencolok persentasenya (antara 8-12 persen) berupa lereng atas dan lereng bawah kompleks Pegunungan Wilis, disusul lereng bawah dan tengah kompleks Gunung Kelud dan Wilis dengan kisaran antara 2 hingga 3 persen, serta lembah sungai dan lembah sungai vulkanik.[4]

Sungai Brantas merupakan komponen ekologis penting dalam lanskap lingkungan dan geostrategis wilayah Kediri. Sungai ini memisahkan wilayah Kediri menjadi dua bagian utama, yakni wilayah sebelah timur dan sebelah barat Sungai Brantas. Wilayah sebelah barat Sungai Brantas merupakan dataran tinggi yang termasuk kawasan lereng Bukit Klotok (472 m) dan Bukit Maskumambang (300 m) sebagai bagian dari kompleks perbukitan dengan puncak Gunung Wilis, dan secara administratif menjadi bagian Distrik Mojoroto. Sementara itu, wilayah timur Sungai Brantas adalah dataran rendah yang secara administratif termasuk Distrik Kediri.[5] Keberadaan Sungai Brantas telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberuntungan dan sekaligus kemalangan yang dialami banyak generasi kaum petani Kediri dan bagian lain Jawa Timur yang mengusahakan pertanian sawah di sepanjang daerah alirannya sejak berabad-abad silam.[6]

---

4 Ardli Swardana, Boedi Tjahjono, Baba Barus, *Studi GeomorRologi Kabupaten Kediri dan Pemetaan Bahaya dan resiko Aliran Lahar Gunungapi Kelud*, *Bulettin Tanah dan Lahan,* Vol. 1, No. 1 Tahun 2017, hlm. 11.

5 Muhamad Faizin, *Dinamika Industri Pabrik Gula Meritjan di Kediri Tahun 1930-1945*, *Skripsi* (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, 2016), hlm. 42.

6 N.C. van Setten van der Meer, *Sawah Cultivation in Ancient Java: Aspects of Development during the Indo-Javanese Period, 5th to 15th Century* (Canberra: Orintal Monograph Series No. 22, Faculty of Asian Studies, The Australian National University, 1979), hlm. 17.

Gambar 1.1. Sungai Brantas di Kediri saat banjir dengan Jembatan Sepanjang 160 Meter di atasnya Tahun 1915
Sumber: Koleksi KITLV 154777

Topografi wilayah Kediri yang terbentuk atas dataran rendah dan lahan perbukitan berpengaruh terhadap curah hujan yang didapat wilayah ini. Curah hujan yang diterima Kediri termasuk cukup tinggi. Rata-rata curah hujan yang diterima sekitar 1.652 mm per hari dan variasi suhu udara berkisar antara 23-34 derajat Celcius. Selain Sungai Brantas, wilayah Kediri juga dialiri sejumlah sungai yang mempunyai debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun, yakni Sungai Konto, Sungai Bakung, Sungai Kolokoso, Sungai Kulo Turitunggorono, Sungai Bangi, dan Sungai Sedayu. Sebagian sungai lainnya berupa sungai musiman, artinya hanya mengalirkan air pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau sungai-sungai ini mengering.[7]

Peran geostrategis yang dimiliki Kediri tidak terpisah dari kondisi ekologis kawasan ini yang memberikan daya dukung yang kokoh bagi kelangsungan hidup penduduk yang mendiaminya. Kediri mempunyai kesuburan tanah yang tinggi dan suplai irigasi yang terjamin. Kesuburan tanahnya dihasilkan oleh guyuran dan endapan material vulkanik yang

7 Aulia Ishmata, *Penggunaan Citra Tandem-X untuk Studi Potensi Genangan Dengan Prakiraan Debit Sungai Menggunakan Metode Rasional*, *Skripsi* (Surabaya: Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016), hlm. 6.

dilontarkan melalui erupsi gunung berapi terutama Gunung Kelud yang terkenal masih sangat aktif. Setidaknya 30 letusan utama tercatat dalam sejarah Gunung Kelud dan dalam dua dekade pertama abad ke-20 tercatat dua letusan besar Gunung Kelud, yakni terjadi pada tahun 1901 dan 1919.[8]

Wilayah Kediri termasuk yang banyak mendapatkan guyuran material vulkanis Gunung Kelud saat erupsi karena berdekatan dengan gunung ini. Pada letusan 1901, misalnya, penyebaran debu vulkanis menjangkau ke arah barat hingga Bogor dan Sukabumi.[9] Terlepas dari kehancuran instan yang ditimbulkan tatkala bencana erupsi besar terjadi, material vulkanik yang dilontarkan juga memberi manfaat dalam peremajaan kembali kesuburan tanah di wilayah Kediri. Seperti ditegaskan Whitten, Soeriaatmadja, dan Affif, formasi kawasan subur di banyak tempat di Jawa mendapat kontribusi besar dari keberadaan gunung-gunung berapi yang melontarkan material vulkanis berupa debu, lahar, dan aliran lumpur yang kaya bahan mineral penyubur tanah.[10]

Selain bahan-bahan vulkanik, Sungai Brantas yang membelah wilayah Kediri menjadi bagian barat dan bagian timur sungai juga menjadi faktor penting yang membentuk kesuburan tanah wilayah Kediri. Kontribusi penting Sungai Brantas bahkan bukan hanya untuk wilayah Kediri saja, melainkan juga beberapa daerah lain di Jawa Timur. Sungai Brantas bermula dari mata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) di lereng Gunung Arjuna. Aliran Sungai Brantas dalam perjalanan menuju hilir di perairan Selat Madura digabungi sejumlah sungai kecil di wilayah yang dilintasinya dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, hingga Mojokerto dan dari sini bercabang dua menjadi Kali Mas yang melintasi Kota Surabaya dan Kali Porong yang melewati Sidoarjo. Daerah aliran sungai (DAS) mencakup kawasan seluas 11.800 km² atau 1/4 dari

8 Nawiyanto dan Nurhadi Sasmita, *The Eruption of Mount Kelud in 1919: Its Impact and Mitigation Efforts*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (ASSEHR), Volume 208 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018), hlm. 127.

9 Fukashi Maeno dan Setsuya Nakada, *et al., Eruption Pattern and a Long-Term Magma Discharge Rate over the Past 100 Years at Kelud Volcano, Indonesia*, *Journal of Disaster Research*, Vol.14 No.1, 2019, hlm. 28.

10 Tony Whitten, Roehayat Emon Soeriaatmadja, Soeraya Afiff, *The Ecology of Java and Bali* (Singapore: Periplus, 2000), hlm. 95-96.

wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang Sungai Brantas mencapai 320 km, mengalir mengitari Gunung Kelud.[11]

Kedudukan Kediri yang strategis semakin diperkuat dengan perkembangan infrastruktur transportasi baik yang menghubungkan berbagai tempat di Kediri maupun menghubungkan daerah ini dengan kota-kota lain di Jawa dan dunia luar. Infrastruktur transportasi di wilayah Kediri bertumpu pada jalan raya dan sungai. Pada masa Kerajaan Kadiri pembuatan perahu dan penggunaan lalu lintas sungai dikontrol oleh pemerintah pusat.[12] Dinamika politik yang terjadi dalam wujud kedatangan pasukan penakluk dari luar maupun pengiriman ekspedisi militer keluar Kediri secara implisit mengindikasikan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang menghubungkan Kediri dengan luar sudah ada untuk lalu lintas orang dan barang. Pergerakan militer Trunajaya dari Istana Mataram di Plered ke Kediri dengan pasukan besar dan harta rampasan yang banyak, serta beberapa waktu kemudian pengiriman ekspedisi militer gabungan Kompeni dan Mataram untuk menundukkan perlawanan Trunajaya pada tahun 1677,[13] tidak mungkin berlangsung tanpa keberadaan infrastruktur transportasi yang menghubungkan menuju ke Keraton Kediri dengan daerah lain. Dalam bukunya, *The History of Java,* Raffles menyebutkan bahwa dalam ekspedisi militer untuk menumpas perlawanan Trunajaya, gabungan pasukan Mataram dan Kompeni bergerak melalui jalur berbeda. Pasukan Kompeni dimobilisasi melalui jalur laut menuju Surabaya, sedangkan ekspedisi pasukan Mataram bersama Susuhunan bergerak ke Kediri melalui jalur darat.[14]

Setelah dilepas Susuhunan Surakarta dan menjadi wilayah kekuasaan kolonial, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan perbaikan infrastruktur transportasi. Jalan pos rute selatan yang melintasi Kediri menuju kearah Surakarta dan Yogyakarta mulai dibangun pada

11 Widyo Parwanto, "Kali Brantas dan Bencana Alam", dalam Restu Gunawan (ed). *Sungai sebagai Pusat Peradaban: Prosiding Seminar Perubahan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, 2008), hlm. 175-176

12 Edi Sedyawati, "The State Formation of Kadiri", dalam G.J. Schutte (ed), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 13.

13 Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya, Vol 2: Jaringan Asia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 80.

14 Thomas Stamford Raffles, *op.cit.,* hlm. 522.

tahun 1854 dan memakan waktu lebih dari 20 tahun. Terhubungnya Kediri dalam rute jalan pos selatan menempatkannya sebagai salah satu kota yang dikunjungi konvoi mobil yang digelar importir mobil Vervey & Lugard pada tahun 1907 ketika menjajal kelayakan jalan trans Jawa.[15] Sementara itu, hubungan antara Kediri bagian barat dan bagian timur yang dibelah oleh Sungai Brantas diperkokoh dengan pembangunan jembatan dengan konstruksi besi di atas pancang bersekrup. Jembatan ini dirancang oleh Sytze Westerbaan Muurling, dibuka secara resmi untuk umum pada tanggal 18 Maret 1869. Bangunan jembatan ini dianggap istimewa karena merupakan jembatan dengan konstruksi besi pertama di Jawa, bahkan disebut sebagai salah satu adikarya keteknikan kolonial pada zamannya.[16]

Gambar 1.2. Jembatan Besi di atas Sungai Brantas di Kediri
Koleksi KITLV 27713

Konektivitas Kediri dengan daerah lain diperkuat dengan hadirnya transportasi berbasis jaringan rel yang melayani pengangkutan produk-produk perdagangan dan lalu lintas penumpang. Kediri telah

15 Oliver Johannes Raap, *Kota di Jawa Tempo Doeloe* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), hlm. 171.

16 *Ibid*, hlm. 221.

dihubungkan dengan jaringan rel menuju Kota Pelabuhan Surabaya pada 1883, dan jaringan kereta api ini dari Kediri berlanjut ke selatan menuju Blitar hingga Tulungagung. Pembukaan jaringan transportasi kereta api ini memberi alternatif pilihan yang lebih beragam untuk mobilitas barang dan penumpang, selain dengan moda transportasi sungai dan jalan darat. Transportasi kereta api memungkinkan pengangkutan barang dan penumpang dalam volume yang lebih besar, serta dalam waktu yang lebih cepat. Namun demikian, transportasi perahu dengan layanan pulang-pergi lewat Sungai Brantas antara Tulungagung, Kediri, dan Surabaya tidak serta merta menghilang, tetapi tetap bertahan. Residen Kediri pada tahun 1891 menyebutkan bahwa moda transportasi sungai masih banyak digemari penduduk karena biayanya lebih murah dibanding kereta api, meskipun perjalanan memakan waktu lebih lama. Pelayaran sungai ini dilakukan dengan menggunakan jenis perahu *compreng.*[17] Data foto Jembatan Brantas sekitar tahun 1900 yang dimuat dalam publikasi Raap (2017) memperlihatkan tamengan kayu pada pancang-pancang kaki jembatan untuk melindungi konstruksi dari kemungkinan kerusakan akibat tertabrak oleh perahu-perahu yang hilir mudik melintasi jalur sungai di bawah jembatan. [18]

Selain jaringan kereta api pemerintah, konektivitas Kediri juga diperkuat melalui jaringan trem. Kediri dihubungkan dengan Jombang melalui jaringan trem sepanjang 191 kilometer yang dibangun pada 1897-1900. Jaringan transportasi berbasis rel ini dioperasikan oleh sebuah perusahaan swasta bernama Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), yang dibentuk pada tahun 1895 dengan modal pendirian sebesar ƒ1.800.000. Modal ini diinvestasikan untuk membangun jaringan rel yang menghubungkan Kediri-Pare-Jombang sepanjang 123 kilometer dengan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan, termasuk di antaranya adalah halte-halte pemberhentian. Pembangunan diawali pada 1 Januari 1898 dengan jalur rel rute Jombang SS-Jombang Kota sejauh 22 km, dilanjutkan rute Jombang Kota-Jombang Pasar, yang kemudian diteruskan

17 Indriyanto, *Menjadi Pusat Pelayaran dan Perdagangan Interregional: Pelabuhan Surabaya 1900-1940*, *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 95; Indriyanto, "Sungai Brantas dalam Konteks Transportasi Antara DAS Brantas dan Pelabuhan Surabaya Dalam Kajian Historis", dalam Restu gunawan (ed), *Sungai sebagai Pusat Peradaban* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, 2008), hlm. 86-87.

18 Olivier Johannes Raap, *op.cit.,* hlm. 221.

dengan lintasan rel yang menghubungkan Jombang SS dengan Stasiun Kediri KSM sepanjang 49,5 km.[19] Rute Jombang SS-Jombang Kota dibuka pada tanggal 1 Juni 1898, sedangkan rute Jombang Kota-Jombang Pasar dibuka pada 13 Juli 1899. Rute ini dalam perkembangannya dialihkan pengelolaannya dari KSM pada Staatsspoorwegen (SS) Oosterlijnen milik pemerintah pada tahun 1918.[20]

Di dalam wilayah Kediri sendiri, jalur transportasi trem juga berlangsung pembangunannya. Jalur trem sepanjang 13,5 km dibangun untuk menghubungkan Distrik Pare yang menjadi kantor pusat KSM dengan Papar. Dari Pare dibangun pula lintasan trem menuju ke arah Kepung sepanjang 11,7 km, yang dibuka pada 30 Agustus 1898. Lintasan rel yang menghubungkan Pare-Kandangan melewati Kencong sepanjang 8,7 km dibuka pada tanggal 12 Mei 1899. Selain itu, pada waktu yang sama KSM juga menggarap lintasan rel sejauh 12,9 km yang menghubungkan Pulorejo-Ngoro-Kandangan, ditambah dengan jalur yang menghubungkan Gurah dengan Kawarasan via Brenggolo sepanjang 9,4 km dan dibuka pada 1 Januari 1899. Jalur rel terakhir di dalam wilayah Kediri dibangun untuk menghubungkan Brenggolo-Plosoklaten. Lintasan ini dibuka secara resmi pada tanggal 15 Januari 1900.[21] KSM melayani 7 trayek perjalanan yakni Pare-Papar, Pare-Konto, Pulorejo-Kandangan, Gurah-Kawarasan, dan Kediri-Wates. Untuk tujuan ini, KSM mengoperasikan masing-masing trayek dengan 5 kereta. Sementera itu, konektivitas Kediri-Pare dan Jombang ditopang dengan pengoperasian sebanyak 5 kereta ekspres dan 3 kereta regular. Setiap hari tidak kurang dari 76 kereta beroperasi bolak-balik melayani trayek perjalanan yang dimiliki KSM.[22]

Geostrategis wilayah Kediri yang menguntungkan membuat wilayah ini memperlihatkan perkembangan yang begitu dinamis secara sosiologis, politis, dan ekonomis. Aspek-aspek ini akan diuraikan lebih jauh pada bagian berikut.

---

19 Hafid Rofi Pradana, *Perkembangan Kediri Stoomtram Maatschappij pada Tahun 1895-1930*, *Avatara,* Vol. 6, No. 2 Tahun 2018, hlm. 210.

20 Tim Telaga Bakti Nusantara, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1997), hlm.164.

21 Hafid Rofi Pradana, *op.cit.*, hlm.210-211.

22 *Ibid.*, hlm.209-210.

MASYARAKAT KAWASAN KEDIRI

Kediri merupakan wilayah pemukiman kuno dan keberadaan masyarakat Kediri sudah tercatat dalam rekaman sejarah prakolonial. Menjelang pendirian De Javasche Bank (DJB) Agentschap Kediri pada tahun 1923, masyarakat Keresidenan Kediri telah menampilkan warna kemajemukan yang kuat. Beragam kelompok etnis/rasial bermukim di kawasan ini, yang dalam data sensus kolonial pada tahun 1920 dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yakni kelompok Eropa, kelompok Timur Asing, dan kelompok bumiputera. Masing-masing kelompok meliputi orang dengan latar belakang kewargaan atau etnis yang berbeda-beda pula. Pembentukan kemajemukan masyarakat Kediri berlangsung melalui perjalanan yang panjang dan warnanya semakin mencolok seiring dengan pertumbuhan populasi. Masing-masing kelompok terbentuk dalam kurun waktu yang berbeda dan melalui proses dan tumbuh dengan laju pertumbuhan yang berbeda pula.

Sejak pengembangan perkebunan tanam paksa hingga menjelang pendirian DJB, penduduk Keresidenan Besuki terus tumbuh. Total penduduk Keresidenan Kediri pada tahun 1890 dilaporkan sebesar 1.109.292 jiwa.[23] Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1920, penduduk Keresidenan Kediri bertambah menjadi 2.011.993 jiwa atau dalam kurun waktu tiga puluh tahun penduduknya tumbuh hampir dua kali lipat. Komposisi penduduk Keresidenan Kediri pada tahun 1920 secara rinci disebutkan terdiri atas 4.633 orang Eropa, 16.822 orang Timur Asing, dan 1.990.388 orang bumiputera.[24] Penyebaran penduduk Keresidenan Besuki pada tahun 1920 menurut wilayah *afdeeling* dapat dilihat pada Tabel 1.1. Di *Afdeeling* Kediri jumlah orang Eropa mencapai angka 2.183 orang. Jumlah ini merupakan populasi Eropa yang paling besar di antara semua *afdeeling* yang menjadi wilayah Keresidenan Kediri. Di *Afdeeling* Blitar jumlah orang Eropa adalah sebesar 1.368 jiwa,

23 Hans Gooszen, *A Demographic History of the Indonesian Archipelago 1880-1942* (Leiden: KiTLV Press, 1999), hlm. 119-120.

24 Nederlandsch-Indie, *Uitkomsten der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling, Deel II* (Batavia: Drukkerijen Ryugrok & Co, 1922), hlm. 119.

sedangkan di *Afdeeling* Tulungagung terdapat 559 orang Eropa, dan di *Afdeeling* Berbek jumlah orang Eropa mencapai 523 jiwa.[25]

Tabel 1.1.
Komposisi Penduduk Keresidenan Kediri Tahun 1920

Afdeeling	Eropa	Bumiputera	Orang-orang timur asing		
			Tionghoa	Arab	Timur Asing lainnya
Kediri	2.183	571.086	6.523	21	26
Tulungagung	559	579.803	3.235	22	5
Berbek	523	387.345	3.388	4	9
Blitar	1.368	452.304	3.569	8	12
Jumlah	**4.633**	**1.990.538**	**16.715**	**55**	**52**

Sumber: Nederlandsch-Indie, *Uitkomsten der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling, Deel II* (Batavia: Drukkerijen Ryugrok & Co, 1922), hlm. 112-113.

Secara lebih terperinci, hasil sensus penduduk tahun 1920 menggambarkan keragaman pada masing-masing kelompok. Kelompok Eropa di Keresidenan Kediri juga cukup beragam latar kewargaannya. Mayoritas kelompok ini adalah orang-orang Belanda yang berjumlah sebanyak 4.356 jiwa, disusul 40 orang berkewargaan Jerman, 53 orang berkewargaan Armenia, 10 orang berkewargaan Inggris, 16 orang berkewargaan Perancis, sejumlah kecil orang Eropa lainnya berkewargaan Swedia, Belgia, Denmark, dan Spanyol. Sementara itu, sebagian besar orang Timur Asing adalah orang Tionghoa (16.715 orang) dan sebagian kecil lainnya terdapat pula orang Jepang (139 orang) dan orang Arab.[26] Kelompok penduduk bumiputera yang bermukim di *Afdeeling* Kediri juga mempunyai latar belakang etnis yang cukup beragam. Mayoritas tentu saja orang Jawa, tetapi terdapat pula 3.121 orang Madura, 522 orang Sunda, 483 orang Ambon, 106 orang Minahasa, 64 orang Bawean, 28 orang Palembang, 10 orang Timor dan sejumlah kecil orang dengan latar belakang etnis lain yang mendiami Kepulauan Nusantara.[27]

25 *Ibid.*, hlm. 112-113.

26 *Ibid.*, hlm. 129.

27 *Ibid.*, hlm. 132-133.

Di antara ketiga elemen utama yang menyusun kemajemukan masyarakatnya, kelompok Eropa adalah yang paling akhir muncul di wilayah ini. Pada saat pemerintah Inggris di Jawa (1811-1816) tidak ada laporan mengenai keberadaan kelompok Eropa di Kediri. Kelompok orang Eropa di Jawa Timur baru terdapat di wilayah pesisir saja yakni Gresik (213 orang) dan Pasuruan (321 orang).[28] Kelompok orang Eropa diperkirakan baru mulai muncul di Kediri setelah wilayah ini, bersama beberapa kabupaten mancanegara timur lainnya dari teritori Mataram, dilepaskan Susuhunan Surakarta kepada pemerintah Belanda pada 1830[29] dan terutama sejak pelibatan wilayah Kediri dalam penanaman wajib di bawah sistem tanam paksa yang diperkenalkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.

Penduduk kelompok Eropa terdiri dari para pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan barat yang menjalankan usaha di Keresidenan Kediri dengan keluarga mereka. Pada tahun 1905 penduduk Eropa di Keresidenan Kediri diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang.[30] Jumlah orang-orang Eropa terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi dan instansi pemerintahan kolonial yang mempekerjakan mereka. Meskipun jumlah kelompok Eropa relatif sedikit dibanding kelompok penduduk lainnya, tetapi dalam konteks masyarakat kolonial kelompok Eropa mempunyai kedudukan dan pengaruh paling kuat. Kelompok ini menentukan kebijakan-kebijakan kolonial dan implementasinya sebagai pemegang tampuk kekuasaan politik maupun ekonomi wilayah jajahan.

Berbeda dengan kelompok Eropa yang bisa dikatakan baru hadir di Kediri pada abad ke-19, kedatangan orang-orang Tionghoa di Kediri telah berlangsung jauh lebih awal. Sulit untuk memastikan secara tepat kedatangan pertama kali orang Tionghoa di kawasan Kediri. Kediri menjelang berdirinya Majapahit sudah didatangi pasukan Mongolia ketika daratan Cina dikuasai Kekaisaran Mongolia. Peningkatan jumlah orang Tionghoa berlangsung seiring dengan perkembangan ekonomi

28 Thomas Stamford Raffles, *The History of Java* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008), hlm. 36-37.

29 Aminuddin Kasdi, *op.cit.,* hlm. 28.

30 J. Paulus, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1923), vol. 1, hlm. 291.

di wilayah Kediri. Pada tahun 1870-an kelompok Tionghoa di Kediri dilaporkan memiliki seorang kapiten (kepala) bernama Tan Kok Tong, yang menguasai perdagangan candu setempat selama bertahun-tahun. Tan juga dikenal sebagai salah satu orang Tionghoa terkaya di Jawa dan mempunyai hubungan dengan TeMechelen, dari Satuan Khusus Anti Penyelundupan Candu dan Residen Kediri.[31]

Meskipun tidak terdapat informasi tentang jumlah komunitas Tionghoa di Kediri sebelum tahun 1900, diperkirakan jumlah populasi mereka sudah jauh lebih banyak dibanding jumlah populasi orang Eropa. Selain Tan, ada beberapa orang Tionghoa seperti Kwee Swie Toan yang menjalankan bisnis toko penjualan candu.[32] Tokoh Tionghoa lainnya di Keresidenan Kediri adalah Han Liong In, seorang letnan Tionghoa dari Berbek, yang juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan Tan Kok Tong. Han Liong In adalah pemimpin "Kongsi Kediri" yang menguasai perdagangan candu di wilayah Cirebon, Tegal, Pekalongan, Rembang, dan Jepara.[33]

Mayoritas masyarakat Kediri berasal dari kelompok Jawa. Elemen penduduk berlatar belakang etnis Madura terbentuk melalui proses yang lebih panjang. Kehadiran etnik Madura di Kediri sebagian akarnya terkait dengan kehadiran Pangeran Madura, Trunajaya dengan para pengikutnya, yang membangun kekuasaan di Kediri pada era Mataram seperti telah dikemukakan di depan. Proses menguatnya kelompok Madura dalam komposisi masyarakat Kediri bersambung pada periode selanjutnya terutama ketika berlangsung pembukaan perkebunan kolonial di wilayah Keresidenan Kediri. Orang-orang Madura merupakan kelompok etnik yang mempunyai orientasi kuat untuk bermigrasi ke tempat lain sehingga pada dekade ketiga awal abad ke-20 jumlah populasi orang Madura yang bermukim di Jawa sudah lebih besar ketimbang orang-orang Madura yang bermukim di Pulau Madura sendiri.[34]

---

31 James R. Rush, *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Interprises in Colonial Indonesia 1860-1910* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 47.

32 *Ibid.,* hlm. 51.

33 *Ibid.,* hlm. 96.

34 Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura 1850-1940* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), hlm. 82.

Kawasan Jawa Timur memang merupakan tempat tujuan favorit untuk migrasi bagi orang-orang Madura. Selain faktor kedekatan secara geografis dari segi jarak dengan Pulau Madura, perkembangan sektor perkebunan kolonial menjadi magnet penarik bagi orang-orang Madura bermigrasi mengadu untung untuk mendapatkan lapangan pekerjaan demi penghidupan yang lebih baik dibanding di daerah asalnya yang kering dan tandus. Laporan tentang imigrasi dan emigrasi pada periode 1880-1905 memperlihatkan adanya imigrasi orang Madura ke Keresidenan Kediri, selain imigrasi orang-orang dari daerah Madiun di sebelah baratnya, serta dari Rembang dan Semarang di Jawa Tengah.[35] Di Keresidenan Kediri, dan beberapa keresidenan lain di Jawa Timur khususnya Besuki, Pasuruan dan Malang, daya tarik utama bagi kaum imigran untuk terus datang adalah lapangan kerja di sektor perkebunan dan prospek untuk pengembangan lahan pribadi yang masih terbuka lebar.[36]

Kehadiran kelompok-kelompok lain yang menyusun komposisi populasi dan masyarakat Keresidenan Kediri sulit untuk digambarkan asal-usul serta proses perkembangannya secara kronologis karena keterbatasan informasi sejarah yang tersedia. Kehadiran orang Arab di Kediri diperkirakan berkaitan dengan kegiatan syiar agama dan perdagangan. Penyebaran pengaruh Islam dalam masyarakat Kediri yang dimulai sejak penaklukan kekuasaan Hindu Kadhiri karena serangan tentara Demak ketiga di bawah pimpinan Sunan Kudus pada tahun 1524.[37] Kehadiran orang Timur Asing lainnya di Kediri, terutama orang Jepang, terkait dengan berkembangnya kegiatan perdagangan yang dilakukan komunitas Jepang di Jawa. Perkembangan kegiatan mereka merupakan bagian dari tren besar pertumbuhan perdagangan orang-orang Jepang di Indonesia yang mulai berlangsung sejak akhir dekade 1860-an dan terus menguat pada masa berikutnya.[38]

35 Hans Gooszen, *op.cit.,* hlm. 119-120.

36 Hans Gooszen, *op.cit.,* hlm. 67.

37 Bapersip Jawa Timur, "Pusaka Jawatimuran: Masjid Auliya'Setono Gedong, Kota Kediri" (https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id, diakses 12 Januari 2022).

38 "Tentang perkembangan perdagangan Jepang dan elemen-elemennya", lihat Peter Post, *Japanse Bedrijvigheid in Indonesie 1868-1942: Structurele Elementen van Japan's Economische Expansie in Zuidoost Azie*", *Disertasi* (Amsterdam: Vrije Universiteit, 1992).

Keresidenan Kediri yang subur dan menghasilkan banyak hasil bumi disinyalir juga telah menjadi lokasi usaha yang dijalankan orang-orang Jepang dalam bidang jual-beli produk pertanian dan penggilingan padi, seperti dijumpai di bagian selatan Keresidenan Kediri, yakni daerah Ngunut di *Afdeeling* Tulungagung.[39] Salah satu orang Jepang yang bekerja dalam perdagangan hasil bumi di Kediri yang kemudian kembali ke Jawa dan bekerja dengan status sipil pada pemerintahan militer Jepang yang mendapat penempatan di wilayah Semarang diketahui bernama Seino Otomatsu.[40] Pada masa krisis ekonomi disebutkan di Distrik Pare terdapat 3 toko Jepang yang menjual barang barang murah buatan Jepang.[41]

Sementara itu, kehadiran orang Minahasa dan orang Ambon di Kediri merupakan bagian dari perkembangan perkebunan dan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah ini. Perkembangan sektor perkebunan memerlukan pekerja terdidik untuk menangani berbagai pekerjaan administrasi pada perusahaan-perusahaan Eropa. Seperti ditunjukkan dalam kajian Henley (1996), dibanding kelompok etnik lain di Hindia Belanda, orang Minahasa telah mengenyam pendidikan barat jauh lebih awal sehingga tingkat literasi mereka juga jauh lebih tinggi. Ketika proporsi tingkat literasi masyarakat Jawa sebagai pusat kekuasaan kolonial baru sebesar 5,48 persen pada 1930, proporsi tingkat literasi kelompok Minahasa telah mencapai 38,97 persen. Dengan kualifikasi pendidikan barat yang mereka miliki, pada 1866 telah ada orang-orang Minahasa yang menjadi pengawas penanaman wajib di Jawa dan perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa telah merekrut mereka sebagai juru tulis dan pengawas. Orang-orang Minahasa digambarkan telah hadir di mana-mana dalam teritori kekuasaan Kolonial Hindia Belanda, mengisi beragam pekerjaan yang memerlukan kualifikasi pendidikan barat, seperti kontroler, polisi, juru tulis, dan guru.[42] Sementara itu, kehadiran orang-orang Ambon di Kediri kemungkinan besar terkait dengan pekerjaan pada dinas kemiliteran Belanda karena secara umum banyak orang Ambon

39 Meta Sekar Puji Astuti, *Apakah Mereka Mata-Mata?: Orang-Orang Jepang di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hlm. 120.

40 *Ibid.,* hlm. 133.

41 Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm. 86.

42 David Henley, *Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies* (Leiden: KITLV Pers, 1996), hlm. 78-82.

direkrut oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi personel Tentara Kerajaan Belanda, *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL). Pada tahun 1920 jumlah orang Ambon yang dipekerjakan sebagai anggota KNIL disebutkan telah mencapai angka sebesar 8.881 orang.[43]

Pola pemukiman dalam masyarakat Kediri memperlihatkan berlakunya pemisahan lokasi berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis/rasial yang berbeda. Kelompok Eropa sebagai kelas penguasa mendiami wilayah khusus yang dinamakan *wijk*, yang juga berlaku untuk kelompok Timur Asing. Orang-orang Eropa mendiami wilayah Kota Kediri bagian barat di mana juga menjadi lokasi kantor-kantor dinas pemerintahan seperti kantor residen, kantor polisi, kantor jawatan pekerjaan umum (*BOW*), juga gedung sekolah Eropa, gereja, rumah sakit. Sebagian orang Eropa tinggal di kompleks perumahan di pabrik-pabrik, yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Orang-orang Timur Asing yang mayoritas Tionghoa mendiami wilayah kota bagian timur di sekitar *Chineesche voorstraat* dan *Klenteng straat* (daerah Pakelan, Setano gedong, dan Ringin Anom), yang berlokasi di sepanjang Sungai Brantas. Sementara itu, pemukiman orang-orang bumiputera menyebar di kampung-kampung kota dan wilayah pedesaan.[44]

Gambaran yang bagus mengenai segregasi pemukiman secara mikro di tingkat distrik diberikan oleh Geertz dalam kajiannya mengenai Pare, yang dalam kajiannya disamarkan dengan nama "Mojokuto". Di Distrik Pare lokasi permukiman orang-orang Belanda terdapat di bagian barat, di mana tinggal pegawai-pegawai dan pensiunan Belanda. Lokasi di sekitar masjid kota merupakan Kampung Kauman di mana banyak tinggal orang-orang Arab, berdekatan dengan lingkungan permukiman kelompok orang Bawean. Sementara itu, di sekitar Pasar Pare menjadi lokasi-lokasi permukiman terpisah dari kelompok orang Tionghoa, kelompok orang Gresik, kelompok orang Madura, kelompok orang Kudus dan Demak, selain terdapat permukiman penduduk asli kota.[45]

---

43 J. Paulus, *op.cit.,* hlm. 563; Purnawan Basundoro, "Penduduk dan Hubungan antar etnis di Kota Surabaya pada Masa Kolonial", *Jurnal Paramita,* Vol. 22, No. 1, Tahun 2012, hlm. 3.

44 M. Saichurrohman, "Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri, *Skripsi* (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015), hlm. 41-42.

45 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 84-85.

EKSPANSI POLITIK KOLONIAL BELANDA KE KEDIRI

Kediri merupakan wilayah yang mempunyai arti penting secara politis. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat kekuasaan politik sejak lama sebelum Majapahit, dan menjadi ibukota Kerajaan Daha dengan menggunakan nama "Kadiri", yang dalam perkembangan kemudian menjadi Kediri. Menurut Sedyawati, nama "Kadiri" merujuk pada sebuah kerajaan (*Nagara),* yang berpusat di pedalaman Jawa Timur pada rentang waktu periode sejak awal abad ke-12 hingga awal abad ke-13. Berdasarkan jejak-jejak prasasti yang ditinggalkannya, teritori Kerajaan Kediri diduga meliputi kawasan yang membentang dari Magetan di sebelah barat hingga Wajak Lor di bagian timur, dan membentang dari Pare di sebelah utara hingga daerah Jepun di bagian selatan.[46]

Meskipun perannya sebagai pusat politis utama di Jawa hanya berlangsung tidak lebih dari dua abad, kedudukan Kediri yang penting tampak dari ambisi politis penguasa lain untuk menaklukkannya. Hal ini tampak nyata dari upaya-upaya yang dilakukan para penguasa politik di Jawa dari Majapahit, Giri hingga raja-raja Mataram di Jawa Tengah untuk menempatkan Kediri ke dalam wilayah kekuasaannya.[47] Pendirian Kerajaan Majapahit yang menjadi kerajaan besar di Jawa bahkan Nusantara diawali dengan penaklukan Kediri oleh Raden Wijaya yang bersiasat dengan memanfaatkan pasukan Mongolia yang menyerbu ke Jawa untuk menghukum penguasa Singhasari. Di bawah bayang-bayang kebangkitan dan kejayaan Majapahit, Kediri sebagai wilayah vasal diperintah oleh kerabat penguasa Majapahit, yakni Bre Daha dan Bre Kahuripan. Ketika Majapahit mengalami disintegrasi, Dinasti politik Kediri di bawah Girindrawardhana mampu bangkit dan meruntuhkan Majapahit pada tahun 1474.[48] Kebangkitan kembali Kediri tidak berlangsung lama karena dengan ekspansi Islam yang dilancarkan Panembahan Giri, kekuasaan dinasti Hindu di Kediri runtuh pada tahun 1527. Dalam

46 Edi Sedyawati, *op.cit.*, hlm.8-9.

47 Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 21-28.

48 *Ibid.*, hlm. 17-18.

perkembangan selanjutnya, tampilnya pusat politik Mataram Islam di Jawa Tengah mencatatkan penaklukan Kediri pada tahun 1590 oleh Panembahan Senapati yang mengintegrasikan wilayah ini sebagai bagian dari Kerajaan Mataram.[49]

Peran politis Kediri kembali menguat ketika Mataram mengalami disintegrasi akibat konflik internal antara Susuhunan Amangkurat I dengan putera mahkota (Amangkurat II). Pangeran Trunajaya yang semula mendukung putera mahkota ternyata kemudian mempunyai ambisi politis pribadi. Setelah berhasil mengalahkan Susuhunan Amangkurat I dan merampas harta pusaka Mataram yang terdapat di Istana Plered yang dipertahankan oleh Pangeran Purbaya pada tahun 1677, Trunajaya dan orang-orang Madura yang menjadi pengikutnya, serta para petualang Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan yang meninggalkan daerah asalnya sejak penaklukan Kerajaan Gowa oleh VOC pada 1669, bergerak ke arah timur dan membangun pusat kekuasaan di Kediri.[50] Lokasi Kediri yang terletak di kawasan pedalaman dipandang cocok untuk basis kekuatan dan lebih aman dari jangkauan kekuatan militer Kompeni yang mengancam dari kota-kota pesisir Jawa. Di Kediri, Trunajaya membangun istana keraton yang besar dan megah dengan diperlengkapi lima halaman yang luas dan beberapa bangunan gapura.[51] Perlawanan Trunajaya atas Mataram berakhir dengan penangkapan Trunajaya pada tahun 1679 dan penjatuhan hukuman mati atasnya pada tahun 1680,[52] sehingga wilayah Kediri kembali menjadi bagian teritori Mataram.

Pada saat terjadi perlawanan Untung Surapati (1687-1707) yang bermarkas di Pasuruan, Kediri juga menjadi bagian penting dalam episode sejarah ini. Ketika Surapati dan para pengikutnya terdesak oleh pasukan Kompeni yang melakukan operasi penumpasan bersama dengan pasukan Mataram, kawasan Kediri Selatan dan Malang menjadi markas untuk bertahan dan memulihkan kekuatan. Dalam kunjungan ke Kediri pada tahun 1706, F. Valentijn melaporkan bahwa Kediri merupakan sebuah

49 *Ibid.*, hlm. 19-20.

50 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm.165-166.

51 Denys Lombard, *op.cit.*, hlm. 60.

52 M.C. Ricklefs, *op.cit.,* hlm. 168.

kota kerajaan yang besar dengan luas sekitar 2 mil, berpenduduk kurang lebih 10.000 rumah tangga dan dipimpin oleh Ngabehi Katawengan, seorang kerabat dekat Surapati. Ilustrasi lain strategisnya Kediri juga tampak bahwa dalam perebutan tahta Mataram melawan Pangeran Puger, Sunas Mas juga menjadikan Kediri sebagai markas dan basis perlawanannya dengan dukungan dinasti penguasa lokal Kediri, Adipati Katawengan. [53]

Berakhirnya perlawanan Untung Surapati membuat wilayah Kediri secara tegas kembali sebagai bagian wilayah Kasunanan Mataram. Di bawah pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749) wilayah kekuasaan Mataram dilakukan penataan dan konsolidasi wilayah. Kediri menjadi salah satu *kadipaten* di wilayah Mataram yang dikenal dengan sebutan *Mancanegara Wetan.*[54] Ketika Mataram pada tahun 1755 dibagi menjadi dua bagian, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, *Kadipaten* Kediri termasuk sebagai teritori Kasunanan Surakarta. Akibat Perang Diponegoro (1825-1830) yang banyak menguras biaya, Kasunanan Surakarta akhirnya harus melepaskan Kadipaten Kediri dan menyerahkan kepada Belanda pada tahun 1830.[55] Penyerahan Kediri dan beberapa kabupaten di wilayah *Mancanegara Wetan* didasarkan pada Perjanjian Sepreh di Pendopo Kabupaten Ngawi pada tanggal 3-4 Juli 1830. Bupati yang berkuasa di Kediri sejak penyerahan wilayah ini kepada Belanda pada tahun 1830 hingga tahun 1858 adalah R.A. Djojodiningrat.[56]

Di bawah pemerintahan Belanda, Kediri ditetapkan sebagai wilayah keresidenan yang dikuasainya. Pada tahun 1834 Belanda membangun Benteng Kediri dengan lokasi di tepi barat Sungai Brantas. Benteng ini berhasil diselesaikan pada tahun 1835 dan merupakan bagian dari sejumlah benteng dalam rangka Garis Pertahanan van den Bosch. Benteng ini berbentuk segi empat dengan halaman terdapat di bagian tengah dan mampu menampung garnisun sebanyak 70 orang dengan perlengkapan pertahanan 7 meriam. Dengan lokasi di pinggiran Sungai Brantas benteng

53 Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 24-25.

54 *Ibid.*, hlm. 25-26.

55 Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 27-28.

56 Heather Sutherland, "Notes on Java's Regent Families: Part II", *Indonesia, Vol. 17* (Apr., 1974), hlm. 30.

ini dapat digunakan untuk mengawasi kesibukan lalu lintas angkutan dan penyeberangan sungai. Seiring dengan perkembangan zaman, bangunan ini direnovasi dan selanjutnya sejak 1890 dialih-fungsikan sebagai Kantor Keresidenan Kediri.[57]

Gambar 1.3. Benteng Belanda yang dibangun pada 1834 dan pada 1890 direnovasi Menjadi Kantor Residen Kediri
Sumber: Raap, 2017:71

Keresidenan Kediri dalam wilayah administrasi kolonial dibagi menjadi empat *afdeeling* atau kabupaten, yakni Kediri, Tulungagung, Berbek, dan Blitar. Sebagai sebuah *afdeeling,* Kediri membawahkan 19 distrik dan salah satu distriknya adalah Distrik Kediri. Distrik-distrik lainnya yang tercakup dalam *Afdeeling* Kediri adalah Mojoroto, Ngadiluwih, Pare, Papar, Tulungagung, Ngunut, Campurdarat, Kalangbret, Trenggalek, Kampak, Karangan, Panggul, Pule, Nganjuk, Berbek, Kertosono, Lengkong, dan Warujayeng.[58] Dalam perkembangannya, ibu kota keresidenan ini ditetapkan sebagai salah satu kota di Jawa yang mendapatkan status *gemeente* pada tahun 1906, bersamaan waktunya dengan sejumlah kota lain termasuk Surabaya dan Bandung. Status ini didapatkan Kediri

57 Olivier Johannes Raap, *op.cit.,* hlm. 71.

58 Nederlandsch-Indie, *op.cit.*, hlm. 111-113.

bahkan lebih awal daripada Kota Malang, yang baru ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1914.[59] Dengan status sebagai *gemeente*, Kota Kediri mendapatkan otonomi penuh untuk mengelola wilayah kota dan berbagai urusannya. Pemberian status demikian tentu saja tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan didasarkan pertimbangan strategis atas kelayakannya. Kediri dianggap layak menjadi *gemeente* (kota praja) karena secara ekonomis memiliki potensi besar dengan perkembangannya sebagai sentra perkebunan kolonial yang penting di Jawa Timur. Bagian berikut akan memaparkan dinamika perekonomian masyarakat Kediri.

AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT
PERKEBUNAN DAN PERTANIAN

Di bawah sistem perkebunan beragam komoditas untuk pasar global dikembangkan di Keresidenan Kediri. Pada masa tanam paksa (1830-1870) komoditas komersial mulai dibudidayakan di kawasan ini terutama adalah kopi, tebu, dan indigo. Pada masa politik kolonial liberal (1870-1900), komoditas kopi dan tebu tetap menduduki posisi semakin penting, sedangkan indigo kehilangan nilai pentingnya secara ekonomi karena terdesak penggunaan zat pewarna tekstil sintetis yang meluas. Berbeda dengan indigo yang kehilangan nilai komersialnya, tembakau justru menguat kedudukannya sebagai komoditas komersial, dan kemudian disusul komoditas karet sejak dekade awal abad ke-20. Menjelang pendirian DJB Agentschap Kediri, di Keresidenan Kediri telah terbentuk sektor perkebunan berorientasi ekspor dengan beragam komoditas andalan sebagai penopang perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat.

Pada dekade pertama penerapan tanam paksa, sistem produksi perkebunan wilayah Kediri terdiri atas 5 jenis komoditas yakni kopi, tebu, indigo, lada, dan kayu manis. Kopi merupakan tanaman budidaya perkebunan yang menempati kedudukan paling penting secara ekonomi. Pada tahun 1837 dilaporkan jumlah tanaman kopi di seluruh Keresidenan Kediri telah mencapai kurang lebih 12,4 juta pohon. Meskipun angka ini

59 M. Saichurrohman, *op.cit.*, hlm.5-6.

masih berada di bawah Keresidenan Besuki yang memiliki 15 juta pohon kopi dan hampir menyamai posisi Keresidenan Madiun dengan total 12,5 juta pohon kopi, jumlah tanaman kopi di Keresidenan Kediri pada dekade pertama implementasi sistem tanam paksa jauh lebih besar dibanding jumlah tanaman kopi di beberapa keresidenan lain di Jawa Timur. Di Keresidenan Pasuruan baru terdapat 8,1 juta pohon kopi, Pacitan sebanyak 5,2 juta pohon, dan Surabaya mempunyai 2,4 juta pohon. Dilaporkan bahwa pada tahun 1844 jumlah tanaman kopi di Keresidenan Kediri telah mencapai angka 15 juta pohon atau meningkat lebih dari 2,5 juta pohon jika dibandingkan dengan jumlah pohon kopi di kawasan ini pada tahun 1837.[60]

Pemerintah kolonial mengklasifikasikan produksi kopi dalam tiga kelompok utama, yakni kopi perkebunan, kopi pagar, dan kopi hutan. Kopi perkebunan dikembangkan mengikuti secara ketat instruksi-instruksi yang dikeluarkan Direktur Penanaman di Batavia. Sebagai usaha yang disponsori pemerintah, budidaya kopi perkebunan ini paling sering diawasi untuk menjamin kuantitas dan kualitas produksi sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, secara politik keberhasilan dalam pengelolaan produksi kopi perkebunan sering menjadi sarana promosi jabatan bagi para pegawai muda dalam meniti karir di pemerintahan kolonial. Kopi pagar ditanam dengan lokasi mengitari halaman di dalam dan pinggiran desa dan tidak banyak berkaitan dengan arahan-arahan para teknisi perkebunan sehingga tidak banyak menimbulkan beban pekerjaan bagi para penanamnya. Kelompok terakhir, yakni kopi hutan adalah kopi-kopi yang tumbuh di antara rimbunan pepohonan di lahan-lahan hutan. Baik kopi pagar maupun kopi hutan sering diklaim sebagai properti para penanam.[61]

Untuk meningkatkan keterlibatan penduduk dalam penanaman kopi, pemerintah kolonial melakukan beberapa upaya. Pertama, upaya dilakukan dengan memberikan komisi berupa insentif finansial

60 R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System 1830-1870* (Sydney: Allen and Unwin, 1994), hlm. 86-87.

61 Frans Baardewijk, "Rural Response to Intensifying Colonial Exploitation: Coffee, State, and Society in Central and East Java", 1830-1880, dalam G.J. Schutte (ed), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 158-159.

kepada para pegawai untuk mendorong mereka lebih bergairah dalam peningkatan produksi. Kedua, pemerintah kolonial memberlakukan kewajiban melakukan pelaporan penanaman kepada para pegawainya. Ketiga, keterlibatan kaum petani Jawa dalam penanaman dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk uang atas produk yang diserahkan. Keempat, pemerintah juga menggunakan instrumen pajak tanah untuk memaksa keterlibatan kaum petani dalam budidaya tanaman komersial. Uang yang diperlukan untuk pembayaran pajak tanah di banyak distrik hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan dalam pengusahaan komoditas untuk pasar dunia yang dijalankan pemerintah kolonial.[62]

Sama halnya dengan kopi, di bawah sistem tanam paksa penanaman tebu juga mulai berlangsung di wilayah Keresidenan Kediri. Untuk mendukung pelaksanaan tanam paksa tebu yang dikembangkan di lahan persawahan, pemerintah kolonial memperbaiki infrastruktur irigasi.[63] Penanaman tebu dilaporkan mencapai 509 hektar pada tahun 1836, sedangkan jumlah pabrik sebanyak empat buah. Pada tahun 1840 jumlah pabrik gula yang beroperasi menjadi 13 buah dengan area penanaman tebu seluas 612 hektar. Meskipun jumlah pabrik mengalami fluktuasi antara 1840 hingga 1870, luas area penanaman tebu mengalami peningkatan. Pada tahun 1850 jumlah pabrik gula tinggal 9 buah, namun area penanaman meliputi area berkembang seluas 904 hektar, meningkat menjadi 1.348 hektar pada tahun 1860. Pada dekade terakhir pemberlakuan sistem tanam paksa sebelum dihapus secara resmi pada tahun 1870, jumlah pabrik gula bertahan sebanyak 6 buah dengan luas area penanaman sebesar 1.348 hektar.[64] Gambaran secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 1.2).

62 *Ibid.*, hlm. 156-157.

63 Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 41-42.

64 William J. O'Malley, *Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar*, Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 201.

Tabel 1.2.
Jumlah Pabrik Gula dan Luas Penanaman di Keresidenan Kediri 1836-1870
(Areal dalam hektar)

Tahun	Jumlah Pabrik	Luas Areal
1836	11	509
1840	13	612
1845	10	568
1850	9	904
1856	4	923
1860	6	1.348
1865	6	1.348
1870	6	1.348

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", Anne Booth, William J. O'Malley dan Ana Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 201. Catatan: Jumlah pabrik pada tahun 1836 yang ada dalam data O'Malley sebanyak 1 buah sangat meragukan, sehingga dikoreksi dengan menggunakan data Elson (1994) yang menyebutkan sebanyak 11 pabrik pada tahun 1834 dengan asumsi tidak ada perubahan jumlah pabrik pada tahun 1835.

Produksi gula di bawah sistem tanam paksa dalam praktek diselenggarakan dengan sistem kontrak gula yang melibatkan peran sentral pelaku swasta, meskipun secara umum disebut sebagai perkebunan pemerintah/negara. Para pemegang kontrak hampir selalu adalah orang-orang Eropa atau Tionghoa. Dalam skema yang disebut sistem kontrak gula, pemerintah menetapkan lokasi tertentu untuk dijadikan lokasi penanaman tebu yang dilakukan oleh warga desa dalam radius tertentu dari pabrik gula sebagai pusatnya. Pemerintah kolonial dalam hal ini juga memberikan jaminan ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang diperlukan oleh perkebunan tebu dengan cara memaksa keterlibatan penduduk desa. Sementara itu, kontraktor berkewajiban melakukan pembangunan pabrik gula, dan untuk tujuan ini tidak jarang ditempuh dengan mengajukan dukungan modal dari pemerintah kolonial. Di pabrik yang mereka dirikan, kontraktor akan memproses tebu-tebu yang dipanen dari lahan yang menjadi wilayah kerja yang ditetapkan untuk operasinya dan menyerahkan produk gula yang dihasilkan kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kontrak.[65]

65 Cees Fasseur, *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch and the Cultivation System* (Ithaca: Cornell University Press, 1992), hlm. 34, 87.

Di luar penanaman komoditas kopi dan gula, sistem tanam paksa juga mengembangkan tanaman-tanaman lain. Pada tahun 1837 dilaporkan bahwa luas penanaman indigo di Keresidenan Kediri mencapai 1.240 *bau* dan 65 *bau* tanaman kayu manis, sedangkan tanaman lada sebanyak 286 ribu. Penanaman komoditas-komoditas ini memperlihatkan tren peningkatan pada dekade 1840-an. Sementara itu, luas tanaman indigo mencapai 1.270 *bau*, kayu manis 80 *bau,* dan lada sebanyak 495 ribu.[66] Keterbatasan data historis yang dapat dijangkau sejauh ini tidak memungkinkan pemaparan secara lengkap dan kronologis. Keterbatasan data tentang komoditas-komoditas ini tampaknya juga dapat menjadi indikasi bahwa signifikansinya lebih rendah dibanding kopi dan gula. Kopi memang menjadi andalan pemerintah untuk menghasilkan keuntungan dari tanam paksa dan komoditas ini menyumbang 80% keuntungan yang dinikmati pemerintah, baru disusul keuntungan dari produk gula.[67]

Perkembangan perkebunan pemerintah di bawah sistem tanam paksa mempengaruhi secara sosio-ekonomis kehidupan masyarakat. Pengaruhnya dirasakan karena dalam proses pengerjaannya melibatkan rumah tangga kaum petani, bahkan sebagian juga menggunakan lahan yang mereka miliki seperti dijumpai dalam penanaman tebu dan indigo yang berlangsung di lahan-lahan persawahan. Dalam penanaman kopi saja misalnya, pada tahun 1834 dilaporkan telah melibatkan sebanyak 13.624 orang penanam, sedangkan pada penanaman indigo melibatkan rata-rata 379 orang untuk setiap pabrik dengan total sebanyak 19 buah pabrik indigo yang beroperasi untuk pemerintah dan rata-rata area tanam masing-masing seluas 73,2 *bau*.[68] Pada tahun yang sama dilaporkan terdapat 11 pabrik gula beroperasi di Keresidenan Kediri. Rata-rata jumlah penanam tebu untuk masing-masing pabrik sebanyak 223 orang dan rata-rata luas penanaman mencapai 32,1 *bau* per pabrik.[69] Pada tahun 1850 diperkirakan jumlah rumah tangga yang dilibatkan dalam penanaman tebu untuk pemerintah mencapai 3.320 kepala keluarga, naik dari 3.320

66 R.E. Elson, *op.cit.*, hlm. 86-87.

67 Willian J. O'Malley, *op.cit.*, hlm. 217.

68 R.E. Elson, *op.cit.,* hlm. 49, 65.

69 R.E. Elson, *op.cit.,* hlm. 55.

kepala keluarga pada tahun 1845.[70] Persentase rumah tangga petani yang direkrut dalam penanaman komoditas komersial untuk pemerintah dalam kerangka sistem tanam paksa di Kediri tampak dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Persentase Rumah Tangga yang Terlibat dalam Tanam Paksa di Keresidenan Kediri, 1840-1850

Tahun	Persen
1840	72,6
1842	83,1
1844	91,7
1846	84,4
1848	75,7
1850	89,0

Sumber: R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System 1830-1870* (Sydney: Allen and Unwin, 1994), hlm. 111.

Ekspansi penanaman tebu berlanjut pada era politik kolonial liberal (1870-1900) dan dua dekade awal era politik etis menjelang pendirian DJB Kediri. Berbeda dengan komoditas perkebunan pada era tanam paksa yang pengembangannya atas prakarsa pemerintah, sejak 1870 penanaman tebu oleh perusahaan-perusahaan swasta barat mendapatkan kesempatan lebar untuk berkembang. Namun demikian, penting dicatat bahwa meskipun usaha perkebunan yang dikelola untuk pemerintah dihapus secara resmi sejak 1870, dalam pelaksanaan di lapangan penghapusan memerlukan waktu lebih lama. Penghapusan di lapangan berlangsung secara bertahap, tidak bisa serta merta berbarengan dengan perubahan kebijakan kolonial. Hal ini karena perlu proses pengalihan dan penyesuaian sehingga pada era politik kolonial liberal dijumpai perkebunan tebu untuk pemerintah dan perkebunan tebu yang dijalankan perusahaan-perusahaan swasta.

Secara umum dengan pemberlakuan politik kolonial liberal sejak 1870, tren yang berlaku untuk sektor perkebunan pemerintah dan swasta memperlihatkan sebuah kontras. Kegiatan sektor perkebunan swasta

70 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Surjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 60.

secara bertahap tampak mulai menguat, sedangkan peran pemerintah di sektor perkebunan berkurang, seperti tampak baik dari jumlah perkebunan maupun area lahan yang ditanami. Gambaran secara lebih lengkap tentang perkembangan perkebunan swasta dan negara untuk tanaman tebu sejak pemberlakuan politik kolonial liberal dapat dilihat hingga menjelang era politik etis tersaji pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5. Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa perkebunan tebu swasta di Keresidenan Kediri diusahakan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan besar Eropa saja, melainkan juga melibatkan perusahaan yang dimiliki pengusaha Tionghoa. Perusahaan swasta yang banyak mengusahakan tanaman tebu di Kediri di antaranya adalah Handelsvereeniging Amsterdam, yang memiliki pabrik di Distrik Pare. Selain pabrik-pabrik lama yang sudah beroperasi pada masa tanam paksa, beberapa pabrik gula baru didirikan oleh perusahaan-perusahaan swasta, di antaranya adalah PG Tjoekir yang mulai berdiri sejak 1884 milik NV Kooy & Coster van Voorhout.[71]

Tabel 1.4.
Perkebunan Tebu Swasta di Keresidenan Kediri, 1875-1900

Tahun	Jumlah Perkebunan	Jumlah Milik Orang Tionghoa	Jumlah Milik Perusahaan Besar	Areal yang Ditanami (ha)
1875	-	-	-	-
1880	-	-	-	-
1885	2	-	1	569
1891	6	3	2	1.170
1895	12	4	7	4.370

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 208-209.

71 Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan, Jombang-Kediri 1965-1966*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000), hlm. 106.

Tabel 1.5.
Pabrik Gula di Keresidenan Kediri yang Bekerja untuk Pemerintah pada Periode 1870-1890 (Area dalam hektar)

Tahun	Jumlah Pabrik	Area yang Diatur Pemerintah	Tanah Rakyat yang ditanami tebu	Tanah Sewaan Perkebunan
1870	6	1.348	-	-
1875	4	1.348	50	6
1880	6	1.244	23	197
1885	6	724	153	1.072
1890	6	206	168	1.980

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 208-209.

Perkebunan swasta beroperasi pada dua jenis perolehan lahan. Pertama, sebagian besar lahan diperoleh melalui sewa tanah jangka panjang yang diberikan pemerintah kolonial melalui *hak erfpacht* berjangka waktu 75 tahun. Tanah *erfpacht* untuk perkebunan tebu dan perkebunan lain di Kediri banyak diberikan sejak setelah pertengahan 1880-an. Kedua, sebagian perkebunan khususnya perkebunan tebu juga mendapatkan lahan untuk penanaman dengan cara menyewa dari para petani. Di Distrik Pare, sebagai misalnya, sekitar 2.500 akre sawah tiap tahun disewa dari para petani dengan jangka waktu selama dua setengah tahun oleh pabrik-pabrik gula dengan perantaraan para kepala desa untuk ditanami tebu. Setiap 18 bulan sebanyak sepertiga dari luas sawah desa diberikan kepada pabrik-pabrik untuk ditanami tebu, dan sisanya dikelola oleh para petani sendiri untuk kepentingan budidaya tanaman yang mereka inginkan. Diperkirakan setiap tahun perusahaan perkebunan menggunakan sekitar seperempat lahan sawah desa untuk kepentingan penanaman tebu.[72]

Pada dua dekade awal abad ke-20 menjelang pendirian DJB Kediri, perkebunan tebu di Keresidenan Kediri menunjukkan tren peningkatan baik dari segi jumlah pabrik maupun luas area penanaman tebu. Pabrik gula yang dibangun pada dua dekade pertama awal abad ke-20, di antaranya

72 Clifford Geertz, *op.cit.,* hlm. 32-33.

PG Meritjan yang didirikan pada tahun 1903 oleh Nationale Industrie en Landbouw Mij NV. Pada tahun 1912 dua pabrik menyusul berdiri di Kediri, yakni PG Pesantren Baru yang didirikan oleh NV Javasche Cultuur Maatschappij yang berlokasi dekat dengan Pondok Pesantren Lirboyo dan PG Ngadirejo yang didirikan oleh Handelsvereeniging Amsterdam (HVA).[73] Seperti tampak pada Tabel 1.6, bertambahnya pabrik gula di Kediri ikut menyumbang pada tren tumbuhnya jumlah pabrik gula yang berlangsung di seluruh Jawa. Penurunan jumlah pabrik gula yang terjadi pada tahun 1920 bukan karena kondisi perekonomian yang memburuk, melainkan sebagai dampak erupsi Gunung Kelud pada 1919, yang sangat dahsyat dan menimbulkan kerusakan parah, termasuk merusak pabrik gula di *Afdeeling* Kediri dan *Afdeeling* Blitar.

Bukan hanya perkebunan tebu saja, penanaman kopi juga terus berkembang di bawah sistem perkebunan swasta. Perkebunan kopi swasta di Kediri dikembangkan oleh sejumlah perusahaan. Cultuurmaatschappij Kenteng mempunyai perkebunan kopi di Distrik Papar dengan persil kopi Kenteng dan Besowo. Sebagian besar perusahaan mengembangkan perkebunan kopi di Distrik Pare. Cultuur Maatschappij Ngrangkah mempunyai persil kopi Ngrangkah dan Sumber Glatik.

Tabel 1.6.
Jumlah dan Area Perkebunan Tebu di Keresidenan Kediri dan Total Jawa 1900-1920 (Area dalam hektar)

Tahun	Jumlah Perkebunan		Luas Area	
	Kediri	Jawa	Kediri	Jawa
1900	17	189	9.101	89.481
1905	17	187	11.792	104.184
1910	22	196	13.817	117.113
1915	23	193	21.521	146.034
1920	21	185	20.271	149.117

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 211.

73 Hermawan Sulistyo, *op.cit.,* hlm. 108-109.

Gambar 1.4. Pabrik Gula Badas di Timur Laut Keresidenan Kediri Tahun 1912
Sumber: Koleksi KITLV 18271

Cultuur Maatschappij Soerowinangoen mengembangkannya di persil Surowinangun dan Mlancu, sedangkan Cultuur Maatschappij Pengadjaran mengusahakan kopi di persil Selostop. Cultuur Maatschappij Soekaboemi dengan persil Sukabumi. Ada pula persil kopi Rejoagung dan Brumbung milik Cultuur Maatschappij dan persil kopi Kebonduren yang dikelola Landbouwmaatschappij Kebondoeren, serta Cultuur Maatschappij Badak dengan persil Sumberwringin dan Pojokrejo. Akan tetapi perusahaan yang terbesar adalah Handelsvereeniging Amsterdam yang mempunyai jumlah persil kopi paling banyak, di antaranya persil Jengkol, Kepung, dan Karangdinoyo. Perusahaan ini bahkan juga mengusahakan komoditas lain termasuk tebu, karet, kakao, ketela, dan beberapa komoditas perkebunan lainnya.[74]

74 Tidor Arif T. Djati dkk. *Kebijakan Perkebunan di Jawa Timur Masa Hindia Belanda* (Surabaya: Seri Naskah Sumber Arsip No. 15, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 2013), hlm. 144-148.

Gambar 1.5. Gerobak sapi untuk pengangkutan tebu di perusahaan Badas Timur Laut Kediri Tahun 1912

Sumber: Koleksi KITLV 790014

Gambar 1.6. Penyiapan Tanaman Kopi di Onderneming Besowo

Sumber: Koleksi KITLV 2144514

Gambar 1.7. Panen Perusahaan Kopi Besowoh di Kediri 1910
Sumber: Koleksi KITLV A949

Keterbatasan informasi historis tidak memungkinkan untuk menyajikan gambaran secara utuh dan detail mengenai luas dan produksi seluruh perkebunan kopi di Kediri. Data parsial yang berasal dari salah satu perusahaan perkebunan Ngrangkah kiranya dapat memberikan sedikit gambaran tentang perkembangan perkebunan kopi swasta di wilayah Kediri sebelum pembentukan DJB Kediri. Beberapa nama administrator yang mengelola perkebunan Ngrangkah pada periode 1891 hingga 1916, yakni Franz Gierlings (1891-1914), yang pada tahun 1903 untuk sementara digantikan oleh P. H. Soeters. F. C. W. Cunz menjabat administrator pada periode 1915-1917, yang kemudian sejak 1918 digantikan oleh Jhr. A. H. W. de Jonge hingga tahun 1918-1930.[75]

75 Dian Agustin dan Corry Liana, *Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soembar Glatik di Kediri Tahun 1891-1932*, *Avatara,* Volume 9, No. 2 Tahun 2020.

Tabel 1.7.
Produksi Kopi Cultuur Maatschappij Ngrangkah, 1894-1916 (dalam pikul)

Tahun	Jenis Kopi	
	Arabica (Jawa)	Robusta
1894	2.124	-
1895	1.571	-
1896	954	-
1897	251	-
1899	450	-
1900	3.150	-
1901	380	-
1903	2.254	-
1905	956	-
1907	400	-
1909	300	-
1910	270	-
1911	190	-
1912	350	50
1913	-	157
1914	-	225
1915	-	4.450
1916	-	6.375
1917	-	6.000
1918	-	8.275
1919	-	4.300
1920	-	116
1921	-	8.144
1922	-	7.218
1923	-	8.065

Sumber: *De Indische Mercuur* tahun 1910-1916 dalam Dian Agustin dan Corry Liana "Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soembar Glatik di Kediri Tahun 1891-1932", *Avatara,* Volume 9, No. 2 Tahun 2020

Tabel 1.7 memperlihatkan dua varietas kopi yang dikembangkan, yakni kopi Arabica (populer disebut dengan nama kopi Jawa) dan kopi Robusta. Pada mulanya jenis kopi yang diusahakan di Kediri adalah Arabica, tetapi sejak 1912 juga dihasilkan kopi jenis Robusta. Fenomena ini sebenarnya menggambarkan perkembangan umum yang berlaku di Jawa bahwa produksi kopi Arabica mengalami banyak gangguan akibat

serangan penyakit daun, *Hemileia vastatrix.* Tanaman kopi memang mempunyai banyak musuh berupa hama dan penyakit dari jamur perusak daun, batang dan akar, parasite, bakteria, larva hingga penggerek.[76] Serangan luas *Hemileia vastatrix* pada dekade 1880-an mendorong para pengusaha perkebunan mencari alternatif varietas kopi yang tahan terhadap penyakit ini. Kopi Liberia menawarkan ketahanan yang diinginkan sehingga sejak 1890-an penanaman kopi Liberia meningkat.[77] Hanya saja dalam perkembangannya kemudian terbukti bahwa produktivitas Liberia kurang memuaskan sehingga alternatif lain pun terus dicari dan pilihan jatuh pada kopi Robusta. Jenis ini mempunyai kelebihan cepat berbuah, hasil lebih besar dan juga resisten terhadap *Hemileia vastatrix* sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik.[78]

Dengan cepat penanaman kopi Robusta meluas di Kediri dan juga banyak tempat lain di Jawa. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kemudian kopi Arabica tidak lagi diproduksi oleh Cultuur Maatschappij Ngrangkah setelah tahun 1912, yang menandai pula mulai dihasilkannya produk kopi Robusta. Dari tahun ke tahun produksi kopi memperlihatkan kecenderungan meningkat sejak tahun 1914. Turunnya volume produksi kopi Robusta pada 1919 dan bahkan secara drastis anjlok pada tahun berikutnya merupakan dampak erupsi besar Gunung Kelud pada 1919 yang menghancurkan kebun-kebun kopi di lerengnya.[79]

Dalam berbagai kasus penanaman kopi tidak hanya diusahakan sebagai tanaman tunggal (*mono planting*), tetapi sering juga dilakukan secara campuran (*mixed planting*) dengan tanaman lain terutama karet. Praktek serupa banyak dilakukan di tempat lain di Jawa termasuk daerah produksi kopi terkemuka di ujung timur Jawa.[80] Komoditas karet

76 J. Hagen, *De Koffiecultuur* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1917), hlm. 60-67; F.W. Morren, *Werkzaamheden op eene Koffie Onderneming* (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1896), hlm. 112-113.

77 P.J.S. Kramer, "Koffie", *Chronica Naturae,* 106, 6 (1950), hlm. 261; N.D. Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, *Kopi: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 13.

78 Henri Carel Zentgraaff, *Op het Idjen-Hoogland* (Tanpa tempat: Tanpa Penerbit, 1926), hlm. 29; Nawiyanto, *Environmental Change in a Frontier Region of Java*, *PhD Thesis*, The Australian National University, 2007, hlm. 107.

79 "Tentang kajian atas manuskrip sezaman mengenai Letusan Gunung Kelud 1919", lihat Suyami, Taryati dan Sumarno, *Kajian Kebencanaan Dalam Naskah Pajeblugipun Redi Kelud* (Yogyakarta: Kepel Press, 2015).

80 R. Broersma, *Besoeki: Een Gewest in Opkomst* (Amsterdam: Scheltema, 1912), hlm. 66-68.

menanjak permintaannya terutama sejak awal abad ke-20. Perkembangan perkebunan karet secara global dirangsang oleh ekspansi yang berlangsung dalam dunia industri otomotif yang memerlukan produk karet sebagai salah satu komponen utamanya.[81] Di Keresidenan Kediri terdapat sebanyak 38 perkebunan karet dengan luas area penanaman karet pada tahun 1913 mencapai 10.964 *bau.* Jenis karet yang di budidayakan meliputi tiga varietas utama, yakni *Hevea Brasiliensis*, *Ficus elastica*, dan *Castilla elastica.* Signifikansi masing-masing jenis karet dari segi luas area penanaman secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8.
Luas Perkebunan Karet di Keresidenan Kediri, 1913 (dalam *bau*)

Lokasi	Jumlah Perkebunan	*Hevea Braziliensis*		Ficus elastica		Castiloa elastic	
		Mono	Campur	Mono	Campur	Mono	Campur
Kediri	38	349	7.710	934	137	9	61
Jawa	332	32.301	74.163	2.033	7.439	94	3.063
Total Kediri		**9.200**					
Total Jawa		**124.398**					

Sumber: Nurhadi Sasmita, *Mesin Uang di Pedalaman: Industri Perkebunan di Blitar, 1900-1942* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 77.

Seperti terlihat dalam tabel, jenis karet yang paling luas budidayanya adalah varietas *Hevea brasiliensis*, sebagai tanaman tunggal maupun campuran. Sebagai tanaman campuran, karet biasanya ditanam bersama dengan tanaman kopi. Varietas *Hevea brasiliensis* lebih disukai karena menjanjikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan perkebunan. Varietas ini mempunyai produktivitas lateks yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik pula, bila dibandingkan dengan jenis *Ficus elastica*, pohon penghasil lateks asli Asia Tenggara. Meskipun sama-sama berasal dari Benua Amerika, *Hevea brasiliensis* juga lebih unggul dan lebih menguntungkan dibanding jenis *Castilla elastica,* yang produktivitas dan

81 J.A.C Mackie, *Sedjarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern* (Djakarta: PT Pembangunan, 1963), Volume 2, hlm. 165.

kualitas lateksnya jauh lebih rendah.[82] Pengusahaan karet di Keresidenan Kediri dilakukan oleh beberapa perusahaan Barat. Di *Afdeeling* Kediri Handelsvereeniging Amsterdam (HVA) mempunyai sejumlah persil karet di Pare seperti Bakung dan Jengkol. Perusahaan lain yang juga mengusahakan karet, yakni Cultuur Maatschappij Soerowinangoen, NV Landbouw Maatschappij Satak, Cultuur Maatschappij Poentjoe, Bogor-Pradah Cultuur Maatschappij.

Komoditas penting lainnya yang dikembangkan perusahaan perkebunan Eropa di Kediri adalah ketela. Pengusahaan tanaman ketela umumnya dilakukan baik sebagai tanaman tunggal (*monocrop*) maupun dengan pola tanaman campuran (*mixed crops*).[83] Penanaman ketela dengan skala besar di Kediri dilakukan terutama oleh perusahaan yang mengusahakan berbagai macam tanaman perkebunan, Handelsvereeniging Amsterdam (HVA). Terdapat pula penanaman ketela skala besar yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan bernama, The Galoehan Tapioca Estate and Mill, Ltd. yang berkantor pusat di Surabaya.[84] Beberapa persil tanaman ketela yang diusahakan perusahaan ini misalnya persil-persil Bolodewo, Bedali, Sumberjati, Kujang, Kebondalem, Bumirejo, dan Galuan. Ada pula perusahaan lain, Cultuur Maatschappij Branggahan, dengan penanaman ketela di sejumlah persil, yakni Bogo, Alasduwet, Selosari, dan Sumberpucung.

Peluang keuntungan yang diberikan produk ketela membuat penanamannya mengalami perluasan sangat signifikan. Data yang diberikan Van der Eng menyebutkan area panen ketela di Keresidenan Kediri meningkat dari 7.908 hektar pada tahun 1903 menjadi 65.394 hektar pada tahun 1920.[85] Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu 17 tahun luas area penanaman ketela meningkat lebih dari delapan kali lipat.

---

82 G.C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *Western Enterprises in Indonesia and Malaya* (New York: Macmillan Company, 1957), hlm. 117.

83 Sebuah informasi dari Kediri menyebutkan misalnya terdapat penanaman ketela sebagai tanaman tunggal seluas 1.764 *bau* dan sebagai tanaman campuran seluas 518 *bau,* yang dikelompokkan sebagai manihot. Nurhadi Sasmita, *Mesin Uang di Pedalaman: Industri Perkebunan di Blitar, 1900-1942* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 77.

84 John A Fowler, *Netherlands East Indies and British Malaya: A Commercial and Industrial Handbook* (Washington: Government Printing Office ,1923) hlm. 141.

85 Pierre van der Eng, *Cassava in Indonesia: A Historical Re-Appraisal of an Enigmatig Food Crop*, *Southesat Asian Studies*, Vol. 36 No. 1 (1998), hlm. 6.

Secara komparatif dengan luasan area panen tersebut, Kediri menjadi keresidenan kedua di Jawa Timur dengan area panen ketela terluas, yakni menyusul setelah Keresidenan Madura dengan luas panen ketela sebesar 12.185 hektar pada tahun 1903 dan 102.166 hektar pada tahun 1920. Secara tradisional penduduk Pulau Madura dengan daerahnya yang kering dan kurang subur menggunakan ketela dan juga jagung sebagai bagian penting dari adaptasi teknologis yang mereka lakukan untuk mendukung kehidupan subsistensi.

Komoditas ketela yang dihasilkan perkebunan diproses menjadi produk tapioka. Di Distrik Pare, misalnya, Handelsvereeniging Amsterdam, memiliki tiga pabrik tapioka yang berlokasi di Jengkol, Besowo, dan Kalasan. Perusahaan ini juga mempunyai pabrik tapioka di Ngadiluwih, dan di *Afdeeling* Blitar ada pabriknya juga di Distrik Blitar dan Srengat.[86] HVA menghasilkan produk tapioka dengan merk "Boemi Ajoe 1", sedangkan The Galoehan Tapioca Estate and Mill, Ltd. yang berkantor pusat di Surabaya, memproduksi tapioka dengan merk "Galoean XXX".[87] Produk tapioka dari Kediri diakui secara internasional mempunyai kualitas yang lebih bagus daripada produk tapioka yang berasal dari daerah Priangan di Jawa Barat.[88] Produk tapioka dari Kediri diperdagangkan untuk ekspor ke pasar Eropa dan Asia. Pada tahun 1913 disebutkan tapioka dari Jawa diekspor ke Belanda, Jerman, Belgia, India, Singapura, Hongkong, dan Cina. Data tahun 1918 menunjukkan sebagian produk tapioka juga diekspor ke Australia dan Jepang.[89]

86 Yunanto Eka Prabowo dan Devi Ika Santhi Rahayu, *Ubi Kayu di Keresidenan Kediri pada Awal Abad Ke-20 Hingga 1940*, *Verleden: Jurnal Kesejarahan,* Vol. 13 No. 2 (2018), hlm. 180.

87 John A. Fowler, *op.cit.,* hlm. 141.

88 *Ibid.*

89 *Ibid.,* hlm. 143.

Gambar 1.8. Panen Perusahaan Tapioka di Kediri 1927
Sumber: Koleksi KITLV A 1058

Tembakau juga merupakan komoditas penting di Kediri pada masa liberal. Tanaman tembakau diusahakan beberapa perusahaan seperti J. en H.W. van Heemstede Abeit dan Handelsvereeniging Amsterdam. Perusahaan pertama mengusahakan tembakau di persil Kali Besowo, sedangkan perusahaan kedua mengusahakannya di persil Bakung.[90] Kemudian muncul pula NV Javasche Cultuur Maatschappij yang menjalankan perkebunan tembakau Bataan. Di Keresidenan Kediri perkebunan tembakau dijalankan terutama di kawasan kaki bawah Gunung Kelud dan Gunung Wilis.[91] Produksi tembakau Kediri sempat mempunyai arti penting dalam konteks produksi tembakau di Jawa karena diperkirakan bahwa pada 1870-an daerah ini memproduksi sekitar 40 persen dari seluruh daun tembakau berkualitas tinggi di Jawa, yang biasa dikategorikan sebagai *bladtabak* dan menyumbang antara 60 hingga 80 persen tembakau krosok yang digunakan untuk isian. Namun demikian,

90 Tidor Arif T. Djati dkk. *op.cit.,* hlm. 148.

91 John A. Fowler, *op.cit.,* hlm. 138.

pada 1910-1914 posisinya sebagai produsen tembakau kualitas tinggi (*bladtabak)* tersaingi dan direbut oleh Keresidenan Besuki, Surakarta, dan Yogyakarta (*Vorstenlanden*) dan bahkan pada 1920-an Kediri tidak lagi menjadi wilayah penghasil *bladtabak*. Wilayah Kediri hanya menjadi daerah produksi tembakau krosok yang sebagian besar dihasilkan oleh penduduk.[92]

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebelum pendirian DJB Kediri, wilayah Kediri telah melalui fase perintisan dan ekspansi perkebunan. Sejumlah perusahaan perkebunan hadir dengan beragam komoditas yang berorientasi ke pasar dunia. Mayoritas perusahaan perkebunan merupakan milik Eropa, tetapi sebagian juga dijalankan oleh orang-orang Tionghoa. Melalui kedua fase perkembangan tersebut Kediri menjelma sebagai sentra perkebunan penting di pedalaman Jawa Timur. Tabel 1.9 menyajikan secara rinci informasi tentang perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis komoditas perkebunan di *Afdeeling* Kediri, dilengkapi dengan informasi tentang lokasi, persil, tahun perolehan, dan jenis komoditas yang mereka usahakan.

Tabel 1.9.
Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914

Nama Perusahaan	Distrik	Persil	Tahun perolehan *erfpacht*	Komoditas utama
The Jong San	Mojoroto	Sukosewu II	12 Mei 1900	Kopi, lada, kelapa, palawija
Tan Sing Liong	Mojoroto	Poetat	2 Februari 1889	Palawija dan padi
F.M.A de Rijk	Mojoroto	Blimbing I, Blimbing II Pamongan	26 Januari 1897 3 Mei 1900 26 Mei 1900	Kapuk, vanili, palawija Kapuk, vanili, palawija Kapuk, vanili, palawija

92 P.J. van den Broek, "Bevolkingstabak", dalam. C.J.J. Hall dan C. van de Koppel (ed), *De Landbouw in den Indischen Archipel* (The Hague: W. van Hoewe, 1946), Vol. 2, hlm. 550-551.

Tabel 1.9.
Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914 (Lanjutan)

Nama Perusahaan	Distrik	Persil	Tahun perolehan *erfpacht*	Komoditas utama
Handelsvereeniging Amsterdam	Ngadiluwih	Trunung I Trunung II Bakung I Bakung II Bakung IV Bakung V Kali Gadok	24 Januari 1889 29 Agustus 1894 8 Oktober 1888 9 September 1889 9 September 1889 25 Maret 1887 15 Nov 1913	Ketela Ketela Ketela, karet, kopi Ketela, karet, kopi Ketela Ketela Ketela
The Galoehan Tapioca estate and Mill, Ltd. Surabaya	Ngadiluwih	Bolodewo Bedali I Bedali II Bedali III Bedali IV Bedali V Sumberjati Kebondalem I Kebondalem II Kunjang I Kunjang II Kunjang III Galuhan Bumirejo	15 Maret 1880 25 April 1883 26 Februari 1885 12 Juli 1887 10 Februari 1890 10 September 1895 22 Januari 1884 21 April 1883 3 Maret 1890 18 Agustus 1890 5 Mei 1895 12 Maret 1890 30 November 1886 9 Maret 1890	Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela, kelapa
NV Cultuur maatschappij"Brang-gahan"	Ngadiluwih	Bogo Alasduwet Selosari I Selosari II Bangsri I Bangsri II Sumberpucung I Sumberpucung II Sumberpucung III	30 November 1886 13 Maret 1890 21 Maret 1891 31 Maret 1892 25 April 1893 10 Mei 1894 27 Februari 1890 27 Februari 1890 27 Mei 1892	Ketela, kelapa Ketela Ketela Ketela Ketela Ketela, Ketela, tebu Ketela, tebu Ketela, tebu
Handels maatschappij Hoen Yang	Papar	Begendul	21 Juni 1895	Padi

Tabel 1.9.
Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914 (Lanjutan)

Nama Perusahaan	Distrik	Persil	Tahun perolehan *erfpacht*	Komoditas utama
Cultuur maatschappij Kenteng	Papar	Kenteng I Kenteng II Kenteng III Kenteng IV Kenteng V Besowo	5 Mei 1885 5 Mei 1885 5 Mei 1885 5 Mei 1885 28 April 1887 10 Oktober 1888	Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Kawerasan I Kawerasan II Kawerasan III Kawerasan IV Kencong I Kencong II Kencong III Kencong IV	1 Februari 1875 15 November 1878 21 April 1887 21 Juli 1890 22 April 1878 6 Januari 1877 8 Januari1879 30 Januari 1886	Tebu, padi Tebu, padi Tebu, padi Tebu, padi Tebu Tebu Tebu Tebu
Cultuur maatschappij Soerowinangoen	Pare	Surowinangun I Surowinangun II Mlancu I Mlancu II Mlancu III	23 September 1889 5 Oktober 1893 1 Agustus1885 29 Oktober 1892 5 Oktober 1892	Kopi, karet Kopi, karet Kopi, kakao, lada Kopi, kakao, lada Kopi, kakao, lada
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Jengkol I Jengkol II Jengkol III Jengkol IV Jengkol V Jengkol VI Jengkol VII	26 Maret 1878 19 Maret 1888 22 September 1889 5 April 1892 5 April 1892 5 April 1892 31 Mei 1894	Kopi, ketela, karet, tebu Kopi, ketela, karet, tebu Kopi, ketela, karet, tebu Kopi, ketela, karet, tebu Kopi, ketela, karet, tebu Kopi, ketela, karet, tebu Kopi, ketela, karet, tebu
Cultuur maatschappij "Pengadjaran"	Pare	Selostop I Selostop II Selostop III	10 Januari 1880 28 Mei 1884 14 Januari 1891	Kopi Kopi Kopi

Tabel 1.9.
Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914 (Lanjutan)

Nama Perusahaan	Distrik	Persil	Tahun perolehan *erfpacht*	Komoditas utama
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Dermo I Dermo II Dermo III Dermo IV	29 November 1886 17 Januari 1891 17 Januari 1891 27 Juni 1892	Tebu, agave Tebu, agave Tebu, agave Tebu, agave
Cultuur maatschappij "Soekaboemi"	Pare	Sukabumi I Sukabumi II Sukabumi III	28 Mei 1887 28 Mei 1887 11 Oktober 1892	Kakao, kopi Kakao, kopi Kakao, kopi
Than Kong Thuij	Pare	Kali Dermo	5 November 1888	Kopi
Koffie Plantage Pakellan	Pare	Pakellan	11 Februari 1889	Kopi, karet
Cultuur maatschappij "Poentjoe"	Pare	Puncu	11 Maret 1889	Kopi, karet
Cultuur maatschappij Mangli	Pare	Mangli I Mangli II	28 Februari 1881 23 Mei 1889	Kopi, karet, kakao Kopi, karet, kakao
NV Landbouw maatschappij Satak	Pare	Nobo I Nobo II Nobo III Nobo IV	23 Mei 1889 11 November 1889 9 Januari 1890 1 Juli 1889	Kopi, karet, kakao Kopi, karet, kakao Kopi, karet, kakao Kopi
Cultuur maatschappij Redjoagoeng	Pare	Rejoagung I\ Rejoagung II Rejoagung III Rejoagung IV	12 Nov 1895 12 Nov 1895 22 Desember 1896 1 Juli 1889	Kopi Kopi Kopi Kopi, kakao
Bogor-Pradah Cultuur maatschappij	Pare	Pradah I Pradah II	28 Desember 1912 1 Juli 1889	Kopi, karet, sereh Kopi, karet, sereh
Cultuur maatschappij Ngrangkah	Pare	Sumberglatik I Sumberglatik II	16 Februari 1892 23 juli 1889	Kopi, kakao, lada Kopi, kakao, lada
"Pawon koffie maatschappij	Pare	Pawon I Pawon II	23 Juli 1889 19 Agustus 1889	Kopi, agave, lada Kopi, agave, lada
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Kepung I Kepung II Kepung III Kepung IV	19 Agustus 1889 19 Agustus 1889 12 September 1890 31 Oktober 1889	Kopi, agave, lada Kopi, agave, lada Kopi, agave, lada Kopi, kakao

Tabel 1.9.
Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914 (Lanjutan)

Nama Perusahaan	Distrik	Persil	Tahun perolehan *erfpacht*	Komoditas utama
Cultuur maatschappij Redjoagoeng	Pare	Brumbung I Brumbung II	5 April 1897 7 November 1889	Kopi, kakao Kopi, kakao
Landbouw maatschappij Kebondoeren	Pare	Kebonduren I Kebonduren II Kebonduren III Kebonduren IV	7 November 1889 7 November 1889 27 November 1889 27 November 1890	Kopi, kakao Kopi, kakao Kopi, kakao Tebu, padi
Tan Kong Thaij	Pare	Punjul	27 Agustus 1890	Ketela, agave
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Kalasan I Kalasan II Kalasan III Kalasan IV Kalasan V Kalasan VI	27 November 1890 7 November 1890 25 April 1892 25 April 1892 25 April 1892 25 April 1892	Ketela, agave Ketela, agave Ketela, agave Ketela, agave Ketela, agave Ketela, agave
Cultuur maatschappij Badak	Pare	Sumberbringin I Sumberbringin II Sumberbringin III Pojokrejo	25 April 1892 25 April 1892 30 Agustus 1900 25 April 1892	Kopi, kakao, karet Kopi, kakao, karet Kopi, sereh, karet Kopi, sereh, karet
NV Landbouw maatschappij Satak	Pare	Damarwulan I Damarwulan II	21 Juni 1890 21 Juni 1890	Kopi Kopi
Cultuur maatschappij Ngrangkah	Pare	Ngrangkah I Ngrangkah II Ngrangkah III Ngrangkah IV	4 Agustus 1890 4 Agustus 1890 1 Agustus 1890 20 Januari 1914	Kopi, karet, kakao Kopi, karet, kakao Kopi, karet, kakao Ketela
J en H.W. van Heemstede Abeit	Pare	Kali Besowo	9 September 1889	Kopi, kakao, tembakau, lada
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Bakung III	9 September 1889	Kopi, kakao, tembakau

Tabel 1.9.
Daftar Perkebunan Swasta di *Afdeeling* Kediri 1914 (Lanjutan)

Nama Perusahaan	Distrik	Persil	Tahun perolehan *erfpacht*	Komoditas utama
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Bolorejo I Bolorejo II	12 September 1889 27 Agustus 1890	Tebu, kapuk Tebu, kapuk
Handelsvereeniging Amsterdam	Pare	Karangdinoyo I Karangdinoyo II Karangdinoyo III Karangdinoyo IV Karangdinoyo V Karangdinoyo VI KarangdinoyoVII Untung	18 Oktober 1890 18 Oktober 1890 15 November 1890 8 Februari 1897 10 Maret 1899 11 Februari 1910 28 Februari 1913 18 Juli 1892	Kopi, lada, kakao, agave Kopi, lada, kakao, agave Kopi, lada, kakao, agave Kopi, lada, kakao, agave Kopi, lada, kakao, agave Kopi, lada, kakao, agave Kopi, lada, kakao, agave Produk hutan

Sumber: Tidor Arif T. Djati dkk. *Kebijakan Perkebunan di Jawa Timur Masa Hindia Belanda* (Surabaya: Seri Naskah Sumber Arsip No. 15, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 2013), hlm. 144-148.

Seiring dengan ekspansi perkebunan, sirkulasi uang dalam masyarakat bertambah besar dan proses monetisasi masyarakat semakin meningkat. Sebelum menjadi bagian dari kekuasaan kolonial, penggunaan uang sudah dikenal dalam masyarakat Kediri. Namun demikian, gambaran secara rinci sulit untuk dikemukakan karena keterbatasan informasi sejarah. Data parsial yang tersedia dan bisa dijangkau mengindikasikan bahwa ketika Trunajaya ditaklukkan oleh gabungan pasukan Kompeni dan Mataram, dari istananya di Kediri berhasil disita beberapa peti yang berisi uang dolar Spanyol, serta emas batangan dalam jumlah besar.[93]

93 Thomas Stamford Raffles (2008), *op.cit.*, hlm. 522.

Tabel 1.10.
Jumlah Pembayaran Uang Per Kapita Per Tahun untuk Produk Komersial yang diserahkan kepada Pemerintah pada 1840-an

Tahun	Satuan (ƒ) gulden
1840	8,96
1842	14,55
1844	17,76
1846	17,98
1848	20,42
1850	20,62

Sumber: R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System 1830-1870* (Sydney: Allen and Unwin, 1994), hlm. 116.

Informasi parsial dari masa yang berbeda mengindikasikan bahwa pada periode tanam paksa pemerintah melakukan pembayaran uang kepada para penanam atas produk yang diserahkan. Data yang diberikan Elson (1994) memberi gambaran tentang besaran pembayaran uang per kapita per tahun untuk produk komersial yang diserahkan kepada pemerintah pada 1840-an. Seperti tampak pada Tabel 1.10, jumlah pembayaran uang yang diberikan kepada para penanam pada tahun 1840-an memperlihatkan adanya tren peningkatan. Perubahan ini agaknya terkait dengan volume produk yang diserahkan kepada pemerintah seiring dengan ekspansi yang terjadi pada area penanaman dan luas panen yang dihasilkan.

Kalkulasi yang dilakukan Baardewijk (1994) mengindikasikan bahwa untuk periode 1853-1864, pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk produk kopi saja rata-rata sebesar ƒ14,66 per kapita per tahun. Secara komparatif jumlah ini memang masih lebih rendah dibanding jumlah uang yang dibayarkan kepada penanam di Keresidenan Madiun sebesar ƒ18,42 dan Pasuruan sebesar ƒ46,15 untuk periode 1853-1864.[94] Sejumlah faktor menjelaskan perbedaan tingkat pembayaran yang diberikan kepada penanam antar keresidenan, di antaranya terutama adalah jenis produk dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk-produk agraris sangat sensitif

94 Frans Baardewijk, *op.cit.*, hlm. 175.

terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari kondisi lingkungan tempat produk-produk tersebut dibudidayakan, baik dalam hubungan dengan kondisi tanah, iklim, hama dan penyakit, maupun teknik budidaya tanaman. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat harga produk di pasaran yang juga berfluktuasi baik akibat persaingan antar produk sejenis yang berasal dari negara yang berbeda maupun kondisi persediaan produk.

Pada tahun 1920 pembayaran yang dilakukan industri gula di keresidenan kepada pekerja bumiputera sebesar ƒ11.459.000 untuk upah dan lain-lain. Jumlah ini menempati urutan terbesar ketiga di seluruh Jawa, setelah Keresidenan Surabaya dengan pembayaran sebesar ƒ17.921.000 dan Keresidenan Pasuruan sebesar ƒ13.765.000. Pihak industri gula di Kediri juga melakukan pembayaran untuk sewa lahan sawah sebesar ƒ1,347.000.[95] Melalui pembayaran yang dilakukan semakin banyak uang beredar dalam masyarakat. Hal ini tentu membawa pengaruh penting bagi perkembangan kehidupan ekonomi khususnya berbagai kegiatan di sektor industri dan perdagangan. Apalagi di luar sektor perkebunan, sektor pertanian rakyat juga terus menggeliat dan menjadi sumber penghidupan yang sangat penting terutama bagi penduduk bumiputera, seperti yang akan diuraikan pada bagian berikut.

PERTANIAN RAKYAT

Di samping sektor perkebunan barat, sektor pertanian rakyat menempati posisi penting di Keresidenan Kediri. Secara umum dapat dikatakan bahwa hingga menjelang pendirian DJB Kediri, sebagian besar lahan yang ditanami di Keresidenan Kediri digunakan untuk kegiatan pertanian rakyat. Ketiadaan data sejarah sejauh ini tidak memungkinkan untuk memotret secara eksak luasan lahan yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian rakyat di Kediri, tetapi gambaran umum mengenai Jawa kiranya juga merefleksikan kondisi yang berlaku di wilayah Kediri. Pada tahun 1922, yang merupakan bagian dari era kejayaan sektor perkebunan, lahan di Jawa yang digunakan untuk perkebunan besar

95 William J. O'Malley, "Perkebunan", hlm. 214.

sekitar 25 persen dari keseluruhan tanah pertanian, sedangkan pertanian rakyat menggunakan 75 persen tanah pertanian.[96]

Kegiatan pertanian di Keresidenan Kediri dilakukan baik di lahan sawah maupun tegalan. Keberadaan praktik pertanian sawah yang dilakukan rakyat jauh lebih tua dibanding sektor perkebunan. Keberadaan sawah di wilayah ini merupakan fenomena lama, yang terentang mundur pada ekspansi sawah dari Jawa Tengah abad ke-10.[97] Bahkan, pandangan lain yang dikemukakan Sutjipto Wirjosuparto menyatakan bahwa budidaya pertanian sawah di Kediri telah berkembang jauh lebih ke belakang lagi, bermula dari pertanian lahan kering yang dikembangkan oleh kaum pendatang dari daratan Asia Tenggara, yang bermigrasi ke daerah Sungai Brantas menjelang awal abad Masehi melalui pertanian sawah, menurut Sutjipto, merupakan bentuk adaptasi teknologis yang mereka lakukan melalui proses *trials and errors* terhadap lingkungan Sungai Brantas yang secara rutin membanjiri.[98] Secara umum sawah mengacu pada lahan yang dikelilingi pematang untuk mempertahankan genangan air yang diperlukan bagi budidaya tanaman berlumpur.[99]

Pada lahan sawah beragam tanaman dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Padi adalah tanaman pangan terpenting. Penanaman padi mulai dalam waktu berbeda di berbagai tempat, secara umum antara Oktober dan Desember. Waktu panen secara normal berlangsung Maret hingga Juni. Selama musim kemarau, tanaman palawija juga ditanam di sawah. Tegalan (*gaga*) sebaliknya ditandai ketiadaan irigasi dan terkait dengan tanaman yang memerlukan sedikit air seperti jagung, ketela, kacang-kacangan, dan tembakau. Semua tanaman itu kecuali kacang-kacangan diperkenalkan dari Amerika selama atau sesudah abad ke-16. Di antara beragam tanaman sekitar dekade awal abad ke-19, jagung adalah yang

96 *Landbouwatlas van Java en Madoera* (Weltevreden: Department van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1926), hlm. 44-45.

97 G.J.A. Terra, "Farm System in Southeast Asia" dalam *The Netherlands Journal of Agriculture Science,* 6, 3 (1958), hlm. 165-166.

98 Van Setten van der Meer, *Sawah Cultivation,* hlm. 2.

99 G.J. Vink, *Dasar Dasar Usaha Tani di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 174; Tentang ekosistem sawah, lihat misalnya Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1963), hlm. 28-37.

paling menonjol.[100] Dalam sistem tegalan, curah hujan berpengaruh dominan pada rotasi tanaman pertanian. Pada saat ada cukup curah hujan, tegalan mungkin digunakan untuk penanaman padi gaga atau jagung.

Statistik paling awal untuk Keresidenan Kediri pada tahun 1832 mengindikasikan bahwa terdapat lahan pertanian seluas 18.450 hektar, hampir 10 ribu hektar berupa lahan sawah dan sisanya merupakan lahan tegalan.[101] Keberadaan Sungai Brantas yang menyediakan suplai irigasi menjadi faktor penting yang menopang luasnya lahan sawah di wilayah Keresidenan Kediri. Seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk, luas area pertanian terus tumbuh. Pada tahun 1842 total lahan pertanian telah menjadi 27.300 hektar dengan luas tanaman petani pada tahun yang sama sebesar 25.500 hektar. Pada tahun 1850 total lahan pertanian bertambah luas menjadi 44.800 hektar dengan luas tanaman sebesar 41.300 hektar.[102] Angkanya terus tumbuh pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun 1865 total area sawah di Keresidenan Kediri seluas 65.400 hektar, di antaranya 37.700 hektar berupa lahan sawah.[103]

Produk utama pertanian rakyat adalah bahan pangan khususnya padi dan palawija (ketela, jagung, kedelai, kacang tanah, dan sayur mayur). Padi merupakan tanaman utama di sektor pertanian rakyat, meskipun palawija juga mempunyai kedudukan penting dalam ekonomi petani di Kediri. Signifikansi relatif tanaman padi dibanding palawija dalam pertanian rakyat tampak jelas dari perbandingan luas area untuk kedua jenis tanaman. Pada periode 1856-1865 luas penanaman padi berkisar antara 38.500 hingga 48.100 hektar, sedangkan luas tanaman palawija berkisar antara 6.500 hingga 17.500. Gambaran secara detail tersaji pada Tabel 1.11 Variasi dalam penanaman antara keduanya terjadi terutama karena faktor klimatis. Pada saat terjadi kemarau panjang penanaman palawija umumnya meningkat, sebagai bentuk strategi adaptasi para petani untuk mengatasi keterbatasan suplai irigasi dan menekan resiko

100 Thomas Stamford Raffles, *The History of Java,* Vol. 1 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978) (1817), hlm. 34, 121.

101 P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990, hlm. 58.

102 *Ibid.,* hlm. 61.

103 *Ibid.,* hlm. 67.

gagal panen mengingat tanaman padi memerlukan banyak air. Budidaya tanaman palawija lebih sedikit memerlukan air sehingga cocok dilakukan saat air irigasi langka akibat kemarau panjang.

Tabel 1.11.
Luas Tanaman Padi dan Palawija di Keresidenan Kediri
1856-1865 (hektar)

Tahun	Padi	Palawija
1856	42.400	6.500
1857	40.400	10.500
1858	41.400	9.100
1859	38.500	12.500
1860	40.100	12.700
1861	39.100	17.500
1862	41.600	10.000
1863	43.800	11.900
1864	42.400	9.000
1865	48.100	7.900

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990), hlm. 67.

Petani lebih menyukai padi untuk diusahakan di lahan sawah mereka karena tanaman ini memberikan kembalian neto lebih besar dibanding tanaman lain. Kalkulasi yang dibuat Van der Eng untuk Keresidenan Kediri periode 1875-1880 menghasilkan tingkat kembalian neto sebesar 127,40 gulden per hektar untuk padi sawah, sedangkan kembalian neto untuk berbagai tanaman palawija berkisar antara 11 gulden hingga 66 gulden. Hanya untuk kawasan dataran tinggi yang terbatas irigasinya saja, palawija memberi kembalian neto lebih tinggi, yakni ketela sebesar 65,5 gulden, jagung sebesar 25,0 gulden, dan kedelai sebesar 23,75 gulden, sedangkan kembalian neto padi dataran tinggi hanya sebesar 20 gulden.[104] Ketela memberikan kembalian tertinggi di daerah dataran tinggi karena pengusahaannya praktis tidak memerlukan perawatan yang rumit dan curahan banyak tenaga hingga ketela bisa dipanen hasilnya.

104 Pierre van der Eng, *Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Cange and Policy Impact since 1880* (Basingstoke: Macmillan, 1996), hlm. 170, 172.

Luas penanaman padi, yang pada masa tanam paksa berfluktuasi pada kisaran 38.000-48.000 hektar, memperlihatkan peningkatan pada masa liberal. Tren ini berlangsung hingga dua dekade awal abad kedua puluh. Peningkatan mencolok terjadi pada periode 1880-1885 dan 1885-1890 dengan kisaran 22.000-25.000 hektar dan periode 1910-1915 mencatat pertumbuhan paling tinggi, mencapai lebih dari 36.000 hektar, seperti dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 1.12.

Peningkatan penanaman padi pada dekade 1880-an terkait dengan terjadinya krisis yang menerpa industri gula. Persaingan ketat datang dari produk gula bit yang didorong pengembangannya di negara-negara Eropa, padahal Eropa merupakan pasar utama produk gula dari Jawa. Harga gula di Eropa turun secara drastis dari *f*19 per pikul pada tahun 1877 menjadi *f*9 per pikul pada 1884.[105] Industri gula terpaksa mengurangi area penanaman tebu dan lahan-lahan sawah yang semula diserahkan kepada pabrik-pabrik gula lewat kontrak sewa banyak yang dikembalikan. Lahan-lahan kembalian kemudian digunakan untuk penanaman padi. Peningkatan penanaman padi pada periode 1910-an terkait terutama dengan adanya perluasan lahan sawah seiring dengan perbaikan infrastruktur irigasi.[106] Proyek infrastruktur irigasi berskala besar dilaksanakan pemerintah kolonial di Keresidenan Besuki pada periode 1903-1911 yang mampu menjamin kebutuhan irigasi lahan sawah seluas 20.315 *bau*.[107] Lahan sawah di Kediri meningkat dari 114.000 hektar pada tahun 1903 menjadi 134.000 hektar pada 1915.[108]

105 Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967, hlm. 196.

106 P. van der Elst, "Krisis Budidaya Padi di Jawa", dalam Sajogyo dan William L. Collier, *Budidaya Padi di Jawa* (Jakarta: PT Gramedia dan Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm, 157.

107 Maurits Willem Ertsen, *Prescribing perfection. Emergence of an engineering irrigation design approach in the Netherlands East Indies and its legacy 1830-1990* (Rotterdam: Optima Grafische Communicatie, 2005), hlm. 14.

108 Peter Boomgaard dan J.L. van Zanden, *op.cit.,* hlm.76.

Tabel 1.12.
Luas Tanaman dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri 1870-1915 (hektar)

Tahun	Luas (x 1000 ha)	Produksi (x 1000 metrik ton)
1875	64,7	168,6
1880	74,2	222,4
1885	98,9	277,5
1890	121,0	254,6
1895	108,6	256,7
1900	116,6	362,1
1905	116,7	332,9
1910	115,1	292,9
1915	151,2	368,2

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990), hlm. 80-89, 116-119.

Seperti halnya yang berlaku pada komoditas padi, penanaman palawija memperlihatkan kecenderungan peningkatan luas area sejak pemberlakuan politik kolonial liberal hingga menjelang pendirian DJB Kediri pada 1923. Seperti dapat dilihat pada Tabel 1.13, peningkatan area palawija secara signifikan terjadi pada periode 1880-1885, 1885-1890, 1900-1905 dengan kisaran antara 35.000-42.000 hektar, tetapi peningkatan tertinggi berlangsung pada 1910-1915 dengan pertumbuhan sebesar lebih dari 71.000 hektar. Fenomena perluasan mencolok penanaman palawija tampak beriringan dengan perluasan yang berlangsung dalam penanaman padi. Faktor penyebab terjadinya sebagian serupa dengan penjelasan atas perluasan penanaman padi, bahwa sebagian lahan yang dikembalikan pabrik-pabrik gula kemudian juga ditanami para petani dengan palawija khususnya pada musim kemarau yang suplai irigasi terbatas. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan kontribusinya adalah perluasan lahan pertanian non-irigasi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus terjadi sehingga meningkatkan kebutuhan lahan dan mendorong pembukaan lahan-lahan baru. Lahan pertanian non-sawah di Kediri tumbuh dari 30.000 hektar menjadi hampir

40.000 hektar pada tahun 1900 dan seluas lebih dari 92.000 hektar pada tahun 1915. [109]

Tabel 1.13.
Luas Tanaman Palawija di Keresidenan Kediri, 1880-1915 (x 1000 ha)

Tahun	Palawija	Laju tumbuh / 5 tahun
1880	122,9	-
1885	164,9	42,0
1890	200,7	35,8
1895	215,9	15,2
1900	230,0	14,1
1905	264,5	34,5
1910	279,0	14,5
1915	350,6	71,6

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990), hlm. 86-89.

Berbagai macam tanaman palawija dibudidayakan kaum petani (Tabel 1.14). Data tahun 1903 memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis tanaman palawija dan luas area penanaman baik sebagai tanaman utama maupun tanaman kedua yang diusahakan dalam pertanian rakyat.[110] Kedelai, jagung, dan kacang tanah merupakan tanaman palawija yang penting di Keresidenan Kediri dari segi luas. Popularitas kedelai dalam pertanian rakyat berkaitan erat dengan pentingnya komoditas ini dalam konsumsi pangan penduduk. Tiga produk utama berbahan dasar kedelai yang sangat penting dalam konsumsi masyarakat adalah tahu, tempe, dan kecap.[111] Sementara itu, ketela dan jagung menjadi bahan pangan pengaman pada masa kesulitan mendapatkan beras (paceklik). Kaum petani juga mengusahakan tanaman tembakau dan tebu. Hal ini menunjukkan bahwa kaum petani Kediri tidak hanya mengusahakan tanaman pangan berusia pendek di lahan, melainkan juga

109 Data dihitung dari total lahan dikurangi luas sawah yang disebutkan dalam Boomgaard dan van Zanden, *Changing Economy,* hlm. 75-76.

110 *Ibid.*, hlm. 105.

111 Peter Boomgaard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880*, hlm. 93.

mengembangkan jenis tanaman yang umumnya banyak dikembangkan dalam skala komersial oleh perusahaan perkebunan Barat. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan kepekaan kaum petani dalam menanggapi berbagai peluang pasar, bukan hanya berurusan dengan tanaman-tanaman subsistensi demi menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang menopang kelangsungan hidup rumah tangga.

Tabel 1.14.
Tanaman Palawija yang diusahakan Kaum Petani Kediri, 1903 (hektar)

Jenis Tanaman	Luas
Ketela	7.908
Jagung	26.261
Ubi	4.473
Kacang tanah	24.231
Kedelai	28.248
Tembakau	9.321
Tebu	8.668
Indigo	1.147
Kentang	123
Bawang Merah	43
Lainnya	9.059

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990), hlm. 105.

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Di luar sektor perkebunan dan pertanian, sebagian penduduk Keresidenan Kediri menggeluti berbagai kegiatan ekonomi termasuk di sektor industri dan perdagangan. Arti penting sektor industri dan perdagangan dalam konteks ekonomi wilayah Kediri dapat dilihat dari proporsi keterlibatan jumlah angkatan kerja dalam sektor-sektor ini. Data dari Radin Fernando menunjukkan bahwa pada tahun 1880 total angkatan kerja di Keresidenan sebanyak 123.660 orang. Dari jumlah ini mereka yang menggeluti perdagangan sebanyak 7.201 orang atau sebesar 5,8 persen dari total angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja yang menerjuni sektor

manufaktur sebanyak 4.246 orang atau 3,4 persen dari total angkatan kerja. Selain itu, terdapat pula 2.227 orang atau 1,8 persen angkatan kerja yang menggeluti sektor pelayanan masyarakat dan 2.730 orang atau 2,2 persen angkatan kerja menerjuni sektor pelayanan.[112] Secara umum dalam kajian yang membahas secara komprehensif kehidupan di pedesaan Jawa pada masa tanam paksa, Elson (1994) membedakan tiga tipe industri, yakni industri pemrosesan produk agraris, industri manufaktur, dan industri jasa.[113] Ketiga tipe industri ini juga merepresentasikan realitas historis di Keresidenan Kediri.

Industri pemrosesan produk agraris menonjol di Kediri karena wilayah ini merupakan produsen produk perkebunan dan pertanian seperti tebu, kopi, tembakau, karet, padi, jagung, ketela, dan beberapa produk lain. Industri pemrosesan produk perkebunan yang utama adalah industri gula. Pabrik gula yang ada di Keresidenan Kediri pada tahun 1911 adalah Pabrik Gula Badas, Pabrik Gula Bogokidoel, Pabrik Gula Djatie, Pabrik Gula Garoem, Pabrik Gula Kawarassan, Pabrik Gula Kentjong, Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Menang, Pabrik Gula Meritjan, Pabrik Gula Minggiran, Pabrik Gula Modjopanggoeng, Pabrik Gula Nganjoek, Pabrik Gula Popoh, Pabrik Gula Pesantren, Pabrik Gula Purwoasri, Pabrik Gula Soemberdadie, dan Pabrik Gula Tegowangi.[114] Dengan pabrik gula sebanyak 17 buah, Keresidenan Kediri menempati posisi kedua wilayah keresidenan di Jawa Timur yang mempunyai pabrik gula paling banyak, setelah Keresidenan Surabaya dengan jumlah pabrik gula sebanyak 35 buah.[115]

Jumlah pabrik gula di Keresidenan Kediri pada tahun 1911 tersebut sekaligus memperlihatkan terjadinya peningkatan secara tajam dibanding periode sebelumnya. Jumlah pabrik gula di keresidenan ini pada akhir masa Tanam Paksa (1870) tercatat sebanyak 6 pabrik. Salah satu pabrik gula yang berasal dari era tanam paksa adalah PG Pesantren, didirikan pada tahun 1849 dan dikelola oleh orang Tionghoa yang memproduksi gula

112 M.R. Fernando, "Pertumbuhan Kegiatan Ekonomi Nonpertanian Bumiputera di Jawa 1820-1880", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 133-134.

113 R.E. Elson, *op.cit.,* hlm. 266.

114 Muhamad Faizin, *op.cit.,* hlm., hlm. 64-65.

115 *Ibid.,* hlm. 64.

untuk pemerintah. Pada tahun 1890 pabrik ini dialihkan pengelolaannya pada perusahaan swasta, yakni Javasche Cultuur Maatschappij.[116] Pabrik gula yang muncul pada era liberal hingga menjelang pendirian DJB di antaranya adalah PG Meritjan yang didirikan pada tahun 1883 milik Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij (NILM) yang berpusat di Amsterdam dengan cabang di Surabaya,[117] yang juga pemilik Pabrik Gula Ngandjoek. Selain itu, sejumlah pabrik gula lainnya di Kediri dimiliki oleh NV Handelsvereeniging Amsterdam (HVA) dengan cabang di Surabaya, yakni PG Kawarassan, PG Minggiran, PG Kentjong, PG Menang, PG Tegowangi, PG Garoem, PG Soemberdadie.[118]

Gambar 1.9. Kompleks Pabrik Gula Meritjan Kediri di Pinggir Sungai Brantas Tahun 1925

Sumber: Koleksi KITLV 18226

116 Siti Nurhadisah Baroroh, *Peningkatan Sistem Produksi Gula di Pabrik Gula Pesantren Kediri Tahun 1890-1940*, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 31; Amalia Husnul Khotimah dan Dina Dwikurniarini, *Perkembangan Pabrik Gula Pesantren di Kediri 1935-1956*, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah FIS Universitas Negeri Yogyakarta,* Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hlm 239.

117 Muhamad Faizin, *op.cit.*, hlm. 59.

118 Koleksi Perpustakaan P3GI Pasuruan, *Jaarboek voor Suikerfabriekanten op Java jaargang 1913/1914,* hlm. 314; Muhamad Faizin, *ibid.*, hlm. 115.

Industri pemrosesan produk agraris lainnya yang berkembang di Kediri adalah pabrik-pabrik pengolahan kopi, karet, tapioka, minyak kelapa, dan beberapa pabrik lainnya. Informasi lengkap mengenai pabrik-pabrik ini sayangnya lebih terbatas dibanding pabrik-pabrik gula yang secara kuat menampilkan unit-unit khusus yang padat teknologi, modern dan membentuk klaster-klaster tersendiri yang berjarak dan terpisah dari lingkungan sekitar. Informasi yang fragmentaris hanya menyebutkan pabrik-pabrik yang memproses produk kopi, karet, tapioka, minyak kelapa beroperasi di Kediri, di antaranya beberapa pabrik tapioka yang dioperasikan NV Handelsvereeniging Amsterdam (HVA) dan The Galoehan Tapioca Estate and Mill. Dapat dipastikan bahwa banyak di antara perkebunan kopi, karet, kakao, dan produk lainnya juga mendirikan pabrik-pabrik pemrosesan yang di kompleks perkebunan mereka. Satu diantaranya adalah pabrik pengolahan kopi milik Perusahaan Perkebunan Kopi Besowoh berikut ini.

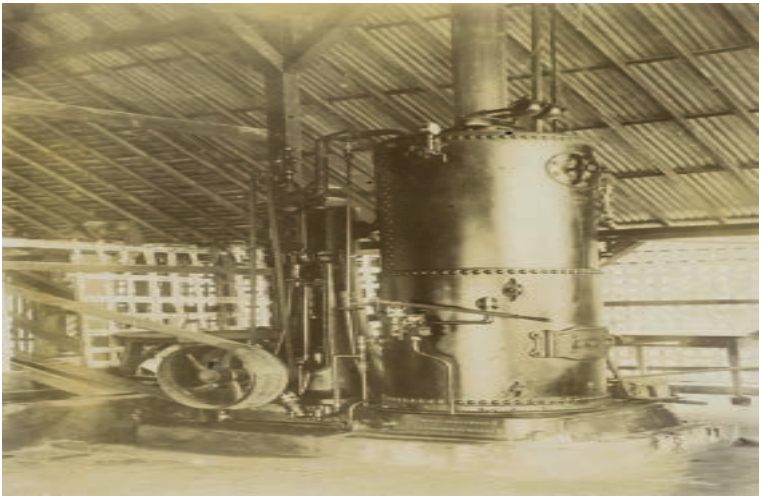

Gambar 1.10. Pabrik Pengolahan Kopi Perkebunan Besowo Kediri
Sumber: Koleksi KITLV 2144506

Industri manufaktur juga menjadi sektor yang berkembang di wilayah Kediri. Pada masa Kerajaan Kediri disebutkan bahwa pembuatan

barang-barang pecah belah dan barang-barang yang terbuat dari logam merupakan objek yang dikenai pajak dan menjadi sumber penghasilan istana. Bersama sumber lain seperti pajak pengadaan garam dan minyak, penjualan ternak dan produksi perahu ikut menopang kemampuan kerajaan dalam mengembangkan teknologi dan gaya hidup, serta membiayai angkatan perang kerajaan.[119] Dapat dipastikan bahwa kegiatan industri kerajinan tetap menjadi kesibukan sebagian penduduk bumiputera Kediri pada masa kolonial. Pada masa pemberlakuan sistem tanam paksa misalnya dilaporkan bahwa pada 1850 kaum perempuan di pedesaan Kediri masih aktif dalam kegiatan menenun dan membatik kain.[120] Selanjutnya, sebuah laporan dari awal abad ke-20 menyebutkan bahwa industri bumiputera yang banyak berkembang di Kediri adalah kerajinan barang-barang dari emas dan perak, penyamakan kulit, dan pembuatan barang pecah belah.[121]

Gambar 1.11. Pabrik Genteng di Pare
Sumber: Koleksi Tropenmuseum TMnr_10014174

119 Edi Sedyawati, *op.cit.*, hlm. 13.

120 R.E. Elson, *op.cit.,* hlm. 275.

121 H. Blink, *Nederlandsch Oost en West Indie, Geographisch en Economisch Beschreven II* (Leiden: E.J. Brill, 1907), hlm 167-169; Indriyanto (2015), *op.cit.*, hlm. 309.

Industri jasa paling mencolok di Kediri sebelum pendirian DJB adalah industri transportasi yang mendukung mobilitas barang dan penumpang di kawasan ini. Salah satu pelaku utama dalam industri ini, seperti telah disebutkan dimuka, adalah Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM). Perusahaan transportasi swasta ini dioperasikan dengan Dewan Direksi yang terdiri dari C.E. van Kesteren sebagai direktur utama, P.C. Huyser sebagai ketua komisaris, Augustus Janssen sebagai sekretaris, dan J.K. Kempees sebagai ketua dewan direksi. KSM memegang hak konsesi pengelolaan layanan transportasi trem di wilayah Kediri dengan jangka waktu selama 99 tahun, berdasarkan Keputusan Pemerintah, *Gouvernement Besluit* No. 42 tertanggal 31 Desember 1894.[122] Pada tahun 1908 dilaporkan bahwa jumlah penumpang kereta KSM mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Pada tahun 1918 jumlah penumpang tumbuh menjadi sekitar 1,8 juta orang.[123] Estimasi untuk Distrik Pare saja yang diberikan Geertz menyebutkan bahwa pengangkutan barang mencapai 300.000 metrik ton pada tahun 1915, meningkat dari 8.000 metrik ton pada tahun 1900.[124] Gambaran mengenai jumlah penumpang KSM pada periode 1912-1916 secara jelas disajikan pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15.
Jumlah Penumpang KSM Berdasarkan Kelas Tahun 1912-1916

Kelas	Tahun				
	1912	1913	1914	1915	1916
Kelas 1	5.545	5.993	5.883	5.910	5.412
Kelas 2	26.469	28.082	28.338	27.145	30.336
Kelas 3	1.434.838	1.578.799	1.622.177	1.604.684	1.787.554
Jumlah	**1.466.852**	**1.612.874**	**1.656.398**	**1.637.739**	**1.823.802**

Sumber: M. Saichurrohman, "Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri, *Skripsi* (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015), hlm. 99.

Dari layanan pengangkutan yang dilakukan, KSM pada tahun 1911 membukukan penghasilan neto sebesar *f*432.218,24. Rata-rata

122 Tim Telaga Bakti Nusantara, *op.cit.,* hlm. 175-176.

123 M. Saichurrohman, *op.cit.*, hlm. 98.

124 Clifford Geertz, *op.cit.,* hlm. 32.

pendapatan untuk setiap kilometer rel adalah sebesar *f*9,62.[125] Peningkatan jumlah penumpang dan volume muatan berdampak pada semakin besarnya pendapatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada periode 1896-1900, pendapatan neto KSM mencapai *f*294.119 dan terus naik menjadi *f*802.561 pada periode 1901-1905. Pada periode 1906-1910 pendapatan perusahaan telah membukukan pendapatan neto sebesar *f*1.525.225 dan sebesar *f*2.031.395 pada periode 1916-1920.[126]

Gambar 1.12. Trem di Halte Karang Dinajoh pada Rute Pare-Kepung Kediri Tahun 1910
Sumber: Koleksi KITLV 409084

Selain industri transportasi kereta api yang dijalankan KSM, layanan jasa transportasi lain juga berkembang di Kediri. Mobilitas barang dan penumpang di wilayah Kediri juga ditopang layanan transportasi yang disediakan perusahaan otobus yang mengandalkan pemanfaatan jaringan jalan raya, tetapi keterbatasan informasi tidak memungkinkan paparan secara rinci. Hal yang sama juga berlaku untuk perusahaan jasa transportasi sungai. Dari sedikit informasi yang tersedia, diketahui tentang adanya transportasi dengan perahu yang beroperasi menyusuri Sungai Brantas, melayani pengangkutan barang dan penumpang dari

125 Hafid Rofi Pradana, *loc.cit*.

126 Saichurrohman, "Perkembangan", hlm. 100.

Tulungagung dan Kediri hingga Surabaya. Menurut taksiran Van Deventer (1904),[127] rata-rata terdapat 20-30 perahu per bulan pergi ke Surabaya dengan menggunakan perahu compreng yang terbuat dari kayu jati dengan kapasitas muatan 10 *koyang* (1 *koyang* = 1.792,32 kilogram).

Perdagangan yang penting di Keresidenan Kediri adalah candu. Perdagangan candu di wilayah ini dikuasai oleh orang-orang Tionghoa terutama Tan Kok Tong dan Han Liong Ing. Tan Kok Tong memegang monopoli penjualan candu di Kediri, sedangkan Han Liong Ing, seorang Letnan Tionghoa yang tinggal di Berbek (Kertosono) yang memimpin Kongsi Kediri.[128] Selain menguasai Kediri, Han Liong Ing juga memainkan peranan besar dalam perdagangan candu di beberapa keresidenan pantai utara Jawa mulai dari Cirebon hingga Jepara. Han Liong Ing menguasai perdagangan candu di Keresidenan Rembang sejak 1884 dan pada tahun 1884 menambahkan Jepara dan tiga residensi ke dalam jaringan kongsinya. Kongsi Kediri terutama lewat direktur pelaksananya, Liem Kok Sing, mempunyai hubungan kerjasama dan pribadi yang sangat akrab dengan Charles TeMechelen, seorang Eurasia keturunan pengusaha tembakau Belanda dengan istri berdarah campuran Tionghoa yang memimpin sebuah satuan tugas anti penyelundupan candu di Jepara yang dibentuk Gubernur Jenderal Frederik s'Jacob pada 1883, dan menjelma menjadi satu dari dua kongsi besar yang menguasai penjualan candu di wilayah Jawa Tengah.[129] Bandar-bandar opium lain yang beroperasi di Kediri selain Tan Kok Tong dan Han Liong Ing adalah Kwee Siwe Toan (1873-1874), Tan Tong Haij (1875-1877, 1884-1886), Tan Hwat Hien (1890-1891), Han Boen Kiet (1892-1894), dan Djie Thay Hien (1895-1900).[130]

Penjualan candu mengalami kemerosotan pada saat terjadi krisis pada pertengahan 1880-an yang ditandai jatuhnya harga-harga produk

127 C.Th. van Deventer, *Overzicht van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1904), hlm. 107-108; Indriyanto (2015), *op.cit.,* hlm. 95-96.

128 Ahmad Fathoni dan Sarkawi B. Husain, "Pelaksanaan Opiumpacht: Monopoli Perdagangan Opium Melalui Perantara Bandar di Keresidenan Kediri, 1833-1900', dalam *Lembaran Sejarah,* Vol. 16 No. 1 (2020), hlm. 54.

129 James R. Rush, *op.cit.,* hlm. 47, 96, 162, 176.

130 Ahmad Fathoni dan Sarkawi B. Husain, *loc.cit.*

perkebunan dan pertanian. Pada 1885 kondisi keuangan Kongsi Kediri goyah dan hanya karena campur tangan TeMechelen, kongsi ini masih diizinkan mengikuti lelang pengelolaan candu. Akan tetapi krisis yang memuncak di pedesaan menyebabkan pendapatan dari perdagangan candu anjlok dan Kongsi Kediri tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya terkait pembayaran fee yang harus dilakukan. Kesulitan memenuhi kewajiban bahkan juga dialami Kapiten Tionghoa Kediri, Tan Kok Tong yang menguasai penjualan candu di Kediri dengan dukungan usaha *real estate*.[131]

Untuk mencegah bangkrutnya Kongsi Kediri, TeMechelen tergerak untuk membantu dengan memintakan keringanan dan penundaan kewajiban keuangan terkait pembayaan fee kepada pemerintah dan kongsi menaruh harta kekayaannya dalam rupa bangunan, hipotek, dan surat berharga sebagai jaminan. Intervensi lebih jauh dilakukan dengan memintakan perpanjangan kepada pemerintah sehingga Kongsi Kediri bisa tetap bertahan melewati tahun 1889 yang penuh kesulitan. Dengan dukungan penuh Residen Kediri dan TeMechelen, Tan mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk membayar hutangnya sebesar lebih dari *f*700.000 pada akhir kontraknya, dengan cara mencicil sebesar *f*75.000 per tahun mulai tahun 1890.[132] Pemberlakuan kebijakan politik etis sejak 1900 bermuara salah satunya pada pembentukan institusi bernama Opium Regie. Dengan sistem ini di setiap keresidenan dibentuk depot opium pusat yang dipegang oleh orang Eropa dengan jaringan toko opium resmi yang dikelola pegawai bumiputera. Pembentukan Opium Regie, dengan demikian, telah mengalihkan perdagangan candu yang semula dikuasai orang-orang Tionghoa ke tangan pemerintah kolonial.[133]

Perdagangan di Kediri melibatkan para pedagang yang datang dari luar daerah. Dilaporkan misalnya produk tembakau rakyat di daerah ini dibeli oleh para pedagang bumiputera yang dari arah barat seperti Surakarta dan Madiun, dan dari timur oleh para pedagang yang datang dari Kota Surabaya.[134] Sementara itu, perdagangan di pusat Kota Kediri ditandai

131 James R. Rush, *op.cit.,* hlm. 181-182.

132 James R. Rush, *op.cit.,* hlm. 185-186.

133 *Ibid.,* hlm. 218-226.

134 R.E. Elson, *op.cit.,* hlm. 265.

dengan perkembangan pasar dan pertokoan. Pada saat pembentukan *Gemeente* Kediri, terdapat empat pasar utama di Kota Kediri, yakni Pasar Alun-alun, Pasar Bangsal, Pasar Paing, dan Pasar Bandar. Untuk mengelola pasar-pasar tersebut, pemerintah membentuk perusahaan pasar dengan salah satu tugas utamanya mengurusi pembayaran retribusi pasar. Selain transaksi perdagangan di pasar-pasar, kegiatan perdagangan juga berlangsung di kawasan pertokoan yang berlokasi di Jalan *Dhohostraat*, sebagai jalur utama Kota Kediri bagian timur, dan berdekatan dengan kawasan Pecinan di *Chinese voorstraat* dan *Klentengstraat*.[135]

Aktivitas perdagangan di kompleks pertokoan di Kota Kediri didominasi oleh pedagang Tionghoa dan sebagian toko dijalankan oleh orang Eropa. Toko milik orang Tionghoa yang cukup terkenal adalah Toko Soerabaja, milik keluarga Tan Khoen Swie, yang juga dikenal luas dalam bidang usaha penerbitan berlokasi di *Dhohostraat,* yakni *Boekhandel En Schryf Behoefte Tan Koen Swie*. Toko-toko lain di kawasan *Dhohostraat, Klentengstraat,* maupun *Alon-alonstraat* memperdagangkan beraneka macam barang kebutuhan dan jasa layanan. Toko Snelpers yang terletak di Jalan *Alon-alonstraat* memperdagangkan alat tulis. Terdapat pula sejumlah agen penyalur otomobil, suku cadang dan aksesorisnya seperti N.V. Behn, Meyer & Co., N.V. Soerabaiasche Automobil mij, N.V. Velodrome, dan Autohandel A. Smelt. Agen-agen ini menyalurkan mobil dari berbagai merek, di antaranya Ford, Chevrolet, Fiat, Whippet, dan Buick. Sementara itu, beberapa toko menyediakan perlengkapan suku cadang dan aksesoris mobil seperti misalnya Toko Volta dan Toko Soerabaja.[136]

Kegiatan perdagangan tidak hanya berlangsung di Kota Kediri saja, melainkan juga di tingkat distrik. Geertz (1986) menggambarkan kegiatan perdagangan di Distrik Pare, salah satu distrik Kediri yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan perkebunan. Menurut Geertz, sektor perdagangan di Pare melibatkan empat golongan pedagang, yakni (1) sekelompok kecil pedagang bahan sandang berkelas yang memperdagangkan kain batik; (2) sekelompok pedagang desa semi professional atau pedagang kota berskala kecil; (3) golongan pedagang

135 M. Saichurrohman, *op.cit.,* hlm. 86-94.

136 *Ibid.*

profesional yang berjualan barang seperti kain, rokok, barang kelontong, barang berbahan kulit, dan makanan siap santap, dan (4) pedagang Tionghoa yang menjual produk impor dan berbagai barang yang dijual ketiga kelompok pedagang lainnya.[137]

Identifikasi yang dilakukan Geertz lebih jauh menunjukkan karakteristik masing-masing golongan pedagang. Golongan pedagang batik bertarif mahal umumnya berasal dari Jawa Tengah. Golongan ini jumlahnya sedikit dan gaya hidup mereka lebih dekat pada priyayi pemerintahan. Tidak jarang mereka adalah istri pegawai pemerintah yang mencari penghasilan tambahan dari sedikit usaha yang terbuka bagi mereka sesuai dengan etiket priyayi. Golongan ini bertindak sebagai agen dari para pedagang besar dari Surakarta atau Yogyakarta yang datang secara teratur untuk mendistribusikan barang dagangan batik mereka. Golongan kedua adalah pedagang semi profesional atau bersifat sampingan. Mereka terdiri dari para istri petani yang berjualan produk-produk pekarangan dan pertanian atau para istri perajin yang menjual barang-barang kerajinan rumahan. Usaha mereka digolongkan sekadar untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Golongan ketiga mencakup para pedagang profesional, umumnya adalah para pedagang keliling yang berasal dari luar Kediri, terutama daerah pantai utara Jawa seperti Kudus, Demak, Tuban, Gresik, dan Surabaya, bahkan sebagian lainnya datang dari Madura dan Bawean. Golongan keempat, yakni pedagang Tionghoa, yang hampir semuanya pada masa menjelang pendirian DJB atau sebelum 1920-an adalah golongan peranakan, artinya yang lahir di Hindia Belanda. Mereka menjalankan toko-toko kecil, rumah gadai, peminjaman uang, penjualan candu, perjudian, pergudangan, dan penggilingan padi. Kegiatan ekonomi mereka tergolong sudah mapan. [138]

Menjelang kehadiran DJB Kediri dapat dikatakan bahwa wilayah Kediri menjelma menjadi sebuah panggung pedalaman yang tengah mengalami pertumbuhan kemakmuran. Wilayah Kediri dengan kedudukan geostrategisnya yang menguntungkan dan masyarakat yang semakin menguat kemajemukannya dari segi etnis dan bangsa

137 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 73.

138 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 73-77.

telah memperlihatkan kehidupan perekonomian dinamis. Dinamika politik kawasan Kediri yang panjang, sejak berkedudukan sebagai pusat kekuasaan politik utama, tetapi kemudian merosot sebagai wilayah vasal kerajaan-kerajaan yang silih berganti menguasai Jawa, berujung pada pengintegrasian Kediri di bawah kekuasaan kolonial. Melemahnya dinamika politik tidak membawa wilayah Kediri kehilangan kedudukan dan kehabisan peran pentingnya karena di bawah kekuasaan kolonial potensi yang dimiliki pedalaman Kediri kemudian dikembangkan dalam kerangka perekonomian kolonial. Kurang lebih selama sembilan puluh tahun pertama sejak dikuasai langsung oleh Belanda pada 1830, tujuan menjadikan Kediri menguntungkan secara ekonomi bagi Belanda telah membuat wilayah Kediri sebagai panggung pedalaman yang mementaskan proses sosio-ekonomis yang sangat dinamis yang melibatkan berbagai kelompok dan meliputi beragam sektor ekonomi dalam perlombaan dan persaingan mengejar mimpi kemakmuran. Kelanjutan kisah pengejaran mimpi kemakmuran di pedalaman Kediri dan peran dinamis yang dimainkan DJB Kediri dalam panggung pedalaman Jawa ini akan menjadi pusat perhatian pada uraian bab selanjutnya.

BAB 2

De Javasche Bank dan Dinamika Perekonomian Kediri

Menjelang pendirian De Javasche Bank Agentschap Kediri, wilayah Kediri telah berkembang menjadi sebuah pedalaman dengan kegiatan ekonomi yang begitu dinamis. Pendirian De Javasche Bank (DJB), yang berkantor pusat di Batavia, kemudian secara bertahap ditopang dengan sejumlah kantor keagenan di berbagai wilayah Hindia Belanda, termasuk di Keresidenan Kediri, merupakan kejadian-kejadian penting yang mewarnai perekonomian kolonial. Ekspansi jaringan keagenan DJB, pada satu sisi, merupakan bagian dari pertumbuhan Hindia Belanda sebagai sebuah perekonomian kolonial yang semakin terintegrasi. Proses ini mendapatkan pula kontribusi dari elemen-elemen penopang lainnya, seperti pembentukan secara gradual negara kolonial dan sistem komunikasi-transportasi yang mengintegrasikan Hindia Belanda dengan Jawa sebagai pusatnya.[1] Sementara itu, kehadiran keagenan DJB dalam panggung regional mencerminkan urgensi dan ekspektasi yang berkembang atas kawasan yang menjadi lokasi, baik dari segi pertumbuhan yang telah dicapai maupun berbagai potensi ekonominya yang diyakini menjanjikan peluang menghasilkan keuntungan.

Bab ini akan menguraikan pendirian DJB Agentschap Kediri, perkembangan perekonomian, dan masyarakat Kediri sejak pendirian institusi ini hingga runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda akibat ekspansi

1 H.W. Dick, "Munculnya Ekonomi Nasional 1808-1990-an" dalam J. Th. Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terjemahan Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 30.

militer Jepang. Dalam bab ini juga akan diuraikan perkembangan perekonomian Kediri pada masa kejayaan perkebunan 1920-an dan masa depresi ekonomi 1930-an, serta memperlihatkan keterkaitan dengan keberadaan dan peran yang dimainkan DJB Kediri di dalamnya.

PENDIRIAN DE JAVASCHE BANK KEDIRI

Kehadiran De Javasche Bank dan jaringan agennya merupakan bagian dari proses panjang dalam manajemen kolonial yang dijalankan untuk merealisasikan keinginan menjadikan koloni sebagai sumber keuntungan. Pembentukan DJB telah didahului pembentukan institusi yang mencerminkan pencarian dan eksperimental akan bentuk-bentuk kelembagaan finansial yang diperlukan kehadirannya dalam menjawab kebutuhan kolonial untuk mendukung pemerintah maupun komunitas Barat dalam menjalankan usaha di wilayah Hindia Belanda. Pencarian ini berlangsung melalui proses *trials and errors* sebelum akhirnya terbentuk institusi DJB yang dipandang dapat menjawab kebutuhan dengan serangkaian perbaikan dilakukan seiring dengan dinamika yang terjadi. Kehadiran DJB dan jaringan keagenan yang dimilikinya, termasuk Agentschap Kediri, penting dipahami dalam proses yang panjang ini.

De Javasche Bank bukanlah bank yang pertama berdiri di Hindia Belanda. Keberadaan institusi perbankan di Hindia Belanda telah muncul sejak masa VOC dengan didirikannya Bataviasche Bank van Leening pada 20 Agustus 1746. Aktivitas yang dijalankan bank ini kurang lebih masih menyerupai lembaga pegadaian, yakni memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas, perak, permata, barang dagangan, dan barang-barang berharga lainnya. Bank ini juga bertugas menampung kelebihan uang para pegawai VOC demi memperoleh bunga dan menggerakkan kegiatan perdagangan. Modal Bank van Leening meliputi 300 lembar saham dengan nilai masing-masing sebesar 1.000 ringgit. Sebanyak 200 lembar saham dikuasai pemerintah dan selebihnya dimiliki sejumlah pihak. Praktik tidak sehat di antara petinggi VOC yang ikut berinvestasi dengan pungutan bunga yang tinggi membuat Bank van Leening tidak mampu mengembangkan kapitalnya dan berjalan terseok-seok. Untuk

mengatasinya pemerintah kolonial memutuskan mengubah statusnya dari bank gadai menjadi bank wesel. Langkah ini menghasilkan pembentukan De Bank-Courant en Bank van Leening yang secara resmi didirikan pada 1 September 1752.[2]

Kegiatan De Bank-Courant en Bank van Leening hingga tingkat tertentu mampu mendorong perkembangan sektor perdagangan semakin dinamis. Hal ini dimungkinkan karena sertifikat deposito atau kertas bank yang berfungsi sebagai uang dengan cepat beredar, tertarik oleh kemudahan untuk menguangkannya kapan saja. Akan tetapi, setelah berjalan hampir 40 tahun problem yang membelit bank ini mulai terkuak dengan adanya kekurangan uang dalam kas sebesar 63.000 ringgit pada tahun 1790. Akibatnya, melalui keputusan tertanggal 5 April 1794, pemerintah menyatakan bank ini ditutup dan segala kewajiban keuangan diambil alih oleh pemerintah untuk penyelesaiannya.[3] Namun, tidak lama setelahnya VOC dinyatakan bangkrut akibat terbelit korupsi yang merajalela sehingga VOC kemudian sering ditafsirkan sebagai *Vergaan onder Corruptie* (mati karena korupsi).[4]

Pembubaran VOC tidak lantas membuat tugas pemerintah kolonial menjadi lebih ringan. Pengelolaan perekonomian Hindia Belanda justru dirasakan pemerintah menjadi semakin berat karena banyak hal yang harus ditangani sendiri, baik terkait kebijakan moneter maupun fiskal secara bersamaan, belum lagi soal kegiatan ekspor impor antara Hindia Belanda dengan negeri induk mengharuskan pendatangan emas dan perak dari Negeri Belanda untuk menutup defisit dalam neraca perdagangan. Kesulitan-kesulitan ini telah memicu gagasan-gagasan tentang perlunya pembentukan bank sirkulasi di Hindia Belanda sejak 1816. Namun, gagasan tersebut ternyata tidak serta-merta dapat terealisasi dengan segera karena lemahnya komitmen Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Hal ini memaksa Raja Belanda Willem I melakukan intervensi pada 1825, yang kemudian ditindaklanjuti Menteri Urusan Jajahan J.C. Baud pada 1826. Raja Willem I mengirim Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris

2 Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 7-8.

3 *Ibid.*, hlm. 9.

4 J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), hlm. 49.

Jenderal Hindia Belanda Du Bus Gisignies agar segera membentuk sebuah bank di Jawa yang beroperasi berdasarkan hak oktroi (wewenang dan hak tunggal berjangka waktu tertentu yang diberikan pemerintah) dengan melibatkan Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM).[5]

Di bawah koordinasi Komisaris Jenderal Du Bus Gisignies, De Javasche Bank akhirnya berhasil didirikan pada tanggal 24 Januari 1828. Pendirian DJB ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris Jenderal Nomor 25 tanggal 24 Januari 1828. Tanggal ini menjadi tanggal kelahiran DJB, meskipun dalam praktiknya bank ini baru mulai beroperasi pada 8 April 1828. Modal dasar DJB ditetapkan sebesar *f*4 juta yang terbagi atas 8.000 saham, meskipun dalam praktiknya saham yang ditempatkan hanya senilai *f*2 juta. Atas perintah Raja Willem I, pemerintah Hindia Belanda menyetor modal sebesar *f*1 juta, sedangkan sisanya disetor oleh Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Dengan terjualnya sebanyak 2.019 saham senilai *f*1.009.500 pada tanggal 16 Januari 1828, maka syarat minimal permodalan bank telah terpenuhi. Mayoritas saham De Javasche Bank dimiliki pemerintah Belanda (49,5 persen), sebanyak 14,9 persen dipegang oleh NHM, selebihnya dimiliki oleh masyarakat. Sesuai dengan ketentuan *Octrooi en Reglement voor De Javasche Bank* tahun 1827 yang berlaku sejak 1 Januari 1828, DJB mendapatkan hak monopoli mengeluarkan uang kertas bank dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi.[6]

Kegiatan utama De Javasche Bank (DJB) pada awalnya banyak terkait dengan diskonto surat berharga yang dikeluarkan pembeli barang impor sesuai yang diminta oleh pengimpor. Hingga dekade 1850-an, DJB masih menjadi satu-satunya bank swasta yang menyediakan kredit kepada pedagang yang terlibat dalam penerapan sistem tanam paksa. Memang ada beberapa perusahaan yang memberikan pinjaman untuk mendukung perusahaan-perusahaan pertanian, tetapi sebenarnya bank-bank ini tidak menggunakan modal mereka sendiri, melainkan hanya meneruskan saja pinjaman kredit yang mereka peroleh dari DJB.[7]

---

5 Erwien Kusuma, *op.cit.*, hlm. 11-13.

6 M. Dawam Rahardjo dkk, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 29; Erwien Kusuma, *op.cit.*, hlm. 14.

7 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 341.

DJB merupakan bank swasta dengan saham yang diperdagangkan di pasar saham. Meskipun berstatus sebagai bank swasta, hubungan erat yang dimiliki dengan pemerintah kolonial di Batavia membuat DJB berbeda dengan bank-bank lainnya. Sejak awal DJB berkeinginan menjadi *banker's bank* atau bank utama yang menyediakan kredit pada bank-bank lain di Hindia Belanda. Akan tetapi, hal ini sulit direalisasikan karena adanya integrasi sistem keuangan dan perusahaan di Hindia Belanda dengan induknya di Negeri Belanda. Banyak perusahaan yang beroperasi di Hindia Belanda mempunyai kantor pusat di Negeri Belanda sehingga hasil penjualan dan keuntungan ataupun sering langsung ditampung di Belanda.[8] Demikian pula, banyak perusahaan di Hindia Belanda mendapatkan kredit secara langsung dari bank-bank yang ada di Belanda tanpa perlu melalui bank-bank Hindia Belanda.

Perkembangan perkebunan swasta membuat kebutuhan kapital yang meningkat. DJB dan NHM tidak lagi mampu mengimbangi dinamika yang terjadi antara suplai dan kebutuhan kapital. Hal ini mendorong pembukaan bank-bank baru di Hindia Belanda, seperti Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij didirikan 1857 di Batavia dengan modal awal sebesar *f*0,5 juta, disusul Rotterdamsche Bank dengan modal awal *f*2,125 juta, Nederlandsch Indische Handelsbank dengan modal *f*1,5 juta, dan Internationale Credit- en Handelsvereniging Rotterdam dengan modal *f*1,0 juta. Selain bank-bank Belanda di Hindia Belanda juga beroperasi bank-bank lain, termasuk perwakilan Chartered Bank of India, Australia & Cina yang mendirikan cabangnya pada 1863.[9] Mayoritas bank-bank baru ini bergerak dalam kredit jangka panjang terutama diberikan kepada perusahaan gula. Peranan bank-bank dalam pemberian kredit bertambah luas ketika di Hindia Belanda diberlakukan Undang-Undang Agraria 1870 yang membuka lebar kesempatan bagi ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta.[10]

Pada dua dekade terakhir abad ke-19, kebutuhan akan modal dan lembaga perbankan di Hindia Belanda terus membesar, baik untuk

---

8 G.H.A Prince, "Kebijaksanaan Moneter Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial", dalam J.Thomas Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 71-72.

9 J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 169-170.

10 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *op.cit.*, hlm. 345-346.

mendukung sektor perdagangan maupun perkebunan. Sebagai respons atas perkembangan ini maka didirikanlah bank-bank perkebunan, seperti Handelsvereeniging Amsterdam pada 1881, disusul dengan Nederlandsch Landbouw Maatschappij pada 1884, dan Cultuur Maatschappij Vorstenlanden (1888). Perkembangan ini mengarah pada menguatnya spesialisasi perbankan, yakni bank-bank dengan orientasi perbankan umum yang melayani kebutuhan kredit jangka pendek, menengah, dan bank-bank pertanian (*cultuurbanken*) dengan fokus pada layanan kredit jangka panjang dalam usaha pertanian/perkebunan.[11]

Pendirian kantor cabang DJB menandai perluasan jaringan DJB di Hindia Belanda. Sebelum DJB Agentschap Kediri berdiri, DJB telah memiliki 19 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Hindia Belanda dan satu kantor cabang berada di Amsterdam. Kantor cabang DJB pertama adalah Agentschap Semarang yang dibuka pada 1 April 1829, disusul Agentschap Surabaya (September 1829), Agentschap Padang (29 Agustus 1864), Agentschap Makassar (21 Desember 1864), Agentschap Cirebon (31 Juli 1866), Agentschap Surakarta (25 November 1867), dan Agentschap Yogyakarta (1 April 1879). Kantor cabang yang dibuka pada 1900-an adalah Agentschap Pontianak (1 April 1906), Agentschap Bengkalis (27 Juni 1907), Agentschap Medan (30 Juli 1907), Agentschap Banjarmasin (1 Augustus 1907), Agentschap Tanjung Balai (15 Januari 1908), Agentschap Bandung (1 Juni 1909), Agentschap Palembang (20 September 1909), Agentschap Manado (9 September 1910), Agentschap Malang (1 December 1916), dan Agentschap Kota Raja (2 December 1918). Dua kantor cabang tidak berkesinambungan sehingga akhirnya ditutup setelah beroperasi beberapa waktu dan merugi. Keduanya adalah DJB Agentschap Pasuruan (27 November 1867-31 Maret 1890) dan Agentschap Tanjung Pura (3 Februari 1908-1 April 1927).[12]

Gagasan pendirian DJB Agentschap Kediri berasal dari Direksi DJB pusat di Batavia. Untuk mewujudkan gagasan ini, direksi selanjutnya memerintahkan W. Jolles, pimpinan DJB Surabaya untuk melakukan penyelidikan tentang kelayakan pendirian cabang DJB di Kediri. Laporan

11 *Ibid.*, hlm. 346-347.

12 L. de Bree, *Gedenkboek van De Javasche Bank 1828-24 Januari 1928,* Deel II (Weltevreden: G. Kolff& Co., 1928), Bijlage 27, hlm. 579.

hasil penyelidikan Jolles dibahas dalam rapat direksi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1923, yang dihadiri Presiden DJB Mr. Z.A. Zeillinga, Direktur K.F. van den Berg, Sekretaris Direktur L. von Hemert. Laporan Jolles memperkuat gagasan direksi tentang perlunya pendirian cabang DJB tersendiri untuk melayani kepentingan ekonomi di wilayah Kediri, yang pada waktu itu masih dilayani oleh DJB Agentschap Surabaya. Rapat direksi akhirnya menyepakati pendirian DJB Agentschap Kediri dan menindaklanjutinya dengan mengirim surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Persetujuan pemerintah diberikan melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 49 tanggal 26 Maret tahun 1923 yang menetapkan bahwa De Javasche Bank dapat mendirikan sebuah kantor cabang di Kediri. Keputusan ini disampaikan dalam rapat direksi yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 1923.[13]

Untuk menindaklanjutinya, Direksi DJB Batavia mengirim seorang stafnya ke Kediri untuk mempersiapkan kantor dan perlengkapan operasional yang diperlukan. Kunjungan ke Kediri dilakukan dengan kereta api yang berangkat dari Batavia pada 24 Mei 1923 dan tiba di Kediri tanggal 24 Mei 1923. Pencarian gedung calon kantor DJB Kediri dilakukan dengan menggali masukan dari berbagai pihak, di antaranya Mr. Hildering dari Hotel Riche, Mr. Berghuis dari Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, Mr. Schouten dari OFI (Oliefabriek Insulinde Mij), dan van Slingelandt dari Kediri Stoomtram Maatschappij. Dari berbagai masukan tersebut, pilihan bakal kantor DJB diarahkan pada gedung Bank Escompto Kediri yang operasionalnya ditutup pada 31 Mei 1923. Gedung ini telah diasuransikan oleh Escompto Mij ke Ned. Ind. Zee & Brand Assurantie Mij seharga *f*8/m hingga September 1923. Tentang gedung bekas Escompto tersebut, staf DJB menggambarkan dalam laporan kunjungannya yang disampaikan kepada Presiden dan Direktur DJB Batavia:

> *"Hari Minggu, setelah makan siang, sekitar pukul 2, saya bersama Tuan Berghuis, pemegang kuasa/wakil pimpinan Ned.Ind Escompto Mij (Pimpinan Cabangnya, Koetsier, sudah meninggalkan kantor) mengunjungi kantor instansi bank, untuk melihat gedungnya untuk pertama kali dan kemudian*

13 R. Hardjo Santoso, *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri*, 1990, hlm. 3.

melihat inventaris dan furniture yang akan diambil alih darinya. Gedung kantornya terlihat baik di bagian dalamnya tidak terawat terutama di bagian luar gedung yang tidak digunakan terlihat sangat terabaikan. Terkait pemeliharaan halaman, terlihat sedikit atau tidak dilakukan pemeliharaan, terutama di bagian belakang gedung terlihat sangat memalukan. Bangunan perlu dibersihkan dan dicat putih secara menyeluruh, dinding dan lantainya perlu diplester, halaman akan dibersihkan dari gulma dan daun-daun rontok, sehingga secara keseluruhan akan terlihat layak untuk dilihat. Gedung ini terletak di perempatan jalan yang paling sibuk karena dilalui jaringan jalan raya kota dari Utara ke Selatan dan dari Timur ke Barat…".[14]

Selain persiapan fasilitas gedung kantor, berbagai hal terkait operasional kantor DJB Kediri baik menyangkut staf maupun perlengkapan pendukung juga dipersiapkan dengan menjaring berbagai masukan. Dari Mr. Berghuis selaku pemegang kuasa Bank Escompto Kediri yang sudah bubar diperoleh masukan tentang kemungkinan untuk merekrut beberapa nama mantan personel Bank Escompto yang dapat diandalkan sebagai staf untuk mendukung operasi DJB Kediri. Di antara nama-nama yang direkomendasikan tersebut adalah Djie Han Kiet dan juru tulis (*klerk*) Tan Ping Hwie. Djie Han Kiet disebutkan saat itu berusia 24 tahun, menikah, memiliki 2 anak, diasuh oleh Mayor dan Kapiten Cina, telah tinggal di Kediri selama bertahun-tahun sehingga mengenal dengan baik Kampung Cina dan keadaan setempat, jujur dan dapat dipercaya, rajin, handal dalam pekerjaannya. Gaji di Bank Escompto sebesar *f*160 + *f*50 biaya tambahan perpanjangan. Dia juga mampu memberikan jaminan *f*15/m atas kepemilikan kompleks tanahnya yang terletak di Berbek. Sementara itu, Tan Ping Hwie disebutkan berusia 19 tahun, dengan pendidikan terakhir Lagere School, mampu berbahasa Belanda, terampil, jujur dan cukup bagus dalam pekerjaannya dengan gaji di Escompto sebesar *f*75 + *f*25 biaya tambahan perpanjangan. Dalam laporan disampaikan pula usulan untuk memulai kantor cabang DJB Kediri dengan 2 kasir yang sudah ada, 3 juru tulis (*klerk*), yang satu orang diambil dari Escompto Mij, dan perlu menambah lagi dengan 2 orang juru tulis lain.[15]

14 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan President & Directeuren De Javasche Bank Batavia 28 Mei 1928*, hlm. 3-4.

15 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan President & Directeuren De Javasche Bank Batavia 28 Mei 1928*, hlm. 5-6.

Sebagai bagian dari persiapan, juga dilakukan pembicaraan dengan beberapa pihak. Dengan Alg. Ontvanger dibicarakan tentang aturan yang ada antara Landkassen dan De Javasche Bank, serta penyediaan uang kertas dan uang koin untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi uang. Di Landkassen disebutkan tersedia *f*300.000 uang kertas, *f*30.000 uang koin, *f*40.000 standpenning, *f*9.000 pasmunt, dan *f*13.000 koper. Terdapat persediaan silver sekitar *f*75/m di Escompto Mij. Menurut keterangan Alg. Ontvanger, di Kediri cukup sedikit ditemukan peredaran uang palsu, tetapi sering ditemukan koin-koin uang yang rusak. Bersama Inspektur Staatsspoor Haremaker, dibicarakan soal pengangkutan uang De Javasche Bank dengan kereta api, dari Kediri ke stasiun sekitarnya agar sirkulasi uang masuk kembali ke DJB dengan teratur dan lancar demi kepentingan masyarakat, perkebunan budaya, dan lain-lain yang skemanya telah diatur olehnya. Pembicaraan serupa dilakukan dengan Administrator Kediri Tram dan Mr. Loriaux, notaris.[16]

De Javasche Bank Agentschap Kediri dibuka pada tanggal 2 Juli 1923.[17] DJB Kediri memulai operasional kegiatannya dengan menggunakan bekas Gedung Bank Escompto yang dibelinya dari NV Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij seharga *f*12.000 dengan akta jual beli tertanggal 12 Juni 1923.[18] Hal ini agak mirip dengan pendirian DJB Agentschap Makassar di mana gedung yang dipakai pertama kali untuk operasional disewa dari perusahaan Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM).[19] DJB Kediri menjadi salah satu dari tiga kantor cabang DJB yang dibuka pada dekade 1920-an, yang dikenal sebagai dekade kemakmuran kolonial. Dua cabang lainnya, yakni DJB Agentschap Pematangsiantar yang dibuka pada 1 Oktober 1923 dan DJB Agentschap Madiun yang dibuka pada 21 April 1928. Pembukaan De Javasche Bank Agentschap Kediri menarik perhatian khalayak dan menjadi pemberitaan dalam media cetak pada saat itu. Surat kabar *Nederlandsch-Indie,* misalnya, telah memuat berita tentang pembukaan DJB Kediri beberapa hari sebelumnya. Dalam berita

16 *Ibid*, hlm. 7.

17 L. de Bree, *op.cit.*, hlm. 579.

18 R. Hardjo Santoso, *op.cit.*, hlm. 9.

19 Arlyana Abubakar, Rita Krisdiana, Rasyid Asba, Yulianto Sumalyo, Allan Akbar, Mirza Ardi Wibawa, *Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan* (Jakarta: bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 313.

yang sama juga disebutkan bahwa W.L. Wiemans ditugasi menduduki posisi sebagai agen atau kepala kantor DJB Agentschap Kediri.[20] Wiemans sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil akuntan di DJB Agentschap Makassar dan Agen DJB Yogyakarta menggantikan F.N. Nieuwenhuijzen.[21]

Dalam menjalankan tugasnya sebagai agen DJB Kediri, Wiemans dibantu oleh beberapa pegawai sebagai stafnya. Staf inti yang membawahkannya pada tahun 1924 terdiri dari H. Calicher sebagai pejabat pemegang buku, Tan Ping Hwie sebagai pegawai Tata Usaha, Djie Han Kiet sebagai Kasir I, dan Njo Tian Lok sebagai Kasir II. Beberapa staf lain yang juga bekerja di DJB Kediri yakni L. Berqis, Ngabdul, Sukardi, dan Soeparto.[22] Wiemans menjabat sebagai agen DJB Kediri kurang lebih selama dua tahun. Selama menjalankan peran penugasannya tersebut, Wiemans juga mendapat amanat untuk mengelola pembangunan gedung kantor DJB, melengkapi perlengkapan kantor yang masih belum lengkap tersedia, dan mengusahakan ketersediaan kendaraan untuk mendukung kegiatan dan operasional kantor.[23] Untuk area pembangunan gedung baru, DJB kemudian membeli lahan seluas 2.098 hektar dari Onderneming Badek seharga *f*15.000 yang dituangkan dalam akta jual beli tertanggal 17 Januari 1928.[24]

Sejak April 1925, posisi W.L. Wiemans sebagai agen DJB Kediri digantikan oleh Mr. F.J.A. Blokbergen.[25] Sebelum menduduki posisi agen DJB Kediri, Blokbergen mengawali karir di DJB sebagai pegawai DJB di Batavia (1909), kemudian ditempatkan sebagai akuntan DJB Semarang (1912), dan pernah dipromosikan menjabat sebagai agen DJB di Tanjung Balai (1919-1920), agen DJB Kotaraja (1921), Wakil agen DJB Semarang (1922), Agen DJB Malang (1922) hingga kemudian ditugasi sebagai Agen DJB Kediri (1925 – 1936).[26] Blokbergen bertugas sebagai agen DJB Kediri hingga tahun 1935. Dalam menjalankan pekerjaannya, Blokbergen pada

20 *Het Nieuws van den Dag voor Ned-Indie Ned-Indie,* 23 Juni 1923.

21 *De Sumatra Post,* 28 Juni 1915.

22 R. Hardjo Santoso, *op.cit.,* hlm. 5.

23 *Ibid*, hlm. 5.

24 *Ibid*, hlm. 9.

25 *De Indische Courant,* 13 November 1934.

26 *Soerabaiasch Handelsblad,* 14 November 1934; *Het Nieuws van den Dag voor Ned-Indie,* 17 November 1934.

tahun 1931 dibantu oleh 11 staf yang membawahkannya, yang secara rinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Personalia De Javasche Bank Agentschap Kediri, 31 Maret 1931

No.	Nama	Jabatan	Gaji
1	F.J.A. Blokbergen	Pemimpin Cabang	*f*1.000
2	A.W. Vermeulen	Wakil Pemimpin Cabang	*f*475
3	Wagner	Pemegang Buku	*f*350
4	M. Soedjono	Pegawai Tata Usaha	*f*250
5	Tan Ping Hwie	Pegawai Tata Usaha	*f*200
6	Ch.Th. van Vliet	Pegawai Tata Usaha	*f*175
7	L. Augenstein	Pegawai Tata Usaha	*f*145
8	Soemodidjojo	Pegawai Tata Usaha	*f*60
9	D.P. Marcus	Kepala Gudang	*f*175
10	Djie Han Kiet	Kasir I	*f*300
11	The Sioe Hiang	Kasir II	*f*160
12	Djie Kim Twan	Kasir III	*f*130

Sumber: R. Hardjo Santoso, "Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri", 1990, hlm. 5.

Pada masa keagenan Blokbergen tercatat beberapa peristiwa penting terkait DJB Agentschap Kediri. Selain tercatat jumlah staf personalia meningkat dibanding masa Wiemans (1923-1925), pada tanggal 8 Mei 1929 gedung baru DJB Kediri dibuka secara resmi penggunaannya. Menurut Hardjo Santoso, gedung baru ini didirikan di atas lahan yang dibeli dari Onderneming Badek, sedangkan gedung lama dibongkar dan berubah fungsi menjadi area halaman.[27] Dalam pemberitaan *Soerabaiasch Handelsblad*, acara peresmian penggunaan gedung baru DJB Kediri disebutkan dihadiri oleh sekitar 150 orang. Acara dihadiri para pejabat DJB maupun pemerintah, termasuk di antaranya adalah Direktur DJB Mr. Ligthart yang datang secara khusus dari Batavia, Residen Kediri, dan Wali Kota Kediri. Hadir pula dalam acara peresmian, Mr. Fermont dari Biro Arsitek Fermont en Cuypers yang menangani proyek pembangunan Gedung DJB Kediri. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Ligthart memberikan

27 R. Hardjo Santoso, *op.cit.*, hlm. 10.

sambutan yang intinya mengapresiasi pertumbuhan wilayah Kediri dalam kaitan dengan sistem perbankan. Kata sambutan pada acara pembukaan gedung DJB Kediri juga diberikan oleh Residen Kediri yang hadir dan berbicara atas nama Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Wali Kota (*Burgermeester*) Kediri.[28] Dalam berita juga disebutkan bahwa DJB Kediri merupakan kantor DJB yang secara spesifik didirikan sebagai tanggapan dalam kaitan dengan perkembangan aktivitas perdagangan produk-produk perkebunan dan pertanian yang dihasilkan di pedalaman Kediri yang banyak melibatkan kaum pedagang Cina.

Di bawah kepemimpinan Blokbergen, DJB Kediri mengalami perkembangan mengesankan. Keberadaan DJB Kediri dan Blokbergen digambarkan telah menyatu begitu kuat dan sulit mencari sosok yang dapat menandinginya. Selama bertugas sebagai agen DJB di Kediri, Blokbergen juga aktif dalam berbagai kegiatan dan dipercaya menduduki beberapa jabatan lain, di antaranya sebagai bendahara Sub-sentral Komite Pengangguran (*Sub-Central Werkloosen Comite*). Selain itu, Blokbergen juga termasuk sebagai pendiri dan pengurus Lingkar Seni Kediri (*Kedirische Kunstkring*). Berbagai prestasi ditorehkan oleh *Kedirische Kunstkring* ketika Blokbergen menjadi pengurus. Selama setahun, sejak Mei 1932-Mei 1933, tercatat telah menggelar 10 konser (termasuk di antaranya Alexander Brailowsky, Moiseivitch, Dresdener Kwartet, Nathalie Wetchor), 6 pertunjukan tonil, beberapa ceramah, dan penggelaran malam musik. F.J.A Blokbergen diberitakan sempat mengambil cuti dengan keluarga ke Belanda sehingga Mr. Kamerling untuk sementara menggantikannya sebagai agen DJB Kediri.[29]

Pada 17 November 1934, Blokbergen genap 25 tahun menjalani karirnya sebagai pegawai De Javasche Bank dan kurang lebih 9 tahun bekerja sebagai agen DJB Kediri. Dalam kedudukan sebagai agen DJB, F.J.A Blokbergen diberitakan mampu bekerjasama secara sangat baik dengan para pedagang Tionghoa dan mereka sangat mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin.[30] Resepsi perayaan Jubileum 25 tahun karir Blokbergen di De Javasche Bank digelar secara meriah pada hari

28 *De Indische Courant,* 8 Mei 1929.

29 *Soerabaiasch Handelsblad,* 4 Juli 1933.

30 *Ibid*, 14 November 1934.

Sabtu 17 November 1934. Acara ini diberitakan dihadiri oleh banyak tokoh terkemuka wilayah Kediri, di antaranya adalah Residen Kediri, Asisten Residen, Sekretaris Daerah, Bupati, tokoh-tokoh dari kalangan perkebunan dan perdagangan di daerah Kediri, Madiun, dan bahkan Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut, sambutan-sambutan ucapan selamat dan penghargaan atas jasa Blokbergen disampaikan oleh Residen Kediri yang berbicara atas nama seluruh warga Kediri, Wakil Agen DJB Kediri Mr. Brantjes, yang mewakili para pegawai Eropa dan Mr. Tan Tjong Koen yang mewakili komunitas Tionghoa.[31]

Pada tahun 1935, F.J.A Blokbergen digantikan oleh R.W.G.B.R Wagner sebagai agen DJB Kediri.[32] Sebelum ditempatkan di Kediri, Wagner adalah kasir utama (*hoofdkassier*) De Javasche Bank di Batavia dan pada saat itu sekaligus menduduki jabatan bendahara pada Komite Daerah untuk Bantuan Bagi Pengangguran (*Plaatselijk Comite voor Steun aan Werkloozen*) di Batavia.[33] Wagner menjabat sebagai pimpinan DJB Agentschap Kediri dari tahun 1936 hingga 1937. Selain sebagai agen DJB Kediri, Wagner juga menduduki posisi sebagai bendahara organisasi Pengurus *Afdeeling Kediri* untuk Perhimpunan Pusat Yayasan untuk Pemberantasan Tuberculosis di Hindia Belanda (*Het Bestuur der Afdeeling Kediri der Stichting Centrale Vereeniging tot Bestrijding de Tuberculose in Nederlandsch Indies*) hingga 15 Oktober 1937.[34] Setelah menjabat sebagai agen DJB Kediri kurang lebih selama dua tahun, sebagaimana diberitakan *De Sumatra Post*, Wagner kemudian dipindah penempatannya untuk menjabat sebagai pimpinan DJB Agentschap Medan.[35] Posisi Wagner sebagai agen DJB Kediri kemudian digantikan oleh P.W. Best yang menduduki jabatan agen DJB Kediri sejak 15 Oktober 1937 hingga tahun 1941, bersamaan dengan kedatangan Bala tentara Jepang di Hindia Belanda.[36] Sebelum dipromosikan pada jabatan baru sebagai pimpinan, P.W. Best pernah menjadi wakil agen DJB Kediri.[37]

---

31 *Ibid*, 17 November 1934.

32 R. Hardjo Santoso, *op.cit*, hlm. 6-7.

33 *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 18 Juni 1935.

34 *Soerabaijasch handelsblad,* 1 Oktober 1937.

35 *De Sumatra Post,* 29 September 1937.

36 R. Hardjo Santoso, *loc.cit*.

37 *Soerabaiasch Handelsblad,* 19 Januari 1934.

Selain De Javasche Bank, terdapat perbankan lain yang beroperasi di Kediri. Pada awal abad ke-20 di wilayah ini telah berdiri *Afdeeling bank* (Bank Daerah). Di Kabupaten Kediri, *Afdeeling bank* berlokasi di sebelah barat kantor gouvernement, yang juga berdekatan dengan Pasar Plaboean, yang berada di sebelah selatan kantor gouvernement.[38] Pendirian *Afdeeling bank* bermula dari penyelidikan W.P.D de Wolff van Westerrode yang ditugaskan berdasar Surat Keputusan Pemerintah tanggal 8 November 1900 No. 25, tentang kemungkinan dilakukannya pendirian bank kredit pertanian di Jawa dan di luar Jawa dengan sesedikit mungkin atau tanpa dukungan finansial secara langsung dari pemerintah. Sebagai tindak lanjut, lembaga perkreditan didirikan di berbagai tempat termasuk Kediri yang bekerja dengan modal lokal, antara lain bertujuan untuk memberikan bantuan materiel dan sarana operasional kepada penduduk pribumi dan sebagian juga kepada lembaga perkreditan daerah setempat. *Afdeeling bank* mendapat subsidi bulanan dari pemerintah untuk membayar personel, untuk menutupi biaya manajemen dan terlebih lagi, uang muka untuk menambah aset bank. Sebagai gantinya, pengawasan atas kebijakan dan operasi *Afdeeling bank* diserahkan kepada pengawasan pemerintah.[39]

Selain *Afdeeling bank*, sebelum pendirian DJB di Kediri juga telah dibuka lembaga perbankan lain, yakni Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (NIEM). Sebelum pendirian cabang dilakukan, sebuah penyelidikan dilakukan oleh Direktur Escompto, Mr. Sandrock dan Mr. Valk yang langsung datang ke Kediri untuk mengetahui kemungkinan untuk kehadiran Bank Escompto di tempat ini. Dengan pertimbangan keberadaan 23 pabrik gula, perusahaan perkebunan yang banyak, dan perdagangan yang ramai di wilayah Kediri, pembukaan kantor cabang Bank Escompto di wilayah ini dipandang memiliki kelayakan dan prospektif. Bank Escompto cabang Kediri dibuka dan beroperasi secara resmi sejak 1 April 1922.[40] Bank Escompto Agentschap Kediri merupakan

38 M. Saichurrahman, "Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri", *Skripsi* (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015), hlm. 42.

39 *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, Eerste Gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Nederlandsch-Indie en Bijlagen* (Batavia: Landsdrukkerij, 1909), hlm. 194.

40 *Het Nieuws van Dag,* 23 Maret 1922.

salah satu dari 13 cabang yang dimiliki NIEM di Hindia Belanda. Agen-agen Escompto lainnya terdapat di Weltevreden, Bandung, Cirebon, Tegal, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Makassar, dan Surabaya Simpang.[41]

Jabatan agen Bank Escompto Kediri dipercayakan kepada Mr. Germeraad, yang sebelumnya menjabat sebagai agen di Makassar.[42] Mr. Germeraad menjabat sebagai agen (kepala) Bank Escompto Kediri hanya dalam waktu beberapa bulan saja karena posisinya sebagai agen Escompto Kediri kemudian digantikan oleh B. Koetsier. Dalam sebuah berita yang terbit bulan September 1922, B. Koetsier sebagai agen Escompto diangkat sebagai anggota Dewan Daerah Kediri (*Gewestelijk Raad van Kediri*) bersama dengan F.W. Kempen, seorang dokter hewan pemerintah di Kediri.[43] Cabang Escompto Kediri tidak bertahan lama dan pada akhirnya terpaksa ditutup pada 31 Mei 1923.[44] Salah satu alasannya dikatakan bahwa harapan atas pendirian cabang ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Disebutkan bahwa jarak yang relatif dekat dengan Surabaya membuat kalkulasi sering meleset.[45] Gedung kantor dan inventaris Escompto kemudian diambil alih oleh De Javasche Bank yang dalam waktu bersamaan sedang membutuhkan bangunan untuk dijadikan kantor DJB cabang Kediri yang tengah dalam proses persiapan pendirian.

PERAN DJB DAN PERBANKAN LAINNYA MASA PUNCAK KEJAYAAN PERKEBUNAN

Keberadaan De Javasche Bank dan institusi perbankan lainnya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan wilayah dan dunia usaha di wilayah Kediri. Perusahaan-perusahaan perkebunan

41 *De Sumatra Post,* 24 April 1922.

42 *De Indische Courant,* 24 Maret 1922; *De Express*, 23 Maret 1922.

43 *De Indische Courant*, 18 September 1922.

44 *Bataviaasch Nieuwsblad* 31 Mei 1923

45 Djie Ting Ham, *De Algemene Banken in Ned-Indie* (Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon, 1926), hlm. 70.

di wilayah Kediri juga beroperasi dengan dukungan keuangan dari lembaga perbankan. Pabrik Gula Pesantren dimiliki oleh Javasche Cultuur Maatschappij, yang modal usahanya berasal dari pinjaman Nederlandsch Indische Handelsbank dan anak perusahaan Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij.[46] Demikian juga misalnya, Cultuur Maatschappij Ngrangkah, sejak awal pendiriannya mendapatkan dukungan pinjaman modal untuk memulai usaha dari Koloniale Bank. Di Kediri juga banyak perusahaan perkebunan milik Handelsvereeniging Amsterdam (HVA), yang juga berperan sebagai bank sehingga menjadi sumber pendanaan penting untuk mendukung operasi bisnis perkebunan-perkebunan mereka yang terdapat di wilayah Keresidenan Kediri.

Peran penting DJB dan lembaga perbankan lain di Kediri tampak antara lain dalam pemberian pinjaman kredit produk. Pinjaman semacam ini, sebelum pendirian DJB Kediri, diberikan oleh Escompto cabang Kediri, salah satunya kepada pengusaha Tionghoa bernama Han Sing Khing, pemilik sejumlah persil perkebunan dan *Java Oliefabriek* yang terletak di Klentengstraat, sebelah barat Pasar Pahing di Kediri.[47] Korespondensi mengenai pengusaha ini mencuat karena kasus kebangkrutan bisnisnya sehingga perusahaan dan persil-persil kebun milik Han Sing Khing akhirnya disita. Disebutkan dalam korespondensi Agen DJB Kediri dengan Presiden dan Direktur DJB di Batavia tentang kunjungan ke persil-persil milik Han Sing Khing untuk menilai beberapa bangunan, mesin, dan inventaris lainnya. Disebutkan dalam laporan bahwa nilai taksasi rumah tinggal, bangunan, dan inventaris pabrik minyak milik Han Sing Khing, Java Oliefabriek, yang disita sebesar *f*98.000, dengan nilai penjualan penyitaan sebesar *f*68.600. Terkait dengan kunjungan tersebut, agen De Javasche Bank menulis dalam suratnya:

> *"Tempat tinggal yang juga digunakan sebagai gedung kantor pabrik, halamannya tampak terlihat cukup baik walaupun dilakukan sedikit perawatan. Pabrik, instalasi dan gudang disana terlihat terabaikan. Sejak pabrik dihentikan baru-baru ini, tampak tidak ada lagi pemeliharaan. Han Sing Khing mungkin kekurangan sumber daya. Terkait mesin-mesin, saat*

46 *Ibid*, hlm. 47.

47 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan President & Directeuren De Javasche Bank Batavia,* 28 Mei 1923.

ini ditutupi kain tebal dan jaring laba-laba, untuk melindungi dari karat dan pembusukan, terutama untuk memberikan kesan yang lebih baik bagi pabrik. Saya sudah membicarakannya dengan Tuan Loriaux dan atas persetujuan Han Sing Khing, mulai besok pagi beberapa tukang akan melakukan pemeliharaan satu dan lain hal sehingga jika ada pembeli yang ingin memiliki pabrik tersebut, akan mendapati kesan yang lebih baik.[48]

Tidak diketahui secara persis akhir cerita dari kasus yang menimpa pengusaha Han Sing Khing tersebut karena keterbatasan informasi historis, tetapi diketahui bahwa penyaluran pinjaman kredit bank dipastikan diberikan pula pada perusahaan lain. Dalam surat Agen DJB Kediri, W.L. Wiemans, disebutkan bahwa Bank Escompto memberikan pinjaman kredit kepada perusahaan minyak kelapa Van Dongen di Blitar. Pinjaman kredit Oliefabriek Van Dongen di Bank Escompto pada tahun 1923 ditaksir mencapai lebih dari *f*3 juta. Selain itu, Bank Escompto juga disebutkan menyalurkan pinjaman kredit kepada Mr. Meyer dari Oliefabriek Bandjaran. Pada korespondensi yang sama, Mr Meyer dari Oliefabriek Bandjaran dikatakan mengajukan pinjaman kredit ke DJB untuk pembelian biji tengkawang dan minyak lemak senilai *f*18.600 untuk mendapatkan uang muka sebesar *f*15.000. Lebih lengkapnya, dalam suratnya pada pimpinan DJB di Batavia, Agen DJB Kediri W.L. Wiemans menulis:

"…Tuan Meyer bergabung dengan saya dengan menulis surat tanggal 7 ini, salinannya dilampirkan, dengan permintaan pinjaman biji Tengkawang dan minyak lemak untuk nilai beli dari f18.600 dan untuk mendapatkan uang muka f15.000. Menurut informasi yang saya dapatkan, ternyata harga beli biji-biji tersebut dan lemak saat ini sekitar 2 tahun yang lalu, harganya tidak meningkat yakni sekitar f3.300 dan nilai biji-bijinya telah menurun drastis sejak penyimpanan yang lama. Meskipun tengkawang adalah komoditas yang kurang umum dan karena itu kurang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman, saya telah mengalihkan permintaan Tuan Meyer kepada Anda, asalkan pihak tersebut benar-benar menghargainya dan meminta uang muka yang moderat. [49]

48 *Ibid*, 11 Juni 1923.

49 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan Pres. & Directeuren De Javasche Bank Batavia*, No. 96/14 Vertrouwelijk, 10 Agustus 1923.

Bukan hanya Bank Escompto saja, penyaluran pinjaman juga dilakukan oleh De Javasche Bank Kediri sebagai bagian layanannya. Sebuah korespondensi menunjukkan bahwa seorang nasabah bernama Tan Tiong Hien memasukkan dua persilnya di Madiun, yakni R.V.E. verp. 1487 dan 1488 sebagai hipotek di De Javasche Bank untuk pinjaman sebesar *f*25.000. Dalam surat tertanggal 28 November 1928 tersebut juga dikatakan bahwa persil-persil itu ditawarkan untuk dijual kepada DJB dan Tan Tiong Hien menyatakan kesediaannya untuk melepas persil-persil tersebut kepada DJB dengan harga sebesar *f*30.000 hingga akhir 1927. [50] Persil ini sebelumnya dibeli oleh Tan Tiong Hien dengan harga *f*32.064,10, termasuk biaya penjual/lelang, tetapi tidak termasuk biaya transfer. Pada persil ini sekitar *f*5.000 gulden telah dihabiskan untuk pembangunan luar klinik, sehingga besar biaya untuk membeli rumah ini plus minus senilai 40.000 gulden.[51] Pada waktu itu, DJB memang sedang mempersiapkan pembukaan kantor cabang baru di Madiun dan Agen DJB Kediri diminta mencari lokasi yang sesuai. [52]

Korespondensi lain menyebutkan penyaluran pinjaman kredit dari DJB kepada NV Handel Ban Kiet Sing dengan jaminan persil tanah Pasewaran dan pinjaman yang diberikan kepada Kho King Kwie dengan jaminan berupa produk. Dalam korespondensi ini juga disebutkan agar Agen DJB selalu berkonsultasi dengan pimpinan di Batavia dalam mengambil langkah-langkah apapun yang secara prinsip penting dalam menangani penyelesaian sengketa pinjaman dan agunan yang dijadikan jaminan kredit di DJB, termasuk dalam penanganan kasus Ban Kiet Sing dan Kho King Kwie. Disebutkan pula bahwa pimpinan DJB tidak siap melepaskan haknya atas kredit yang menggunakan tanah Pasewaran jaminannya. Pimpinan De Javasche Bank siap untuk meninjau tersebut secara keseluruhan dan hanya dapat mempertimbangkan bantuan penyelesaian posisi secara bertahap dengan memberikan kesempatan

50 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri 1459: Soerat Tan Tiong Him*, 28 November 1927.

51 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri: Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan Pres. & Directeuren De Javasche Bank Batavia*, No. No.100/18 geheim, 5 Desember 1927.

52 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri: President & Directeuren De Javasche Bank Batavia aan De Agent DJB Kediri 20 Oktober 1927*.

untuk melakukan pembayaran kembali kredit dalam jangka waktu yang lebih lama [53]

Berdasarkan informasi parsial di atas, dapat dipastikan bahwa terdapat hubungan erat antara para pelaku dunia usaha di Kediri dengan De Javasche Bank dan lembaga perbankan lainnya, termasuk dengan pemerintah kolonial. Sayangnya, keterbatasan informasi historis sejauh ini tidak memungkinkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jaringan relasi antara semua pelaku dunia usaha, DJB dan perbankan pada umumnya, serta pihak pemerintah keresidenan. Namun, tidak dipungkiri bahwa sinergi antara ketiganya menjadi kekuatan dinamis yang menggerakkan perekonomian Kediri. Bagian berikut akan menunjukkan dinamika perekonomian kawasan Kediri setelah pendirian DJB.

DINAMIKA PEREKONOMIAN KEDIRI

DJB Agentschap Kediri didirikan pada tahun 1923 ketika perekonomian Kediri yang berbasis perkebunan komersial, seperti pada umumnya Hindia Belanda, tengah memasuki masa kejayaan. Jumlah perkebunan dan pabrik-pabrik pemrosesan produk agrikultura berada pada keadaan mapan. Pabrik-pabrik telah beroperasi kurang lebih dalam skala penuh sesuai dengan kapasitas terpasang yang dimiliki. Luas penanaman maupun volume produksi rata-rata berada pada plafon atas. Perkembangan sektor perkebunan juga telah mendatangkan efek-efek pengganda dalam bentuk berbagai aktivitas di sektor industri dan perdagangan. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat terus meningkat sehingga mendongkrak daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan hidup, baik produk-produk impor maupun domestik. Kehidupan perekonomian secara umum bertambah ramai dan dinamis. Berbagai perkembangan ini secara garis besar akan diuraikan pada bagian berikut.

53 Arsip Koleksi Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven Kediri 1459, No. 100/23 geheim: President & Directeuren De Javasche Bank Batavia aan De Agent DJB Kediri 20 Januari 1928*.

PERKEBUNAN DAN PERTANIAN

Periode 1920-an, perekonomian Indonesia digambarkan ahli sejarah ekonomi berkebangsaan Belanda, Jan Luiten van Zanden dan Dan Marks, sebagai "Periode pertumbuhan kemakmuran".[54] Perhitungan Pierre van der Eng untuk periode 1913-1929 memperkirakan GDP perkapita Indonesia sebesar 2,9 persen, meningkat dibanding periode 1870-1900 sebesar 1,9 persen.[55] Empat tahun, antara 1925 hingga 1929, bagi sektor perkebunan komersial disebut Haccou sebagai "Periode kemakmuran yang paling besar" dan "Periode yang menguntungkan".[56] Dalam konteks inilah sektor pertanian Kediri menjadi bagiannya dan beroperasi baik sebagai unit korporasi skala besar (*plantation agriculture*) maupun usaha tani rakyat (*smallholder agriculture*). Tanaman yang dibudidayakan mencakup tanaman komersial (*cash crops*) seperti tebu, kopi, karet, agave, dan tembakau maupun tanaman pangan (*food crops)* seperti padi, jagung, ketela, kedelai, dan beberapa tanaman lainnya.

Dalam kasus tebu, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2 jumlah perkebunan sudah berada pada posisi relatif stabil. Jumlah perkebunan tebu di Keresidenan Kediri sudah konstan, yakni sebanyak 21 buah, sedangkan untuk Jawa pada kisaran 180-185 buah. Area penanaman tebu memang berfluktuasi luasannya untuk wilayah Kediri berkisar antara 20.000 hingga 24.300 hektar, sedangkan untuk Jawa secara umum memperlihatkan kecenderungan peningkatan sampai tahun 1929. Namun, persentase penggunaan lahan sawah memperlihatkan tren yang cenderung meningkat bila dibandingkan dengan periode pra-DJB Kediri. Pada tahun 1910, persentase lahan sawah yang ditanami tebu baru sebesar 13 persen. Pada tahun 1925, persentasenya menjadi sebesar 19 persen.[57] Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan area sawah

54 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 203.

55 Pierre van der Eng, "The Real Domestic Product of Indonesia, 1880-l 989", *Explorations in Economic History,* 29 (1992), hlm. 359.

56 J.F. Haccou, "Perekonomian Hindia Belanda Suatu Gambaran tentang Pertumbuhan dan Perjuangan", dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans (ed.), *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 298.

57 Pierre van der Eng, *Agricultural development in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880* (Basingstoke: Macmillan, 1996), hlm. 53.

yang ditanami tebu secara signifikan. Potret mikro dari Distrik Pare mengindikasikan besar sewa tahunan rata-rata yang dibayarkan kepada petani atas tanah yang diserahkan kepada pabrik gula untuk ditanami tebu setiap *bau* tercatat meningkat dari *f* 68,13 pada tahun 1920 menjadi *f* 74,74 pada tahun 1924.[58]

Tabel 2.2.
Jumlah dan Area Perkebunan Tebu di Keresidenan Kediri dan Total Jawa 1920-1929 (dalam hektar)

Tahun	Jumlah Perkebunan		Luas Area	
	Kediri	Jawa	Kediri	Jawa
1920	21	185	20.271	149.117
1925	21	181	24.291	171.553
1929	21	180	21.658	189.602

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia.* Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 211.

Perluasan sawah yang ditanami tebu kemungkinan berkat peningkatan lahan beririgasi sebagai hasil perbaikan infrastruktur irigasi. Data dari Van der Eng secara jelas mengindikasikan bahwa sawah dengan irigasi (semi) teknis meningkat tajam dari 13.000 hektar pada tahun 1910 menjadi 67.000 hektar pada tahun 1925. Demikian pula, pada periode yang sama tercatat bahwa total area sawah telah bertambah sebesar 33.000 hektar, yakni dari 117.000 hektar menjadi 150.000 hektar.[59] Penanaman tebu yang secara teknis budidaya memiliki persyaratan ekologis menyerupai tanaman padi sawah memang hanya memungkinkan perluasan penanamannya melalui peningkatan kapasitas pengairan melalui perbaikan teknis fasilitas irigasi.

Perkebunan tebu di Kediri terutama dijalankan oleh Handelsvereeniging Amsterdam (HVA). Dalam sebuah berita berjudul "Het Jubileum der HVA", pada usianya yang ke 50 tahun, HVA mempunyai 15 pabrik gula di Jawa. Pabrik gula di Kediri yang dimiliki HVA yakni PG Minggiran, Kawarasan,

58 Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa.* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm. 33.

59 Pierre van der Eng (1996), *op.cit.*, hlm. 53.

Kentjong, Menang, Tegowangi, Blimbing, Garoem, Soemberdadie, Ngadiredjo, dan Sroenie. Pada 1927, HVA melaporkan hasil penanaman tebu sebesar 23.876.368 kuintal atau setara dengan 2.620.024 kuintal gula. Saldo laba bersih HVA pada tahun ini dilaporkan mencapai sebesar *f*15.500.883. Panen tebu secara umum digambarkan memuaskan dan bagus berkat penggunaan varietas bibit tebu unggul yang sangat tinggi produksinya, yakni POJ 2878, yang penanamannya telah mencapai 67%. Pada musim tanam, 1928/1929, penanaman varietas tebu unggul direncanakan untuk diperluas hingga 100%. HVA juga memutuskan untuk mengganti sebagian area budidaya agave dengan tanaman tebu. Untuk maksud ini direncanakan peningkatan kapasitas pabrik gula miliknya dengan membangun pabrik baru, PG Koenir, di dekat Halte Ngunut di Kediri Selatan dengan rencana penggilingan untuk pertama kalinya pada tahun 1930 dan biayanya ditaksir mencapai 6.500.000 gulden.[60] Bukan hanya di Kediri, HVA juga mendirikan beberapa pabrik gula baru di daerah Jember sebagai perluasan pabrik gulanya, PG Djatiroto, di Kabupaten Lumajang. Pabrik gula baru HVA di Jember yakni PG Goenoengsari, PG Bedadoeng dan PG Semboro. PG Goenoengsari memulai penanaman tebu pertama pada 1927, sedangkan PG Semboro dan PG Bedadoeng memulai penanaman perdana pada tahun 1928.[61]

Perkebunan tebu lainnya yang juga memperlihatkan produksi yang tinggi adalah PG Pesantren milik NV Javasche Cultuur Maatschappij. Pada tahun 1922, dilaporkan area tanam 1.948 *bau*, meningkat dua kali dibanding area tanam pada tahun 1907 yang baru sebesar 923 *bau*.[62] Area tanam tebu pabrik ini tersebar di beberapa desa, yakni Desa Banjaran, Kawak, Gampengrejo, Pesantren, dan Jamsaren. Menindaklanjuti saran dari Dinas Irigasi, maka pada tahun 1924 PG Pesantren dilakukan perbaikan drainase dan pengeboran 10 sumur artesis untuk menjamin kebutuhan pengairan tanaman. PG Pesantren mengolah tebu baik yang diusahakan sendiri maupun tebu yang dibeli dari tanaman penduduk.

60 *Het Vaderland,* 24 Juni 1928; *De Locomotief,* 23 Juli 1928; *De Indische Courant,* 25 Juli 1928.

61 *Soerabaiasch-Handelsblad,* 2 Januari 1929.

62 Siti Nurhadisah Baroroh, "Peningkatan Sistem Produksi Gula Di Pabrik Gula Pesantren-Kediri Tahun 1890-1940", *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, 2015), hlm. 80.

Gambar 2.1. Perusahaan Pabrik Gula Minggiran Kediri 1920"
Sumber: KITLV 7787

Tebu yang berasal dari tanaman sendiri pada tahun 1922 mencapai sebanyak 2.267.559 pikul, sedangkan tebu yang dibeli dari penduduk sebanyak 250.887 pikul.[63] Pada periode 1924-1929, area tanam tebu dan produksi gula PG Pesantren secara umum dapat dikatakan meningkat. Selain dari penggunaan varietas tebu unggul, hal ini juga dicapai berkat adopsi mesin dan teknologi pemrosesan tebu yang lebih baik, khususnya mesin pengepres tebu, pengolah nira, dan mesin pemroses produk gula.[64]

Kinerja produksi PG Pesantren yang bagus tercermin secara tidak langsung dalam sepenggal berita surat kabar. Salah satu mandor pabrik gula ini menjadi sorotan berita, yakni sosok Haji Abdoel Sakoer. Dia diberitakan bekerja sebagai mandor tanaman pada PG Pesantren selama sekitar 40 tahun. Selama masa kerjanya yang panjang di pabrik ini, Haji

63 *Ibid*, hlm. 81-84.

64 *Ibid*, hlm. 94-95.

Sakoer mengalami empat masa kepemimpinan (administrator) pabrik yang berbeda dari Mr. Fabius, Mr. Kniphorst, Mr. van Vleuten, dan Mr. Tijl. Mandor Haji Sakoer diberitakan mampu memberikan hasil panen tebu yang tinggi sehingga mendapat apresiasi dari pimpinan pabrik. Haji yang tinggal di Desa Ngletih, Onderdistrik Kandat, Distrik Kediri ini telah menjelma menjadi seorang tuan tanah besar. Sebuah perayaan diselenggarakan sebagai penghargaan atas pengabdiannya yang luar biasa di PG Pesantren. Acara ini bahkan dihadiri oleh Administrator Pabrik Mr. Tijl dan seluruh personel kebun, serta digambarkan dalam terbitan *Soerabaiasch-Handelsblad* sebagai "Sebuah jubileum yang langka" (*teen zeldzaam jubileum*).[65]

Gambar 2.2. Pengangkutan Tebu di Kediri Tahun 1926
Sumber: Koleksi KITLV

Perkembangan perkebunan tebu yang diusahakan perusahaan-perusahaan besar Eropa mendorong penduduk berinisiatif memanfaatkan peluang yang ada untuk menambah penghasilan dengan menanam tebu secara mandiri. Tanaman tebu penduduk umumnya menjadi bahan mentah produksi gula Jawa. Penanaman tebu penduduk di Keresidenan Kediri berkembang secara luas. Meskipun mengalami fluktuasi luasan area

65 *Soerabaiasch-Handelsblad,* 29 November 1934.

penanaman dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan keresidenan lain di Jawa, di mana industri gula kolonial berkembang pesat, penanaman tebu penduduk di Keresidenan Kediri meliputi area yang paling besar. Pada tahun 1923, pemanenan tanaman tebu penduduk di Keresidenan Kediri mencapai area seluas 7.349 *bau*. Pada tahun 1924, area panen sebesar 7.504 *bau* dan melonjak hingga 8.742 *bau* pada tahun 1925.[66]

Di tempat lain di mana penanaman tebu penduduk juga berkembang, luas area panen masih berada jauh dibawah Keresidenan Kediri. Sebagai misal, berdasarkan data yang sama dari Heyne, di Pasuruan yang juga terkenal sebagai sentra industri gula terkemuka dan di mana salah satu lembaga riset tebu kolonial berlokasi, penanaman tebu penduduk pada tahun 1925 hanya sebesar 3.174 *bau* atau kurang lebih sebesar 36 persen dari luas panen di Kediri, sedangkan di Keresidenan Semarang di mana penanaman tebu penduduk juga begitu populer dan bahkan menduduki posisi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, luas panenannya juga hanya sebesar 3.786 *bau*.[67] Apabila dilihat secara komparatif, proporsi area panen tebu penduduk di Keresidenan Kediri dibanding luas total area panenan tebu penduduk di Jawa adalah sebesar 33 persen untuk tahun 1923, menanjak ke besaran 35 persen untuk tahun 1924 dan sebesar 39 persen pada tahun 1925.

Penanaman tebu penduduk di Keresidenan Kediri berlangsung di lahan-lahan tegalan atau yang juga biasa disebut *gaga* yang terbatas suplai airnya, tetapi tanahnya mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik, bertekstur gembur dan dapat menahan air. Kondisi tanah yang demikian memungkinkan tanaman tebu tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kekeringan. Penanaman tebu penduduk berlangsung terutama pada saat musim kemarau. Pengolahan tanah secara umum dikerjakan dengan cara membajak dan menggaru secara teliti bahkan hingga tiga kali. Pada lahan yang telah diolah kemudian dibuat selokan keliling untuk mengontrol air dan selanjutnya dibuat alur-alur tanaman dengan menggunakan perlengkapan bajak. Setelah tanaman tebu di lahan berumur satu hingga dua bulan dilakukan penyiangan dan pengurugan beberapa kali sambil dilakukan pemberian pupuk sebanyak 1 hingga 3 pikul per *bau*. Ketika

66 K. Heyne, *Tumbuhan Berguna Indonesia*, Vol. 1 (Jakarta: Yayasan Sarana WanaJaya, 1987), hlm. 152.

67 *Ibid*, hlm. 152.

panen tebu tiba, hasil rata-rata per *bau* mencapai sekitar 700 pikul tebu atau 70 pikul gula Jawa.[68]

Tebu yang ditanam secara mandiri oleh penduduk sebagian dijual ke penggilingan tebu yang dikelola orang-orang Jawa. Penggilingan yang dijalankan orang-orang Jawa ini umumnya memproduksi gula kasar berskala kecil-kecilan untuk tujuan distribusi di kalangan penduduk Jawa yang sangat menyukai makanan berasa manis. Menurut estimasi Geertz (1986), penanaman tebu mandiri oleh penduduk dengan kepemilikan lahan berukuran kecil memberikan keuntungan secara absolut maupun relatif bagi petani yang membudidayakannya. Hasil rata-rata per hektar tebu yang diusahakan penduduk di Distrik Pare mencapai hampir separuh dari hasil tebu perkebunan yang dikelola oleh pabrik-pabrik gula.[69] Lebih tingginya hasil tebu milik perusahaan perkebunan tentu saja wajar karena pengusahaannya dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk meraih peningkatan hasil secara maksimal.

Perlu diingat kembali bahwa sejak krisis gula pada pertengahan 1880-an, peningkatan efisiensi dan daya saing industri gula Jawa di pasar global terus diupayakan. Teknologi produksi tebu di Jawa diperbaiki dengan berbagai cara, seperti pendirian lembaga riset gula di Tegal (1885), Semarang (1886), dan Pasuruan (1887), adopsi sistem Reynoso pada awal abad ke-20, aplikasi pupuk kimia secara luas, dan adopsi varietas bibit tebu "ajaib", temuan Stasiun Riset Tebu Pasuruan, yakni POJ 2878.[70] Penggunaan metode ilmiah untuk menopang budidaya tebu telah memberi kontribusi besar dalam mentransformasi industri gula di Jawa sebagai salah satu industri gula paling efisien di dunia.[71]

Prestasi mengagumkan ini telah diraih industri gula di Jawa, termasuk Kediri, pada masa kejayaannya pada dekade 1920-an. Tampilan serupa tidak dimiliki tebu yang dibudidayakan penduduk. Meskipun memiliki tingkat produktivitas lebih rendah dibanding tebu yang

68 *Ibid*.

69 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 43.

70 Pierre van der Eng, *Agricultural development in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880* (Basingstoke: Macmillan, 1996), hlm. 218.

71 A.J. de Boer, *Sugarcane Production and the Sugar Industries in Asia* (Tokyo: Asian Productivity Organization, 1978), hlm.19.

diusahakan perusahaan perkebunan besar, tebu penduduk tetap memiliki daya saing dan memberi keuntungan usaha. Dalam budidaya tanaman tebu, penduduk tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pendirian institusi, pengadaan personel ahli dan kegiatan riset ilmiah, serta investasi untuk peningkatan efisiensi perlengkapan mesin dan teknologi di bidang manufaktur pemrosesan batang-batang tebu menjadi kristal gula.

Selain perkebunan tebu, komoditas perkebunan yang bertahan peran pentingnya di wilayah Keresidenan Kediri adalah kopi dan karet. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan dengan tanaman kopi dan karet termasuk di antaranya adalah HVA dan Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik. Perusahaan perkebunan Ngrangkah didirikan di Amsterdam pada tahun 1891 dengan total kapital sebesar *f*217.000 dengan direktur Koloniale Bank dan tiga orang komisaris, yakni H.C. Hintzen, J.A.C van Leeuwen dan A.F. Willink.[72] Pada tanggal 1 Agustus 1901, *De Locomotief* memberitakan kunjungan yang dilakukan Direktur Koloniale Bank, Mr Hudwig, kepada direktur onderneming Ngrangkah, Kediri dan agen kepala Koloniale Bank, Mr. Binjamin berkunjung ke perkebunan di Blitar. Bersama dengan Mr. Gierlings, ketiganya melanjutkan kunjungan ke perkebunan kopi yang terdapat di kawasan lereng Kawi, Distrik Wlingi, *Afdeeling* Blitar.[73] Di sini terdapat perkebunan kopi yang diusahakan oleh Kawi Cultuur Maatschappij dengan beberapa persil seperti Sengon, Rinni, dan Pidjiombo Gentjong. Perusahaan Kawi Cultuur Maatschappij didirikan di Belanda dengan modal awal sebesar 1 juta gulden, diantaranya sebanyak 760 saham senilai 760.000 gulden dimiliki oleh Koloniale Bank. Komisaris perusahaan ini adalah J.E. Henny dan G. Kramer bertindak selaku direktur, sedangkan direktur di Hindia Belanda didelegasikan kepada kepala agen Koloniale Bank di Surabaya.[74]

Berbeda dengan HVA yang banyak menaruh perhatian pada tanaman tebu, Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik menjadikan kopi dan karet sebagai tanaman andalan yang dibudidayakan. Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 memperlihatkan produksi kopi dan karet dari Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik. Produksi kedua komoditas

72 *Het Nieuws van den Dag: Kleine Courant*, 5 Maret 1891.

73 *De Locomotief,* 1 Agustus 1901.

74 *Algemeen Handelsblad,* 13 Februari 1895.

memperlihatkan tren yang berbeda. Produksi kopi cenderung berfluktuasi pada periode 1925-1929, dengan puncak produksi kopi terjadi pada tahun 1927 dengan produksi lebih dari 28.000 pikul. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya yang produksinya pada periode 1924-1926 berkisar antara 16.000-19.450 pikul.[75] Akan tetapi, pada 1928 produksi kopi anjlok di bawah 10.000 pikul, meskipun pada tahun berikutnya naik kembali dengan angka produksi sedikit di atas 15.000 pikul. Sementara itu, pada periode 1925-1929 produksi karet secara umum memperlihatkan tren peningkatan. Produksi karet tumbuh hampir dua kali lipat dari sekitar 83.000 kilogram ke 162.000 kilogram. Peningkatan produksi karet dirangsang oleh kenaikan harga karet dan penghapusan pembatasan ekspor karet.[76]

Tabel 2.3.
Produksi Kopi Robusta Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik
Tahun 1924-1932 (dalam pikul)

Tahun	Produksi Kopi Robusta
1925	19.450
1926	16.000
1927	28.185
1928	9.888
1929	15.170

Sumber: Dian Agustin dan Corry Liana "Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soembar Glatik di Kediri Tahun 1891-1932", *Avatara,* Volume 9, No. 2 Tahun 2020.

Tabel 2.4.
Produksi Karet Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik
Tahun 1925-1929 (dalam Kg)

Tahun	Volume produksi
1925	82.650
1926	81.000
1927	90.076
1928	142.868
1929	161.880

Sumber: Dian Agustin dan Corry Liana "Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soember Glatik di Kediri Tahun 1891-1932", *Avatara,* Volume 9, No. 2 Tahun 2020.

75 *De Indische Mercuur*, 25 April 1928.

76 *De Indische Mercuur*, 8 Mei 1929.

Pada masa kejayaan perkebunan tahun 1920-an, ketela juga menjadi komoditas penting yang diusahakan perusahaan perkebunan Barat di Kediri. Penanaman ketela dengan skala besar di Kediri dijalankan oleh Handelsvereeniging Amsterdam (HVA) dan The Galoehan Tapioca Estate and Mill, Ltd. Persil-persil penanaman ketela milik HVA tersebar di Distrik Pare dan Distrik Ngadiluwih, serta di distrik-distrik lain Keresidenan Kediri khususnya di *Afdeeling* Blitar.[77] Pada jubileum ke 50, HVA tercatat memiliki sebanyak 4 pabrik/perkebunan ketela.[78] Sementara itu, persil-persil perkebunan ketela milik The Galoehan Tapioca Estate and Mill, Ltd dapat disebutkan misalnya Bolodewo, Bedali, Kunjang, Sumberjati, Kebondalem, dan Galuhan. Sebagai area penanaman terbesar kedua di Jawa Timur, Keresidenan Kediri memberi kontribusi besar terhadap posisi yang diraih Jawa sebagai wilayah budidaya tanaman ketela terbesar di dunia. Estimasi yang diberikan Koch menyebutkan bahwa area panen ketela di Jawa kurang lebih sama dengan luas total area panen ketela di seluruh dunia.[79]

Selain ketela, tanaman perkebunan lainnya adalah agave yang diambil seratnya untuk bahan tenunan. Ada beberapa jenis agave terdapat di Jawa, tetapi yang paling banyak dibudidayakan oleh perusahaan perkebunan adalah *Agave cantala* (*A. cantala*) dan *Agave sisalana (A. sisalana).* Serat didapat melalui proses pemisahan serat dari daging daun dengan cara mekanis. Produk serat dari *A. cantala* digambarkan mempunyai tekstur lebih halus, lebih lembut, dan lebih putih apabila dibandingkan dengan serat yang dihasilkan dari jenis *A. sisalana,* yang mempunyai keunggulan pada ketebalan serat sehingga lebih kuat dan lebih awet.[80] Sebagai salah satu tanaman komersial yang diusahakannya di Kediri, Handelsvereeniging Amsterdam mengembangkan penanaman agave di sejumlah persil, yakni Kepung I, Kepung II, Karangdinoyo I-Karangdinoyo VII di bawah

77 Yunanto Eka Prabowo dan Devi Ika Santhi Rahayu, "Ubi Kayu di Keresidenan Kediri Pada Awal Abad Ke-20 Hingga 1940", *Verleden: Jurnal Kesejarahan,* Vol. 13 No. 2 (2018), hlm. 180.

78 *Soerabaiasch Handelsblad,* 2 Januari 1929.

79 L. Kocht, *Cassava Selectie* (Wageningen: Veenman, 1934), hlm. 4-4; Pierre van der Eng, "Cassava in Indonesia: A Historical Re-Appraisal of an Enigmatic Food Crop", *Southeast Asian Studies*, Vol. 36, No. 1 (1998), hlm. 5.

80 K. Heyne, *op.cit.*, hlm. 533-535.

administrator C.M. Graafland, sedangkan untuk persil Kalasan I hingga Kalasan VI yang bertindak sebagai administrator adalah L.F. Hojel.[81]

Perkebunan tembakau yang berkembang di Keresidenan Kediri ditanam di kawasan kaki bawah Gunung Kelud dan Gunung Wilis.[82] Salah satu perusahaan yang mengusahakan tanaman tembakau untuk ekspor adalah Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bataan", milik NV Javasche Cultuur Maatschappij. Budidaya tembakau oleh perkebunan besar memperkaya ragam warna komoditas perkebunan yang dihasilkan wilayah Kediri. Meskipun sempat mempunyai arti penting pada awal masa liberal, tetapi pada 1920-an reputasi yang dimiliki Kediri sebagai penghasil tembakau telah tenggelam dan tidak lagi menjadi penghasil *bladtabak*,[83] perannya diambil alih oleh Keresidenan Besuki dan *Vorstenlanden* di Jawa Tengah. Kedua tempat menjelma sebagai sentra utama produksi tembakau berkualitas tinggi dan menyumbang sebagian besar ekspor tembakau dari Jawa,[84] reputasi yang terus melekat pada kedua tempat hingga masa pascakolonial.

Meskipun tidak lagi menghasilkan produk *bladtabak*, penanaman tembakau terus berlangsung dengan produk tembakau krosok. Tembakau merupakan tanaman komersial yang sangat penting di Keresidenan Kediri. Budidaya ini banyak dilakukan oleh penduduk setempat. Produk tembakau yang mereka hasilkan dikenal dengan nama tembakau krosok dan secara umum masuk dalam kategori krosok biasa.[85] Kualitasnya kurang bagus dibanding dengan tembakau krosok yang diproduksi penduduk di daerah lain. Hal ini tampak jelas dari harga yang dibayarkan

---

81 Tidor Arif T. Djati dkk. *Kebijakan Perkebunan di Jawa Timur Masa Hindia Belanda* (Surabaya: Seri Naskah Sumber Arsip No. 15, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 2013), hlm 146-147.

82 John A. Fowler, *op.cit.,* hlm. 138.

83 Kenneth Young, "Kediri dan Gudang Garam: Sebuah Enklave Industri dalam Lingkungan Pedesaan", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan Yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 419.

84 Tembakau dari *Vorstenlanden* (Yogyakarta dan Surakarta) diekspor via Pelabuhan Semarang dan tembakau Besuki diekspor via Pelabuhan Panarukan. Pada tahun 1926-1930 ekspor tembakau via Panarukan menyumbang sekitar seperempat dari total ekspor tembakau Jawa, sedangkan Semarang memberi andil sedikit lebih kecil. A Clemens, J. Th. Lindblad dan J. Touwen, *Changing Economy in Indonesia,* Vol 12b: *Regional Patterns in Foreign Trade, 1911-1940* (Amsterdam: Royal tropical Institute, 1992), hlm. 62-63.

85 K. Heyne, *op.cit.*, hlm. 1731.

untuk produk tembakau krosok Kediri yang lebih rendah dibanding produk tembakau krosok dari tempat lain. Pada periode 1924-1929, harga tembakau krosok Kediri berkisar antara *f*15-21,5 per pak, jauh lebih rendah dibanding dengan harga produk tembakau krosok dari daerah Besuki, yang merupakan sentra utama tembakau di Jawa Timur, dengan kisaran harga antara *f*26,5 hingga *f*40,75.[86] Produksi dan harga tembakau krosok dari Kediri dan beberapa keresidenan lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Produksi dan Rata-Rata Harga Tembakau Krosok di Kediri dan Besuki

Tahun	Kediri		Besuki	
	Pak	Harga	Pak	Harga
1924	56.029	21,5	121.646	34,5
1925	28.360	17	122.519	27,5
1926	26.885	15	89.581	40,75
1927	25.632	16	115.968	34,5
1928	28.840	15	148.437	27,5
1929	20.000	16	145.694	26,25

Sumber: P.J. van den Broek, "Bevolkingstabak", C.J.J. van Hall dan C van de Koppel (ed), *De Landbouw in de Indische Archipel.* 's-Gravenhage: W. van Hoeve, 1949, hlm. 555-556.

Produk tembakau krosok dijual kepada para pedagang perantara, banyak di antaranya dari kelompok Tionghoa Petani. Dari para pedagang Tionghoa, produk tembakau krosok selanjutnya disalurkan ke perusahaan-perusahaan eksportir Eropa. Krosok dari Kediri disukai karena merupakan bahan yang bagus untuk industri cerutu di Eropa. Pelanggan produk ini tidak hanya berasal dari Negeri Belanda saja, melainkan juga dari negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, Belgia, Polandia, Cekoslovakia, Perancis, dan Spanyol.[87] Sebagian produk krosok juga disalurkan ke pasar domestik untuk memenuhi permintaan pabrik-pabrik rokok sigaret yang ada di Keresidenan Kediri. Penurunan produksi tembakau krosok yang

86 P.J. van den Broek, "Bevolkingstabak", dalam C.J.J. van Hall dan C van de Koppel (ed), *De Landbouw in de Indische Archipel* ('s-Gravenhage: W van Hoeve, 1949), hlm. 555-556.

87 *Ibid*, hlm. 544.

terjadi pada paruh kedua 1920-an selain terkait dengan kecenderungan penurunan harga, juga disebabkan oleh peningkatan penanaman tebu. Perluasan penanaman tebu dipandang berdampak fatal bagi tembakau karena perusahaan-perusahaan gula di Kediri mampu membayar sewa tanah yang lebih tinggi daripada yang dapat diperoleh tani dengan menanam tembakau, apalagi dengan mempertimbangkan pula risiko besar yang selalu ditimbulkan oleh budidaya tembakau. [88] Namun, keberadaan perkebunan tembakau di Kediri telah menjadi bagian penting dalam kemunculan Kediri sebagai daerah industri rokok kretek di Jawa Timur, yang dalam perkembangannya bahkan menjadi sektor industri rokok terkemuka di Indonesia pada masa Orde Baru.

Selain mengembangkan tanaman komersial, khususnya tebu dan tembakau, penduduk Kediri juga mengusahakan tanaman pangan di lahan-lahan pertaniannya. Sektor pertanian rakyat di Keresidenan Kediri memperlihatkan perkembangan signifikan pada dekade 1920-an. Hal ini secara jelas diindikasikan baik oleh luas area penanaman maupun produksi tanaman pangan (*foodcrops*). Berbagai jenis tanaman pangan dibudidayakan petani di Keresidenan Kediri pada lahan-lahan pertanian milik mereka, di antaranya yang terpenting adalah padi, jagung, ketela, kedelai, dan kacang tanah, serta beberapa tanaman pangan lain yang kurang penting kedudukannya secara komersial. Berbagai tanaman tersebut diusahakan para petani, baik di lahan sawah maupun lahan kering (tegalan). Pada tahun 1928, dilaporkan bahwa area lahan sawah di Kediri seluas 210.192 *bau*, sedangkan area lahan kering mencapai 342.024 *bau*.[89]

Seperti tampak pada Tabel 2.6 penanaman padi di Keresidenan Kediri pada periode 1923-1929 memperlihatkan tren peningkatan. Pada kurun waktu 1923-1926, luas penanaman padi rata-rata 157.000 hektar, sedangkan pada kurun 1927-1929 menjadi 166.000 hektar. Karena sebagian lahan pertanian juga digunakan untuk kepentingan perkebunan, maka dapat dipastikan bahwa perluasan penanaman padi dimungkinkan berkat perbaikan sarana irigasi dan pembukaan lahan pertanian baru.

88 *Ibid*, hlm. 543.

89 *De Kedirische Courant*, 13 Januari 1928.

Data statistik kolonial menunjukkan ekspansi lahan pertanian dari 394.000 hektar pada tahun 1923 menjadi 402.400 hektar pada tahun 1929 atau meningkat sebesar lebih dari 8.000 hektar. Sementara itu, area sawah bertambah sebesar 2.000 hektar, dari 149.400 hektar pada tahun 1923 menjadi 151.400 hektar pada tahun 1929.[90] Namun, kontras dengan tren perluasan luas tanaman, produksi padi justru mengalami penurunan. Sebagai misal, area penanaman padi tahun 1929 yang jauh lebih luas dibanding tahun tahun 1923, tetapi volume padi yang diproduksi jauh lebih kecil. Kemungkinan penyebabnya adalah lebih besarnya area kegagalan panen padi. Data untuk Jawa secara keseluruhan mencatat area kegagalan panen padi pada tahun 1929 mencapai lebih dari 166.000 hektar. [91]

Tabel 2.6.
Luas Tanaman dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri 1923-1929 (hektar)

Tahun	Luas (x 1000 ha)	Produksi (x 1000 metrik ton)
1923	153,5	353,5
1924	157,5	358,8
1925	159,6	345,7
1926	158,5	393,2
1927	166,6	394,5
1928	164,3	354,3
1929	167,2	340,7

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990, hlm. 96,121.

Pada periode yang sama, penanaman palawija secara umum juga memperlihatkan adanya tren peningkatan. Seperti terlihat pada Tabel 2.7 peningkatan secara mencolok berlangsung dari 1923 hingga puncaknya pada tahun 1927 dengan luas panen sebesar 178.600 hektar, dengan kekecualian tahun 1924. Meskipun pada tahun 1928 dan 1929 area panen palawija menurun kembali dengan luas panen berkisar 160.000-167.000 hektar, tetapi area panen palawija masih lebih besar dibanding

90 P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990), hlm. 91.

91 *Ibid*, hlm. 107.

luas panen tanaman ini pada tahun 1923, yang kurang lebih hanya sekitar 151.000 hektar. Dari empat jenis tanaman palawija yang utama, ketela dan jagung menempati posisi utama dari segi luas area panen. Ketela menduduki posisi terpenting dari segi area pada tahun 1923-1924, tetapi mulai tahun 1925 hingga 1929 posisinya digantikan oleh jagung. Posisi tanaman kedelai pada periode 1923-1929 tidak mengalami perubahan dari segi luas area, dengan menempati urutan ketiga.

Tabel 2.7.
Luas Panen dan Produksi Palawija di Keresidenan Kediri, 1923-1929
(x 1000 ha, x 1000 ton)

Tahun	Jagung		Ketela		Kacang Tanah		Kedele		Total Luas
	Luas	Ton	Luas	Ton	Luas	Ton	Luas	Ton	
1923	54,3	n.a	61,0	n.a	16,7	n.a	19,1	n.a	151,1
1924	52,6	n.a	59,6	n.a	13,6	n.a	21,1	n.a	146,9
1925	50,2	66,8	61,1	547,2	14,5	11,9	29,1	22,7	154,9
1926	65,8	88,7	55,7	490,0	12,3	9,9	24,0	19,0	157,8
1927	69,6	92,5	66,8	610,0	14,8	12,0	27,4	21,7	178,6
1928	62,5	82,5	61,3	582,3	16,1	13,0	26,7	19,1	166,6
1929	60,2	74,9	57,9	551,1	16,9	13,9	25,4	16,9	160,4

Catatan: n.a. = tidak ada data

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990, hlm. 94-101, 126-130.

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Industri yang menjadi urat nadi dan menopang roda kegiatan perekonomian Kediri adalah transportasi. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, industri transportasi yang paling besar di Keresidenan Kediri adalah Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM).

Gambar 2.3. Jalur Kereta Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM) Menuju Stasiun Pare
Sumber: Koleksi Wikipedia

Perluasan kegiatan perkebunan Barat dan peningkatan produksi komoditas yang dihasilkan pada dekade 1920-an membuat lalu lintas pengangkutan barang dan penumpang semakin ramai. Volume barang yang diangkut KSM bertambah besar, demikian pula dengan jumlah penumpang semakin banyak. Perkiraan yang dibuat Geertz mengindikasikan peningkatan volume angkutan barang di Distrik Pare dari 300.000 metrik ton pada tahun 1915 menjadi 330.000 metrik ton pada tahun 1929. Pada periode tahun yang sama, jumlah penumpang KSM juga terus tumbuh dari sekitar 1.600.000 orang menjadi 1.750.000 orang.[92]

Laporan terperinci pengangkutan KSM memperlihatkan variasi volume pengangkutan barang antar berbagai stasiun di Kediri. Lalu lintas pengangkutan barang dalam volume besar terjadi di stasiun-stasiun di mana pabrik-pabrik gula beroperasi. Pada tahun 1928, misalnya, volume angkutan barang di Stasiun Kawarasan berada di urutan teratas sebesar 29.905 metrik ton, disusul Stasiun Kentjong dengan volume angkutan

92 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm.32.

barang sebesar 27.072 metrik ton, Stasiun Pesantren sebesar 25.631 metrik ton, Stasiun Bogokidul sebesar 15.979 metrik ton, dan Stasiun Kediri SS sebesar 15.690 metrik ton. Sementara itu, Stasiun Pare mencatat volume pengangkutan barang pada tahun 1928 sebesar 13.402 metrik ton dan di beberapa stasiun lainnya berkisar antara 3.000 ton hingga 9.000 ton. Hanya di beberapa stasiun terutama yang berdekatan dengan stasiun yang lebih besar, angkutan barang volumenya kecil karena pengangkutan barang lebih dipusatkan di stasiun lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 1928 KSM telah membukukan pengangkutan barang sebesar lebih dari 295.000 ton, dalam angka ini termasuk barang-barang yang diangkut di beberapa stasiun yang terdapat di Kabupaten Jombang dan Blimbing (Malang) yang menjadi bagian dari wilayah layanannya.[93]

Gambar 2.4. Personel KSM 1931
Sumber: Koleksi KITLV PK-F-PKL.0618

Dengan volume angkutan barang dan penumpang yang meningkat, pendapatan yang diraih KSM juga terus mengalami pertumbuhan. Tabel

93 M. Saichurrahman, *op.cit.,* hlm. 103.

2.8 memberikan gambaran besarnya pendapatan yang diraih KSM dari layanan angkutan barang dan penumpang. Dengan jelas dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari tahun 1928 ke tahun 1929, yakni kurang lebih sebesar *f*30.500 atau peningkatan sebesar lebih dari 7 persen.

Tabel 2.8.
Pendapatan Bersih KSM Periode 1928-1929

Tahun	Total Pendapatan Pendapatan	Pendapatan per km/hari
1928	430.582	9,80
1929	461.094	10,53

Sumber: Saichurrahman "Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri, *Skripsi.* Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015, hlm. 102.

Industri lainnya yang mengalami perkembangan signifikan pada dekade 1920-an adalah industri rokok kretek. Industri rokok Kediri baru menjadi sektor ekonomi yang diperhitungkan sejak pertengahan 1920-an, meskipun asal-usulnya bisa dilacak sejak 1911 dalam bentuk perusahaan-perusahaan rokok berskala kecil. Perkembangan industri rokok di Keresidenan Kediri dilatarbelakangi oleh keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki pabrik-pabrik rokok besar yang berpusat di daerah Kudus (Jawa Tengah) dalam memenuhi permintaan pasar Jawa Timur yang sangat besar. Harga cengkeh yang melambung memaksa produsen rokok Kudus terpaksa harus menurunkan kualitas produk kretek mereka, bahkan juga memotong upah pekerja. Langkah pemotongan upah yang diberlakukan kemudian berujung pada munculnya sabotase. Sebagai ekspresi bentuk perlawanan terselubung, sabotase merupakan bagian dari apa yang disebut James Scott sebagai "Senjatanya orang-orang yang kalah"[94], yang digunakan untuk melampiaskan kekecewaan dan frustasi yang berkembang akibat berbagai perlakuan yang mereka rasakan sebagai ketidakadilan dari pihak elite atau atasan. Dalam konteks perusahaan rokok Kudus, sabotase sebagai senjata perlawanan dilakukan dengan cara menukar bahan campuran racikan berkualitas rendah sehingga merusak citra produk di pasaran.

94 James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

Kesempatan yang muncul dimanfaatkan dengan baik oleh produsen rokok Kediri, termasuk Gudang Garam, yang produknya dibanderol dengan harga lebih murah untuk mengisi ceruk pasar yang ada.

Gambar 2.5. Perusahaan Rokok Kretek Gudang Garam di Kediri
Sumber: www. liramedia.com

Respons konsumen terhadap produk kretek Kediri tampak menggembirakan. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan secara signifikan produksi rokok kretek di Keresidenan Kediri. Pada tahun 1929, produksi rokok kretek di wilayah ini mencapai 2.100 juta batang dan naik menjadi 2.310 juta pada tahun 1930.[95] Dengan kata lain, antara tahun 1929-1930 terdapat peningkatan produksi rokok sebesar 210 juta batang. Secara komparatif dengan kapasitas produksi rokok kretek sebesar itu, Keresidenan Kediri menduduki posisi teratas dalam daftar peringkat daerah-daerah produksi rokok kretek di Provinsi Jawa Timur. Hal ini secara jelas tampak dari data produksi rokok kretek masing-masing keresidenan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.9.

95 Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* (Kudus: PT Djarum Kudus, 1987), hlm. 156-159.

Tabel 2.9.
Jumlah Produksi Rokok Kretek di Jawa Timur 1929-1930 (dalam jutaan)

Keresidenan	Jumlah Produksi	
	1929	1930
Kediri	2.100	2.310
Madiun	60	75
Bojonegoro	30	44
Surabaya	560	545
Malang	5	10

Sumber: Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* (Kudus: PT Djarum Kudus, 1987), hlm. 159.

Industri penerbitan juga mengalami perkembangan signifikan di Kediri pada tahun 1920-an. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan yang tersohor pada masa itu adalah Boekhandel Tan Khoen Swie. Pada awal pendiriannya, di tahun 1905, Boekhandel Tan Khoen Swie merupakan toko buku yang menyalurkan buku-buku dari penerbit lain seperti Uitgeversmij NV Papyrus, Eertijd HM van Dorp & Co Batavia. Sejak tahun 1915 mengembangkan usaha sebagai perusahaan penerbitan sehingga berganti nama dari "Tan Khoen Swie Sedia Boekoe Java Melajoe dan Ollanda" menjadi "Boekhandel en Schryf Behoeften". Perubahan ini menjadi bagian dari proses diversifikasi usaha yang dijalankan Tan Khoen Swie dari pedagang yang menjual buku, suku cadang mobil, dan gasoline dengan membuka "Toko Soerabaia" melebar ke usaha penerbitan. Meskipun Tan Khoen Swie tidak memiliki mesin cetak sendiri, dalam penerbitan buku-bukunya dia bekerjasama dengan perusahaan penerbitan lain yang ada di Kediri seperti NV Kedirische Snelpersdrukkerij maupun yang berpusat di kota-kota lain misalnya Penerbit Stabelan di Solo, Stoomdrukkerij Liem Liang Jan di Kediri, dan Elektrische Drukkerij De Matador di Kertosono.[96]

Penerbit Tan Khoen Swie tumbuh pesat dan menjelma sebagai penerbit terpercaya pada dekade 1920-an. Pada tahun 1921 jumlah buku yang diterbitkan Tan Khoen Swie baru mencapai sebanyak 47 judul,

96 Wisnu, "Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri: The Agent of Javanese Culture", *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 29, No. 1, 2019), hlm. 49-50.

meningkat menjadi 131 judul pada tahun 1926. Buku-buku terbitan Tan Khoen Swie banyak beredar di Jawa Timur dan Jawa Tengah.[97] Buku-buku keluaran Penerbit Tan Khoen Swie meliputi beragam bahasa, aksara, dan tema. Terbitan yang paling banyak jumlahnya adalah buku-buku berbahasa dan beraksara Jawa, disusul buku-buku berbahasa Melayu dalam aksara Latin, dan yang paling sedikit penerbitannya adalah buku-buku berbahasa Jawa dan beraksara Latin. Tampaknya hal ini mencerminkan literasi aksara Latin di kalangan masyarakat masih lebih rendah, dibandingkan dengan literasi aksara Jawa, sebagai akibat dari keterbatasan akses masyarakat pribumi terhadap fasilitas pendidikan kolonial.

Adapun dari segi tema yang diangkat, terbitan Tan Khoen Swie yang paling banyak adalah buku-buku bertema budaya. Pada urutan berikutnya disusul buku-buku bertema religi, pendidikan, sastra, sejarah, dan yang paling sedikit adalah terbitan bertema masakan. Karakter multikultural merupakan fitur yang menonjol dari buku-buku terbitan Tan Khoen Swie, yang tampak jelas dari banyaknya terbitan berupa kitab-kitab yang ditulis oleh para pujangga Jawa dan Tionghoa ternama.[98] Sebuah pustaka yang dikenal secara luas dalam masyarakat kolonial dan banyak diperbincangkan karena ramalannya yang membangkitkan harapan dan memberi gambaran masa depan di tengah kesesakan tatanan kolonial, yakni Djangka Djajabaja adalah salah satu buku yang dikeluarkan oleh Penerbit Tan Khoen Swie yang berpusat di Jalan Dhoho Kota Kediri.[99]

INFRASTRUKTUR

Sebelum kehadiran DJB Kediri, wilayah Keresidenan Kediri mempunyai sejumlah infrastruktur yang berfungsi menunjang aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dan pemerintahan. Sebagai kawasan pedalaman, wilayah Kediri telah dihubungkan antar bagiannya dengan jaringan kereta api, trem, jalan raya, dan jaringan transportasi sungai. Infrastruktur yang sama

97 *Ibid*, hlm. 54-55.

98 Belly Isayoga Kristyowidi, "Multikulturalisme Dalam Terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie 1916-1953", *Kenosis,* Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 96-97.

99 *Ibid.,* hlm. 89.

juga menghubungkan Kediri dengan kota pelabuhan Surabaya maupun daerah-daerah di Jawa Timur lainnya. Selain infrastruktur komunikasi dan transportasi, terdapat pula bangunan-bangunan yang mewadahi kegiatan pemerintahan, bisnis, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan keagamaan. Berbagai fasilitas infrastruktur telah dikembangkan pada masa sebelumnya, tetapi setelah pendirian DJB Kediri pada tahun 1923, pengembangan infrastruktur semakin meningkat untuk merespons kebutuhan dunia usaha dan masyarakat yang meningkat. Apalagi, menjelang pendirian DJB, Keresidenan Kediri telah memiliki dua daerah *gemeente*, yakni Kediri dan Blitar, yang mendapat wewenang untuk mengatur berbagai urusan secara mandiri termasuk urusan infrastruktur seperti pembuatan jalan raya dan jembatan.

Menjelang pendirian DJB Kediri, dengan dua daerah berstatus *gemeente*, yakni Kediri dan Blitar, wilayah ini telah memiliki jaringan kereta api dan trem sepanjang ratusan kilometer dengan puluhan stasiun. Infrastruktur ini menjadi penopang vital beroperasinya sektor perkebunan dan denyut nadi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain infrastruktur jaringan transportasi kereta api dan trem, terdapat infrastruktur jalan dan moda transportasi yang menopang mobilitas barang dan penumpang. Pada ruas-ruas jalan tertentu ditempatkan terminal dan halte pemberhentian bus, misalnya di Semampirstraat, Hoofdstraat, Alun-alunstraat, Djagalanstraat, dan Slachtthuistraat.[100] Peningkatan status Kediri dari *Gemeente* menjadi Kotapraja (*Stadgemeente*) pada 1928 tidak hanya menandai hadirnya wali kota sebagai kepala daerah yang semula sejak menjadi *gemeente* posisi kepala dirangkap oleh Asisten Residen, melainkan juga berdampak pada pendanaan untuk perbaikan infrastruktur. Alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur menempati urutan paling besar setiap tahun dan pada tahun 1930, misalnya, alokasi anggaran untuk pekerjaan umum mencapai besaran *f*64.312.[101]

Gemeente Kediri sebagai salah satu kawasan utama di Keresidenan Kediri mempunyai gedung-gedung utama di bagian barat. Di antara gedung-gedung ini menjadi pusat perkantoran kolonial, seperti Kantor

100 M. Saichurrahman, *op.cit.*, hlm. 76-77.

101 *Ibid.*, hlm. 45,78.

Residen, Dinas Pekerjaan Umum (*Burgerlijke Openbare Werken,* BOW), Kantor Irigasi, Kantor Polisi, serta berbagai kantor dan biro pemerintah lainnya, termasuk rumah kepala distrik. Di kawasan ini juga terdapat bangunan-bangunan fasilitas pendidikan seperti Frobelschool dan Hollands-Inlandsche School. Di kawasan barat ini pula berdiri Bangunan Gereja Protestan, Rumah Sakit Bumiputra, Bank Daerah (*Afdeeling Bank*), dan Pasar Plaboean. Sementara itu, di bagian timur *Gemeente* Kediri terdapat permukiman Cina, Kelenteng Hwie Kiong, Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan (THKK), dan Hollandsch- Chinese School (HCS). Di kawasan timur ini pula berlokasi berbagai bangunan publik seperti Kantor Pos Besar, Pasar Alun-alun, Hotel Centrum, Hotel Kediri, Societeit Phoenix, Societeit Ons Genoegen, dan Hollandsch- Inlandsche School. Gedung pemerintah yang ada di kawasan timur adalah Controleurs Woning, Ziekeninrichting Semampir, dan rumah bupati. Setahun menjelang pendirian DJB Kediri, sebuah sekolah MULO dibuka, tepatnya pada Juli 1922.[102]

Tahun pendirian DJB di Kediri pada 1923 diwarnai perkembangan lebih lanjut di sektor pendidikan di *Gemeente* Kediri. Dengan jumlah sekolah yang semakin banyak, dirasa mendesak untuk membagi komisi sekolah menjadi dua bagian, yakni Komisi Sekolah Eropa dengan 11 anggota termasuk ketua dan Komisi Sekolah Bumi Putera dengan 7 anggota termasuk ketua. Dalam keanggotaan Komisi Sekolah Eropa terdapat nama seperti antara lain Dr. A.J. Salm, H. Loriaux, Ir. F. Oldenburger (insinyur pada Seksi Irigasi Brantas), M. Schouten (administrator Oliefabrieken Insulinde), G.D. Schafer (jurnalis), Djie Djwang Hien (Kapiten titular Cina), Djie Ting Han (pedagang), Raden Mochamat Saleh Mangoendihardjo (dokter pribumi), dan sekretaris *gemeente*. Sementara itu, sejumlah pejabat mengisi Komisi Sekolah Bumi Putera, yakni Kontrolir Kediri, Raden Djojosoebroto (Kepala Kejaksaan Kediri), Kepala Distrik Mojoroto, kepala Distrik Kediri, dan Raden Mas Ario Mariono (Akun Administrator Kedirische Afdeeling Bank). Di dalam kedua daftar kepengurusan komisi sekolah juga tercantum di dalamnya Asisten Residen Kediri. [103]

102 *Ibid.*, hlm. 41-43, 58-61.

103 *Ibid.*, hlm. 62-63.

Infrastruktur pendidikan juga dibangun di *Afdeeling* Blitar dan Tulungagung, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Di *Afdeeling* Blitar yang terdiri atas 246 desa telah terdapat 164 sekolah desa, di antaranya sebanyak 18 sekolah diperuntukkan khusus bagi perempuan. Selain itu, terdapat dua sekolah desa yang diselenggarakan oleh misi Katholik, satu sekolah desa milik HVA, dan 36 standaardschool yang 11 diantaranya adalah vervolgschool, ditambah satu standaardschool milik zending di Desa Maron (Srengat) dan dua kopschool untuk perempuan. Ada pula Hollandsch Inlandsche School (HIS) sebanyak tiga buah dengan rincian satu negeri, satu milik misi Katolik, dan satu milik Mardi Siswo, sedangkan untuk anak-anak Eropa terdapat satu ELS dan bagi anak-anak Tionghoa terdapat satu HCS dan Tiong Hwa Hwee Kwan. Perkumpulan Muhammadiyah di Blitar mempunyai schakelschool dan HIS. Di *Afdeeling* Tulungagung terdapat 182 sekolah desa (27 di antaranya berupa vervolgschool), satu ELS, satu HCS dan satu HIS, serta satu standaardschool.[104] Di berbagai tempat berdiri pula poliklinik kesehatan, di antaranya poliklinik yang diselenggarakan Handelsvereeniging Amsterdam di Pabrik Gula Garum dan Kunir. Terdapat pula sejumlah poliklinik dengan lokasi terpisah seperti Srengat, Lodoyo, Kesamben dan Gandusari.[105]

PEREKONOMIAN KEDIRI PADA ERA DEPRESI

KRISIS DAN DAMPAKNYA

Puncak perkembangan perekonomian Kediri berbasis perkebunan terguncang keras ketika krisis menghantam Hindia Belanda secara penuh pada dekade 1930-an. Krisis bermula dari jatuhnya harga saham di Wall Street pada tahun 1929 dan memicu penurunan secara drastis harga-harga komoditas di pasar internasional.[106] Krisis tahun 1929 ini diikuti dengan tahun-tahun depresi yang berlangsung pada tahun 1930-an. Berbagai sektor ekonomi memang merasakan efek-efek buruk dan

104 Sartono Kartodirdjo, dkk, *Memori Serah Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan Tanah Kerajaan* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia,1978), hlm. CXCIX-CC.

105 *Ibid*, hlm. CXCVI.

106 J.S. Furnivall, *op.cit.,* hlm. 429.

menghancurkan yang menimbulkan badai depresi, tetapi pukulan paling keras dan akibat-akibatnya yang parah dirasakan sektor perkebunan yang kegiatan bisnisnya sangat bergantung pada pasar dunia untuk membeli produk-produk ekspor yang dihasilkan.[107]

Industri gula adalah sektor yang paling menderita akibat hantaman keras depresi. Gula dari Jawa 80 persen dijual di pasar internasional, hanya 20 persen diserap di pasar domestik. Jatuhnya harga gula pada awal depresi ditanggapi industri gula dengan meningkatkan produksi dengan harapan dapat memberikan kompensasi atas turunnya harga agar pendapatan tetap tinggi. Respons meningkatkan output produksi di tengah pasar yang mengalami kontraksi terbukti bukan pilihan yang tepat. Langkah yang diambil tidak banyak membantu karena sejumlah negara kemudian satu per satu membatasi impor gula untuk melindungi produksi dalam negeri, seperti yang dilakukan Inggris dan India jajahannya Jepang, maupun Amerika Serikat. Pasar bebas untuk gula semakin mengecil dan di pasar bebas yang tersisa pun produk gula dari Jawa juga masih harus berkompetisi ketat dengan produk gula dari Kuba, Peru, Santo Domingo, Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, serta beberapa produsen lain.[108] Produk gula yang kelebihan stok dalam skala masif membuat pasar menjadi jenuh. Banyak produk gula menumpuk di gudang-gudang dan tidak terserap di pasar yang ada.

Sebagai respons atas krisis yang memburuk dalam sektor produksi komoditas perkebunan pemerintah kolonial melakukan pembatasan-pembatasan. Terkait dengan produksi gula, pemerintah mengadopsi *Chadbourne Plan* pada tahun 1930. Dalam skema ini area penanaman tebu dikurangi sebesar 17,5% per tahun. Sebagai tindak lanjut dalam penerapannya, maka pada bulan Mei 1931 pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengeluarkan Peraturan Ekspor Gula (*Sugar Export Ordinance*) yang memberlakukan pelarangan kegiatan ekspor gula tanpa izin. Hal ini kemudian disusul dengan penerbitan Dekrit Ekspor Gula, yang menetapkan jumlah total gula yang boleh diekspor setiap tahun.[109] Tidak hanya sektor industri gula saja, pembatasan-pembatasan serupa juga

107 Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 28.

108 Clifford Geertz (1986), *op.cit.*, hlm. 38.

109 J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 435-436.

diberlakukan terhadap berbagai komoditas perkebunan lainnya seperti kopi, karet, dan tembakau untuk menyelamatkan bisnis agar tetap dapat bertahan hidup di tengah badai krisis yang mendera dengan kuatnya.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan pembatasan yang diberlakukan pemerintah kolonial, perusahaan-perusahaan perkebunan di Keresidenan Kediri membatasi kegiatannya. Banyak pabrik gula di Kediri mengurangi areal penanaman tebu. Sebagian pabrik gula untuk sementara bahkan terpaksa menghentikan penanaman tebu, seperti yang dilakukan oleh PG Poerwoasrie, PG Goedo, dan PG Bogokidoel. Hanya satu pabrik gula yang menambah areal tanamnya, yakni PG Pesantren. Secara keseluruhan penanaman tebu untuk tahun tanam 1933-1934 berkurang sebesar 63,47% dibandingkan tahun tanam sebelumnya. Pada tahun 1935 masih diberitakan bahwa Direksi Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij memutuskan untuk menghentikan operasi PG Meritjan dan pabrik tidak melakukan penanaman tebu di lahan.[110] Bagi pabrik gula ini, krisis tahun 1930-an digambarkan sebagai masa yang penuh dengan kesukaran.[111]

Kondisi serupa berlaku pula bagi pabrik-pabrik gula lainnya. Pabrik Gula Pesantren dilaporkan menghentikan secara sementara produksi gula pada tahun 1936, setelah pada tahun 1935 area penanaman tebu banyak dikurangi.[112] Selama beberapa tahun krisis, PG Kawarasan terus beroperasi hingga tahun 1933 sebelum ditutup sementara pada tahun berikutnya. Administrator Brinkhorst tetap tinggal di pabrik untuk menyelesaikan masalah sewa tanah. Pada tahun 1935, Brinkhorst diangkat sebagai pengurus pabrik gula Ngadiredjo (bersama Kawarasan dan Soemberdadie). PG Ngadiredjo merupakan satu-satunya pabrik gula milik HVA di Kediri yang beroperasi pada tahun 1936.[113] Secara lebih detail pengurangan area penanaman tebu masing-masing pabrik gula pada musim tanam 1932-1934 dapat dilihat pada Tabel 2.10

110 *De Indische Courant,* 7 November 1934.

111 Muhamad Faizin dan Gayung Kesuma, "Dinamika Pabrik Gula Meritjan di Kediri Tahun 1930-1945", *Verleden: Jurnal Kesejarahan*, 11(2), 2017, hlm. 150-151.

112 *Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940* (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1940), hlm. 87; Amalia Husnul Khotimah dan Dina Dwikurniarini, "Perkembangan Pabrik Gula Pesantren 1935-1956", *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hlm. 244.

113 *Soerabaiasch Handelsblad,* 15 April 1941.

Tabel 2.10.
Luas Penanaman Tebu Pabrik-Pabrik Gula di Keresidenan Kediri, 1932-1934

Pabrik Gula	Luas Tanam (dalam *bau*)	
	1932/1933	1933/1934
Meritjan	1273.149	589.335
Minggiran	1449.048	6.494
Poerwoasri	918.099	-
Goedo	320.216	-
Bogokidoel	597.142	-
Kentjong	114.191	19.086
Tegowangi	1710.236	1087.352
Menang	1564.343	2.200
Kawarasan	1553.380	221.455
Pesantren	1115.449	1693.171
Soemberdadie	913.370	608
Ngadiredjo	1128.486	498.016
Blimbling	290.167	3.494
Total	12950.257	4731.104

Sumber: *De Indische Courant*, 18 Oktober 1932

Tidak hanya penanaman tebu dan produksi gula saja yang dikurangi atau bahkan dihentikan, pengiriman gula ke Pelabuhan Surabaya oleh sejumlah pabrik juga terhenti. Hal ini diberitakan terjadi, misalnya, pada Pabrik Gula Pesantren. Sejak pertengahan 1933 hingga sepanjang tahun 1934 pabrik gula ini diberitakan tidak melakukan pengiriman gula dengan kereta api ke Pelabuhan Surabaya. Baru pada tahun 1935 mulai ada permintaan kepada Pabrik Gula Pesantren untuk mengirim gula kembali.[114]

Berkurangnya kegiatan pabrik gula berimbas lebih jauh pada nasib para karyawan dan pekerja pabrik gula. Keberadaan mereka di pabrik-pabrik tidak lagi banyak diperlukan karena sedikitnya aktivitas pekerjaan yang bisa dilakukan, sedangkan jumlah pekerja jauh melebihi kebutuhan. Sementara itu, pemasukan keuangan juga merosot tajam karena hanya sedikit produk gula bisa diserap oleh pasar sehingga beban keuangan pabrik menjadi tidak tertanggungkan. Menghadapi situasi demikian,

114 *De Indische Courant,* 17 Januari 1935.

banyak perusahaan perkebunan tidak mempunyai pilihan lain untuk bertahan hidup selain dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan. Langkah pengurangan tenaga kerja perusahaan ditempuh, misalnya, oleh PG Meritjan dan PG Pesantren. Kedua pabrik gula tersebut diberitakan merumahkan sebagian besar pekerja, hanya sedikit karyawan tetap dipertahankan dan sejumlah karyawan dipensiunkan sebelum waktunya. Karyawan yang menerima pembayaran redundansi dizinkan untuk kembali ke Belanda. Pengurangan jumlah tenaga kerja menyebabkan jumlah pengangguran meningkat tajam.[115] Berkurangnya kesempatan kerja dan tingkat upah tampak dari penurunan jumlah upah yang dibayarkan industri gula kepada penduduk, yang menurut Djojohadikusumo untuk Jawa secara keseluruhan jumlahnya pada tahun 1936 tinggal 7 persen dari jumlah yang dibayarkan pada tahun 1928.[116]

Situasi sedikit membaik pada tahun-tahun terakhir 1930-an. Pada tahun 1938, pabrik gula milik HVA, yakni PG Kentjong dilaporkan mulai beroperasi. Dari dua puluh pabrik gula yang dimiliki Kediri pada masa puncak perkebunan, sebelas pabrik dilaporkan beroperasi. Pabrik gula milik HVA yang beroperasi meliputi Poerwoasri, Minggiran, Tegowangi, Kentjong, Ngadiredjo, dan Koenir. Selanjutnya pabrik lain yang juga beroperasi yakni, Lestari, Djati, Mritjan, Pesantren, dan Modjopanggoeng. Pabrik HVA yang lain sebanyak empat buah yakni, PG Menang, Soemberdadi, Kawarasan, dan Garoem belum beroperasi, demikian juga pabrik gula milik perusahaan lainnya masih tidak beroperasi, termasuk tiga pabrik milik Cina di Kediri Utara, Nganjuk, dan Kenongo dekat Wlingi.[117] Beroperasinya 11 pabrik gula diperkirakan dapat menyalurkan uang kepada penduduk pedesaaan Kediri sebagai pembayaran upah maupun pembayaran bahan material yang disediakan penduduk sebesar 2,6 juta gulden. Jumlah ini diperkirakan baru mencapai sekitar 40% dari jumlah yang dibayarkan pabrik gula pada tahun 1923 menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Sindikat Gula.[118] Meskipun demikian, aliran uang yang masuk diantara penduduk desa di wilayah Kediri melalui

115 *De Indische Courant*, 20 Desember 1934.

116 Sumitro Djojohadikusumo, *op.cit.*, hlm. 33.

117 *Het Algemeen Handelsblad,* 30 Maret 1938.

118 *Het Algemeen Handelsblad,* 30 Maret 1938.

beroperasinya pabrik gula dinilai berkontribusi meringankan beban hidup. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1938 volume produksi gula PG Pesantren dilaporkan mencapai sebesar 1.936 kuintal dan pada tahun 1939 sebesar 1.945 kuintal.[119]

Pembatasan kegiatan produksi juga diadopsi oleh perkebunan kopi dan karet. Pertumbuhan perkebunan kopi dan karet seakan terhenti pada dasawarsa 1930-an. Selain karena depresi, problem juga terkait dengan faktor struktural yakni akibat ekspansi penanaman yang berlebihan. Data makro untuk seluruh Jawa menunjukkan ekspansi penanaman karet dari sekitar 109.000 hektar pada tahun 1915 menjadi sekitar 229.000 hektar pada tahun 1930, sedangkan pada periode yang sama area penanaman kopi juga meningkat dari sekitar 33.000 hektar menjadi hampir 98.000 hektar.[120] Untuk mengatasinya dipandang perlu melakukan pengaturan produksi karet agar harga karet lebih stabil sehingga akhirnya Pemerintah Belanda menyetujui Perjanjian Pengaturan Karet Internasional.[121] Berbeda dengan tanaman tebu yang berusia lebih pendek dan ditanam di lahan-lahan pertanian, tanaman kopi dan karet berumur lebih panjang. Sebagai tanggapan atas pembatasan yang diberlakukan, perusahaan perkebunan karet memilih untuk membiarkan sebagian petak-petak kebun karet yang produktif tidak disadap selama beberapa waktu tertentu sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk upah pekerja. Harapannya ketika pembatasan dilonggarkan dan harga membaik, pohon-pohon karet yang semula dibiarkan dapat disadap kembali getahnya. Pembatasan produksi kopi dan karet secara jelas tercermin dalam statistik produksi dari Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik yang tersaji pada tabel berikut (Tabel 2.11).

119 Amalia Husnul Khotimah dan Dina Dwikurniarini, *loc.cit.*

120 William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar" dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 221.

121 Colin Barlow dan John Drabble, "Pemerintah dan Industri Karet yang Muncul di Indonesia dan Malaysia, 1900-1040", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 282-283.

Tabel 2.11.
Produksi Kopi Robusta dan Karet Cultuur Maatschappij Ngrangkah Soember Glatik Tahun 1929-1932

Tahun	Produksi karet (kg)	Produksi Kopi Robusta (pikul)
1929	161.880	15.170
1930	112.946	5.918
1931	62.234	8.522
1932	62.222	10.978

Sumber: Dian Agustin dan Corry Liana "Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soembar Glatik di Kediri Tahun 1891-1932", *Avatara,* Volume 9, No. 2 Tahun 2020.

Tidak hanya perusahaan perkebunan besar saja yang terpukul, dampak buruk krisis tahun 1930-an juga dialami tanaman perkebunan rakyat di Kediri. Hal ini tampak jelas pada tanaman tembakau rakyat. Tabel 2.12 memperlihatkan penurunan produksi dan harga tembakau krosok yang dihasilkan penduduk Kediri. Produksi tembakau terus menurun secara drastis hingga posisi terendah tercatat pada tahun 1933, kurang lebih tinggal sepertiga dibanding tingkat produksi tahun 1929. Demikian pula, harga yang diperoleh tembakau krosok Kediri juga turun secara tajam pada awal 1930-an. Tren serupa juga berlangsung di Keresidenan Besuki, yang merupakan salah satu daerah produsen tembakau terpenting di Hindia Belanda.

Tabel 2.12.
Produksi dan Rata-rata Harga Tembakau Krosok di Kediri dan Besuki

Tahun	Kediri		Besuki	
	Pak	Harga	Pak	Harga
1929	20.000	16	145.694	26,25
1930	17.600	17	124.632	25,75
1931	14.000	9	154.232	16
1932	10.000	10	55.311	16,5
1933	7.000	10	71.843	14

Sumber: P.J. van den Broek, "Bevolkingstabak", C.J.J. van Hall dan C van de Koppel (ed), *De Landbouw in de Indische Archipel.* 's-Gravenhage: W. van Hoeve, 1949, hlm. 555-556.

Meskipun tembakau krosok dari Kediri harganya rendah, kontribusi wilayah ini dalam produksi tembakau krosok di Jawa sangat penting pada paruh terakhir 1930-an. Statistik produksi tembakau Kediri yang tersedia sejak 1934 digabung bersama Keresidenan Rembang. Pada periode 1934-1938, andil yang disumbangkan kedua wilayah ini untuk produksi tembakau krosok Jawa berkisar antara 17-28 persen, berada di urutan ketiga setelah Besuki di urutan pertama dan Lumajang di urutan kedua. Sementara itu, andil-andil yang berasal dari daerah lain seperti Banyumas, Kedu, dan daerah-daerah lainnya relatif sangat kecil antara 1-4 persen.[122]

Berbeda dengan sektor perkebunan yang merosot baik area maupun produksinya pada masa depresi, sektor pertanian pangan justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya. Seperti tampak pada Tabel 2.13, luas area penanaman dan produksi tanaman rakyat mengalami perluasan secara signifikan. Untuk menyikapi kondisi yang sulit akibat hilangnya pendapatan dari upah kerja dan sewa lahan, kaum petani Kediri menggunakan lahan-lahan sewa yang dikembalikan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk tanaman pangan yang secara tradisional sudah biasa mereka budidayakan. Luas area penanaman padi sejak tahun 1931 memperlihatkan tren meningkat. Peningkatan secara mencolok berlangsung pada periode 1933-1935 berkisar antara 19.000-31.000 hektar dibanding luas area tanam pada 1929 ketika hantaman krisis ekonomi mulai terjadi. Meskipun setelah 1935 area penanaman padi mulai menurun kembali seiring upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh industri perkebunan, khususnya gula, tetapi tetap saja area penanaman padi masih lebih luas dibanding area penanaman pada masa sebelum krisis dan tampak baru normal kembali pada awal 1940 hingga menjelang kedatangan Jepang.

122 P.J. van den Broek, *op.cit.*, hlm. 551.

Tabel 2.13.
Luas Tanaman dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri, 1929-1940

Tahun	Luas (x 1000 ha)	Produksi (x 1000 metrik ton)
1930	164,7	330,3
1931	178,8	400,2
1932	176,2	361,4
1933	188,0	402,4
1934	198,1	397,5
1935	186,3	431,4
1936	177,8	404,3
1937	173,7	385,6
1938	176,1	397,6
1939	177,3	395,1
1940	171,9	413,6
1941	166,2	419,6
1942	166,1	410,7

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990, hlm. 96, 121.

Tren yang berlaku pada penanaman padi kurang lebih serupa dengan tren yang terjadi pada penanaman palawija. Seperti terlihat pada Tabel 2.14, penanaman palawija meningkat signifikan mulai terjadi pada tahun 1930 dan mencapai puncak perluasan pada tahun 1933. Pada kasus penanaman padi, peningkatan mulai terjadi pada tahun 1931 dan memuncak pada tahun 1934. Berbeda dengan padi, luas penanaman palawija tetap tinggi pada paruh kedua 1930-an dan tidak pernah kembali ke level luas area penanaman pada masa pra krisis, bahkan sempat mengalami puncak peningkatan kedua pada tahun 1941 dengan luas lebih dari 190.000 hektar. Di samping keinginan para petani untuk tetap mempunyai pijakan keamanan bagi kehidupan subsistensi mereka dengan berpegang pada tanaman pangan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, kecenderungan ini tampaknya terkait dengan faktor harga produk palawija yang relatif bagus. Pada tahun 1935 dilaporkan harga palawija meningkat tiga kali lipat.[123]

123 *De Locomotief,* 13 Februari 1935.

Tabel 2.14 memberikan gambaran signifikansi relatif masing-masing tanaman palawija dari segi luas penanaman. Jagung menempati urutan teratas, disusul kedelai, kacang tanah dan ketela.

Tabel 2.14.
Luas Panen Beberapa Tanaman Palawija Utama 1929-1942 (x 1000 hektar)

Tahun	Jagung	Ketela	Kacang Tanah	Kedelai	Total
1929	60,2	57,9	12,4	25,4	155,9
1930	81,0	48,8	16,2	26,7	172.7
1931	75,0	52,6	12,6	23,9	164,1
1932	84,2	59,5	17,8	32,8	194,3
1933	114,5	57,8	20,0	31,8	224,1
1934	82,9	65,6	19,5	34,9	202,9
1935	96,8	60,7	18,0	39,8	215,3
1936	100,9	65,3	20,5	42,9	229,6
1937	90,7	73,8	20,3	44,4	229,2
1938	94,3	69,9	23,2	47,5	234,9
1939	95,1	72,7	19,8	59,8	247,4
1940	92,0	74,8	17,8	50,8	235,4
1941	104,8	72,6	19,8	51,7	248,9
1942	98,2	71,7	17,8	53,5	241,2

Sumber: P. Boomgaard dan J.L. van Zanden, *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990), hlm. 97-101.

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Depresi ekonomi juga berdampak besar terhadap sektor industri jasa di Kediri. Industri transportasi merasakan pukulan keras karena menurunnya kegiatan pengangkutan barang dan penumpang. Hal ini tampak jelas dari data volume angkutan KSM, sebagai penyedia moda transportasi terpenting yang menopang nadi perekonomian di wilayah Kediri. Pengaruh krisis terhadap kegiatan bisnis KSM dalam pengangkutan barang dan penumpang dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum beriringan dengan menurunnya produksi pada sektor perkebunan pada 1930-an, kegiatan KSM pun tidak pelak juga merasakan efek buruknya.

Berdasarkan data pada Tabel 2.15 diketahui bahwa penurunan volume angkutan barang secara drastis terjadi pada periode 1932-1934, kurang lebih tinggal sepertiga dari volume barang yang diangkut pada 1930.

Tabel 2.15.
Volume Barang yang diangkut KSM, 1930-1936 (dalam ton)

Nama Stasiun	1930	1932	1934	1936
Djombang	214	88	105	64
Djombang S.S.	27.375	101.61	5.819	8.181
Tjeweng	13.097	7.602	3	140
Tjoekir	15.992	13.346	14.272	13.608
Blimbing	31.660	27.463	2.006	9.995
Badas	369	41	4	42
Paree	8.032	7.435	5.236	8.162
Bendo	22.115	28.941	15.102	12.691
Goerah	29.005	21.744	2.734	3.565
Pesantren	26.300	26.337	7.390	6.734
Kediri	1.242	753	688	1.637
Kediri S.S.	9.421	3.175	1.930	1.159
Ngoro	773	479	153	157
Kandangan	5.082	3.423	3.023	3.242
Kepoeng	1.326	1.867	1.715	1.332
Kentjong	23.419	16.770	6.614	6.173
Bogoh Kidul	13.417	12.306	7.530	176
Papar	-	5	-	1
Papar S.S	3.410	1.173	268	62
Brenggolo	7.923	7.528	8.792	8.608
Kawarasan	23.506	26.022	2.678	3.786
Wates	2.091	1.641	1.220	1.079
Total	263.678	216.659	86.062	89.515

Sumber: M. Saichurrahman, "Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri, *Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015), hlm.103.

Dengan terjadinya penurunan jumlah angkutan barang dan penumpang, pendapatan yang diperoleh KSM tanpa bisa dihindarkan merosot secara tajam. Laporan perusahaan menyebutkan bahwa

pendapatan tertinggi yang diraih KSM dicapai pada tahun 1929, yakni sebesar *f*461.093,57 atau rata-rata bisnis KSM menghasilkan pendapatan sebesar *f*10,53 per kilometer per hari. Pada tahun selanjutnya, pendapatan KSM terus anjlok, yakni sebesar *f*329.037,33 atau sebesar *f*7,46 per kilometer per hari pada tahun 1930. Pendapatan terendah tercatat pada tahun 1934, hanya sebesar 18.580,77 atau sebesar *f*0,42 per kilometer per hari. Tahun 1934 tercatat sebagai tahun paling buruk dalam perjalanan sejarah bisnis KSM sejak perusahaan mendapat izin beroperasi. Keuntungan besar yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya seolah sirna, terpuruk hingga titik terendah. Meskipun kemudian peningkatan mulai kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan tanda-tanda pemulihan kegiatan sektor perkebunan, tetapi tingkat pendapatan masih sangat fluktuatif dan penuh ketidakpastian. Besarnya pukulan krisis terhadap tingkat pendapatan bersih KSM dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Pendapatan Bersih KSM Periode 1928-1936

Tahun	Jumlah Pendapatan Pendapatan	Pendapatan per km/hari
1928	430.582	9,80
1929	461.094	10,53
1930	329.037	7,46
1931	202.408	4,59
1932	197.305	4,46
1933	85.884	1,94
1934	7.918	0,17
1935	46.128	1,04
1936	18.581	0,42

Sumber: M. Saichurrahman "Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri, *Skripsi.* Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2015, hlm. 102.

Nasib berbeda dialami industri rokok kretek Kediri. Berbeda dengan produk-produk perkebunan yang mengandalkan pasar internasional dan ambruk ketika pasar global mengalami disintegrasi, industri rokok kretek Kediri justru mendapatkan keuntungan karena usaha bisnis yang dilakukan bermain di pasar domestik. Bagi industri rokok kretek Kediri, masa depresi justru diwarnai dengan peningkatan jumlah produksi. Pada

tahun 1929, produksi rokok kretek di wilayah ini tercatat sebesar kurang lebih 2.100 juta batang, naik menjadi 2.310 pada tahun 1930. Produksi rokok kretek Kediri terus memperlihatkan tren peningkatan, yakni dari 2.560 juta batang pada 1931 menjadi 2.730 pada tahun 1933 dan 3.715 juta batang pada tahun 1934.[124] Peningkatan yang hampir 1 miliar batang ini tampak sangat kontras dibanding dengan kondisi yang dialami oleh KSM yang terperosok ke tingkat terendah.

Peningkatan bukan hanya dalam jumlah produksi rokok kretek, melainkan juga dalam jumlah pabrik rokok yang beroperasi di Keresidenan Kediri. Beberapa perusahaan menjelma menjadi perusahaan berskala besar. Data dalam laporan angket yang dilakukan Van der Reijden (1936) menyebutkan bahwa jumlah perusahaan kretek berskala besar di Keresidenan Kediri sebanyak 11 buah pada tahun 1929, semuanya milik pengusaha Tionghoa. Pada tahun 1933, jumlah perusahaan kretek besar telah menjadi 13 buah, dengan rincian 12 buah perusahaan milik Tionghoa dan satu perusahaan milik orang Jawa.[125] Gambaran lebih lengkap penyebaran perusahaan kretek besar di Keresidenan Kediri tersaji pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Jumlah Perusahaan Kretek Berskala Besar di Keresidenan Kediri, 1929

Kabupaten	Etnis Pemilik	1929	1930	1931	1932	1933	1934
Blitar	Tionghoa	8	8	8	8	8	7
Tulungagung	Tionghoa	1	1	1	1	3	4
Kediri	Tionghoa	1	1	0	0	0	0
Nganjuk	Tionghoa	1	1	1	1	1	1
Nganjuk	Jawa	0	0	0	1	1	1
Jumlah		**11**	**11**	**10**	**10**	**13**	**13**

Sumber: The Siauw Giap, "Socio-Economic Role of The Chinese in Indonesia, 1820-1940", dalam Angus Madison dan Ge Prince (ed), *Economic Growth in Indonesia, 1820*-1940 (Dordrecht: Foris Publications, 1989), hlm. 175. (teks, p. 159-183).

124 Amen Budiman dan Onghokham, *op.cit.*, hlm. 159.

125 B. van der Reijden, "Rapport betreffende eene gehouden enquete naar arbeidtoestanden in de industrie van strootjes en inheemsche sigaretten op Java", Vol.III: Oost Java (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1936), hlm. 7 dikutip The Siauw Giap, "Socio-Economic Role of The Chinese in Indonesia, 1820-1940", dalam Angus Madison dan Ge Prince (ed), *Economic Growth in Indonesia, 1820*-1940 (Dordrecht: Foris Publications, 1989), hlm.175.

Berdasarkan data pada tabel di atas tampak bahwa sebagian besar perusahaan rokok kretek berlokasi di Kabupaten Blitar, yang sebelumnya memang menjadi lokasi awal munculnya perusahaan-perusahaan rokok kretek, sedangkan di Tulungagung dan Nganjuk penambahan jumlah perusahaan rokok kretek besar sejak tahun 1932. Di Kabupaten Tulungagung jumlah perusahaan kretek besar terus tumbuh dalam dua tahun berikutnya. Surat kabar *De Indische Courant* juga memberitakan berkembangnya industri kretek di Tulungagung dan Nganjuk, serta upaya untuk meningkatkan produksi hariannya.[126] Salah satu pabrik rokok besar milik pengusaha Tionghoa di Tulungagung adalah Perusahaan Rokok Moro Seneng.[127] Di Keresidenan Kediri, perusahaan-perusahaan rokok kretek beroperasi dengan sistem depot. Dalam sistem ini, perusahaan membangun tempat kerja di desa-desa sekitar dimana agen-agen pabrik menyediakan bahan material kretek ke tempat-tempat kerja dan membeli produk sigaret yang dihasilkan.[128] Selain perusahaan-perusahaan kretek besar, di Keresidenan Kediri terdapat pula produsen kretek berskala kecil yang bisa jumlahnya lebih banyak. Baik data produksi rokok kretek dan jumlah perusahaan kretek dengan jelas mengindikasikan bahwa bagi produsen rokok kretek, masa krisis pada 1930-an masih memberikan keberuntungan bagi usaha mereka.

Keberuntungan industri rokok kretek Kediri pada masa depresi tampaknya terkait erat dengan penyesuaian gaya hidup yang dilakukan masyarakat. Penurunan daya beli akibat berkurangnya penghasilan di tengah hantaman krisis telah memaksa orang yang mempunyai kebiasaan merokok harus beralih ke produk rokok yang lebih murah. Rokok kretek Kediri menyediakan pilihan bagi para konsumen yang sedang mengalami keterbatasan uang yang ada di kantong, tetapi tetap ingin bisa merokok meskipun dengan rokok berharga murah. Dengan menggunakan bahan isian dan pembungkus yang lebih murah, serta tampilan yang lebih sederhana, produk rokok kretek Kediri mempunyai harga lebih rendah sehingga cocok dengan para perokok yang daya belinya tengah menurun. Harga yang lebih murah ini pulalah yang memampukan produsen rokok

126 *De Indische Courant,* 24 November 1934.

127 *De Indische Courant,* 1 September 1937.

128 The, *op.cit.*, hlm. 174.

Kediri pada masa sebelumnya bersaing dengan rokok kretek buatan Kudus, yang dibanderol dengan harga lebih mahal karena menggunakan kelobot pembungkus lebih baik dan racikan campuran isian yang berkualitas.[129]

Perdagangan di pasar tradisional menjadi lebih ramai. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan di sektor perkebunan, rumah tangga Eropa, dan pabrik-pabrik berpaling mengadu nasib ke pasar-pasar sebagai pedagang-pedagang dadakan. Pekerjaan dagang kecil-kecilan digeluti karena tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memperoleh penghasilan sekecil apapun demi menyambung hidup sehingga jumlah pedagang kecil bertambah banyak. Sejumlah pasar mingguan berubah menjadi pasar harian, diramaikan oleh pedagang-pedagang dadakan yang berjuang bertahan hidup di tengah-tengah situasi sulit yang menghimpit. Jaringan distribusi barang yang semula relatif sederhana berubah menjadi semakin rumit karena limpahan tenaga kerja yang tidak dapat lagi bergantung pada pekerjaan mereka terdahulu di sektor ekonomi Barat.[130]

Kontras dengan ramainya kegiatan perdagangan kecil, toko-toko besar melemah dan sebagian bahkan menghilang. Bukan hanya pasar tradisional mengalami peningkatan aktivitas akibat masuknya limpahan para penganggur baru, jenis pekerjaan tertentu juga bertambah jumlah orang yang menggelutinya dari orang-orang yang tengah mencari pijakan baru. Jumlah tukang, pengrajin, dan pemilik warung kopi dilaporkan meningkat drastis.[131] Kegiatan industri dan kerajinan tangan skala rumahan bermunculan dan meningkat jumlahnya, pabrik-pabrik kecil menyesuaikan diri dengan beralih ke pola eceran.[132] Di Tulungagung dilaporkan muncul 9 pabrik batik baru dan jumlah pekerja batik rumahan meningkat dari 229 orang menjadi 270 orang.[133]

Secara umum, dampak krisis ekonomi 1930-an dirasakan sebagai pukulan berat bagi kemakmuran Keresidenan Kediri, seperti bagian lain di Hindia Belanda. Namun, pukulan krisis dirasakan dengan tingkatan yang berbeda-beda oleh kelompok-kelompok yang berlainan. Orang-orang

129 Amen Budiman dan Onghokham, *op.cit.*, hlm. 156.

130 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 86-87.

131 *Ibid.,* hlm. 96-97.

132 *Ibid.,* hlm. 86-87.

133 *De Indische Courant,* 24 November 1934.

Eropa yang telah biasa hidup dalam kemapanan posisi dan penghasilan digambarkan Haccou sebagai jatuh miskin dan kondisi kehidupannya sangat menyedihkan. Sementara itu, kehidupan masyarakat bumiputera juga terpukul fondasi yang menopang ekonomi mereka akibat krisis, meskipun agak sedikit terkompensasi dari ekspansi yang terjadi dalam produksi tanaman pangan sehingga terlepas dari kelaparan dan kemiskinan yang kronis.[134]

Dampak negatif krisis terhadap penduduk bumiputera diindikasikan, misalnya, oleh jumlah jemaah haji yang anjlok secara tajam. Di Keresidenan Kediri, bersama dengan daerah lain di Jawa Timur, jumlah jemaah haji pada tahun 1930 sebanyak 18.006 orang dan pada tahun 1931 turun menjadi 11.104 orang. Angka tersebut terus merosot pada tahun berikutnya, yakni sebanyak 2.908 pada tahun 1932 dan sebanyak 1.142 orang pada tahun 1933. Pada tahun 1934, jemaah haji dari Kediri sebanyak 33 orang, sedangkan untuk seluruh Jawa Timur berjumlah 1.328 orang.[135]

Indikasi lain dari meningkatnya kesulitan hidup pada masa krisis adalah merebaknya kriminalitas. Harian *De Locomotief* memberitakan bahwa angka kejahatan di Kediri naik sebesar 7% pada kuartal terakhir tahun 1934, peningkatan kasus pencurian pada tahun sebelumnya dilaporkan jauh lebih besar. Terjadinya peningkatan tajam angka kriminalitas terkait dengan kasus pencurian kecil-kecilan, sedangkan pencurian dalam skala besar disebutkan tidak tersedia laporannya.[136] Sementara itu, di Kabupaten Blitar dilaporkan terjadinya peningkatan jumlah pencurian kopi perkebunan dalam beberapa tahun terakhir, selain itu terjadi pula peningkatan jumlah pencurian produk-produk pertanian milik penduduk di lahan-lahan pertanian, serta pencurian yang dilakukan di rumah-rumah penduduk. Peningkatan kriminalitas juga disebutkan terjadi karena perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan pencurian oleh polisi khusus kopi tidak berjalan dengan efektif. Problem ini dikatakan juga terkait dengan terjadinya pengurangan secara tajam jumlah personel aparat polisi pamongpraja, polisi lapangan, dan polisi kota dalam menghadapi

134 J.F. Haccou, *op.cit.*, hlm. 279-280.

135 *Indisch Verslag 1935 Vol II.* (Batavia: Landsdrukkerij, 1935), hlm. 113.

136 *De Locomotief,* 25 Oktober 1934.

meningkatnya kejahatan.[137] Atas kasus-kasus yang dilaporkan, pada tahun 1935, sebanyak 1.796 kasus pidana diselidiki oleh polisi. Jumlah ini meningkat dibandingkan perkara pidana yang ditangani polisi pada tahun 1934 sebanyak 1.750 kasus.[138] Kriminalitas juga terjadi dalam bentuk pencurian-pencurian kayu dari hutan-hutan jati milik pemerintah yang berlokasi di bagian selatan keresidenan, yakni Rejotangan di mana 17 orang pelaku berhasil ditangkap basah.[139]

Bukan hanya tindak kriminalitas saja yang meningkat, kesulitan akibat krisis juga memaksa sebagian orang hidup menggelandang. Kondisi ini digambarkan dalam sebuah berita surat kabar sebagai tanda-tanda tragis kemiskinan di Kediri. Diberitakan bahwa di Kediri berkeliaran orang-orang miskin, bukan dari kalangan pengemis biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup karena kehilangan sumber penghidupan akibat krisis sehingga untuk makan saja mereka diberitakan menggeledah tong sampah dan selokan untuk mencari sisa makanan untuk memuaskan rasa lapar. Mereka bermalam di pasar-pasar dan mencari tempat istirahat di beranda rumah-rumah kosong, bahkan di sepanjang trotoar kota.[140]

Kondisi berbeda dinikmati orang-orang Jepang dengan bisnis perdagangan yang digelutinya. Di tengah situasi krisis kedudukan mereka justru mengalami penguatan secara signifikan. Untuk Hindia Belanda, proporsi nilai impor dari Jepang menyumbang 11,4% dari total impor pada tahun 1929, angka ini masih lebih kecil dibanding andil impor dari Negeri Belanda sebesar 21,3% pada tahun yang sama. Akan tetapi, memasuki tahun-tahun krisis performansi kedua sumber barang impor mengalami perkembangan yang berkebalikan. Andil impor dari Jepang melejit naik, sedangkan impor dari Negeri Belanda menurun secara drastis. Pada tahun 1934, andil nilai impor dari Jepang menyumbang 32% dari total nilai impor Hindia Belanda, sedangkan andil nilai impor dari Negeri

137 *Soerabaiasch Handelsblad,* 5 Mei 1937.

138 *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*," 15 Januari 1936.

139 *De Indische Courant*, 12 November 1935.

140 *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-indie*, 30 Juli 1935.

Belanda turun drastis kurang lebih tinggal separuh ke angka 11,8%.[141] Sebuah kalkulasi menyebutkan bahwa pada periode 1930-1934, impor dari Jepang meningkat rata-rata 19 persen per tahun.[142]

Tren umum yang berlaku di Hindia Belanda ini juga berlangsung di wilayah Kediri. Di Distrik Pare, misalnya, dilaporkan terdapat tiga toko Jepang yang memperdagangkan produk-produk Jepang yang berharga murah dan bahkan sejumlah penduduk bumiputera ikut melibatkan diri dalam perdagangan produk-produk murah Jepang secara kecil-kecilan.[143] Fenomena yang sama agaknya juga berlangsung di bagian-bagian lain di Keresidenan Kediri. Secara umum, Liem menyebutkan bahwa toko-toko Jepang tersebar di 64 kota besar dan kecil di Pulau Jawa, termasuk di Kediri.[144] Perdagangan Jepang meraih posisi mengesankan dalam pasar Jawa di tengah krisis 1930-an karena harga-harga produknya yang sangat murah. Daya saing produk Jepang dari segi harga yang lebih murah dimungkinkan berkat tiga alasan pokok, yakni biaya tenaga kerja di Jepang yang rendah, penggunaan maskapai pelayaran Jepang sendiri yang berbiaya rendah, serta kebijakan devaluasi yen pada tahun 1931 dan 1933 yang membuat harga produk-produk Jepang semakin murah.[145]

Perkembangan keadaan perekonomian yang secara umum memburuk akibat terpaan krisis dan ekspansi pesat perdagangan Jepang di pasar Hindia Belanda termasuk di Kediri memberikan sinyal mendesaknya dilakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan agar tidak bertambah parah. Bagian berikut akan memaparkan berbagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun DJB.

---

141 Saroso Wirodihardjo, *De Contingenteeringspolitiek en Hare Invloed op de Indonesische Bevolking* (Djakarta: Indira, 1951), 17.

142 Ian Brown, "Some Closing Remarks: An Agenda for Further Research", dalam Shinya Sugiyama dan Milagros C. Guerrero (ed), *International Commercial Rivalry in Southeast Asia in the Interwar Period* (New Haven: Yale Southeast Asian Studies, 1994), hlm. 217.

143 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 86.

144 Liem Twan Djie, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia dan Perwakilan KITLV, 1995), hlm. 78.

145 Nawiyanto, *Matahari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang-Cina di Jawa Pada Masa Krisis 1930-an dan 1990-an* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 51.

INTERVENSI DI MASA DEPRESI

Periode krisis 1930-an merupakan dekade yang diwarnai dengan intervensi pemerintah secara luas dan intensif dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi di Hindia Belanda. Krisis 1930-an memperlihatkan bahwa perekonomian Hindia-Belanda rentan terhadap siklus perdagangan global. Corak agraris dan peran utamanya sebagai eksportir bahan-bahan mentah membuatnya juga rentan mengalami kemunduran ekonomi. Jatuhnya harga produk-produk ekspor jauh lebih parah dibanding turunnya harga produk-produk impor sehingga *terms of trade* Hindia Belanda memburuk.[146] Pemerintah memandang bahwa dalam situasi krisis prinsip non-intervensi tidak mungkin dipertahankan lagi demi menaati aturan-aturan perdagangan dan persaingan bebas, apalagi setelah langkah-langkah yang mengindikasikan tanda-tanda kearah praktik proteksionis ditempuh oleh berbagai negara di mana Hindia Belanda menjalin hubungan-hubungan ekonomi.[147] Adopsi *Chadbourne Agreement* pada 1931 oleh negara-negara Eropa yang menjadi pasar gula dari Jawa dan pembatasan-pembatasan tarif yang diberlakukan di sejumlah negara Asia yang menjadi pasar bagi produk perkebunan khususnya gula berdampak besar bagi perekonomian berbasis perkebunan termasuk Kediri dan Jawa Timur umumnya. Pada periode krisis 1930-an inilah pemerintah dipaksa mengubah kebijakan ekonomi bebas (*laizzes-faire*) kearah kebijakan ekonomi terpimpin yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi-intervensi kebijakan di bidang ekonomi yang dipandang urgen dalam keadaan yang luar biasa.[148]

Berbagai langkah intervensi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, baik di tingkat pusat maupun di daerah sebagai tindak lanjut implementasinya. Di tingkat pusat, pemerintah Hindia Belanda melakukan

146 `Ge Prince, "Kebijakan Ekonomi di Indonesia", dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 241-242.

147 `Ge Prince, "Dutch Economic Policy in Indonesia, 1870-1942", dalam Angus Maddison dan Ge Prince (eds), *Economic Growth in Indonesia, 1820-1940* (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1989), hlm. 216.

148 `Francien van Anrooij, *De Koloniale Staat (Negara Kolonial) 1854-1942* (Leiden: Nationaal Archief, 2014), hlm. 182.

reorganisasi kelembagaan yakni penggantian Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan (*Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel)* menjadi Departemen Urusan Ekonomi (*Departement van Economische Zaken).*[149] Pendirian Departemen Urusan Ekonomi ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemerintah (*Gouvernementsbesluit)* tanggal 22 Desember 1933 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1933 No.509).* Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang sosial-ekonomi dapat dijalankan secara lebih efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Keberadaan departemen yang baru ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk "Membelokkan arah spiral yang menurun" dari perekonomian Hindia Belanda yang diwarnai penurunan ekspor yang tajam, nilai gulden yang tinggi, penurunan pendapatan masyarakat, ancaman banjir barang impor dari Jepang berharga murah, pemecatan pekerja secara masif, dan jumlah pengangguran yang membengkak.[150]

Dalam hubungan dengan Jepang, Departemen Urusan Ekonomi melakukan negosiasi yang berjalan alot untuk membatasi impor tekstil dari Jepang demi melindungi industri tenun dalam negeri yang tengah bangkit. Upaya ini direalisasikan, misalnya, dengan perjanjian tahun 1936 dan tahun 1937. Untuk tujuan yang sama, perundingan juga dilakukan untuk membatasi impor tekstil dari Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda juga mengirim secara resmi Delegasi Departemen Urusan Ekonomi yang dipimpin G.H.C. Hart berangkat ke Belanda untuk mendiskusikan kerjasama ekonomi yang lebih menguntungkan. Salah satu hasilnya berupa pengambilalihan hutang Hindia-Belanda sebesar *f*25 juta oleh Pemerintah Belanda di Den Haag untuk membiayai langkah-langkah intervensi yang dipandang perlu demi meningkatkan kemakmuran masyarakat yang sedang bergulat dengan krisis ekonomi. [151]

Berbagai bentuk intervensi dilakukan otoritas kolonial di Kediri untuk meringankan beban penduduk yang hidupnya tengah dalam kesusahan akibat kehilangan sumber mata pencaharian hidup. Tindakan yang

149 *Ibid*, hlm. 7.

150 *Ibid*, hlm. 182.

151 Francien van Anrooij, *op.cit.*, hlm. 183.

diambil pemerintah di antaranya menyediakan tempat dan kesempatan berusaha dengan mendirikan pasar baru. Hal ini dilakukan, misalnya, di Distrik Pare.[152] Intervensi juga dilakukan dalam bentuk penyaluran bantuan dalam berbagai bentuk kepada para pengangguran. Pada tahun 1934, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kolonial di Keresidenan Kediri dilaporkan mencapai angka sebesar *f*9.150.[153] Tidak ada detail laporan mengenai jumlah penerima bantuan di wilayah Keresidenan Kediri, tetapi dapat dipastikan bahwa bantuan disalurkan kepada para pengangguran baik dari kalangan Eropa, Cina, maupun bumiputera.

Data tahun 1934 untuk Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa jumlah pengangguran yang terdaftar mendapat bantuan dari Komite Pengangguran Daerah per 31 Desember 1934 sebanyak 3.334 orang, yang terdiri dari 1.026 orang Eropa, 1.946 orang Pribumi, dan 362 orang Timur Asing. Total bantuan yang dibayarkan kepada mereka mencapai *f*551.972 dengan rincian sebesar *f*378.518 dibayarkan kepada pengangguran berkebangsaan Eropa, sebesar *f*117.829 dibayarkan kepada pengangguran bumiputera, dan sebesar *f*55.626 diberikan kepada pengangguran golongan Timur Asing.[154] Pada Januari 1938 masih tercatat sebanyak 509 orang pengangguran yang mendapatkan alokasi bantuan dari Komite Pengangguran dengan total bantuan dana yang disalurkan sebesar *f*216.013. Mayoritas pengangguran yang masih menerima bantuan adalah golongan orang Eropa yang berjumlah 367 orang dengan alokasi bantuan dana sebesar *f*208.210, sedangkan pengangguran bumiputera yang menerima bantuan tercatat sebanyak 85 orang dengan total bantuan sebesar *f*3.689 dan pengangguran golongan timur asing sebanyak 57 orang dengan bantuan yang disalurkan sebesar *f*4.117.[155]

Penyaluran bantuan tidak hanya diberikan kepada pengangguran dari semua kalangan yang terdata oleh otoritas pemerintah, melainkan juga menyasar kepada para gelandangan dalam bentuk bantuan

152 Clifford Geertz (1986), *op.cit.,* hlm. 86-87.

153 Egbert de Vries, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, 1985), hlm. 42.

154 *Indisch Verslag 1935 Vol II* (Batavia: Landsdrukkerij, 1935), hlm. 194.

155 *Indisch Verslag 1939 Vol II* (Batavia: Landsdrukkerij, 1939), hlm. 240.

makanan. Diberitakan, misalnya, Wali Kota Kediri Mr. L.K. Wennekendonk memintakan perhatian dari berbagai kalangan pada sebuah rapat Dewan Kota Kediri. Atas inisiatif wali kota dan dukungan para pejabat pemerintahan bumiputera dan Perkumpulan Muhammadiyah, bantuan makanan telah diberikan secara gratis kepada orang-orang yang jatuh melarat tersebut berkat bantuan keuangan yang disediakan pemerintah kota.[156] Lebih jauh diberitakan tentang himbauan bagi masyarakat agar tidak lagi memberikan bantuan uang secara langsung kepada para gelandangan tersebut, melainkan menyalurkannya melalui kas perkumpulan Muhammadiyah.[157]

Selain upaya pemerintah, terdapat pula Sub-Sentral Komite Urusan Pengangguran (*Sub-Central Werklozen Comite*) Kediri. Komite ini melakukan penggalangan dana dari berbagai pihak untuk membantu orang-orang yang menderita akibat kehilangan pekerjaan.[158] Dalam sebuah berita dilaporkan bahwa pada bulan Juli 1933 Sub-Sentral Komite Urusan Pengangguran Kediri berhasil mengumpulkan dana dari kalangan masyarakat baik pribadi maupun korporasi sebesar *f*2.850,89. Dalam enam bulan pertama tahun 1933, HVA menyumbangkan dana sebesar *f*1506, komite juga menerima dana dari karyawan KSM (*f*24.30), Soos Brantas Kediri (*f*11,51), PG Bogokidoel (*f*11), PG Garoem (*f*20,36), PG Kawarasan (*f*39,49), PG Kentjong (*f*1,86), PG Menang (*f*38,77), PG Minggiran (*f*19,75), Modjopanggoeng (*f*40), PG Pesantren (*f*26), PG Poerwoasri (*f*24), PG Soemberdadie (*f*109, 62), dan PG Tegowangi (*f*76,93). Sumbangan dana juga berasal dari Cultuuronderneming Badek (*f*7,50), Bendoredjo (*f*59), Bogorprada (*f*13), Djengkol (*f*26,25), Galoehan (*f*40,25), Karangdinojo (*f*11,25), Karangredjo (*f*3), Kenteng (*f*15), Mangli (*f* 5), Kebon Doeren (*f*4,50), Poentjoe (*f*4,50), Redjo Agoeng (*f*8), Satak (*f*16), Soekaboemi (*f*10), NV Aniem (*f*27,50), pegawai ANIEM (*f*28,90), dan NV Mewini (*f*7.60). Sumbangan dana juga datang dari penggelaran Pesta Malam Blitar (*f*300), penduduk Blitar (*f*104,75), penduduk Kediri (*f*132,80), HCS Tulungagung (*f*18,50), NV Electra Tulungagung (*f*7,5), dan karyawan Electra (*f*6), serta sejumlah individu yang hanya disebutkan

156 *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-indie*, 30 Juli 1935.

157 *De Indische Courant,* 26 Juli 1935.

158 *Soerabaiasch Handelsblad,* 17 Agustus 1933.

inisialnya, misal Mr. G.D.B. (*f*10), Mr. Z.J.G.S, Mr. C.J.A.K, dan Mr. F.H.G masing masing menyumbang *f*2,50.[159]

Penggalangan tidak hanya bersifat insidental pada tahun tertentu, melainkan berlangsung secara terus menerus selama beberapa tahun. Sebuah berita menyebutkan bahwa pada bulan Januari 1937, Komite Pusat Bantuan untuk Pengangguran (*Hoofdcomite voor Steun aan Werkloozen*) Kediri mengumpulkan sumbangan dana sebesar *f*230,33 dari berbagai tempat dengan rincian, yakni Kediri (*f*101,47), Tulungagung (*f*6,50), Blitar (*f*93,75), dan Pare (*f*28,61), sedangkan sebanyak *f*2.262,46 dikeluarkan untuk membayar beberapa tanggungan.[160] Dalam berita lain disebutkan bahwa pada bulan Agustus 1937 komite menerima sumbangan individual dari masyarakat sebesar *f*173,98. Secara lebih detail disebutkan di Kediri terkumpul sumbangan sebanyak *f*32,78, di Pare sebesar (*f*28,71), Blitar sebesar (*f*85,85), Kertosono sebesar (*f*19,49), dan Tulungagung sebesar (*f*7,15), sedangkan bantuan dari Komite Eropa disebutkan berjumlah *f*1.747,25.[161]

Kegiatan Komite Bantuan Pengangguran tidak berhenti pada penggalangan dan penyaluran dana, melainkan juga dalam bentuk kursus-kursus. *De Indische Courant* memberitakan dalam terbitan edisi 13 Maret 1933 bahwa sebuah pertemuan diselenggarakan di Societeit Brantas yang dihadiri antara lain Kepala Kantor Ketenagakerjaan Jawa Timur, A.G. Vreede, yang sekaligus juga menjabat Komisaris Urusan Pengangguran, dan Residen Kediri, Mr. M.J.J. Treur. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang persoalan perlunya penyediaan lapangan pekerjaan dan penyelenggaraan berbagai kursus bagi para penganggur. Atas prakarsa Mr. Van Wennekendonk memang telah ada upaya untuk membentuk sebuah panitia yang bertujuan menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur, tetapi dalam pertemuan tersebut ditegaskan tentang perlunya upaya ini ditangani secara lebih baik oleh komite. Pertemuan ini akhirnya menyepakati penyelenggaraan kursus, yakni elektro-teknis dan akuntansi. Sebagai pemimpin kursus elektro-teknis adalah Mr. Ir. Tersteeg dari Perusahaan Listrik ANIEM, sedangkan

159 *Soerabaiasch Handelsblad,* 17 Agustus 1933.

160 *De Indische Courant,* 20 Februari 1937.

161 *De Locomotief,* 1 Oktober 1937.

kursus akuntansi ditangani Mr. J.C. de Jonge yang juga dari perusahaan ANIEM. Untuk tujuan ini, sebuah komisi pengawas juga dibentuk dengan keanggotaan terdiri dari Ir. Tersteeg, Mr. Tuinhoff, Dr. Kodyat, dan Mr. W. Berg. Kegiatan kursus-kursus ini juga diawasi lebih lanjut oleh Komisaris Bantuan Pengangguran Provinsi Jawa Timur.[162] Kursus lain yang diberikan Komite kepada para pengangguran bumiputera adalah kursus stenografi. Kursus ini diberitakan dilakukan misalnya di Balai Persatoean di sebelah Sekolah Taman Siswa Kediri. Kursus yang diselenggarakan secara gratis ini dipimpin oleh R. Poespowardojo dan di bawah pengawasan Komite Bantuan Pengangguran Bumiputera *(Comite tot steun aan Inheemsche Werkloozen*).[163]

Untuk meringankan beban penduduk, pemerintah juga memberikan keringanan pajak tanah yang harus mereka bayar. Pada tahun 1934, pembebasan pajak karena alasan krisis (*crisis ontheffing*) yang diberikan di Keresidenan Kediri mencapai *f*1.080, sedangkan pembebasan pajak karena kegagalan panen sebesar *f*124. Jumlah nilai pembebasan pajak karena alasan krisis di Keresidenan Kediri pada tahun 1934 menempati urutan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Pembebasan pajak karena krisis pada urutan kedua dari segi besarannya ditempati Keresidenan Surabaya dengan jumlah sebesar *f*1.021, sedangkan di keresidenan lainnya lebih kecil lagi, yakni Bojonegoro (*f*260), Madiun (*f*337), Malang (*f*997), Besuki (*f*877), dan Madura (*f*254).[164]

Intervensi lain yang dilakukan pemerintah memperbaiki keadaan perekonomian penduduk, pemerintah juga memutuskan untuk meningkatkan layanan kredit yang tersedia bagi penduduk secara umum, yang tidak dapat dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan yang ada. Langkah kelembagaan penting yang diambil pemerintah untuk tujuan ini adalah dengan mengganti *Afdeeling bank* dengan Algemene Volkscrediet Bank (AVB) pada tahun 1934. Dengan pemberlakuan kebijakan ini, maka empat *Afdeeling bank* yang ada di Keresidenan Kediri juga berubah menjadi AVB, bersamaan dengan *Afdeeling bank* lainnya di Hindia

162 *De Indische Courant,* 13 Maret 1933.

163 *De Indische Courant,* 1 September 1937.

164 *Indisch Verslag 1935,* Vol I, hlm. 412.

Belanda yang secara keseluruhan berjumlah 94 buah.[165] Pada bulan Februari 1938, Presiden Algemeene Volkscrediet Bank, Mr. F.J. Muller, dilaporkan melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang AVB bersama dengan Residen Kediri.[166]

Tidak banyak data mikro tentang detail kegiatan AVB Kediri pada masa depresi yang dapat dijangkau sejauh ini. Dari sedikit data yang ada, diketahui, misalnya, tentang peran AVB dalam menyumbang proses pembentukan kapital di Kemantren, Distrik Ngadiluwih, Kediri. Diberitakan bahwa di Kemantren didirikan sebuah bank desa berskala kecil dengan modal awal sebesar *f*500 yang berasal dari AVB Kediri. Dalam waktu enam tahun, demikian diberitakan, bank desa ini telah berhasil melunasi kembali hutangnya, bahkan mampu mendepositkan sejumlah uang ke AVB. Dengan bunga simpanan yang diterimanya, setiap tahun uang yang tersimpan di AVB terus bertambah sehingga bank ini memiliki simpanan cukup besar. Selain itu, masing-masing peminjam pada bank desa ini juga merupakan pemegang saham, dalam arti bahwa bagian terbesar dari bunga yang dikenakan terdaftar sebagai tabungan atas nama peminjam. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah bank desa ini berkisar antara *f*5 hingga *f*20 gulden. Jika peminjam, entah seorang penjaga gudang, kusir dokar, petani, atau seorang tukang membutuhkan sejumlah kecil uang untuk usaha atau bisnis, misalnya *f*10, maka pinjamannya akan lunas dalam waktu hingga 10 minggu dengan cicilan *f*1,20 per minggu. Setelah sepuluh minggu mereka telah membayar *f*12 untuk jumlah pinjaman dan bunga. Dari jumlah bunga yang dibayarkan ini, 40 sen dimasukkan sebagai bunga bank dan *f*1,20 terdaftar sebagai tabungan atas nama peminjam.[167]

Sementara itu, De Javasche Bank pada masa krisis mengeluarkan surat edaran bersifat rahasia kepada cabang-cabangnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu, baik uang kertas maupun uang logam. Kondisi perekonomian yang susah tampaknya juga

165 J.O. Sutter, "Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institutions of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of of the General Elections", *Ph.D. Thesis* (Ithaca: Cornell University, 1959), hlm. 92.

166 *De Indische Courant*, 25 Februari 1938.

167 *De Locomotief,* 1 Maret 1940.

menimbulkan efek negatif berupa meningkatnya peredaran uang palsu dalam masyarakat. Dalam salah satu korespondensinya, agen DJB Kediri, Blokbergen, menyampaikan penjelasan tentang bagaimana uang palsu yang ditemukan di Kediri ditangani dengan melibatkan pihak pejabat yang berwenang. Disebutkan dalam suratnya bahwa uang palsu yang ditemukan akan dikirim dalam sampul yang disegel oleh DJB, melalui *Ontvanger van 's Lands Kas* ke Kantor Pusat Pengiriman Uang (*Centraal Remisekantoor*) di Batavia.[168]

Laporan tentang penemuan uang palsu di Kediri disebutkan dalam beberapa korespondensi yang terjalin antara agen DJB Kediri dengan pimpinan DJB yang bertempat di Batavia. Dalam surat tertanggal 10 Oktober 1931, agen DJB Kediri, Blokbergen, melaporkan bahwa kasirnya pada tanggal 5 Oktober 1931 menerima setoran uang dari Kepala Staatspoor (SS) Kediri sebesar *f*710, dan di dalamnya ditemukan sebuah uang setengah gulden palsu emisi tahun 1929, dan pada tanggal yang sama diterima setoran dari Kepala Kompleks Telepon Kediri sebesar *f*101 dan ditemukan gulden palsu emisi tahun 1858. [169] Dalam korespondensi yang lain tertanggal 30 November 1931, Blokbergen melaporkan bahwa pada 3 November 1931 diterima setoran dari Zoutregie Papar sebesar *f*1.219 yang di dalamnya terdapat uang palsu setengah gulden keluaran tahun 1929. Pada tanggal 12 November, kasir DJB menerima setoran dari Kepala Kompleks Telepon sebesar *f*599,50 dan di dalamnya ditemukan uang palsu dengan nilai nominal setengah gulden keluaran tahun 1921, demikian pula diterima setoran dari Zoutregie Papar sebesar *f*385 dengan temuan uang palsu bernilai nominal setengah gulden keluaran tahun 1928.[170] Dalam surat tertanggal 19 Januari 1933, agen DJB Kediri juga melaporkan kepada pimpinan DJB di Batavia tentang uang palsu senilai *f* 39.50 dengan rincian satu rijksdaalder palsu (senilai *f*2.50), tujuh gulden palsu (senilai *f*7), 60 buah setengah gulden palsu (senilai *f*30) dan sejumlah uang rusak.[171]

168 Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk brieven No. 105/13: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 9 Januari 1931*.

169 *Ibid*, 10 Oktober 1931.

170 Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk brieven No. 104/32: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 30 November 1931*.

171 Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk brieven No. 104/32: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia, 19 Januari 1933*.

Intervensi lain yang dilakukan De Javasche Bank pada masa krisis ekonomi 1930-an berkenaan dengan pengelolaan pasar beras. Produk tanaman padi dan palawija dari para petani mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada masa krisis karena berkurangnya persaingan penggunaan lahan sawah dengan tanaman tebu akibat penutupan dan penghentian sementara pabrik-pabrik gula. Untuk melindungi produksi tanaman pangan, khususnya padi, yang diusahakan para petani pada tahun 1933 pemerintah kolonial mulai memberlakukan larangan impor beras dari luar negeri. Meskipun dengan maksud melindungi sektor padi penduduk bumiputera, pengumuman dan implementasi larangan impor beras di lapangan memunculkan berbagai suara miring. Salah satu respons yang muncul menyatakan bahwa larangan impor membuat harga beras menjadi kacau dan bukan petani yang menikmati peningkatan harga, melainkan para pedagang perantara yang terlibat dalam perdagangan padi. Menurut Agen DJB Kediri, kenaikan harga beras yang sempat terjadi beberapa saat menyusul pengumuman pemerintah yang melarang kegiatan impor beras dari luar terjadi akibat adanya spekulasi para pedagang Tionghoa yang terlibat dalam bisnis impor beras [172]

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap pada pimpinan DJB, Agen DJB Kediri memberikan laporan tentang perkembangan harga beras dalam berbagai kategori di wilayah Kediri dan di beberapa tempat lain di Jawa Timur untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap pada pimpinan DJB di Batavia. Dalam laporan kepada pimpinan DJB di Batavia disebutkan misalnya harga-harga padi gogo di Distrik Wlingi sebesar 1,60 gulden per pikul dan di Tulungagung dengan harga 1,90 gulden per pikul, sedangkan beras putih desa yang memiliki kualitas lebih baik dihargai 3,40 gulden per pikul dan dijadikan empat gulden per pikul. Berdasarkan informasi relasi DJB bernama, Tjio Gie Kwie, yang mengelola belasan penggilingan padi bersama anggota keluarganya, agen menyampaikan dalam laporannya bahwa kondisi harga beras di Bondowoso untuk harga padi sawah sebesar dua gulden dan untuk beras B (yang 20-30% rusak) sebesar 4,50 gulden per pikul, sedangkan di Jember harga spekulasi padi sekitar 3,85 hingga 5,70 gulden per pikul, tetapi harga tersebut

172 Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk brieven No. 106/3: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 10 Oktober 1931*.

turun lagi menjadi 4,50 gulden.[173] Terlepas dari adanya respons negatif, pertumbuhan produksi padi untuk pasar domestik pada tahun 1930-an diakui berkat insentif positif dari pembatasan impor beras tersebut sehingga pada tahun 1939 Jawa mampu menjelma menjadi eksportir beras dan bahkan Hindia Belanda secara keseluruhan mampu berswasembada beras pada tahun 1941.[174]

173 *Ibid.*

174 Pierre van der Eng, "Market Responses to Climate Stress: Rice in Java in the 1930s", *Australian Economic History Review*, Vol. 50, No. 1, hlm. 66.

BAB 3

Masa Transisi Kekuasaan dan Perbankan

Masa pendudukan Jepang dan revolusi merupakan periode yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai bangsa dan negara. Masa pendudukan Jepang menggantikan masa Hindia Belanda yang telah lama mapan dan tak tergoyahkan, sedangkan masa revolusi mengakhiri masa pendudukan Jepang yang meskipun singkat, tetapi penuh dengan perubahan. Periode revolusi sendiri bagi Indonesia telah menjadi alat untuk menegakkan kemerdekaan.[1] Dalam kedua episode sejarah, berlangsung tiga kali transisi kekuasaan politik dengan jeda waktu yang sangat pendek, yakni transisi kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942, dari pemerintah pendudukan Jepang ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1945, dan transisi kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda (*NICA*), yang berhasil menegakkan kembali kekuasaan di sebagian wilayah Indonesia, kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1949.

Di bawah permukaan gelombang besar transisi kekuasaan politik tersebut, banyak sekali terjadi perubahan dalam lingkup yang lebih kecil sebagai implikasinya, tidak terkecuali dalam dunia perbankan. Dalam sektor ini, masa Jepang dan revolusi kemerdekaan menyaksikan likuidasi De Javasche Bank dan penggantian perannya sebagai bank sentral oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Kekalahan Jepang disusul dengan kehadiran

1 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 421, 446.

kembali De Javasche Bank milik Belanda dan pendirian Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral milik Indonesia dalam waktu tidak lama kemudian, dan diikuti dengan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Proses yang berlangsung secara nasional tersebut berpengaruh terhadap perkembangan di tingkat lokal sehingga bab ini secara khusus akan menguraikan proses transisi kekuasaan yang terjadi di wilayah Kediri dan implikasinya dalam konteks perbankan dan dinamika perekonomian secara umum di wilayah ini.

TRANSISI KEDIRI DARI BELANDA KE JEPANG

Serangan mendadak Jepang atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 mengobarkan Perang Pasifik.[2] Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, merespon serangan Jepang tersebut dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Pasukan Jepang dengan cepat melakukan gerakan ofensifnya ke berbagai wilayah Hindia Belanda. Jepang mendarat di Tarakan dan menguasai kota minyak Kalimantan Timur ini pada tanggal 11 Januari 1942, disusul dengan jatuhnya kota-kota lain ke tangan Jepang, yakni Balikpapan (24 Januari 1942), Pontianak (29 Januari 1942), Samarinda (3 Februari 1942), dan Banjarmasin (10 Februari 1942).[3] Selanjutnya, pasukan Jepang menyerang Sumatera dan berhasil menguasai Kota Palembang dan sekitarnya pada 16 Februari 1942. Dengan jatuhnya Kalimantan dan Sumatera, sasaran ofensif pasukan Jepang berikutnya adalah Jawa.[4]

Pasukan Serikat yang terdiri dari pasukan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat mencoba membendung ofensif pasukan Jepang ke Jawa dengan membentuk Komando Gabungan yang dikenal *American British Dutch Australian Command* (ABDACOM) yang bermarkas di Lembang, Jawa Barat. Jenderal Sir Archibald Wavell ditunjuk sebagai

2 Peter Post dan William H. Frederick, *et al.* (editor), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill, 2010), hlm. 6.

3 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN, Balai Pustaka, 1984), hlm. 1.

4 Anthony J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 15.

Panglima Perang ABDACOM. Sementara itu, Letnan Jenderal H. Ter Poorten diangkat sebagai Panglima Perang *Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL).[5] Pasukan yang dikerahkan untuk menghadapi ofensif Jepang ke Jawa, khususnya di Jawa Barat, terdiri atas: tiga resimen infanteri Belanda, tiga batalion Australia, dua kompi pasukan berlapis baja, satu kompi Taruna Akademi Militer Kerajaan, dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan.[6] Kekuatan Serikat untuk mempertahankan Jawa Tengah terdiri 4 batalion infanteri, dan untuk mempertahankan Jawa Timur mengerahkan kekuatan tiga batalion, satu batalion marinir, dan satuan-satuan artileri Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.[7] Namun, Pasukan Serikat yang dikerahkan untuk mempertahankan Pulau Jawa tidak didukung oleh pasukan tempur udara, karena dalam pertempuran sebelumnya Jepang telah berhasil merusak segala fasilitas pasukan tempur Serikat di Malaya, Kalimantan, dan Sumatera.[8]

Pasukan Jepang yang dikirim untuk menguasai Jawa dipimpin Panglima Tinggi Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Untuk merebut Jawa Barat, Jepang mengerahkan kekuatan tiga resimen infanteri, satu resimen kavaleri, zeni, dan angkutan. Operasi ini juga didukung satu detasemen dari Divisi Ke-38 yang terdiri dua batalion infanteri di bawah pimpinan Kolonel Shoji. Sementara itu, untuk menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jepang menugaskan pasukan Angkatan Darat dari Divisi Ke-48 yang terdiri dari tiga resimen infanteri beserta sebuah brigade infanteri dengan bantuan satu batalion pasukan perintis dan beberapa satuan artileri dan zeni, serta Brigade Sakaguchi. Pengerahan pasukan Jepang dalam merebut Jawa masih didukung dengan pasukan tempur udara lengkap dengan beberapa pesawat pembom.[9]

Pendaratan pasukan Jepang di Jawa dilakukan di Eretan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah), dekat perbatasan Jawa Timur pada 1 Maret 1942. Dari Eretan pasukan Jepang di bawah pimpinan Kolonel

---

5 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.,* hlm. 2.

6 A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 1: Kenangan Masa Muda* (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1982), hlm. 44.

7 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *loc.cit.*

8 Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi,* Djilid Pertama (Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 301.

9 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 3.

Toshinori Shoji bergerak ke Bandung dengan terlebih dahulu menduduki Subang. Dari Subang pasukan ini bergerak cepat menguasai Lapangan Terbang Kalijati dengan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Serikat. Pasukan Serikat pada tanggal 2, 3, dan 4 Maret 1942 mencoba merebut Subang dan Lapangan Terbang Kalijati, tetapi berhasil dipukul mundur pasukan Jepang. Pada 5 Maret 1942, pasukan Jepang bergerak cepat menyerang Kota Bandung dari arah utara dengan merebut Ciater. Setelah gagal mempertahankan Ciater, pasukan Belanda (Serikat) mundur ke Lembang sebagai kota pertahanan terakhir.[10] Di tempat lain, pada hari itu juga, 5 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil merebut Batavia. Dari Batavia pasukan ini bergerak ke arah selatan menduduki Buitenzorg (Bogor). Pada 6 Maret 1942 ketika pasukan Jepang melakukan serangan ke Bandung, Panglima KNIL, Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan komandan tempur Belanda di Jawa Barat, J.J. Pesman, untuk menghindari pertempuran di Bandung karena kota ini penuh warga sipil. Pada keesokan hari, 7 Maret 1942, pasukan Jepang menguasai Lembang sebagai pertahanan terakhir Belanda dan pada hari itu juga J.J. Pesman menyatakan penyerahan lokal atas Bandung kepada Kolonel Shoji.[11]

Sementara itu, setelah mendarat dan menguasai Kragan (Jawa Tengah), pasukan Jepang dari Divisi Ke-48 meneruskan ofensif ke wilayah Jawa Timur. Benteng-benteng pertahanan Belanda di Jawa Timur terdapat di Wonokromo, Sidoarjo, dan Porong. Di antara ketiga benteng ini, Porong merupakan benteng Belanda yang paling kuat. Menurut perhitungan Belanda, serangan musuh pertama-tama akan diarahkan untuk menguasai Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Hindia Belanda, selanjutnya musuh akan bergerak menyerang benteng pertahanan pertama di Wonokromo. Pasukan Belanda akan mundur untuk sementara waktu sambil mengkonsolidasikan diri ke Benteng Sidoarjo. Di tempat ini kekuatan Belanda mengatur strategi dan taktik pertempuran sambil menunggu bala bantuan dari Semarang atau Batavia untuk selanjutnya merebut kembali Surabaya dari tangan musuh. Jika upaya gagal, pasukan Belanda akan bertahan di Porong sebagai benteng pertahanan terakhir.

10 *Ibid*, hlm. 4.

11 Anthony J.S. Reid, *op.cit.*, hlm. 15.

Di benteng pertahanan Porong yang kuat ini pasukan Belanda diyakini dapat menghalau musuh dengan pertempuran habis-habisan.[12]

Dugaan tersebut ternyata meleset, pasukan Jepang tidak mendarat dan menguasai Kota Surabaya terlebih dahulu. Justru pada 7 Maret 1942, pasukan Jepang muncul di Porong pada waktu Maghrib dan dengan mudah dapat menguasai benteng pertahanan Porong. Selain tidak adanya dukungan dari masyarakat setempat, pasukan Belanda juga dibuat panik oleh berita-berita yang dihembuskan penduduk bahwa Jepang telah menguasai daerah-daerah Jawa Timur sambil berteriak-teriak *"Nippon teko! Nippon teko"* [Jepang datang!, Jepang datang!]. Setelah Porong dikuasai pada malam hari, 7 Maret 1942, pasukan Jepang menyerang pertahanan Belanda di Sidoarjo dan masuk Surabaya. Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Jepang pada pagi hari, 8 Maret 1942, setelah mendapat perlawanan dari pasukan Belanda di Benteng Wonokromo.[13]

Pasukan Jepang yang masuk ke Kediri datang dari arah Pantai Brondong dekat Bojonegoro. Mereka bergerak menuju Kota Kediri melalui Nganjuk ke selatan. Di Kecamatan Pace, sebagian pasukan Jepang mengambil rute Warujayeng terus ke Prambon dan Pabrik Gula Meritjan. Sebagian lainnya dari Kecamatan Pace ke Kota Kediri melalui Kecamatan Grogol.[14]

Kedatangan pasukan Jepang menyebabkan pertempuran dengan pasukan Belanda di Benteng Blokhuis.[15] Benteng ini didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1835 dan difungsikan untuk menjaga area gedung-gedung pemerintahan, seperti kantor Keresidenan Kediri dan Kantor *Afdeeling Bank*,[16] sekolah anak-anak orang Eropa (Frobel School), Gereja Merah, Gereja Katolik (Santo Vincentius A. Paulo), maupun gedung-gedung perkantoran beserta pemukiman orang-orang Belanda

12 "Kissah Pendaratan Balatentara Dai Nippon Di Tanah Djawa: Riwajat Belanda Moelai dan Tamat di Banten," dalam *Djawa Baroe*, Edisi 2605 (1945.).

13 *Ibid*.

14 Hisbaron Muryantoro, "Kediri Pada Masa Revolusi 1945-1949", *Jurnal Patrawidya,* Vol. 12 No 1 Tahun 2011, hlm. 63.

15 Benteng Blokhuis pada saat ini (2021) difungsikan sebagai Kantor Polisi Resort (Polres) Kediri. Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

16 Kantor Afdeling Bank pada saat ini (2021) difungsikan sebagai Kantor Cabang BRI, Kediri. Lihat radarkediri.jawapos.com/read/2021/03/11/11. Diunduh pada 21 Maret 2021.

di sebelah barat Sungai Brantas.[17] Benteng ini terletak di samping *Brug Oer den Brantas te Kediri* sepanjang 160 meter dan lebar 5,8 meter yang menghubungkan kawasan di sebelah barat dengan timur sungai yang merupakan kawasan bisnis dan permukiman Tionghoa.[18] Setelah *Brug Oer den Brantas te Kediri* berhasil dikuasai Jepang, pada 5 Maret 1942 sore, Benteng Blokhuis direbut Jepang. Jatuhnya Benteng Blokhuis dan kantor-kantor penting di barat Sungai Brantas menandai runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda dan hadirnya kekuasaan Jepang di Kediri. Jepang menyelenggarakan pemerintahan militer untuk sementara waktu atas daerah yang didudukinya dan sampai Agustus 1942 seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan *Gunshirekan* (Panglima Tentara) Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.[19]

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1942, seluruh Jawa dan Madura, kecuali *koci* Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas *syuu* (keresidenan)*, syi* (kota praja)*, ken* (kabupaten)*, gun* (distrik atau kewedanan)*, son* (kecamatan atau *onderdistrict*), dan *ku* (kelurahan atau desa).[20] Pada Pasal 4 Undang-Undang ini disebutkan selaku kepala daerah pada *syuu, syi, ken, gun, son, ku,* masing-masing diangkat seorang *syuuco, syico, kenco, gunco, sonco*, dan *kunco.*[21] Keresidenan Kediri menjadi salah satu *syuu* dari 17 *syuu* yang ada di Jawa.[22] Struktur pemerintahan *syuu* berbeda dengan struktur pemerintahan *residentie* pada zaman Hindia Belanda, karena *syuu chokan* kekuasaannya sama dengan gubernur, meskipun daerah kekuasaannya seluas keresidenan.[23]

17 Bangunan-bangunan tersebut sampai saat ini (2021) masih berdiri dan menjadi bangunan Cagar Budaya yang dapat dilacak di sekitar Jalan KDP. Slamet, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lihat radarkediri.jawapos.com/read/2021/03/11/11. Diunduh pada 21 Maret 2021.

18 *Brug Oer den Brantas te Kediri* sampai saat ini (2021) dikenal sebagai Jembatan Lama Kediri, dan jembatan ini dijadikan sebagai benda cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. radarkediri. jawapos.com/read/2021/03/11/11. Diunduh pada 21 Maret 2021.

19 Wiretno, Edy Budi Santoso, "Kediri-Syuu Masa Pendudukan Jepang: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang terhadap Kehidupan Sosial Tahun 1942-1945", *Verleden: Jurnal Kesejarahan*, Vol.10, No.1, Juni 2017, hlm., hlm. 24-25.

20 *Kan Po No*, 1 Edisi Agustus 2602 (1942).

21 *Ibid*.

22 *Syuu* lainnya yakni Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Jepara-Rembang, Banyumas Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Malang, Besuki dan Madura. Pasal Tambahan Undang-Undang No. 28 Tahun 1942.

23 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.,* hlm. 11.

Gambar 3.1. Enji Kihara, Syuucokan Kediri
Sumber: https://commons.wikimedia.org/

Orang Jepang yang dipercaya untuk menjabat sebagai Residen (*syuu chokan*) Kediri adalah Enji Kihara, lulusan Akademi Militer Jepang dan pernah menjabat kepala Departemen Pembangunan Kantor Gubernur Jenderal di Taiwan.[24] Enji Kihara menjadi *syuu chokan* Kediri hingga tahun 1943 dan kemudian digantikan oleh orang Jepang dari kalangan sipil bernama Yoshi Kotsuyashu dengan wakil (*Fuku syuu chokan*) seorang Indonesia bernama Patalikrama.[25] Sementara itu, Raden Adipati Ario Danoediningrat, yang menjabat sebagai Bupati Kediri sejak 18 Desember 1930, diangkat sebagai *Kentyo* Kediri pada tanggal 2 April 1942 berdasarkan surat keputusan *Gunseikanbu* Surabaya.[26] Posisi *Shi Choo*

24 Latif Kusairi, "Perang Memori dan Historiografi Indonesia: Studi Penyebutan Terowongan Neyama di Tulungagung Jawa Timur", *Jurnal Widya Citra*, Vol 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 40; Hendri F. Isnaeni, "Terowongan Neyama Romusha", https://historia.id/urban/articles/terowongan-neyama-romusha-PRkO6/page/1, 14 April 2012, diakses tanggal 1 Juni 2021.

25 Hisbaron Muryantoro, *op.cit*, hlm. 64.

26 Arsip Nasional RI, "Pendaftaran Orang Indonesia Terkemoeka Jang Ada di Djawa D.357."; Tentang para bupati Kediri Jaman Belanda hingga tahun 1830-1930 dapat ditemukan dalam Heather Sutherland, "Notes on Java's Regent Family Part II", *Indonesia,* hlm. 30-31 (https://ecommons.cornell.edu/).

Kediri dijabat oleh R.M Harsojo, yang kemudian selama periode Jepang digantikan oleh Moestadjah, Djojokoesoemo, Santoso, dan Soeprapto.[27]

Pemerintah pendudukan Jepang menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pemerintahan Kediri *Syuu*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Kediri pada zaman Hindia Belanda merupakan ibu kota keresidenan. Di sini terdapat berbagai peninggalan pemerintah Hindia Belanda, seperti gedung-gedung pemerintahan (termasuk kantor Keresidenan Kediri), benteng pertahanan Belanda (Benteng Blokhuis), gedung perbankan, dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang pemerintah pendudukan Jepang di Kediri-*Syuu*. Kediri-*Syuu* sebagai unit pemerintahan bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan meliputi Kediri-*Shi* (Kotamadya Kediri), Kediri-*Ken* (Kabupaten Kediri), Blitar-*Shi* (Kotamadya Blitar), Blitar-*Ken* (Kabupaten Blitar), Nganjuk-*Ken* (Kabupaten Nganjuk), dan Tulungagung-*Ken* (Kabupaten Tulungagung).[28]

Dengan berdirinya pemerintahan Jepang, berlaku pula kebijakan-kebijakan pemerintahan pendudukan. Transisi kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke Jepang di wilayah Kediri sempat diwarnai dengan disorganisasi sosial dan perampokan yang luas terhadap toko-toko Tionghoa, baik yang dilakukan orang-orang kota maupun pedesaan.[29] Oleh karena itu, selain memelihara ketertiban dan keamanan di daerah yang dikuasainya, kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang secara umum diarahkan untuk memobilisasi segala sumber daya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan logistik demi meraih kemenangan dalam perang Asia Timur Raya.[30] Pada bagian berikut akan dibahas lebih jauh implementasi kebijakan Jepang di sektor perbankan dan perekonomian masyarakat Kediri pada masa pendudukan Jepang.

---

27 Hisbaron Muryantoro, *op.cit.,* hlm. 64.

28 Wiretno dan Edy Budi Santoso, *op.cit.*, hlm. 25

29 Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm. 87.

30 G.A. Ohorella, Restu Gunawan, Suryo Haryono, *Penulisan Sejarah Lokal: Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada Masa Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional: Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 18.

NANPO KAIHATSU GINKO DAN EKONOMI PENDUDUKAN

PEMBENTUKAN NANPO KAIHATSU GINKO DAN TUGAS-TUGASNYA

Pembentukan pemerintahan pendudukan Jepang mengawali penerapan berbagai kebijakan baru di wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk kebijakan menyangkut sektor perbankan yang menentukan nasib DJB dan institusi perbankan kolonial lainnya yang pernah beroperasi di Hindia Belanda, termasuk aset-aset miliknya. Akan tetapi, tidak semuanya dapat diambil alih dan jatuh ke tangan Jepang karena menjelang masuknya bala tentara Jepang, De Javasche Bank telah mengantisipasinya dengan mengamankan seluruh persediaan emas keluar dari Hindia Belanda, yakni ke Australia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Persediaan emas DJB yang dipindahkan ke luar negeri tersebut nilainya sebesar *f*378,7 juta dan diangkut dengan 7 kapal, lima di antaranya yakni KM Phrontis dengan nahkoda J. Hendriks Jansen, KM Java dengan nahkoda W. Persson, KM Tegelberg dengan nahkoda J.W. Zuyderhoudt, KM Tjitjalengka dengan nahkoda J. Adriaanse, dan KM Jagersfontein yang dinahkodai M.A. van der Est.[31] Dengan jatuhnya Hindia Belanda ke pihak pasukan pendudukan Jepang, Direktur DJB, Dr. R.E. Smiths bersama beberapa pejabat mendapat instruksi untuk meninggalkan Hindia Belanda menuju Australia untuk menyusun skenario persiapan kembali ke Hindia Belanda setelah perang usai.[32] Perginya penguasa lama dan hadirnya penguasa baru dengan berbagai kebijakan yang diterapkan mempengaruhi nasib DJB dan pelaku bisnis perbankan lainnya, serta kondisi perekonomian secara umum.

Dengan keberhasilan mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda pada 5 Maret 1942, pemerintah pendudukan militer Jepang segera mengeluarkan perintah pembekuan kegiatan seluruh institusi perbankan di Hindia Belanda. Perintah penghentian kegiatan seluruh bank dituangkan

31 Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 64-65.

32 R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Masa Peperangan* (Jakarta: Bank Indonesia, 1990), hlm. 7.

secara resmi dalam peraturan yang diterbitkan administrasi pendudukan militer Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Seiring dengan peraturan tersebut, pemerintahan militer Jepang juga meminta secara paksa para pimpinan bank-bank yang ada di Hindia Belanda untuk menandatangani surat pernyataan tentang penyerahan tanpa syarat seluruh aset bank yang mereka miliki kepada Jepang.[33] Pada tanggal 11 April 1942, kebijakan likuidasi diberlakukan oleh penguasa militer dalam bentuk moratorium yang dikenakan kepada semua bank yang digolongkan sebagai bank milik musuh, tanpa kecuali berlaku pula pada bank-bank lokal yang ada di Jawa dan di wilayah Hindia Belanda lainnya.[34]

Peraturan likuidasi menjadi akhir bagi keberadaan bank-bank kolonial yang sudah menjalankan bisnis perbankan pada masa Hindia Belanda. Sasaran likuidasi terpenting adalah De Javasche Bank, yang mendapatkan mandat menjalankan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda.[35] Selain De Javasche Bank, target likuidasi lainnya adalah bank-bank besar milik Belanda, yakni Nederlandsch Indische Handelsbank, Nederlandsch Indische Escomptobank Maatschappij, dan Nederlandsch Handels Maatschappij.[36] Bank-bank yang berskala lebih kecil pun tidak berbeda nasibnya. Cultuur Banken, Amsterdam Commercial Union, Netherlands Indies Mortgage Bank, Java Mortgage Bank, Postpaarbanken, dan Algemene Spaar-en Deposito Bank pun terkena likuidasi. Serupa dengan bank-bank milik Belanda, sejumlah bank milik Inggris dan Cina yang digolongkan sebagai "Milik musuh" dilikuidasi pula, seperti yang terjadi pada Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dengan kantor pusat di Hong Kong, The Chartered Bank of India, Australia and China (CBIAC), dan Bank of China (BC) yang memiliki kantor pusat di Shanghai.[37] Hanya ada dua bank milik Tionghoa, N.V. Bankvereeniging Oei Tiong Ham dan Cunghwha

33 R. Hardjo Santoso, *op.cit.*, hlm. 14

34 M. Dawam Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 47.

35 Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East-Indies under the Japanese Administration", dalam P. Post and E. Touwen-Bouwsma (ed), *Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities* (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 181.

36 Peter Post dan W.H. Frederick, *et al* (editor), *op.cit.,* hlm. 219-220.

37 Shibata Yoshimasa, *op.cit.*, hlm. 181-182.

Shangieh Maatschappij, berhasil menghindari likuidasi dan meneruskan usaha mereka, tetapi dengan pengawasan ketat dari pemerintah militer Jepang.[38] Keberhasilan keduanya lolos dari likuidasi tidak terlepas dari kemampuan pemilik dalam meyakinkan pihak Jepang dan kesediaan berkolaborasi untuk mendukung kepentingan pemerintah Jepang. Secara khusus, Oei Tjong Hauw yang merupakan generasi kedua pengelola Oei Tiong Ham Concern, dikenal sebagai orang yang luwes dan piawai dalam menjalin relasi dengan pemerintah yang berkuasa sehingga dapat menyelamatkan bisnis pada masa sulit.[39] Melalui proses likuidasi yang dilakukan, Jepang telah menyita sejumlah uang sitaan. Di Jawa, uang sitaan dilaporkan sebesar *f*508.790.000, dengan rinciannya: *f*27.533.000 dari institusi keuangan, *f*12.497.000 dari badan-badan pemerintah, dan *f*508.790.000 dari rekening bank yang terdapat di De Javasche Bank.[40]

Sebagai ganti dari bank-bank yang dilikuidasi, pemerintah Jepang mendirikan sebuah bank baru bernama Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) sebagai bank sentral dan bank sirkulasi pengganti De Javasche Bank. Kapital pendirian bank baru ini berasal dari dana pemerintah Jepang dan secara resmi NKG, yang berarti Bank Pembangunan Wilayah Selatan, berdiri sejak 30 Maret 1942. NKG Batavia dibuka pada Juli 1942 dengan perwakilan di Surabaya yang dibuka pada November 1942. Selain itu, cabang NKG terdapat di Banjarmasin yang pembukaannya dilakukan pada Agustus 1942. NKG Banjarmasin membawahi empat kantor perwakilan, yakni Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda yang dibuka pada September 1942, dan Perwakilan Tarakan yang pembukaannya dilakukan sebulan kemudian. NKG Seram dibuka pada Agustus 1942 dengan kantor pusat di Ambon, sedangkan cabang Sulawesi dengan kantor pusat di Makassar dibuka pada September 1942, disusul pada bulan Maret 1943 dengan pembukaan NKG Papua Barat yang berpusat di Manokwari. Pada tahun yang sama dibuka pula NKG cabang Palembang untuk wilayah Sumatera.

---

38 J.O. Sutter, "Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institutions of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of of the General Elections", *PhD Thesis* (Ithaca: Cornell University, 1959), hlm. 169.

39 Nur Zakaria, "Pesta Terakhir Oei Tiong Ham. Orang terkaya Asia Tenggara Asal Semarang", 14 Maret 2017. (https://poentjakweg.com, diakses pada 14 Februari 2022)

40 Shibata Yoshimasa, *op.cit.*, hlm. 196.

Dalam menjalankan aktivitas dan tugas-tugasnya di tingkat cabang, NKG sering mengandalkan Taiwan Bank dan Yokohama Specie Bank.[41] Di Kediri, bank yang menggantikan DJB Kediri dalam praktiknya adalah Yokohama Specie Bank (Yokohama Shomin Ginko) dan dikepalai oleh S. Hori.[42] Yokohama Specie Bank didirikan pada tahun 1880 dengan pemilik saham terbesarnya adalah keluarga kekaisaran Jepang. Bank inilah yang menyalurkan pembiayaan untuk mendukung kampanye militer yang dilancarkan oleh angkatan perang Jepang.[43]

Yokohama Specie Bank dan Taiwan Bank merupakan dua perbankan milik Jepang yang sebelumnya pernah menjalankan kegiatan di Hindia Belanda sejak sebelum perang. Akan tetapi, kedua bank kemudian dikenai pembekuan oleh Pemerintah Hindia Belanda akibat pecahnya perang Jepang-Hindia Belanda. Ketika Jepang berkuasa atas Hindia Belanda, baik Yokohama Specie Bank maupun Taiwan Bank kembali beroperasi berbarengan dengan bank lain milik Jepang seperti Mitsui Bank dan Southern Bank. Yokohama Specie Bank inilah yang di lapangan sering menjadi pelaksana kebijakan likuidasi bank-bank "Milik musuh" yang dimandatkan kepada NKG. Tiga bank lainnya, Taiwan Bank, Mitsui Bank, dan Southern Bank beroperasi kembali pada tahun 1943.[44] Persebaran cabang bank-bank ini memberikan gambaran tentang jangkauan wilayah kerja masing-masing bank. Yokohama Specie Bank, misalnya, memiliki 15 cabang di seluruh Jawa dan 10 cabang di Sumatera. Taiwan Bank mempunyai tiga cabang di Jawa, lima cabang di Kalimantan, dua cabang di Sulawesi, dua cabang di Bali, satu cabang di Timor, dan satu cabang di Ambon. Sementara itu, Mitsui Bank memiliki satu kantor cabang di Surabaya.[45]

Dengan kedudukan sebagai pengganti De Javasche Bank, NKG menjalankan fungsi sebagai bank sentral sejak bulan Juli 1942.[46] NKG

41 *Ibid*, hlm. 187, 196.

42 R. Hardjo Santoso, *op.cit.*, hlm. 16.

43 Peter Keppy, "Japanese Control of Enemy Property", in Peter Post dan William H. Frederick, *et al.* (editor), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill, 2010), hlm. 220.

44 Shibata Yoshimasa, *op.cit.*, hlm. 182-183.

45 J.O. Sutter, *op.cit.,* hlm. 167.

46 A.A. Zorab, *De Japanse Bezetting van Indonesie en Haar Volkenrechtelijke Zijde* (Leiden: Leiden Universiteit Pers, 1954), hlm. 89-90.

bertindak sebagai penyedia dana yang diperlukan oleh berbagai institusi perbankan lainnya, sebagai pengatur lalu lintas dan penyedia devisa bagi pemerintah, serta sebagai kantor perbendaharaan yang melayani pembayaran secara langsung ke rekening-rekening pemerintahan militer yang terdapat di tingkat regional.[47] Bukan itu saja, NKG juga menjadi penyedia pinjaman bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang memerlukan modal untuk mengawali kegiatan bisnis di Indonesia. Pada Desember 1942, misalnya, peminjam terbesar NKG di Jawa adalah Kawasaki Heavy Metal Company yang mendapatkan kucuran utang sebesar *f*1.210.000. Taiwu Industrial Company menempati urutan kedua dalam besaran pinjaman yang diberikan NKG. Pinjaman dari NKG juga disalurkan kepada Yoshiwara Oil Manufacturing Company, Harima Shipbuilding Company, Ishihara Industry and Shipping Company, dan Toyo Warehouse Company. Di Kalimantan Selatan pada tahun yang sama, NKG menyalurkan pinjaman kepada Taiwan Bank berjumlah sebesar *f*944.000. Sementara itu, di Sulawesi pinjaman terbesar dari NKG disalurkan kepada International Electric Communications Company, disusul Sumitomo Mining Company, dan Mitsui Agricultural and Forest Company sebagai penerima pinjaman DJB di urutan kedua dan ketiga.[48]

Selain bank-bank milik Jepang, beberapa lembaga finansial juga diizinkan Jepang untuk menjalankan kegiatan kembali. Peraturan yang membuka ruang bagi operasi bank-bank lain mulai berlaku sejak 3 Oktober 1942. Bank yang diizinkan beroperasi kembali di antaranya adalah Algemene Volkscrediet Bank (AVB), yang bergerak dalam kegiatan pemberian kredit kepada penduduk pribumi. Di bawah pemerintahan militer Jepang, AVB menjalankan kembali kegiatannya dengan nama baru, Syomin Ginko. Kegiatan Syomin Ginko dilakukan berdasarkan arahan dan di bawah pengawasan penguasa militer Jepang. Pengelolaan Syomin Ginko di tingkat pusat ditangani oleh orang-orang Jepang, sedangkan orang-orang pribumi banyak menjalankan peran sebagai pimpinan di kantor-kantor cabang, yang pada masa sebelumnya biasa diduduki oleh orang-orang Belanda. Cabang-cabang AVB yang beroperasi

47 *Ibid*, hlm. 191.

48 Shibata Yoshimasa, *op.cit.*, hlm. 188.

kembali sebanyak 16 cabang di Jawa Barat, 25 cabang di Jawa Tengah, dan 28 cabang di Jawa Timur.[49] Institusi finansial lainnya yang mendapat izin beroperasi kembali adalah rumah pegadaian (*Pandhuizen*) dan Bank Simpanan Kantor Pos (*Postpaarbanken*) yang pada masa Jepang berganti nama menjadi Tyokin Ginko.[50] Pada awal 1942 Jepang menyusun rencana untuk menggabungkan tiga bank komersial besar dan mereorganisasinya menjadi dua tipe bank, yakni 1) bank yang melayani sektor perdagangan dan industri, dan 2) bank yang melayani sektor pertanian. Akan tetapi, sampai dengan berakhirnya pemerintahan pendudukan Jepang rancangan ini tidak berjalan karena ditolak Kementerian Keuangan.[51]

Dalam implementasi kebijakan likuidasi perbankan, wilayah likuidasi dibagi menjadi tiga bagian, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain bertugas melaksanakan eksekusi penyitaan aset bank, tim likuidasi Jepang juga mendapat mandat tugas untuk melakukan 3 tugas utama. Tugas pertama adalah melakukan pemberesan tagihan-tagihan yang harus dilunasi. Tugas ini tampaknya tidak begitu berhasil dilaksanakan, hal ini terbukti dari tingkat pelunasan tagihan yang hanya mencapai 2,5% atau sebesar *f*5,6 juta. Tugas kedua berkaitan dengan pembayaran hasil likuidasi kepada para debitur. Pembayaran hanya diberikan kepada para debitur yang tidak dikategorikan sebagai musuh Jepang dengan ketentuan 30% pembayaran tahap pertama dilakukan pada pertengahan Maret 1943 bagi mereka yang berdomisili di Jawa, sedangkan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan pada rekening di NKG sebagai pengganti DJB. Tugas ketiga berkenaan dengan penyelesaian simpanan tertutup dan simpanan khazanah bank. Penyelesaian atas simpanan dalam kategori ini berlaku ketentuan bahwa pembayaran dapat dilakukan sejauh pemerintah militer Jepang tidak mempunyai "Kepentingan" atasnya, sebuah ketentuan yang dalam praktek sangat elastis dan beragam tafsir sehingga implementasinya di lapangan menyebabkan banyak simpanan yang akhirnya raib.[52]

49 J.O. Sutter, *op.cit.*, hlm. 169-170.

50 A.A.Zorab, *op.cit.,* hlm. 90.

51 Shibata Yoshimasa, *op.cit.*, hlm. 186.

52 R. Hardjo Santoso, *op.cit.*, hlm. 47-48.

Menyikapi kebijakan likuidasi perbankan Belanda dan langkah-langkah yang dilakukan Jepang di lapangan, pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan surat keputusan tertanggal 3 Februari 1944 yang berisi larangan melakukan segala kegiatan perbankan di Hindia Belanda tanpa sepengetahuan dan izin dari Gubernur Jenderal. Larangan tersebut diterbitkan dari London yang menjadi tempat pengasingan Pemerintah Kerajaan Belanda akibat pendudukan militer Jerman atas Negeri Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda juga menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 21 Februari 1944 yang mengatur pembentukan De Bank Voor Nederlandsch-Indie di Paramaribo, Suriname, wilayah koloni Belanda satu-satunya yang tidak dikuasai musuh. De Bank Voor Nederlandsch-Indie merupakan wadah bagi perbankan swasta yang pernah beroperasi di Hindia Belanda dengan para pemegang saham terdiri atas Pemerintah Hindia Belanda, Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), Nederlandsch Indische Handel Bank (NIHB), dan Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (NIEM). Saham milik Pemerintah Hindia Belanda pada perkembangannya setelah pendirian kantor pengasingan DJB di Australia dialihkan ke DJB.[53]

Di Keresidenan Kediri, proses likuidasi De Javasche Bank cabang Kediri dipercayakan pelaksanaannya kepada H. Tokunaga dari *Tekisan Kanribu Kediri Shibu*. Dalam surat yang disampaikan Tokunaga kepada Kediri *Guntyo* dengan jelas dituliskan:

> *"Seperti soeda di oemoemkan dan barangkali toean joega soeda taoe, oeroesan De Javasche Bank d.l.l. Bank Olanda moesti dibikin likwidasie, dan oeroesan mana boeat De Javasche Bank, Tjabang Kediri, saia jang pegang (oeroes) atas angkatan dari Pemimpin likwidasie di Djakarta".*[54]

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan hutang piutang antara De Javasche Bank Kediri dengan sejumlah nasabahnya, Tokunaga melakukan korespondensi dan koordinasi dengan pimpinan kabupaten dan distrik di wilayah Kediri. Dalam surat yang dikirim kepada Grogol *sontyo* tertanggal 22 Desember 1942, H. Tokunaga meminta bantuan

53 Arsip Bank Indonesia, *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*.

54 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Surat H. Tokunaga kepada Toean Kediri Guntyo 13 Januari 2603.

Grogol *sontyo* untuk menyelesaikan tanggungan hutang pengusaha bernama Lo Tjien Tjing kepada DJB sebesar *f*16.252,25 dengan jaminan berupa 3.500 karung gabah seberat 2.975 kuintal dengan karungnya yang disimpan di gudang-gudang di Gringging, Kediri. Dalam suratnya diterangkan bahwa atas perintah Kediri *Guntyo*, Lo Tjien Tjing telah mendistribusikan gabah tersebut kepada penduduk bumiputera di daerah Grogol. Oleh karena itu, Tokunaga meminta bantuan *sontyo* untuk membereskan tanggungan utang Lo Tjien Tjing dengan cara mengatur pengembalian barang atau pembayaran uang dari penduduk yang telah mendapatkan distribusi gabah.[55]

Dalam surat tertanggal 13 Januari 1943, Tokunaga berupaya menyelesaikan tanggungan hutang seorang pengusaha bernama Bwa Ping Hwie, pemilik Pabrik Beras dan Minyak Ing Tjiang Sing kepada DJB Kediri yang bertempat di Distrik Papar. Hutang Bwa Ping Hwie disebutkan sebesar *f*38.803,20, dengan jaminan barang berupa gabah dan karung goni yang digadaikan kepada DJB Kediri dan tersimpan dalam gudang di Distrik Papar dengan rincian 9.400 karung berisi 8.178 kuintal gabah senilai *f*35.983,20 dan 9.400 lembar karung goni senilai *f*2.820. Pada saat terjadi kekacauan seiring dengan kedatangan Jepang, gabah tersebut dikatakan dibagi-bagikan/dipinjamkan kepada penduduk Distrik Papar. Tokunaga minta bantuan Papar *Guntyo* agar barang-barang yang sudah dipinjamkan atau uang pembayaran dari penduduk dapat dikumpulkan karena Bwa Ping Hwie harus melunasi tanggungan hutangnya pada DJB. Uang pembayaran diminta untuk dimasukkan ke rekening H. Tokunaga di The Yokohama Specie Bank Ltd di Kediri.[56]

Upaya penyelesaian urusan hutang juga dilakukan oleh H. Tokunaga terhadap nasabah De Javasche Bank di Distrik Kediri. Di distrik ini disebutkan ada dua pemilik pabrik beras yang harus membereskan hutangnya kepada DJB, yakni Liem Hok Yang, pemilik Pabrik Beras "Kediri" yang berlokasi di Desa Banjaran dan Tan Tiong Hien, pemilik Pabrik Minyak dan Beras "Tan Tiong Hien". Tanggungan hutang Liem Hok Yang sebesar *f*24.761 dengan

55 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Surat H. Tokunaga kepada Grogol Sontyo 22 Desember 2602 (1942).

56 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Surat H. Tokunaga kepada Papar Guntyo 13 Januari 2603 (1943).

jaminan barang berupa 5.216 karung gabah sebanyak 495.520 kilogram dan 3.679 lembar karung goni. Sementara itu, tanggungan hutang Tan Tiong Hien sebesar *f*7.446,51 dengan jaminan barang yang digadaikan pada DJB berupa 170.491 kilogram gabah dan 288 lembar karung goni. Barang-barang tersebut sebelumnya tersimpan di dalam gudang-gudang di Kediri. Untuk menyelesaikan pembayaran tanggungan hutang kedua pengusaha, Tokunaga mengirim surat yang berisi permintaan bantuan kepada Kediri *Guntyo* untuk membantu menagihkan pembayaran dari penduduk di wilayahnya atau mengupayakan pengembalian barang-barang yang telah mereka pinjam. Uang pembayaran dari penduduk diminta untuk disetorkan ke rekening Tokunaga di The Yokohama Specie Bank Ltd Kediri.[57]

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Tokunaga pada nasabah DJB di Distrik Mojo. Di daerah ini terdapat nasabah DJB Kediri bernama Tan Tjhiang yang beralamat di Desa Ploso yang mempunyai tanggungan hutang sebesar *f*4.438,82 dengan menjaminkan 1.327 karung gabah senilai *f*4.173,42 kuintal dan 1.327 lembar karung goni senilai *f*265,40. Barang tanggungan ini disebutkan telah dipinjamkan/dibagi-bagikan kepada penduduk atas perintah *guntyo* di Kediri menjelang kedatangan pasukan Jepang. Melalui surat yang dikirimnya kepada Mojo *sontyo*, Tokunaga meminta bantuan untuk mengatur pembayaran gabah yang dipinjam penduduk di wilayahnya dan melakukan penyetoran uang pembayaran ke rekening pada Yokohama Specie Bank di Kediri.[58]

Penagihan hutang juga dilakukan terhadap beberapa pengusaha di daerah Pare. Dalam surat dari Tekisan Kanribu Kediri Shibu disebutkan bahwa di wilayah jurisdiksi Pare *Guntyo* tinggal tiga orang penghutang pinjaman dari DJB, yakni Ang Sik Tian, Lie Kok Tjwan, dan Pabrik Beras Oei Twan Bie. Untuk pinjamannya, Ang Sik Tian menanggungkan jaminan barang berupa gabah sebanyak 80.550 kilogram termasuk karungnya yang total bernilai sebesar *f*3.866,40, sedangkan Lie Kok Tjwan untuk hutangnya di DJB menaruh jaminan berupa gabah sebanyak 2.132 karung dengan berat 191.880 kilogram yang bernilai sebesar *f*8.634,60.

57 *Ibid*.

58 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Surat H. Tokunaga kepada Modjo sontyo 13 Januari 2603 (1943).

Sementara itu, untuk hutangnya di DJB Pabrik Beras Oei Twan Bie telah menjaminkan barang berupa 400.000 kilogram gabah dengan nilai sebesar *f*17.600. Beras dan karung yang disimpan sebagai jaminan gadai pada DJB di gudang-gudang di Pare disebutkan telah dibagi-bagikan sebagai pinjaman kepada penduduk atas perintahnya. Oleh karena itu, Pare *Sontyo* diminta untuk mengurus pembayaran barang-barang pinjaman penduduk tersebut dan menyetorkan uangnya ke rekening di The Yokohama Specie Bank Kediri sebagai cicilan hutang-hutang ketiga pengusaha pada DJB Kediri.[59]

Tembusan atas surat-surat tersebut di atas disampaikan pula kepada Kediri *Kentyo* dengan tembusan kepada Kediri *syucho*. Dalam balasan surat yang dibuatnya, Bupati (*Kentyo)* Kediri R.A.A. Danoediningrat menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Tokunaga dalam perihal pembayaran atau pengembalian gabah yang telah dibagikan kepada penduduk ketika di tengah-tengah kegentingan situasi peperangan pada bulan Maret 1942. Penolakan Danoediningrat didasarkan pada alasan bahwa pembagian gabah tersebut dilakukan untuk mencegah pemusnahan bahan pangan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari taktik bumi hangus. Pembagian gabah juga disebutkan dilakukan dalam situasi yang genting, sehingga tanpa membuat catatan tentang seberapa banyak yang diterima masing-masing penduduk, apalagi pada umumnya gabah dibagikan kepada penduduk miskin. Permintaan pembayaran atau pengembalian juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan penduduk yang menerima karena mereka beranggapan pembagian gabah dilakukan secara percuma tanpa pembayaran dan tidak perlu mengembalikan lagi. Dalam surat tersebut Danoediningrat juga menanyakan kemungkinan untuk menganggap gabah yang dibagi-bagikan sebagai barang yang sudah hilang dan sekaligus meminta Kepala Tekisan Kanribu Kediri *Shibu* untuk membatalkan permintaan pembayaran atau pengembalian gabah yang sudah didistribusikan kepada penduduk.[60]

---

59 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Surat Tekisan Kanribu Kediri Shibu kepada Pare Guntyo tanggal 13 Januari 2603 (1943).

60 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Kangdjeng-Boepati Kediri-Ken-Tyoo R.A.A. Danoediningrat kepada Kepala Tekisan Kanribu Kediri Shibu tanggal Syowa 18 Itigatu 19.

Untuk menyikapi poin-poin surat yang dikirim Kediri *Kentyo* R.A.A. Danoediningrat, *Tekisan Kanribu Kediri Shibu* H. Tokunaga mengirim surat kepada Pimpinan Kantor De Javasche Bank (DJB) di Batavia tertanggal 27 Maret 1943. Dalam suratnya, Tokunaga meminta petunjuk terkait dengan tindakan yang harus diambilnya untuk menangani permasalahan yang muncul dalam kaitan dengan pelunasan kembali pinjaman para nasabah DJB Kediri. Dua problem yang dikonsultasikan berkenaan dengan masalah neraca debit penghutang yang tidak lagi mencukupi untuk dikurangi dengan nilai gabah yang telah dibagi-bagikan/dipinjamkan kepada penduduk maupun para penghutang yang barang-barang agunan pinjaman kredit pada DJB yang telah dijarah.[61] Sayangnya, sejauh ini tidak ditemukan dokumen sejarah yang memberikan informasi tentang bagaimana ujung penyelesaian akhir dari kasus-kasus tagihan hutang yang perlu dibereskan. Penuntasan hutang nasabah tersebut hanyalah sebagian dari beragam tugas yang dijalankan NKG. Tugas lainnya yang dijalankan NKG adalah membuat laporan tentang situasi umum bahan makanan di Jawa. Sebagai ilustrasi, dalam salah satu laporan NKG yang dibuat pada tahun 1944 disampaikan misalnya gambaran tentang keadaan dan pengaturan bahan pangan, situasi penyediaan gabah pada tahun 1943, pembagian dan keuangan gabah pada tahun 1944, pengaturan bahan makanan khususnya beras, serta laporan tentang harga beras pada tahun 1944.[62]

EKONOMI PENDUDUKAN

Kondisi perekonomian wilayah Kediri pada masa pendudukan militer Jepang secara umum memburuk. Tanda-tanda pemulihan ekonomi yang telah mulai tampak terjadi pada akhir 1930-an dan awal tahun 1940-an dengan cepat menghilang. Sektor keuangan mengalami kekacauan dan

61 Arsip Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven van/aan Hooddkantoor Kediri, Tekisan Kanribu Kediri Shibu, H Tokunaga to The Head-Office of zzde Javasche Bank, Djakarta Kota, 27 Maret 2603 (1943).

62 Jawa ni okeru saikin no beikoku jōsei shiryō), Bagian Survey di Biro Direktur Nanpō Kaihatsu Ginko (Bank Pembangunan Daerah Selatan), Oktober 1944, dalam Aiko Kurasawa dan Mitsuko Nanke, *Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 91.

problem inflasi yang sangat tinggi. Produksi dan distribusi produk-produk perkebunan banyak terganggu, sedangkan produktivitas sektor pertanian rakyat menurun. Demikian pula, kegiatan ekspor dan impor macet karena kesulitan sarana transportasi dan kekacauan pasar di tengah gejolak perang dan aksi-aksi pemblokadean oleh kapal-kapal musuh. Sektor industri dan perdagangan juga melemah karena terganggunya jalur-jalur pengadaan barang-barang input produksi, sedangkan distribusi produk-produk juga banyak terkendala. Kondisi ekonomi yang memburuk memang tidak terpisahkan dari kekacauan akibat perang yang telah mengoyak sendi-sendi dan tatanan ekonomi, tetapi kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah pendudukan militer Jepang dalam pengelolaan ekonomi wilayah pendudukan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi semua sektor ekonomi dan kondisi perekonomian secara umum.

Dalam sektor keuangan, pendudukan Jepang berdampak pada terjadinya kekacauan keuangan dan problem inflasi yang parah di mana-mana. Problem ini terjadi karena terlalu banyak ragam dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Peredaran uang membludak karena serbuan tentara Jepang bersamaan dengan invasi dalam bentuk mata uang. Pemerintah militer Jepang menerbitkan mata uang yang disebut uang invasi (*invasion money*) atau uang militer (*gunpyo*). Pada uang tersebut tertera kalimat "*De Japansche Regeering Betaalt aan toonder*" (Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa). Pembuatan uang ini tampaknya memang secara khusus dirancang penggunaannya untuk wilayah Hindia Belanda dan telah disiapkan sebelum kedatangan Jepang. Uang-uang ini telah didistribusikan di atas kapal dan dibawa serta oleh tentara Jepang pada waktu melakukan pendaratan. Satuan mata uang yang dipakai pada uang tersebut adalah gulden dan dengan menggunakan Bahasa Belanda. Langkah-langkah tersebut rupanya ditempuh Jepang sebagai bagian dari upaya taktis untuk memenangkan dukungan dan simpati rakyat Indonesia dengan cara membuat mereka lebih akrab dengan uang terbitan Jepang. Mata uang yang dikeluarkan Jepang dari jenis ini diterbitkan dalam beberapa denominasi, yaitu 1 gulden, ½ gulden, 5 gulden, 10 gulden, serta 1 sen, 5 sen, dan 10 sen.[63]

63 Tim Penulis Bank Indonesia, *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia* (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2007), hlm. 34.

Pada waktu pendaratan tentaranya di Jawa, Jepang mengeluarkan uang invasi sebesar 81.738 juta gulden untuk menutup biaya operasional. Menurut data De Javasche Bank, pada tahun 1941 di Hindia Belanda sudah beredar uang sebesar 316 juta gulden. NKG mengeluarkan uang Nanpatsu pada tahun 1944 dengan menggunakan rupiah sebagai satuan nilai. Uang ini diedarkan di wilayah Hindia Belanda dalam pecahan ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah.[64] Hingga tahun 1945, jumlah peredaran uang dalam masyarakat di Hindia Belanda ditaksir telah mencapai 3,1 miliar gulden. Besarnya mata uang di peredaran telah menciptakan problem inflasi luar biasa sehingga mengakibatkan uang kertas keluaran NKG menjadi tidak bernilai ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Pendaratan Sekutu di Hindia Belanda mengemban tugas melucuti tentara Jepang, dan di dalamnya ikut serta pula NICA *paymasters* yang secara khusus bertugas menangani peredaran uang gulden Hindia Belanda. Uang NICA yang dicetak pada tahun 1943 di American Bank Note Company Amerika Serikat menurut rencana akan digunakan untuk menggantikan uang keluaran DJB dan uang kertas Jepang yang masih beredar.

Bukan hanya dalam sektor keuangan, sektor perkebunan juga banyak mengalami dampak langsung dari kebijakan Jepang dalam rangka menata ulang posisi Jawa dalam konteks tatanan ekonomi baru yang dirancang Jepang. Kebijakan Jepang dalam sektor perkebunan menggariskan pemertahanan perkebunan yang dianggap vital untuk mendukung kepentingan. Peran vital masing-masing jenis perkebunan diukur dari kontribusinya dalam rangka memenangi perang dan merealisasikan gagasan Jepang tentang Kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dalam rancangan tatanan ekonomi baru yang akan dibangun Jepang, bukan Jawa yang dimaksudkan sebagai sentra produksi gula, melainkan Formosa (Taiwan) yang telah lebih dahulu berperan sebagai lokasi utama bagi operasi perusahaan-perusahaan gula Jepang.[65] Industri gula di Jawa menurut rancangan Jepang hanya akan diposisikan sebagai pelengkap saja, yakni untuk menutup kekurangan gula manakala diperlukan, bukan

64 Darsono dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 177.

65 M.A. Aziz, *Japan's Colonialism and Indonesia* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1955), hlm. 140.

sebagai produsen utama karena kapasitas industri gula di Jawa yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan produksi dan imperium Jepang sebagai pasar dianggap bakal tidak mampu menyerapnya.

Dengan kerangka kebijakan Jepang tersebut, pabrik-pabrik gula di Jawa, termasuk Kediri di dalamnya, dialihkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan Jepang. Pada periode November 1942-April 1944 manajemen pabrik-pabrik gula di Jawa dibagi di antara 6 perusahaan swasta milik Jepang. Dai Nippon Seitô, sebagai perusahaan terbesar dipercaya mengelola 25 pabrik gula, yang semula milik Nederlandsche Handel-Maatschappij, Sentanen Lor c.s., Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-Maatschappij, Coster van Voorhout & co, dan Perusahaan Gedaren. Sementara itu, Taiwan Seitô, Meiji Seitô, dan Ensuikô Seitô masing-masing mengelola 15 pabrik gula, yang letaknya tersebar di berbagai keresidenan yang berbeda. Demikian pula, Okinawa Seitô dan Nanyô Kôhatsu masing-masing mengelola 4 dan 6 pabrik gula.[66] Pada periode ini, sebagian besar pabrik gula di Keresidenan Kediri yang merupakan bekas milik Handel Vereeniging Amsterdam (HVA) masuk dalam pengelolaan Taiwan Seitô, yakni PG Koenir, PG Ngadiredjo, PG Minggiran, PG Tegowangi, PG Kentjong, PG Sroeni, PG Garoem, PG Soemberdadie, PG Menang, dan PG Kawarasan. Beberapa pabrik gula lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit dikelola oleh Meiji Seitô, yakni PG Pesantren, PG Meritjan, dan PG Djatie, yang sebelumnya milik Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij. PG Mojopanggoeng milik Tiedemans & van Kerchem dikelola oleh Ensuikô Seitô. [67] Dalam perkembangannya, dengan pertimbangan efektivitas pengelolaan, maka semua pabrik gula di Keresidenan Kediri kemudian ditempatkan di bawah satu manajemen Taiwan Seitô, sebagai hasil reorganisasi manajemen pabrik gula di Jawa berdasarkan kriteria wilayah administratif yang diberlakukan sejak 1 Mei 1944.[68]

66 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa* (Jakarta: Grasindo & Yayasan Karti Sarana, 1993), hlm. 41-42.

67 T.F.H. Postma, J.W. d'Hane dan J.A. von Meijenfeldt, *De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche Bezetting* (Batavia: Mededeelingen van Het Departement van Economische Zaken in Nederlandsch-Indie, 1946), hlm. 40-42.

68 Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 46.

Tabel 3.1.
Produksi Gula di Keresidenan Kediri, 1942-1944 (dalam ton)

Pabrik	1942	1943	1944
Koenir	28.382	21.594	20.089
Ngadiredjo	17.820	16.307	13.486
Pesantren	16.832	12.154	0
Meritjan	19.474	14.941	15.993
Tegowangi	18.902	14.668	11.724
Kentjong	15.728	10.320	10.902
Poerwoasrie	22.513	13.922	0
Modjopanggoeng	15.178	0	0
Lestarie	11.018	6.390	7.569
Djatie	7.580	0	0
Minggiran	17.833	0	0
Total	191.26	110.296	79.763

Sumber: T.F.H. Postma, J.W. d'Hane dan J.A. von Meijenfeldt, *De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche Bezetting* (Batavia: Mededeelingen van Het Departement van Economische Zaken in Nederlandsch-Indie, 1946), hlm. 48.

Di bawah pengelolaan Jepang, jumlah pabrik gula di Kediri yang aktif secara umum mengalami penurunan. Dari semua pabrik gula yang dikelola Taiwan Seitô di Keresidenan Kediri, hanya ada enam pabrik yang dioperasikan yakni PG Koenir, PG Ngadirejo, PG Minggiran, PG Tegowangi, dan PG Kentjong. Sementara itu, lima pabrik gula lainnya, yaitu PG Soemberdadie, PG Menang, PG Kawarasan, PG Sroeni, dan PG Garoem hanya dijadikan cadangan saja.[69] Sebagian pabrik gula bahkan dialihkan fungsi pengoperasiannya untuk tujuan lain. PG Kentjong berubah menjadi pabrik pemintalan garabo, sedangkan PG Koenir dialihkan untuk produksi semen. Pengalihfungsian dari pabrik gula menjadi pabrik semen juga dilakukan pada PG Modjopanggoeng dengan kapasitas 150 ton semen per bulan.[70] Dengan dilakukannya pengurangan jumlah pabrik gula yang beroperasi dan pengalihan fungsi sebagian pabrik gula untuk tujuan lain menyebabkan produksi gula di Kediri pada masa pendudukan Jepang mengalami penurunan secara tajam. Tabel

69 T.F.H. Postma, J.W. d'Hane dan J.A. von Meijenfeldt, *op.cit.*, hlm. 46.

70 *Ibid*, hlm. 46, 131, 134.

3.1 menyajikan secara rinci volume produksi dari pabrik-pabrik gula yang beroperasi di wilayah Kediri dan tren penurunan volume produksi gula. Selain yang berhenti berproduksi secara total, seluruh pabrik gula yang masih beroperasi berkurang produksinya antara tahun 1942 dan 1943. Penurunan terus berlangsung pada tahun berikutnya untuk PG Koenir, PG Ngadirejo, PG Tegowangi, sedangkan PG Mritjan, PG Kentjong, dan PG Lestarie bertambah volume produksi masing-masing. Meskipun demikian, peningkatan itu masih terbatas dan tidak mampu mengatrol kembali kapasitas produksi gula Keresidenan Kediri secara umum, bahkan pada tahun 1944 produksi gula Kediri terus merosot.

Berbeda dengan industri gula yang mundur akibat kebijakan penataan ulang sektor gula dalam kerangka kebijakan ekonomi Jepang, beberapa tanaman perkebunan lain mendapat perhatian untuk terus dikembangkan termasuk kopi dan terutama karet. Karet adalah salah satu komoditas yang dipandang penting bagi keperluan Jepang. Perkebunan karet secara resmi ditempatkan dalam kontrol *Kanribu* (Dewan Pengendali Tanaman Komersial), sebuah agen yang dibentuk di setiap perkebunan tanaman tahunan.[71] Otoritas Jepang semula juga bermaksud mengembangkan komoditas karet di wilayah Kediri. Akan tetapi, karena menghadapi kendala keterbatasan modal dan tenaga pelaksana, maksud Jepang tersebut tidak diteruskan penerapannya di lapangan. Tanaman karet yang ada bahkan kemudian banyak yang dibongkar baik untuk diambil kayu-kayunya, sebagian menjadi wilayah hunian dan sebagian besar lahannya diubah menjadi area produksi tanaman pangan. Untuk memfasilitasi pengkonversian lahan-lahan perkebunan tanaman pegunungan (*bergcultures*) ini, otoritas Jepang tidak hanya mempekerjakan penduduk lokal dari wilayah Kabupaten Kediri saja, melainkan juga mengerahkan penduduk dari daerah-daerah tetangga seperti Madiun, Ponorogo, dan Nganjuk. Proses ini menyebabkan perluasan pola pedesaan dan menggerogoti sektor perkebunan padat modal warisan zaman Hindia Belanda di Kediri.[72]

71 *Kanpo,* No. 14, II (3), 2603 (1943), hlm. 10; Nawiyanto, *Perekonomian Keresidenan Besuki Masa Pendudukan Jepang* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019), hlm. 145.

72 Clifford Geertz, *op.cit.,* hlm. 53.

Bertolak belakang dengan sektor perkebunan, khususnya tanaman tebu, di mana kebijakan Jepang bertujuan mengurangi kapasitas produksinya, dalam sektor pangan pemerintah Jepang justru memberikan dorongan agar dapat ditingkatkan hasilnya. Dalam kerangka "Konstruksi Jawa Baru" yang dibayangkan Jepang, pemerintah pendudukan Jepang bermaksud menjadikan Jawa sebagai lumbung pangan bagi kepentingan tentara Jepang di Asia Tenggara dan membangun kemandirian pangan di wilayah pendudukan.[73] Untuk mencapai tujuan ini, berbagai langkah diambil Jepang untuk mendorong pelipatgandaan produksi pangan baik melalui perbaikan produktivitas maupun dengan perluasan area penanaman padi. Pada aspek peningkatan produktivitas padi, otoritas Jepang melakukan perbaikan teknologi produksi melalui adopsi varietas padi baru dan inovasi teknis pemeliharaan tanaman.[74] Sementara itu, pada aspek perluasan areal tanam, pemerintah Jepang secara umum menempuh dua alternatif untuk merealisasikannya, yaitu melalui penambahan lahan tanaman padi melalui konversi hutan dan lahan perkebunan menjadi area penanaman padi.[75]

Upaya yang dilakukan Jepang untuk meningkatkan produksi pangan khususnya padi di Keresidenan Kediri menghasilkan adanya peningkatan area panen padi pada lahan-lahan sawah. Pada tahun 1942 ketika kekuasaan Jepang mulai hadir dan mempengaruhi kehidupan di Kediri, luas area panen padi pada lahan sawah di keresidenan ini adalah sebesar 149.149 hektar dan pada tahun 1943 luas panen padi bertambah menjadi 154.623 hektar. Hal ini berarti bahwa antara tahun 1942 dan 1943 di Kediri telah terjadi adanya peningkatan luas panen padi sebesar lebih dari 5.000 hektar.[76] Seiring dengan perluasan areal panen, produksi padi dari lahan sawah juga meningkat dari 3.612.269 kuintal pada tahun 1942 menjadi 3.775.687 kuintal pada tahun 1943,[77] atau meningkat sebesar 163.418 kuintal. Hanya saja, peningkatan produksi padi sawah

73 Shigeru Sato, *War, Nationalism and Peasant: Java under the Japanese Occupation, 1942-1945* (Sydney: Allen and Unwin, 1994), hlm. 175.

74 Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 5-22.

75 Joint Publications Research Service, *Japanese Military Administration in Indonesia* (Washington: US Department of Commerce, 1968), hlm. 275-276.

76 *Geoogste Uitgestrektheden en Productie van voornaamste Voedingsgewassen op Java en Madura 1937-1946* (Jakarta: Centraal Kantoor voor Statistiek,1947), Tabel 1.

77 *Ibid*, Tabel 9.

tidak dibarengi peningkatan panen pada lahan non irigasi, yang bahkan sebaliknya produksinya justru menurun dari 294.890 kuintal menjadi 249.102 kuintal.[78] Implikasinya, secara keseluruhan produksi padi di wilayah Kediri pada tahun 1943 tetap saja turun. Seiring dengan semakin dalamnya pengaruh kebijakan Jepang dalam kehidupan masyarakat di pedesaan Kediri, peningkatan luas panen dan produksi padi tidak berlanjut pada dua tahun berikutnya. Justru pada tahun 1944 dan 1945 baik area panen maupun volume produksi padi terus melorot. Area panen padi pada tahun 1944 adalah seluas 140.188 hektar dan pada tahun 1945 area panen tinggal 122.947 hektar. Demikian pula, produksi padi anjlok volumenya menjadi 3.357.545 kuintal pada tahun 1944 dan 2.200.751 kuintal pada tahun 1945.[79]

Perkembangan luas panen dan produksi padi di Kediri baik pada lahan sawah maupun lahan non-irigasi (tegalan) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Luas Panen dan Produksi Padi di Keresidenan Kediri 1941-1945

Tahun	Luas Panen (hektar)		Total Produksi (kuintal)
	Sawah	Tegalan	
1941	147.873	18.319	4.195.805
1942	149.149	16.914	4.107.159
1943	154.623	16.127	4.024.789
1944	140.188	9.477	3.436.011
1945	122.947	11.360	2.329.119

Sumber: *Geoogste Uitgestrektheden en Productie van voornaamste Voedingsgewassen op Java en Madura 1937-1946* (Jakarta: Centraal Kantoor voor Statistiek,1947), Tabel 1, 2, dan 11.

Tren penurunan produksi padi yang terjadi di Kediri ini merupakan bagian dari pola umum yang berlaku di Jawa meskipun masing-masing daerah dengan tingkatan yang bervariasi. Menurut Aiko Kurasawa, salah satu faktor penyebab utama penurunan adalah mobilisasi tenaga kerja dalam skema *romusha* yang berat sehingga menyebabkan kaum

78 *Ibid*, Tabel 10.

79 *Ibid*, Tabel 1 dan Tabel 9.

petani banyak disibukkan dengan kegiatan fisik dalam berbagai proyek baik untuk tujuan ekonomi maupun militer. Mobilisasi tenaga kerja ini, menurut Kurasawa, banyak menguras tenaga dan melelahkan petani sehingga mereka tidak memiliki waktu dan tenaga yang memadai untuk merawat tanaman padi mereka.[80] Shigeru Sato memberikan penjelasan lain bahwa penurunan produksi padi di Jawa khususnya pada tahun 1944 disebabkan oleh faktor iklim karena pada tahun ini terjadi anomali iklim berupa kemarau yang sangat panjang sehingga menyebabkan kelangkaan air irigasi pada tanaman di sawah-sawah. Banyak tanaman padi yang rusak dan akibatnya hasil panen menurun secara tajam.[81]

Penurunan hasil padi di Jawa tentu saja berhubungan dengan faktor iklim, tetapi faktor kebijakan romusha tampaknya menjadi faktor yang jauh lebih besar pengaruhnya. Di bawah pendudukan Jepang, penduduk Kediri mengalami beban yang sangat berat akibat beragam tuntutan layanan kerja sehingga mereka tidak lagi mempunyai waktu yang memadai untuk mengerjakan lahan dan memelihara tanaman di sawah. Bahkan, Sato sendiri yang menempatkan faktor anomali iklim sebagai sebab penting dalam penurunan produksi padi di Jawa secara umum, mengakui beratnya beban kerja romusha di Keresidenan Kediri. Di Kediri bagian selatan, tepatnya Kabupaten Tulungagung, tenaga kerja romusha dikerahkan dalam proyek ambisius yang digagas oleh Residen Kihara Enji yang dinamakan Proyek Terowongan Neyama. Enji adalah lulusan Akademi Militer Jepang dan berpengalaman dalam pekerjaan keinsinyuran sipil di Taiwan.

Proyek Terowongan Neyama dikerjakan sejak 1 Februari 1943 dan ditargetkan selesai pada awal Juni 1944. Alokasi anggaran untuk ini sebesar *f*750.000, sebagian diantaranya sebesar *f*150.000 disubsidi dari pemerintah pusat di Jakarta. Dalam 9 bulan pertama pengerjaan, proyek ini telah menguras sebanyak 1.800.000 orang per hari, dengan perhitungan rata-rata sebanyak 6.666 orang bekerja setiap hari selama kurun waktu ini. Meskipun sempat diberhentikan beberapa saat di tengah jalan karena kesulitan pengerjaan dan kekurangan dana, Residen Kihara

80 Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 23-27, 52-53.

81 Shigeru Sato, *War, Nationalism and Peasant: Java under the Japanese Occupation, 1942-1945* (Sydney: Allen and Unwin, 1994), hlm. 121-122.

tetap bersikeras untuk melanjutkan proyek Terowongan Neyama yang digagasnya. Pada fase kedua pengerjaan, proyek ini diperkirakan telah mempekerjakan sebanyak 200.000 orang per hari dalam 9 bulan kedua, dengan rata-rata melibatkan sebanyak 740 orang setiap hari.[82]

Selain proyek Neyama, proyek dengan tenaga kerja romusha lainnya di Kediri adalah Penjara Sinai yang berlokasi di medan pantai selatan. Mengacu pada gambaran yang diberikan Sintha Melati, dilukiskan horor dari kedua proyek Jepang tersebut yang berlokasi di daerah yang sangat rawan malaria berikut ini:

> *"Meskipun tujuan terowongan diumumkan untuk memecahkan problem banjir (di Tulungagung), pekerja pada saat yang sama juga digunakan untuk membangun Penjara Sinai yang diperkuat di medan pantai selatan. Puluhan ribu orang harus dikerahkan ke Sinai dan Neyama setiap hari. Mereka disebut romusha Neyama. Jumlah kematian mengerikan. Ratusan orang mati setiap hari di tempat itu […] Memang, itu adalah tanda zaman bahwa mayat-mayat seperti sampah rangka-rangka berjalan tidak lagi mengagetkan orang."*[83]

Bukan hanya komoditas padi yang menurun akibat beban kerja kaum petani yang berat, tanaman lain juga merosot produksinya. Area panen ketela merosot dari 71.708 hektar pada tahun 1942 menjadi 60.945 hektar pada tahun 1943. Pada tahun 1944, area panen ketela hanya seluas 47.464 dan terus turun tajam ke 25.167 hektar pada tahun 1945.[84] Luas panen jagung yang pada tahun 1942 mencapai 98.241 hektar turun menjadi 71.327 hektar pada tahun 1943. Area panen terus melorot pada tahun berikutnya, yakni seluas 43.407 hektar pada tahun 1944.[85] Luas panen kedelai juga mengalami penurunan serupa. Pada tahun 1942, luas panen kedelai sebesar 58.998 hektar dan pada tahun 1943 sebesar 40.094 hektar. Luas panen menurun ke 14.644 hektar pada tahun 1944, meskipun tahun berikutnya naik sedikit menjadi 16.324 hektar pada tahun 1945.[86] Seiring dengan penurunan luas panen, volume

82 *Ibid.*, hlm. 190-195.

83 *Ibid*, hlm. 195-196.

84 *Geoogste Uitgestrektheden en Productie van voornaamste Voedingsgewassen op Java en Madura 1937-1946* (Jakarta: Centraal Kantoor voor Statistiek,1947), Tabel 5.

85 *Ibid*, Tabel 4.

86 *Ibid*, Tabel 8.

produksi palawija juga merosot. Pada tahun 1942, produksi panen jagung sebesar 1.187.645 kuintal, pada tahun 1943 sebesar 744.117 kuintal dan sebesar 329.025 pada tahun 1944. Produksi ketela pada tahun 1942 sebesar 7.568.290 dan sebesar 6.279.636 kuintal pada tahun 1943. Pada tahun 1944, volume produksinya hanya sebesar 3.702.192 kuintal dan pada tahun 1945 produksi ketela terlempar lebih jauh ke bawah, hanya mencapai 1.371.607 kuintal.[87] Kemerosotan area panen dan volume produksi palawija juga memberi petunjuk cukup jelas bahwa tidak tersedia cukup waktu dan stamina di kalangan kaum petani untuk mengelola lahan dan tanaman mereka karena teralihkan ke layanan kerja lain yang melelahkan dan akibatnya adalah kemunduran tajam persediaan bahan makanan.

Berkurangnya persediaan pangan, beratnya beban hidup, turunnya stamina fisik yang berdampak sakit dan kematian tampak kontras dengan himbauan-himbauan yang dikeluarkan untuk mempromosikan kesehatan penduduk. Untuk menjaga kesehatan penduduk agar tidak diserang penyakit, misalnya, dikeluarkan Maklumat Kediri-S*yuu* tentang kesehatan, kebersihan, dan penyakit. Di dalam Pasal 1 Maklumat Kediri-S*yuu* disebutkan larangan minum air mentah dari sumur dan keharusan penduduk untuk meminum air bersih yang sudah dimasak. Selain itu, juga diatur larangan penduduk di Kediri-*Syuu* memakan sayur, ikan sebelum dimasak terlebih dahulu (Pasal 2). Demikian juga, untuk menjaga penduduk Kediri-*syuu* agar tidak terserang penyakit dikeluarkan perintah untuk membersihkan rumah dan pekarangan setiap hari (Pasal 3), tempat-tempat tidur, pakaian, dan sebagainya harus dijemur matahari (Pasal 4). Di dalam maklumat yang sama juga disebutkan agar penduduk di Kediri-*Syuu* menjaga kesehatan agar tidak terserang penyakit dan harus segera berobat jika jatuh sakit.[88]

Peraturan-peraturan tersebut tidak banyak artinya di lapangan karena kehidupan penduduk dihadapkan pada beragam tekanan berat yang menurunkan stamina tubuh dan suplai pangan. Selain dikenai wajib kerja dalam skema romusha, kaum petani di pedesaan Kediri juga dikenai beban lain dalam bentuk kewajiban menyerahkan padi untuk

87 *Ibid.*, Tabel 13.

88 *Kan Po*, No.1 Edisi 10 Desember 2602 (1942).

kepentingan pemerintah Jepang. Pada periode April 1943-Maret 1944, volume padi yang terkumpul melalui wajib serah padi dari kaum petani di Kediri mencapai 70.511 ton. Pada periode April 1944-Maret 1945 volume padi yang terkumpul lewat penyerahan wajib padi sebesar 60.978 ton.[89] Dengan penyetoran padi untuk kepentingan militer Jepang yang sistematis tersebut, bukan suatu kebetulan bila laporan-laporan awal tentang kelangkaan pangan di wilayah Kediri mulai muncul sejak 1943.[90] Apalagi Jepang juga membatasi kegiatan perdagangan secara ketat. Orang-orang Jepang dapat melakukan penyitaan secara sewenang-wenang terhadap barang-barang yang dijual secara terbuka di pasar-pasar. Tindakan pembatasan dan penyitaan yang dilakukan Jepang membuat barang-barang kebutuhan hidup termasuk beras dan kain hanya tersedia dalam jumlah terbatas di pasar bebas.[91]

Tidak hanya bahan pangan yang diambil dan dibatasi peredarannya di pasar bebas, beban penduduk Kediri juga lebih diperberat dengan kebijakan lain terkait pengumpulan harta benda milik penduduk untuk kepentingan Jepang. Pada 20 Desember 1944, otoritas Jepang mengumumkan bahwa dalam waktu satu bulan penduduk harus menyerahkan barang-barang berharga miliknya seperti emas, intan, perak, platinum, dan batu-batu berharga lainnya. Barang-barang berharga ini diperlukan Jepang konon untuk dibuat amunisi perang satu-satunya yang dapat digunakan untuk menghancurkan kapal-kapal perang milik Sekutu. Pada akhir kegiatan, pengumpulan barang-barang berharga untuk pemerintah Jepang, disebutkan bahwa di Kediri berhasil diperoleh sebanyak lima kali lebih besar dari target yang ditetapkan. Tidak ada angka-angka yang menyebut jumlah maupun nilai secara pasti untuk Keresidenan Kediri, tetapi total barang-barang berharga yang berhasil terkumpul di sebagian Jawa Timur dan Jawa Tengah nilainya dikatakan mencapai 30 juta gulden.[92]

Kemunduran akibat kebijakan Jepang juga terjadi pada bidang infrastruktur dan sarana transportasi. Meskipun di tempat lain, misalnya

89 Aiko Kurasawa, *op.cit.* hlm. 83-84.

90 Pierre van der Eng, *Food Supply in Java during War and Decolonisation 1940-1950*, MPRA Paper, May 2008, hlm. 36.

91 Clifford Geertz, *op.cit.,* hlm. 87.

92 L. de Yong, *The Collapse of a Colonial Society: The Dutch in Indonesia during the Second World War* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 257.

Banten, penguasa Jepang dengan mengerahkan tenaga kerja romusha membangun jaringan rel sepanjang 120 km antara Bayah dan Saketi untuk memfasilitasi eksploitasi tambang dengan tenaga romusha,[93] di Kediri Jepang justru membongkar jalur kereta api yang dianggap Jepang kurang strategis. Ada tiga jalur trem di Kediri milik Perusahaan Kediri Stoomtram Maatschappij yang dibongkar Jepang pada tahun 1943, yakni jalur Pesantren-Wates sepanjang 14 km, jalur Palem-Papar sepanjang 14 km, dan jalur Gurah-Kawarasan sepanjang 4 km. Pembongkaran juga dilakukan Jepang pada berbagai jalur lainnya di Jawa Timur, termasuk jalur Sepanjang-Krian (7 km), jalur Mojokerto-Ngoro (34 km), jalur Gemakan-Dinoyo (8 km), dan jalur Mojokerto-Wates (3 km), yang semuanya merupakan milik Perusahaan Oost-Java Stoomtram Maatschappij.[94] Bekas bongkaran rel dikumpulkan Jepang untuk digunakan membangun jaringan rel di tempat lain.

Kebijakan Jepang tersebut oleh Geertz disebut sebagai "Kebijakan regresi ekonomi yang dipaksakan". Kehidupan rakyat dikembalikan kepada tatanan "ekonomi secukup hidup". Pembongkaran infrastruktur transportasi dan pembatasan kegiatan perdagangan membawa kehidupan masyarakat desa berbalik arah kembali menuju kondisi autarki yang nyaris pramodern. Surplus pangan dan tenaga kerja yang ada diekstraksi secara paksa melalui cara-cara politik untuk memenuhi keperluan Jepang tanpa ada upaya serius untuk melakukan investasi demi pengembangan perekonomian ke depan. Jepang bukan hanya tidak mempunyai sisa kapital untuk diinvestasikan secara produktif, bahkan sebaliknya demi mendukung usaha-usaha dan kepentingan perang yang dilancarkannya, Jepang malahan telah menggerogoti modal yang ada. Kebijakan yang diterapkan Jepang, menurut Geertz, bukanlah "Pembangunan", melainkan "Penghisapan secara langsung". Dengan praktik semacam itu, masa Jepang disebut Geertz sebagai "Masa kembali ke ekonomi secukup hidup" dan hal ini menimbulkan akibat yang sangat serius berupa terjadinya kemunduran tingkat kehidupan masyarakat secara tajam.[95]

93 Shigeru Sato, *op.cit.*, hlm. 181.

94 Tim Telaga Bakti Nusantara, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia,* Jilid 1 (Bandung: Penerbit Angkasa, 1997), hlm. 145-146.

95 Clifford Geertz, *op.cit.*, hlm. 52.

Beban yang ditanggung penduduk Kediri tidak hanya sebatas urusan ekonomi yang memberatkan. Mereka juga harus sering menyaksikan dan menghadapi tindakan opresif Jepang yang tidak jarang berujung kematian. Pada bulan Mei 1944, misalnya, kebakaran terjadi di kawasan pergudangan sebuah pabrik gula di Kediri. Dalam peristiwa ini, 30 orang pekerja pabrik, kebanyakan orang bumiputera, ditangkap oleh pihak militer Jepang dan 27 orang di antaranya dijatuhi hukuman mati karena dianggap bersalah.[96] Tindakan represif militer Jepang yang dirasakan lebih traumatis dan besar pengaruhnya secara sosial adalah pemadaman terhadap pemberontakan yang dilancarkan tentara PETA di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan yang mengguncang ini merupakan bentuk letupan kekecewaan yang memuncak atas sangat buruknya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat akibat eksploitasi yang dilakukan Jepang dalam bentuk paksaan menyerahkan padi dan harta benda, pengerahan dan perlakuan terhadap kerja romusha yang kejam, rekrutmen wanita-wanita muda sebagai penghibur tentara Jepang, dan kesulitan pangan dan sandang di kalangan masyarakat secara luas.[97]

Perekonomian Kediri yang secara umum merosot terutama setelah tahun 1943 berdampak langsung terhadap kondisi demografis Kediri. Di bawah pendudukan Jepang, laju pertumbuhan penduduk Kediri mengalami penurunan dibanding dekade terakhir Kediri di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Kalkulasi pertumbuhan penduduk Jawa yang dilakukan Pierre van der Eng menunjukkan dengan jelas bahwa pada periode 1930-1942, rata-rata pertumbuhan penduduk Keresidenan Kediri mencapai 1,75% per tahun, sedangkan di bawah pendudukan Jepang laju pertumbuhan penduduk Kediri turun menjadi sebesar 1,65% pada tahun 1942-1943. Pada tahun 1943-1944, untuk pertama kali dalam sejarah demografi Kediri sejak tahun 1930, Kediri mengalami pertumbuhan penduduk negatif, yakni sebesar minus 0,08 dan terus turun ke minus 1,75 pada tahun 1944-1945, dan baru menjadi stagnan sebesar 0% pada 1945-1946.[98] Secara absolut, penduduk Keresidenan Kediri naik dari 2.969.000

96 L. de Yong, *op.cit.*, hlm. 183.

97 Nugroho Notosusanto, *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 117-118.

98 Pierre van der Eng, "Bridging a Gap: A Reconstruction of Population Patterns in Indonesia 1930-1961", *Asian Studies Review,* Vol. 26, No. 4, Desember 2002, hlm. 499.

jiwa pada tahun 1943 menjadi sebesar 3.018.000 jiwa pada tahun 1943, tetapi setelahnya jumlah penduduk menurun sebesar 3.015.000 jiwa pada tahun 1944 dan berlanjut merosot sebesar 2.963.000 jiwa pada tahun 1945.[99]

Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan angka kematian penduduk Kediri pada periode Jepang sebagai konsekuensi kemerosotan perekonomian secara umum akibat keterbatasan persediaan pangan dan barang kebutuhan hidup lain khususnya pakaian, serta memburuknya kondisi kesehatan masyarakat akibat beban hidup yang bertambah berat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kediri yang buruk pada masa pendudukan Jepang terus berlanjut pada periode revolusi. Transisi kekuasaan pada paruh kedua 1940-an menghadirkan drama yang penuh dengan kekerasan dan konflik bersenjata yang menyeret kondisi perekonomian dan masyarakat Kediri dalam kesulitan dan ketidakpastian. Persoalan ini akan diuraikan pada bagian berikut.

KEDIRI MASA REVOLUSI

KEDIRI BERGABUNG REPUBLIK

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga pertengahan September 1945, keadaan di Kota Kediri sebagai ibu kota Kediri-*Syuu* masih belum memperlihatkan geliat menyambut proklamasi. Hal ini kontras dengan masyarakat di Blitar-*Shi* (Kotamadya Blitar), Blitar-*Ken* (Kabupaten Blitar), Nganjuk-*Ken* (Kabupaten Nganjuk), dan Tulungagung-*Ken* (Kabupaten Tulungagung), yang begitu bersemangat menyambut peristiwa proklamasi. Pertengahan September 1945 datang para pemuda Blitar ke Kota Kediri dengan mengendarai mobil. Mereka mengajak para pelajar di Kediri untuk melakukan aksi gerakan penempelan bendera Merah Putih dan plakat-plakat bertuliskan "Merdeka!," "Sekali Merdeka Tetap Merdeka," "Merdeka atau Mati," "Lebih Baik Mati Daripada Dijajah Nippon."[100] Para pemuda Blitar tersebut membuat plakat

99 *Ibid.*, hlm. 498.

100 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

dengan para pemuda pelajar Kediri dari SMP (*Chuu Gakko)* dan Sekolah Dagang Menengah dari jam 10.00-14.00 WIB.[101]

Mereka kemudian melancarkan aksi penempelan bendera maupun plakat-plakat di tembok-tembok toko, perkantoran, tembok/gedek rumah-rumah penduduk di pinggiran jalan, dan pada tiang-tiang listrik. Pekerjaan berisiko, mengingat kekuasaan Jepang di Kediri-*Syuu* masih kuat. Hal ini terbukti seorang pelajar putra dari Wedana Campur Darat (Kabupaten Tulungagung), Danoe Soegito mati tertembak seorang Jepang ketika sedang menempel plakat di tembok rumahnya. Gerakan penempelan plakat tersebut berakhir sampai sore hari. Setelah itu para pemuda Kediri diperintahkan meninggalkan kota, mengingat Kenpeitai Kediri yang masih berkuasa sudah mulai bertindak.[102] Gerakan penempelan plakat dan pemasangan Bendera Merah Putih mendapat respons sekelompok pemuda Kediri seperti Wasis,[103] Surip, Tajib, Ermadi, dan Sudjud. Mereka adalah para pelajar *Koto Sihan Gakko* (Sekolah Guru Tinggi) di Jakarta yang setelah menghadiri rapat raksasa di Lapangan Ikada di Jakarta pada 19 Agustus 1945,[104] diperintahkan Martono (pemimpinnya) kembali ke tempat asal guna memimpin aksi perjuangan mendukung proklamasi Indonesia.[105] Sekitar Minggu ke-3 September 1945, mereka mengajak para pemuda Kediri untuk mengadakan rapat di Gedung Taman Siswa di Jalan Pemuda No. 16 Kediri untuk membahas penyusunan strategi dan taktik pengambilalihan kekuasaan Jepang di Kediri-*Syuu*. Hasil rapat memutuskan dua langkah akan diambil, yakni pengambilalihan kekuasaan Jepang atas Kediri-*Syuu* dan pelucutan senjata pasukan Jepang di Kediri dan sekitarnya.[106]

Setelah pertemuan di Gedung Taman Siswa Kediri, bergabunglah sekelompok pemuda eks-Pembela Tanah Air (PETA) seperti Sudiro, R.

101 Sudarno dkk., *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 78

102 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

103 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

104 Nugroho Notosusanto, *30 Tahun Indonesia Merdeka.* Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Intermasa, 1981), hlm. 39

105 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 79

106 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

Surachmat, Bismo, Haji Mahfud,[107] dan para pemuda dari Pasukan Polisi Istimewa (PPI) seperti Memed Tanumijoyo, Sumarsono, dan Singgih.[108] Para pemuda bergerak cepat mengajak para pemuda maupun rakyat Kediri serempak menuju ke Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk menghadiri Rapat Umum pengambilalihan kekuasaan Jepang di Kediri-*Syuu* yang direncanakan pada 25 September 1945.[109] Sebagian pemuda mendatangi rumah kediaman *Fuku Chookang* (Wakil Residen Jepang), A.R. Pratalikrama,[110] untuk meminta kesediaannya menyatakan penyerahan kekuasaan Jepang di Kediri-*Syuu* dan menyatakan pengakuan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dan pernyataan Keresidenan Kediri masuk ke dalam bagian Negara Republik Indonesia.[111]

Sejak sekitar pukul 09.00 pagi, 25 September 1945, segenap rakyat Kediri dari kalangan para pemuda, remaja, dewasa, orang tua bahkan sebagian anak-anak berbondong-bondong membawa senjata berupa pentungan, golok, *klewang,* pisau, belati, arit, linggis, tombak, keris, dan batu, memasuki Gedung Nasional Indonesia(GNI). Pelataran GNI penuh sesak oleh kehadiran massa untuk menyaksikan Rapat Umum pengambilalihan kekuasaan Jepang di Kediri-*Syuu* yang direncanakan pada pukul 11.00 WIB.[112] Kehadiran massa tersebut mampu memberikan *pressure* kepada pemerintah pendudukan Jepang di Kediri-*Syuu.*[113] Rapat Umum dibuka pukul 11.00 WIB diawali pidato anggota KNIP, Sidik Joyosukarto. Isi pidato bercerita pengalamannya ketika menghadiri Rapat Raksasa di Lapangan IKADA Jakarta pada 19 September 1945.[114] Ia mengatakan, rapat tersebut bukan sekedar rapat biasa, melainkan pertemuan antara ribuan orang bersenjata. Setelah pidato selesai, Wakil Residen Kediri-*Syuu*, A.R. Pratalikrama dibawa masuk ke ruang pertemuan

107 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021; Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

108 Sudarno dkk., *loc.cit.*

109 *Ibid.*, hlm. 79-80

110 A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 2: Diplomasi Atau Bertempur* (Jakarta: Disjarah-AD-Angkasa, 1977), hlm. 33.

111 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

112 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

113 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

114 Nugroho Notosusanto (1981), *op.cit.*, hlm. 39-41.

dan didaulat untuk menjadi Residen Kediri yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Atas kesediaannya, ia disambut tepuk tangan gegap gempita seluruh rakyat Kediri yang menghadiri pertemuan Rapat Umum tersebut.[115] Selain itu, hasil rapat diputuskan untuk menggalang dana guna keperluan perjuangan kemerdekaan seluruh rakyat Kediri dari pemerintahan pendudukan Jepang. Berkenaan dengan itu dibentuk badan pengumpul dana yang diberi nama Fonds Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Maridi Danukusumo.[116]

Setelah Rapat Umum pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang ke RI berjalan lancar, 23 September 1945, aksi dilanjutkan pelucutan senjata pasukan Jepang pada 25 September 1945 oleh para pemuda eks-PETA maupun para pemuda anggota PPI. Di dalam pelaksanaan aksi ini, Wasis (PPI) ditugaskan mengerahkan massa. Massa diminta untuk melucuti senjata pasukan Jepang dengan menggunakan senjata pentungan, batu, berbagai senjata tajam dan sebagainya di gudang senjata, Gedung Kenpeitai di Jalan Brawijaya.[117]

Taktik pelaksanaan pelucutan senjata dimulai malam hari, 25 September 1945, didahului para pemuda eks-PETA menyerang dari belakang. Sementara itu, massa bergerak cepat dan serentak menyerbu dari depan gedung di bawah pimpinan para pemuda dari PPI sambil menunggu suara tembakan pistol dari pimpinan pemuda eks-PETA (Bismo). Sebelum pelaksanaan pelucutan senjata dimulai, pada malam itu para pemuda tergabung di dalam PPI berkeliling ke desa-desa sambil memukul tiang listrik keras untuk mengumpulkan massa guna menyerang gedung senjata Jepang di Gedung Kenpeitai pada pagi harinya, 26 September 1945. Sejak pagi hari, massa berdatangan berbondong-bondong bersenjatakan apa saja di tangan mengepung gedung senjata tersebut sambil berteriak-teriak "NIPPON menyerahlah." Sampai pukul 11.45 WIB belum ada penyerbuan ke gedung senjata, karena massa menunggu *aba-aba* suara letusan senjata pistol dari belakang gedung, tetapi suara letusan juga belum terdengar. Tepat pukul 12.00 WIB, Residen Kediri (RI), Pratalikrama dengan beberapa pengawal memasuki gedung dari arah

115 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

116 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 81.

117 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

depan dan terjadi dialog dengan pimpinan tentara Jepang. Dialog diakhiri dengan penandatanganan penyerahan senjata dari pihak Jepang kepada pihak para pejuang RI tanpa syarat.[118]

Setelah pelucutan senjata, pada 1 Oktober 1945 senjata-senjata hasil rampasan dibawa para pejuang RI untuk dikumpulkan di perkebunan Satak, Jengkol, Sepawan, Badeg, dan Petungombo.[119] Selanjutnya hasil rampasan senjata dibagikan kepada badan-badan perjuangan. Selain itu para pemuda pejuang RI mengumpulkan para tawanan yang terdiri atas para perwira Jepang. Untuk sementara waktu mereka dikumpulkan menjadi satu di Hotel Merdeka, para prajurit Jepang dikumpulkan di Lapangan Sentono Betek. Sementara itu, para prajurit perempuan dikumpulkan di Hotel Emma.[120] Selanjutnya, semua tawanan diangkut ke Surabaya dan diserahkan kepada Sekutu.[121] Setelah berhasil melucuti senjata pasukan Jepang, gerakan para pejuang RI di Kediri selanjutnya adalah pengibaran Bendera Merah putih di seluruh kantor pemerintahan yang berada di wilayah Keresidenan Kediri. Yang mengibarkan Bendera Merah Putih di Kantor Keresidenan Kediri adalah seorang pemuda berasal dari Desa Rejoagung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, bernama Soemarsono.[122]

Gerakan perjuangan RI selanjutnya adalah melakukan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di seluruh wilayah Keresidenan Kediri. Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian di wilayah Keresidenan Kediri. Selain itu, tujuan pembentukan BKR untuk mempertahankan kemerdekaan RI dari pasukan Belanda yang didukung pasukan Serikat yang masih ingin menjajah Indonesia. BKR yang dibentuk di Keresidenan Kediri meliputi: (1) BKR Keresidenan Kediri dipimpin R. Surachmad; (2) BKR Kabupaten Kediri dipimpin Firslan Suryoatmojo; (3) BKR Kabupaten Tulungagung dipimpin Kusnadi; (4) BKR Kabupaten Blitar dipimpin Suhud; (5) BKR Kabupaten Trenggalek

118 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

119 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun, Kediri, 21 Maret 2021.

120 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 84.

121 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*,, hlm. 122.

122 Hersri Setiawan, *Negara Madiun?* (Pengantar Arief Budiman), Cetakan Pertama. (Tanpa Kota Terbit: FuSPAD, 2002), hlm. 192.

dipimpin Tjipto Harsono; (6) BKR Bawah Tanah dipimpin Bismo; (7) BKR Kota Kediri dipimpin Banurejo. Para pejuang RI yang membentuk BKR di daerah-daerah seluruh Indonesia termasuk di Keresidenan Kediri berasal dari eks-PETA di daerahnya masing-masing.[123]

Pada masa Agresi Militer I, 21 Juli 1947, Surabaya dan Malang menjadi sasaran bombardir pasukan Belanda. Penduduk dari kedua tempat banyak yang mengungsi ke wilayah Kediri. Dalam Agresi Militer I ini, wilayah Keresidenan Kediri tidak mendapat gempuran dari pasukan Belanda, karena pasukan ini hanya sampai di daerah Malang bagian selatan dan di Kabupaten Mojokerto yang berada di sebelah barat Kota Surabaya.[124] Keadaan pemerintahan sipil di Keresidenan Kediri berjalan normal. Pada saat peralihan administrasi pemerintahan dari Jepang ke RI termasuk pengisian jabatan-jabatan yang ditinggalkan Jepang tidak menimbulkan permasalahan, karena sejak masa pendudukan Jepang sesungguhnya pimpinan kantor, jawatan, dan termasuk instansi pimpinan perkebunan secara berangsur-angsur dipegang orang-orang Indonesia.[125] Struktur pemerintahannya pun tidak banyak berubah, kecuali perubahan nama wilayah dengan istilah Indonesia, seperti seperti *syuu* berubah menjadi keresidenan, *ken* menjadi kabupaten, *syuchokan* menjadi residen, dan *kencho* berubah menjadi bupati.[126]

Pada masa pendudukan Jepang, setiap *Syuu* dibentuk badan penasihat pemerintahan bernama *Syusangikai* yang anggotanya dari daerah-daerah mewakili kabupaten (*Ken*), kawedanan (*Gun*), dan Kecamatan (*Son*). Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, badan-badan tersebut dihapus, dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dari tingkat pusat (KNIP) hingga tingkat daerah (KNID) para anggotanya diangkat dari kalangan partai politik yang ada.[127] KNID dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1945 sebagai produk pertama dari KNIP yang telah berubah fungsi dari Badan Pembantu Presiden RI berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945 menjadi Dewan Legislatif berdasarkan

123 Sudarno dkk.,*op.cit.*, hlm. 85.

124 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

125 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 84.

126 Pamoe Rahardjo, *Tentara PETA (Pembela Tanah Air): Mengawal Proklamasi 17 Agustus Mulai Rengasdengklok* (Jakarta: Yayasan Peta, 1984), hlm.25.

127 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 107.

Maklumat X Wakil Presiden RI tertanggal 23 November 1945. Dalam perkembangannya, KNID berubah menjadi DPRD yang dipimpin Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintah daerah. KNID memilih sebanyak-banyaknya lima orang sebagai anggota Badan Eksekutif yang bersama-sama dengan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan jalannya pemerintahan sehari-hari.[128]

KNID Keresidenan Kediri beranggotakan 50 orang terdiri atas wakil-wakil partai yang ada semenjak dikeluarkan Maklumat Pemerintah RI pada 3 November 1945. Dari ke-50 anggota tersebut yang ditetapkan lima orang sebagai Badan Eksekutif Keresidenan Kediri sebagai berikut: (1) Wasis dari PNI; (2) M. Tahir Huseini dari Partai Murba; (3) A.W. Suyoso dari Masyumi; (4) Moh. Subagiyono dari Masyumi; (5) Abdul Karim dari Masyumi. Badan Eksekutif ini berperan sebagai badan penasehat urusan pemerintahan sipil.[129] Sementara itu, susunan pemerintahan Keresidenan Kediri sebagai berikut: (1) Suwondo Ranuwijoyo sebagai Residen Kediri; (2) Muntoro Atmosentono sebagai Sekretaris Residen; (3) Dharmadi sebagai Bupati Blitar; (4) Djanuismedi sebagai Bupati Tulungagung; (5) Muntajab sebagai Bupati Kediri; (6) Suprapto sebagai Wali Kota Kediri; (7) Suparno sebagai Wali Kota Blitar. Selain Badan Eksekutif, Residen Kediri di dalam menjalankan pemerintahannya dibantu Dewan Pertahanan Daerah (DPD) yang beranggotakan Komandan Resimen/Komandan Brigade S, Letkol R. Surachmad, Kepala Kepolisian Keresidenan Kediri, dan Sekretaris DPD, R. Abdurachman. DPA berfungsi sebagai badan penasehat urusan pertahanan.[130]

Antara Juli-Agustus 1947, para pengungsi dari Malang berdatangan ke wilayah Keresidenan Kediri akibat serangan bombardir dari pesawat tempur Belanda ke Keresidenan Malang dalam Agresi Militer I. Di dalam Agresi Militer I, pasukan Belanda di Jawa Timur hanya membombardir daerah-daerah di Keresidenan Surabaya, Mojokerto, dan Keresidenan Malang. Wilayah Keresidenan Kediri aman dari bombardir pasukan Belanda, sehingga wilayah ini menjadi tempat pengungsian banyak

128 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Dalam m.hukumonline.com, diunduh, 27 April 2021.

129 Sudarno dkk., *op.cit.,* hlm. 88.

130 *Ibid*, hlm. 90.

penduduk dari Keresidenan Malang.[131] Pemerintah di Keresidenan Kediri menyelenggarakan tempat penampungan sementara dan dapur umum yang mendapat bantuan sepenuhnya dari ibu-ibu yang tergabung di dalam KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) dan para pelajar Sekolah Menengah Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) cabang Kediri.[132]

Pada Agresi Militer Ke-2 (19 Desember 1948), Ibu Kota RI, Yogyakarta diserbu Belanda, dan giliran kota Kediri menjadi sasaran bombardir dengan tembakan-tembakan mitraliur dari pesawat tempur Belanda pada akhir Desember 1948 terkait keberadaan PB. Soedirman di dalam memimpin Perang Gerilya Semesta sedang bersembunyi di hutan-hutan berada di Keresidenan Kediri.[133] Menurut kesaksian Sutaji dan Theresia Titah,[134] bom-bom yang dijatuhkan bukan berkategori besar, melainkan berukuran kecil, sehingga kerusakannya tidak terlalu serius, bahkan korban jiwa dari serangan bombardir tersebut cuma satu. Serangan bombardir dari pesawat tempur Belanda hanya merusak rumah Kepala Kantor Pos Kediri, dapur rumah Wali Kota Kediri, sebuah gedung bioskop dan sebuah warung.[135]

Setelah serangan bombardir pesawat tempur Belanda, Komandan Teritorium Militer Keresidenan Kediri, Letkol. Surachmad melakukan antisipasi serbuan Belanda dengan menyusun program evakuasi bagi pemerintahan sipil dan militer, sebagai berikut.

(1) Pemerintahan Keresidenan ditempatkan di kaki Gunung Wilis, di Desa Tawingan, Kecamatan Mojo berada di sebelah barat Sungai Brantas yang berjarak 20 km ibu kota Kediri. Mereka yang ditempatkan di desa ini Residen Suwondo Ranuwidjojo, Sekretaris Residen: Muntoro Atmosentono, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur: Komisaris Suprapto, Sekretaris Dewan Pertahanan Daerah: R. Abdulrachman.

131 G.A. Ohorella, Restu Gunawan, P. Suryo Haryono, *Penulisan Sejarah Lokal: Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada Masa Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional: Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 19.

132 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

133 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 161-169

134 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021; Wawancara dengan Theresia Titah (82 tahun), Kediri 23 Maret 2021.

135 Sudarno dkk., *op.cit.*,, hlm. 94-95.

(2) Pemerintahan militer berpindah-pindah dan terakhir ditempatkan di lereng Gunung Wilis, Desa Pamongan, Kecamatan Sendang. Mereka yang berada di tempat ini seperti: Letkol. R. Surachmad (Komando Resimen/Komando Brigade), Kepala Staf Resimen: Mayor Yono Sewoyo, Staf Brigade: Kapten Kartidjo.

(3) Wali Kota Kediri berada di Desa Pojok, Kecamatan Gampengrejo. Sementara itu Sekretaris Kotapraja Dwijo Sumarto bertempat di Desa Gayam.

(4) Badan Eksekutif (BE) bertugas sebagai penghubung antara Residen dengan para Bupati/Wali Kota maupun para pejabat instansi pusat. Anggota BE, M. Tahir bersama para pengurus Taman Siswo dari Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten memberikan pelajaran keliling bagi para siswa yang tersebar di daerah-daerah tempat pengungsian. Anggota SE, Wasis membuka SD di Desa Klanderan, Kecamatan Plosoklaten.

(5) Di dalam menyelenggarakan pemerintahan darurat, Bupati Blitar memilih tempat di Lodoyo, Boyolangu, Bupati Tulungagung memilih tempat di Durenan, Bupati Nganjuk memilih tempat di Desa Jatikapur, Kecamatan Prambonan, dan Bupati Kediri memilih tempat di Desa Ngetrep, Kecamatan Mojo.[136]

Selama masa perang kemerdekaan, di seluruh wilayah Keresidenan Kediri terdapat formasi pasukan perang sebagai berikut: (1) Batalion Mujayin (Yon 20) dikenal sebagai Yon Branjangan yang berkedudukan di daerah Blitar; (2) Batalion Sobirin (Yon 21) disebut Yon Mliwis yang berkedudukan di Tulungagung; (3) Batalion Surachman (Yon 27) yang dikenal sebagai Yon Sriti, berkedudukan di daerah Kediri bagian utara; (4) Batalion H. Machfud (Yon 24) dikenal sebagai Yon Glatik berkedudukan di Kandat dan Ngadiluwih; (5) Batalion Sunandar (Yon 19) dikenal sebagai Yon Merak yang berkedudukan di Pare dan Ngantang; (6) Batalion Yuwono (Yon 23) dikenal sebagai Sikantan dengan berkedudukan di Kediri Selatan. Selain beberapa kesatuan tersebut, juga terdapat beberapa kompi berdiri sendiri yang meliputi: (1) Kompi Macan Gembong berkedudukan di Kalangbret; (2) Kompi Macan Putih berkedudukan di

136 Sudarno dkk., *op.cit.,* hlm. 95-96.

Ngantang; (3) Kompi Macan Kumbang berkedudukan di Tulungagung; (4) Kompi Macan Rembah berkedudukan di Kampak; (5) Kompi Macan Sruni berkedudukan di Trenggalek; (6) Kompi Macan Tutul yang berkedudukan di Ngunut. Selain itu, masih terdapat pasukan Brigade XVII TRIP yang beroperasi di Blitar, Trenggalek, dan perbatasan Kabupaten Kediri-Kabupaten Jombang. Masih ada lagi ribuan pegawai di seluruh wilayah Keresidenan Kediri ikut dalam perang gerilya.[137]

Gambar 3.2. Patroli Pasukan Belanda di Wilayah Kediri
Sumber: Foto Lex Herder, Koleksi KITLV

Keadaan topografi wilayah Keresidenan Kediri yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kotamadya Kediri, dan Kotamadya Blitar dikelilingi gunung dan pegunungan serta memiliki banyak lembah dan ngarai. Wilayahnya juga dibelah oleh Sungai Brantas sebagai sungai terbesar kedua di Jawa, yang menguntungkan bagi pasukan-pasukan RI untuk menjalankan strategi perang gerilya semesta dalam menghadapi pasukan Belanda. Keadaan topografi yang demikian memungkinkan pemerintah sipil dan markas komando pertempuran berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga tetap eksis dan mampu memimpin perjuangan

137 *Ibid*, hlm. 100-101

rakyat semesta dalam mempertahankan kemerdekaan. Selama bergerilya para pasukan pejuang kemerdekaan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, sehingga para Komandan Order Distrik Militer (KODIM) selaku penguasa teritorial bersama para camat (Asisten Wedana) dan para kepala desa berkewajiban menyediakan tempat beristirahat dan makanan ala kadarnya bagi para pasukan pasukan pejuang kemerdekaan. Selain itu, para kepala desa menyediakan tenaga sukarela, para pemuda desa, jika pasukan tentara memerlukan bantuan untuk mengangkut peralatan perang.[138]

Setelah Kota Kediri dibombardir menggunakan pesawat-pesawat tempur Belanda, Wali Kota Kediri, Suprapto menyingkir ke luar kota mengikuti perintah evakuasi dari Komandan Sub Teritorium Militer Kediri, Letkol R. Surachmat dengan segenap pejabat pemerintah Kotamadya Kediri dievakuasi ke timur kota di Desa Pandantoyo, Kecamatan Wates. Mereka itu adalah Wali Kota Suprapto, diikuti Sekretaris Wali Kota, Dwijosumarto, anggota BE Maridi Danukusumo, juga seorang aktivis PNI, Suksmantoyo, dan 15 pelajar Sekolah Menengah Kediri. Namun, di desa tersebut mereka hanya bertahan dua minggu, karena pasukan Belanda berhasil menduduki ibu kota Kecamatan Wates. Mereka meninggalkan tempat tersebut menuju lereng Gunung Kelud tinggal sementara di Pancer, selanjutnya rombongan menuju ke Lodoyo (Kabupaten Blitar) selanjutnya berpindah lagi menuju daerah Campurdarat (Tulungagung). Dari tempat ini selanjutnya berpindah lagi ke Kalangbret, berpindah lagi ke Karangrejo, selanjutnya ke Mojo. Desa Mojo pun dibombardir pasukan Belanda, dan rombongan tersebut pergi meninggalkan Desa Mojo menuju Dukuh Kletak Desa Kanjoran (Kecamatan Mojo).[139] Di tempat ini Wali Kota Kediri beserta rombongan bertemu dengan Patih Kabupaten Kediri, Imam Kus Subagyo dan Wedana Kota Kediri, Sujalmo. Mereka meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke Kota Kediri setelah perang kemerdekaan usai.[140] Bagian berikut akan menguraikan implikasi transisi kekuasaan di wilayah Kediri dalam sektor perbankan dan perekonomian Kediri secara umum.

138 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

139 Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

140 Sudarno dkk., *op.cit.,* hlm. 105 .

PERTUMBUHAN LEMBAGA PERBANKAN NASIONAL DAN LOKAL DI KEDIRI

Keberadaan Indonesia sebagai negara baru dan klaim Belanda atas wilayah yang dulu pernah dijajahnya memunculkan dualisme pemerintahan. Tidak hanya muncul dua pemerintahan yang saling beradu klaim dan legalitas, masing-masing pemerintahan ditopang dengan berbagai institusi, aparat pemerintahan, kekuatan kemiliteran, dan tanpa terkecuali keberadaan lembaga perbankan. Baik pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan Republik Indonesia mengandalkan perbankan masing-masing untuk mengatur keuangan negara dan beroperasinya tata perekonomian dalam masyarakat di wilayah masing-masing. Seperti halnya dalam ranah politik yang diwarnai dualisme pemerintahan, masa revolusi kemerdekaan juga memunculkan terjadinya dualisme perbankan, yakni De Javasche Bank sebagai penopang pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan Bank Negara sebagai institusi keuangan baru yang menjadi pilar negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Di tengah-tengah era revolusi hingga menjelang terjadinya nasionalisasi De Javasche Bank oleh Pemerintah Republik Indonesia, dualisme perbankan bisa dikatakan masih berlangsung. Baik perbankan nasional dan perbankan kolonial hadir dan ikut menjadi bagian dalam denyut nadi revolusi.

Di pihak republik, tidak lama sesudah proklamasi, muncul gagasan untuk mendirikan bank umum dan sekaligus sebagai bank sirkulasi. Gagasan awal berasal dari R.M. Margono Djojohadikoesoemo, yang memandang kehadiran bank semacam ini urgen karena akan menjadi mitra keuangan dan moneter, serta menjadi bagian dari organ-organ yang vital bagi eksistensi sebuah negara.[141] R.M. Margono Djojohadikoesoemo kemudian menyampaikan gagasannya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Keduanya lantas membuat surat kuasa pemerintah yang ditandatangani Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden yang memberi mandat kepada Margono untuk mendirikan sebuah bank. Berdasarkan surat kuasa tersebut, Margono mengontak para pengusaha Indonesia di

141 Bank Negara Indonesia 1946, *35 Years bank Negara Indonesia 1946 5 Juli 1946 –1981* (Jakarta: 1981), hlm. 16.

beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya untuk menggalang dana yang menjadi modal awal.[142]

Atas saran notaris R. M. Soerojo, Margono lantas mendirikan sebuah yayasan bernama Jajasan Poesat Bank Indonesia. Yayasan ini secara resmi berdiri pada 19 Oktober 1945 untuk mempersiapkan pembentukan bank sentral. Berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh R.M. Soerojo, Jajasan Poesat Bank Indonesia diketuai oleh Mohammad Hatta.[143] Yayasan ini mendapat wewenang dari pemerintah untuk menjalankan aktivitas bank umum seperti penyaluran kredit, penerbitan obligasi, menerima simpanan giro, deposito dan tabungan, serta aktivitas lain yang berhubungan penerangan ekonomi. Setelah perangkat peraturan berhasil disiapkan, yakni melalui Perpu No. 2 Tahun 1946, maka Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) yang bertindak sebagai bank sentral/sirkulasi milik Indonesia. Pembentukan BNI dilakukan peresmiannya oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1946 di Yogyakarta. Seiring dengan terbentuknya BNI, Jajasan Poesat Bank Indonesia dilebur keberadaannya ke dalam BNI. Dengan peleburan ini maka semua urusan yang ditangani Jajasan Poesat Bank Indonesia ditransfer ke BNI, yang mulai beroperasi dari bekas Gedung De Javasche Bank di Yogyakarta.[144]

Dengan kedudukannya sebagai bank sirkulasi Indonesia, BNI bertugas melakukan distribusi uang rupiah, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks revolusi, BNI berperan sebagai bank perjuangan dan mitra Kementerian Keuangan dalam membendung invasi uang NICA dengan menggunakan ORI sebagai senjata. Dalam rangka menunjang distribusi ORI dan menegakkan kedaulatan melalui penggunaan ORI di wilayah Indonesia, BNI kemudian mendirikan sejumlah kantor cabang di Jawa, yakni Malang (1946), Jember (1946), Purwokerto (1946), Garut (1946), Cirebon (1946), dan beberapa cabang di Sumatera termasuk Pematangsiantar (November

142 Margono Djojohadikoesoemo, *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis* (Jakarta: Indira, 1970), hlm. 128.

143 Darsono dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 184.

144 Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 84.

1946), Bukittinggi (17 Agustus 1947), dan Kutaraja (September 1948).[145] Bank Indonesia Cabang Kediri juga mulai beroperasi sejak 1946 dengan menggunakan gedung DJB Kediri, yang sebelumnya setelah proklamasi kemerdekaan juga pernah digunakan untuk kantor Bank Pemerintah Daerah (5 November 1945-18 April 1946). Adapun orang yang dipercayai untuk menduduki posisi pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Kediri adalah A. Rifai dan Rt. Bagus Marijono.[146] Melalui dukungan sejumlah kantor cabangnya, BNI dapat menggalang dana simpanan dari masyarakat sebesar 2,045 juta gulden uang Jepang atau sekitar Rp 40,9 juta ORI. Capaian ini dinilai luar biasa dalam rangka stabilisasi moneter di tengah situasi kacau akibat kecamuk perang, blokade pasukan Belanda, sulitnya pengangkutan, dan maraknya pemalsuan ORI oleh Belanda.[147]

Di pihak lain, pemerintah Hindia Belanda yang tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia ingin kembali menguasai bekas wilayah jajahannya. Pendirian kembali DJB mencerminkan keberhasilan militer Hindia Belanda merekolonisasi bagian-bagian wilayah Indonesia karena Belanda mengandalkan De Javasche Bank untuk mendukung keberadaannya. Seiring dengan keberhasilan Belanda menguasai satu per satu berbagai wilayah bekas Hindia Belanda, dengan segera Belanda mempersiapkan pengaktifan kembali De Javasche Bank. Pada bulan Oktober 1945, Belanda mendapatkan akses ke kantor-kantor pusat bank Jepang di Batavia dan membatalkan proses likuidasi yang sedang diterapkan Jepang dan tengah memasuki tahap akhir. Pemerintah Belanda kemudian memerintahkan DJB menyiapkan langkah-langkah untuk melikuidasi Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) milik Jepang.[148] Hingga bulan Juni 1946, terdapat sebanyak sembilan kantor De Javasche Bank yang berhasil dibuka kembali oleh pihak Belanda di berbagai tempat di Indonesia, yakni 4 di Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung), dua di Kalimantan (Banjarmasin dan Pontianak), satu di Sumatera (Medan),

145 *Melangkah ke Depan, dengan Kearifan Masa Lalu: Bank BNI 50 Tahun Emas* (Jakarta: PT. Bank Negara Indonesia, 1996), hlm. 22.

146 R. Hardjo Santoso, *op.cit.*, hlm. 16.

147 Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia 1945 - 1958 Jilid 1* (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. hlm. 94-95.

148 J.O. Sutter, *op.cit.*, hlm. 600.

dan dua di Sulawesi (Manado dan Makassar). Kantor-kantor DJB yang berhasil dibuka ini berlokasi di wilayah Indonesia yang berhasil direbut dan diduduki kembali oleh pasukan Belanda di mana kekuasaan Hindia Belanda kembali ditegakkan.

Tabel 3.3.
Kantor Cabang De Javasche Bank yang dibuka Kembali sebelum Agresi Militer Belanda I, Januari-Juni 1946

No	Kantor Cabang	Tanggal Pendirian	Tanggal Pembukaan Kembali
1	Jakarta	8 April 1828	5 Januari 1946
2	Semarang	1 Maret 1829	25 Maret 1946
3	Manado	9 September 1910	3 April 1946
4	Surabaya	14 September 1829	6 April 1946
5	Banjarmasin	1 Agustus 1907	29 April 1946
6	Pontianak	1 April 1906	1 Mei 1946
7	Bandung	1 April 1909	6 Mei 1946
8	Medan	30 Juli 1907	15 Mei 1946
9	Makassar	21 Desember 1864	20 Juni 1946

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Jaarverslag van De Javasche Bank 1946/1947*.

Selain pembukaan kembali kantor-kantor cabang DJB, bank-bank lain yang beroperasi pada zaman Hindia Belanda juga mulai beroperasi di wilayah kekuasaan Belanda. Melalui Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 2 Januari 1946, bank-bank swasta Belanda diizinkan untuk membuka kantor dan kembali beroperasi. Bank-bank komersial utama milik Belanda seperti Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM), Nederlandsch Indische Handel Bank (NIHB), dan Bank Escompto kembali beraktivitas di sejumlah tempat. Demikian pula, perbankan lainnya yang pernah beroperasi menjalankan usaha pada masa Hindia Belanda seperti The Chartered Bank of India, Australia, and China (CBIAC), Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), Bank of China, Bankvereeniging Oei Tiong Ham Concerns juga tidak ingin ketinggalan sehingga segera ikut menyusul beroperasi dan menjalankan usaha kembali seperti pada masa sebelum perang.[149]

149 Erwien Kusuma, *op.cit.,* hlm. 85.

Hingga pertengahan tahun 1947, beberapa kantor cabang DJB belum beroperasi kembali. Kantor-kantor cabang DJB yang belum dibuka kembali adalah Kediri, Malang, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Palembang, Padang, dan Kutaraja (Banda Aceh). Kantor-kantor DJB yang belum aktif kembali ini berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia sehingga belum dapat dijangkau karena konflik yang tengah terjadi antara pihak republik dan Belanda. DJB Agentschap Kediri baru dibuka kembali pada tanggal 17 Januari 1949, kurang lebih sebulan setelah Belanda melakukan serangan ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia sejak 18 Desember 1948, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Beberapa bagian wilayah Indonesia berhasil dikuasai pasukan Belanda dan sesudah keadaannya memungkinkan maka DJB pun kemudian segera beroperasi kembali untuk mendukung kepentingan Belanda. DJB Agentschap Kediri merupakan satu dari tiga kantor cabang DJB yang dibuka kembali setelah Agresi Militer Belanda II. Dua kantor cabang lainnya yang dibuka untuk memulai operasi kembali adalah DJB Agentschap Yogyakarta dan DJB Agentschap Surakarta, seperti tampak detailnya pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Kantor Cabang De Javasche Bank yang dibuka Kembali Pasca Agresi Militer Belanda II, Desember 1948-Januari 1949

No	Kantor Cabang	Tanggal Pendirian	Tanggal Pembukaan Kembali
1	Yogyakarta	1 April 1879	30 Desember 1948
2	Surakarta	25 November 1867	6 Januari 1949
3	Kediri	2 Juli 1923	17 Januari 1949

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Jaarverslag van De Javasche Bank 1948/1949*.

Pejabat yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan DJB Kediri adalah H.G. Nauta sebagai agen dan F. Verzijden sebagai Kuasa Kas berdasarkan Circulair No. 121/29-Diversen tanggal 17 Januari 1949. Posisi sebagai agen dijabat oleh H.G. Nauta kurang lebih selama lima bulan. Nauta bukanlah orang baru di DJB Kediri. Sekitar tahun 1940, Nauta pernah menduduki jabatan sebagai wakil agen DJB Kediri sebelum kemudian dimutasi untuk menempati posisi agen DJB Manado.[150] Pada tanggal

150 *De Indische Courant,* 16 Februari 1940; *De Indische Courant,* 23 Februari 1940.

15 Juni 1949, posisi Nauta sebagai agen DJB Kediri digantikan oleh J.G. Wallis de Vries. Wallis de Vries pada awal tahun 1940 pernah ditunjuk menjadi kepala DJB Agentschap Banjarmasin untuk sementara waktu, ketika H.H. Verhoeff mengambil cuti domestik. Posisi sebagai agen DJB Kediri dijalani Wallis de Vries kurang lebih selama setahun. Pada tanggal 1 Juli 1951, kedudukan kepala DJB Kediri berpindah dari J.G. Wallis ke E. Ahn.[151] Pengalaman kerja E.Ahn sebelum menempati posisi agen DJB Kediri di antaranya adalah pada tanggal 21 Februari 1942 pernah ditugasi oleh Presiden dan Para Direktur DJB di Batavia untuk menjadi pelaksana tugas kepala di DJB Makassar.[152] Sekitar April 1938, Ahn mengakhiri penugasan sebagai wakil kepala Departemen Urusan Efek Javasche Bank di Batavia dan memulai peran sebagai pelaksana tugas Deputi Agen di DJB Makassar.[153] Dia juga pernah ditunjuk sebagai agen pelaksana di DJB Agentschap Banjarmasin sekitar Februari 1923 ketika agen definitif, E.A.V. Muller sedang mengambil cuti ke Eropa.[154]

Ketika hadir kembali di Kediri dengan posisi sebagai kepala DJB Agentschap Kediri setelah Agresi Militer Belanda II, H.G. Nauta segera mengumpulkan informasi mengenai keadaan wilayah Kediri dan melaporkan kepada Presiden dan Direktur De Javasche Bank di Batavia. Tiga hari setelah pembukaan kembali secara resmi DJB Agentschap Kediri, Nauta mengirimkan laporan tertulis pertama yang dibuatnya kepada pimpinan di Batavia tertanggal 20 Januari 1949 tentang keadaan pabrik-pabrik gula yang ada di wilayah Kediri.[155] Surat yang dibuat Nauta pada hari berikut, tertanggal 21 Januari 1949 melaporkan tentang situasi kota Kediri. Dalam laporannya disebutkan bahwa situasi kota Kediri sejak kedatangannya pada tanggal 11 Januari 1949 tidak membaik. Zona aman hanya terdapat di bagian kota yang disebutnya sebagai Europeesche Wijk dan sebagian kecil wilayah Pecinan, di luar kedua kawasan ini adalah daerah tidak bertuan di mana elemen-elemen jahat berkeliaran. Bagian-

151 R. Hardjo Santoso, *op.cit.,* hlm. 7; *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië*; 16 Januari 1940.

152 *De Indische Courant,* 21 Februari 1942.

153 *Deli Courant*, 9 April 1938.

154 *De Nieuwe Vorstenlanden*, 26 Februari 1923.

155 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1".

bagian kota yang tidak aman ini diwarnai pembakaran dan perusakan yang bermuara pada kekacauan.[156]

Pada tanggal 24 Januari 1949, Nauta menulis surat kepada pimpinan DJB Batavia tentang keadaan di luar kota Kediri, khususnya Distrik Pare dan Wates, yang mulai dikuasai oleh pasukan Belanda. Dalam laporannya antara lain disebutkan tentang hancurnya emplasemen perusahaan perkebunan tapioka dan serat Bendorejo, perusakan terhadap PG Pesantren, penculikan yang dilakukan terhadap orang-orang Tionghoa di Pare, pembakaran atas rumah-rumah tinggal dan toko-toko milik orang Tionghoa di Wates, penemuan enam lokomotif milik Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), dan kondisi berbagai pabrik penyelepan gabah. Laporan Nauta juga menyebutkan penemuan dan penjalinan kembali kontak dengan sejumlah orang Tionghoa yang menjadi relasi bisnis DJB Agentschap Kediri pada masa sebelum perang, yakni Tan Djiem Gwan, Bwa Ping Hwie, Wed. Kwa Thwan Lok, Liem Hok Yong, Lo Tjien Tjing, Njoo Sik Lian, Handel Mij Soen Djiang, Tan Hwat Gie, Tan Lioe Hong, Erven Tan Tiong Hien, Wed. Tjioe Tjong Tjie, dan Teng Hong Tjiang.[157] Dalam surat tertanggal 2 Februari 1949, Nauta menyampaikan informasi mengenai relasi DJB Kediri yang tinggal di Tulungagung dan terkonfirmasi masih hidup, yakni Liem Hauw Soen, Fa. Lie Han Thim & Zonen (Lie Kim Liang dan Lien Tjwan Thong), S.L. Han, dan Lo Tjien Han (Campurdarat). Dalam surat yang sama disebutkan bahwa relasi DJB bernama The Tjien Bie, yang rumah dan pabrik kapuknya hancur, belum dapat dipastikan keadaannya, sedangkan relasi DJB yang berdomisili di Blitar, yakni Swan Boen & Co dikatakan pabrik minyak dan penggilingan padi miliknya hancur karena pembakaran. [158]

Selain terjalinnya kembali kontak dengan para relasi bisnis, pendalaman yang dilakukan atas catatan-catatan korespondensi antara tim likuidasi Jepang dan para pejabat bumiputera memberikan gambaran tentang hutang-hutang para relasi bisnis DJB yang perlu diselesaikan.

156 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 21 Januari 1949, No. 121/2".

157 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 24 Januari 1949, No. 121/3".

158 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 2 Februari 1949, No. 121/4".

Tanggungan hutang para relasi terkait dengan gabah yang dijadikan agunan untuk mendapatkan kucuran kredit dari DJB Kediri jumlahnya mencapai sekitar *f*160.000. Sehubungan dengan berbagai kesulitan yang muncul dalam pelunasan tanggungan hutang tersebut, Nauta menyampaikan kebutuhan tentang kemungkinan pemerintah untuk turut campur tangan agar beban hutang para relasi bisnis DJB sebelum perang dapat diselesaikan.[159] Catatan tentang tanggungan kredit para relasi yang perlu dibereskan pelunasannya tersaji dalam tabel berikut. Data dalam tabel hanya mengenai relasi DJB yang ada di Keresidenan Kediri saja, tetapi penting untuk dicatat juga bahwa para relasi DJB Kediri tidak hanya pengusaha yang berdomisili di Kediri, tetapi juga berasal dari daerah lain, termasuk sejumlah pengusaha Tionghoa di Kabupaten Mojokerto, Ponorogo, dan Kabupaten Jombang. Sayangnya, tidak ada informasi lebih jauh mengenai sukses tidaknya upaya-upaya yang dilakukan DJB Kediri dalam menagih kembali tanggungan hutang para relasinya.

Tabel 3.5.
Tanggungan Pinjaman Relasi DJB Agentschap Kediri untuk Pemberesan, 8 Februari Tahun 1949

No	Nama	Agunan	Nilai Pinjaman
1	Oliefabriek dan Rijstpellerij "Djie le & Co" (Blitar)	780 kw gabah= *f*3.120 1580 Karung Goni= *f*774	*f*3.894
2	Rijstpellerij "Liem" (Blitar)	1840 kw gabah= *f*8.280	*f*8.280
3	Djie Kie Tie (Nganjuk)	437,6 kw gabah = *f*1.927,45 374 karung goni= *f*149,60	*f*2.077,05
4	Soen Boen Lie (Nganjuk)	851,50 kw gabah= *f*3.150,55 1.050 karung goni= *f*367,50	*f*3.518,05
5	Djhiang Tjioe (Ploso, Kediri)	1127,95 kw gabah= *f*4.173,42 […] karung goni = *f*265	*f*4.438
6	Tjien Tjieng (Gringging, Kediri)	2975 kw gabah= *f*15.202,25 […] karung goni= *f*1.050	*f*16.252,25

Sumber: Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 8 Februari 1949, No. 121/6". Bijlage.

159 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 8 Februari 1949, No. 121/6".

Implikasi dari kembalinya kekuasaan Belanda atas wilayah Kediri dan beroperasinya kembali DJB Kediri tentu saja berdampak pada kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas Bank Negara Indonesia. Hal ini karena pada umumnya kantor-kantor perwakilan Bank Negara Indonesia pada masa revolusi, untuk alasan kemudahan dalam mengawali kegiatan operasionalnya, menggunakan gedung-gedung bekas kantor DJB.[160] Bersamaan dengan dikuasainya kota oleh Belanda dan kembali beroperasinya DJB, keberadaan Bank Negara Indonesia kehilangan fasilitas infrastruktural pendukung untuk menjalankan fungsi perbankan secara normal sebagaimana yang diamanatkan. Bahkan, kesepakatan KMB yang mengakhiri konflik Indonesia-Belanda dengan pengerahan kekuatan militer tersebut juga kurang menguntungkan bagi kedudukan Bank Negara Indonesia yang digadang sebagai bank sirkulasi Indonesia. Hal ini karena yang disetujui sebagai bank sirkulasi di wilayah Indonesia yang telah diakui pemerintah Belanda ternyata bukan BNI, melainkan DJB yang sebenarnya berstatus bank swasta Belanda.[161]

DINAMIKA EKONOMI KEDIRI MASA REVOLUSI

Setelah runtuhnya kekuasaan Jepang di Keresidenan Kediri, terjadi pengambilalihan aset-aset ekonomi yang ditinggalkan Jepang. Pemerintah RI setempat segera menguasai aset-aset yang ditinggalkan Jepang seperti gedung-gedung, bangunan pabrik, dan perkebunan diberi label "Milik RI".[162] Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penjarahan terhadap aset-aset tersebut oleh berbagai kalangan masyarakat. Para pejuang RI di Keresidenan Kediri pada pertengahan tahun 1946 juga berinisiatif mengamankan hasil rampasan barang-barang Jepang berupa senjata, pakaian, sembako, obat-obatan, dan sebagainya dari kebun-kebun di

160 Wasino, dkk., *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional* (Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2014), hlm. 637.

161 Widigdo Sukarman, "Upaya Membentuk Perbankan Nasional: Peran Bank BNI pada tahun 1950an", *Lembaran Sejarah,* Vol. 8, No.2, 2005, hlm. 53.

162 Beberapa bangunan pabrik gula yang ditinggalkan Jepang di Keresidenan Kediri seperti: Pabrik Gula Mritjan, Pabrik Gula Tegowangi (Desa Bendo, Kecamatan Pare), Pabrik Gula Karawasan, Pabrik Gula Pesantren, Pabrik Gula Purwoasri, Pabrik Gula Minggiran, Pabrik Gula Ngadirejo. Diunduh dari amp-tirto.id.cdn.ampproject.org, 1 Mei 2021. Atau lihat *Ekspedisi Kali Serinjing, Telusur Sejarah Terbentuknya Kediri*, dalam radarkediri.jawapos.com, diunduh 1 Mei 2021.

Satak, Sepawon, Badek, Petungombo, dan Jengkol di kaki Gunung Kelud ke gudang-gudang milik Kantor Keresidenan Kediri. Barang-barang diangkut menggunakan truk-truk dengan pengawalan pasukan polisi, kemudian dilanjutkan pengawalannya oleh laskar pelajar. Pengawalan dilakukan untuk menghindarkan aksi-aksi anarkis berupa perampasan dan penjarahan yang dapat menyulut kekacauan dan gangguan ketertiban umum. Orang yang mengatur semuanya ini adalah Singgih Praptodihardjo, Kepala Perekonomian Kantor Keresidenan Kediri.[163]

Terjadinya peralihan penguasaan atas aset-aset ekonomi dan alat produksi berpengaruh terhadap kinerja dan kondisi perekonomian di Keresidenan Kediri. Sektor perkebunan yang pernah menjadi pilar perekonomian Kediri pada masa Hindia Belanda dan terpuruk pada masa pendudukan Jepang secara praktis belum beroperasi pada masa awal kemerdekaan akibat situasi yang penuh ketidakpastian. Informasi detail mengenai kegiatan produksi perkebunan-perkebunan di Kediri setelah proklamasi tidak tersedia secara memadai. Tren untuk Jawa barangkali dapat menjadi indikasi dan membantu untuk membayangkan keadaannya. Produksi komoditas perkebunan di Jawa secara umum mengalami kemerosotan. Perkebunan tebu agaknya tidak beroperasi pada periode 1945-1946 dan area penanaman dalam skala signifikan untuk seluruh Jawa baru terjadi pada tahun 1949. Penurunan produksi secara tajam juga terjadi pada komoditas-komoditas perkebunan penting lain seperti kopi dan karet. Produksi kopi pada tahun 1949 hanya sebesar 11.000 ton, jauh lebih rendah dibanding sekitar 50 ribu ton pada tahun 1930, sedangkan produksi kopi hanya tinggal 7.000 ton dibanding sebelumnya sebesar 35 ribu ton pada tahun yang sama.[164]

Mandeknya industri gula dan kerusakan sektor perkebunan tebu Kediri tampak dari laporan yang diberikan Agen DJB Kediri, H.G Nauta kepada Presiden dan Direktur DJB Batavia. Laporan dibuat pada saat kedatangannya pada hari-hari pertama Belanda masuk kembali di Kediri menyusul Agresi Militer Belanda II atas Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948. Dalam korespondensi tertanggal 20 Januari 1949, Nauta melaporkan bahwa sepuluh pabrik gula milik Handel Vereeniging

163 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 92

164 Wasino, dkk., *op.cit.*, hlm. 566-567.

Amsterdam (HVA) sebagian besar dalam keadaan rusak. Pabrik Gula Soemberdadi, Menang, Garum, Kawarasan, dan Tegowangi disebutkan dalam keadaan hancur total, sedangkan PG Tegowangi dan Koenir juga dipastikan hancur berdasarkan pengamatan dari udara. Hanya Pabrik Gula Ngadiredjo disebutkan masih dalam keadaan utuh, sedangkan PG Minggiran mengalami kerusakan sebagian. PG Kentjong dan PG Blimbing masih tidak diketahui keadaannya, tetapi berdasarkan informasi tertanggal 1 Juli 1947 disebutkan bahwa untuk PG Kentjong mesin molennya secara keseluruhan dalam keadaan hancur. Disebutkan pula bahwa PG Ngadiredjo sebelumnya dikuasai oleh pihak militer dan PG Menang sejak jaman Jepang telah diubah fungsinya menjadi pabrik kaca dan cat.[165]

Tidak hanya pabrik-pabrik gula milik HVA, kerusakan juga dialami pabrik-pabrik gula lainnya yang beroperasi di Keresidenan Kediri. PG Meritjan milik Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij dilaporkan mengalami sedikit kerusakan, hanya gudang dan rumah hunian yang masih dalam keadaan utuh. Akan tetapi, instalasinya sebagian besar sudah disingkirkan karena pabrik ini telah dialihkan menjadi pabrik senjata dan dikuasai oleh militer. Separuh mesin instalasi dalam keadaan terbongkar masih terdapat di emplasemen, sedangkan untuk jembatan di atas Sungai Brantas yang berada di dekatnya, disebutkan dek jembatan dan beberapa tiang penyangganya dalam keadaan rusak. PG Pesantren milik NV Javasche Cultuur Maatschappij dilaporkan mengalami kerusakan cukup serius, tetapi masih mungkin untuk dilakukan perbaikan. Di gudang-gudangnya masih terdapat simpanan gula dalam gundukan maupun terwadahi dalam sejumlah karung. Pabrik ini tidak dikuasai militer karena kurang strategis dari sudut pandang militer. PG Djatie milik NV Cultuur Mij Djati dari pengamatan udara tampak rusak terbakar. Kerusakan juga dialami PG Modjopanggoeng dan PG Kenongo, dua pabrik gula milik FA Tiedeman & Van Kerchem. Demikian pula, PG Poerwoasrie milik NV Nederlandsch Suiker Unie juga dilaporkan dalam kondisi rusak berat meskipun masih mungkin diperbaiki lagi.[166] PG Purwoasri setelah penyerahan Jepang

165 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1 Vertrouwelijk".

166 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1 Vertrouwelijk".

dikuasai oleh Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) di bawah pimpinan Bung Tomo dan menjelang Agresi Militer Belanda II pabrik ini memang sengaja dibumihanguskan agar tidak jatuh ke tangan Belanda.[167]

Sama halnya dengan industri gula, perkebunan tanaman pegunungan (*bergcultures*) juga mengalami kerusakan dan kemunduran produksi. Dalam laporan tertanggal 18 Februari 1949, Agen DJB Kediri H.G. Nauta melaporkan kondisi beberapa perusahaan perkebunan tanaman pegunungan. Untuk perkebunan C.O. Badek-Babadan II milik Pitcairn & Syme disebutkan bahwa tanaman kopi yang semula seluas 220 hektar separuhnya telah rusak, sedangkan 40% dari tanaman karet seluas 780 hektar telah lenyap dan pabrik dalam keadaan hancur. Nasib serupa dialami perusahaan perkebunan C.O. Ngrangkah Pawon milik Tiedeman & Van Kerchem. Sekitar 50% dari tanaman kopinya yang semula mencapai 900 hektar telah rusak, sedangkan sekitar 30% dari tanaman karet yang pada mulanya seluas 500 hektar juga dilaporkan telah hilang. Emplasemennya juga dalam keadaan hancur. Penanaman karet seluas sekitar 100 hektar dari perusahaan perkebunan C.O. Pakelan milik Kooy & Co masih dalam kondisi utuh, tetapi 500 hektar tanaman kopinya secara keseluruhan rusak dan pabrik juga hancur. Pabrik kopi dari perusahaan perkebunan C.O. Satak yang juga dimiliki Kooy & Co juga dalam kondisi hancur dengan kerusakan tanaman karet mencapai 30% dari luas tanaman karet secara keseluruhan yang kurang lebih seluas 1.000 hektar.[168]

Kerusakan yang terjadi pada perkebunan lain juga muncul laporannya, seiring dengan menguatnya kontrol Belanda atas kawasan di luar kota. Dalam laporan Agen DJB Kediri H.G. Nauta tertanggal 4 April 1949 diberikan rincian mengenai keadaan perkebunan tanaman pegunungan milik sejumlah perusahaan. Tanaman karet C.O. Soerowinangoen milik Geo Wehry seluas 713 hektar disebutkan seluruhnya dalam keadaan rusak. Kehilangan tanaman karet secara keseluruhan dialami oleh C.O. Soekaboemi milik Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij dengan luas 285 hektar dan tanaman karet milik C.O. Bogor Prada (Kooy & Co's)

167 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 93.

168 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 18 Januari 1949, No. 121/8 Vertrouwelijk".

seluas 71 hektar. Tanaman karet dengan luas 470 hektar pada C.O. Soemberpetoeng milik HVA, hanya tersisa tanaman muda kurang lebih seluas 70 hektar. Lebih buruk lagi, tanaman karet seluas 765 hektar milik C.O. Redjoagoeng (HVA) seluruhnya mengalami kerusakan.[169]

Sementara itu, terkait perkebunan kopi dilaporkan kerusakan tanaman kopi sebesar 70% dialami oleh C.O. Bogor Prada dari luas tanaman karet sebesar 464 hektar dan sekitar 50% kerusakan dari tanaman kopi seluas 309 hektar dialami perkebunan kopi C.O. Kebon Doeren milik Harmsen Verwey. Tanaman kopi seluas 280 hektar milik C.O. Soekaboemi tersisa hanya 40% dan dari 891 hektar tanaman kopi C.O. Kenteng milik Koloniale Bank, masih tersisa tanaman seluas 700 hektar. Sementara itu, tanaman kopi seluas 174 hektar milik C.O. Poentjoe secara keseluruhan hilang, hal serupa terjadi pada 137 hektar tanaman kopi perkebunan C.O. Soerowinangoen (Geo Wehry). Hanya tanaman kopi seluas 385 hektar milik C.O. Margomoeljo (Insulinde Cultuur Maatschappij) disebutkan masih dalam keadaan utuh, sedangkan tanaman kopi seluas 290 hektar milik C.O. Mangli (Verge Majanglanden) hanya tersisa separuhnya saja.[170] Dalam berita surat kabar yang melansir secara khusus laporan HVA, banyak tanaman kopi milik perkebunan HVA di Kediri juga diberitakan dalam keadaan hancur.[171]

Berbeda dengan sektor perkebunan yang umumnya mengalami kelumpuhan akibat rusaknya infrastruktur produksi, sektor pertanian rakyat khususnya tanaman pangan di wilayah Kediri setelah penyerahan Jepang tampaknya mulai meningkat kembali. Luas panen padi terendah di wilayah ini pada pertengahan dekade 1940-an adalah panen di lahan sawah dan lahan kering tahun 1945 seluas 134.307 hektar dengan total produksi sebesar 2.329.119 kuintal. Seperti terlihat dalam Tabel 3.6 pada tahun 1946 luas panen padi bertambah menjadi 148.349 hektar dengan total produksi sebesar 2.698.214 kuintal. Dari data kedua tahun ini terlihat adanya peningkatan luas panen sekitar 14.000 hektar dan pertumbuhan

169 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 4 April 1949, No. 122/8 Vertrouwelijk".

170 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Vetrouwelijk Brieven 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 4 April 1949, No. 122/8 Vertrouwelijk".

171 *Algemeen Handelsblad*, 17 Oktober 1949.

produksi kurang lebih sekitar 370.000 kuintal.[172] Pada periode yang sama, luas panen ketela bertambah dari 25.167 hektar menjadi 39.122 hektar, dengan peningkatan produksi dari 1.371.607 kuintal menjadi 2.488.159 kuintal.[173] Demikian pula, luas panen kedelai meningkat dari 16.324 hektar pada tahun 1945 menjadi 31.253 hektar pada tahun 1946, dengan peningkatan produksi dari 57.134 kuintal ke 250.024 kuintal.[174] Kedua tanaman palawija memperlihatkan adanya peningkatan volume produksi yang sangat tajam, sebesar kurang lebih 1.000.000 kuintal untuk ketela dan sebesar hampir 193.000 kuintal untuk kedelai. Peningkatan juga berlaku pada tanaman kacang tanah yang luas panennya naik dua kali lipat dan volume panen naik sekitar tiga kali lipat. Hanya tanaman jagung dan umbi mengalami penurunan pada periode ini, tetapi secara umum panen tanaman pangan rakyat meningkat lebih dari 30.000 hektar.

Tabel 3.6.
Luas Panen dan Produksi Tanaman Rakyat di Keresidenan Kediri 1945-1946

Tanaman	1945		1946	
	Luas Panen (hektar)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (hektar)	Produksi (kuintal)
Padi	134.307	2.329.119	148.349	2.698.214
Jagung	71.000	461.500	56.374	293.145
Ketela	25.167	1.371.607	39.122	2.488.159
Kedelai	16.324	57.134	31.253	250.024
Kacang	4.151	14.528	8.330	48.311
Umbi	15.511	761.590	13.081	656.666
Total Luas	266.460		296.509	

Sumber: *Geoogste Uitgestrektheden en Productie van voornaamste Voedingsgewassen op Java en Madura 1937-1946* (Jakarta: Centraal Kantoor voor Statistiek,1947).

Peningkatan tanaman pangan sejak proklamasi tampaknya berkaitan dengan beberapa alasan.[175] Dalam situasi pasar yang tidak menguntungkan untuk produk-produk komersial tersebut di tengah gejolak revolusi,

172 *Geoogste Uitgestrektheden en Productie van voornaamste Voedingsgewassen op Java en Madura 1937-1946* (Jakarta: Centraal Kantoor voor Statistiek,1947), Tabel 3 dan Tabel 11.

173 *Ibidi*, Tabel 5 dan Tabel 13.

174 *Ibid*, Tabel 8 dan Tabel 16.

175 Clifford Geertz, *op.cit.*, hlm. 54.

tanaman pangan lebih memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi rumah tangga petani di tengah situasi yang belum pasti. Setidaknya dengan membudidayakan tanaman pangan, kaum petani mendapatkan jaminan akan tetap tercukupi kebutuhan pangan mereka. Peningkatan tanaman pangan rakyat juga tidak terpisahkan dari faktor lain, yakni pemanfaatan tanah-tanah bongkaran bekas tanaman perkebunan untuk budidaya tanaman pangan. Setelah pengambilalihan kebun-kebun dan pabrik-pabrik dari tangan Jepang, sering terjadi bahwa para pengelola yang memegang kuasa atas kebun-kebun tersebut menyerahkan lahan-lahan perkebunan kepada penduduk untuk digunakan sebagai lokasi produksi tanaman pangan dengan sistem bagi hasil.[176] Langkah ini agaknya diambil dengan berbagai alasan seperti kurang pengalaman dalam mengoperasikan jalannya usaha perkebunan, keterbatasan infrastruktur produksi yang masih bisa beroperasi akibat pembongkaran yang terjadi sebelumnya, atau pesimisme akan keterserapan produk-produk perkebunan oleh pasar yang penuh ketidakpastian di tengah kekacauan perang revolusi.

Orientasi pada produksi bahan pangan selama masa revolusi telah memungkinkan dukungan logistik yang lebih kuat bagi kepentingan perjuangan di pihak republik. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan darurat, penyelenggaraan pemerintahan sipil Keresidenan Kediri sering berpindah-pindah tempat. Lokasi yang dipilih terutama dikonsentrasikan di desa-desa daerah pegunungan di Keresidenan Kediri terutama sejak Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 hingga menjelang pengakuan kedaulatan pada Desember 1949. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Keresidenan Kediri selama masa darurat pada masa revolusi fisik memerlukan dana yang besar untuk membiayai perang gerilya semesta. Residen Kediri Suwondo Ranuwidjojo berusaha mengumpulkan dana yang tidak memberatkan rakyat dengan menetapkan pembayaran pajak berupa pajak *in natura* sebesar seperlima dari kekayaan atau seperlima dari hasil panen tanaman yang diperoleh penduduk.[177] Pelaksanaan atas penarikan pajak yang dikenakan terhadap semua penduduk untuk kepentingan mendanai revolusi ini diserahkan

176 *Republik Indonesia: Propinsi Djawa Timur* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 328.

177 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 99.

kepada para camat dan para kepala desa di seluruh Keresidenan Kediri.[178]

Produksi pertanian rakyat semakin berkembang setelah situasi berangsur-angsur normal dengan berakhirnya konflik bersenjata menyusul terjadinya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda. Pertanian padi di Keresidenan Kediri pada awal tahun 1950-an telah didukung dengan lima buah Balai Bibit Padi dengan persediaan bibit padi bengawan 343,22 ton. Terdapat pula sebanyak 130 kring tani dengan anggota berjumlah 6.344 orang, simpanan gabah sebesar 3.465 kuintal dan simpanan uang sebesar Rp40.063,58.[179] Pada tahun 1952, padi yang dibeli pemerintah dari Keresidenan Kediri sebanyak 16.846 ton, sebagian besar dalam bentuk gabah (16.270 ton) dan selebihnya berupa padi, ketan, dan sereh. [180]

Sementara itu, sektor perkebunan besar setelah terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia juga diwarnai dengan proses kembalinya pabrik-pabrik dan kebun-kebun kepada pemilik yang lama. Proses ini memang dijamin dalam klausul *Financial Economic Agreement* (Finec) yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar yang telah menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda. Artikel 1 Finec menggariskan pemulihan kembali secara penuh hak-hak legal yang dimiliki perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dan artikel 3 berkaitan dengan pemberian jaminan perlindungan dari nasionalisasi dan kompensasi secara wajar apabila karena alasan-alasan tertentu nasionalisasi diterapkan. Secara esensial, Finec merupakan kerangka yang menjamin secara maksimal keberlanjutan operasi bisnis Belanda di wilayah Indonesia yang baru saja merdeka dari penjajahan Belanda.[181]

Dengan jaminan klausul tersebut, penguasaan kembali perkebunan dan pabrik-pabrik gula di daerah dataran rendah Kediri oleh para pemilik lama yang secara praktis sudah berlangsung sejak Agresi Militer Belanda II disusul dengan proses pengembalian tanah-tanah perkebunan dataran

178 Wawancara dengan Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

179 *Republik Indonesia, op.cit.,* hlm. 274-275.

180 *Ibid*, hlm. 456.

181 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), hlm. 282.

tinggi/pegunungan (*bergcultures)*. Sekitar 1952, disebutkan bahwa tanah perkebunan besar di Keresidenan Kediri yang telah dikembalikan kepada para pemiliknya yang lama sebanyak 16 buah, dari total seluruh Jawa Timur yang berjumlah 247 buah.[182] Sebagian perkebunan di Kediri yang masih dalam proses pengembalian dan belum keluar izinnya meliputi perkebunan Jabung, Kawarasan, Purwodadi, Kali Tello, Sumbernongko, Karangnongko, Wonodjojo, Kali Gambang, dan perkebunan Gunung Njamil. Sementara itu, perkebunan yang belum diminta kembali oleh pemilik lama antara lain meliputi perkebunan Balonggebang, Ngadipuro, Djatitumpakmergo, Kaligentong, Karangredjo, Puntju, Soekaboemi, Sumberpandan, dan perkebunan Surowinangun, serta empat pabrik gula yakni PG Sumberdadi, PG Menang, PG Bogokidul, dan PG Kawarasan. Beberapa persil kecil di Kediri diajukan pembatalan hak erfpachtnya oleh Gubernur Jawa Timur untuk dikuasai negara karena habis masa berlakunya, yakni 3 persil perkebunan Papoh.[183]

Sebagian perkebunan yang telah kembali kepada pemiliknya sudah mulai beroperasi dan sebagian lainnya masih dalam proses perbaikan. Pada tahun 1951, sejumlah pabrik gula yang telah beroperasi kembali antara lain PG Ngadiredjo, PG Pesantren, PG Lestari, dan PG Modjopanggung. Pabrik gula yang sedang dalam proses perbaikan meliputi PG Meritjan, PG Kunir, PG Purwoasri, sedangkan pabrik-pabrik gula lainnya seperti PG Djati, PG Kentjong, PG Minggiran, PG Tegowangi, PG Menang, PG Kawarasan, PG Sumberdadi, dan PG Garum masih dalam keadaan rusak.[184] Tidak ada informasi mengenai kegiatan produksi perkebunan pegunungan di keresidenan ini. Hanya secara umum disebutkan bahwa di Jawa Timur perkebunan-perkebunan yang telah kembali kepada para pemiliknya sudah mulai dibangun kembali dan perlu perhatian khusus untuk mengatasi pencurian-pencurian kopi dan karet secara besar-besaran yang masih sering terjadi.[185] Produksi karet untuk Jawa Timur pada tahun 1951 disebutkan sebesar 20.324 ton dan untuk kopi sebesar 8.894 ton, sedangkan untuk tahun 1952 volume produksi diperkirakan meningkat

182 *Republik Indonesia op.cit.,* hlm.. 425.

183 *Ibid*, hlm. 430-431.

184 *Republik Indonesia: Propinsi Djawa Timur* (Jakarata: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 334.

185 *Ibid*, hlm. 339.

ke 21.305 ton untuk karet dan 9.956 ton untuk kopi.[186] Angka-angka ini menandakan mulai menggeliatnya kembali sektor perkebunan gunung, meskipun tentu saja angka-angka ini masih jauh dibanding tingkat produksi pada akhir masa Hindia Belanda dimana dari perkebunan-perkebunan di Keresidenan Kediri saja pada tahun 1942 dapat dihasilkan produk karet sebesar 3.831 ton dan produk kopi sebesar 5.436 ton. [187]

Tabel 3.7.
Tanaman Ketela Perkebunan Djengkol Kediri Tahun 1951/1952 (dalam hektar)

Persil	Area Tanam Asal	Area yang dicuri	Sisa
Kalasan	21	10	11
Kentoeng	119	84	35
Simbar	25	4	19
Bakoeng	14	1	13
Onggobojo	33	15	18
Total	210	114	96

Sumber: Arsip Nasional RI, Koleksi Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No. Inventaris 1067: "De Administratur Djengkol kepada Kepala Bg Staf "K" d/p Sekretariat Perdana Menteri Tanggal 4 Januari 1952".

Tanaman-tanaman perkebunan lainnya juga tampak mulai berproduksi, tetapi umumnya juga dihadapkan pada persoalan yang tidak berbeda. Pencurian-pencurian juga banyak terjadi. Sebuah laporan yang dibuat oleh Administrator Perusahaan Perkebunan Djengkol memberikan gambaran tentang maraknya pencurian ketela pada tahun 1951. Lebih dari separuh tanaman ketela telah dicuri hingga Desember 1951 dan pencurian juga dilaporkan terus meningkat, bukannya berkurang sehingga perlu perhatian khusus.[188]

186 *Ibid*, hlm. 342.

187 *Ibid*, 339.

188 Arsip Nasional RI, Koleksi Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No. Inventaris 1067: "De Administratur Djengkol kepada Kepala Bg Staf "K" d/p Sekretariat Perdana Menteri Tanggal 4 Januari 1952".

Gambar 3.3. Pasar di Kediri sekitar Tahun 1949
Sumber: Koleksi KITLV

Sementara itu, sektor perdagangan menjadi lebih leluasa dibanding masa pendudukan Jepang yang banyak diwarnai pembatasan dan pengawasan secara ketat. Barang-barang dagangan seperti bahan pakaian dan pangan tersedia dalam jumlah agak lebih banyak di pasar. Tidak adanya lagi kekhawatiran disita Jepang membuat barang-barang dagangan yang pada masa sebelumnya mengalami kelangkaan dan sulit didapat khususnya bahan pakaian mulai keluar dari tempat-tempat penimbunan. Untuk sesaat kelangkaan barang di pasar mulai berkurang, apalagi berlangsung pula pembagian-pembagian barang timbunan oleh pemerintah untuk mengatasi kesukaran-kesukaran pemenuhan kebutuhan hidup yang dihadapi penduduk.[189] Masyarakat Keresidenan Kediri, khususnya yang tinggal di kawasan perkotaan, pada masa revolusi ini oleh Geertz digambarkan berubah menjadi "Pasar besar tegangan tinggi".[190] Keterbatasan penghasilan yang didapat dari bekerja sebagai pegawai, karyawan, dan buruh mendorong banyak orang menempuh

189 *Republik Indonesia, op.cit.,* hlm. 443.
190 Clifford Geertz, *op.cit.,* hlm. 88.

berbagai upaya untuk menambah penghasilan sekecil apapun dengan terlibat dalam perdagangan spekulatif barang-barang dagangan apapun yang dicari pembeli. Dalam istilah yang populer pada masa itu, cara-cara berdagang yang demikian disebut dengan nama "Mencatut".[191] Berdagang dengan cara mencatut bertambah marak ketika keberadaan barang-barang di pasaran menjadi langka.

Kelangkaan barang di Kediri begitu terasa terutama ketika terjadi blokade-blokade lalu lintas keluar masuk barang seiring Agresi Militer Belanda II. Kekuatan militer Belanda dan Republik berhadapan langsung di wilayah Kediri dalam kontak-kontak bersenjata dan kedua belah pihak juga berusaha mengontrol arus keluar masuk barang sebagai bagian dari strategi perang. Semua produk dari pedesaan seperti sayur-mayur, beras, jagung, kedelai, buah-buahan, dan berbagai produk lainnya memasuki pasar-pasar perkotaan diperiksa dan diawasi secara ketat oleh pasukan Belanda. Dengan cara ini Belanda berharap perekonomian desa melemah karena barang dagangan tidak dapat dijual ke kota. Sementara itu, taktik yang diterapkan pasukan Belanda terhadap orang-orang Tionghoa di kota adalah dengan cara memobilisasi mereka untuk mendukung Belanda. Sementara itu, barang-barang dagang dari kota seperti garam, minyak, gula, bahan pakaian, sikat dan pasta gigi, sabun dan sebagainya yang memasuki ke pasar-pasar desa juga diperiksa para gerilyawan. Pemerintahan militer di Keresidenan Kediri mengusahakan agar barang-barang yang masuk ke kota pendudukan Belanda harus bermanfaat bagi kebutuhan perjuangan.[192] Lalu lintas perdagangan antar desa dan kota memang masih berlangsung, tetapi dalam skala terbatas.[193] Lalu lintas perdagangan mulai berjalan agak lancar kembali setelah blokade dilonggarkan menyusul perintah gencatan senjata antara pihak Belanda dengan pihak RI dalam Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949.[194]

---

191 *Republik Indonesia, op.cit.,* hlm. 443.

192 Irna H.N. Hadi Soewito, *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan* (Jakarta, Grasindo,1994), hlm. 533.

193 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 103.

194 Isi Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949 sebagai berikut: (1) TRI harus menghentikan aktivitas gerilya; (2) Pemerintah RI turut serta dalam KMB; (3) Kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta; (4) Tentara bersenjata Belanda harus menghentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik; (5) Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat; (6) Dengan menyetujui adanya RI bagian dari NIS; (6) Belanda memberikan hak, kekuasaan dan kewajiban kepada pihak Indonesia. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.,* hlm. 167.

Selain terhambatnya lalu lintas barang, transaksi perdagangan juga mengalami kekacauan akibat pertarungan dua mata uang yang berbeda, Uang ORI dan Uang NICA. Pasukan Belanda menginstruksikan kepada masyarakat di daerah pendudukan (di perkotaan) penggunaan Uang NICA sebagai alat tukar jual beli barang, sehingga orang-orang kota merasa enggan menerima ORI sebagai alat tukar jual beli barang. Bahkan untuk melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Republik, Belanda juga melancarkan taktik perang dengan mengedarkan ORI palsu di kalangan masyarakat.[195] Sementara itu, di pedesaan pemerintah Keresidenan Kediri menginstruksikan penggunaan ORI sebagai alat tukar di dalam jual beli barang, dan pelaksanaan instruksi tersebut senantiasa dikawal oleh para gerilyawan RI, maka dari itu masyarakat di pedesaan merasa enggan menggunakan uang NICA dalam berjual beli barang.[196]

Penggunaan mata uang yang berbeda tidak jarang berujung pada terjadinya insiden-insiden dalam masyarakat. Salah satu insiden terjadi di Stasiun Kereta Api Kediri. Seorang calon penumpang yang akan naik kereta api disebutkan hendak membeli karcis menggunakan uang ORI. Penjual karcis di loket ternyata menolak uang ORI untuk pembayaran harga karcis, dan calon penumpang kereta api diminta membayar menggunakan uang NICA. Pembeli karcis tersebut menolak membayar dengan menggunakan uang NICA dan bersikukuh membayar menggunakan uang ORI miliknya. Keduanya bersitegang dan dengan insiden-insiden yang terjadi, Komandan Teritorium Militer Keresidenan Kediri, Letkol. Surachmad turun tangan dengan mengeluarkan instruksi yang mewajibkan masyarakat di seluruh wilayah Keresidenan Kediri untuk menggunakan ORI sebagai alat pembayaran sah di dalam jual beli barang dan jasa.[197]

Untuk mengatasi kekurangan uang ORI, pemerintah militer Keresidenan Kediri mengambil kebijakan penerbitan kupon yang berlaku sebagai alat pembayaran sah.[198] Hampir semua kupon yang beredar dicetak di atas kertas sampul sebagai promes hutang negara yang akan

195 Irna H.N. Hadi Soewito, *op.cit.,* hlm. 533.

196 Wawancara dengan Theresia Titah, pedagang (82 tahun), Kediri 23 Maret 2021.

197 Sudarno dkk., *op.cit.,* hlm. 104.

198 *Ibid*, hlm. 101.

dibayarkan setelah para gerilyawan berhasil mengusir pasukan Belanda dari Indonesia. Sementara itu, Residen Kediri, Suwondo Ranuwidjojo selaku kepala pemerintahan sipil di Kediri mengeluarkan kebijakan penerbitan uang dengan nominal Rp. 2,5 (dua setengah rupiah) yang dicetak di atas kertas sampul dengan jaminan uang ORI milik Kotamadya/ Kotapraja di seluruh wilayah Keresidenan Kediri yang tersimpan di bank di dalam kota-kota yang telah diduduki Belanda.[199]

Penerbitan uang oleh pemerintah daerah Kediri merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi sulitnya distribusi ORI di wilayah Republik Indonesia. Kewenangan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 1947. Peraturan ini mengatur pemberian izin kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, keresidenan dan kabupaten untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (Orida). Selain diterapkan oleh pemerintah Keresidenan Kediri, Orida juga diterbitkan di berbagai tempat lain. Di Banten, misalnya, diterbitkan Oeang Kertas Darurat Untuk Daerah Banten (ORIDAB), sedangkan di Yogyakarta digunakan Surat Tanda Penerimaan Uang. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS), sedangkan di Keresidenan Lampung dikeluarkan Tanda Pembayaran Yang Sah untuk menggantikan ORI yang sulit distribusinya di wilayah ini.[200]

Pemerintah militer Keresidenan Kediri mengupayakan agar masyarakat senantiasa percaya pada uang ORI. Para gerilyawan RI berperan besar dalam mengawal uang ORI tetap beredar dalam masyarakat meskipun dihadapkan pada ancaman hukuman dari pihak Belanda terhadap siapa pun yang menggunakan alat tukar uang ORI. Ancaman Belanda ditanggapi para gerilyawan dengan ancaman balik pula bahwa mereka yang tidak mau menerima uang ORI, nanti setelah Indonesia berhasil mengusir Belanda, akan diperlakukan sebagai kaki tangan Belanda. Bahkan di daerah pendudukan Belanda di Kotamadya Kediri, pemerintah mengusahakan penggunaan uang ORI yang kadang-

199 *Ibid*, hlm. 102.

200 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tri Suryanti dan Allan Akbar, *Berjuang Dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017), hlm. 235.

kadang terpaksa disertai tindakan-tindakan militer, agar para pedagang di kota termasuk para pedagang Tionghoa yang banyak menempati permukiman di timur Sungai Brantas mau menerima ORI.[201]

Di penghujung tahun 1949 kota Kediri tidak aman karena dibombardir oleh pasukan Belanda baik dari darat maupun dari udara. Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Kediri segera mengambil langkah pengamanan ORI ke luar kota. Uang dimasukkan ke dalam beberapa karung dan selanjutnya diangkut menggunakan cikar menuju ke arah barat Sungai Brantas untuk diserahkan kepada Residen Kediri, Suwondo Ranuwidjojo di tempat pengungsiannya di Desa Tawingan. Berkenaan dengan itu, Residen Kediri, Suwondo Ranuwidjojo menceritakan pengalamannya ketika menerima uang berkarung-karung dari Kepala BNI Cabang Kediri untuk menyimpannya agar tidak dirampas pasukan Belanda seperti tergambar dalam kutipan berikut ini.

> *"Pada saat meninggalkan kota, pimpinan Bank Indonesia Cabang Kediri mengambil langkah pengamanan uang pemerintah dengan membawanya ke luar kota. Uang dimasukkan ke dalam beberapa karung dan dibawa keluar diangkut dengan cikar (pedati) menuju barat Sungai Brantas. Sampai di Desa Tawingan, tempat Residen Kediri berkedudukan, cikar dihentikan oleh Staf Residen dan uang diminta untuk diserahkan kepada Residen. Dengan uang ORI yang dibawa dari kota inilah Pemerintah Keresidenan membiayai pemerintahannya, mampu memberi makan dan membiayai operasional bagi pegawainya, dan mampu memberi makan keluarganya.... Agar tidak dirampas Belanda, uang bank ini saya simpan di dalam gentong-gentong (tempayan), tempat air yang terbuat dari tanah dan ditanam dalam tanah. Karena gentong/tempayan tidak kedap air, uang akhirnya ada yang rusak dan sama sekali tidak dapat digunakan. Berapa ratus ribu atau berapa juta uang yang disimpan di dalam ini saya tidak pernah tahu jumlahnya. Yang mengelola uang tersebut tiga orang yaitu saya (Residen Kediri), Husni (Kepala Bagian Keuangan), dan Muntoro Atmosentono (Sekretaris Residen)."*[202]

Di tempat pengungsiannya, Residen Suwondo Ranuwidjojo, bersama para stafnya seperti Kepala Bagian Keuangan Keresidenan Kediri,

201 Wawancara dengan Sutaji, Eks TRIP, Pensiunan Guru (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

202 Sudarno dkk., *op.cit.*, hlm. 102-103.

Husni, dan Sekretaris Residen Kediri, Muntoro Atmosentono mengelola uang tersebut untuk biaya operasional para pegawainya maupun untuk membiayai para gerilyawan. Pada saat terjadi gencatan senjata selama Agresi Militer Belanda II, terjadi pertemuan antara Gubernur Recomba[203] Jawa Timur, Van Der Plas dengan Residen Kediri, Suwondo Ranuwidjojo. Dalam pertemuan Suwondo menyinggung kebutuhan uang untuk menata pemerintahan kembali khususnya untuk kantor-kantor inspeksi. Gubernur Recomba Van Der Plas kemudian menyuntikkan dana sebesar 500.000 uang NICA. Van Der Plas menanyakan kepada Residen Suwondo adakah bukti-bukti menyangkut keberadaan pemerintahan RI selama perang kemerdekaan. Residen Suwondo menjawabnya dengan mengambil buku catatan yang memuat daftar nama, tempat tinggal, dan jumlah setoran hasil bumi yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak *in-natura*. Van Der Plas merespons tanggapan Suwondo sambil menggeleng-gelengkan kepala.[204]

Dengan terjadinya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda berakhir pula kekuasaan Belanda di Kediri dan berakhir pula periode revolusi kemerdekaan di Indonesia. Memasuki tahun 1950-an, masyarakat Kediri mengawali suasana baru sebagai masyarakat yang hidup dalam kemerdekaan, paling tidak dalam artian politik. Sisa-sisa antusiasme perjuangan bersenjata masih tersisa dan tidak lekas sirna, tetapi tatanan politik baru menghendaki perhatian segera diarahkan pada realitas baru untuk menata kembali kehidupan secara normal dan melupakan kekacauan perang. Proses penataan kembali kehidupan dalam suasana yang baru dengan pengalaman mengelola pemerintahan yang masih sangat terbatas, ditambah dengan warisan kehancuran infrastruktur dan ekonomi yang porak-poranda akibat perang, serta kembalinya kekuatan ekonomi lama bukanlah perkara yang sederhana dan mudah, melainkan luar biasa berat, kompleks dan penuh tantangan. Persoalan ini lebih jauh akan menjadi bagian dalam pembahasan dalam bab selanjutnya.

---

203 Recomba kepanjangan dari *Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden*. Recomba Jawa Timur sebuah pemerintahan darurat versi Belanda yang dibentuk Gubernur Jenderal H.J. van Mook dan merupakan *counterpart* dari pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa itu pejabat-pejabat pemerintahan selalu ganda, di satu sisi ada camat, lurah, republik, di sisi lain ada lurah, dan camat Recomba. Hal ini juga terjadi di wilayah Keresidenan Kediri.

204 Sudarno dkk., *op.cit.,* hlm. 103.

BAB 4

Institusionalisasi Bank Indonesia dan Rekonstruksi Ekonomi

Masa transisi tahun 1940-an tidak hanya menghadirkan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat yang diakui secara internasional, melainkan juga mewarisinya dengan puing-puing kehancuran. Keadaan ekonomi yang porak-poranda menghadapkan Pemerintah Indonesia pada tantangan yang luar biasa besar dalam proses rekonstruksi ekonomi sesudah perang dan pembebasan perekonomian nasional dari dominasi asing yang diaspirasikan secara luas.[1] Selain dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber dana, Pemerintah Indonesia masih harus menyiapkan berbagai institusi yang vital bagi penegakan kedaulatan negara, termasuk dalam sektor moneter dan ekonomi. Kesukaran menjadi berlipat ganda dengan masih berlanjutnya dominasi kekuatan asing terutama Belanda dalam perekonomian Indonesia. Pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda mengharuskan Indonesia menjamin aktivitas bisnis Belanda tetap berjalan seperti biasa di wilayah Indonesia.[2] Pergulatan antara kesinambungan dan keinginan akan adanya perubahan inilah yang membuat tahun 1950-an dan 1960-

1 Thee Kian Wie, "Kebijakan Ekonomi di Indonesia Selama Periode 1950-1965, khususnya terhadap Penanaman Modal Asing", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terj. Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 376.

2 Howard Dick, V.J.H. Houben, J. Th. Lindblad, dan Thee Kian Wie, *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-200* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 171.

an dalam perjalanan perekonomian Indonesia digambarkan Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks sebagai "dekade-dekade transisi".[3]

Bab ini mengkaji institusionalisasi Bank Indonesia yang berlangsung melalui proses nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) yang berperan sebagai bank sentral di wilayah Hindia Belanda. Lingkup temporal pembahasan bab ini adalah periode 1953-1968. Nasionalisasi atas DJB pada tahun 1953 tidak terlepas, pertama-tama, dari kedudukannya sebagai bank sirkulasi yang mengatur sistem moneter nasional Indonesia padahal berstatus sebagai badan usaha asing dan swasta.[4] Kelahiran Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dengan berembrio DJB merupakan hasil dari kontestasi, kalkulasi dan negosiasi beragam gagasan, dan pertimbangan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, serta melibatkan pihak asing, Belanda, yang menurut kesepakatan harus dilindungi eksistensi dan kepentingannya. Disamping membahas institusionalisasi Bank Indonesia, bab ini juga akan membahas peran yang dimainkan Bank Indonesia melalui agensinya di Kediri dalam proses rekonstruksi perekonomian wilayah Kediri pascaperang (revolusi) dan implementasi ekonomi terpimpin yang digagas Presiden Sukarno hingga tahun-tahun awal transisi pada masa Orde Baru. Dalam konteks perjalanan sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral, akhir tahun 1960-an ditandai dengan tonggak penting dalam perubahan kedudukannya melalui pemberlakuan Undang-undang Perbankan 1968, yang menghapus fungsi Bank Indonesia sebagai penyedia kredit komersial.

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK DAN TERBENTUKNYA BANK INDONESIA KEDIRI

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK

Nasionalisasi DJB merupakan babak lanjutan dari perjuangan yang belum terselesaikan dengan hasil yang memuaskan bagi pihak

3 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), hlm. 273.

4 Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 25.

Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Meskipun kedaulatan politik Indonesia mendapat pengakuan dari Kerajaan Belanda, pihak Indonesia harus membayar dengan harga mahal, antara lain dengan mengakui DJB sebagai bank sirkulasi di wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). Hasil kesepakatan KMB yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 secara jelas memuat pasal-pasal khusus berkenaan dengan masalah moneter dan perbankan, yang tercantum pada Pasal 14 yang mengatur tentang keuangan dan Pasal 19 yang mengatur urusan perbankan. Pada Pasal 19 ditegaskan bahwa DJB akan menjadi bank sirkulasi RIS. Dalam pasal ini juga digariskan bahwa selama pihak Indonesia masih berutang kepada Kerajaan Belanda, pengambilan keputusan terkait persoalan moneter dan perbankan oleh pemerintah RIS harus dilakukan dengan bermusyawarah lebih dahulu dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Ketentuan ini berlaku terutama ketika berhubungan dengan persoalan, (1) jika pemerintah RIS akan mengubah undang-undang mata uang maupun undang-undang De Javasche Bank (*De Javasche Bankwet*) yang diberlakukan sejak disepakatinya isi perjanjian KMB; (2) jika pemerintah RIS akan membuat undang-undang mata uang dan undang-undang bank sirkulasi yang baru.[5]

Penetapan DJB sebagai bank sirkulasi di wilayah Indonesia yang berstatus serikat sesuai hasil kesepakatan KMB memunculkan ketidakpuasan delegasi Indonesia yang menginginkan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Seperti dijelaskan pada bab terdahulu, pendirian BNI merepresentasikan perjuangan dan harapan besar akan keberadaan bank milik Bangsa Indonesia sebagai pilar dalam menegakkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa secara penuh di bidang ekonomi dan moneter. Posisi yang sulit dan kurang menguntungkan karena banyaknya tekanan dalam proses perundingan memaksa delegasi Republik Indonesia (RI) harus berpuas diri dengan hasil yang dicapai dalam bentuk pengakuan (penyerahan) kedaulatan politik, tetapi dengan menanggung biaya besar, termasuk salah satunya berupa keharusan Indonesia untuk menerima DJB sebagai bank sirkulasi yang berlaku di wilayah RIS. Keberadaan bank sentral dan sirkulasi yang

5 Darsono dkk., *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 212.

berstatus bank swasta dan milik asing yang hadir melalui keberadaan DJB di wilayah Indonesia dipandang banyak pihak bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Sejumlah kalangan masih tidak bisa menerima bahwa BNI yang lahir dari kancah dan sebagai alat perjuangan harus dikorbankan karena alasan praktis, yakni bahwa DJB sudah mempunyai aparat personalia dan jaringan kerja yang lengkap dan luas sehingga dapat diteruskan sebagai bank sirkulasi.[6]

Hal tersebut mendorong adanya upaya-upaya untuk melanjutkan perjuangan merealisasikan bank milik Indonesia sendiri sebagai bank sirkulasi dan bank sentral untuk Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan penuh dalam bidang moneter dan ekonomi. Perjuangan tersebut dipandang perlu untuk dilanjutkan meskipun sejak awal 1950 sudah terdapat sejumlah orang Indonesia yang ditunjuk pemerintah untuk menempati pos-pos tertentu di DJB, misalnya Mr. R.B. Gandasoebrata sebagai pejabat urusan devisa, Mr. Loekman Hakim sebagai anggota direksi komisaris pemerintah dalam DJB, dan Ir. R.M.T. Mangunkusumo sebagai anggota direksi. Bahkan, sejak 15 Agustus 1950, Mr. Loekman Hakim diangkat dalam jabatan Wakil Presiden DJB. Meskipun dalam jajaran kepegawaian DJB sudah ada orang-orang Indonesia di dalamnya, bank ini masih saja milik Belanda, bukan milik Indonesia. Berkenaan dengan hal ini Sutter mengungkapkan:

> *". . . De Javasche Bank, yang selama ini telah bertindak sebagai bank sirkuasi dan juga lembaga perbankan komersial yang utama dalam masa Belanda, tetap melakukan fungsinya dalam Negara federal yang baru. Meskipun terdapat orang-orang Indonesia dalam dewan direkturnya, serta sejumlah besar orang-orang Indonesia dalam jajaran pimpinan cabang-cabang utamanya di Indonesia Timur, De Javasche Bank pada dasarnya masih dimiliki oleh Belanda dan didukung oleh staf perusahaan yang terdiri dari orang-orang Belanda."*[7]

Sebagai bank milik asing, Belanda, keberadaan DJB sebagai bank sirkulasi dipandang sejumlah kalangan hanya melanggengkan dominasi

6 *Ibid.*

7 Dikutip dalam Darsono dkk, *Perjuangan,* hlm. 226.

Belanda. Pandangan demikian menemukan pembuktian dalam praktik-praktik DJB dimana kebebasan bertindak bagi Pemerintah Indonesia diamputasi. Bukan hanya dalam soal pengangkatan Presiden dan Direktur DJB pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah Belanda, melainkan juga dalam soal-soal lain, seperti perubahan nilai tukar mata uang antara rupiah dengan gulden Belanda, penentuan langkah-langkah kebijakan devisa, dan pemberian kredit DJB selaku bank sirkulasi kepada pemerintah Indonesia konsultasi harus melalui konsultasi dengan pemerintah Belanda.[8] Dengan berlanjutnya dominasi Belanda melalui DJB, maka kesepakatan menjadikan DJB sebagai bank sirkulasi untuk Indonesia tidak dapat diterima sebagai sebuah bentuk penyelesaian final. Apalagi keputusan KMB memang dicapai melalui proses yang alot karena sebagian delegasi Indonesia membawa aspirasi yang menginginkan Bank Negara Indonesia, yang merupakan bank perjuangan dan milik sendiri, sebagai bank sirkulasi dan bank sentral untuk Indonesia. Salah satu tokoh dan pelaku sejarah dalam perundingan KMB yang kuat mengusung aspirasi ini, Sumitro Djojohadikusumo, secara tegas mengungkapkan pandangannya:

> *"Mengenai peran Bank Sentral, saya menginginkan agar BNI (Bank Negara Indonesia) menjadi Bank Sentral, itu adalah bank kita sendiri. Seperti Simatupang menghendaki agar Tentara Republik menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), jadi bukan KNIL (Royal Netherlands Indies Army), begitulah saya menginginkan BNI menjadi Bank Sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Betapapun primitifnya TNI, ia adalah tentara kita! Sama juga dengan BNI. Saya merasa, itu adalah bank kita."*[9]

Kemenangan separuh jalan dalam KMB yang menyisakan kekecewaan atas hasil yang tidak maksimal dan penerimaan hasil KMB sebagai "penundaan sementara" atas aspirasi memiliki bank sirkulasi dorongan untuk menuntaskan sendiri menjadi perjuangan melalui jalan lain. Kehidupan perekonomian di dalam kemerdekaan yang dirasakan masih sangat mengecewakan menjadi pendorong penting untuk

8 Soedradjad Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1949* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 27.

9 Thee Kian Wie (ed), *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan Freedom Institute, 2005), hlm. 16.

melanjutkan perjuangan dengan jalan lain. Perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar Belanda, yang biasa dikenal dengan sebutan "The Big Five", yakni Internationale Crediet en Handelsvereniging Rotterdam (Internatio), Jacobson van den Berg, Borneo Sumatera Handel Maatschappij (Borsumij), Lindeteves Stockvis dan Geo Wehry yang menguasai ekspor dan impor. Dunia pelayaran masih didominasi Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) dan Rotterdamsche lloyd. Sektor produksi masih dikuasai perusahaan Belanda misalnya Handels Vereeniging Amsterdam, Deli Maatschappij, Rubber Cultuur Maatschappij, dan Banka en Billiton Tin Maatschappij. Tidak berbeda pula, sektor perbankan didominasi bank-bank swasta Belanda seperti Bank Escompto, NIHB, dan Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) yang mempersulit operasi bank-bank nasional seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Industri Negara (BIN).[10]

Selain masih dominannya bank-bank swasta Belanda di Indonesia, kekecewaan juga muncul dari pendiktean yang dilakukan pihak Belanda melalui bank sentralnya. Dalam sebuah konferensi Menteri RIS yang diselenggarakan pada bulan Maret 1950 di Jakarta ditetapkan bahwa bank sentral Belanda, De Nederlandsche Bank, berencana untuk membuka rekening "A besar" untuk DJB sebagai tempat memperhitungkan segala urusan yang berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan antara Indonesia dan Belanda. Sementara itu, bank-bank devisa Indonesia bisa membuka rekening "A kecil" pada bank-bank Belanda, yang saldonya akan diperhitungkan dalam rekening "A besar". Praktik-praktik demikian ini dipandang merupakan bagian dari strategi Belanda untuk melindungi kepentingannya dan membatasi ruang gerak Pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan-tindakan penting di bidang ekonomi dan keuangan.[11]

Dorongan untuk menempuh jalan lain guna menggapai kedaulatan secara penuh dan utuh bertambah kuat ketika Pemerintah Belanda dengan jelas memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif terkait penyelesaian "masalah Irian Barat", yakni pengembalian wilayah ini sebagai bagian sah dari teritori Negara Indonesia. Menurut hasil kesepakatan perundingan

10 Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia 1945 - 1958 Jilid 1* (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 134-135.

11 *Ibid.,* hlm. 117.

KMB, wilayah Irian Barat harus dikembalikan kepada pihak Indonesia paling lambat setahun sesudah isi perjanjian disepakati. Dalam praktiknya Belanda mengingkari hasil kesepakatan tersebut dengan mengulur-ulur waktu pengembalian dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.

Akumulasi sisa-sisa kekecewaan lama dan meningkatnya frustasi atas sikap kesewenang-wenangan Belanda dalam banyak hal telah membangkitkan dorongan khalayak bagi pemerintah untuk merespons dengan sikap dan tindakan-tindakan yang lebih keras terhadap pemerintah Belanda dan berbagai kepentingan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Seiring dengan perjuangan merebut Irian Barat, para tokoh nasional bermaksud menggapai kedaulatan ekonomi Indonesia melalui kepemilikan bank sentral milik sendiri dan dalam konteks ini DJB menjadi target pertama. Penguasaan atas DJB sebagai bank sentral milik Indonesia dipandang dapat menjadi kunci pembuka bagi gerbang kemerdekaan ekonomi dan menggagalkan agenda Belanda untuk melanggengkan penguasaan atas ekonomi Indonesia sesudah masa revolusi.[12] Dengan demikian, maka DJB menjadi target nasionalisasi sebagai manifestasi keinginan Indonesia untuk mempunyai bank sentral independen dan bebas dari kepemilikan asing.

Akan tetapi, gagasan untuk melakukan nasionalisasi DJB tidak bisa dikatakan sebagai keinginan bulat seluruh tokoh nasional yang duduk di pemerintahan. Sejumlah tokoh nasionalis, bahkan termasuk Sjafruddin Prawiranegara yang berada di jajaran direktur DJB, menghendaki agar wacana nasionalisasi DJB dipikirkan secara matang dan penuh kehati-hatian. Dalam pandangan mereka, langkah nasionalisasi perlu mempertimbangkan urgensi dan konsekuensi untung rugi yang ditimbulkannya bagi perekonomian Indonesia, khususnya kehidupan perekonomian rakyat yang belum pulih dari kehancuran akibat perang. Apalagi dalam pandangan mereka, sejumlah lembaga perbankan swasta Belanda juga ada yang memberikan bantuan kredit kepada perusahaan-perusahaan bumiputera dalam upaya mereka bangkit dari kehancuran akibat perang.[13]

---

12 Thee Kian Wie, "The Indonesian Government's economic policies towards the Ethnic Chinese: Beyond Economic Nationalism?" dalam Leo Suryadinata (ed), *Southeast Asia's Chinese Businesses in an Era of Globalization* (Singapore: ISEAS, 2006), hlm. 78.

13 Darsono dkk., *op.cit.*, hlm. 227.

Namun demikian, pandangan perlunya pertimbangan matang dan kehati-hatian tampaknya kalah populer dan tidak banyak menarik perhatian dibanding pernyataan terbuka dari pejabat pemerintah yang dengan cepat menuai reaksi karena menyuarakan arus kuat aspirasi untuk membebaskan diri secara penuh dari cengkeraman kepentingan asing. Pernyataan Menteri Keuangan, Jusuf Wibisono, dalam sebuah wawancara pers pada tanggal 30 April 1951 tentang niat pemerintah Indonesia menasionalisasi DJB tanpa memberi tahu terlebih dahulu telah membuat Dr. A. Houwink mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden DJB. Jabatan yang ditinggalkan Houwink kemudian diduduki oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur DJB.[14]

Keterangan resmi atas rencana nasionalisasi disampaikan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Mei 1951. Sebagai tindak lanjut rencana nasionalisasi tersebut, kemudian dibentuk Panitia DJB. Pembentukan panitia didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No. 118 tanggal 2 Juli 1951, yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 1951. Susunan panitia terdiri dari ketua yang diduduki oleh Mohamad Sediono (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI), dengan para anggota yang terdiri dari Mr. Soetikno Slamet, Dr. R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo, T.R.B Sabarudin, dan Drs. Khouw Bian Tie. Panitia ini bertugas melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk proses pengambilalihan DJB.[15]

Selain pembentukan panitia ini, dukungan pemerintah juga diwujudkan dengan menerbitkan Keputusan Nomor 122 tanggal 12 Juli 1951 tentang pemberhentian secara resmi Dr. A. Houwink dari jabatan Presiden DJB, dan keputusan nomor 123 bertanggal sama tentang pengangkatan secara resmi Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden DJB yang baru.[16] Sementara itu, dua direktur berkewarganegaraan Belanda, Paul Spies dan Th. Teunissen, tetap bersedia melanjutkan jabatan

14 Wasino, dkk., *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN* (Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2014), hlm. 637-638.

15 *Sejarah Bank Indonesia: Kelembagaan Periode 1953-1959*, hlm. 10.

16 Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah Swt* (Jakarta: Idayu Press, 1986), hlm. 172.

dan pekerjaannya di bawah kepemimpinan Sjafruddin hingga proses nasionalisasi DJB selesai.[17]

Dengan mempertimbangkan usulan yang muncul agar proses nasionalisasi tidak dilakukan secara paksa yang dapat berdampak buruk terhadap reputasi Indonesia di mata institusi perbankan dan nonperbankan internasional, Panitia Nasionalisasi DJB memutuskan pengambilalihan kepemilikan DJB dengan cara menguasai saham-sahamnya. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah RI menyampaikan penawaran secara resmi untuk membeli saham-saham DJB kepada para pemegangnya pada tanggal 3 Agustus 1951. Dalam penawaran yang diajukan, pemerintah Indonesia memasang harga pembelian saham dengan kurs 120% dalam valuta uang Belanda atau valuta asing lainnya sesuai dengan domisili pemilik saham dengan kurs sebanding. Untuk pemilik saham berkewarganegaraan Indonesia atau penduduk dalam rupiah, pemerintah menawarkan harga saham dengan kurs 360%. Dengan menggunakan cara ini, pemerintah Indonesia akhirnya dapat menguasai kepemilikan saham DJB sebesar 99,4%, sedangkan sisanya sebesar 0,6% dari total saham dianggap hilang karena tidak jelas pemiliknya. [18]

Berkat dukungan Sjafruddin, Panitia Nasionalisasi DJB dapat menyelesaikan tugas pertamanya dalam sekitar waktu enam bulan. Moh. Sediono selaku ketua melaporkan kinerja panitia kepada Perdana Menteri Soekiman yang kemudian meneruskan laporan dengan disertai rancangan keputusan nasionalisasi kepada Sukarno selaku kepala negara. Setelah menandatanganinya, Presiden Sukarno menyampaikan keputusan nasionalisasi kepada DPR. Surat keputusan ini menjadi dasar hukum bagi DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Nasionalisasi DJB menjadi Undang-undang Nomor 24 pada tanggal 15 Desember 1951, yang dimuat dalam *Lembaran Negara RI* No. 120 Tahun 1951.[19] Dengan disahkannya undang-undang ini dan bermodal penguasaan atas hampir seluruh saham kepemilikan, pada tanggal 15 Desember 1951 DJB secara resmi dinasionalisasi.

17 *Ibid*, hlm. 172.

18 Darsono dkk., *op.cit.* hlm. 228.

19 Wasino, dkk., *op.cit.*, hlm. 638.

Tugas selanjutnya yang harus dikerjakan oleh Panitia Nasionalisasi adalah melakukan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam konsiderans UU Nasionalisasi DJB disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Rancangan yang dibuat oleh panitia kemudian diteruskan oleh pemerintah kepada Parlemen (Konstituante). Pada tanggal 10 April 1953, rancangan tersebut disahkan oleh Konstituante sebagai Undang-undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Mei 1953 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 1953 melalui *Lembaran Negara* No. 40 Tahun 1953.[20] Undang-undang No 11 Tahun 1953 dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1953. Dengan pemberlakuan Undang-undang No 11 Tahun 1953, Bank Indonesia resmi berkedudukan sebagai Bank Sentral Indonesia.[21] Dalam Bab Ketentuan Umum I Pasal 1 dengan tegas disebutkan bahwa "Dengan nama 'Bank Indonesia' didirikan suatu bank yang bermaksud menggantikan De Javasche Bank NV dan bertindak sebagai bank sentral Indonesia."

Nasionalisasi DJB dan pendirian Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dinilai sebagai keberhasilan awal untuk mengakhiri dominasi asing yang mengeksploitasi perekonomian Indonesia. Dalam capaian ini sekaligus terkandung sebuah harapan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan arah yang jelas dan positif dalam mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pujian dan harapan terhadap BI secara jelas tergambar dalam penggalan artikel yang terbit di *Harian Merdeka* berikut ini:

> *"Jika De Javasche Bank dapat dianggap sebagai suatu alat politik kolonial dari suatu pemerintahan kolonial yang terutama mengabdi kepada kepentingan-kepentingan di luar tanah air kita, sehingga daerah Indonesia telah dijadikan suatu sumber kekuatan penghidupan dan kekayaan bukan untuk bangsa Indonesia sendiri, hendaknya tanggal 1 Juli 1953 kita pandang sebagai hari peresmian perubahan tujuan dan maksud pemerintah dan Bank Sentralnya,*

20 Darsono dkk., *op.cit.,* hlm. 229.

21 Koleksi Arsip Bank Indonesia No. *Inventaris 3234: Stukken Inzake de Nationalisatie van De Javasche Bank*, 1951-1952.

sesuai dengan cita-cita tiap-tiap negara yang betul-betul merdeka, politik maupun ekonomis. Dengan demikian kita mengharapkan dari pihak Bank Indonesia haluan positif dan tertentu, karena dalam melaksanakan tugas yang sangat berat ini hendaknya tidak boleh dilupakan bahwa negara kita yang sampai sekarang pada hakekatnya masih berada di bawah telapak ekonomi bangsa asing, masih harus diisi dengan kekuatan kemerdekaan untuk mengurus politik ekonomi kita sendiri."[22]

Langkah penting yang diambil untuk merealisasikan harapan tersebut adalah pembenahan internal menyangkut orang-orang yang mengelola Bank Indonesia dari tingkat atas hingga bawah. Direksi BI pada periode 1953-1959 terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I, seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Pucuk pimpinan Bank Indonesia setelah nasionalisasi dijabat oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, tetapi pada tanggal 31 Januari 1958 Syafruddin diberhentikan dari posisi Gubernur BI karena terlibat PRRI/ Permesta. Posisi Gubernur BI yang ditinggalkan Syafruddin kemudian diisi Mr. Loekman Hakim pada 8 April 1958. Susunan Direksi BI sejak tanggal 31 Juli 1958 terdiri atas Mr. Loekman Hakim sebagai Gubernur BI, Mr. Indra Kasoema sebagai Direktur merangkap Gubernur Pengganti I, Ir. Dharmawan Mangoenkoesoemo sebagai Direktur merangkap Gubernur Pengganti II, T.B.R. Sabarudin, dan Mr. Boerhanuddin sebagai direktur.[23] Penataan kembali tata kelola Bank Indonesia dilakukan setelah kebijakan sanering yang dijalankan Perdana Menteri Djuanda. Dalam reorganisasi tata kelola ini dibentuk lima unit kerja tingkat urusan, masing-masing membawahkan beberapa bagian yang dipimpin secara langsung oleh seorang Direktur, dengan dibantu seorang atau lebih Direktur Muda. Kelima unit kerja tingkat urusan tersebut adalah urusan moneter, urusan pembangunan ekonomi, urusan *research* dan statistik, urusan luar negeri, dan urusan umum.[24]

Keberhasilan nasionalisasi DJB menjadi tonggak penting bagi proses nasionalisasi ekonomi yang berlangsung pada era Sukarno. Upaya-upaya

22 *Merdeka,* 9 Juli 1953.

23 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 103.

24 *Ibid*, hlm. 111.

serupa pada sektor ekonomi yang lain menjadi lebih gencar dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dan mendapatkan picuan dengan memanasnya konflik atas Irian Barat, yang meyakinkan pihak Indonesia akan niat Belanda melanggengkan sisa-sisa kolonialismenya di Indonesia. Dengan kuatnya dukungan berbagai elemen masyarakat, langkah tegas terhadap Belanda pun diambil oleh pemerintah Indonesia dengan mendorong lebih jauh agenda nasionalisasi dengan pemberlakukan Undang-undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958.

Dalam konteks perbankan, implementasi kebijakan tersebut diwujudkan dengan nasionalisasi bank-bank milik Belanda lainnya yang masih beroperasi di Indonesia. Nationale Handels Bank dinasionalisasi pada tahun 1959 melalui Peraturan Pemerintah No.39 sehingga kemudian berubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG), yang selanjutnya berganti nama lagi menjadi Bank Bumi Daya (BBD). Bank-bank lainnya segera menyusul dinasionalisasi pada awal tahun 1960, yakni Escompto Bank berubah menjadi Bank Dagang Negara (BDN), Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang kemudian berubah lagi menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).[25]

Menurut ketentuan Undang-undang No.11 tahun 1953, BI mempunyai tiga fungsi pokok terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan, dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Tugas BI diatur dalam Bab II Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 UU No.11 tahun 1953. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa tanggung jawab atas kebijakan moneter berada di pundak pemerintah. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter, sedangkan Direksi BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter. UU tersebut juga menyebutkan bahwa BI melakukan pengawasan terhadap urusan kredit, menyelenggarakan peredaran uang, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia, dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) UU pokok BI 1953, pada bulan Januari 1955 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955 tentang pengawasan urusan kredit. Sejak saat itu, BI mulai

25 Priasmoro Prawiroardjo, "Perbankan Indonesia 40 Tahun", dalam Hendra Asmara (ed), *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei Untuk Menghormati 70 Tahun Sumitro Djojo Hadikusumo* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 193-194.

mempersiapkan organisasi dan tenaga di bidang pengawasan bank yang secara formal terbentuk tahun 1957. Dalam bidang moneter, BI mulai melakukan pengendalian uang beredar dengan menggunakan *reserves requirement* dan pembatasan kredit bank.[26] Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman operasional Bank Indonesia dan seluruh kantor-kantor cabang di Indonesia termasuk Bank Indonesia Kantor cabang Kediri.

TERBENTUKNYA BANK INDONESIA KEDIRI

Pada saat terakhir menjelang dinasionalisasi, De Javasche Bank mempunyai 15 kantor cabang di Indonesia yang terdapat di Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon, satu kantor cabang di Amsterdam, dan satu kantor perwakilan di New York. Pimpinan DJB terdiri atas presiden bank dan lima orang direktur, dewan komisaris, seorang penasehat, komisaris pemerintah, dan 12 bagian/biro di kantor pusat Jakarta. Sebagai bank Belanda, komposisi pimpinan dan staf DJB sebagian besar diisi oleh tenaga-tenaga berkebangsaan Belanda. Dengan terjadinya proses nasionalisasi DJB, maka tidak hanya terjadi perubahan dari DJB menjadi Bank Indonesia, melainkan juga berlangsung proses Indonesianisasi pegawai di lingkungan Bank Indonesia dari tingkat pejabat hingga staf personalia. Proses indonesianisasi memerlukan waktu lebih lama dan berlangsung secara bertahap dibanding perubahan di tingkat kelembagaan karena perlu dilakukan penyiapan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi baik.[27]

Berdirinya Bank Indonesia dengan De Javasche Bank sebagai embrionya di tingkat nasional berimplikasi langsung pada keberadaan De Javasche Bank di daerah termasuk Keresidenan Kediri. De Javasche Bank Agentschap Kediri secara otomatis juga berubah menjadi Bank Indonesia Kantor cabang Kediri (BI Kediri). Berbeda dengan perkembangan di tingkat pusat bahwa pendirian Bank Indonesia menghasilkan presiden dan

26 *Sejarah Bank Indonesia: Kelembagaan Periode 1953-1959*, hlm. 12.

27 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *op.cit.*, hlm. 100-101.

pimpinan Bank Indonesia dari kalangan orang Indonesia, perkembangan tingkat lokal di BI Kediri memerlukan waktu yang agak lebih lama. Beberapa tahun setelah pendirian BI Kediri, jabatan kepala masih dipegang oleh orang Belanda. Kepala BI Kantor cabang Kediri berkebangsaan Belanda yang terakhir adalah J.G. Spaan. Berdasarkan arsip foto BI Kediri, J.G. Spaan menduduki posisi Kepala BI Kediri pada periode Juli 1953 hingga Desember 1957. Orang Indonesia yang menjabat pertama kali sebagai Kepala BI Kediri adalah Soekarno dengan periode jabatan Desember 1957-Oktober 1959 (Gambar 4.1)

Gambar 4.1. Pemimpin Bank Indonesia cabang Kediri Berkebangsaan Belanda yang Terakhir dan Berkebangsaan Indonesia yang Pertama
Sumber: Koleksi Foto BI Kediri

Secara umum proses indonesianisasi staf BI untuk menggantikan orang-orang Belanda dengan tenaga-tenaga Indonesia terus berlangsung hingga 1958. Berdasarkan dokumen yang ditulis R. Hardjo Santoso, posisi Kepala BI Kediri setelah Soekarno hingga tahun 1969 adalah R. Soejatno Soemardjo, Ahmad Sirod, Soeparto Wignyasubrata, Oesman Ibrahim.

M.A. Soeradi, dan Soeroto Dono.[28] Informasi tentang pimpinan BI Kediri secara lebih lengkap tersaji dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Daftar Pimpinan DJB/Bank Indonesia Kantor Cabang Kediri 1949-1969

Nama	Tahun	Sumber
H.G Nauta	1949	Laporan Agent 1949
J.G. Wallies de Vries	1949- Maret 1950	Laporan Agent 1949
L. Martijn	Maret 1950-Juni 1953	Arsip BI Kediri
J.G Spaan	Juli 1953-Desember 1957	Arsip BI Kediri
Soekarno	Desember 1957- Oktober 1959	Arsip BI Kediri
R. Soejatno Soemardjo	Oktober 1959- Maret 1961	Arsip BI Kediri
Achmad Sirod	Maret 1961- Januari 1963	Arsip BI Kediri
Soeparto Wignjasubrata	Januari 1963-Mei 1965	Arsip BI Kediri
Oesman Ibrahim	Mei 1965-Desember 1966	Arsip BI Kediri
M.A. Soerjadi	Desember 1966- 1968	Arsip BI Kediri

Sumber: Arsip BI, *Koleksi aporan Agentschap Kediri 1949*; R. Hardjo Santoso, *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri* (Jakarta: Arsip BI, 1990), hlm. 7; Bank Indonesia Kediri, *Koleksi Arsip Foto Bank Indonesia Kediri 1950-2019.*

Gambar 4.2. Personalia Bank Indonesia Kantor cabang Kediri 1958

Sumber: Arsip Koleksi Foto BI Kediri

28 R. Hardjo Santoso, *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri* (Jakarta: Arsip BI, 1990), hlm. 7; Bank Indonesia Kediri, *Koleksi Arsip Foto Bank Indonesia Kediri 1950-2019.*

Pada tahun 1958, Bank Indonesia Kediri mempunyai pegawai sebanyak 36 orang. Pemimpin cabang BI Kediri adalah Soekarno. Dalam foto di atas, Soekarno berada pada barisan terdepan dengan posisi duduk di tengah. Djie Han Kiet dan Soeparto Wignjosoebroto mengapit di sebelah kanannya, sedangkan Soenarti dan Tan Ping Hwie mengapitnya di sebelah kiri. Kelima orang ini tampaknya merupakan pucuk pimpinan BI Kediri. Mereka didukung oleh 31 personel, yakni The Tjien Liang, Ong Tiang Han, Tjioe Tiang Fan, Tan Ing Hoo, Go Sing Han, Liem Sian Kok, Go Hian, Tien, Johny Mardjono, Lie Mo Liem, M. Koeslan, Soeroso, Djamin Martodihardjo, R. Mudomo, Samiran, dan Tan Gien Kwan (Berdiri di barisan kedua). Sementara itu, personel yang berdiri di barisan ketiga yakni Musiran, Mukin, Sunandir, Moekandar, Salam, Ngabdoel, Kabul, Tukiran, Suradi, Waris, Adiwilojo, Sarimin, Martobijo dan Wijono, Tamsiran, dan Moh. Ambjah.

Wilayah kerja BI cabang Kediri meliputi dua wilayah administrasi keresidenan, yakni Keresidenan Kediri dan Keresidenan Madiun.[29] Keresidenan Kediri meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung, sedangkan Keresidenan Madiun mencakup Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan. Dimasukkannya wilayah Keresidenan Madiun ke dalam wilayah kerja BI Cabang Kediri tampaknya disebabkan karena pada periode revolusi dan sesudah nasionalisasi, De Javasche Bank Agentschap Madiun belum dibuka kembali.

Sebagai cabang dari BI pusat, BI cabang Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan kepanjangan tangan fungsi dan tugas BI Pusat. Selain bertindak sebagai bank sirkulasi, Bank Kediri setelah nasionalisasi masih meneruskan fungsi komersial, seperti yang sebelumnya diperankan oleh DJB dalam kedudukannya sebagai bank umum. Bank Indonesia menyalurkan kredit, tetapi berbeda dengan bank komersial lainnya, kredit yang disalurkan BI bukan berasal dari simpanan nasabah, melainkan dari mencetak uang baru.[30] Peran komersial yang

29 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 6.

30 Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 75.

masih dijalankan oleh BI sesudah nasionalisasi DJB direncanakan untuk dihapus seiring dengan perkembangan kemampuan bank-bank umum milik pemerintah dalam memberikan layanan terhadap kebutuhan kredit dalam masyarakat.[31] Pada dekade 1950-an, BI banyak menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi dan bank komersial. Fungsi sirkulasi dijalankan oleh Bagian Kas dan Uang Kertas Bank, sedangkan fungsi komersial BI dilaksanakan oleh Bagian Pemberian Kredit Pusat dan Bagian Kredit Rayon Jakarta.[32]

Terkait dengan detail pelaksanaan tugas-tugas BI di wilayah Kediri, tidak terdapat informasi sejarah secara lengkap dan memadai untuk semua tahun. Dari informasi yang tersedia dapat dikemukakan beberapa hal. Berdasarkan laporan Kepala BI cabang Kediri tahun 1963. BI cabang Kediri sudah tidak lagi memberikan kredit komersial, kecuali kredit kepada bank-bank. Hingga tahun 1963, pemberian kredit kepada bank-bank disebutkan belum pernah dilakukan oleh BI cabang Kediri. Satu-satunya bank pemerintah yang dapat memberikan kredit di wilayah Kediri adalah BKTN cabang Kediri. Kredit yang disalurkan BKTN cabang Kediri ditujukan terutama kepada koperasi-koperasi.[33] Berdasarkan pandangan dari Kepala Djawatan Koperasi di Kediri, Pimpinan BI cabang Kediri lebih jauh melaporkan bahwa di wilayah ini telah ada beberapa Pusat Koperasi Pertanian, tetapi tidak berjalan dengan lancar karena pengurus dikatakan "bukan full-timer" dan berlokasi di pedesaan. Untuk mendorong perkembangan koperasi pertanian disarankan perlunya dibentuk pusat-pusat koperasi di kota-kota dan dipilih anggota pengurus yang dapat mencurahkan waktu dan tenaga secara penuh untuk mengurus jalannya koperasi. [34]

Berkenaan dengan aliran uang, Pemimpin BI cabang Kediri melaporkan terjadinya kecenderungan penurunan *outflow* terutama pada periode Agustus-November selama tiga tahun berturut-turut sejak 1961 hingga 1963. Menurut pandangannya, tren penurunan *outflow* terjadi

31 Soedradjad Djiwandono, dkk., *op.cit.,* hlm. 35-36.

32 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *op.cit.*, hlm. 109.

33 Arsip Bank Indonesia, Kode KS 0104, JR P, *Laporan Pemimpin Tjabang Surabaya, Malang, Kediri, Djember pada Konperensi Para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat pada tgl. 25 Nopember 1963-30 Nopember 1963* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 6.

34 *Ibid,* hlm. 7-8.

karena semakin berkurangnya pengambilan uang oleh pabrik-pabrik gula seiring dengan musim giling yang mendekati waktu berakhir. Secara khusus, mengenai mengecilnya *outflow* September-Oktober 1963 yang sangat besar jumlahnya, Rp. 215,4 juta, dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Menurut Wignjasubrata, penurunan *outflow* disebabkan karena dua hal, pertama berkaitan dengan nilai rupiah yang terus melorot; dan kedua berkaitan dengan transfer untuk pabrik-pabrik gula yang terlambat sehingga uang tidak diambil di BI cabang Kediri, melainkan langsung mengambil uang ke BUNEG Surabaya.[35] Pengambilan langsung ke Surabaya juga didasari alasan bahwa permintaan koper-koper besar yang dibutuhkan untuk wadah uang sering tidak dapat dipenuhi BI cabang Kediri, di samping alasan persoalan biaya transfer dan alasan "Sambil menyelam minum air" atau sekaligus mengerjakan urusan-urusan dinas maupun urusan pribadi lainnya di Surabaya.[36]

Dalam menjalankan tugas sirkulasi uang, problem yang muncul di wilayah Kediri adalah masalah Uang Kertas Pemerintah (UKP) yang lusuh. Peredaran UKP lusuh di wilayah Kediri dilaporkan dalam jumlah yang sangat besar terutama untuk lembaran pecahan Rp 2,50 dan Rp 1.-. Upaya menarik UKP yang sangat lusuh/rusak, Kas Negara menghadapi kendala keterbatasan tenaga, ruang penyimpan, dan alat pengangkut sehingga kemampuan untuk menarik kembali uang lusuh dari peredaran tidak mampu mengimbangi volume uang yang rusak di peredaran. Dalam laporan Pemimpin BI cabang Kediri dituliskan:

> *"Kas Negara Kediri tiap harinja hanja dapat mengumpulkan rata-rata Rp 50.000,-. Karena tidak mempunjai truck sendiri maka mengangkutnja UKP ke Kas Negara Surabaja untuk diberi lobang sering terhambat sehingga ruang kluisnja jang tak begitu lama sering tidak dapat muat".* [37]

Uang rusak yang masih beredar dalam masyarakat tidak jarang memunculkan masalah biaya ekstra dalam transaksi jual beli. Misalnya, dalam kasus transaksi jual beli kedelai seharga Rp 80,- per kilo bila dibayar

35 Arsip Bank Indonesia, Kode KS 0104, JR P, *Laporan Pemimpin Tjabang Surabaya, Malang, Kediri, Djember pada Konperensi Para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat pada tgl. 25 Nopember 1963-30 Nopember 1963* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 12.

36 *Ibid.*, hlm. 13.

37 *Ibid*.

dengan uang dalam kondisi baik, ketika pembayaran dilakukan dengan uang kertas lusuh penjual meminta pembayaran Rp 90,- per kilo. Harga yang lebih tinggi dikenakan penjual kepada pembeli dengan alasan kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam melakukan pembayaran dan setoran dengan menggunakan uang lusuh dalam jumlah uang yang besar.[38]

REKONSTRUKSI EKONOMI KEDIRI PASCA PERANG

Rekonstruksi ekonomi setelah perang merupakan tantangan yang luar biasa besar dan berat bagi pemerintah Indonesia setelah solusi politis atas sengketa Indonesia dan Belanda dapat dicapai melalui Konferensi Meja Bundar. Proses rekonstruksi ekonomi Indonesia setelah perang merupakan satu episode dari apa yang disebut sejarawan Belanda, Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam karya mereka *Ekonomi Indonesia,* sebagai kegagalan periode 1940-1965 dalam kinerja ekonomi. Alasan kegagalan dalam melakukan rekonstruksi ekonomi setelah perang tersebut secara umum, menurut Van Zanden dan Marks, adalah dua faktor besar yang saling berkait. Faktor pertama adalah terlalu besarnya tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan faktor kedua adalah ketidaksiapan orang-orang Indonesia untuk melaksanakan tugas yang luar biasa besar yang diembannya.[39] Masing-masing faktor tersebut mencakup beragam aspek yang lebih kecil, tetapi menampilkan kerumitan dan efek-efek yang membuat proses rekonstruksi dan pembangunan ekonomi tidak berjalan mulus dan bahkan cenderung stagnan.

Warisan perang yang sangat membebani perekonomian setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1949 adalah utang yang sangat besar untuk sebuah negara yang baru lahir dan mewarisi infrastruktur produksi yang porak-poranda**.** Beban utang yang dipikul sejak awal kelahiran dalam jumlah yang sangat besar jelas tidak menguntungkan

38 Arsip Bank Indonesia, Kode KS 0104, JR P, *Laporan Pemimpin Tjabang Surabaya, Malang, Kediri, Djember pada Konperensi Para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat pada tgl. 25 Nopember 1963-30 Nopember 1963* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 13.

39 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *op.cit.,* hlm. 290.

bagi sebuah negara dan pemerintahan baru, apalagi utang tersebut bukan merupakan dana pinjaman yang dapat digunakan sebagai modal awal untuk investasi produktif dalam pelaksanaan program pembangunan, melainkan sebatas beban tanggungan yang hanya menunggu pelunasan tanpa memberi kemanfaatan sama sekali. Berdasarkan kesepakatan KMB, Republik Indonesia Serikat sebagai pemerintah baru yang diakui kedua belah pihak melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan atas bekas wilayah Hindia Belanda harus menanggung utang yang harus dibayar pemerintah kolonial Hindia Belanda sebelumnya yang jumlahnya mencapai sebesar 4,3 miliar gulden.[40]

Delegasi Indonesia telah berjuang keras agar pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Kerajaan Belanda tidak membuat Indonesia harus menanggung beban utang. Persoalan utang dan jumlah besarannya menjadi isu alot yang diperselisihkan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda. Dalam argumentasi Soemitro Djojohadikoesoemo, Republik Indonesia sebagai entitas politik yang baru merdeka tidak seharusnya memiliki utang kepada Kerajaan Belanda karena menurutnya justru Belanda yang berutang kepada Indonesia karena penjajahan dan ekspedisi militer yang dilakukan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dalam perhitungan Soemitro yang sangat rinci, Pemerintah Kerajaan Belanda malahan harus membayar sisa utang sebesar sekitar 540 juta gulden kepada pihak Indonesia.[41] Dalam buku kenangannya, Sumitro mengungkapkan kekecewaan dan masih mempertanyakan masalah utang ini:

> *"…mengapa Indonesia harus menanggung hutang dari suatu tentara pendudukan, seharusnya pihak Belanda yang harus menanggung hutang-hutang tersebut, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika waktu tentara Amerika meninggalkan Brussel, mereka membayar pada pihak Belgia, padahal kehadiran tentara Amerika di sana adalah untuk membebaskan Belgia dari pendudukan Jerman."*[42]

40 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indoensia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 488.

41 George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1970), hlm. 441.

42 Sumitro Djojohadikusumo, *Profesor Sumitro Mengenang Masa Lalu* (Jakarta, 1987), hlm. 15.

Sekuat apapun argumentasi dan penolakan Delegasi Indonesia, pada akhirnya kenyataan yang harus diterima sangat berbeda dari harapan semula. Utang menjadi salah satu harga mahal yang harus dibayar untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan politik dan menjadi beban yang harus dipikul pelunasannya.

Selain utang warisan dari hasil kesepakatan KMB, pemerintah Indonesia mewarisi infrastruktur dan ekonomi yang porak-poranda akibat pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan. Banyak gedung perkantoran, bangunan-bangunan pabrik, perlengkapan mesin, fasilitas infrastruktur, dan alat transportasi yang rusak bahkan luluh-lantak tinggal puing-puing berserakan di atas tanah karena hancur baik pada masa pemerintahan pendudukan militer Jepang maupun perang revolusi kemerdekaan. Agar infrastruktur dan alat-alat produksi ekonomi dapat digunakan kembali perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali dengan dana yang tidak sedikit. Kerugian dari kerusakan yang ditimbulkan terhadap keadaan perekonomian diperkirakan mencapai tidak kurang dari 2,3 triliun gulden. Perkiraan ini mencakup 814 juta gulden yang diperlukan untuk rehabilitasi sektor industri tambang, 814 juta gulden untuk perbaikan sektor pertanian, 140 juta gulden untuk perbaikan sektor manufaktur, 172 juta gulden untuk reparasi jaringan rel dan trem, 150 juta gulden untuk penggantian kapal-kapal laut, 80 juta gulden untuk rehabilitasi pelabuhan-pelabuhan, dan 85 juta gulden untuk penggantian kendaraan.[43] Untuk perbaikan di bidang transportasi kereta api saja diperkirakan memerlukan sebanyak 300 gerbong penumpang, 3.000 gerbong barang, 150 lokomotif, dan 55.000 ton rel. Secara proporsional, total biaya yang diperlukan untuk mendanai rehabilitasi infrastruktur ekonomi secara kasar diperkirakan mencapai separuh dari total GDP pada tahun 1951.[44] Jumlah ini luar biasa besar dan untuk merealisasikannya jelas bakal memakan waktu yang tidak sebentar.

Bagi pemerintahan Indonesia yang baru merdeka, beban utang dan kebutuhan rekonstruksi ekonomi setelah perang dirasakan semakin berat dan kompleks karena berbagai persoalan lain yang harus dihadapi dalam waktu yang bersamaan. Pemerintah Indonesia memiliki anggaran yang

43 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *op.cit.*, hlm. 279.

44 *Ibid.*, hlm. 279.

sangat terbatas untuk mendanai program-program pembangunan yang harus dilakukan. Sumber pendapatan bagi keuangan negara masih sangat kecil dan terbatas karena sistem perpajakan belum berjalan baik, sedangkan pemasukan yang berasal dari sumber lain juga masih jauh dari memadai. Sementara itu, akses untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari negara-negara lain dan badan-badan internasional masih sangat terbatas dan merupakan pilihan yang tidak terbayangkan para penentu kebijakan ekonomi di dalam pemerintahan. Persoalan lain yang tidak kalah rumit adalah pergolakan-pergolakan di daerah yang penanganannya juga banyak menyedot keuangan pemerintah.[45] Problem keuangan yang dihadapi begitu serius sehingga Indonesia, disebut Higgins, menghadapi krisis keuangan kelas satu.[46] Tabel 4.2 menunjukkan problem defisit anggaran yang selalu dihadapi pemerintah Indonesia pada periode 1953-1959 karena jumlah pengeluaran yang selalu lebih besar dibanding jumlah penerimaan.

Tabel 4.2.
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia, 1953-1959
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1953	13.591	15.659	-2.068
1954	11.789	13.391	-1.602
1955	14.227	16.317	-2.090
1956	18.452	20.015	-1.564
1957	20.571	25.610	-5.040
1958	23.271	35.313	-12.040
1959	30.571	44.350	-13.780

Sumber: Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), hlm. 298.

Selain terbatasnya pendapatan pemerintah, defisit anggaran pemerintah Indonesia yang terjadi pada tahun 1950-1959 dari sisi pengeluaran terkait dengan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan.

45 R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella dan Yudha B Tangkilisan, *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 88-89.

46 Binjamin Higgins, *Indonesia's Economic Stabilization and Development* (New York: Institute of Pacific Relations, 1957), hlm. 2.

Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk mendanai program pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan pengusaha swasta nasional Indonesia, mendanai operasi-operasi militer dalam rangka memadamkan pergolakan-pergolakan di daerah, dan mendanai program nasionalisasi DJB.[47] Pemerintah Indonesia juga harus mengeluarkan dana untuk mencicil utang warisan KMB. Sebelum hasil kesepakatan KMB dibatalkan secara unilateral oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956, Indonesia telah melakukan pembayaran cicilan selama lima tahun yang jumlahnya mencapai sekitar 4 juta gulden, dari utang yang harus dilunasi sebesar 4,3 miliar gulden.[48]

Selain warisan utang yang menyedot anggaran pemerintah, awal dekade 1950-an dibuka dengan warisan kerusakan infrastruktur dan alat-alat produksi. Kerusakan dalam bidang ini di wilayah Kediri tergolong parah. Gambaran mikroskopis tentang warisan kerusakan infrastruktur dan alat-alat produksi akibat pendudukan Jepang dan Revolusi diberikan antropolog Amerika, Clifford Geertz dalam kajiannya tentang Distrik Pare (yang disamarkan sebagai Mojokuto) berdasarkan observasi lapangan yang dilakukannya bersama tim ilmuwan Amerika pada awal tahun 1950-an. Geertz menggambarkan:

> *"Ketika Revolusi sudah berakhir dan kedaulatan atas kepulauan Indonesia sudah dialihkan dari Hindia Belanda ke tangan Republik Indonesia (tanggal 27 Desember 1949), hampir semua jembatan untuk mobil di daerah Mojokuto sudah dihancurkan. Semua penggilingan tebu dan berbagai bangunan penting lainnya dapat dikatakan sudah dibumihanguskan".*[49]

Memang belum ada kalkulasi secara rinci mengenai total kerugian yang dialami akibat rusaknya infrastruktur ekonomi dan dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi. Sejumlah laporan menyebutkan terjadinya kerusakan-kerusakan infrastruktur ekonomi di Kediri. Banyak pabrik gula mengalami kerusakan. Dari sepuluh pabrik gula milik HVA di Kediri, sekitar enam pabrik dalam kondisi rusak berat, yakni PG Soemberdadi, PG Menang, PG Garum, PG Kawarasan, PG Tegowangi,

---

47 Soedradjad Djiwandono, dkk., *op.cit.*, hlm. 127-138.

48 Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 49.

49 Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm.99.

dan PG Koenir. Hanya tersisa sedikit pabrik gula saja yang mengalami kerusakan agak ringan, termasuk di antaranya adalah PG Ngadiredjo dan PG Minggiran, serta PG Meritjan milik Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij, sedangkan PG Pesantren milik NV Javasche Cultuur Maatschappij dalam keadaan rusak cukup serius, demikian pula kerusakan pada PG Modjopanggoeng dan PG Kenongo, dua pabrik gula milik FA Tiedeman & Van Kerchem. Kerusakan yang terjadi pada PG Poerwoasrie milik NV Nederlandsch Suiker Unie juga tergolong parah.[50] Bangunan-bangunan pabrik pada onderneming tanaman pegunungan juga mengalami kerusakan, di antaranya adalah emplasemen perusahaan perkebunan tapioka dan serat Bendoredjo.[51]

Warisan kerusakan parah juga terjadi pada infrastruktur transportasi. Jembatan di atas Sungai Brantas yang sangat vital berlokasi di dekat PG Meritjan dilaporkan rusak dek dan tiang penopangnya.[52] Perusakan terhadap Jembatan Sungai Brantas merupakan bagian taktik gerilyawan untuk menghambat pergerakan konvoi pasukan Belanda dalam mempertahankan kedudukannya di Kota Kediri. Perusakan jembatan dilakukan oleh Batalion Mliwis pada waktu dilancarkan serangan umum atas pasukan Belanda di Kediri pada pertengahan 1949 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Surachmat.[53] Pendudukan Jepang di Kediri mewariskan kerusakan jaringan kereta api dan trem yang telah diletakkan pembangunannya pada masa Hindia Belanda. Kerusakan akibat pembongkaran terdapat di jalur trem Pesanten-Wates sepanjang 14 km, jalur Palem-Papar sepanjang 14 km, dan jalur Gurah-Kawarasan sepanjang 4 km.[54] Pada saat Agresi Militer Belanda II 1949, sejumlah lokomotif milik Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM) ditemukan dalam keadaan rusak

50 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1 Vertrouwelijk".

51 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 24 Januari 1949, No. 121/3".

52 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1 Vertrouwelijk".

53 Hisbaron Muryantoro, "Kediri Pada Masa Revolusi 1945-1949", *Jurnal Patrawidya*, Volume 12 No. 1 Tahun 2011, hlm. 74-75.

54 Tim Telaga Bakti Nusantara, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia,* Jilid 1 (Bandung: Penerbit Angkasa, 1997), hlm. 145-146.

di Daerah Wates. Kerusakan juga banyak dialami oleh pabrik-pabrik penggilingan padi di berbagai wilayah Kediri.[55] Secara keseluruhan, kerugian akibat kerusakan aset yang dialami perusahaan kereta api di Jawa pada periode 1942-1949 diperkirakan sebesar *f* 31.731.000.[56]

Dalam rangka rekonstruksi ekonomi, tugas utama yang harus dijalankan oleh pemerintahan baru pada tahun 1950-an adalah mengembangkan perekonomian nasional di tengah-tengah masih kuatnya dominasi asing dan mayoritas perusahaan-perusahaan milik swasta. Hingga tahun 1952, menurut taksiran Glassburner, empat perusahaan Belanda masih menguasai kurang lebih 50% dari keseluruhan produk konsumsi impor Indonesia dan delapan perusahaan Belanda masih menguasai 60% dari seluruh ekspor.[57] Menurut Thee, berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia 1952-1953, hanya 19% dari modal di sektor non-pertanian dimiliki oleh kaum bumiputera, selebihnya berada dalam pemilikan asing. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa total keuntungan yang ditransfer ke Belanda pada tahun 1953 mencapai Rp499 juta atau 70%, transfer sosial dalam bentuk tabungan pribadi dan dana pensiun mencapai Rp464 juta (83%).[58]

Kenyataan masih dominannya kepentingan bangsa asing dalam perekonomian nasional mendorong pemerintah Indonesia menempuh jalur nasionalisme ekonomi sebagai orientasi kebijakan untuk diimplementasikan. Dalam konteks ini nasionalisme ekonomi diartikan secara sederhana sebagai sebuah aspirasi yang diusung oleh suatu bangsa untuk memiliki atau menguasai aset-aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bangsa asing dan menjalankan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh bangsa lain. Nasionalisme ekonomi merupakan langkah yang dipandang paling konkret untuk membangun perekonomian nasional. Akan tetapi, pilihan ini jelas tidak mudah dan dilematis bagi Indonesia karena pada

55 Arsip Koleksi Bank Indonesia, Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 24 Januari 1949, No. 121/3".

56 Waskito Widi Wardodjo, "Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949", *Indonesian Historical Studies,* Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 103.

57 Bruce Glassburner, "Economic Policy Making in Indonesia", dalam Bruce Glassburner (ed), *The Economy of Indonesia: Selected Readings* (Ithaca: Cornell University Press, 1971), hlm. 79-80.

58 Thee Kian Wie, "Understanding Indonesia: The Role of Economic Nationalism", *Journal of Indonesian Sciences and Humanities,* Vol. 3, 2010, hlm. 59.

sisi lain pemerintah Indonesia masih terikat pada hasil kesepakatan KMB tentang kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjamin perusahaan-perusahaan Belanda dapat beroperasi kembali seperti pada waktu sebelum perang.

Dengan keterikatan tersebut, pengembalian aset-aset milik perusahaan-perusahaan Belanda menjadi bagian penting dalam proses rekonstruksi ekonomi pada awal dasawarsa 1950-an. Pada tahun 1952, sebanyak 16 perkebunan besar di wilayah Kediri telah dikembalikan kepada pemilik lama.[59] Pengembalian perkebunan-perkebunan lainnya seperti perkebunan Jabung, Kawarasan, Purwodadi, Kali Tello, Sumbernongko, Karangnongko, Wonodjojo, Kali Gambang, dan perkebunan Gunung Njamil sedang diproses oleh pemerintah, sedangkan sebagian perkebunan masih menunggu inisiatif dari pemiliknya yang lama.[60] Hanya sedikit perusahaan perkebunan yang masih tetap dikuasai oleh pihak Republik Indonesia dan diselenggarakan sebagai perkebunan negara, terutama perusahaan perkebunan yang dikategorikan sebagai milik musuh Sekutu terutama Jepang dan Jerman. Satu-satunya perusahaan perkebunan milik Jepang di Kediri adalah Perkebunan Gunung Njamil seluas 2.120 hektar dengan tanaman kelapa seluas 571 hektar dan tanaman kapuk seluas 584 hektar. Perkebunan ini untuk sementara dikelola oleh militer.[61]

Perkebunan-perkebunan yang telah dikembalikan sebagian mulai menjalankan kegiatan produksi dan sebagian dalam proses rehabilitasi. Menurut publikasi resmi Provinsi Jawa Timur tahun 1953, sejumlah pabrik gula yang telah beroperasi kembali pada tahun 1951 meliputi PG Ngadiredjo, PG Pesantren, PG Lestari, dan PG Modjopanggung.[62] Bagi kalangan Indonesia, terutama mereka yang menginginkan berakhirnya semua bentuk dominasi asing, beroperasinya kembali perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda dianggap menghilangkan makna kemerdekaan dan merugikan karena membuat kesempatan membangun

59 Republik Indonesia, *op.cit.,* hlm. 425.

60 *Ibid,* hlm. 430-431.

61 Arsip Nasional Republik Indonesia, No. Inventaris 2571, Koleksi Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Tahun 1950-1959, "Surat Sekjen Kementerian Kemakmuran kepada Semua Menteri RIS dan RI 8 Agustus 1950 mengenai Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Milik Musuh Sekutu. Berkas mengenai pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia".

62 Republik Indonesia, *op.cit.,* hlm. 334.

perekonomian nasional berbasis masyarakat bumiputera sebagai pemeran utamanya menjadi harapan yang kian menjauh. Dominasi ekonomi asing di tingkat bawah dirasakan menguat kembali sehingga kemerdekaan politik dirasakan kosong tanpa arti.

Jalan buntu dalam penyelesaian sengketa Irian Barat mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah keras terhadap Belanda yang berujung pada nasionalisasi perusahan-perusahaan milik Belanda. Seperti ditegaskan Roger Knight, proses nasionalisasi aset-aset ekonomi khususnya dalam hal ini perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda tidak berhubungan langsung dengan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan industri perkebunan di kawasan pedesaan, melainkan imbas samping dari sengketa atas wilayah Irian Barat yang berlarut-larut.[63] Sengketa ini telah menghabiskan kesabaran pihak Indonesia terhadap Belanda. Kesepakatan kerjasama Uni Indonesia Belanda pun dibatalkan pada bulan Februari 1956. Penyelesaian sengketa atas wilayah Irian Barat lewat jalur diplomatis di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga tahun 1957 juga berujung tanpa hasil sehingga semakin menguatkan pemerintah mengambil langkah-langkah konfrontatif termasuk dengan mengerahkan kekuatan militer. Dengan keluarnya himbauan dari parlemen tentang perlunya tindakan keras terhadap Belanda dan persetujuan Dewan Menteri atas pengorganisasian "Pekan Irian", aksi-aksi yang dilancarkan terhadap perusahaan-perusahaan dan kepentingan Belanda bermunculan.[64]

Seperti di tempat-tempat lain, sentimen-sentimen anti perusahaan-perusahaan Belanda juga menguat di wilayah Kediri dan mendorong gerakan nasionalisasi aset-aset milik Belanda dan asing lainnya. Aksi-aksi pengambilalihan berhasil dilakukan pada kantor direksi di Jawa Timur, antara lain Firma Anemaet & Co, Handels Vereeniging Amsterdam, Kooy & Coester van Voorhout, Firma Tiedemen & van Kerchem, Cultuur Bank, Majanglanden, dan Landbouw Maatschappij Oud Djember. Pengambilalihan seluruh aset perkebunan dan pabrik milik Belanda di Jawa Timur, termasuk Kediri, dipimpin dan diawasi langsung oleh pihak

63 G. Roger Knight, "From Merdeka to Massacre: The Politics of Sugar in the Early Years of the Indonesian Republics", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol 43, No 3 (2012), hlm. 414.

64 Wasino, dkk., *op.cit.*, hlm. 731-732.

militer yang bertindak sebagai penguasa daerah atas nama pemerintah pusat. Kewenangan militer ini terkait dengan seruan dari A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat (AD) agar perusahaan-perusahaan milik asing yang dinasionalisasi segera diambil alih oleh militer. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah kelompok komunis menguasai perkebunan-perkebunan yang dinasionalisasi.[65]

Gelombang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Jawa Timur menyapu pula aset-aset perkebunan Belanda di wilayah Kediri. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan/pertanian di Kediri milik NV Handelsvereeniging Amsterdam yang dikenai kebijakan nasionalisasi meliputi perusahaan perkebunan Djengkol/Kalasan (tebu/sisal), Galoehan (tebu/sisal), Bendorejo (tapioka), PG Ngadiredjo, dan PG Koenir.[66] Nasionalisasi juga dikenakan terhadap PG Pesantren milik NV Javasche Cultuur Mij dan PG Meritjan/Djati milik NV Nationale Industrie & Landbouw Mij Djakarta, serta perkebunan karet Ngrangkah-Pawon milik NV Cultuur Mij Ngrangkah-Soember Glatik.[67] Sebelumnya, pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan perkebunan tembakau Bataan milik N.V. Cult. Mij. Bogokidoel.[68]

Nasionalisasi juga menyasar perusahaan-perusahaan di luar sektor pertanian/perkebunan. Nasionalisasi dilakukan terhadap Mexolie (pabrik minyak kelapa) dan NV Nimaf yang bergerak dalam produksi arak, alkohol, spiritus, dan minyak kelapa.[69] Nama lengkap perusahaan ini adalah NV Nimaf (Maatschappij) voor Ondernemingen van Nijverheid dengan alamat kantor pusat Djalan Djatibaru 56A Djakarta.[70] Perusahaan lainnya di Kediri yang bergerak dalam sektor industri yang dinasionalisasi adalah Mf. De Nijverheid yang beralamat di Djalan Dandangan 21 Kediri yang bergerak dalam bidang permesinan.[71]

---

65 Darini dan Miftahudin, *op.cit.*, hlm. 7-8.

66 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan yang Dikenakan Nasionalisasi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 31*.

67 Wasino, dkk., *op.cit.,* hlm. 1029, 1030, 1036.

68 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 7.*

69 Darini dan Miftahudin, *op.cit.*, hlm. 9.

70 Wasino, dkk., *op.cit.,* hlm. 1009.

71 *Ibid.,* hlm. 1018.

Nasionalisasi di bidang industri dilakukan oleh Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPPIT), sebagai salah satu dari empat badan usaha yang dimiliki Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS). BANAS dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 dan mendapatkan penugasan untuk menentukan jenis perusahaan milik Belanda yang akan dinasionalisasi oleh pemerintah, menampung dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat nasionalisasi. Tiga badan usaha lainnya dalam BANAS yaitu Badan Urusan Dagang (BUD), Badan Penguasaan Perusahaan Pharmasi (BAPHAR), dan Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru).[72] Perusahaan yang dinasionalisasi di Kediri yang berada di bawah penguasaan Badan Urusan Dagang (BUD) adalah NV Cultuur Mij Soerawinangoen, yang merupakan anak perusahaan dari NV Geo Wehry & Co. Setelah dinasionalisasi kegiatannya dilanjutkan oleh PT Triangle Corp.[73]

Gambar 4.3. Kompleks N.V. Mexolie Maatschappij tot exploitatie van Oliefabrieken te Kediri, Java. 1930-1938
Sumber: Koleksi Tropenmuseum

72 Darini dan Miftahudin, *op.cit.*, hlm. 6.

73 Wasino, dkk., *op.cit.*, hlm. 1004.

Gambar 4.4. Tanki Penampung Minyak Mexolie Kediri
Sumber: Koleksi Tropenmuseum

Kebijakan nasionalisasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan (2 Mei 1959) dan berlaku surut hingga 3 Desember 1957.[74] Salah satu pertimbangan pokok tindakan nasionalisasi adalah skala kepentingan. Perusahaan yang terkena nasionalisasi adalah perusahaan yang merupakan cabang produksi penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ada beberapa pasal yang menjadi dasar hukum terutama Undang-undang No. 86 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1957, No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.[75] Dengan kebijakan nasionalisasi dapat

74 ANRI, Arsip Koleksi Mr Bodan No 667.

75 Lihat Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda yang dikenai nasionalisasi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 31.*

dikatakan bahwa dominasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Kediri menghilang.

Berbeda dengan keberhasilan kebijakan nasionalisasi yang mencatat kisah sukses, kebijakan pemerintah untuk membangun kelas pengusaha nasional (bumiputera) yang kuat tidak berjalan sesuai harapan. Program Benteng yang dilaksanakan sejak 1950 hingga dihapuskan pada tahun 1957 untuk membangun kelas pengusaha bumiputera tidak menghasilkan capaian yang berarti.[76] Dalam Laporan Gubernur Bank Indonesia 1959-1960, disampaikan bahwa bantuan finansial yang diberikan pemerintah kepada kalangan pengusaha swasta yang luar biasa besar pada tahun 1950-an sebagian besar berakhir sia-sia. Program bantuan yang diberikan gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk memajukan kelas pengusaha bumiputera dan kemakmuran masyarakat, tetapi hanya menguntungkan segelintir individu dan menjadi beban berat pemerintah secara finansial.[77]

Memang perdagangan dan sektor-sektor perekonomian mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Kesempatan bagi aktivitas pedagang bumiputera untuk bergerak dan mengembangkan usaha lebih terbuka pada awal 1950-an. Jumlah pedagang Tionghoa untuk sementara berkurang karena sebagian dari mereka menjadi korban selama periode revolusi. Pada awal tahun 1950-an, menurut Geertz, memang terdapat pedagang Jawa dalam jumlah lebih banyak dibanding pada masa sebelumnya, tetapi tidak ada di antara mereka yang menjalankan usaha dalam skala yang besar.[78] Keterbatasan akses pada jaringan perdagangan berskala nasional dan internasional di kalangan kaum bumiputera menjadi salah satu faktor penting yang menghambat perkembangannya. Hal ini berbeda dengan para pedagang Tionghoa yang umumnya mempunyai jejaring lebih luas, bahkan pada masa sulit sekalipun, seperti pada jaman perang revolusi dimana blokade-blokade perdagangan diterapkan akses jaringan mereka masih tetap berlangsung.[79]

---

76 Howard Dick, V.J.H. Houben, J.Th. Lindblad dan Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 178.

77 Bank Indonesia, *Report of the Governor of the Bank Indonesia for the Financial Year 1959-1960* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 3.

78 Clifford Geertz, *op.cit.*, hlm. 88.

79 Kajian komprehensif tentang kegiatan bisnis Cina di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, lihat misalnya Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan* (Jogjakarta: Niagara, 2004).

Dalam sektor industri, peran komunitas Tionghoa dapat pulih kembali dengan cepat setelah berakhirnya periode revolusi. Pada tahun 1952, terdapat sebanyak 16 penggilingan padi di Keresidenan Kediri, dari jumlah ini hanya ada satu penggilingan milik orang Indonesia. Sementara itu, 15 penggilingan lainnya disebut dalam laporan sebagai milik asing, tetapi bisa dipastikan bahwa pemiliknya adalah orang-orang Tionghoa. Ke-16 penggilingan tersebut tersebar di empat kabupaten di Keresidenan Kediri, yakni tujuh di Kediri, enam di Blitar, dua di Tulungagung, dan dua lainnya di Nganjuk. Selain itu, di Keresidenan Kediri terdapat sebanyak 10 perusahaan percetakan, dengan sebaran tujuh di Kediri, dua di Blitar, dan satu di Tulungagung. Dari jumlah ini, delapan di antaranya adalah milik pengusaha Tionghoa. Terdapat industri tenun sebanyak 13 buah, tiga milik orang Indonesia dan 10 milik orang Tionghoa dengan 28 alat tenun mesin dan 1.556 alat tenun bukan mesin.[80]

Hanya dalam sektor pertanian rakyat pemulihan berlangsung relatif lebih cepat, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Hal ini secara umum dimungkinkan karena pemulihan sektor ini tidak memerlukan investasi untuk rehabilitasi infrastruktur dalam jumlah yang sangat besar.[81] Tanaman tebu rakyat menyediakan ilustrasi untuk fenomena ini. Pada akhir tahun 1950, luas tanaman tebu rakyat di Jawa Timur, di mana Kediri merupakan daerah terpenting untuk tanaman tebu rakyat, mencapai 11.216 hektar. Pada akhir tahun 1951, luasnya bertambah menjadi 15.699 hektar dan pada tahun 1952 diperkirakan mencapai 20.000 hektar. Area tanaman tebu rakyat jauh lebih luas dibanding pada masa Hindia Belanda karena beberapa alasan, termasuk di antaranya penghapusan peraturan-peraturan yang membatasi tanaman tebu rakyat terkait perlunya izin tanam dan giling terlebih dahulu, larangan penanaman tebu rakyat di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan tebu milik pabrik gula, dan larangan pengoperasian mesin penggiling dengan kekuatan di atas 10 pk. Penanaman tebu rakyat juga mendapatkan bimbingan teknis dari Djawatan Pertanian Rakyat dalam berbagai hal,

80 Republik Indonesia*, op.cit.,* hlm. 239-241.

81 Anne Booth, "Pertumbuhan dan Kemandegan dalam Era Pembangunan Bangsa, Penampilan Ekonomi Indonesia dari 1950-1965", dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terj. Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 486-487.

di antaranya contoh cara penanaman tebu yang baik, penggunaan bibit tebu yang bermutu tinggi, dan cara-cara penggilingan yang baik.[82]

Penanaman tebu rakyat didukung dengan keberadaan perusahaan penggilingan tebu. Perusahaan penggilingan tersebut menggunakan perlengkapan mesin dengan beragam bahan dari besi, kayu, maupun mesin. Keberadaan perusahaan penggilingan tebu tersebar di empat kabupaten di wilayah Keresidenan Kediri, dengan jumlah paling banyak di Kabupaten Tulungagung dan disusul Kabupaten Kediri di urutan kedua untuk jumlah keseluruhan. Akan tetapi, mayoritas perusahaan penggilingan dengan perlengkapan mesin yang paling banyak terdapat di Kabupaten Kediri, yakni enam mesin, sedangkan di Tulungagung sebanyak dua mesin. Data selengkapnya tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.
Perusahaan Penggilingan Tebu di Keresidenan Kediri pada Tahun 1952

Kabupaten	Banyaknya Gilingan Tebu			
	Besi	Kayu	Mesin	Jumlah
Kediri	52	488	6	546
Nganjuk	13	69	-	82
Tulungagung	31	1.634	2	1.667
Blitar	5	52	-	57
Jumlah	101	2.243	8	2.352

Sumber: Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Timur* (Surabaya: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 337.

Menurut kepemilikannya, perusahaan penggilingan tebu di Kediri dimiliki oleh pihak/kelompok etnik tertentu. Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa dari delapan penggilingan tebu dengan penggunaan mesin, tiga di antaranya adalah milik Djawatan Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur, sedangkan lima mesin lainnya dimiliki oleh pihak partikelir (swasta), baik petani kaya maupun koperasi keluarga. Tiga mesin penggilingan tebu milik Djawatan Pertanian keluarga ditempatkan di berbagai lokasi baik di Kediri maupun Tulungagung, yang detailnya

82 Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 335-336.

terdapat pada Tabel 4.4. Gilingan tebu swasta dimiliki baik oleh petani kaya maupun koperasi (Tabel 4.4).

Tabel 4.4.
Penyebaran Penggilingan Tebu Mesin Milik Djawatan Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur di Kediri

No	Tempat	Nama yang Ketempatan	Merk		PK	Tanggal Mulai
			Mesin	Gilingan		
1	Krandang (Kras) Kediri	H. Gozali	Yanmar	Sharat	8	17-9-1952
2	Gilang (Ngunut) Tulungagung	H. Suhadak	Yanmar	Vasant	16	14-9-1952
3	Tengur (Rejotangan) Tulungagung	H. Noor	Yanmar	Vasant	8	14-9-1952

Sumber: Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Timur* (Surabaya: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 337.

Tabel 4.5.
Lokasi Penggilingan Tebu Mesin Milik Swasta di Kediri

No	Tempat	Milik	Kapasitas 12 Jam/Kw		Mesin dan PK	Rendemen
			Tebu	Gula		
1	Wonotengah (Purwoasri) Kediri	Koperasi Keluarga (Kepala Desa Wonotengah)	108	15,12	Tangya (16PK)	14%
2	Mojokerto (Purwoasri) Kediri	Koperasi (Kelapa Desa Mojokerto)	64	6,4	Petter (10PK)	10%
3	Rembang (Ngadiluwih) Kediri	Amat Jasir (Petani Kaya)	276	33,12	Tangya (24 PK)	12%
4	Kanigoro (Kras) Kediri	H. Rais	133	16	M.W.M	12%
5	Pelas (Kras) Kediri	H. Irsad	84	7,6	M.W.M	9%

Sumber: Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Timur* (Surabaya: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 337.

Tanaman tebu yang diusahakan penduduk tidak hanya digilingkan di pabrik-pabrik penggilingan di atas, sebagian hasil panen dijual kepada pabrik-pabrik gula besar. Beberapa pabrik gula besar di Kediri sangat memerlukan tambahan input tebu untuk digiling dengan membeli

tanaman tebu penduduk karena terbatasnya kuantitas panenan tebu pada lahan-lahan perkebunan yang dikelola pabrik akibat terganjal persoalan lahan. Pembelian tetap dilakukan oleh pihak pabrik gula untuk menutup kebutuhan giling meskipun kualitas tebu rakyat lebih rendah dibanding dengan tebu-tebu yang dipanen dari lahan-lahan tanaman tebu perkebunan. Untuk memberikan bimbingan dan dukungan, termasuk fasilitas kredit, terhadap usaha penanaman tebu rakyat, pemerintah membentuk sebuah bagian baru, yakni Bagian Urusan Hubungan Petani dan Perkebunan Besar, di dalam Djawatan Perkebunan.[83] Melalui badan ini diupayakan agar penanaman tebu rakyat dapat lebih maju dengan hasil panenan yang lebih produktif dan semakin baik mutunya. Pada tahun 1958 dan tahun-tahun selanjutnya, misalnya PG Meritjan disebutkan masih banyak tergantung pada pasokan tebu hasil tanaman rakyat untuk digiling.[84]

Dalam sektor tanaman pangan, peningkatan juga terjadi. Data spesifik tentang Kediri terkait tanaman pangan sejauh ini sangat terbatas, tetapi impresi ini dapat ditarik berdasarkan pembacaan atas kecenderungan umum yang berlaku di/untuk Jawa secara keseluruhan. Kalkulasi yang dilakukan sejarawan ekonomi, Anne Booth menunjukkan tren meningkatnya produksi padi dan bahan pangan lain pada dekade 1950-an sebesar 2,6% untuk padi dan 2,8% untuk kelompok tanaman palawija (non-padi).[85] Peningkatan ini tidak terlepas dari fakta bahwa sejak awal tahun 1950-an pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan produksi pangan khususnya beras dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah adopsi bibit padi unggul yang dikenal dengan sebutan Padi Unggul Nasional (PUN), misalnya Bengawan, Sigadis, Remadja, dan Djelita.[86]

---

83 Republik Indonesia, *op.cit.,* hlm. 338.

84 Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2003), hlm. 123 (catatan kaki no 274).

85 Anne Booth, *Agricultural Development of a Frontier Region of Java* (Sydney: Allen and Unwin, 1988), hlm. 35; Nawiyanto, "The Politics of Food and Food Security during Indonesia's Old Order", *Lembaran Sejarah,* Vol. 10, No. 1 Tahun 2013, hlm. 67.

86 Sadikin Sumintawikarta, "Tjatatan tentang Penelitian Tanaman Pangan Antara Tahun 1945-1965", dalam M. Makagiansar (ed), *Research di Indonesia 1945-1965* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965), hlm. 70.

Dari berbagai varietas ini, jenis yang paling populer adalah padi Bengawan. Sejak diadopsi pertama kali pada awal 1950, varietas padi Bengawan melejit cepat popularitasnya dan menjadi padi terpenting yang paling banyak ditanam. Presiden Sukarno menyebut padi Bengawan sebagai padi yang "allround" karena resisten terhadap penyakit terutama mentek, menghasilkan beras bermutu tinggi, sangat enak rasanya, dan memberi produksi padi jauh lebih banyak dibanding dengan varietas-varietas lain.[87] Bahkan karena berbagai keunggulannya yang luar biasa, padi Bengawan pada zamannya digambarkan sebagai "padi atoom",[88] atribut atom menjadi sangat populer karena masyarakat dunia terpukau akan keluarbiasaan setelah kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki yang rata dengan tanah dalam sekejap dan berakibat Jepang terpaksa menyerah kepada Sekutu. Selain itu, dorongan adopsi padi "atoom" Bengawan, seiring anjuran Presiden Sukarno untuk meningkatkan produksi padi pada lahan kering, berbagai varietas padi gaga juga disebarluaskan, termasuk di antaranya Si Bandel, Bintang Ladang, Bimopakso, Bimokurdo, dan Retnodumilah. Varietas unggul lainnya adalah Padi Marhaen dan Padi Rajalele Baru.[89]

Laporan Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa penanaman padi Bengawan mendapat sambutan luar biasa di kalangan petani mulai dari Madiun hingga Banyuwangi, tidak terkecuali termasuk juga di wilayah Kediri yang berlokasi di sebelah timur Madiun.[90] Untuk memfasilitasi penyebaran bibit padi unggul di kalangan petani, Djawatan Pertanian Rakyat menggunakan balai-balai bibit untuk menyalurkannya. Pada tahun 1952, dilaporkan terdapat lima balai bibit di Kediri, yang mendistribusikan secara langsung bibit padi varietas Bengawan. Untuk Jawa Timur secara keseluruhan terdapat sebanyak 39 balai bibit. Melalui distribusi yang dilakukan oleh balai-balai bibit yang ada, jumlah area sawah yang ditanami padi Bengawan terus bertambah dengan cepat. Data untuk Jawa Timur menggambarkan bahwa pada tahun 1950 luas penanaman

87 "Presiden Sukarno: Soal Hidup atau Mati", *Almanak Pertanian 1953* (Jakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, 1953), hlm. 15.

88 Soepangkat Martodarsono, "Sepuluh Tahun Suka Duka dengan Padi Bengawan di Banjuwangi", *Pertanian*, 1, 9 (1958), hlm. 433.

89 Sadikin Sumintawikarta, *op.cit.*, hlm. 71.

90 Republik Indonesia, *op.cit.,* hlm. 274.

padi Bengawan di lahan sawah mencapai luas 46.492 hektar atau 27% dari baku sawah. Pada tahun 1951, luas tanaman padi Bengawan tumbuh menjadi 56.704 hektar atau sebesar 33% dari baku sawah dan pada tahun 1952 luasnya mencapai 84.500 hektar atau 48% dari baku sawah. Luas baku sawah pada periode 1950-1952 adalah sebesar 172.243 hektar.[91] Pada tahun-tahun berikutnya penanaman padi Bengawan terus meluas dan menjadi bagian penting dalam peningkatan produksi pada hingga akhir tahun 1950-an, ketika kebijakan politik nasional memasuki babak baru termasuk lahirnya ekonomi terpimpin.

IMPLEMENTASI EKONOMI TERPIMPIN

Krisis politik berkepanjangan yang diwarnai jatuh bangun kabinet, konflik antara partai yang menajam, pergolakan daerah, dan gerakan separatis telah mendorong Presiden Sukarno, dengan dukungan militer pada tahun 1957, mencetuskan gagasan tentang pemerintahan yang cocok dengan kepribadian Indonesia yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin.[92] Implementasi Demokrasi Terpimpin mendapatkan tonggak penting dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mencanangkan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada 9 Juli diumumkan pembentukan kabinet baru dengan Sukarno sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama, disusul dengan pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Ideologi yang mendasari Demokrasi Terpimpin seperti dikemukakan Sukarno pada pidato peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1959 adalah Manifesto Politik (Manipol). Melaluinya diserukan pembangkitan kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkelanjutan, yang pada awal 1960 ditambahi dengan nama USDEK yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.[93]

---

91 *Ibid*.

92 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indoensia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 533.

93 *Ibid.,* hlm. 552-553.

Penjabaran dari Sistem Ekonomi Terpimpin tampak dari berbagai pernyataan dan program kebijakan ekonomi, yang paling penting adalah Rencana Delapan Tahun Agustus 1960, dan Deklarasi Ekonomi (Dekon) bulan Maret 1963. Prinsip-prinsip Ekonomi Terpimpin secara umum menggariskan koordinasi dan regulasi oleh negara pada semua sektor ekonomi Indonesia (negara, swasta dan koperasi) untuk memastikan integrasi investasi dan produksi ke dalam tujuan dan kebutuhan sosial dan politik yang lebih luas. Kepemimpinan negara akan disediakan dalam wujud perencanaan pusat dan pengawasan atas distribusi, kredit, dan produksi melalui investasi negara langsung. Digariskan pula prinsip penghancuran terhadap imperialisme dan subordinasi kapital asing untuk tujuan sosial dan ekonomi nasional. Subordinasi kapital asing akan diraih melalui kombinasi penyitaan, preferensi pinjaman pemerintah ke pemerintah, dan dalam kasus investasi langsung tidak dapat dihindari, melalui usaha patungan dan perjanjian bagi hasil. Prinsip lainnya adalah penggantian perekonomian berbasis ekspor impor dengan perekonomian yang lebih mandiri.[94]

Dalam rangka membangun kemandirian ekonomi, Sukarno bermaksud membatasi modal asing di Indonesia dan menolak Indonesia dijadikan sebagai penyedia bahan mentah untuk negara-negara industri dan sebagai pasar bagi produk-produk mereka. Untuk mewujudkan gagasannya ini, Sukarno segera mencabut Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang disetujui Parlemen pada September 1958. Dalam kebijakan Ekonomi Terpimpin, semua elemen dituntut mengambil peran sebagai alat untuk mencapai tujuan revolusi, tidak terkecuali Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1960 yang mengatur tugas dan kebijakan tata kerja Bank Indonesia. Intinya BI harus menyesuaikan tugas dan tata kerjanya dengan amanat Presiden yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) pada tahun 1959.[95] Untuk mempertegas tugas dan kewajiban dunia perbankan sesuai dengan amanat baru, pada tahun

94 Richard Robinson, *Indonesia: The Rise of Capital in Indonesia* (Kuala Lumpur: Equinox, 2009), hlm. 71.

95 Tim Penulis Bank Indonesia, *Menudju Bank Berdjoang Tunggal* (Jakarta: Bank Indonesia Bagian Hubungan Masyarakat, 1965), hlm. 3.

1961 presiden juga membentuk Panitia Negara Perbankan yang bertugas menyusun Rancangan Undang-undang Perbankan dan Rancangan Undang-undang Bank Indonesia, yang berdasarkan asas-asas ekonomi terpimpin, bersih dari kolonialisme dan feodalisme.[96]

Perubahan penting dalam konteks reorganisasi BI tahun 1962 adalah tersusunnya enam urusan dalam lingkungan BI, yang semula hanya lima urusan. Keenam urusan tersebut meliputi: (1) Urusan Luar Negeri, dengan tugas mencakup dana devisen, luar negeri dan wesel, serta pengawasan; (2) Urusan Moneter mendapat tugas menangani pasar uang dan modal, pemerintah dan kredit, serta peredaran uang; (3) Urusan Pembangunan Ekonomi mendapat tugas dalam pengedaran kas, penyediaan dan pembuatan uang kertas, serta penyimpanan dan distribusi; (5) Urusan Riset, Ekonomi dan Statistik bertugas menyiapkan dokumentasi dan publikasi neraca pembayaran dan penelitian; (6) Urusan Umum dengan tugas meliputi bagian bangunan, biro direksi, pegawai, pendidikan, dan rumah tangga.[97]

Perubahan keorganisasian BI kembali dilakukan pada tahun 1963. Perubahan ini dilakukan sebagai konsekuensi atas dimasukkannya Gubernur Bank Sentral dalam kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Teuku Jusuf Muda Dalam yang telah diangkat menjadi Gubernur BI yang baru dibantu oleh empat direktur, yakni Oei Beng To, Rachmat Saleh, Sulwan S. Astradiningrat, dan Sulaksana Suparta. Dengan masuknya Gubernur BI dalam kabinet pemerintah, maka keberadaan Dewan Moneter yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1953 yang semula berperan dalam kerangka koordinasi dalam perumusan kebijakan moneter antara Pemerintah dengan Gubernur BI praktis tidak dapat berjalan. Dengan posisi sebagai menteri, Gubernur BI yang dapat menjalankan perintah Presiden secara langsung.[98] Struktur BI yang semula terdiri atas enam urusan berubah menjadi 11 urusan/biro. Kesebelas urusan tersebut, yaitu: (1) Urusan Administrasi, Organisasi, dan Inspeksi; (2) Urusan LAAPLN (Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar

96 *Ibid.*

97 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *op.cit.*, hlm. 113-114.

98 J. Soedradjad Djiwandono dan Binhadi *et al.*, (ed), *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966, Bank Indonesia Pada Masa Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 190-191.

Negeri dan Biro Devisen Perdagangan; (3) Urusan Luar Negeri; (4) Urusan Pembangunan Ekonomi; (5) Urusan Pembimbingan Bank-Bank; (6) Urusan Pengedaran dan Pencetakan Uang; (7) Urusan Perencanaan Kredit; (8) Urusan Perkreditan; (9) Urusan Riset; (10) Urusan Umum; dan (11) Biro Direksi.[99]

Struktur keorganisasian tersebut hanya berlangsung sebentar. Pada tahun 1965 keorganisasian BI kembali direorganisasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Struktur BI disederhanakan dari sebelas urusan menjadi delapan urusan. Bukan ini saja, Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah hendak diintegrasikan untuk mewujudkan konsep "Bank Berdjoang" guna mendukung program-program pemerintah secara langsung. Doktrin Bank Berdjoang yang terdiri atas lima butir diformulasikan sebagai "Panca Sakti Bank Berdjoang". Esensi dari doktrin ini adalah prinsip untuk menempatkan bank sebagai alat revolusi, bukan semata-mata lembaga pencari keuntungan sehingga kegiatan bank harus berdasarkan Deklarasi Ekonomi dan Manipol-USDEK dan mengintegrasikan perjuangan bank dengan perjuangan masyarakat.[100]

Pembagian tugas antara BI dengan bank-bank pemerintah lainnya dihubungkan secara langsung dengan program-program departemen/pemerintah sehingga semua bank berfungsi menjadi semacam "Bank Pembangunan". Sementara itu, BI mendapat tugas khusus dalam kaitan dengan penanganan pembiayaan proyek-proyek di luar APBN yang bermakna politis, seperti persiapan penyelenggaraan *Conference of the New Emerging Forces* (CONEFO), pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan pendirian Masjid Istiqlal, dan proyek-proyek yang bermakna ekonomi termasuk pembangunan Toserba Sarinah dan Perhotelan Banteng.[101] Tugas BI lainnya mencakup penyaluran kredit untuk perusahaan-perusahaan negara yang mengalami defisit karena berkenaan dengan fungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum pemerintah menetapkan harga produk lebih rendah dibanding biaya produksinya, termasuk pula kredit pada perusahaan-perusahaan vital

99 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *op.cit.*, hlm. 115-116.

100 *Ibid.*, hlm. 120-122.

101 *Ibid.*, hlm 147.

yang membutuhkan pendanaan sangat besar dengan pembayaran kembali yang tidak mungkin dilakukan dalam tempo singkat (lebih dari 3 tahun). Dukungan pendanaan berupa kucuran kredit terhadap BUMN pada periode 1958-1965 terus meningkat dari Rp2,2 miliar pada tahun 1959 menjadi Rp334,4 miliar pada tahun 1965,[102] seperti terlihat pada Tabel 4.6 . Selain itu, BI juga mendapat tugas untuk menangani kredit-kredit yang bersifat rintisan (*pioneering projects*) yang secara teknis sulit diakomodasi bank-bank lain, tetapi vital bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.[103]

Tabel 4.6.
Dukungan Dana dari Bank Indonesia dan Bank-Bank Pemerintah kepada BUMN 1958-1965

Tahun	Besaran Kredit (dalam miliar)	
	Bank Indonesia	Bank-bank Pemerintah
1958	-	1,9
1959	7,2	7,4
1960	7,3	10,7
1961	12,8	14,4
1962	20,6	27,2
1963	41,0	50,8
1964	82,2	131,5
1965	334,4	527,0

Sumber: Diadaptasi dari Budiono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2016), hlm. 99.

Pada 11 April 1965, BI dan perbankan di Indonesia lainnya kembali direorganisasi kearah sistem "Bank Tunggal". Maksud reorganisasi ini adalah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terpimpin. Reorganisasi ini dilakukan berdasarkan Penpres RI No. 8 tahun 1965 yang menetapkan bahwa dalam rangka penyederhanaan organisasi perbankan ke arah

102 Budiono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2016), hlm. 99.

103 Darsono, dkk., *op.cit.*, hlm 277. Tentang tugas Bank-bank Negara lainnya, lihat Noek Hartono, *Bank Indonesia Sejarah lahir dan Pertumbuhannya* (Jakarta: Bank Indonesia, 1976), hlm. 147-148.

organisasi yang bersifat tunggal, ditetapkan pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dengan penetapan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral. Sebagai tindak lanjut, bank-bank milik negara diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1965 secara resmi dibentuk "Bank Tunggal", yang selanjutnya berubah nama menjadi "Bank Negara Indonesia" (BNI) dan mulai berlaku sejak 17 Agustus 1965. Dengan perkembangan ini, bank-bank umum milik negara dimasukkan ke dalam unit-unit BNI yang secara lengkap tersaji dalam Tabel 4.7.[104]

Tabel 4.7.
Susunan Perubahan Nama pada Bank Tunggal

No	Nama Asal	Nama Perubahan
1.	Bank Indonesia	BNI Unit I
2.	BKTN (Bank Kredit Tani dan Nelayan)	BNI Unit II
3.	BNI	BNI Unit III
4.	BUN (Bank Urusan Negara)	BNI Unit IV
5.	BTN	BNI Unit V

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965,* hlm. 62.

Dalam sistem Bank Tunggal ini, pimpinan BI menjadi pimpinan BNI Unit I dan terdiri dari Menteri Urusan Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam, para Gubernur Pengganti dijabat oleh M. Djoeana Koesoemahardja, R. Hertatijanto, Brigjen. Soehardi, dan Rachmat Saleh. Para direktur terdiri atas R. Sulaksana Soeparto, Oey Beng To, S. Kertopati, R.A. Kartadjoemena, dan Sulwan S. Astradiningrat.[105]

Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dalam konteks sistem Bank Tunggal tidak berlangsung lama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia membawa arah baru bagi peran BI sebagai bank sentral murni dan otoritas moneter otonom mitra kerja pemerintah pada masa Orde Baru. Perubahan ini berkaitan setidaknya

104 Darsono dkk., *op.cit.*, hlm 280.

105 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *op.cit.,* hlm. 123-128.

dengan dua alasan pokok. Pertama adalah pekerjaan bank yang bertambah besar volume dan ragamnya. Alasan kedua adalah adaptasi menuju pelaksanaan fungsi-fungsi bank sentral sebagai *the banker's bank* dan *lender of the last resort* dengan meninggalkan fungsi komersial, sehingga BI dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan bank-bank, pasar uang, dan pasar modal.[106] Dengan peraturan baru tersebut BI meninggalkan fungsi utama yang diperankan pada periode 1953-1959 dan 1959-1966, dari pemberi kredit kepada swasta pada dasawarsa 1950-an ke pemberi kredit kepada proyek-proyek pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara pada dasawarsa 1960-an.

Perubahan juga sempat terjadi dalam sistem pelaporan yang dibuat BI. Laporan Tahunan Bank Indonesia tidak diterbitkan sejak tahun 1960. Penerbitan Laporan Tahunan Bank Indonesia yang terakhir adalah laporan untuk pembukuan tahun 1959-1960. Laporan BI untuk tahun berikutnya, yakni tahun 1960-1961 dibatalkan penerbitannya karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1/M/61 tertanggal 6 Januari 1961, Bank Indonesia tidak lagi mengumumkan dan menerbitkan angka-angka statistik moneter/perbankan maupun laporan tahunan seperti biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan pelarangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D. 15.1.1.37 tanggal 28 Desember 1966, maka laporan tahunan BI kembali diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan pada periode laporan tahunan yang dibatalkan penerbitannya, Bank Indonesia menerbitkan laporan 5 tahunan, yakni untuk Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965.[107] Laporan ini diterbitkan pada tahun 1968 setelah diberlakukan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 mengenai Pemisahan Tugas dan Kedudukan Bank Sentral dari Fungsi Komersial.

Kondisi perbankan menjelang tahun 1960 secara umum tidak sehat. Banyak bank swasta mengalami kesulitan likuiditas akibat tingginya inflasi dan persaingan tidak sehat antar bank karena banyaknya jumlah bank-bank swasta. Untuk menyehatkan dunia perbankan yang tengah bermasalah, terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tanggal 19 September 1959.

106 *Ibid.,* hlm. 118.

107 Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965*. Lihat pula Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Pembukaan 1959-1960*.

Salah satu poinnya adalah tentang penghentian perizinan pendirian bank umum dan bank tabungan swasta yang diberlakukan dari tahun 1960 hingga 1964. Selama penghentian pemberian perizinan, pemerintah mengarahkan kebijakan pada perubahan persyaratan modal, kepemilikan, dan kepengurusan bank untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.[108] Perizinan dibuka kembali pada tahun 1964 dengan ketentuan bahwa bank umum hanya diizinkan untuk daerah di luar kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang, dan Makassar), untuk bank tabungan tidak ada pembatasan tempat. Bank asing juga diberi kesempatan membuka cabang/perwakilan, dengan ketentuan terbatas di Jakarta dan tidak boleh menggalang dana dari masyarakat dalam negeri melalui giro dan deposito. Pelonggaran dalam pembukaan bank disertai ketentuan bahwa semua saham harus dikeluarkan atas nama WNI atau badan hukum Indonesia milik WNI dengan tujuan mencegah penyusupan elemen-elemen asing dan dominasi kelompok tertentu atas bank swasta nasional.[109]

Perizinan pembukaan bank baru diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Menteri UPBMS No. 11/64/Kep MUPBMS tanggal 10 Mei 1964. Peraturan ini berisi ketentuan tentang persyaratan modal dan persyaratan tambahan untuk pembukaan cabang atau perwakilan bank umum. Terkait tambahan modal dibayar dan atau cadangan bebas yang sebelumnya sebesar Rp500.000 untuk setiap cabang atau perwakilan, berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 38 tertanggal 20 September 1958, besarannya berubah tergantung lokasi, yakni sebesar Rp25 juta untuk pembukaan cabang Jakarta, sebesar Rp15 juta untuk pembukaan di Kota Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, dan Makassar sebesar Rp15 juta, dan sebesar Rp5 juta untuk kota-kota lainnya. Ketentuan lainnya adalah bahwa 30% dari jumlah tambahan modal dibayar dan atau cadangan bebas harus ditanam menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pembukaan cabang atau perwakilan bank umum tersebut kepemilikan dan kepengurusannya tidak boleh merupakan organisasi yang terpisah dari kantor pusatnya.[110]

108 J. Soedradjad Djiwandono dan Binhadi et al (ed), op.cit., hlm. 155.

109 *Ibid*.

110 Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965,* hlm. 60.

Kesempatan yang dibuka pemerintah bagi bank-bank untuk mendirikan kantor cabang mendapat tanggapan positif dari pelaku perbankan di Jawa Timur, terbukti dengan adanya penambahan kantor-kantor cabang bank. Seperti tersaji dalam Tabel 4.8, pada periode 1961-1964 hanya terdapat tiga kantor pusat dengan 18 kantor cabang bank swasta di Jawa Timur. Pada tahun 1964, jumlah kantor cabang meningkat tajam dengan penambahan tujuh buah kantor cabang dalam waktu setahun saja sehingga total terdapat 25 kantor cabang bank swasta di Jawa Timur.

Tabel 4.8.
Pertumbuhan Bank Swasta Nasional di Provinsi Jawa Timur 1960-1965

Provinsi	1961		1962		1963		1964		1965	
	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC
Jawa Timur	3	18	3	18	3	18	3	18	3	25

Keterangan: KP (Kantor Pusat), KC (Kantor Cabang).

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 diketahui bahwa lokasi pendirian kantor-kantor cabang bank swasta nasional hingga tahun 1965 terutama berlokasi di Surabaya dan Malang. Pada tahun 1966, muncul cabang baru bank swasta di Kota Jember, sedangkan di Kota Kediri pembukaan cabang bank baru terjadi pada tahun 1967. Cabang bank swasta yang pertama berdiri di wilayah Keresidenan Kediri adalah Bank Pasar.[111]

Tabel 4.9.
Pertumbuhan Bank Swasta Nasional di Kota-Kota Besar di Provinsi Jawa Timur 1965-1967

No	Kota	1965			1966			1967		
		KP	KC	KR	KP	KC	KR	KP	KC	KR
1	Surabaya	4	20	2	5	23	2	7	26	-
2	Malang	-	6	-	-	6	-	1	8	-
3	Jember	-	-	-	-	1	-	-	1	-
4	Kediri	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Keterangan: KP (Kantor Pusat), KC (Kantor Cabang), KR (Kantor Representatif).

Sumber: Bank Negara Indonesia Unit I, *Laporan Tahun Pembukuan 1966-1967,* hlm. 40.

111 Arsip Bank Indonesia, KS.01.04, *Laporan Singkat Bank Indonesia Tjabang Kediri Pada Rapat Kerdja Pemimpin2 Tjabang Pada Tanggal 24 Maret s/d 29 Maret 1969* (Djakarta: Bank Indonesia, 1969), hlm. 1.

Dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 11-19 September 1967 muncul usulan dari Kepala BI cabang Kediri, M.A. Soeradi tentang perlunya pendirian Bank Bumi Daya cabang Kediri. Usulan ini disampaikan dengan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan suplai uang mengingat banyaknya perkebunan di wilayah Keresidenan Kediri dan sebagian perkebunan disebutkan suplai uangnya masih dikirim dari Surabaya. Akan tetapi, hingga akhir 1968 usulan ini tampaknya masih menjadi bahan pembicaraan dan belum direalisasikan. Pembukaannya juga sangat tergantung pada pertimbangan pimpinan Bank Bumi Daya yang bertugas menangani sektor perkebunan. Menggaris bawahi penegasan R. Soekandir Tedjasoekarta, inspektur perkebunan di wilayah eks Keresidenan Kediri dan Madiun, Pimpinan BI cabang Kediri R. Soeroto Dono menyatakan bahwa sektor perkebunan terutama perkebunan swasta dengan areal kurang lebih seluas 22.400 hektar atau 86% dari luas keseluruhan area perkebunan di Kediri sangat memerlukan kredit untuk peremajaan tanaman di kebun-kebun maupun pembaruan permesinan pabrik.[112]

Pada tahun 1968, pemerintah kembali mengeluarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pendirian bank baru di daerah. Hal ini dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 603/M/IV/12/1968. Dalam surat keputusan disebutkan bahwa izin terkait usaha mendirikan bank hanya diberikan apabila daerah yang menjadi lokasi pendirian masih membutuhkan tambahan bank dan apabila pendiri bank tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan seperti permodalan, bentuk hukum, pimpinan, pegawai, serta kelengkapan usaha yang memenuhi kriteria minimal bagi suatu bank.[113] Syarat penyertaan modal yang harus dipenuhi dalam pendirian bank baru bervariasi berdasarkan jenis bank dan lokasi pendirian. Berdasarkan ketentuan yang baru, pendirian bank di wilayah Kediri diharuskan membayar penyertaan modal minimal sebesar Rp10 juta untuk jenis bank umum dan bank pembangunan dan sebesar Rp5 juta untuk jenis bank tabungan. Menurut laporan tahunan Bank Negara Indonesia Unit I tahun 1968, di Jawa Timur terdapat 103 bank umum, yang

112 *Ibid.,* hlm. 2.

113 Bank Negara Indonesia (Unit I), *Laporan Tahun Pembukuan 1968,* hlm. 33.

terdiri atas 64 bank umum negara dan 39 bank swasta.[114] Sementara itu, pada akhir 1968 di Kota Kediri terdapat tiga bank milik pemerintah, yakni Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, dan Bank Rakyat Indonesia. Selain ketiga bank ini, di wilayah kerja BI cabang Kediri terdapat bank-bank lain yang beroperasi di luar Kota Kediri yang berjumlah sebelas, yakni dua cabang Bank Negara Indonesia 1946, dan sembilan cabang Bank Rakyat Indonesia. [115]

Selain terjadi perkembangan menyangkut keorganisasian perbankan seperti yang telah diuraikan di depan, kebijakan ekonomi terpimpin mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BI di tingkat daerah. BI cabang Kediri sebagai perpanjangan dari BI Pusat yang ada di daerah juga melaksanakan tugas dan fungsi BI berdasarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan kemandirian ekonomi yang digariskan dalam amanat Presiden untuk membangun ekonomi di atas kaki sendiri (Berdikari). Dalam kaitan dengan bidang perdagangan luar negeri, implementasi Dekon dan Berdikari dilaporkan masih terbatas. Menurut pimpinan BI cabang Kediri, R. Soeparto Wignjasubrata, hal ini karena wilayah kerja BI cabang Kediri tidak mempunyai pelabuhan sendiri dan hanya berperan sebagai wilayah produksi, sedangkan direksi dan kantor-kantor pusat perusahaan berkedudukan di luar Kediri, sebagian perusahaan lainnya menjual produk-produk mereka kepada para pedagang pengumpul yang berlokasi di Surabaya.[116]

Dalam kaitan dengan pembangunan kemandirian bidang sandang, problem besar yang dihadapi wilayah Kediri adalah keterbatasan bahan baku sandang berupa benang tenun pada pertengahan 1960-an. Seriusnya problem ini tampak antara lain dari perbedaan harga yang sangat besar antara harga resmi benang tenun sebesar Rp200.000 per bal, sedangkan harga di pasar tercatat sebesar Rp1,8 juta. Harga benang tenun yang sangat mahal disebabkan terbatasnya suplai benang impor karena impor bahan baku benang tenun sulit dilakukan akibat

114 *Ibid.,* hlm. 36-39.

115 Arsip Bank Indonesia, KS.01.04, *Laporan Singkat Bank Indonesia Tjabang Kediri Pada Rapat Kerdja Pemimpin2 Tjabang Pada Tanggal 24 Maret s/d 29 Maret 1969* (Djakarta: Bank Indonesia, 1969), hlm. 1.

116 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 3.

terbatasnya devisa negara. Mayoritas pemasukan benang tenun impor merupakan utang yang diperoleh negara dari beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia khususnya negara-negara sosialis. Karena sikap pemerintahan Sukarno yang anti kapitalisme Barat, relasi ekonomi Indonesia termasuk soal bantuan utang luar negeri lebih condong untuk bersandar pada negara-negara sosialis di Eropa Timur dan RRC yang secara kapasitas permodalan juga relatif terbatas. Hingga tahun 1966, sekitar 60% utang Indonesia berasal dari negara-negara blok sosialis.[117] Seretnya suplai bahan baku mempersulit para pelaku usaha pertenunan dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan produksi dengan kapasitas penuh. Dilaporkan sebagian besar perusahaan tenun hanya beroperasi sebesar seperempat dari kapasitas yang mereka miliki akibat ketidak-pastian aliran pasokan bahan baku. Penyelesaian problem pasokan benang tenun, menurut pimpinan BI Kediri, perlu dilakukan dengan cepat yakni barang segera dikirim ke perusahaan pertenunan ketika pembayaran via bank sudah dilakukan, selain penyesuaian lokal dengan mempertimbangkan usaha pertenunan di Kediri merupakan usaha kerajinan rakyat, bukan usaha besar.[118]

Problem juga dihadapi dalam membangun kemandirian sektor pangan dalam kerangka kebijakan ekonomi terpimpin di wilayah Kediri. Menurut pimpinan BI Kediri, di Madiun yang merupakan bagian dari wilayah kerjanya terjadi kekurangan stok pangan pada tahun 1965 sebanyak 26.866 ton. Produksi beras perkapita hanya sebesar 151,34 kilogram, sedangkan kebutuhan minimum per kapita sebesar 160 kilogram. Dalam kerangka penyelesaian problem ini, pimpinan BI Kediri melalui Surat No. 12/4/UP/Kred. Rhas tanggal 30 Desember 1964 telah meneruskan permintaan pemerintah Kabupaten Madiun kepada Direksi BI berkaitan dengan pengajuan kucuran kredit untuk menyelesaikan pembangunan pabrik beras yang mangkrak karena kekurangan dana. Pimpinan BI Kediri juga menyampaikan keprihatinan atas persoalan pupuk yang terbatas ketersediaannya, padahal kebutuhan pupuk di kalangan petani sangat tinggi karena para petani sudah "pupuk-minded", tidak perlu lagi

117 Howard Dick, V.J.H. Houben, J. Th. Lindblad, dan Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 189.

118 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 3-4.

didorong-dorong untuk menggunakan pupuk seperti pada awal tahun 1960-an. Penyelesaian soal pupuk yang memihak dan menguntungkan kaum petani digambarkan sebagai mutlak dan mendesak. Pimpinan BI melakukan penjajakan kepada para pimpinan daerah di wilayah kerja BI Kediri tentang kebutuhan bantuan kredit untuk proyek-proyek yang bersifat "pioneering" dan perencanaan pembangunan daerah.[119]

Dalam sektor perkebunan, penggiatan produksi ekspor wilayah Kediri dinilai sangat prospektif dengan mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki pada masa Hindia Belanda. Untuk membangun kembali kapasitas produksi sektor ini, pimpinan BNI cabang Kediri mengusulkan dilakukan pembukaan cabang Bank Umum Negara di Kediri. Keberadaan cabang bank ini dipandang sangat penting untuk memfasilitasi penilaian secara mendalam atas kebutuhan kredit, besaran kredit, serta pengawasan kredit yang dikucurkan.[120] Dalam surat No 12/1/Biro Rhs. Tgl 17/9-1964 dan Surat No. 12/4/UP/Kred.Rhs. tanggal 30/12-1964 yang dikirim kepada Direksi BI Pusat, pimpinan BI cabang Kediri telah menyampaikan berbagai pandangan dan usulan terkait kredit proyek-proyek "pioneering" di wilayah kerjanya, yakni (1) untuk wilayah Kabupaten Kediri meliputi *pilot project* penanaman kapas seluas 20 hektar, perkebunan karet dan kopi, serta perbaikan jalan; (2) untuk Kabupaten Tulungagung berupa pengembangan pabrik keramik, pabrik genteng dan pembakaran kapur, serta perkebunan kapuk; (3) untuk Kabupaten Trenggalek meliputi pabrik genteng, pembangkit tenaga listrik, perbaikan jalan, gedung kesenian, rumah penginapan, apotek, pasar ikan di Prigi, dan perumahan pegawai; (4) untuk Kota dan Kabupaten Blitar meliputi perkebunan kopi/karet Kulonbambang, perbaikan stasiun opelet, dan perbaikan pasar; (5) untuk Kabupaten Madiun berupa penggilingan beras di Caruban.[121]

Selain itu, BI cabang Kediri menyebutkan perkembangan kredit yang tersedia untuk mendanai proyek *pioneering* berupa proyek jarak (*ricinus communis*) di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp2,5 juta. Proyek ini merupakan bagian dari implementasi semboyan Bank Berdjoang di wilayah kerja BI cabang Kediri dengan tujuan memperbaiki taraf kehidupan

119 *Ibid*, hlm. 5-6.

120 *Ibid.*

121 *Ibid.*, hlm. 10-12.

masyarakat di daerah yang menjadi langganan paceklik akibat kondisi lahan pertanian mereka yang tandus dan kering, penduduk yang besar, dan relatif terisolasi dari segi perhubungan. Proyek ini sekaligus bertujuan untuk menggali kemampuan produksi produk-produk berorientasi pasar ekspor dan dalam rangka membangun keswasembadaan dalam berbagai bidang. Jarak merupakan produk yang bernilai ekspor terutama untuk pasar Jepang. Proyek yang dibiayai oleh Bank Indonesia cabang Kediri ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari proyek jarak yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang dibiayai oleh BKTN, tetapi gagal karena keterlambatan dalam penanaman dan akibat bencana banjir. Pendanaan proyek jarak pada tahun kedua yang dilaksanakan pada 1965 diambil alih oleh Bank Indonesia cabang Kediri. Sebagai proyek *pioneering*, penanaman jarak di Kabupaten Trenggalek belum biasa dilakukan sehingga pihak BI dan pelaksana proyek juga memberikan motivasi dan penyadaran kepada penduduk bahwa penanaman jarak berguna bagi kehidupan mereka dan berguna pula untuk negara. BI cabang Kediri juga telah mengucurkan premi peremajaan perkebunan karet kepada empat perusahaan perkebunan, yakni Perkebunan Gambar, Perkebunan Sengon, Perkebunan Ngrangkah Pawon, dan Perkebunan Tretes. Total area peremajaan karet yang dibayarkan preminya adalah seluas 200 hektar pada tahun 1961-1962, dengan besaran premi Rp24.000/hektar, dan pemberian premi untuk tahun 1963-1964 masih dalam proses pencairan dan diharapkan terjadi penambahan besaran premi perangsang yang diberikan. [122]

Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pembinaan bank-bank oleh Bank Indonesia cabang Kediri masih terbatas. Alasan utamanya adalah jumlah bank di wilayah kerja BI cabang Kediri masih sedikit. Dalam laporan pimpinan BI Cabang Kediri, Suparto Wignjasubrata, yang dibuat pada bulan Mei tahun 1965 disebutkan bahwa di wilayah kerjanya hanya terdapat satu bank pegawai dan tidak terdapat cabang-cabang bank swasta. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan produksi perkebunan dan industri di wilayah Kediri dalam rangka kemandirian ekonomi yang berdikari, Wignjasubrata mengusulkan pembukaan cabang-cabang bank di wilayah kerjanya sehingga kebutuhan kredit untuk

122 *Ibid.*, hlm. 13.

pengembangan usaha tidak harus lagi diberikan melalui cabang-cabang bank yang terdapat di Surabaya. Menurut Wignjasubrata, cabang-cabang bank yang perlu dibuka di wilayah kerjanya adalah cabang BUNEG dan cabang BNI di Kota Kediri, sedangkan di Kota Madiun atau Ponorogo perlu dibuka cabang BNI dan satu cabang bank swasta.[123] Usulan tersebut disampaikan selaras dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Menteri UBS dan UPBMS terkait pembukaan cabang-cabang bank baru baik milik pemerintah maupun swasta dalam rangka mengakselerasi pembangunan. Untuk menopang sirkulasi uang di wilayah kerja BI cabang Kediri disebutkan baru terdapat Bank Indonesia dan BKTN di Kediri, serta BKTN di Madiun, ditambah kantor-kantor BKTN di ibu kota kabupaten,[124] dan jumlah ini dipandang belum memadai untuk mengakselerasi pembangunan daerah sehingga perlu ditambah lagi dengan cabang-cabang baru.

KONDISI SOSIAL-EKONOMI KEDIRI

Dengan berakhirnya periode revolusi dan berakhirnya konflik bersenjata kembalinya zaman normal tanpa perang dan pertempuran, kesempatan kembali terbuka bagi sektor perkebunan di wilayah Kediri untuk memulihkan diri dan mulai beroperasi kembali. Dalam praktik di lapangan, proses ini tidak selalu berjalan mudah. Kehadiran kembali perusahaan-perusahaan perkebunan dihadapkan pada lingkungan sosial-politik yang baru, selain kebutuhan mendesak untuk merehabilitasi kerusakan-kerusakan infrastruktur produksi. Aset-aset tanah yang vital sebagai faktor produksi perkebunan banyak yang telah berpindah tangan dan dikuasai oleh penduduk. Karena euforia kemerdekaan dan dihadapkan pada kebutuhan lahan, penduduk telah mengambil alih banyak tanah-tanah perkebunan sebagai ekspresi kemerdekaan dan kebebasan dari tatanan dan ikatan kolonial yang dianggap tidak adil dan menindas. Pemulihan kembali sektor perkebunan terutama milik

123 *Ibid.*, hlm. 12-13.

124 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 13.

Belanda diwarnai ketidakpastian di tengah gejolak aspirasi nasionalisasi dan maraknya okupasi tanah-tanah perkebunan oleh sejumlah pihak yang berlarut-larut proses penyelesaiannya. Kendala-kendala ini membuat sektor perkebunan sulit untuk dapat pulih kembali seperti pada masa kejayaannya di era Hindia Belanda sebelum perang.

Dalam kasus perkebunan tebu, beragam faktor membelit upaya pemulihan kegiatan produksinya. Manajemen perkebunan tebu di wilayah Kediri secara umum hanya menguasai sekitar separuh dari lahan yang pernah dikuasainya di zaman normal sebelum perang. Persoalan lahan menjadi isu sentral dalam pemulihan industri gula Kediri. Untuk sementara, dalam memenuhi kebutuhan tebu dan peningkatan produksi gula yang ditargetkan oleh pemerintah, pabrik-pabrik gula banyak bergantung pada tebu yang dibeli dari penduduk yang berkualitas rendah. Selain karena persoalan teknis manajerial, seperti dikemukakan Hermawan Sulistyo, turunnya produksi gula di wilayah Kediri juga berkaitan dengan faktor-faktor sosial-politik. Empat faktor penting dalam kategori ini yaitu: (1) perselisihan kontrak sewa lahan; (2) suplai tebu yang berasal dari petani (tebu rakyat/penduduk); (3) ketersediaan pekerja sementara khususnya pada musim panen dan giling; dan (4) konflik-konflik politik yang muncul karena keterlibatan dalam keanggotaan serikat buruh.[125]

Pabrik Gula Ngadiredjo memberikan ilustrasi yang baik mengenai sulitnya menampilkan kembali kapasitas produksi seperti zaman Hindia Belanda akibat persoalan lahan. PG Ngadiredjo adalah pabrik gula besar milik HVA di Kediri. HVA diberitakan mempunyai tanah berdasarkan hak *erfpacht* kurang lebih seluas 16.500 hektar dan sekitar 12.000 hektar lahan telah diduduki dan digunakan penduduk secara tidak sah pada masa revolusi. *Java Bode* memberitakan 4.500 hektar tanah HVA masih dikuasai secara ilegal oleh penduduk.[126] Kembalinya PG Ngadiredjo ke tangan HVA segera berhadapan dengan persoalan agraria yang rumit. Upaya-upaya untuk pengambilalihan kembali tanah-tanah oleh perusahaan untuk penanaman tebu telah memicu serangkaian aksi, ketegangan, dan konflik berlarut-larut dengan pihak rakyat yang telah mendudukinya. Ketegangan yang berujung terjadinya serangkaian kekerasan, perusakan

125 Hermawan Sulistyo, *op.cit.*, hlm. 123-124.

126 *Java Bode,* 24 Mei 1954.

dan korban jiwa telah memaksa pelibatan aparat keamanan dalam penanganan, dan banyak menyita perhatian Kementerian Urusan Agraria di Jakarta. Penyelesaian secara tuntas belum tercapai hingga PG Ngadiredjo dinasionalisasi dan menempatkannya secara de facto di bawah pengendalian militer.[127]

Persoalan kurangnya lahan akibat konflik tanah tidak hanya dihadapi PG Ngadiredjo saja, melainkan juga menjadi problem perusahaan-perusahaan perkebunan tebu lainnya di Kediri. Upaya penambahan lahan untuk tanaman tebu melalui sewa tanah milik petani juga tidak selalu berjalan mulus. Manajemen pabrik gula tidak memiliki cukup modal untuk menyewa lahan dan melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan. Memang dengan dikeluarkannya Undang-undang Sewa Tanah pada tahun 1960 memberikan jaminan bagi pabrik gula berupa akses pemerolehan lahan untuk penanaman tebu, tetapi di dalamnya juga diatur perlunya proses mediasi ketika muncul perselisihan antara pabrik dengan pemilik tanah. Perselisihan terjadi seiring dengan maraknya kampanye politik yang dilakukan berbagai kelompok yang berafiliasi pada partai-partai politik tertentu guna berebut pengaruh dan pendukung. Situasi demikian memunculkan tekanan-tekanan dan kesukaran-kesukaran tersendiri bagi manajemen pabrik gula karena harus menghadapi faktor sosio-politis untuk operasinya, ketimbang sebatas persoalan teknis dan lingkungan alam. Manajemen pabrik dituntut menguasai baik aspek teknis maupun sosial-politik untuk mendukung kinerja dalam pemulihan perusahaan perkebunan tebu atau yang diistilahkan pada masa itu sebagai kecakapan "manipolis",[128] sebuah adopsi dari jargon politik Presiden Sukarno yang secara sederhana diartikan memiliki kesadaran politik dan revolusioner. Mereka yang dipandang tidak manipolis rentan digoyang untuk dilengser dari posisinya sebagai manajer pabrik, seperti yang dialami oleh Kartawidjaja, yang menjabat manajer PG Ngadiredjo, yang dituntut pemecatannya oleh anggota-anggota Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), KBG dan SBG, serta diusulkan untuk digantikan oleh mantan direktur Djokosudibyo.[129]

127 G. Roger Knight, *op.cit.,* hlm. 406-409.

128 Hermawan Sulistyo, *op.cit.*, hlm. 122-123.

129 *Ibid,* hlm. 124.

Aktivisme politik yang menyelimuti dunia perkebunan dan menjadi faktor yang ikut menyandera pemulihan kapasitas produksi perkebunan tidak lepas dari gencarnya agitasi-agitasi politik di wilayah Keresidenan Kediri. Media populer yang banyak digunakan untuk membangkitkan agresivitas masyarakat di antaranya adalah seni pertunjukan. Politisasi ludruk dengan agenda-agenda politik tidak jarang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat misalnya dengan mengusung cerita tentang "tujuh setan" yang dipadankan sebagai tujuh musuh rakyat. Ujung cerita digambarkan berakhir dengan kemenangan petani. Himpunan Seni Budaya Indonesia (HSBI), sebuah kelompok teater yang beraliran kiri, disebutkan menyelenggarakan tiga kali pentas keliling di Kabupaten Kediri. Penggunaan ludruk untuk propaganda semacam ini pada satu sisi mendekatkannya pada kehidupan sekuler para buruh, memberi ruang dalam acara-acara buruh pabrik antara lain pada saat pabrik gula buka giling atau tutup giling dan memenangkan simpati mereka, tetapi pada sisi lain juga menjauhkan ludruk dari kalangan penggemarnya yang religius. Dalam perkembangannya, politisasi pertunjukan ini ikut membentuk identitas budaya dan pandangan politik yang berbeda. [130]

Kendala-kendala untuk pemulihan tidak hanya dihadapi sektor perkebunan gula, melainkan juga dihadapi oleh perusahaan perkebunan yang mengusahakan tanaman lain. Hampir semua perusahaan bekerja dengan mesin-mesin warisan perang. Sebagian perusahaan perkebunan yang bergerak dalam penanaman kopi, karet, dan tanaman lainnya belum mampu merehabilitasi tanaman-tanaman lama yang telah rusak sejak zaman revolusi maupun telah menua sehingga tidak produktif. Kalaupun produksi masih dapat berlangsung, hasil-hasilnya sebagian besar diperoleh dari sisa-sisa tanaman lama.[131] Masih banyak lahan perkebunan yang terlantar dan belum diusahakan secara produktif. Secara garis besar, area lahan perkebunan kopi yang sudah diusahakan untuk penanaman belum ada sepertiganya, sebagian besar lahan justru masih terlantar atau belum diusahakan. Gambaran secara detail kondisi masing-masing perkebunan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

130 *Ibid.*, hlm. 127-128.

131 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 14.

Tabel 4.10.
Perkebunan Kopi di Keresidenan Kediri pada Tahun 1962

Pengelola	Nama Perkebunan	Areal	Areal Yang Diusahakan (ha)	Produksi (ton)
PPN	1. Ngrangkah Pawon/ Badek	2.632	689	58,7
	2. Satak	1.429	731	427,2
	3. Penataran	360	58	7,4
Swasta Nasional	4. Mangli	299	254	89,2
	5. Tjandisewu	619	540	261,3
	6. Gambar	854	302	117,6
	7. Sengon	529	98	25,4
	8. Kawisari	3.412	335	169,8
	9. Swambuluroto	609	171	62,4
Pekerja Perkebunan	10. Pakelan	499	57	-
	11. Margomuljo	385	226	48,4
	12. Karanganjar	377	218	128,3
	13. Karangnongko	296	82	62,2
	14. Djurangbanteng	326	130	69,5
	15. Njutjur	518	150	45,1
	16. Ngusu	381	200	141,4
	17. Rotoredjo	254	65	31,4
	18. Pidjiombo	312	220	106,1
	19. Kulonbambang	936	221	74,6
Total		**15.027**	**4.747**	

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Kode KS 0104, JR P, *Laporan Pemimpin Tjabang Surabaya, Malang, Kediri, Djember pada Konperensi Para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat pada tgl. 25 Nopember 1963-30 Nopember 1963* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm.16-17.

Berbagai persoalan yang dihadapi membuat perkembangan sektor pertanian pangan pada tahun 1960-an juga belum seperti yang banyak diharapkan. Pada awal tahun 1964, terjadi kelangkaan beras di Kediri. Kelangkaan ini terjadi akibat masa paceklik berat pada tahun 1963 yang disebabkan oleh musim kemarau yang sangat panjang dan serangan

hama tikus yang merajalela di wilayah Kediri.[132] Tabel 4.11 menunjukkan penurunan luas panen dan produksi padi secara drastis di Keresidenan Kediri. Luas panen berkurang secara tajam, mencapai hampir 35.000 hektar pada tahun 1963 dan 1964 dibanding tahun 1962, demikian pula produksi padi anjlok kurang lebih sebesar 280.000 ton. Tren penurunan juga terjadi pada komoditas jagung, yang area panennya berkurang sekitar 13.000 hektar dan hasil panen turun sekitar 15.000 ton antara tahun 1962 dan 1963. Hanya ketela mengalami kenaikan volume produksi sekitar 38.000 ton. Ketela umumnya merupakan tanaman yang disukai dalam kondisi musim kering yang berat karena kualitasnya yang masih dapat tumbuh baik dalam musim yang sangat kering sekalipun. Tabel 4.12 menunjukkan penurunan produksi padi dan ketela tercermin pula dalam produksi per kapita yang juga mengalami penurunan drastis karena ditambah faktor lain, yakni peningkatan jumlah penduduk Keresidenan Kediri, kurang lebih sebanyak 180.000 jiwa pada periode 1962-1964. Produksi padi per kapita turun dari sekitar 153 kilogram pada tahun 1962 menjadi 74,02 kilogram pada tahun 1964. Peningkatan produksi jagung per kapita dan ketela per kapita antara tahuin 1963 dan 1964 mencerminkan adaptasi penduduk terhadap problem musim kering yang abnormal khususnya untuk tanaman padi.

Tabel 4.11.
Luas Panen dan Produksi Tiga Tanaman Pangan di Keresidenan Kediri 1962-1964

Tahun	Padi		Jagung		Ketela	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1962	176.108	635.667	103.836	131.206	60.890	541.410
1963	141.267	357.129	90.736	116.316	69.110	679.144
1964	141.133	405.459	155.730	266.640	63.244	564.709

Sumber: Data diadaptasi dari Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 17-23.

132 R. Soeparto Wignjasubrata, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri* (Djakarta: Arsip Bank Indonesia, 1965), hlm. 4.

Tabel 4.12.
Rata-Rata Produksi Bahan Pangan Perkapita di Keresidenan Kediri 1962-1964

Tahun	Jumlah Penduduk	Padi (Beras)	Jagung	Ketela
1962	3.856.698	152,83 (79,47)	31,17	131,96
1963	3.945.401	80,60 (41,91)	27,78	171,41
1964	4.036.141	74,02 (38,49)	47,26	155,25

Sumber: Data diadaptasi dari Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 17-23.

Penurunan panen padi berdampak luas terhadap kondisi kehidupan masyarakat di Keresidenan Kediri. Dilaporkan akibat paceklik sekitar 10.000 orang di wilayah Kediri menderita gizi buruk akibat kekurangan bahan pangan.[133] Paceklik pangan yang begitu juga berdampak buruk pada terjadinya keterlambatan dalam distribusi beras untuk kalangan pegawai negeri dan swasta. Menyikapi kondisi ini Bupati Kediri kemudian, pada tahun 1964, mengambil keputusan untuk mengganti jatah beras yang dibagikan kepada para pegawai dengan jagung, yang secara populer dipandang sebagai bahan makanan kelas dua. Bupati Kediri juga mengeluarkan keputusan yang berisi larangan produk pangan lokal diperdagangkan ke luar wilayah Kediri.[134] Bantuan dari pemerintah pusat tidak bisa banyak diharapkan karena banyak dana pusat pada tahun 1964 tersedot untuk operasi militer dalam politik konfrontasi sebagai reaksi atas terbentuknya Negara Federasi Malaysia.[135]

Sektor industri di wilayah Kediri yang pulih dengan baik dari keterpurukan perang adalah industri rokok. Ketersediaan suplai tembakau penduduk dalam jumlah yang memadai, kadar dominasi Belanda yang relatif rendah, dibanding misalnya sektor gula yang tersandera aksi-aksi anti asing dan nasionalisasi, ikut menjadi faktor yang memudahkan kebangkitan industri rokok pada 1950-an dan 1960-an. Kebangkitan industri rokok Kediri yang relatif berhasil tampak misalnya dari jumlah produksi rokok kretek Kediri. Pada tahun 1961, produksi rokok kretek

133 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia), hlm. 4.

134 Hermawan Sulistyo, *op.cit.*, hlm. 128.

135 Dawam Rahardjo dan Aswab Mahasin dkk., *op.cit.*, hlm. 147.

Kediri telah mencapai hampir 3,2 miliar batang. Angka ini sudah cukup tinggi, meskipun jumlah ini masih lebih rendah dibanding produksi pada tahun 1934 yang mencapai sekitar 3,7 miliar batang.[136]

Secara komparatif Kediri menghasilkan rokok dengan jumlah paling besar di Jawa Timur, meskipun jumlah pabriknya lebih sedikit dibanding Keresidenan Malang. Seperti dapat dilihat pada Tabel 4.13 dalam konteks Jawa, Kediri hingga akhir 1960-an memang belum mampu menggeser Jepara-Rembang di Jawa Tengah dengan Kudus sebagai sentranya, yang merupakan tempat asal industri rokok kretek.

Tabel 4.13.
Jumlah Pabrik dan Produksi Rokok di Kediri dan Keresidenan Lain di Jawa Tahun 1961

Keresidenan	Jumlah Pabrik	Jumlah Produksi (batang)
Malang	134	3.020.000.000
Surabaya, Madura dan Besuki	112	1.427.000.000
Kediri	131	3.148.000.000
Madiun	83	1.340.000.000
Bojonegoro	31	204.000.000
Jepara-Rembang	209	5.755.000.000
Semarang	38	2.116.000.000
Pekalongan	15	277.000.000
Banyumas	9	57.000.000
Kedu	51	306.000.000
Surakarta	58	818.000.000
DI Yogyakarta	9	75.000.000

Sumber: Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* (Kudus: PT Djarum Kudus, 1987), hlm. 180.

Meskipun banyak pabrik rokok di Keresidenan Kediri, produsen penting dalam industri rokok kretek di Kediri yang muncul pada periode akhir 1950-an dan nantinya merajai produksi rokok kretek nasional pada

136 Kenneth Young, "Kediri dan Gudang Garam: Sebuah Enclave Industri Dalam Lingkungan Pedesaan", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan Yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 418.

masa Orde Baru adalah Pabrik Rokok Gudang Garam. Pabrik Rokok Gudang Garam didirikan oleh Tjoa Ing Hwie yang datang ke Kediri pada awal tahun 1950-an untuk mencari pekerjaan. Pada mulanya Ing Hwie bekerja pada pabrik rokok kretek milik pamannya, Tjoa Kok Tjiang, yang tergolong salah satu pabrik rokok besar di Kediri. Di pabrik rokok ini, Tjoa Ing Hwie mendapatkan keterampilan dalam meramu tembakau dan meracik campuran cengkeh untuk rokok kretek. Pada tahun 1956, Ing Hwie keluar dari pabrik rokok milik pamannya dan terjun ke perdagangan tembakau dan cengkih dengan berperan sebagai penyalur. [137]

Setelah menggelutinya sekitar tiga tahun, pada Juni 1958, Tjoa Ing Hwie (Surya Wonowijoyo) membangun pabrik rokok kreteknya sendiri dengan mengajak 50 orang pekerja dari pabrik milik pamannya. Pabrik yang didirikannya dinamai PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam, yang pada mulanya berlokasi di atas tanah sewaan di Jalan Semampir Kediri seluas sekitar 1.000 meter persegi milik Murdioso.[138] Produk rokok kretek yang dihasilkan pertama kali oleh Gudang Garam adalah Sigaret Kretek Linting (SKL) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh, pada tahun 1960 sebuah unit produksi didirikan di Gurah, berjarak kurang lebih sekitar 13 km arah tenggara Kota Kediri. Setiap hari sebanyak 200-an orang pekerja pabrik menempuh perjalanan Gurah-Kediri pulang pergi dengan menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibayar oleh perusahaan.[139]

Bisnis Pabrik Rokok Gudang Garam perlahan tumbuh dengan stabil sebelum peluncuran produknya yang luar biasa, Gudang Garam Kuning,

137 *Ibid*.

138 Nama Gudang Garam dipakai atas saran Sarman, seorang sahabatnya. Berbagai nama yang pernah disarankan para sahabatnya antara lain Tjap Kali Brantas, Tjap Gunung Kelud, Tjap Dhoho, tetapi akhirnya tidak dipakai. Pada Logo Rokok Tjap Gudang Garam terdapat elemen, dua buah gunung sebagai latar belakang, sebuah sungai mengalir di kaki gunung, deretan gudang garam dan di tengahnya ada rel. kereta api, dengan hamparan sawah di latar depan dengan langit cerah. Logo ini mengandung makna pentingnya menjalin relasi dengan alam. Sungai yang mengalirkan air jernih sangat penting bagi kehidupan manusia. Bangunan gudang garam menyimbolkan tempat berlindung dan jalan kereta api tanpa horizon mengekspresikan jalan kehidupan yang panjang. Jalan juga menggambarkan dinamika dan gerak kehidupan. Etty Sukaringtyas, "Dampak Sosial Industri Rokok PT Gudang garam Kediri Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Desa Blimbing dan Sidomulyo Kediri Tahun 1980-1985", *Skripsi* (Jember: Fakultas Sastra, 1991), hlm. 28-31.

139 Fikri, *PT Gudang Garam Tbk*, (https://fikrinm93.wordpress.com/2015/10/18/); Aulia Akbar, *Dulu Usaha Rumahan Kini Laba Triliunan, Ini Cerita Gudang Garam*, https://lifepal.co.id/media/gudang-garam-jadi-raksasa/, diakses 12 Juni 2021.

pada tahun 1962. Produk ini meningkat pesat popularitasnya di kalangan masyarakat dan mengantarkan Gudang Garam melejit menuju pada puncak kejayaannya pada masa Orde Baru. Muncul desas-desus miring yang ditiupkan para kompetitor untuk menjatuhkan reputasi produknya, si bungkus kuning, yang sedang banyak digandrungi bahwa keistimewaan produknya karena di dalamnya terdapat kandungan ganja, sebuah gosip yang ditolak Ing Hwie dengan tegas untuk membela ramuan rahasia dan daya tarik produknya.[140] Akan tetapi, hingga menjelang tragedi 1965 pabrik rokok terbesar di Kediri adalah Pabrik Rokok Tokek, yang dikelola oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Khouw. Kebesaran pabrik ini berakhir dengan cepat karena pemiliknya ditangkap karena disinyalir terlibat dalam gerakan komunis 1965 dan bisnisnya pun ambruk sehingga pangsa pasarnya kemudian diambil alih oleh Pabrik Rokok Gudang Garam yang tengah menanjak.[141]

Gambar 4.5. Perusahaan Rokok Gudang Garam 1958
Sumber: https://fikrinm93.files. wordpress.com/

140 Kenneth Young, *op.cit.*, hlm. 420-421.

141 Kesaksian Ir. Handinoto, M.T., dalam *Forum Group Discussion* pada tanggal 15 September 2021.

Selain diuntungkan oleh kondisi politik yang menghilangkan pesaing utama di Kediri, keberhasilan Gudang Garam dalam bisnis rokok pada tahun 1960-an mendapat kontribusi dari kombinasi faktor. Faktor pertama adalah adanya inovasi rokok kretek filter pada tahun 1968 yang melengkapinya dengan keunggulan untuk menembus pangsa pasar rokok putih. Kedua, berdasarkan pada Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, pada tahun ini pemerintah Indonesia mengeluarkan lisensi mekanisasi kepada Pabrik Rokok Gudang Garam dan tiga pabrik rokok lain. Dengan lisensi mekanisasi yang diberikan maka peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi rokok Gudang Garam terbuka sangat lebar. Ketiga, Pabrik Gudang Garam juga memiliki gudang dalam kapasitas besar untuk menyimpan stok bahan mentah dalam jumlah besar sehingga menguntungkan dalam mengantisipasi fluktuasi harga tembakau dan cengkih. Hal ini ditopang pula dengan keahlian pemiliknya dalam melakukan pembelian bahan-bahan mentah untuk produk rokok, khususnya tembakau dan cengkih, dalam volume besar pada saat harga rendah dan kemudian menyimpannya sebagai stok yang mengamankan proses produksi pabrik tatkala terjadi fluktuasi harga yang kurang menguntungkan.[142]

Terlepas dari variasi penampilan ekonomi sektoral, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kediri ekonomi terpimpin menurun. Booth menghubungkan kemunduran ekonomi pada periode ekonomi terpimpin terjadi akibat menghilangnya perusahaan-perusahaan asing, dampak pergolakan yang terjadi di beberapa daerah penghasil komoditas ekspor, dan faktor iklim berupa curah hujan yang rendah yang terjadi pada 1960-an (1961, 1963, 1965, dan 1967).[143] Dari sisi fiskal dan moneter kemunduran penampilan ekonomi tidak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar anggaran pemerintah dialokasikan pada pos-pos pengeluaran yang merupakan prioritas politik, terutama pendanaan untuk pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962, jumlah pengeluaran untuk pos Irian Barat dan Malaysia mencapai Rp23,6 miliar.

142 Kenneth Young, *op.cit.*, hlm. 422-423.

143 Anne Booth, "Pertumbuhan dan Kemandegan dalam Era Pembangunan Bangsa, Penampilan Ekonomi Indonesia dari 1950-1965", dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terj. Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 505-505.

Pada tahun 1963, alokasinya turun ke Rp21 miliar, tetapi pada tahun 1964 meroket ke Rp90,5 miliar dan bahkan tidak tanggung-tanggung membengkak pada tahun 1965 menjadi Rp567,1 miliar.[144] Karena rendahnya pemasukan negara, pembiayaan sebagian besar bersandar pada pinjaman dari Bank Indonesia yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencetak uang sehingga menyebabkan peningkatan jumlah uang di peredaran.

Sebagai akibatnya, tahun 1960-an diwarnai dengan laju inflasi yang mengkhawatirkan. Laju inflasi melambung tinggi tidak terkendali dari 19% pada tahun 1960 menjadi 636% pada tahun 1966. Hiperinflasi berdampak parah terhadap kehidupan ekonomi dan politik. Pemerintah kehilangan kemampuan dalam mengendalikan pengelolaan sumber daya dan mengambil tindakan-tindakan yang efektif, termasuk dalam mengelola cadangan stok beras yang sangat vital bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau semua orang. Hanya segelintir penduduk yang mempunyai akses ke sistem distribusi pangan pemerintah khususnya kalangan pegawai dan aparat.[145] Mereka yang tidak mempunyai akses terhadap jaminan yang secara langsung diberikan oleh pemerintah terpaksa harus hidup dalam himpitan kesulitan dan menjadi korban inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok yang meroket sehingga sulit dijangkau.

Kehidupan sebagian besar buruh pabrik perkebunan tebu di Kediri digambarkan sangat menyedihkan dan bertambah berat, bahkan mereka tidak mampu membeli gula yang mereka ikut memproduksinya dengan tenaga mereka. Harga gula naik dari Rp7,5 per kilogram pada Januari 1962 menjadi Rp33 per kilogram pada bulan Agustus-September 1963. Pada bulan November 1964, harga gula bertengger pada Rp220 per kilogram dan pada pertengahan tahun 1965 harganya hampir mencapai Rp330 per kilogram. Sebagai bandingan, buruh biasa yang bekerja di luar pabrik dari pagi hingga siang hanya mendapat bayaran upah sekitar sebesar Rp10 dan Rp7.50 untuk pembersih rumput di lahan tebu.[146] Biaya

144 Budiono, *op.cit.*, hlm. 97.

145 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.*, hlm. xlii-xliii.

146 Hermawan Sulistyo, *op.cit.*, hlm. 125-126.

hidup melambung tinggi, bahkan hingga empat kali lipat di atas upah normal mereka. Di wilayah Kediri, harga-harga kebutuhan pokok sandang dan pangan berlipat ganda, bahkan bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai rendahan, harga beras juga dirasakan sangat mahal dan lebih buruk lagi barang juga langka di pasaran.

Ketika imbas badai politik yang terjadi di ibukota pada September 1965 dengan cepat menyebar secara luas ke daerah-daerah, kondisi sosial-ekonomi wilayah Kediri yang penuh kesukaran tersebut telah menjadi penggerak arus bawah yang luar biasa kuatnya, memicu gejolak dan ketegangan sosial secara luas di wilayah Kediri. Masyarakat Kediri termasuk bagian dari Indonesia yang merasakan begitu beratnya proses transisi yang mengiringi berakhirnya sistem ekonomi terpimpin yang dijalankan Presiden Sukarno dan bangkitnya ekonomi Orde Baru yang dibangun Presiden Soeharto. Bagaimana dinamika perekonomian dan masyarakat Kediri dalam era pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru, serta peran yang dimainkan BI Kediri di dalamnya akan menjadi pokok persoalan yang dibahas pada bab selanjutnya.

BAB 5

Bank Indonesia Kediri Dalam Era Pembangunan

Transisi kekuasaan politik dari era Sukarno ke era Soeharto mengawali babak baru dalam perkembangan sejarah Indonesia. Munculnya pemerintahan Orde Baru mendatangkan perubahan-perubahan penting, tidak hanya dalam kehidupan politik, melainkan juga dalam bidang perekonomian. Melalui kebijakan ekonomi yang diterapkannya, Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan. Indonesia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman problem perekonomian yang kronis pada 1950-an dan awal 1960-an yang dilukiskan Boediono sebagai masa stagnasi dan hiperinflasi.[1] Melalui kebijakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan, Indonesia bergerak ke arah tingkat kehidupan yang lebih makmur. Pengakuan positif dari dunia internasional pun didapatkan. Bank Dunia (1993) mengakui Indonesia sebagai negara industri yang sedang muncul dengan performansi ekonomi yang tinggi.[2] Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia masa Orde Baru digambarkan sejarawan Belanda, Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, sebagai sebuah kasus transisi yang menarik dari "drama" menjadi "keajaiban".[3]

---

1 Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Mizan, 2016), hlm. 83.

2 Howard Dick, Vincent Houben, J. Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie, *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia* (Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 198-200.

3 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2012), hlm. 5.

Dalam bab ini akan dibahas perkembangan ekonomi Orde Baru dengan mengangkat pengalaman wilayah Kediri pada era pembangunan sebagai fokus dan peran yang dimainkan Bank Indonesia (BI) dalam pembangunan perekonomian dan masyarakat Kediri. Lingkup temporal pembahasan bab ini adalah periode 1968-1998, sejak pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas, melaksanakan pembangunan hingga keruntuhannya. Dalam konteks perjalanan sejarah Bank Indonesia, tahun 1968 ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 yang menggariskan Bank Indonesia berkedudukan sebagai bank sentral dengan independensi terbatas, bagian dari pemerintah dalam menjalankan peran sebagai agen pembangunan, dan tidak lagi menjalankan fungsi komersial. Tahun 1998 menjadi batas akhir pembahasan karena pada tahun berikutnya diberlakukan Undang-undang No.23 Tahun 1999 yang menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan independensi penuh di luar pemerintah.[4] Dengan demikian, bab ini akan menampilkan gambaran mikro dari implementasi kebijakan nasional yang dijalankan pemerintah Orde Baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan yang diejawantahkan melalui kehadiran BI Kediri.

PEREKONOMIAN MASA ORDE BARU

KINERJA PEREKONOMIAN ORDE BARU

Perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru menampilkan kontras yang begitu tajam dibanding dengan periode sebelumnya. Pemerintahan yang muncul pada masa Orde Baru dan periode pendahulunya memang sama-sama muncul dari situasi krisis. Kedua pemerintahan baru sama-sama menghadapi permasalahan ekonomi yang luar biasa besar. Terdapat beberapa perbedaan penting di antara kedua periode, terutama menyangkut ideologi yang mendasari kebijakan ekonomi yang ditempuh dan capaian kinerja perekonomiannya. Berbeda dengan periode Sukarno yang kebijakan ekonominya lebih kuat dilandaskan pada prinsip

4 Iskandar Simorangkir, (ed), *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 38; Bank Indonesia, *Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1999-2005*, https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx.

nasionalisme ekonomi dan anti modal asing, khususnya yang berasal dari Barat, perekonomian Orde Baru lebih bersifat pragmatis dan pro-modal asing. Dari aspek kinerja perekonomian, periode Sukarno secara umum diwarnai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah sehingga sering digambarkan sebagai periode stagnasi atau bahkan kemunduran. Sementara itu, perekonomian masa Orde Baru memperlihatkan capaian pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan berkesinambungan.

Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan tidak terlepas dari keberhasilan proses stabilisasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi menjadi kebutuhan urgen bagi kiprah Orde Baru dalam menerapkan kebijakan dan program-program yang dicanangkannya. Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, pemerintah Orde Baru lahir dari situasi krisis. Beratnya krisis perekonomian yang Indonesia hadapi tergambar dari sebuah penilaian bahwa ketika transisi kekuasaan terjadi, perekonomian Indonesia dalam situasi bangkrut dan berada di ambang jurang kehancuran.[5] Kondisi ekonomi Indonesia pada pertengahan 1960-an memang porak-poranda dan memprihatinkan. Indonesia mengalami defisit anggaran yang sangat besar. Meskipun masalah ini selalu terjadi sepanjang tahun, tetapi defisit anggaran pada tahun 1965 berkali lipat, mencapai lebih dari Rp1.565 miliar. Angka defisit ini meroket kenaikannya dibanding defisit anggaran pada tahun 1964 sebesar Rp397,9 miliar.[6]

Pada pertengahan 1960-an, Indonesia juga didera problem hiperinflasi. Meskipun problem inflasi sudah terjadi dan dihadapi pemerintah pada dekade 1950-an, laju inflasi meningkat tajam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan pada dekade 1960-an. Laju inflasi meroket tidak terkendali dari sebesar 19% pada tahun 1960 menjadi sebesar 636% pada tahun 1966.[7] Meroketnya laju inflasi terjadi karena defisit anggaran yang dihadapi pemerintah hampir selalu diatasi dengan jalan pintas dan gampang, yakni melalui pencetakan uang.[8] Upaya

5 Thee Kian Wie (ed), *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan Freedom Institute, 2005), hlm. xlv.

6 Boediono, *op.cit.*, hlm. 100.

7 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.* hlm. xlii.

8 R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella dan Yudha B Tangkilisan, *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 99.

menutup defisit anggaran dengan cara ini menyebabkan volume uang yang beredar dalam masyarakat terus membengkak dan menyebabkan harga-harga barang melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh mayoritas rakyat. Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah sejak awal 1960-an berdampak sangat buruk terhadap kemakmuran masyarakat.[9]

Problem tersebut masih ditambah dengan sederet problem lain. Indonesia gagal membayar utang luar negeri sebesar US$ 2,4 miliar. Produksi sektor industri juga sangat buruk karena kurang dari 20%, jauh di bawah kapasitas terpasang. Infrastruktur dan alat-alat produksi yang dimiliki juga tidak berfungsi secara optimal karena sudah tua. Hampir semua permesinan dan alat-alat produksi merupakan warisan dari masa kolonial Hindia Belanda. Demikian pula, korupsi merajalela dan menggerogoti sistem pemerintahan dan kontrol negara.[10] Tidak mengherankan, Anne Booth menggambarkan Indonesia pada pertengahan 1960-an sebagai negara dengan permasalahan perekonomian yang sangat besar, sedangkan munculnya pemerintah yang berkomitmen kuat pada pembangunan ekonomi sebagai faktor yang sangat menentukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara praktis jauh dari kenyataan.[11]

Dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang kronis warisan era Sukarno, Presiden Soeharto berpaling kepada kelompok ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) untuk mendapatkan nasehat dan jalan keluarnya. Pada September 1966, Soeharto menunjuk sebuah tim ahli di bidang ekonomi dan keuangan yang terdiri atas lima ekonom dari FE-UI di bawah koordinasi Mayor Jenderal Sudjono Humardani. Tim ini mendapat tugas untuk merancang Program Stabilisasi dan Rehabilitasi, yang kemudian dimuat dalam Ketetapan MPRS No 23 tahun 1966. Berdasarkan ketetapan ini, maka kemudian disusun pedoman

9 J.A.C. Mackie, "Periode 1941-1965 Sebagai Selingan Dalam Pembentukan Ekonomi Nasional: Bagaimana Sebaiknya Kita Menafsirkan?" dalam J. Th. Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terjemahan Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 413.

10 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.*, hlm. xlvii- xlviii.

11 Anne Booth, "Pertumbuhan dan Kemandegan Dalam Era Pembangunan Bangsa: Penampilan Ekonomi Indonesia dari 1950-1965", dalam J. Th. Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terjemahan Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 508.

untuk pemulihan ekonomi Indonesia, yang menggariskan kebijakan-kebijakan tentang anggaran berimbang, neraca pembayaran, rehabilitasi infrastruktur fisik, produksi pangan, dan pembangunan pertanian.[12]

Kebijakan yang dibuat oleh Soeharto berdasarkan masukan dari penasehat ahli yang ditunjuknya menandai tampilnya kaum teknokrat, yakni para pejabat puncak di lingkungan pemerintahan yang menyiapkan kebijakan ekonomi berdasarkan pertimbangan rasional menurut prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Kaum teknokrat awal yang mendampingi pemerintahan Soeharto ini mayoritas adalah lulusan dari Universitas California di Berkeley sehingga kemudian populer dijuluki sebagai "Mafia Berkeley".[13] Tim penasihat ekonomi ini dipimpin oleh Widjojo Nitisastro. Dia adalah seorang figur pemimpin yang diakui kapasitas intelektualnya yang mumpuni dalam soal kebijakan ekonomi dan sekaligus mempunyai kepiawaian dalam memainkan peran politik demi pencapaian tujuan. Widjojo sangat dipercaya oleh Soeharto dan tim ekonomi yang dipimpinnya begitu handal dan kompak. Dalam pengakuan Emil Salim, Widjojo adalah sosok arsitek yang sejatinya dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Widjojo juga dilukiskan oleh Salim sebagai "dalang" yang menentukan lakon dari kebijakan ekonomi, sedangkan para teknokrat ekonomi yang lain adalah wayang-wayang yang bergerak menuruti skenario sang dalang.[14]

Tidak lama setelah transisi kekuasaan dari pemerintahan Sukarno ke Soeharto terjadi, proses stabilisasi ekonomi segera dilakukan. Tujuan utama dari program stabilisasi ekonomi adalah mengendalikan laju inflasi. Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah prinsip anggaran berimbang, Pemerintah tidak menutup defisit anggaran selalu hanya dengan mencetak uang, melainkan juga terbuka pada alternatif-alternatif pembiayaan lain, termasuk di antaranya adalah bantuan (utang) dari luar negeri. Hasil yang dicapai program stabilisasi pun begitu mengesankan. Melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter secara ketat, problem hiperinflasi dengan cepat dapat ditangani

12 Howard Dick, Vincent Houben, J. Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 196.

13 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.*, hlm. xlv- xlvi.

14 *Ibid.*, hlm. xlviii.

pemerintah. Laju inflasi yang meroket hingga mencapai 636% pada tahun 1966 dapat dihentikan laju kenaikannya. Bahkan kemudian, lajunya dapat diturunkan ke tingkat yang lebih rendah.[15] Pada tahun 1968, laju inflasi telah turun hingga menjadi 85% dan terus dapat diturunkan pada tingkat yang semakin terkendali pada tahun berikutnya. Dengan inflasi yang terkendali berkat program stabilisasi pemerintah dapat memulai program pembangunan melalui pencanangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sehingga tahun 1969 oleh Ricklefs disebut sebagai masa akhir transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.[16]

Pada Desember 1966, Indonesia juga berhasil mendapatkan persetujuan penjadwalan kembali pembayaran utang yang telah jatuh tempo dari Jepang dan negara-negara Barat. Penjadwalan kembali utang yang jatuh tempo ini membawa kelegaan dan meringankan tekanan beban fiskal yang dipikul pemerintahan baru. Bahkan, atas prakarsa pemerintah Belanda, sebuah konsorsium bantuan internasional untuk Indonesia dibentuk pada 1967 dengan nama Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Untuk memfasilitasi masuknya investasi asing di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada Januari 1967.[17] Peraturan baru ini intinya memberikan berbagai kemudahan, insentif, dan jaminan bagi para calon investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, di antaranya berupa pembebasan pajak dan jaminan perlindungan dari risiko pemberlakuan kebijakan nasionalisasi. Kalaupun nasionalisasi akhirnya akan dikenakan, investor dijamin akan mendapatkan ganti rugi secara penuh menurut ketentuan peraturan hukum internasional yang berlaku.[18] Dalam rangka implementasi peraturan ini pemerintah membentuk Tim Teknis Penanaman Modal yang terdiri dari Moh. Sadli sebagai ketua dengan anggota A.R. Suhud dan Suryo Sediono.[19]

---

15 *Ibid.*, hlm. lii.

16 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 613.

17 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.*, hlm. xlix-l.

18 *Ibid*, hlm. xlix-l.

19 Suryo Sediono, "Sadli Teman Kerja dan sahabatku", dalam M. Arsjad Anwar, Thee Kian Wie, dan Iwan Jaya Azis (editor), *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 8.

Kebijakan pemerintah Orde Baru yang terbuka dan pro-kapital Barat ini kontras dengan kebijakan sebelumnya yang anti bantuan luar negeri, khususnya yang berasal dari negara-negara kapitalis Barat. Keterbukaan terhadap modal asing ini telah menarik kalangan investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia terutama bergerak dalam bidang minyak bumi, pertambangan, dan industri manufaktur.[20] Keterbukaan terhadap investasi dilanjutkan dengan pemberian peluang investasi bagi para investor dalam negeri, yang landasan yuridis formalnya dituangkan dalam pemberlakuan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Implementasi peraturan ini secara teknis dipersiapkan oleh tim yang diketuai Moh. Sadli dengan anggota Priasmoro dan Pamuncak.[21] Berbagai insentif diberikan untuk merangsang investasi domestik, termasuk di antaranya kemudahan akses perkreditan yang ditawarkan oleh bank-bank negara. Pemerintah juga memberlakukan "kebijakan menghapus kesalahan masa lampau" untuk merangsang para pengusaha Tionghoa memasukkan kembali modal mereka ke Indonesia. Kebijakan ini dinilai berhasil memulangkan modal yang telah ditransfer ke luar negeri ketika terjadi kekacauan politik.[22]

Melalui berbagai kebijakan dan program yang dilakukan, Indonesia pada masa Orde Baru memperlihatkan capaian-capaian kinerja ekonomi yang mengesankan. Untuk pertama kali pada tahun 1968 Indonesia mengukir pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan capaian ini terus berlanjut sehingga secara umum Pierre van der Eng menyebut periode 1970-1985 sebagai periode ekspansi ekonomi.[23] Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5% per tahun diraih hingga tahun 1982. Setelah turun sedikit pada tahun berikutnya hingga tahun 1986 akibat merosotnya harga minyak, laju pertumbuhan ekonomi kembali naik pada kisaran 6-7 persen pada akhir dekade 1980-an.[24] Pendapatan per kapita

20 Hal Hill, *Foreign Investment and Industrialization in Indonesia* (Singapore: Oxford University Press, 1988), hlm. 81.

21 Suryo Sediono, *op.cit.*, hlm. 8.

22 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.*, hlm. I-li.

23 Pierre van der Eng, "Revolusi Dalam Pertanian Indonesia?: Pandangan Jangka Panjang Mengenai Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian" , dalam J. Th. Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,* Terjemahan Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 426.

24 Hal Hill, *Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Murai Kencana, 1988), hlm. 17.

yang kurang lebih baru sebesar US$ 100 pada pertengahan 1960-an tumbuh pesat hingga mencapai US$ 580 pada tahun 1982. Pendapatan per kapita terus naik hingga hampir menyentuh US$ 1.000 pada awal dekade 1990-an.[25] Menurut kalkulasi Van der Eng, Indonesia mengalami pertumbuhan GDP per kapita rata-rata sebesar 4,5% dalam periode 1967-1997.[26] Pertumbuhan ini dinilai sebagai capaian kinerja yang luar biasa dengan besaran jauh di atas laju pertumbuhan penduduk. Berkat capaian ini, posisi Indonesia terangkat lebih tinggi dari negara berpendapatan rendah (*low income economy*) menjadi negara berpendapatan menengah lapisan bawah (*lower middle income economy*).[27] Dalam dekade terakhir era Orde Baru, Indonesia juga telah bertransformasi dari negara agraris ke negara industri baru.

Transformasi tersebut dibarengi pula dengan perbaikan dalam berbagai indikator sosial-ekonomi. Angka kemiskinan absolut berkurang proporsinya dari sebesar 40% penduduk pada tahun 1976 menjadi 11% pada tahun 1996. Secara absolut jumlah orang miskin juga berkurang. Pada tahun 1976, jumlah orang miskin mencapai sekitar 54 juta orang dan pada tahun 1996 jumlahnya tinggal 23 juta. Penurunan angka kemiskinan tahunan di Indonesia pada periode 1970-1987, menurut penelitian yang dilakukan Bank Dunia mengenai angka kemiskinan di berbagai negara berkembang, disebut sebagai angka penurunan yang paling tinggi. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pendidikan tingkat dasar juga meningkat secara tajam. Demikian pula, persentase penduduk yang mendapat akses air bersih juga mengalami peningkatan signifikan. Sebaliknya, terjadi penurunan tajam dalam angka kematian bayi.[28] Sejumlah indikator lain juga menguatkan adanya perbaikan. Persediaan pangan perkapita meningkat dari 1.816 kcal/kapita pada tahun 1970 menjadi 2.461 kcal/kapita pada tahun 1985 atau meningkat lebih dari

25 Howard Dick, Vincent Houben, J. Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie, *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia* (Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 198.

26 Pierre van der Eng, "Indonesia's Economy and Standard of Living in the 20th Century", dalam Grayson Lloyd and Shannon Smith (ed), *Indonesia Today-Challenges of History* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), hlm. 182.

27 Howard Dick, Vincent Houben, J. Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 198.

28 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.,* hlm. lii.

30%. Pada periode yang sama, jumlah sepeda motor per 100.000 orang meningkat dari 2.629 buah menjadi 4.234 buah, sedangkan jumlah jemaah haji per 100.000 muslim bertambah dari 11.883 orang menjadi 15.901 orang.[29]

Kinerja perekonomian Orde Baru yang banyak dipuji secara luas juga berhasil mengubah secara struktural perekonomian Indonesia dari negara agraris pada tahun 1960-an menjadi negara industri baru pada awal 1990-an. Seperti dikemukakan Ricklefs, sekitar 31% penduduk Indonesia pada tahun 1990 dapat dikelompokkan sebagai kaum urban yang tidak lagi menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor pertanian.[30] Pandangan Ricklefs sejajar dengan data yang dikemukakan Paauw bahwa pada tahun 1985-1990 sektor manufaktur mampu menyediakan 26,7% kesempatan kerja, meningkat tajam dibanding periode 1980-1985 yang baru sebesar 10,1%. Sementara itu, penyerapan angkatan kerja di sektor pertanian turun dari 47,7% pada periode 1980-1985 menjadi 19% pada periode 1985-1990.[31] Komparasi kedua sektor ini dengan jelas menunjukkan bahwa pada tahun 1990 sektor manufaktur telah melampau sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor produk-produk primer. Pertumbuhan sektor industri manufaktur di Indonesia secara komparatif lebih cepat dibandingkan tiga negara besar di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, serta sedikit lebih lambat dibanding Korea Selatan.[32] Proporsi kontribusi sektor ini terhadap GDP *(Gross Domestic Product*) meningkat dari 13% pada tahun 1965 menjadi 43% pada tahun 1996. Hal ini bertolak belakang dengan kontribusi sektor pertanian yang berkurang secara drastis dari 51% pada tahun 1965 menjadi 24% pada tahun 1980. Persentasenya terus menurun hingga tinggal 16% pada

29 Pierre van der Eng (2002), *op.cit.*, hlm. 427.

30 M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 635.

31 Douglas S. Paauw, "Economic Growth and Employement in Indonesia", dalam M. Arsjad Anwar, Thee Kian Wie, dan Iwan Jaya Azis (editor), *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 316.

32 Howard Dick, Vincent Houben, J. Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 198.

tahun 1996.[33] Dengan transformasi ini Indonesia telah menjelma menjadi negara industri baru sejak awal 1990-an,[34] menanggalkan atribut yang lama disandangnya sebagai negara agraris. Transformasi perekonomian Orde Baru berjalan beriringan dengan perkembangan dalam sektor perbankan yang menjadi salah satu pilar penopangnya. Perkembangan sektor perbankan dan keuangan selama Orde Baru akan diuraikan dalam bagian berikut.

SEKTOR PERBANKAN

Sektor perbankan dan keuangan pada periode 1968-1998 secara umum mengalami kemajuan. Menurut Hal Hill, perkembangan sektor ini memperlihatkan kombinasi antara reformasi peraturan dan pertumbuhan.[35] Pertumbuhan sektor ini secara umum dapat dibagi ke dalam dua fase yang berbeda, yakni fase 1968-1988 dan fase 1988-1998. Fase pertama diawali dari pemberlakuan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang bank sentral yang menjadi fondasi baru dalam pengaturan sistem perbankan di Indonesia. Sebagai garis pembatas antara kedua fase pertumbuhan adalah pemberlakuan Paket Kebijakan Perbankan 27 Oktober 1988 (Pakto1988) yang menandai perkembangan penting dunia perbankan. Tonggak yang digunakan sebagai penutup fase pertama adalah pemberlakuan Undang-undang No.23/1999 yang memposisikan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan independensi penuh di luar pengaruh pemerintah.

Pemberlakuan Undang-undang No. 13 tahun 1968 merupakan tonggak penting dalam perkembangan Bank Indonesia karena mengakhiri fungsi dualistis yang dijalankannya. Berbeda dengan fungsi BI menurut Undang-undang Tahun 1953, menurut perundangan yang baru Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi komersial. Dalam kedudukan dan fungsi yang lain, Bank Indonesia masih melanjutkan fungsi yang kurang lebih sama dengan masa sebelumnya yakni membantu pemerintah dalam

33 *Ibid.*, hlm. 199.

34 Thee Kian Wie (ed), *op.cit.*, hlm. liii.

35 Hal Hill (1988), *op.cit.* hlm. 246.

menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan. Secara spesifik fungsi ini dikaitkan dengan pengaturan dan penjagaan stabilitas nilai rupiah, serta dorongan pelancaran produksi dan pembangunan demi peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Menurut aturan yang baru, Bank Indonesia juga menjalankan fungsi lain yakni sebagai pemegang kas pemerintah, penyelenggara pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantornya di seluruh Indonesia, penyelenggara dan pengurus tata usaha cadangan emas dan devisa negara, serta sebagai banknya bank (*the bankers' bank*). Bank Indonesia masih menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi dengan hak tunggal mengeluarkan uang kertas dan logam.[36]

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan perundangan perbankan yang baru, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai ketentuan pelaksanaan. Pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1968 tentang bank asing yang mengatur bentuk bank asing yang dapat diizinkan, ketentuan tentang permodalan, kepegawaian, dan hak transfer. Pada tahun ini pula dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan no. Kep. 034/MK/IV/2/1968 tentang tempat, bidang usaha, dan prosedur perizinan bank asing. Di penghujung tahun 1968, terbit pula Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. /603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968 tentang syarat-syarat dan cara pendirian bank umum swasta dan bank tabungan swasta. Pada tahun 1969, menyusul penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep 800/MK/IV/11/1969 yang memuat ketentuan tentang persyaratan dan prosedur pendirian bank umum koperasi, bank tabungan koperasi, dan bank pembangunan koperasi. Pendirian dan pelaksanaan usaha bank-bank ini baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan berdasarkan masukan Bank Indonesia. Peraturan-peraturan ini menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan swasta. Namun demikian, ketentuan dalam Instruksi Menteri Negara, Ekonomi, Keuangan, dan Industri No. IN/11/Menkuin/2/1968 terkait penyimpanan uang negara hanya dapat dilakukan pada bank-bank milik negara dianggap kurang kondusif bagi daya saing bank swasta.[37]

---

36 M. Dawam Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 261.

37 *Ibid.,* hlm. 190.

Beberapa kemajuan tercatat pada periode 1969-1988. Meskipun jumlah bank pemerintah tidak mengalami penambahan, tetapi cabang-cabangnya telah meningkat 38%. Jumlah bank swasta domestik secara absolut berkurang pada tahun 1970-an dan tidak sedikit diantara bank-bank ini merupakan anak dari perusahaan perdagangan, tetapi cabang-cabang bank swasta domestik mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat. Selama tahun 1970-an, tidak banyak terjadi perubahan dalam struktur kepemilikan bank domestik, sedangkan kesempatan bagi kiprah bank asing juga masih terbatas. Pertumbuhan yang masih relatif terbatas disebabkan karena perubahan peraturan perbankan yang masih parsial, pengurangan volume kredit bersubsidi yang disalurkan lewat bank-bank milik pemerintah, dan kecenderungan pengamatan fiskal di sektor perusahaan negara. [38]

Berbagai kemajuan tersebut dicapai berkat pemberlakuan serangkaian kebijakan deregulasi. Dua kebijakan deregulasi yang penting disebut di sini adalah Paket Kebijakan 1 Juni 1983 dan Paket Kebijakan 25 Oktober 1986. Paket Kebijakan 1 Juni 1983 merupakan kebijakan deregulasi perbankan yang bertujuan meningkatkan kemandirian perbankan melalui pemberian kebebasan dalam penentuan pagu suku bunga simpanan dan pinjaman, pencabutan sistem pagu pengucuran kredit, pengurangan secara bertahap kredit likuiditas Bank Indonesia, dan pengenalan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia dan fasilitas diskonto yang dapat digunakan perbankan sebagai alternatif untuk mengendalikan likuiditasnya. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 memberikan insentif di bidang moneter berupa fasilitas swap yang memberikan kelonggaran bagi investor penanaman modal asing, investor penanaman modal dalam negeri, dan bank devisa, serta pembolehan modal asing untuk memasuki perusahaan nasional. [39]

Paket Kebijakan Perbankan 27 Oktober 1988 yang dikeluarkan Gubernur BI Adrianus Mooy menandai kemajuan yang lebih pesat sektor perbankan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dan efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, serta mengembangkan pasar modal. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui

38 Hal Hill (1988), *op.cit.,* hlm. 246.

39 M. Dawam Rahardjo, dkk., *op.cit.*, hlm. 260.

pemberian kemudahan-kemudahan dalam pendirian bank swasta dan bank perkreditan rakyat, peningkatan status sebagai bank devisa, penurunan ketentuan terkait kewajiban likuiditas minimum untuk perbankan dari 15% menjadi 2%, pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan, serta pembolehan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non bank untuk menaruh dana pada perbankan swasta.[40]

Pemberlakuan Pakto 1988 mendorong perkembangan pesat sektor perbankan. Sektor perbankan swasta merespons secara aktif peluang deregulasi perbankan ini yang memberikan berbagai kemudahan dan kelonggaran. Terbukti dalam waktu empat tahun sejak digulirkannya reformasi perbankan pada 1988 hingga 1993, jumlah bank-bank swasta tumbuh hampir dua kali lipat, sedangkan cabang-cabang bank pemerintah juga tumbuh 24%. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap proporsi andil yang diberikan baik bank pemerintah maupun bank swasta dalam segi simpanan deposito. Dalam hal ini, andil perbankan swasta melampaui andil perbankan pemerintah. Pada tahun 1993, misalnya, andil bank pemerintah kurang lebih hanya separuh dari andil yang diberikannya pada awal 1970-an. Fenomena ini sangat kontras dengan andil yang diberikan oleh perbankan pemerintah yang pada dua dekade sebelumnya yang mencapai hampir sepuluh kali lipat. Perkembangan pesat juga terjadi pada perbankan kecil di kawasan pedesaan. Demikian pula, sejak reformasi perbankan 1988, bank-bank asing juga mengalami pertumbuhan signifikan.[41]

Fenomena menarik sejak pemberlakuan Pakto 27 Oktober 1988 adalah pembentukan bank campuran. Bank campuran ini merupakan usaha patungan antara pihak asing dengan pihak dalam negeri, yang dibedakan dari bank asing murni. Alasan pemberian kesempatan pada pembentukan bank campuran adalah untuk meningkatkan layanan perbankan dalam rangka menunjang ekspor non-migas dan yang lebih penting lagi adalah banyaknya tekanan dari negara donor yang tergabung dalam IGGI untuk membuka ruang yang lebih lebar bagi kehadiran bank asing di Indonesia. Pembentukan bank campuran merupakan bentuk

40 *Ibid.*, hlm. 179-181.

41 Hal Hil (1988), *op.cit.,* hlm. 247.

jalan tengah antara aspirasi asing dan domestik.[42] Dengan demikian, selain beroperasi bank asing murni baik dengan status kantor perwakilan maupun kantor cabang, di Indonesia juga beroperasi bank campuran yang sahamnya dimiliki pihak asing dan bank nasional dan tercatat dengan status badan hukum Indonesia. Sejumlah bank campuran yang muncul sejak Pakto 1988 hingga 1991, yakni PT Fuji Bank International, PT Sanwa Indonesia Bank, PT IBJ Indonesia Bank, PT Bank Sumitomo Niaga, PT Bank Mitsubishi Buana, PT Bank Mitsui Swadarma, PT Bank LTCB Central Asia, PT Tokai Lippo Bank, PT Bank Credit Lyonnais Indonesia, PT Bank BNP Lippo Indonesia, PT United Overseas Bank Bali, PT Korea Exchange Bank Danamon, PT Daichi Kangyo Bank, PT DBS Buana Tatlee Bank, PT NMB Iandonesia Bank, PT Rabo Bank Duta, PT SOG Generale Summa, dan PT Westpac Panin Bank. [43]

Pengaruh pemberlakukan Pakto 1988 terhadap perkembangan sektor perbankan hingga tahun 1993 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Jumlah Bank dan Cabang, 1969-1993

Jenis Bank	Pemilikan	Status	1969/ 1970	1978/ 1979	1988/ 1989	1993/ 1994
Bank Umum	Pemerintah	Bank	7	7	7	7
		Cabang	625	707	860	1.062
	Swasta Domestik	Bank	138	83	94	152
		Cabang	295	279	1.536	2.923
	Swasta Asing	Bank	11	11	11	39
		Cabang	15	20	21	75
Bank Pembangunan Daerah		Bank	25	26	27	27
		Cabang	61	144	326	431
Bank Penyimpan		Bank	12	5	3	3
		Cabang	18	12	82	127
Bank Perkreditan Rakyat			8.408	5.718	7.501	7.632

Sumber: Hal Hill, *Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Murai Kencana, 1988), hlm. 248.

42 Priasmoro Prawiroardjo, "Bank Campuran di Indonesia", dalam M. Arsjad Anwar, Thee Kian Wie, dan Iwan Jaya Azis (editor), *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 456-457.

43 *Ibid.*, hlm. 460-461.

Perkembangan perbankan yang berlangsung di tingkat nasional juga tercermin di wilayah kerja Bank Indonesia cabang Kediri. Seperti pada masa sebelumnya, wilayah kerja Bank Indonesia cabang Kediri juga masih meliputi wilayah eks keresidenan, yakni eks Keresidenan Kediri dan eks Keresidenan Madiun, yakni tiga kotamadya. Bank-bank yang muncul era Orba di Kediri antara lain adalah Bank Bumi Daya (BBD),[44] yang pada tahun 1999 berubah menjadi Bank Mandiri sebagai hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Expor Impor (Exim). Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, misalnya, memiliki Bank Pasar yang berkecimpung dalam pemberian kredit kepada para pedagang pasar, pegawai negeri, dan pekerja swasta. Selain itu, di Kabupaten Kediri juga terdapat lembaga perkreditan milik Pemerintah Provinsi yaitu KURK yang kemudian berubah nama LKURK.[45]

Perkembangan bank perkreditan rakyat ikut menjadi bagian penting perkembangan perbankan di Kediri masa Orde Baru. Beberapa ilustrasi dapat disebutkan. Pertama, PT. Bank Desa Dhaha Ekonomi yang disahkan Menteri Kehakiman pada 10 Desember 1975. Sebelum menjadi perusahaan terbatas, bank ini merupakan usaha bank desa yang dirintis sejak 1972 dan berkedudukan di Djalan Diponegoro No. 9 Kediri.[46] Era tahun 1980-an menjadi masa kejayaan PT. Bank Desa Dhaha Ekonomi. Banyak kantor kas dibuka sehingga bank ini dikenal secara luas. Di kalangan masyarakat Kediri bank ini dikenal sebagai "Bank Dhoho". Dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur di antaranya jumlah minimum modal disetor suatu perseroan yaitu Rp500.000.000,- dan penarikan dana oleh berbagai pihak menyebabkan Bank Dhoho mengalami krisis likuiditas. Bank Indonesia kemudian melikuidasi bank ini dan menawarkan ke pihak lain yang tertarik membelinya. Pada tahun 1996 PT. Bank Desa Dhaha Ekonomi dibeli oleh Bank Bukopin. Di bawah manajemen Bank Bukopin, namanya berganti

44 Kesaksian Soebagijono dalam wawancara pada 27 Agustus 2021.

45 Pemerintah Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993/1994*, Laporan IIB (Kediri: Pemerintah Kabupaten Kediri, 1989), hlm. 129.

46 Arsip BI KPw Kediri, "Surat Keterangan Direktorat Djenderal Keuangan No. Ket-080/DDK/II/4/72 tanggal 19 April 1972".

menjadi PT. BPR Dhaha Ekonomi, yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat tertanggal 25 Juni 1998.[47]

PT Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto beralamat di Kecamatan Kandangan. Bank ini didukung oleh 3 (tiga) Kantor Cabang dan 7 (tujuh) Kantor Kas yang tersebar di Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Wlingi. Pada awalnya, perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu tujuh karyawan. Bank ini berkembang semakin besar dan dikelola seorang Direktur Utama dan satu orang Direktur, serta dibantu oleh 85 karyawan dan karyawati. Dari namanya, bank ini didirikan sebagai respons atas kebijakan pemerintah tentang perbankan yang dikeluarkan pada 1988 yang dikenal sebagai Paket Oktober (PAKTO) sehingga pemegang saham dapat mendirikan dan menjalankan usaha perbankan.[48] PT. BPR Artha Samudera Indonesia berdiri pada tahun 1992 dengan bentuk badan hukum sebagai koperasi dengan nama BPR Artha Samudera dan berkedudukan di Desa Selosari Kecamatan Kandat, Kediri. Bank ini beroperasi berdasarkan surat izin usaha yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-185/Km.13/1991 tertanggal 8 Juli 1991.[49] BPR ini mulai menjalankan usaha pada tanggal 12 Maret 1992 dengan modal awal sebesar Rp69.737.475.[50] Selain itu, muncul pula PT. BPR Pare Artorejo yang didirikan pada 20 Agustus 1994 yang berpusat di Kecamatan Pare. Bank ini mendapatkan persetujuan Prinsip dari Menteri Keuangan dengan Nomor: S-262/MK.17/1993, tanggal 16 Maret 1993 dan Surat Izin Usaha dengan Nomor: Kep-126/MK.17/1994, Tgl 23 Mei 1994.[51]

---

47 *Profil PT BPR Dhaha Ekonomi*, https://bprkediri.wixsite.com/dhahaekonomi/profil, diunduh pada 18 Agustus 2021.

48 *Sejarah Perusahaan*, http://www.bprberkahpakto.co.id/, diunduh 18 Agustus 2021.

49 Arsip Koleksi BI KPw Kediri, "Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-185/Km.13/1991 tertanggal 8 Juli 1991"; Sumber lain menyebutkan bahwa memulai operasi dengan status koperasi, BPR Artha Samudera pada tahun 2006 berencana mengubah status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. BPR Artha Samudera Indonesia. Status baru sebagai PT mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan nomor AHU-39872.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009. *PT. BPR Artha Samudera Indonesia*, https://bprarsindo.co.id/Profil. diunduh 18 Agustus 2021 diunduh 18 Agustus 2021.

50 Arsip Koleksi BI KPw Kediri, "Laporan Pengurus KBPR-Kandat kepada Pimpinan Bank Indonesia Kediri Perihal Mulai Melaksanakan Kegiatan Usaha Bagi KBPR Kandat tanggal 29 Februari 1992".

51 *Sejarah BPR Pare Artorejo* http://bprartorejopare.com/tentang-kami/, diunduh pada 18 Agustus 2021.

Dinamika di wilayah kerja BI cabang Kediri juga tampak dari perubahan yang terjadi dalam pucuk pimpinan cabang. Secara reguler pimpinan BI cabang Kediri diganti dari waktu ke waktu sebagai bagian dari proses mutasi pegawai BI yang dilakukan sesuai dengan kebijakan pusat. Jangka waktu masing-masing menjalani penugasan formal sebagai pemimpin cabang BI Kediri tidak sama persis antara figur satu dengan yang lain. Mutasi dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan baik dalam rangka penyegaran maupun promosi karier pegawai. Praktik semacam ini sudah lazim terjadi sejak masa Hindia Belanda hingga masa Indonesia merdeka. Figur yang pernah menduduki jabatan pimpinan Bank Indonesia cabang Kediri hingga tahun 1987 tersaji dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Daftar Pimpinan DJB/Bank Indonesia Kantor Cabang Kediri 1969-1987

Nama	Masa Jabatan
Soeroto Dono	Januari-Desember 1969
R. Hardjo Santoso	Desember 1969 - Mei 1971
Wahju Handojo	Mei 1971-Mei 1974
R. Masherman	Mei 1974-September 1975
R. Soenoekarto Darsopanambang	September 1975-November 1977
Purtomo	November 1977-Desember 1981
Soediarto	Januari 1982-April 1985
Jusup Kartadibrata	Mei 1985-Juni 1986
Soediono	Juli 1986-Oktober 1992
Kokrosono Sadhan	Oktober 1992-Agustus 1996
Nugroho Endropranoto	Agustus 1996-November 1998

Sumber: R. Hardjo Santoso, *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri* (Jakarta: Arsip BI, 1990), hlm. 7; Bank Indonesia Kediri, *Koleksi Arsip Foto Bank Indonesia Kediri 1950-2019.*

Seiring dengan pertumbuhan jumlah bank dan layanan yang diberikan, personalia BI cabang Kediri juga terus ditingkatkan jumlah dan kemampuannya. Terkait dengan rekrutmen tenaga personalia, perkembangan menarik pada masa Orde Baru salah satunya adalah penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan kriteria tambahan berupa prestasi dalam bidang olahraga. Jadi, pegawai yang diterima sebagai staf Bank Indonesia tidak hanya mereka yang memenuhi kualifikasi

yang dipersyaratkan untuk menjalankan tugas dan fungsi perbankan semata-mata, kelebihan dalam bidang olahraga juga ikut menjadi faktor yang menentukan. Penyelenggaraan Pekan Olahraga yang digelar secara rutin oleh Bank Indonesia dan kejuaraan-kejuaraan lainnya menjadi alasan dijadikannya prestasi di bidang olahraga sebagai salah satu pertimbangan tambahan dalam seleksi penerimaan personalia Bank Indonesia. Ilustrasi pegawai BI Kediri yang direkrut karena prestasi tambahan di bidang olahraga adalah Soebagijono. Selain memenuhi kualifikasi lowongan, ia diterima bekerja di BI Kediri pada 1 Desember 1976 sebagai kasir berkat prestasi tambahan yang dimilikinya di cabang bulu tangkis.[52] Sementara itu, peningkatan kemampuan pegawai dilakukan dengan pemberian kesempatan dan pengiriman pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik di dalam dan luar negeri.[53]

Untuk meningkatkan kualitas layanan, berbagai perbaikan sarana dan prasarana dilakukan di Bank Indonesia Kediri. Penambahan fasilitas gedung baru dilakukan di kompleks perkantoran Bank Indonesia Kediri pada masa Orde Baru. Pembangunan berlangsung secara bertahap antara 28 Agustus 1980-19 maret 1985, dengan melibatkan kontraktor PT. Bandung Raya Jakarta.[54] Dari segi perlengkapan BI Kediri juga melakukan modernisasi permesinan kantor. Upaya yang dilakukan ini telah memungkinkan otomasi sistem akuntansi untuk menggantikan penggarapan laporan yang sebelumnya dikerjakan secara manual dan banyak menyita waktu.[55] Bagian berikut akan membahas dinamika perekonomian Kediri masa Orde Baru dalam perspektif sektor.

52 Kesaksian Soebagijono dalam Forum Diskusi Grup pada 17 Agustus 2021. Dia diterima di BI Kediri sebagai kasir sejak 1 Desember 1976 di Kediri. Dia mengabdi di Bank Indonesia selama 34 tahun 9 bulan dan memasuki pensiun 1 oktober 2011. Selama bekerja di BI, Ia pernah ditempatkan di BI Jember 2002-2004, di BI Semarang 2004, dan kemudian di BI Jakarta, dan tahun 2006 kembali ke BI Kediri. Sejak pensiun hingga kesaksian diberikan ia menjabat sebagai Ketua Pensiunan Pegawai Bank Indonesia Kediri.

53 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

54 Kesaksian Soebagijono dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

55 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

PEREKONOMIAN KEDIRI ERA PEMBANGUNAN
SEKTOR PERTANIAN

Kediri merupakan kawasan pedalaman dengan pertanian sebagai sektor utama penopang sejak lama hingga masa Orde Baru. Dengan karakteristik ini, kebijakan pembangunan pertanian Orde Baru juga banyak mempengaruhi sektor pertanian di Kediri. Wilayah ini merupakan salah satu daerah utama di Jawa yang menjadi lokasi implementasi kebijakan Orde Baru dalam pembangunan pertanian yang populer disebut dengan istilah Revolusi Hijau. Kompleks area persawahan yang luas dengan Sungai Brantas dan anak-anak sungainya sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan irigasi menjadikan Kediri memainkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Orde Baru. Implementasi program revolusi hijau membuat Kediri sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang memperlihatkan perubahan besar dalam sektor pertanian khususnya pertanian pangan (padi).

Sektor pertanian pangan khususnya beras mengalami perkembangan yang mengesankan pada masa Orde Baru. Perubahan dari negara pengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan pangan domestik menjadi negara yang mampu berswasembada beras merupakan prestasi penting Orde Baru. Sektor pertanian pangan memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Orde Baru karena kemunculannya berangkat dari situasi krisis di Indonesia dan krisis pangan merupakan bagian di dalamnya. Persoalan ketersediaan pangan yang tidak mencukupi dan harga yang sulit dijangkau oleh sebagian besar rakyat menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan Sukarno. Ketika rakyat menuntut perbaikan keadaan kepada pemerintah dalam krisis politik pada pertengahan 1960-an dengan jelas tampak bahwa salah satu dari Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) adalah penurunan harga bahan pokok (beras).[56]

56 Sri Margana dkk., *Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan dari Masa Kolonial sampai Reformasi* (Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010), hlm. 209.

Untuk mengatasi krisis beras, pemerintah berusaha melakukan impor beras dari Thailand. Berdasarkan nota dari Wakil Perdana Menteri J. Leimena, Gubernur Bank Indonesia Jusuf Muda membuka L/C sebesar US$ 2 juta untuk sebuah perusahaan di Bangkok melalui bank di Thailand, tetapi L/C tersebut tidak dapat dicairkan karena ada keraguan akan kemampuan Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran. Usaha untuk mengimpor beras dengan meminta jaminan dari Pemerintah Thailand juga gagal meskipun Panglima Komando Tertinggi Operasi Ekonomi melayangkan surat resmi dengan dukungan tanda tangan dari tokoh-tokoh seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal A.H. Nasution, dan Adam Malik. Bank di Bangkok mengharuskan L/C Bank Indonesia dikonfirmasi salah satu bank di Amerika papan atas, yang bagi Indonesia dengan kondisi yang dihadapinya pada saat itu tidak mungkin didapatkan. Impor beras dari Thailand sebesar 20.000 ton baru berhasil didatangkan ketika Indonesia menjaminkan dua kapal bermuatan tembakau yang tengah dalam perjalanan ke Bremen (Jerman).[57] Kedatangan beras impor ini tidak mampu menyelamatkan pemerintahan Sukarno dari keruntuhannya.

Belajar dari pengalaman krisis pemerintahan Sukarno dan begitu vitalnya beras untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik, pemerintah Orde Baru menempatkan ketersediaan beras sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang dijalankannya. Pada tahun-tahun awal kehadiran Orde Baru, kebijakan impor beras menjadi penyangga untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Pada tahun 1966, Indonesia mengimpor beras dari Burma sebesar 20.000.000 ton dengan pembayaran secara kredit berjangka waktu enam bulan dengan bunga sebesar 4% per tahun. Pada tahun berikutnya, pemerintah Orde Baru juga berusaha mengimpor kembali beras dari Burma, tetapi dihadapkan pada kendala cadangan devisa negara yang tidak mencukupi dan terbatasnya stok padi akibat kemarau panjang yang juga melanda negara-negara produsen padi yang berdampak besar pada kegagalan panen. Upaya penggantian beras dengan bahan pangan dari bulgur, gandum, dan "beras tekad" (butir-butir mirip beras yang dibuat dari campuran gandum, kacang-kacangan, dan jagung yang ketika dimasak berubah menjadi bubur) yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1967 banyak menghadapi penolakan

57 *Ibid.,* hlm. 215-216.

dan memicu aksi-aksi demonstrasi yang berpotensi menyebabkan kemelut politik.[58]

Pemerintah Orde Baru menyadari betapa urgen dan vitalnya untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan sistemik untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat demi terpeliharanya stabilitas ekonomi dan politik. Dalam membangun sektor pertanian, khususnya untuk meningkatkan produksi bahan pangan, pemerintah Orde Baru menerapkan tiga program, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Dari ketiga program ini, intensifikasi pertanian merupakan program yang paling penting dan diimplementasikan melalui Panca Usaha Tani, yang meliputi: (1) penyediaan bibit padi unggul; (2) penggunaan pupuk kimia; (3) perbaikan sarana irigasi; (4) pemberantasan hama dan penyakit; dan (5) perbaikan cara bercocok tanam.[59] Program pembangunan pertanian yang sarat dengan paket teknologi modern tersebut populer dikenal sebagai Revolusi Hijau.

Implementasi Revolusi Hijau selama era Orde Baru dalam kelima paket teknologi modern dapat diilustrasikan secara faktual. Dalam kaitan dengan bibit unggul, sejumlah padi varietas didorong penanamannya. Varietas unggul IR 8 yang dihasilkan oleh International Rice Research Institute (IRRI) di Los Banos (Filipina) mengawali penanaman padi varietas unggul dan di Indonesia dikenal dengan sebutan PB 8. Sejumlah varietas padi unggul baru (PUB) menyusul di antaranya Pelita I-1 dan Pelita I-2. Selanjutnya, diadopsi pula berbagai padi varietas unggul tahan wereng (VUTW I) seperti Serayu, Asahan, Brantas, Citarum, PB 26, PB 28, PB 29, dan PB 34. Varietas ini disusul dengan sejumlah varietas yang termasuk kelompok VUTW II seperti Cisadane, Cimandiri, Ayung, PB 32, PB 36, PB 38, dan PB 42. [60]

Penggunaan pupuk selama Orde Baru juga meningkat. Data penggunaan pupuk di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 1971 penggunaan pupuk urea baru mencapai sebesar 405.800 ton. Pada tahun 1978, volume pupuk yang digunakan mencapai 1.159.000 ton, sedangkan penggunaan pupuk TSP meningkat dari 37.900 ton pada

58 *Ibid.*, hlm. 216-217.

59 *Ibid.,* hlm. 219.

60 *Ibid.*, hlm. 232-233.

tahun 1972 menjadi 205.000 ton pada tahun 1978.[61] Penggunaan pupuk NPK juga meningkat dari rata-rata 14,56 kilogram/hektar pada tahun 1969 menjadi 30,43 kilogram/hektar. Pada tahun 1982, penggunaan NPK mencapai 106,72 kilogram/ hektar.[62] Pemakaian insektisida naik pula dari rata-rata sebesar 0,56 kilogram/hektar pada tahun 1971 menjadi 1,06 kilogram/hektar pada tahun 1980. Peningkatan penggunaan pupuk dimungkinkan berkat bertambahnya kapasitas produksi pupuk kimia di dalam negeri. Produksi pupuk urea tumbuh dari sebesar 85,4 ribu ton pada tahun 1969/1970 menjadi 2.204.000 ton pada tahun 1983/1984. Demikian pula, produksi pupuk ZA meningkat dari 49.700 ton pada tahun 1972/1973 menjadi 208.000 ton pada tahun 1972/1973.[63] Secara komparatif dalam konteks Asia, industri pupuk kimia di Indonesia pada masa Orde Baru digambarkan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai salah satu industri pupuk yang paling cepat pertumbuhannya.[64]

Melalui program Revolusi Hijau, produksi pangan khususnya beras di Indonesia masa Orde Baru mengalami peningkatan tajam. Produktivitas padi di Jawa meningkat dari rata-rata 2,7 ton/hektar pada tahun 1969 menjadi 3,04 ton/hektar pada tahun 1974. Pada tahun 1980, produktivitas padi bertengger 3,98 ton/hektar dan meningkat hingga 4,27 ton/hektar pada tahun 1984.[65] Produksi beras perkapita meningkat dari 105 kilogram pada tahun 1977/1980 menjadi 144 kilogram pada tahun 1987/1992.[66] Produksi padi yang diperoleh dari lahan sawah mengalami peningkatan lebih dari 250% pada periode 1966 hingga 1992. Peningkatan produksi bersumber terutama dari panenan yang berlangsung lebih dari dua kali setahun dalam periode ini, yang berkontribusi lebih dari 70% dari keseluruhan peningkatan produksi beras. Berkat terjadinya peningkatan produksi, konsumsi beras perkapita juga mengalami pertumbuhan sekitar 80%. Kejadian kasus-kasus kelaparan juga semakin berkurang. Kinerja pemerintah Orde Baru dalam sektor beras digambarkan oleh ekonom

61 *Ibid.*, hlm. 234.

62 Anne Booth, *Agricultural Development in Indonesia* (Sydney: Allen and Unwin, 1988), hlm. 143.

63 Sri Margana dkk., *op.cit.*, hlm. 234.

64 Anne Booth (1988), *loc.cit*.

65 *Ibid.*, hlm. 140.

66 Pierre van der Eng (2002), *op.cit.,* hlm. 433.

Australia, Hal Hill sebagai sebuah kisah sukses luar biasa. Dari negara pengimpor beras yang besar pada tahun 1960-an, Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada impor beras dan bahkan menjelma menjadi negara yang mampu berswasembada beras pada pertengahan 1985.[67]

Perkembangan sektor pertanian di Kediri juga mencerminkan tren yang berlaku secara umum di Indonesia dan Jawa pada khususnya. Sektor pertanian masih memainkan peranan penting khususnya dalam produksi padi di daerah aliran Sungai Brantas. Data tahun 1983 menunjukkan wilayah Kediri memiliki area sawah irigasi paling luas di daerah aliran Sungai Brantas. Sistem jaringan irigasi yang ada di wilayah Kediri mencakup total area seluas hampir 140.000 hektar. Secara lebih rinci, angka ini meliputi sekitar 92.000 berupa jaringan irigasi teknis, 17.000 jaringan irigasi setengah teknis dan 31.000 hektar jaringan irigasi non-teknis. Sawah dengan jaringan irigasi teknis di Jombang sekitar 58.000 hektar, sedangkan di Mojokerto kurang lebih seluas 54.000 hektar dan di Malang sebesar sekitar 53.000 hektar.[68] Di wilayah aliran Sungai Brantas ini areal sawah dengan irigasi teknik mencapai 69%, dan di wilayah Kediri dengan area sawah yang paling luas jaringan irigasi teknisnya mencapai 66%. Dengan mengacu Jawa Timur secara umum, pada periode 1970-1983, areal sawah dengan irigasi teknis meningkat sebesar 13%.[69]

Perbaikan jaringan irigasi tidak hanya memungkinkan perluasan areal sawah melalui konversi lahan-lahan yang semula tergolong sebagai lahan kering. Dengan konversi ini luas area pertanian lahan kering (tegalan) berkurang. Bukan itu saja, perbaikan irigasi juga menjamin ketersediaan air untuk budidaya pertanian terutama pada musim kemarau. Hal ini memberi kontribusi penting dalam mengurangi risiko kegagalan panen akibat kekeringan terutama pada saat terjadi kemarau panjang. Pada sisi lain, ketika musim hujan perbaikan jaringan irigasi memberi kontribusi dalam pengendalian banjir sehingga kerusakan tanaman akibat banjir

67 Pierre van der Eng, *Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880* (Houndsmill: Macmillan, 1996), hlm.190; Hill (1988), *op.cit.,* hlm. 169.

68 James J. Fox, "Lumbung Beras di Jawa Timur: Ekologi dan Konteks Sosial Produksi Sawah," dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 175.

69 *Ibid.,* hlm. 174.

juga berkurang. Dengan perbaikan sarana irigasi, penanaman pada lahan sawah khususnya dengan tanaman padi juga meluas dan meningkat intensitasnya. Peningkatan ini dimungkinkan melalui peluang penanaman padi yang kedua atau bahkan penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun ketika irigasi terjamin. Hal ini juga dimungkinkan berkat penanaman varietas padi berusia pendek. [70]

Adopsi varietas padi bibit unggul juga menjadi bagian penting dalam implementasi Revolusi Hijau di wilayah Kediri. Hal ini tercermin dalam tren perluasan area sawah yang ditanami dengan varietas-varietas padi unggul seperti IR atau PB, Pelita, dan beberapa varietas unggul lainnya. Untuk wilayah Kediri bersama dengan wilayah Jawa Timur lainnya secara umum, persentase sawah yang ditanami varietas padi unggul pada tahun 1974/1975 mencapai sekitar 66% dan pada tahun 1981/1982 meningkat hingga hampir 80%. Secara berkesinambungan, adopsi bibit unggul terus dilakukan untuk merespons berbagai problem yang muncul, khususnya hama wereng. Lima varietas padi yang paling banyak ditanam pada tahun 1975/1976 secara berurutan berdasarkan besaran persentasenya adalah PI-1 (28,1%), IR 5 (16,6%), C4-63 (9,7%), IR 26 (8,6%), dan PI-2 (3,1%). Sementara itu, pada tahun 1980/1981 varietas padi yang banyak ditanam adalah IR36 (75,3%), C4-63 (5,2%), PI-1 (2,9%), Semeru (2,2%), dan IR 38 (2,2%). Ketika swasembada diraih pada tahun 1984/1985, varietas padi yang ditanam terutama adalah IR 36 (55%) dan Krueng Aceh (20,7%), disusul Cisadane (7,6%), Semeru (2,3%), dan Cipunegara (1,3%).[71] Perkembangan menarik dalam kaitan varietas padi unggul adalah munculnya varietas-varietas padi unggul hasil program pemuliaan tanaman nasional dengan nama-nama sungai (Cisadane, Cipunegara, Citarum, Cimandiri, dan Citandui) dan nama-nama tempat di Indonesia seperti Krueng Aceh, Sadang, dan Semeru. [72]

Elemen penting lainnya yang diadopsi dalam Revolusi Hijau di Kediri tentu saja adalah penggunaan pupuk dan input kimia. Semua varietas padi unggul yang baru sangat responsif terhadap nitrogen terutama dalam bentuk urea, selain ammonium sulfat (ZA) tripel pospat (TSP) dan

70 *Ibid.*, hlm. 176.

71 James J. Fox, *op.cit.*, hlm. 181-182.

72 *Ibid*, hlm. 184.

potassium klorida (KCL). Pada tahun 1971, penggunaan pupuk urea di Kediri dan Jawa Timur lainnya rata-rata mencapai kurang lebih 114 kilogram/hektar dan meningkat dua kali lipat pada tahun 1977 dengan penggunaan rata-rata sekitar 229 kilogram/hektar. Pada tahun 1983, penggunaan urea mencapai lebih dari 303 kilogram/hektar. Dari data yang sama, secara komparatif penggunaan pupuk urea di Kediri dan Jawa Timur pada umumnya jauh lebih besar dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang pada tahun 1983 secara berurutan masing-masing sebesar 210 kilogram/hektar dan 250 kilogram/hektar.[73]

Selama Orde Baru, luas tanam dan produksi padi di Kediri juga meningkat secara signifikan. Area sawah irigasi di Kediri tumbuh sebesar 12,5% pada periode 1969-1979, sedangkan peningkatan produksi pada periode 1961-1965 dan periode 1976-1980 tumbuh sebesar 121,6% dengan peningkatan produktivitas padi sawah mencapai sebesar 65,8%.[74] Pada tahun 1985, di wilayah Kediri tercatat produksi padi sebesar 334.700 ton dengan area panen seluas 256.820 hektar. Rata-rata produktivitas padi adalah sebesar 5,36 ton/hektar. Angka ini merupakan yang tertinggi di daerah persawahan di Lembah Sungai Brantas. Kabupaten Jombang yang menempati urutan kedua dari lima kabupaten di Lembah Sungai Brantas mencatatkan hasil panen sebesar 285.300 ton dengan luas panen mencapai 54.269 hektar dan rata-rata produktivitas sebesar 5,26 ton/hektar.[75]

Bukan hanya dalam luas area penanaman saja terjadi kenaikan, produktivitas padi juga tumbuh secara mengesankan. Pada tahun 1970, produktivitas padi rata-rata sebesar 37,02 kuintal/hektar dan rata-rata sebesar 44,9 kuintal/hektar pada periode 1971-1975 atau meningkat lebih dari 21%. Pada periode 1976-1980 produktivitasnya terus naik hingga 51,1 kuintal/hektar. Angka ini termasuk di antara yang tertinggi di seluruh Jawa, lebih besar dibanding produktivitas padi sawah di Madiun sebesar 48,8 kuintal/hektar. Produktivitas padi sawah di Kediri hanya sedikit lebih rendah dibanding Malang sebesar 52,4 kuintal/hektar

73 James J. Fox, *op.cit.*, hlm. 196.

74 Anne Booth (1988), *op.cit.*, hlm. 161.

75 James J. Fox, *op.cit.* , hlm. 189.

dan di Jember yang mencapai 53,2 kuintal/hektar.[76] Produksi padi per kapita Kediri tumbuh dari 94 kilogram pada 1968 menjadi 117 kilogram pada 1981. Pada tahun 1988, produksi mencapai 182 kilogram/kapita.[77] Peningkatan produksi yang berlipat ganda pada periode 1968-1988 ini masih bisa diraih meskipun jumlah penduduk terus tumbuh. Pada tahun 1971, penduduk Kabupaten Kediri berjumlah 1.080.695 jiwa dan pada tahun 1980 mencapai 1.199.989 jiwa. Pada tahun 1985, jumlah penduduk Kediri tercatat sebesar 1.252.539 jiwa.[78]

Tabel 5.3.
Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri, Periode 1984/1985-1987/1988 (dalam ton)

Kecamatan	1985/1986	1986/1987	1987/1988
Semen	10.140	8.952	9.332
Mojo	16.258	11.513	11.415
Tarokan	7.233	17.409	14.930
Grogol	10.492	10.387	10.990
Gempengrejo	16.190	17.440	13.068
Papar	144.520	158.517	226.238
Purwoasri	123.716	143.815	192.860
Kunjang	231.950	229.650	198.185
Plemahan	268.994	412.645	286.675
Pagu	21.451	33.700	25.083
Pare	346.635	377.223	231.772
Kandangan	17.038	17.433	18.359
Gurah	18.362	23.049	19.694
Plosoklaten	238.535	244.850	245.812
Kepung	17.288	21.243	20.933
Puncu	48.278	67.891	36.401
Wates	14.853	15.633	14.315
Ngancar	8.207	13.033	9.594
Kandat	15.826	10.749	10.639

Sumber: Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm. 29-135.

76 Anne Booth (1988), *op.cit.*, hlm. 159.

77 Jamie Mackie, "Pereknonomian Jawa Timur: Dari Dualisme ke Pambangunan Berimbang", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan Yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 56.

78 Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid I (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm. 79.

Seperti terlihat pada Tabel 5.3 semua kecamatan di Kabupaten Kediri merupakan wilayah produksi padi. Akan tetapi, dari 19 wilayah kecamatan yang ada di kabupaten ini, sentra produksi padi terpenting adalah Kecamatan Pare, Plemahan, Plosoklaten, Kunjang, Papar, dan Purwoasri. Angka produksi padi di enam kecamatan ini pada periode 1985-1987 memperlihatkan posisi yang berubah-ubah secara komparatif dari segi ranking. Pada tahun 1985/1986, Kecamatan Pare berada pada posisi tertinggi, tetapi pada tahun-tahun berikutnya posisinya digantikan Kecamatan Plemahan. Fluktuasi produksi pada masing-masing kecamatan terjadi umumnya karena faktor hama dan penyakit dan beberapa faktor lain. Penjelasan secara spesifik atas fluktuasi produksi padi pada masing-masing lokasi mengharuskan penggalian dan ketersediaan data mikro yang memadai, sayangnya belum berhasil dijangkau. Akan tetapi, dari statistik produksi yang tersedia dapat dikatakan bahwa enam kecamatan di Kediri masih menjadi sentra utama produksi padi. Secara ekologis, kecamatan-kecamatan ini merupakan wilayah dataran dengan sawah yang luas dan irigasi yang baik. Di kecamatan-kecamatan inilah program Revolusi Hijau pada masa Orde Baru dilaksanakan secara intensif dan berskala luas.

Selain padi, tanaman pertanian yang penting di kawasan Kediri adalah kedelai. Pada era Orde Baru, kedelai merupakan tanaman palawija utama di Kediri dan kawasan Jawa Timur lainnya. Budidaya tanaman kedelai secara umum dilakukan pada musim kemarau di area persawahan. Penanaman dilakukan terutama sesudah penanaman padi pertama maupun kedua tergantung kondisi irigasi pada masing-masing lokasi. Kedelai termasuk dalam kelompok tanaman palawija yang umum ditanam pada musim kemarau ketika suplai irigasi terbatas ketersediaannya. Wilayah Kediri bersama Daerah Aliran Sungai Brantas lainnya merupakan area penanaman kedelai utama di Jawa Timur. [79] Data tahun 1984 menunjukkan bahwa daerah Kediri dan Lembah Sungai Brantas memberikan panen kedelai seluas 56.232 hektar. Angka ini lebih luas dibanding daerah yang sebelumnya termasuk wilayah Keresidenan Kediri lainnya, misalnya, pada tahun yang sama panen kedelai di Tulungagung seluas 8.882 hektar, sedangkan di Malang seluas 1.043

79 James J. Fox, *op.cit.*, hlm. 198-199.

hektar. Sementara itu, panen kedelai di wilayah Malang sebesar 1.505 hektar.[80]

Berdasarkan data statistik tahun 1985/1986-1987/1988, penanaman kedelai dilakukan di 13 kecamatan di Kediri. Penanaman kedelai dalam skala besar paling luas terdapat di dua kecamatan, yakni Papar dan Purwoasri. Penanaman kedelai juga banyak dilakukan di Kecamatan Tarokan, Gempengrejo, Pare, Puncu, dan Grogol. Dalam skala yang lebih marginal perkembangan volume produksi kedelai juga ditemukan di beberapa kecamatan lain, secara lebih lengkap hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Penanaman Kedelai di Kabupaten Kediri 1985-1987 (dalam hektar)

Kecamatan	1985/1986	1986/1987	1987/1988
Semen	72,1	86,1	52,2
Tarokan	820,3	1.087,4	735,4
Grogol	374	670,1	452,6
Gempengrejo	769	876,2	355,6
Papar	11.624	7.215	6.429
Purwoasri	7.444,4	8.406,4	8.758,2
Pagu	1.087,7	336	527,8
Pare	1.297	1.920	937
Kandangan	38,2	70,8	83,4
Kepung	84	84,9	74,6
Puncu	827	599	125
Wates	0,9	5,8	0
Kandat	2,5	0	17,1

Sumber: Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm.29-135.

80 *Ibid.*, hlm. 202.

SEKTOR PERKEBUNAN

Selain pertanian, perekonomian Kediri juga ditopang oleh sektor perkebunan baik yang diselenggarakan oleh perusahaan perkebunan besar maupun beroperasi sebagai perkebunan rakyat. Berdasarkan data tahun 1987, perkebunan besar mencakup area seluas sekitar 7.000 hektar, sedangkan perkebunan rakyat meliputi area lebih dari 28.000 hektar.[81] Beragam tanaman perkebunan dibudidayakan di wilayah Kediri. Terdapat tanaman perkebunan yang dibudidayakan di area persawahan dataran rendah dengan tebu sebagai tanaman utama. Berbagai tanaman juga dibudidayakan di wilayah dataran tinggi Kediri terutama kopi, karet, cengkih, dan tembakau. Berdasarkan data tahun 1989, di wilayah Kediri baik kota maupun kabupaten masih terdapat tiga pabrik gula, yakni PG Ngadiredjo, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, ditambah satu lagi PG Lestari yang secara administratif ada di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, terdapat lima perusahaan perkebunan besar di wilayah Kediri, yakni Perkebunan Ngrangkah Pawon, Perkebunan Mangli, Perkebunan Sumber Petung, Perkebunan Sukosewu, dan Perkebunan Margomulyo.[82]

Lebih dari tanaman lainnya, tebu masih menduduki posisi terpenting di wilayah Kediri pada masa Orde Baru. Pada tahun 1984, misalnya, produksi tebu di wilayah Kediri masih menduduki urutan tertinggi dibanding empat kabupaten lain (Jombang, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo) di daerah lembah Sungai Brantas. Pada tahun ini luas panen tebu di Kediri adalah sebesar 12.234 hektar. Secara proporsional, Kediri menyumbang hampir sepertiga dari total panen tebu di daerah lembah Sungai Brantas pada tahun 1984 seluas 38.093 hektar. Produksi tebu di Kediri tercatat sebesar 84.820 ton dengan rata-rata produktivitas mencapai 6,91 ton/hektar. Sementara itu, kabupaten yang bertetangga yang menempati urutan kedua, yakni Jombang, luas panen tebu mencapai 9.457 hektar dengan produksi sebesar 69.670 ton. Di Kabupaten Nganjuk, luas panen tebu pada tahun yang sama adalah 4.470 hektar dengan produksi mencapai

81 Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid I (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm. 8.

82 *Ibid*, hlm. 8-9.

30.020 ton.[83] Kediri memberi andil besar kepada Jawa Timur sehingga menjadi area perkebunan tebu terbesar di Indonesia. Provinsi ini memberi andil sebesar 51% dengan total area penanaman tebu seluas 154.320 hektar pada tahun 1986. Sementara itu, Jawa Tengah dan Yogyakarta yang juga menjadi area perkebunan tebu penting di Indonesia sejak masa Hindia Belanda hanya memberi andil sebesar 18,3% dengan area seluas 55.395 hektar.[84]

Perkebunan tebu mengalami beberapa perubahan pada masa Orde Baru, meskipun komoditas yang diusahakan tetap sama dengan masa Hindia Belanda. Pabrik gula pada masa Orde Baru dikelola sebagai perusahaan milik negara, sedangkan pada masa Hindia Belanda umumnya dikelola oleh sektor swasta. Perubahan penting lainnya adalah pemberlakuan sistem Tebu Rakyat Indonesia (TRI) sejak tahun 1975, sebagai bentuk baru penanaman tebu oleh rakyat. Pada masa Hindia Belanda, penanaman tebu oleh rakyat dilakukan secara bebas atas prakarsa mereka sendiri. Penanaman tebu rakyat di bawah sistem TRI merupakan inisiatif pemerintah. Dalam praktik pelaksanaan TRI banyak diwarnai dengan paksaan melalui pejabat setempat untuk menjamin rakyat mau menanam tebu pada lahan mereka. Untuk menjamin terpenuhinya bahan baku, kaum petani dipaksa menanam tebu pada lahan mereka dan menyerahkan panennya kepada pabrik. Peranan pabrik dikurangi sehingga hanya sebatas pada tugas pemrosesan tebu menjadi gula, selain memberikan panduan dan bimbingan teknis kepada petani tentang tata cara penanaman tebu yang baik dan penyediaan berbagai sarana produksi seperti bibit tebu, pupuk, dan pestisida.[85]

Perubahan lainnya menyangkut aspek agronomis yakni perluasan penanaman tebu dari lahan persawahan ke area lahan kering (tegalan). Hal ini seiring dengan inovasi teknologi sejak tahun 1970-an. Bukan ini saja, penanaman tebu juga lazim dilakukan dengan menerapkan sistem ratun (*keprasan*), yakni tebu dibiarkan tumbuh satu hingga dua kali lagi

83 James J. Fox, *op.cit.*, hlm. 200.

84 Jamie Mackie, "Perkebunan dan Tanaman Perdagangan di Jawa Timur: Pola yang sedang Berubah" dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 264.

85 *Ibid.*, hlm. 275-276.

setelah panen pertama. Praktik ini sangat dihindari pada masa Hindia Belanda karena hasil tebu yang diperoleh memberikan kadar sukrosa yang rendah meskipun lebih efisien dalam aspek kebutuhan tenaga kerja untuk penyiapan lahan penanaman. [86]

Penerapan sistem TRI memberikan kenaikan dalam produksi gula. Kenaikan produksi berhasil diraih karena pabrik gula tidak lagi mendapatkan kesulitan dalam perolehan tebu untuk digiling. Seperti tampak pada Tabel 5.5 dan dengan asumsi bahwa tren data ini mencerminkan perkembangan di tingkat daerah Kediri, luas area tanaman tebu pada periode 1975-1985 meningkat lebih dari dua kali lipat, tetapi luas area tanam kemudian menjadi relatif konstan pada tahun-tahun sesudahnya. Seiring dengan perluasan area penanaman, produksi tebu juga mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 66% dan kemudian sedikit fluktuasi antara tahun 1986 dan 1989.

Selisih antara tingkat perluasan area dengan volume tebu yang dihasilkan dipengaruhi setidaknya oleh dua faktor, yakni kesuburan tanah dan kondisi klimatis. Faktor pertama terkait dengan perluasan penanaman tebu di lahan-lahan kering yang tingkat produktivitas tebunya secara umum lebih rendah dibandingkan area persawahan. Untuk mewujudkan swasembada gula, pemerintah Orde Baru mengkampanyekan perluasan area penanaman tebu ke lahan kering, sebagai salah satu dari tiga programnya. Dua program lainnya adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas pabrik gula, serta pembangunan pabrik gula di luar Jawa. Sementara itu, kondisi iklim antar tahun juga tidak selalu konstan dan tanaman tebu juga dipengaruhi oleh kondisi iklim dan faktor-faktor alam lainnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1982 kemarau yang berkepanjangan telah mengguncang industri gula. Banyak petani meminta pabrik gula memanen tanaman tebu lebih awal dari waktunya untuk mencegah terjadinya kerugian besar akibat kerusakan tebu di lahan. Hal ini berakibat terjadi penurunan produksi gula secara mencolok.[87]

86 *Ibid.*, hlm. 276-277.

87 Mubyarto dan Daryanti, *Gula: kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 18.

Tabel 5.5.
Luas Tanaman dan Produksi Tebu di Jawa Timur, 1975-1989 (x 1000)

Tahun	Luas Tanaman	Produksi
1975	32,5	609
1980	94,2	756
1985	154,7	1.031
1986	160,8	1.128
1987	153,8	1.215
1988	163,6	1.123
1989	149,8	1.071

Sumber: Jamie Mackie, "Perkebunan dan Tanaman Perdagangan di Jawa Timur: Pola yang sedang Berubah", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 277.

Sentra penanaman tebu di daerah Kediri adalah Kecamatan Kandat dan Kecamatan Kras. Hal ini tampak dari segi luas area tanaman dan produksi tebu di kedua kecamatan ini. Tabel 5.6 mengindikasikan bahwa Kecamatan Kandat dan Kecamatan Kras ini tampaknya silih berganti menempati urutan teratas dari segi luas penanaman maupun produksi tebu di Kediri. Penanaman tebu dalam skala besar juga dilakukan di tiga kecamatan lainnya di Kediri, yakni Kecamatan Papar, Kecamatan Purwoasri, dan Kecamatan Pare.

Tabel 5.6.
Penanaman dan Produksi Tebu di Kabupaten Kediri 1984-1987
(dalam ton dan hektar)

Kecamatan	1985		1986		1987	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
Semen	88,0	5525,0	129,0	8385,0	73,0	6205,0
Papar	611,7	54105,5	561,7	42263,8	548,9	40617,1
Purwoasri	762,6	57423,8	885,7	66690,2	754,4	56807,1
Pare	597,7	43085,0	757,6	60867,0	826,8	83336.0
Kandat	1051,0	118237,5	822,8	92568,4	835,8	94027,5
Kras	n.a.	141773,6	n.a.	n.a.	n.a.	82411,7
Ngadiluwih	n.a.	76735,4	n.a	93831,4	n.a.	130451,9

Catatan n.a.: Tidak ada data.

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm, 29-147.

Bukan hanya perkebunan tebu, berbagai tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kakao, cengkih, kayu manis, dan teh juga dibudidayakan di Kediri pada masa Orde Baru. Tanaman perkebunan ini juga biasa disebut sebagai tanaman perkebunan dataran tinggi atau pegunungan (*bergcultures*). Ada lima perusahaan yang menjalankan usaha budidaya tanaman perkebunan dataran tinggi di wilayah Kediri, yakni di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Kelima pelaku perkebunan besar ini adalah PT. Perkebunan XXIII (PTP XXIII), perusahaan milik daerah, dan tiga perusahaan swasta nasional. Area perkebunan tanaman dataran tinggi di Kediri secara keseluruhan mencapai 5.125 hektar.[88] Perkebunan pegunungan yang beroperasi di Kediri dan kabupaten lain di wilayah eks Keresidenan Kediri pada tahun 1973 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.7.
Perkebunan dan Komoditas yang diusahakan di Kediri pada Tahun 1973

Perkebunan	Luas (ha)	Komoditas	Lokasi
Jaeyan	530	Karet, kopi, kakao	Sendang (Tulungagung)
Bantaran	1.394	Kopi, karet, kakao, cengkih	Gandusari (Blitar)
Ngusri	381	Kopi, cengkih	Gandusari (Blitar)
Kawisari	349	Kopi, cengkih	Gandusari (Blitar)
Nyunyur	472	Kopi, cengkih, karet	Gandusari (Blitar)
Jurang Banteng	326	Kopi	Gandusari (Blitar)
Rotorejo	254	Kopi, karet	Gandusari (Blitar)
Karangnongko	263	Kopi, cengkih	Nglegok (Blitar)
Candisewu	620	Kopi, cengkih, sereh	Nglegok (Blitar)
Karang Anyar	381	Kopi, cengkih	Nglegok (Blitar)
Perhutani Wlingi	124	Kopi	Wlingi (Blitar)
Sengon	559	Kopi, cengkih	Wlingi (Blitar)
Pijiombo	375	Kopi, cengkih	Wlingi (Blitar)
Swaru Buluroto	609	Kopi	Garum (Blitar)
Petung Ombo	433	Karet, kakao	Garum (Blitar)
Kulon Bambang	936	Kopi, teh, cengkih	Doko (Blitar)
Ngrangkah Pawon	4.066	Kopi, karet, kakao, kayumanis	Ploso Klaten (Kediri)
Mangli	300	Kopi	Puncu (Kediri)
Sumber Petung	798	Kopi, karet, cengkih, kelapa	Ngancar (Kediri)
Margo Mulyo	344	Kopi, karet	Ngancar (Kediri)

Sumber: P.S. Siswoputranto, *Perkembangan Teh, Kopi, Cokelat Internasional* (Jakarta: PT Gramedia, 1978), hlm. 436-437.

88 Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, "Pokok Ngudud Keretek: Kebiasaan Ngudud dan Munculnya Pabrik Keretek di Kediri Jawa Timur 1970-an", *Jurnal Handep*, Vol. 4 No. 1 Desember 2020, hlm. 5.

Berdasarkan Tabel 5.7 di atas, tampak bahwa dari segi area yang diusahakan, Ngrangkah-Pawon yang berlokasi di Kediri merupakan perkebunan terbesar, disusul oleh Perkebunan Bantaran yang terdapat di Blitar. Hampir semua perusahaan perkebunan mengembangkan beragam jenis tanaman seperti kopi, karet, cengkih, kakao, dan beberapa tanaman lainnya. Dari beragam tanaman tersebut, tidak semua tanaman memiliki signifikansi ekonomi yang sama. Kopi merupakan tanaman perkebunan dataran tinggi yang menempati posisi paling penting di Kediri pada masa Orde Baru. Pentingnya komoditas kopi tampak jelas dari fakta bahwa hampir semua perusahaan perkebunan di Kediri membudidayakan kopi sebagai komoditasnya.

Pentingnya perkebunan kopi khususnya di Kediri juga tampak dari perbandingan luas lahan penanaman masing-masing komoditas (Tabel 5.8) dan area pembibitan yang tersedia. Penanaman kopi menempati area paling luas di Kediri, yakni lebih dari 2.100 hektar. Tanaman perkebunan lain khususnya kakao dan cengkih luas area tanam masing-masing adalah kurang lebih 820 hektar dan 120 hektar. Dalam periode lima tahun antara 1977 hingga 1982, ketiga tanaman perkebunan ini mengalami perluasan secara signifikan. Dari segi area perluasan tanaman kopi menempati urutan tertinggi, dengan peningkatan sekitar 450 hektar. Perluasan area tanaman kakao dan cengkih kurang lebih sama sekitar 130 hektar. Untuk mendukung peremajaan dan perluasan tanaman, terdapat kebun-kebun pembibitan seluas 13 hektar untuk kopi, 9 hektar untuk karet, 3 hektar untuk cengkih, dan 0,5 hektar untuk kakao.[89]

Tabel 5.8.
Luas Lahan Beberapa Tanaman Perkebunan yang Utama di Kediri pada 1977 dan 1982 (dalam hektar)

Komoditas	Luas lahan		Persentase Kenaikan
	1977	1982	
Cengkih	122,65	251,90	105,3
Kakao	820,48	950,28	15,9
Kopi	2.119,44	2.588,36	22,1

Sumber: Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, "Pokok Ngudud Keretek: Kebiasaan Ngudud dan Munculnya Pabrik Keretek di Kediri Jawa Timur 1970-an", *Jurnal Handep,* Vol. 4 No. 1 Desember 2020, hlm. 6.

89 *Ibid.,* hlm. 6.

Sejajar dengan berlangsungnya ekspansi area tanam, volume produksi kopi, cengkih, dan kakao juga memperlihatkan tren peningkatan. Hanya saja masing-masing komoditas menampilkan laju peningkatan yang berbeda-beda. Pada periode 1977-1981 produksi kopi mencatatkan angka jauh lebih tinggi dibanding kakao dan cengkih, yakni hampir mendekati 1.600 ton pada tahun 1977 dan 1.800 ton pada tahun 1981. Produksi kopi tetap tinggi meskipun laju kenaikannya terendah yakni hanya 12,4%. Produksi cengkih meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dari sekitar 3 ton lebih menjadi 12 ton lebih, sedangkan untuk produksi kakao meningkat lebih dari tiga kali lipat dari sekitar 192 ton menjadi hampir 788 ton. Perbandingan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9.
Volume Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan di Kediri 1977 dan 1981

Komoditas	Produksi (kg)		Kenaikan (%)
	1977	1981	
Cengkih	3.320	12.165	266,4
Kakao	192.125	787.544	309,9
Kopi	1.574.265	1.769.574	12,4

Sumber: Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, "Pokok Ngudud Keretek: Kebiasaan Ngudud dan Munculnya Pabrik Keretek di Kediri Jawa Timur 1970-an", *Jurnal Handep,* Vol. 4 No. 1 Desember 2020, hlm. 7.

Produksi kopi di Kediri, baik sebagai usaha perkebunan besar maupun perkebunan rakyat, tersebar di banyak kecamatan dengan skala yang berbeda. Sentra produksi kopi terpenting di wilayah Kediri pada masa Orde Baru terutama adalah Kecamatan Plosoklaten dengan area lebih dari 2.000 hektar. Kopi juga menjadi tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting di empat kecamatan lain, yakni Ngancar, Puncu, Kandangan, dan Pare dengan area berkisar antara 100-400 hektar. Di berbagai kecamatan lain penanaman kopi lebih kecil dari segi skala luas area dan produksinya.

Tabel 5.10.
Produksi Kopi di Wilayah Kabupaten Kediri 1984-1987

Kecamatan	1984		1985		1986		1987	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
Semen	8,7	0,9	8,7	1,4	8,7	1,9	10,2	1,8
Mojo	14,8	2,4	14,8	2,8	14,8	4,6	16,8	4,9
Grogol	2,4	0,2	2,4	0,3	2,4	0,6	2,7	0,5
Pare	145,6	6,8	145,6	10,1	145,6	13,9	131,4	19,7
Kandangan	258,5	44,5	258,5	44,5	258,5	44,5	258,5	52,8
Gurah	3,3	1,5	2,9	2,4	2,9	3,0	2,9	4,7
Plosoklaten	2.040	789,3	2.022	1178,6	2.022	1077.7	1.990	1.470,8
Kepung	n.a	411	n.a	357,8	n.a	n.a	n.a	336,6
Puncu	237,7	39,4	237,7	48,4	237,7	44,2	226,3	56,5
Wates	94,6	20,8	94,6	30,6	94,6	38,5	86,8	31,4
Ngancar	372,8	51,4	372,8	51,4	372,8	57,4	372,8	57,4
Kandat	69,8	11,3	69,8	15,3	69,8	35,2	69,8	35,2

Catatan n.a.: Tidak ada data.

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm, 29-136.

Kopi dari Kediri merupakan salah satu komoditas yang memberi kontribusi penting bagi produk ekspor dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 1978, terdapat 25 perusahaan milik negara dan swasta di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pedagang kopi dan ditetapkan besaran kuota ekspornya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No: 01/DAGLU/KP/I/78, kuota ekspor kopi tertinggi diberikan kepada PTP XXIII dan XXVI sebesar 6.000 ton/tahun. PTP XXIII, seperti telah disebutkan di muka, merupakan perusahaan perkebunan milik negara yang mengusahakan kopi dan beberapa tanaman perkebunan lain di wilayah di Kediri. Kuota ekspor tertinggi kedua diberikan kepada PT Landuc, yakni sebesar 2.080 ton/tahun. Di luar keduanya, hak mengekspor kopi diberikan kepada perusahaan milik negara (PTP XXIX) dengan kuota ekspor sebesar 400 ton/tahun dan sejumlah besar eksportir swasta dengan besaran kuota ekspor berkisar antara 240-600 ton/tahun.[90]

90 P.S. Siswoputranto, *Perkembangan Teh, Kopi, Cokelat Internasional* (Jakarta: PT Gramedia, 1978), hlm. 416.

Peningkatan luas dan produksi cengkih merupakan fenomena yang lebih menarik. Meskipun menjadi komoditas penting yang memotivasi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara,[91] komoditas ini merosot signifikansinya pada masa perkembangan perkebunan kolonial yang mengorbitkan komoditas kopi, tebu, tembakau, dan karet ke pasar global sebagai sumber keuntungan kolonial.[92] Akibatnya, cengkih menjadi komoditas yang merosot pamornya meskipun komoditas ini masih terus dibudidayakan karena dibutuhkan terutama oleh perusahaan rokok kretek. Bersama dengan berbagai kabupaten di Jawa Timur termasuk Tulungagung, Madiun, Blitar, dan beberapa kabupaten lain, wilayah Kediri menjadi salah satu lokasi di mana penanaman cengkih dilakukan Belanda di Jawa Timur.[93] Permintaan cengkih kembali tumbuh seiring dengan perkembangan industri rokok kretek. Hingga akhir 1950-an, kebutuhan cengkih masih banyak mengandalkan impor dari luar negeri khususnya Zanzibar dan Madagaskar yang pada mulanya justru mendatangkan tanaman cengkih dari Maluku untuk dibudidayakan.[94]

Seiring dengan perkembangan industri rokok kretek, penanaman cengkih dalam negeri mulai bangkit kembali. Di wilayah Keresidenan Kediri, penanaman cengkih dilakukan diantaranya oleh Perkebunan Branggah Banaran sejak 1961 dengan cara mengonversi perkebunan karet. Mempertimbangkan kebutuhan cengkih yang tinggi dan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri kretek, pemerintah mencanangkan swasembada cengkih.[95] Penanaman cengkih pun terus mengalami peningkatan secara signifikan.[96] Pengusahaan tanaman cengkih di Kediri dilakukan oleh perusahaan daerah dan perusahaan perkebunan negara. Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 5.11

91 Jack Turner, *Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).

92 Tentang perkembangan perkebunan kolonial lihat William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", Anne Booth, William J. O'Malley dan Ana Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 197-235.

93 Melya Wiedya Damaya dan Edy Budi Santoso, "Perkebunan Cengkih Branggah Banaran Kabupaten Blitar Tahun 1961-1998", *Verleden: Jurnal Kesejarahan*, Vol. 9 No 2 2016, hlm. 143.

94 Abhisam DM, Hasriadi Ary dan Miranda Harlan, *Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek* (Jakarta: Penerbit Kata-Kata, 2012), hlm. 93-94.

95 *Ibid*, hlm. 96.

96 Melya Wiedya Damaya dan Edy Budi Santoso, *op.cit.*, hlm. 145.

pengusahaan perkebunan cengkih oleh perusahaan daerah luasnya tiga kali lipat dibanding area tanaman cengkih yang dibudidayakan oleh perusahaan milik negara. Dalam perkembangannya, semakin banyak penduduk tertarik menanam cengkih di lahan-lahan kebun milik mereka meskipun dalam skala kecil. Ketertarikan menanam cengkih di kalangan penduduk secara umum dirangsang oleh keinginan untuk ikut meraup keuntungan yang menggiurkan dari tingginya harga cengkih di pasaran pada tahun 1980-an.[97] Hal ini menyebabkan andil para pekebun kecil dalam penanaman dan produksi cengkih secara kolektif juga terus tumbuh. Ekspansi penanaman dan produksi cengkih Kediri menjadi bagian penting dari apa yang digambarkan Mackie sebagai "cerita keberhasilan terbesar tentang tanaman keras di Jawa Timur sejak Kemerdekaan".[98]

Tabel 5.11.
Perkebunan Cengkih di Wilayah Kediri Sekitar 1977 (Hektar)

Pengelola	Luas tanam	Persentase
PTP XXIII	63	25
Perusahaan Daerah	189	75
Total	252	100

Sumber: Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, "Pokok Ngudud Keretek: Kebiasaan Ngudud dan Munculnya Pabrik Kretek di Kediri Jawa Timur 1970-an", *Jurnal Handep,* Vol. 4 No. 1 Desember 2020, hlm. 6.

Daerah yang berperan sebagai sentra terpenting penanaman cengkih di Kediri adalah Kecamatan Kandangan. Luas penanaman cengkih di kecamatan ini pada periode 1984-1987 sekitar 350 hektar. Tanaman cengkih dengan luas area puluhan hektar ditemukan di tiga kecamatan yakni Mojo, Semen, dan Puncu. Perluasan tanaman cengkih dipengaruhi oleh dua faktor yang saling terkait. Pertama, sejak tahun 1970-an permintaan rokok meningkat tajam dan sejumlah pabrik kretek bermunculan di Kediri. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan akan cengkih sebagai bahan penting dalam racikan rokok. Lebih dari

97 Isang Gonarsah, "Kebijakan Tata Niaga Cengkih dalam Perspektif: Tinjauan Teoretis dan Temuan Empiris", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVI, No. 1 (!998), hlm. 37.

98 Jamie Mackie, "Perkebunan dan Tanaman Perdagangan di Jawa Timur: Pola yang sedang Berubah" dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 291.

90% produk cengkih nasional diserap oleh industri rokok kretek.[99] Faktor kedua adalah mekanisasi pembuatan rokok mulai diterapkan termasuk oleh khususnya PT. Gudang Garam Kediri sehingga meningkatkan volume produksi rokok dan mendongkrak kebutuhan akan bahan cengkih.[100] Perkembangan penanaman dan produksi cengkih di wilayah Kediri tersaji secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12.
Penanaman dan Produksi Cengkih di Kabupaten Kediri 1984-1987
(dalam ton dan hektar)

Kecamatan	1984		1985		1986		1987	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
Semen	22,9	1,6	22,9	1,8	22,9	1,7	23,6	0,8
Mojo	43,8	3,0	43,8	3,8	43,8	2,7	44,7	1,5
Grogol	8,1	0,3	8,1	0,6	8,1	0,8	8,1	0,3
Pare	5,7	0,4	5,7	0,7	5,7	0,8	5,7	0,1
Kandangan	349,4	15,9	349,4	10,5	349,4	8,7	349,4	7,4
Gurah	3,6	3,1	3,6	0,1	3,6	0,1	3,6	0,1
Plosoklaten	53	14,3	73,7	20,5	73,7	36,8	73,7	22,0
Kepung	n.a	1,0	n.a	1,6	n.a	n.a	n.a	1,0
Puncu	19,3	0,6	19,3	0,7	19,3	0,8	19,3	0,5
Wates	7,6	0,4	7,6	0,4	7,6	0,4	7,6	0,7
Ngancar	2,7	2,7	2,3	2,3	2,4	2,6	2,4	3,4

Catatan n.a.: Tidak ada data.

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm, 29-131.

Dekade 1980-an adalah masa ketika produk cengkih bernilai sangat tinggi. Cengkih menjadi produk primadona. Banyak orang tertarik menanam cengkih demi ikut menikmati keuntungan finansial yang menjanjikan. Pada tahun 1991, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih (BPPC) didirikan. Tujuan pendirian BPPC adalah untuk mengatur peredaran dan harga cengkih dalam masyarakat sebelum akhirnya

99 Isang Gonarsah, *op.cit.*, hlm. 36.

100 Monika Arnez, *Tobacco and Kretek: Indonesia Drugs in a Historical Change*, ASEAS: Austrian Journal of Southeaat Asean Studies, 2(1) 2009, hlm. 56.

disalurkan ke pabrik-pabrik rokok kretek. Peran BPPC dalam tata niaga cengkih mendapat landasan hukum berdasarkan SK Menteri Perdagangan RI No. 306/KP/XII/1990 dan Keppres RI No.20 Tahun 1992, yang memberi BPPC hak monopoli pembelian cengkih yang dipanen dan satu-satunya penjual cengkih ke pabrik rokok kretek.[101] Dalam menjalankan haknya, BPPC menunjuk sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menampung panen cengkih yang dihasilkan rakyat dan perkebunan. Produk cengkih ini oleh BPPC kemudian dijual ke pabrik-pabrik yang memerlukan untuk campuran rokok yang mereka produksi. Melalui praktik ini, BPPC dapat meraup keuntungan besar karena umumnya harga beli cengkih dari produsen relatif rendah, sedangkan pabrik-pabrik rokok harus membeli dengan harga lebih mahal. Para produsen rokok ini tidak punya pilihan lain karena pemesanan pita cukai rokok mensyaratkan bukti penyerahan cengkih dari KUD yang ditunjuk BPPC.[102]

Dibanding tanaman cengkih, penanaman kakao di Kediri lebih terbatas lokasinya. Berdasarkan laporan yang disusun tahun 1989, penanaman kakao baru dijumpai di Kecamatan Plosoklaten. Area penanamannya dilaporkan seluas 1.077 hektar pada tahun 1985 dengan volume produksi sebesar 495 ton. Pada tahun 1987, produksi kakao meningkat menjadi 844 ton.[103] Peningkatan ini merupakan hasil dari perluasan penanaman kakao dan bertambahnya tanaman kakao yang berproduksi. Di beberapa perkebunan milik negara, tanaman kakao diperluas melalui konversi tanaman perkebunan kopi. Perkembangan perkebunan kakao mendapat kontribusi penting dari keberadaan Balai Penelitian Perkebunan Jember yang aktif melakukan riset mengenai budidaya tanaman kakao.[104]

Di luar sektor perkebunan besar, terdapat sektor perkebunan rakyat. Tanaman yang diusahakan terutama adalah tembakau. Tembakau yang mereka hasilkan biasa disebut tembakau rakyat dengan produk digolongkan sebagai tembakau krosok. Tanaman tembakau telah diusahakan di Kediri sejak masa kolonial Hindia Belanda dan merupakan

101 Isang Gonarsah, *op.cit.*, hlm. 37.

102 Melya Wiedya Damaya dan Edy Budi Santoso, *op.cit.*, hlm. 146.

103 Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm, 109.

104 P.S. Siswoputranto, *op.cit.*, hlm. 338.

tanaman yang populer. Tanaman ini menemukan kesinambungan pengusahaannya oleh rakyat pada masa pemerintahan Orde Baru.

Berdasarkan data tahun 1977 yang tersaji pada Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa budidaya tanaman tembakau rakyat tersebar di delapan kecamatan di wilayah Kediri. Luas keseluruhan penanaman tercatat mencapai 234 hektar. Pengusahaan tanaman tembakau terutama dilakukan pada lahan-lahan di wilayah kaki dan lereng pegunungan. Tanaman tembakau seluas 52,79 ha yang terdapat Kecamatan Kandangan berlokasi di lereng Gunung Anjasmoro. Tembakau di Kecamatan Banyakan (69,9 ha), Mojo (20,07 ha), dan Grogol (43,11 ha) diusahakan di lereng Gunung Wilis. Tembakau yang terdapat di Kecamatan Kepung seluas (8,9 ha) berlokasi di lereng Gunung Kelud. Kecamatan Kepung di lereng Gunung Kelud memiliki lebih sedikit area tanaman tembakau karena wilayah ini menjadi sentra pengusahaan tanaman cengkih, kopi, dan kakao.[105]

Tabel 5.13.
Kecamatan Penghasil Tembakau di Kabupaten Kediri pada 1977 (hektar)

No.	Kecamatan	Luas Tanaman (ha)
1.	Banyakan	69,9
2.	Mojo	20,07
3.	Semen	11,42
4.	Tarokan	13,26
5.	Grogol	43,11
6.	Kandangan	52,79
7.	Kepung	8,9
8.	Badas	14,55
Jumlah luas lahan		**234**

Sumber: Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, "Pokok Ngudud Keretek: Kebiasaan Ngudud dan Munculnya Pabrik Keretek di Kediri Jawa Timur 1970-an", *Jurnal Handep,* Vol. 4 No. 1 Desember 2020, hlm. 8.

Berbeda dengan tanaman perkebunan lain yang berusia tahunan, tanaman tembakau berusia pendek. Artinya tanaman ini hanya berada di lahan budidaya selama beberapa bulan terutama pada musim kemarau

105 Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, *op.cit.*, hlm. 8.

hingga awal musim hujan. Sifat penanaman yang berjangka pendek ini membuat pengusahaannya bersifat fleksibel dari tahun ke tahun sesuai dengan keadaan pasar dan kondisi iklim. Seperti tampak pada Tabel 5.14 fleksibilitas tanaman tampak dari fluktuasi produksi tembakau yang sekaligus mengindikasikan area penanamannya. Data produksi yang tersedia dan bisa dijangkau sejauh ini bersifat parsial sehingga menghalangi untuk diperolehnya gambaran yang utuh mengenai luas penanaman dan volume produksi selama era Orde Baru. Data yang tersedia sekilas mengindikasikan bahwa popularitas tembakau sebagai tanaman perkebunan rakyat di wilayah Kediri mengalami kemerosotan. Mengingat produksi rokok kretek dan kebutuhan tembakau oleh perusahaan-perusahaan rokok di Jawa yang cenderung meningkat, kemungkinan penjelasan dari kecenderungan menurunnya produksi tembakau Kediri adalah adanya kompetisi dengan produk tembakau dari tempat lain yang mempunyai kualitas yang lebih baik.

Tabel 5.14.
Produksi Tembakau di Kediri 1984-1987 (dalam ton)

Kecamatan	1984	1985	1986	1987
Mojo	-	-	-	2,2
Semen	-	-	8,4	19,5
Papar	540	152	-	52,2
Purwoasri	1.450	1.029	173	-

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm 30, 37, 62, 69.

Informasi yang ada menunjukkan bahwa produk tembakau lokal merupakan bahan baku utama untuk produksi rokok kretek di Kediri. Menurut para penikmat kretek di Kediri, produk tembakau setempat mempunyai cita rasa yang lebih halus dibandingkan produk tembakau dari daerah Temanggung (Jawa Tengah). Pada tahun 1970-an, tembakau Temanggung digunakan sebagai bahan campuran rokok kretek di sejumlah pabrik kretek Kediri. Tembakau Temanggung disukai karena rasanya yang kuat, tetapi halus di tenggorokan.[106] Berkaitan dengan populernya rokok

106 Ronal Ridhoi dan Moh Nazri Adlani, *op.cit.*, hlm. 8.

kretek, Haji Iskandar, seorang Manajer Pembelian Tembakau PT. Djarum, menyatakan bahwa pada dekade 1970-an rokok kretek yang digemari adalah yang berbahan tembakau dengan kandungan nikotin tinggi dan tembakau yang banyak digunakan adalah tembakau Temanggung. Pada 1978-1984, Haji Iskandar pernah mengusahakan penanaman tembakau di lereng Gunung Arjuno dan Bukit Panderman, tetapi kurang berhasil karena produk tembakau yang dihasilkan kalah dari segi kualitas dibandingkan dengan tembakau Temanggung.[107]

SEKTOR INDUSTRI

Dalam era pembangunan di bawah pemerintah Orde Baru, sektor industri di Kediri mengalami pertumbuhan meskipun laju pertumbuhannya tidak sepesat sektor pertanian khususnya padi. Pertumbuhan sektor ini secara umum tampak dari andil yang diberikannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 1983, sumbangan sektor industri terhadap PDRB wilayah Kediri sebesar 5,5%, sedangkan pada tahun 1987 kontribusinya sebesar 8,8% atau mengalami kenaikan sebesar 3,3%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kediri pada tahun 1987 menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian (50,1%), dan sektor perdagangan (16,28%).[108] Unit industri juga bertambah jumlahnya dari 7.060 buah pada tahun 1984 menjadi 8.310 pada tahun 1988 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 26.367 orang. [109]

Unit industri yang berkembang di Kediri meliputi beragam jenis dan ukuran. Secara umum dalam laporan resmi daerah dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni aneka industri, industri kecil formal, dan industri kecil non-formal/kerajinan. Perkembangan masing-masing jenis industri dan nilai produksinya dapat dilihat pada Tabel 5.15

107 Nuran Wibisono, *Dunia Iskandar: Tembakau, Humanisme, Kepemimpinan* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2013), hlm. 18-19; Ridhoi dan Adlani, *op.cit.*, hlm. 8.

108 Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994*, Jilid IIA (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm. 53.

109 *Ibid*, hlm. 51.

Tabel 5.15.
Perkembangan Unit Industri dan Nilai Produksinya, 1984-1987

Industri	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988
Aneka Industri	11	12	15	20
Industri Kecil Formal	383	369	541	815
Industri Kecil Non-formal/Kerajinan	6.666	7.080	7.420	7.475
Nilai Produksi (Jutaan Rupiah)	53.643	55.310	83.823	91.460

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid IIA (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989), hlm. 51.

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dalam waktu sekitar tiga tahun sektor jumlah unit usaha dalam kelompok Aneka Industri tumbuh hampir dua kali lipat, daripada tahun 1984/195 menjadi 20 unit pada tahun 1987/1988. Peningkatan jumlah unit usaha dalam kategori Industri Kecil Formal meningkat dua kali lipat lebih pada periode tahun yang sama, dari 383 unit menjadi 815 unit. Jumlah Industri Kecil Non-formal/kerajinan meningkat signifikan sebesar 800 unit dari 6.666 unit menjadi 7.475 unit. Pertumbuhan unit secara signifikan pada sektor Industri Kecil Formal dan Industri Kecil Non-formal dimungkinkan karena sektor ini memerlukan permodalan yang tidak besar dan peluang pendiriannya yang lebih mudah dan lebih besar bagi para investor dalam negeri. Sektor industri kecil formal maupun non-formal juga banyak menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan rakyat kebanyakan, serta menunjang sektor ekonomi lain termasuk sektor pertanian maupun sektor industri lainnya. Perkembangan Industri Besar di Kabupaten Kediri berjalan relatif lambat. Sekitar 1990, di Kabupaten Kediri hanya terdapat tiga PMDN (PT Koyo Mulya, PT Tani Maju, PT Surya Zig Zag) dan satu PMA (PT BISI). Namun demikian, secara umum penambahan jumlah unit industri diikuti dengan penambahan nilai produksi. Pada tahun 1984/1985, nilai produksi sektor industri dilaporkan mencapai Rp53,6 triliun,- meningkat tajam menjadi Rp83.8 triliun pada tahun 1986/1987 dan Rp91,4 triliun pada tahun 1987/1988.

Perkembangan sektor industri di Kediri telah menempatkan wilayah Kediri khususnya Kota Kediri pada peringkat keenam di Jawa Timur untuk

keseluruhan industri, dan peringkat ketiga untuk industri skala besar dan menengah. Pada tahun 1985, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor industri manufaktur sebesar 47.297 orang, sebanyak 43.626 orang dalam industri manufaktur skala besar dan menengah. Sementara itu, di Kabupaten Kediri jumlah tenaga kerja dalam sektor industri manufaktur sebesar 31.062 orang, di antaranya sebanyak 4.695 orang berada dalam sektor industri besar dan menengah.[110] Pada tahun 1998, sektor industri berkontribusi hampir sebesar 82% terhadap perekonomian Kotamadya Kediri, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoram sebesar 11%.[111] Pentingnya sektor industri di wilayah Kediri secara nyata tampak dari atribut yang disandang dan menjadi identitas Kediri yang dikenal secara luas. Dua atribut yang menarik untuk dibahas adalah Kediri sebagai Kota Kretek dan Kediri sebagai Kota Tahu yang akan dipaparkan dalam uraian berikut.

Kediri Kota Kretek

Identitas Kediri sebagai Kota Kretek mendapat pengakuan luas pada masa Orde Baru. Kontributor utama identitas Kediri ini adalah Pabrik Rokok Gudang Garam yang menjadi pabrik rokok terbesar di seluruh Indonesia. Secara komparatif, ukuran pabrik rokok ini mendekati dua kali lipat dari pabrik rokok terbesar kedua di Indonesia yakni Pabrik Rokok Bentoel Indonesia yang berlokasi di daerah Malang. Kedua pabrik rokok kretek ini bersaing sangat ketat dalam memperebutkan pangsa pasar rokok kretek di Indonesia. Tiga dari empat besar pabrik rokok kretek di Indonesia berada di Provinsi Jawa Timur. Pabrik Rokok Kretek Sampoerna yang terdapat di Surabaya merupakan pabrik terkecil dari keempat raksasa rokok kretek yang dimiliki Indonesia.[112] Pesaing terdekat dari Gudang

110 Howard Dick, "Manufaktur", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 344.

111 H.A. Maschut, *Dinamika Pembangunan Kota Kediri: Himpunan Laporan Wali Kota* (Malang: Pustaka Bayan, 2003), hlm. 32.

112 Jamie Mackie, "Ekonomi Jawa Timur: Dari Dualism ke Pembangunan Berimbang", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 60-61.

Garam adalah Perusahaan Rokok Djarum yang terdapat di Kota Kudus, Jawa Tengah. Begitu pentingnya Gudang Garam bagi identitas Kediri sebagai Kota Kretek terungkap jelas dalam pernyataan ilmuwan Australia, Kenneth Young yang menyebutkan bahwa tanpa keberadaan Pabrik Rokok Gudang Garam, "Kediri adalah sebuah kota yang biasa saja".[113]

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak hanya Gudang Garam saja yang berperan sebagai produsen kretek di Kediri. Banyak pabrik rokok kretek skala kecil beroperasi di Kediri. Pada tahun awal dekade 1960-an, disebutkan pabrik rokok kecil di Kediri berjumlah 161 buah. Salah satu dari pabrik rokok skala kecil yang ada di Kediri adalah Pabrik Rokok Gudang Rasa. Pabrik rokok skala kecil ini juga ikut menikmati masa kejayaan rokok kretek pada dekade 1980-an. Meskipun kemudian mengalami stagnasi akibat ketidakstabilan harga cengkih, Pabrik Rokok Kretek Gudang Rasa masih mampu bertahan hingga sesudah masa Orde Baru. Melalui produk rokok kretek yang dihasilkan baik oleh pabrik-pabrik kretek skala kecil maupun utamanya pabrik rokok kretek berskala raksasa yang direpresentasikan Gudang Garam dengan jangkauan pasar yang sangat luas dan masif, rokok kretek menjadi ilustrasi yang baik dari ungkapan "Dari Kediri untuk Indonesia".

Tabel 5.16 memberikan gambaran secara makro perusahaan rokok besar di Indonesia. Berdasarkan produksi dan kontribusi cukai yang dibayarkan kepada pemerintah dapat diketahui peringkat masing-masing perusahaan. Pada tahun 1990, Perusahaan Rokok Kretek Gudang Garam menjual rokok kretek sebanyak hampir 21 miliar batang dengan cukai yang dibayarkan hampir mencapai 250 miliar. Perusahaan Rokok Djarum Kudus membayangi pada peringkat kedua dengan penjualan rokok lebih dari 16,7 miliar batang dan pembayaran cukai kepada pemerintah kurang lebih sebesar Rp217,8 miliar. Sementara itu, Perusahaan Rokok Bentoel mencatat penjualan rokok lebih dari 9,2 miliar batang dengan cukai yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak sebesar Rp 108 miliar. Besarnya PT Gudang Garam ditunjukkan Robison dengan

113 Kenneth Young, "Kediri dan Gudang Garam: Sebuah Enklave Industri dalam Lingkungan Pedesaan", dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Mackie (ed), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 416.

ilustrasi berbeda. Disebutkan bahwa keuntungan yang diraup Gudang Garam hampir setara dengan separuh dari penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada tahun 1982/1983 dan total penghasilan dari penjualan setara dengan sepertiga nilai ekspor gas alam cair (LNG) Indonesia.[114]

Tabel 5.16.
Posisi Perusahaan Gudang Garam dibanding Produsen Rokok Lain pada Tahun 1990

Perusahaan	Penjualan (Batang)	Persen	Cukai (Rp)	Persen
Gudang Garam	20.979.703.600	34,74	248.400.158.500	38,59
Djarum	16.760.075.000	27,75	217 .863.620.126	33,85
Bentoel	9.237.477.900	15,30	108.216.115.700	16,81
Sampoerna	2.461.680.000	4,08	28.901 046.500	4,49
Nojorono	2.277.130.320	3,77	12.303.676.000	1,91
Lain-lain	8.670.896.722	14,36	27.935.208.690	4,35
Jumlah	60.386.963 .542	100	643.619.825.516	100

Sumber: Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja: Kasus Pabrik Rokok di Jawa Timur* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 36.

Perusahaan Gudang Garam menempati kawasan seluas 132 hektar, terbagi atas 34,80 hektar untuk bangunan pabrik, 0,93 hektar untuk kantor, dan 96,87 hektar untuk fasilitas penunjang.[115] Untuk mendukung proses produksi, Perusahaan Gudang Garam melakukan beberapa langkah strategis. Langkah strategis yang diambil pada sisi suplai bahan baku berupa pengamanan tembakau dan cengkih melalui pembelian dalam skala besar melalui jaringannya yang tersebar luas di pusat-pusat produksi bahan baku, serta didukung dengan fasilitas pergudangan yang memadai dan pengangkutan yang efisien.[116] Bahan baku rokok mayoritas

114 Richard Robison, *Indonesia: The Rise of capital* (Wellington: Allen and Unwin in association with Asian Studies Association of Australia, 1987), hlm, 285.

115 Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja: Kasus Pabrik Rokok di Jawa Timur* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 37.

116 Kenneth Young, *op.cit.,* hlm. 422-423.

didapatkan melalui pembelian dari petani maupun Koperasi Unit Desa (KUD) dari daerah di Jawa Tengah seperti Dieng, Parakan, Weleri, Kedu, Mranggen, Boyolali, Salatiga, dan beberapa daerah di Jawa Timur seperti Tuban, Bojonegoro, Besuki, Paiton, Jember, Madura, dan bahkan dari Bali. Sekitar 5% tembakau diimpor dari luar negeri untuk bahan campuran dengan tembakau lokal. [117]

Langkah strategis lainnya yang ditempuh adalah mekanisasi pabrik melalui adopsi permesinan modern. Perusahaan ini mempunyai 54 unit mesin dengan kapasitas produksi antara 2.200-5 500 batang rokok per menit. Perusahaan ini juga memiliki sebanyak 91 unit mesin pengemas rokok.[118] Perlengkapan mesin modern yang dimiliki Gudang Garam dimungkinkan berkat pemberian lisensi dari pemerintah kepada Gudang Garam, bersama dengan tiga perusahaan rokok lainnya, berdasarkan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Mekanisasi dilakukan PT Gudang Garam pada tahun 1978 dengan memanfaatkan kucuran pinjaman dari pemerintah yang mendapatkan banyak pemasukan besar dari *oil boom*.[119] Langkah strategis lainnya yang ditempuh Gudang Garam adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku kertas dari luar negeri. Hal ini ditempuh dengan mendirikan perusahaan kertas sendiri bernama Surya Zig Zag sebagai perusahaan patungan yang didirikan dengan menggandeng Probosutedjo, seorang pengusaha nasional yang merupakan kerabat Presiden Soeharto. [120]

Produk rokok Gudang Garam meliputi tiga jenis, yakni Sigaret Kretek Kelobot (SKK), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Jenis rokok SKK dikemas dengan memakai kelobot (kulit jagung) untuk membungkus bahan baku berupa campuran tembakau, cengkih, dan saus. Batang rokok digulung secara manual dengan tangan dan secara umum masyarakat mengenalnya sebagai rokok kelobot. Pada rokok jenis SKT, bahan baku digiling dengan alat penggiling tradisional. Bahan campuran rokok dikemas dalam gulungan yang menggunakan

117 Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *op.cit.,* hlm. 46.

118 *Ibid*, hlm. 47.

119 Abhisam DM, Hasriadi Ary dan Miranda Harlan, *op.cit.*, hlm. 96.

120 Kenneth Young, *op.cit.*, hlm. 422-423.

kertas ambri. Masyarakat secara umum mengenal rokok jenis ini sebagai rokok kretek. Sementara itu, produksi rokok SKM dilakukan dengan menggunakan perlengkapan mesin modern. Bahan baku rokok dibungkus dengan kertas ambri. Dalam batangan rokok diberi penyaring (*filter)* kadar nikotin yang terkandung dalam rokok sehingga kadar nikotinnya lebih rendah dibandingkan dengan rokok jenis SKK dan SKT. Jenis rokok yang terakhir ini biasa dikenal oleh masyarakat sebagai rokok kretek *filter.*[121]

Sekitar tahun 1990, Pabrik Rokok Kretek Gudang Garam memproduksi SKK manis berisi 5 batang per bungkus, SKK tawar berisi 5 batang, dan 10 batang per bungkus. Beberapa jenis SKT yang diproduksi misalnya: Tanda Mata (10 batang per bungkus), Taman Sriwedari (10 batang per bungkus), Djaja Hijau (10 batang per bungkus), Merah King Size (12 batang per bungkus), dan Special de Luxe (20 batang per bungkus). SKM yang diproduksi meliputi Filter Internasional (12 batang per bungkus), Filter Internasional Coklat (12 batang per bungkus), Filter Internasional Merah King Size (12 batang per bungkus), Filter Surya (16 batang per bungkus), dan Filter Surya (18 batang per bungkus).[122] Produk rokok kretek Gudang Garam dan perusahaan kretek lainnya mendapatkan sambutan pasar yang luar biasa pada 1980-an. Berkat promosi periklanan yang gencar dan kemasan yang menarik, citra kretek sebagai produk rokok untuk konsumen kalangan menengah ke bawah yang telah lama melekat telah menghilang. Rokok kretek juga mampu menyaingi rokok putih sebagai produk berprestise tinggi untuk konsumsi kaum elite. [123]

Produk rokok Gudang Garam dipasarkan baik untuk pasar nasional maupun pasar internasional. Secara proporsional, produksi rokok yang dijual di pangsa pasar nasional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar ekspor. Dengan penduduk yang besar dan jumlah perokok yang sangat banyak, Indonesia merupakan pasar rokok dengan permintaan yang sangat tinggi. Namun demikian, penjualan rokok untuk pasar ekspor secara umum memperlihatkan tren peningkatan. Penjualan rokok di pasar ekspor meningkat tajam pada tahun 1989 dibanding tahun sebelumnya

121 Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *I op.cit.*, hlm. 46-47.

122 Provinsi Jawa Timur, *Pembangunan Lima Tahun di Provinsi Jawa Timur 1969-1988* (Surabaya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 1999), hlm. 94-95.

123 Abhisam DM, Hasriadi Ary dan Miranda Harlan, *op.cit.*, hlm. 96.

dengan peningkatan sebesar hampir 350 juta batang. Penjualan rokok untuk pasar ekspor yang dilakukan Gudang Garam menembus pasar di semua negara anggota ASEAN. Produk-produk rokok Gudang Garam juga merambah ke berbagai pasar di kawasan Asia seperti Hongkong, Maccao, Jepang, dan Arab Saudi, kawasan Australia, Selandia Baru, dan Guam. Bahkan lebih jauh lagi, produk-produknya juga beredar di kawasan Eropa, seperti Belanda dan Swiss, serta kawasan Amerika khususnya Amerika Serikat dan Kanada. [124]

Tabel 5.17.
Data Volume Penjualan Domestik dan Ekspor Tahun 1985-1989
(dalam miliar batang)

Tahun	Pasar Domestik	Pasar Ekspor	Total
1985	24,369	0,113	24,482
1986	33,346	0,115	33,461
1987	40,265	0,120	40,385
1988	40,334	0,156	40,490
1989	40,224	0,502	40,740
1990 (hingga Juni)	25,315	0,307	25,622

Sumber: Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja: Kasus Pabrik Rokok di Jawa Timur* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 52.

Untuk mendukung distribusi produk-produknya secara efisien ke kalangan konsumen rokok di dalam negeri, Gudang Garam memiliki armada angkutan darat lebih dari 3.000 unit truk besar dan kecil. Perusahaan ini juga mempunyai depo-depo penampungan besar yang tersebar luas di seluruh wilayah Nusantara. Terdapat tidak kurang dari tiga distributor utama produk rokok yang dihasilkan perusahaan Gudang Garam, yakni PT Surya Bhakti Utama, PT Surya Kerta Bhakti, dan PT Surya Jaya Bhakti. Melalui ketiga distributor inilah produk-produk rokok dari perusahaan Gudang Garam disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kinerja ketiga distributor didukung dengan jaringan keagenan, sub-agen dan pengecer yang berjumlah lebih dari 400.000 dan menjangkau seluruh

124 Sri Saadah Soepeno, *op.cit.*, hlm. 51.

wilayah Indonesia.[125] Aliran produk rokok dari Kediri yang berjejaring luas dengan demikian ikut menghidupkan aktivitas perekonomian di kawasan yang berlokasi jauh yang menjadi lokasi pemasarannya.

Keberadaan Perusahaan Gudang Garam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pabrik. Manfaat ekonomi yang paling kentara adalah dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja. Mereka yang dipekerjakan tidak hanya berasal dari Kediri saja, melainkan juga berasal dari daerah lain seperti Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Blitar, dan Kertosono.[126] Pada tahun 1983, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 42.000 pekerja. Pada 1990, perusahaan ini dilaporkan menyerap sebanyak 48.050 tenaga kerja, dengan rincian 10.401 laki-laki dan 37.649 wanita.[127] Angka ini menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja wanita jumlahnya jauh lebih banyak, secara komparatif hampir empat kali lipat dibanding jumlah tenaga kerja laki-laki.

Pekerja wanita dianggap lebih cocok untuk sejumlah pekerjaan di pabrik karena umumnya mereka lebih teliti, tekun, telaten, dan sabar. Tenaga kerja wanita biasanya digunakan untuk menangani pekerjaan memilah tembakau dan cengkih, serta meramu bumbu campuran dan melinting rokok. Jenis pekerjaan yang ditangani pekerja wanita secara keseluruhan lebih banyak dibanding dengan jenis pekerjaan yang ditangani laki-laki. Dengan demikian, jumlah pekerja wanita di pabrik rokok juga jauh lebih besar dibanding pekerja laki-laki.[128] Tentang besarnya tenaga kerja wanita di Perusahaan Gudang Garam sekitar 1980-an, Young menggambarkan: "Berkeliling di Kediri pada saat pergiliran waktu kerja di pabrik akan terlihat hampir tiada henti-hentinya barisan perempuan muda naik sepeda, membanjiri jalan-jalan menuju desa-desa di sekitar kota".[129] Bekerja di pabrik rokok lebih menarik bagi kaum pekerja perempuan dibanding di sektor pertanian karena pekerjaan di

125 Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *op.cit.,* hlm.51.

126 Etty Sukaringtyas, "Dampak Sosial Industri Rokok PT Gudang garam Kediri terhadap Tenaga Kerja Wanita di Desa Blimbing dan Sidomulyo Kediri Tahun 1980-1985", *Skripsi* (Jember: Fakultas Sastra, 1991), hlm. 59.

127 Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *op.cit.,* hlm. 39.

128 *Ibid.*, hlm. 39.

129 Kenneth Young, *op.cit.*, hlm. 423.

pabrik rokok lebih ringan, upah lebih besar, dan tidak bersifat musiman. Pada periode 1980-1985, rata-rata besarnya upah di pabrik rokok secara umum dua kali lipat dari jumlah yang diterima pekerja ketika bekerja di sektor pertanian. Pekerja perempuan di Desa Blimbing menerima upah rata-rata sebesar Rp300/hari kerja, sedangkan upah yang didapat dari pekerjaan di pabrik rokok sebesar Rp700/hari kerja. Di Desa Sidomulyo perbandingan upahnya adalah Rp450/hari di sektor pertanian dan Rp850/hari di pabrik rokok.[130]

Selain menjadi pekerja pabrik, penduduk sekitar pabrik juga mendapatkan manfaat positif berupa munculnya kesempatan berwirausaha. Dengan dukungan daya beli dan kebutuhan para pekerja pabrik yang sangat besar jumlahnya, sebagian penduduk di sekitar pabrik membuka warung, toko, dan rumah kos-kosan. Pada tahun 1985, sepanjang Jalan Ngaglik yang berdekatan dengan PT Gudang Garam terdapat tiga toko pakaian, lima toko kelontong, tiga warung makanan, dua salon kecantikan, lima pedagang kaki lima, dan satu toko emas.[131] Banyak pekerja dari luar kota lebih menyukai indekos atau mengontrak rumah yang berlokasi tidak jauh dari kompleks pabrik agar lebih mudah menjangkau tempat bekerja.[132] Dampak lainnya yang dirasakan mulai tampak menggeliat sejak pertengahan 1980-an adalah munculnya sejumlah hotel dan restoran, perumahan baru di pinggiran kota, serta kompleks universitas di ujung barat kota Kediri yang mendapatkan sebagian besar dukungan pendanaannya dari Gudang Garam.[133] Selain itu, sebagian rumah tangga membuka usaha pembuatan produk-produk makanan yang murah, di antaranya salah satu produk yang paling populer adalah tahu.

130 Etty Sukaringtyas, *op.cit.*, hlm. 25.

131 *Ibid.*, hlm. 25.

132 Sri Saadah Soepeno, M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar, *op.cit.,* hlm. 39.

133 Kenneth Young, *op.cit.*, hlm. 423.

Kediri Kota Tahu

Kediri dikenal secara luas sebagai kota tahu. Identitas ini terbentuk melalui proses yang panjang, tetapi popularitasnya baru berkembang belakangan. Pembentukan tahu sebagai bagian penting dalam identitas Kota Kediri mencerminkan proses panjang dari kehadiran orang-orang Tionghoa yang tetap mempertahankan tradisi kulinernya, budidaya tanaman kedelai yang berkembang di kalangan petani Kediri, penerimaan masyarakat bumiputera atas tradisi kuliner yang dibawa kaum pendatang Tionghoa dan keturunannya. Faktor penting lainnya yang berpengaruh besar adalah perlombaan kota-kota di Indonesia untuk mengenalkan karakteristik dan kekhasan masing-masing sebagai bagian dari proses pembentukan identitas kota.

Asal-usul tahu memiliki beberapa versi. Sebuah versi menyebut tahu berasal dari kata *tauhu* dalam Bahasa Hokkian, yang berarti kedelai yang difermentasikan.[134] Versi lain meyakini tahu berasal dari bahasa Cina yaitu *teu* dan *hu. Teu* berarti kedelai, dan *hu* berarti melumat menjadi bubur, sehingga tahu berarti kedelai yang dibuat menjadi bubur.[135] Tahu mulai dikenal sebagai makanan di Negeri Cina sejak Zaman Dinasti Han (206 SM-220 M). Penemunya diyakini adalah salah seorang cucu dari Kaisar Han Gaouzu (Pendiri Dinasti Yuan) yang bernama Liu An pada 164 SM.[136] Menurut Shurleff dan Aoyagi, Liu An menemukan tahu berbahan dasar kedelai secara tidak sengaja. Dalam suatu pelayaran Liu An menuangkan air laut ke bubur tahu untuk mendapatkan rasa gurih dan di luar dugaannya bubur tersebut menjadi kental. Bubur kedelai yang mengental dikenal sebagai tahu. Dalam perkembangannya, orang-orang Tionghoa biasa mengentalkan bubur kedelai dengan menggunakan larutan asam asetat yang dikenal pula sebagai asam cuka.[137]

---

134 *Asal Usul Tahu Kediri yang Mendunia*, dalam https://www.goodnessfromingindonesia.id (diunduh 21 Juni 2021).

135 Arifatul Ilma, "Tahu Takwa Kediri Pada Masa Orde Baru (Perkembangan Tahu Takwa sebagai Identitas Budaya Etnis Tionghoa dan Kuliner Khas Kediri", *Skripsi* (Kediri: Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusantara Kediri, 2020), hlm. 17.

136 *Asal Usul Tahu Kediri yang Mendunia*, dalam https://www.goodnessfromingindonesia.id (diunduh 21 Juni 2021).

137 Arifatul Ilma, *op.cit.*, hlm. 18.

Pembuatan tahu tersebar ke berbagai negara termasuk ke Nusantara melalui para biksu sambil mengajarkan agama Budha.[138] Menurut catatan Chu Ku Fei, tahu di Cina berwarna putih, sedangkan tahu di Kediri berwarna kuning, bertekstur kenyal dan padat yang dikenal sebagai tahu takwa. Sumber yang sama menyebutkan nama tahu takwa diadopsi dari seorang Hokkian bernama Kwa yang bermigrasi ke Kediri. Di Kediri ia membuat tahu yang dikenal dengan nama tahu kwa. Karena kesulitan mengucapkan, orang Jawa biasa menyebutnya sebagai tahu takwa. Rasanya mirip dengan tahu *dou fu* dari Cina.[139]

Kehadiran tahu di Kediri tidak diketahui secara pasti waktunya. Ada pendapat yang mengaitkannya dengan kedatangan pasukan Mongol pada saat menyerbu Jawa. Sebagian dari pasukan ini diduga tertinggal dan menetap di Kediri, serta mempertahankan tradisi kulinernya termasuk tahu.[140] Pendapat ini berbeda dengan pendapat Liem Djang Yen dan Lauw Sing Hian. Menurut pendapat mereka, sejarah pembuatan tahu di Kota Kediri terkait dengan kedatangan imigran Tionghoa ke Nusantara pada awal tahun 1900-an. Dari ribuan migran Tionghoa ke Hindia Belanda, sebagian masuk ke Kediri. Mereka datang ke Kediri dari berbagai daerah di daratan Cina seperti Kwang Tung, Fu Chien, Fux Cho, Xin Hua, Hokkian, Hok Jia, An Pek, Chin Ciang, dan Kwang Fu.[141] Imigran Tionghoa di Kediri ini tinggal di bantaran timur Sungai Brantas seperti di Kemasan, Jagalan, dan Balowati,[142] yang kemudian dikenal sebagai Kawasan Pecinan dan menjadi sentra tahu takwa.[143] Tiga di antaranya tercatat sebagai pelopor pembuatan tahu di Kediri, yakni Liem Ga Moy, Lauw Soe Hoek, dan Kaou Loung.[144] Di pihak lain, Shuttlet dan Aoyagi beranggapan bahwa munculnya tahu dan berbagai jenis pangan lain berbahan dasar kedelai di Hindia

138 *Ibid*, hlm. 17.

139 *Kenapa disebut sebagai Tahu Takwa?*, dalam https://nusadaily.com (diunduh 20 Juni 2021).

140 Wida Ayu Puspitasari, "Etnis Tionghoa, Tahu dan Kota: Terbangunnya Identitas Kota Kediri", *Skripsi* (Surakarta: Prodi Sosiologi, FISIP Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 84-85.

141 Dwi Margo Utomo, "Etnis Tionghoa Kediri dalam Penerapan SBKRI 1969-1996", *Skripsi* (Surabaya: Prodi Ilmu Sejarah, FIB Universitas Airlangga, 2019), hlm. 52-53.

142 *Ibid*, hlm. 53.

143 Wawancara dengan Dwi Sunaryati (58 tahun), Kediri 28 Juni 2021.

144 Wawancara Liem Djang Yen dengan detiksurabaya.com di Jl. Yos Sudarso Kediri, dalam *Mengungkap Rahasia di Balik Julukan Kota Tahu untuk Kediri*, (https://news.detik.com), diunduh 08 Juni 2021.

Belanda terkait penerapan kebijakan Cultuurstelsel (1830-1870) yang berdampak krisis pangan sehingga muncul sebagai pangan alternatif.[145] Sementara itu, Fadly Rahman beranggapan bahwa kedatangan imigran Tionghoa ke Hindia Belanda pada awal tahun 1900-an terkait dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan berbagai makanan berbahan dasar kedelai seperti tahu, kecap, oncom, dan tempe untuk memenuhi kebutuhan kaum peranakan Belanda, golongan Timur Asing, maupun kaum bumi putera.[146]

Menurut Lauw Sing Hian, orang yang pertama kali membuat tahu di Kota Kediri adalah kakeknya bernama Lauw Soe Hoek yang lebih akrab disapa Bah Kacung. Bah Kacung mendirikan usaha tahu takwa di Kediri pada tahun 1912, tepatnya di Desa Pejagaan Lor (Jalan Pattimura) di sebelah barat Sungai Brantas. Berkat keuletan dan ketekunannya, sejak tahun 1940-an usahanya mulai banyak diminati masyarakat Kediri dan sekitarnya.[147] Hal ini menarik perhatian Liem Ga Moy untuk membuka usaha tahu takwa pada tahun 1948. Ia adalah salah seorang imigran Cina yang masuk dan menetap di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri sejak tahun 1928. Setelah 20 tahun tinggal di Kediri, ia membuka usaha tahu takwa di Desa Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri sejak tahun 1948. Satu tahun kemudian, Kaou Long juga membuka usaha tahu takwa di Jalan Pattimura, Kediri.[148] Pilihan Lauw Soe Hoek, Liem Ga Moy, dan Kaou Loung mengembangkan industri tahu di Kediri didasarkan pada alasan kesamaan kandungan air di Kediri dengan di Cina. Dalam pembuatan tahu takwa, jenis air sangat berpengaruh terhadap produk akhir. Berkat bisnis tahu takwa yang dikembangkan Lauw Soe Hoek, Liem Ga Moy, dan Kaou Long, Kediri mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai Kota Tahu.[149]

145 Arifatul Ilma, *op.cit.*, hlm. 18.

146 Fadly Rahman, *Jejak Rasa Nusantara; Sejarah Makanan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 124-125.

147 Wawancara dengan Lauw Sing Hian (Cucu Mbah Kacung), dalam *Kediri Modern dikenal sebagai Kota Tahu; Inilah Orang Pertama yang Membikinnya*, (https://nusadaily.com), diunduh, 08 Juni 2021.

148 Wida Ayu Puspitasari, *op.cit.*, hlm. 112.

149 Wawancara Liem Djang Yen dengan detiksurabaya.com di Jl. Yos Sudarso Kediri, dalam *Mengungkap Rahasia di Balik Julukan Kota Tahu untuk Kediri*, (https://news.detik.com), diunduh 08 Juni 2021.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ruang gerak bagi etnis Tionghoa di Indonesia dibatasi. Pemerintah Orde Baru mencurigai etnis Tionghoa berkaitan dengan keberadaan komunisme di Indonesia. Pada tahun 1967, terbit Instruksi Presiden N0.14 tahun 1967 yang membatasi aktivitas orang-orang Tionghoa di bidang keagamaan, tradisi, budaya, dan politik. Hanya dalam sektor ekonomi, masyarakat Tionghoa mendapat keleluasaan untuk mengembangkan diri termasuk dalam usaha tahu takwa.[150] Lauw Soe Hoek yang memiliki usaha tahu takwa yang berlabel Tahu Poo meninggal dunia pada tahun 1963.[151] Bisnisnya diteruskan oleh salah satu cucunya yang bernama Lauw Sing Hian alias Yosef Seger Budi Santosa. Pada tahun 1966, Yosef Seger Budi Santosa memindahkan industri tahu takwa miliknya dari Jalan Pattimura ke tempat tinggalnya di Jalan Trunojoyo. Pada tahun 1971, sepasang suami-istri Lien Thien Tjien dan Took Fien Nio mendirikan industri tahu takwa berlabel LTT (Liem Thien Tjien) di Jalan Pattimura. Pasangan suami-istri ini tampaknya memanfaatkan Jalan Pattimura yang dikenal sebagai sentra tahu takwa di Kediri untuk memudahkan pemasaran produk tahunya.[152]

Perkembangan bisnis tahu takwa di Kediri pada dekade 1970-an begitu ramai. Para pembeli datang baik dari kalangan masyarakat di eks Keresidenan Kediri maupun dari tempat lain. Mereka datang ke Kota Kediri membeli tahu takwa Poo di Jalan Trunojoyo, tahu takwa Lym di Jalan Yos Sudarso, dan membeli tahu takwa LTT di Jalan Pattimura. Bahkan perusahaan tahu takwa LTT pada akhir tahun 1970-an telah mempunyai tiga toko melayani pembelian tahu takwa, yang ketiga-tiganya berada di Jalan Pattimura. Memasuki tahun 1980, cucu Bah Kacung yaitu Lauw Sing Hian, mempelopori pendirian gerai tahu takwa Cing Poo (Tahu Poo) di Jalan Yos Sudarso sebagai pusat oleh-oleh di Kota Kediri. Sampai akhir tahun 1980, bermunculan gerai-gerai tahu takwa di Kota Kediri dan menjadikan kota ini berkembang menjadi pusat oleh-oleh yang tidak hanya menjual tahu takwa saja, melainkan juga menjual aneka kuliner seperti stik tahu, kecap, tahu pong, gethuk pisang, dan sambel pecel.[153]

150 Arifatul Ilma, *op.cit.*, hlm. 72.

151 Wawancara dengan Lauw Sing Hian (Cucu Mbah Kacung), dalam *Kediri Modern dikenal sebagai Kota Tahu; Inilah Orang Pertama yang Membikinnya*, (https://nusadaily.com), diunduh, 08 Juni 2021.

152 Wawancara dengan Supriono (60 tahun), Kediri 20 Juni 2021.

153 Arifatul Ilma, *op.cit.*, hlm. 75

Ramainya bisnis tahu takwa juga mencerminkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Tahu takwa Poo (Bah Kacung) dan tahu takwa Lym (Lym Ga Moy) masih menjadi primadona para pembeli. Dalam perkembangannya, tahu takwa LTT mengalami penurunan omset karena kalah bersaing dalam rasa.[154] Menurut cucu Bah Kacung, Lauw Sing Hian, Tahu Poo dapat bertahan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dan tetap menjadi primadona masyarakat. Keunggulannya terletak pada pemertahanan cita rasa melalui proses produksi secara tradisional termasuk menggunakan batu sebagai "mesin" giling, pembakaran menggunakan kayu, dan menggunakan resep leluhur dari Tiongkok, serta faktor manajerial dan pemasaran menjadi faktor penting kesuksesan bisnis yang ditekuninya.[155]

Liem Ga Moy pemilik industri tahu takwa berlabel Lym meninggal dunia pada awal tahun 2000, kemudian usahanya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Liem Djang Yen alias Bambang Suyendro.[156] Sementara itu, industri tahu takwa milik Kaou Long tutup pada awal tahun 1990-an. Menurut salah seorang pengusaha tahu takwa di Desa Mojo Kabupaten Kediri, bernama Supriono, tutupnya industri tahu takwa milik Kaou Long karena kalah dalam persaingan dengan tahu takwa milik Bah Kacung. Produk tahu takwa milik Kaou Long yang munculnya lebih belakangan (1949) jika dibandingkan dengan produk tahu takwa milik Bah Kacung yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda (tahun 1912) dan berlokasi saling berdekatan (Jalan Pattimura) kalah rasa jika dibandingkan dengan tahu takwa milik Bah Kacung yang telah dikenal oleh masyarakat luas.[157]

Perkembangan industri tahu takwa di Kediri sejak dirintis oleh Lauw Soe Hoek (1912), Liem Ga Moy (1948), dan Kaou Loung (1949) menunjukkan tren peningkatan. Studi yang dilakukan Antropolog Amerika Clifford Geertz pada tahun 1950-an menunjukkan bahwa industri tahu tidak lagi dimonopoli etnis Tionghoa. Di sebelah tenggara Distrik Pare,

154 Wawancara dengan Supriono (60 tahun), Kediri 20 Juni 2021.

155 Fadly Rahman, *op.cit.*, hlm 71

156 Wawancara Liem Djang Yen dengan detiksurabaya.com di Jl. Yos Sudarso Kediri, dalam *Mengungkap Rahasia di Balik Julukan Kota Tahu untuk Kediri*, (https://news.detik.com) ,diunduh 08 Juni 2021.

157 Wawancara dengan Supriono (60 tahun), Kediri 20 Juni 2021.

tidak jauh dari deretan pertokoan milik orang Tionghoa, terdapat lima pabrik tahu dalam sebuah kampung yang terdiri dari sekitar 50 rumah tangga. Industri rumahan ini pada mulanya dijalankan oleh seorang Jawa yang mendapatkan keterampilan ketika bekerja pada pabrik tahu milik orang Tionghoa. Dalam perkembangannya, industri tahu menarik lebih banyak orang Jawa terlibat dalam usaha ini. Produk tahu mempunyai pasar yang luas karena besarnya permintaan. Tahu merupakan bahan makanan penting bagi masyarakat sebagai sumber protein utama.[158]

Sekitar tahun 2000, dilaporkan terdapat 20 industri tahu takwa yang secara keseluruhan dikelola oleh WNI Keturunan Tionghoa. Semuanya mengaku sebagai keturunan Lauw Soe Hoek, Liem Ga Moy, dan Kaou Long.[159] Dari ke-20 industri tahu takwa tersebut terdapat berbagai merek dagang di antaranya "Poo", "Lym", "LTT", "Nusantara", "Surya", "Panglima", "Pong", dan "GTT".[160] Merk "Poo" milik Lauw Soe Hoek (Bah Kacung) merupakan label dagang tahu takwa tertua dan paling terkenal di Kediri, selanjutnya disusul "Lym" sebagai label dagang industri tahu takwa milik Liem Ga Moy. Tahu takwa "Poo" dan "Lym" dinilai memiliki kualitas rasa yang terjaga dan lebih enak dibandingkan dengan tahu takwa lainnya.[161] Industri tahu yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Kediri dan keberadaan pusat oleh-oleh di sepanjang Jalan Trunojoyo, Jalan Pattimura, dan Jalan Yos Sudarso Kediri ikut mengangkat pamor tahu di Kediri dan mengukuhkan identitas Kediri sebagai Kota Tahu.[162]

158 Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Town* (Chicago: The University of Chicago Press, 1963), hlm. 66-67.

159 Wawancara dengan Lauw Sing Hian (Cucu Bah Kacung), dalam *Kediri Modern dikenal sebagai Kota Tahu; Inilah Orang Pertama yang Membikinnya*, (https://nusadaily.com), diunduh, 08 Juni 2021.

160 Izzatul Jannah, "Analisis Produktivitas Pada Pabrik Tahu dengan Menggunakan Pendekatan Green Productivity (Studi Kasus UD. Gudange Tahu Takwa (GTT)", Kediri), *Skripsi* (Malang: Jurusan Teknologi Industri Pertanian Unibraw, Malang, 2017), hlm. 1.

161 Wawancara dengan Supriono (60 tahun), Kediri 20 Juni 2021.

162 Arifatul Ilma, *op.cit.*, hlm. 77.

SEKTOR JASA
Pariwisata

Kabupaten Kediri mempunyai beberapa objek wisata yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Kerajaan Kediri yang pernah berkuasa di Jawa Timur pada kurun waktu 1038-1144 Masehi[163] mempunyai andil besar dalam membangun kejayaan sejarah masa Nusantara dan telah mewariskan ragam budaya bendawi dan non-bendawi kepada masyarakat Kediri. Di wilayah ini banyak ditemukan situs, prasasti, candi, benda cagar budaya, dan juga upacara adat dan legenda, yang menunjukkan kekayaan budaya masyarakat Kediri. Semuanya ini merupakan pusaka budaya yang bernilai sejarah dan menjadi harta karun bagi masyarakat Kediri yang dapat dikembangkan untuk menempatkan Kediri sebagai destinasi wisata dunia.[164]

Pusaka budaya yang diwariskan Kerajaan Kediri merupakan potensi pariwisata budaya. Ragamnya meliputi antara lain Upacara Adat Sesaji 1 Syuro yang dilaksanakan setiap malam 1 Syuro di Petilasan Sri Aji Jayabaya. Upacara Adat Sesaji Gunung Kelud yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas perlindungan-Nya dari ancaman Mahaesa Sura.[165] Upacara Adat Sesaji Ki Ageng Prabu Anom Doko dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Desa Doko, Kecamatan Ngasem dengan berziarah ke makam Ki Ageng Prabu Anom Doko. Upacara Adat Sesaji Tirto Husodo dilaksanakan setiap malam 1 Syuro oleh masyarakat Jugo, Kecamatan Mojo di lokasi air terjun Ironggolo, bertujuan mengenang seorang tokoh Curigomoto sebagai pembuka hutan dan pendiri Desa Jugo. Upacara Adat Sesaji Ki Ageng Boto Putih dilakukan oleh masyarakat Desa Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten setiap malam 1 Suro dengan berziarah ke makam Ki Ageng

163 Sartono Kartodirdjo, *et.al*., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 106-109.

164 I. Ketut Ardhana, I. Ketut Setiawan, Sulanjari, *Religi, Ritual, dan Sistem Kerajaan di Jawa Timur: Berdasarkan Tinggalan Arkeologi dan Kesejarahan Masa Raja Airlangga* (Denpasar: Pusat Kajian Bali, Universitas Udayana, 2006), hlm. 80-81.

165 Heylen Amildha Yanuarita, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi tentang Pengembangan Wisata Gua Selomangleng di Kota Kediri", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2018, hlm. 138-139.

Boto Putih. Prosesi Hari Jadi Kediri diperingati setiap 25 Maret oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan dimeriahkan berbagai hiburan. Tanggal 25 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Kediri berdasarkan pada Prasasti Harinjing yang ditemukan di Desa Siman, Kecamatan Puncu.[166]

Petilasan Sri Aji Jayabaya diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat moksa Raja Kediri, Sri Aji Jayabaya. Tempat ini disakralkan dan menjadi tempat ziarah masyarakat *Kejawen* pada setiap malam Jumat Legi.[167] Sementara itu, objek wisata religi lainnya adalah Gereja Katolik Puhsarang yang terletak di Kecamatan Semen, 10 km ke arah barat daya Kota Kediri. Gereja ini didirikan atas inisiatif Pastor Jan Wolters CM pada tahun 1936. Perancang bangunan gereja dengan nuansa Hindu-Jawa dengan bahan-bahan bebatuan setempat ini adalah arsitek kenamaan, Ir. Henricus Maclaine Pont.[168] Dalam perkembangannya, tempat ini menjadi lokasi ziarah bagi umat Katolik di Kabupaten Kediri dan sekitarnya terutama selama bulan Mei untuk setiap tahun. Sejak akhir 1998, di gereja ini mulai diadakan peribadatan khusus (Misa Jumat Legi atau tepatnya Kamis Malam sesuai dengan perhitungan kalender Jawa), yang kemudian berkembang hingga dewasa ini sebagai kegiatan wisata religi yang diminati para peziarah.[169]

Berbagai karya kesusastraan juga dimiliki Kabupaten Kediri dan mencerminkan kejayaan kesusastraan Jawa Klasik. Karya kesusastraan yang penting di antaranya adalah Kitab Arjuna Wiwaha, Krisnayana, Sumana Santaka, Smaradahana, Baratayudha, Werdasancaya, dan Gatutkacasraya. Selain karya sastra klasik, Kabupaten Kediri memiliki berbagai folklore dan legenda yang dapat dikembangkan sebagai potensi pariwisata seperti folklore Panji Semirang, Legenda Irenggolo, Legenda

166 Disbudpar Kabupaten Kediri, *Profil Kebudayaan Informasi Nilai-nilai Budaya dan Legenda Kabupaten Kediri*, 2010, hlm. 4-35

167 Wawancara dengan Theresia Titah (82 tahun), 14 Agustus 2021.

168 Hisbaron Muryantoro, "Gereja Katolik Santa Maria Puh Sarang dalam Perjalanan Sejarah 1936-1986", *Patrawidya*, Vol. 9, No. 3 (2008), hlm. 531. (teks. 531-552).

169 Anita Sulistyaning Gunawan, Djamhur Hamid, Maria Goretti W, Endang N.P, "Analisis Pengembangan Pariwisata terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Puhsarang Kediri)," dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol.32 N0.1, Maret 2016, hlm. 2; Muryantoro, *op.cit.*, hlm. 542; Wawancara dengan J. Harry Setiono (74 tahun), 15 Agustus 2021. Objek wisata ini hingga sekarang ini (2021) dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Badan Pengelola Peziarahan Puhsarang.

Sumber Baru Klinting, dan Legenda Gunung Kelud.[170] Warisan budaya non-fisik lainnya yang dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata di Kabupaten Kediri adalah tumbuh dan berkembang masyarakat Kejawen yang terwadahi dalam organisasi Penghayatan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Kediri seperti Aliran Seni dan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Paguyuban Pangudi Ketentraman, dan Paguyuban Sumarah.[171]

Kediri memiliki dua museum, yakni Museum Airlangga dan Museum Daerah Bhagawanta Bhari. Museum Airlangga memiliki luas 6.670 m² dan berada di kawasan Gunung Klotok dekat Gua Selomangleng di Kecamatan Mojoroto Kotamadya Kediri. Museum lainnya adalah Museum Daerah Bhagawanta Bhari. Keberadaan kedua museum ini merupakan warisan budaya fisik masa lampau yang menjadi potensi pariwisata Kabupaten Kediri berupa benda-benda purbakala Cagar Budaya meliputi situs, candi dan benda Cagar Budaya, serta berbagai koleksi benda tersimpan di Museum Airlangga dan Museum Daerah Bhagawanta Bhari. Berbagai situs dan benda Cagar Budaya yang dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata, seperti Situs Calon Arang di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah (Petilasan Calon Arang atau Janda Gurah), Gereja Katolik Puhsarang di Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, Watu Gajah berwujud arca di Dusun Karang Dinoyo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Situs Tondowongso di Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Situs Sumbercangkring di Desa Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, Prasasti Harinjing di Desa Siman, Kecamatan Puncu, Prasasti Siman diketemukan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Candi Tegowangi di Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Candi Surowono di Desa Canggu Kecamatan Badas, dan berbagai benda Cagar Budaya lainnya baik yang tersimpan di Museum Airlangga dan Museum Daerah Bhagawanta Bhari.[172]

Kondisi objek wisata di Kabupaten Kediri sampai Repelita Ke-5 tahun 1989/1990-1993/1994 belum dikelola secara optimal. Misal, objek wisata Pesanggrahan Goliman yang berlokasi di Desa Parang, Kecamatan

170 I. Ketut Ardhana, I. Ketut Setiawan, Sulanjari, *op.cit.*, hlm. 91.

171 *Ibid*, hlm. 88-90.

172 *Ibid*, hlm. 85-90, 96-98.

Grogol dan objek wisata Pesanggrahan Besuki di Desa Besuki, Kecamatan Mojo, objek wisata religi Gereja Katolik Puhsarang yang berlokasi di Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, dan objek wisata Petilasan Sri Aji Joyoboyo, di Desa Menang, Kecamatan Pagu.[173] Selain itu, terdapat pula objek wisata Cagar Budaya, seperti Candi Surowono di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Candi Tegowangi di Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Situs Tondowongso, Situs Totok Kerok, Situs Kamandanu, Situs Tunglur, Taman Sekartaji,[174] dan beberapa arca, batu berukir, situs sebanyak 47 buah tersebar di desa-desa di Kabupaten Kediri.[175] Beberapa objek wisata pemandian juga terdapat di kabupaten ini seperti: Pemandian Canda Bhirawa berlokasi di Desa Pare, Kecamatan Pare, Pemandian Sumber Bedug di Desa Sumber Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Pemandian Surowono di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Pemandian Tirto Kamandanu di Desa Menang, Kecamatan Pagu, dan Pemandian Sumber Manten di Desa Kalasan, Kecamatan Plosoklaten yang keberadaannya belum dikembangkan sebagai destinasi wisata secara optimal.[176]

Kondisi sejumlah objek wisata Cagar Budaya di Kabupaten Kediri pada masa Repelita Ke-5 tahun 1989/1990-1993/1994 dilaporkan memerlukan beragam perbaikan. Kondisi demikian dilaporkan khususnya untuk objek wisata Pemandian Surowono di Kecamatan Pare dan objek wisata di Pesanggrahan Besuki di Kecamatan Mojo. Demikian juga ada berbagai peninggalan kuno seperti arca, batu tertulis (prasasti), patung-patung, dan candi-candi berserakan belum ditangani secara serius oleh pemerintah. Demikian juga keadaan penunjang kepariwisataan di Kabupaten Kediri, seperti: hotel, penginapan, restoran, dan sistem transportasi masih perlu lebih ditingkatkan. Pada tahun 1980-an, sejumlah hotel dan restoran baru dibangun di Kediri untuk melayani orang-orang yang berbisnis maupun berkunjung ke Kediri.[177] Pada tahun 1993-1994, terdapat beberapa

173 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun (Kelima) Tahun 1989-1990-1993/1994*, Non-publikasi, 30 Maret 1989, hlm. 85.

174 I. Ketut Ardhana, I. Ketut Setiawan, Sulanjari, *op.cit.*, hlm. 6.

175 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun (Kelima) Tahun 1989-1990-1993/1994*, Non-publikasi, 30 Maret 1989, hlm. 86.

176 *Ibid*, hlm. 86

177 Kenneth Young, *op.cit.*, hlm. 425.

tempat penginapan di antaranya Losmen Amanda, Losmen Kediri, dan Losmen Slamet. Mereka yang menginap di losmen tersebut terutama para wisatawan domestik. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata masih perlu dikembangkan secara lebih optimal untuk dapat menjadi sektor andalan yang diminati para wisatawan domestik dan mancanegara.[178] Dalam rangka lebih mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata, pada tahun 1996 dibentuk Dinas Pariwisata Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 5 September 1996 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 438/P/1997 tanggal 11 Agustus 1997.[179] Potensi pariwisata Kediri yang belum banyak digarap pada masa Orde Baru adalah warisan sejarah masa kolonial mulai dari bangunan pabrik, rumah, kantor, jembatan, hingga kompleks perkebunan.

Kampung Inggris di Kediri

Kampung Inggris terletak di Desa Tulungrejo dan Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri merupakan destinasi wisata edukasi, terutama kursus bahasa Inggris. Selain di Pare, Kampung Inggris juga terdapat di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti di Magelang, Bandung, dan Sumatra Barat. Setiap Kampung Inggris memiliki kekhususan. Kampung Inggris di Desa Palem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, ciri khasnya adalah selain jumlah lembaga kursus bahasa Inggris yang banyak, sekitar 100 lembaga kursus. Di Kampung Inggris ini juga tersedia fasilitas ibadah, penginapan, penyedia makanan, dan alat transportasi, seperti sepeda, sampai jasa cuci, baik dari lembaga kursus maupun masyarakat.[180] Dari waktu ke waktu, lembaga kursus Basic English Course (BEC) semakin dikenal bukan hanya oleh masyarakat sekitarnya, melainkan juga masyarakat luar. Kampung Inggris di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

178 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri (1989), *op.cit.*, hlm. 86-87.

179 H.A. Maschut, *op.cit.*, hlm. 40.

180 Putu Elmira. 6 Kampung Inggris yang Ada Di Indonesia diunduh tanggal 28 Mei 2021 dengan alamat: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4031145/6-kampung-inggris-yang-ada-di-indonesia-mau-coba-kursus-di-salah-satunya.

selalu ramai didatangi pengunjung dari berbagai tingkatan usia dan kalangan, bahkan sebagian datang dari Malaysia, Brunei, dan Thailand.

Secara historis, lembaga kursus bahasa Inggris yang didirikan pertama kali berasal dari gagasan Mohammad Kalend Osen (yang kemudian dikenal sebagai Mr. Bob). Pada tanggal 15 Juni 1977, Mohammad Kalend Osen mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris dengan nama BEC, yang memberikan pelajaran *speaking*, *listening*, dan *writing*. Pada awalnya, kegiatan kursus diadakan secara sederhana. Kursus bahasa Inggris diberikan secara menyenangkan. Pendidikan agama tetap diberikan karena dasar pendidikan Mohammad Kalend adalah pesantren.[181]

Dengan tumbuhnya peminat kursus, Mr. Kalend mengembangkan program pembelajaran reguler dan pilihan. Program reguler adalah program yang wajib diikuti peserta yang terdiri atas dua tahapan, yaitu tahapan *Candidate of Training Class* (CTC) dan *Training Class* (TC). Pada saat peserta mengikuti tahapan CTC dengan durasi sekitar tiga bulan, peserta masih diperbolehkan berkomunikasi dengan bahasa non-Inggris. Adapun TC merupakan kelanjutan kursus setelah CTC, dengan durasi 3 bulan juga. Pada tahapan ini, peserta diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dalam seluruh aktivitas sehari-harinya. Maksudnya adalah agar peserta kursus menjadi terbiasa bercakap-cakap dengan bahasa Inggris dengan penuh kepercayaan diri. Cara ini ternyata menarik bagi peserta kursus. Program pilihan tidak diwajibkan untuk peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahapan CTC dan TC, bergantung kepada peserta mau melanjutkan kursus atau tidak.[182]

Dengan meningkatnya jumlah peserta kursus, maka Mohammad Kalend berinisiatif untuk menambah lembaga kursus dan menyediakan fasilitas bagi peserta yang berasal dari luar kota. Di sisi lain, para alumni BEC yang berasal dari Desa Tulungrejo dan Desa Palem berminat untuk menjadi pengajar kursus. Beberapa alumni BEC bahkan didorong untuk mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris. Hal ini dilakukan agar peminat

181 Joko Dian Ismail, "Perubahan Sosial dalam Masyarakat Kampung Inggris di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 1995-2014", *Skripsi* (Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 2018), hlm. 30.

182 *Ibid.*, hlm. 36-37.

kursus yang tumbuh pesat dapat tertampung. Lembaga kursus yang muncul pada tahun 1991 adalah WTC dan lembaga-lembaga lainnya kemudian juga bermunculan.[183] Alasan lainnya agar masyarakat sekitar dapat menikmati manfaat dari keberadaan lembaga kursus. Tidak semua alumni menginginkan menjadi tenaga pengajar, sebagian terjun dalam wirausaha di sekitar lembaga kursus dengan membuka layanan warung makan, toko alat-alat tulis, tempat penginapan, dan sebagainya.[184]

Dengan bertambahnya lembaga kursus bahasa Inggris, maka metode mengajar pun semakin bervariasi. Pada umumnya pembelajaran menggunakan metoda CEFR (*Common European Framework of Reference*) dan NILA (*Natural Learning Ability*) untuk mengembangkan *skill* berbahasa Inggris para peserta kursus. Dalam sistem mengajar prinsipnya sama, variasi mengajar dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Hanya saja, ada peraturan bersama yang harus ditaati oleh lembaga kursus lainnya, yaitu mengenai wajib berbicara bahasa Inggris setiap hari, baik di lingkungan kursus maupun di luar lingkungan kursus pada saat mereka berbaur dengan masyarakat. Kelebihan Kampung Inggris di Pare adalah masyarakat juga dilatih untuk berkomunikasi dengan para peserta kursus dalam bahasa Inggris. Para penyedia penginapan banyak di antaranya adalah alumni dari lembaga kursus sehingga peserta yang menginap di rumah penduduk dapat mengasah keterampilan bahasa Inggris dalam berkomunikasi dengan pemilik penginapan.

Pada saat BEC sudah semakin berkembang, Mr. M. Kalend tidak saja mengembangkan lembaga kursus bagi dirinya sendiri. Ia juga menggandeng masyarakat sebagai mitra kerja lembaga kursus BEC. Masyarakat disarankan untuk menyediakan rumah inap (*home stay)*. Penginapan dikondisikan seperti di rumah sendiri sehingga ikatan kekeluargaan terbentuk antara pemilik rumah dengan peserta. Selain itu, masyarakat juga didorong membuka warung atau menyediakan makanan bagi peserta kursus. Bahkan, dengan semakin meningkatnya kebutuhan

183 Lembaga-lembaga kursus yang muncul pada 2000-an di antaranya Global English, Elfast, The Daffodils, Global-e, The Eminence, Marvelous, Test, Kresna, Peace. dan Mr Bob. Agus Saefur Rohman, *Ayo Berwisata ke Kediri* (Surabaya: Mandiri Publishing, 2018), hlm. 67-84.

184 *Sejarah Berdirinya Kampung Inggris Pare Kediri*, Diakses tanggal 28 Mei 2021 dengan alamat: https://lenterakecil.com/kampung-inggris-pare-kediri/https://lenterakecil.com/kampung-inggris-pare-kediri/.

peserta akan jasa mencuci pakaian, sebagian penduduk berinisiatif membuka jasa pelayanan mencuci pakaian. Pada dasarnya, peserta diberi kebebasan untuk memilih lembaga kursus beserta fasilitas penginapan, penyedia makanan, dan jasa cucian sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Seiring dengan berkembangnya lembaga kursus dan permintaan peserta akan tempat menginap dan kebutuhan lainnya, lembaga kursus bahasa Inggris pun mulai membangun tempat kursus dengan fasilitas penginapan dan katering bagi para peserta kursus. Dengan demikian, lembaga kursus bahasa Inggris selain menyediakan tempat kursus juga harus menyediakan tempat penginapan, seperti asrama untuk beberapa minggu atau bulan bagi para peserta di sekitar lembaganya, terutama bagi peserta yang berasal dari luar Kota Pare. Hal ini menarik para investor dari luar untuk menanamkan modal mereka dalam penyelenggaraan lembaga kursus. Beberapa investor membangun lembaga kursus secara permanen dengan ruang penginapan sekitar 20-30 kamar, lengkap dengan fasilitasnya. Harganya pun disesuaikan dengan harga pasar. Persaingan harga selalu ada antara penginapan di rumah penduduk dengan penginapan yang dibangun oleh investor. Akan tetapi, persaingan ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka antara pemodal besar dengan penduduk setempat karena peserta dapat memilih mana yang sesuai dengan kondisi keuangan dan pilihan kenyamanan yang mereka inginkan.

Selain peran serta personal dalam mengajak masyarakat, pemerintah juga ikut dilibatkan untuk menyiapkan sumber daya manusianya melalui pelatihan kewirausahaan, agar masyarakat siap menyongsong daerah mereka menjadi tempat destinasi wisata edukasi. Selain itu, untuk menjaga kualitas lembaga kursus, pemerintah menerapkan sistem standarisasi kursus, dimana lembaga kursus harus mempunyai lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.[185] Peran lainnya adalah memperkenalkan kampung Inggris sebagai destinasi wisata edukasi melalui Dinas Pariwisata

185 Joko Dian Ismail, *op.cit.*, hlm. 36-37, 52.

dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Kemajuan teknologi informasi melalui internet juga menyumbang pengenalan lembaga-lembaga kursus yang ada di Desa Palem Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Perkembangan Kampung Inggris di Kediri mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lembaga kursus. Sebelum ada lembaga kursus bahasa Inggris, mayoritas masyarakat Desa Tulungrejo dan Desa Palem adalah bercocok tanam atau agraris, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Dapat dikatakan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tergolong rendah. Mereka hanya dapat mengandalkan hasil produksi pertanian, yang kadang kala hasilnya tidak menentu.
Dengan adanya lembaga kursus, kehidupan masyarakat Desa Telungrejo dan Desa Palem mulai beralih pada kehidupan ekonomi berbasis jasa. Sebagian warga desa menyediakan kamar, sekaligus menyediakan layanan makanan dan pencucian pakaian kotor. Ada juga yang hanya menyediakan kamar atau menyediakan warung makan saja. Keberadaan Kampung Inggris tidak hanya menguntungkan pemilik lembaga dan pengajar kursus saja, melainkan juga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Melalui kemitraan dengan lembaga kursus, penduduk setempat ikut merasakan peningkatan perekonomian mereka.[186]

Dengan berkembangnya lembaga kursus bahasa Inggris, maka Desa Tulungrejo dan Palem ini mengalami kemajuan di bidang pembangunan desa baik yang berkaitan dengan kualitas manusia, maupun pembangunan berupa suprastruktur. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu tingkat pendidikan anak-anak Desa Telungrejo dan Desa Palem dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Pembangunan fisik desa juga dirasakan oleh masyarakat, di mana jalan-jalan desa sudah diaspal. Sebagian besar bangunan lembaga kursus serta rumah-rumah penduduk sudah merupakan bangunan permanen. Di balik kemajuan desa, terjadi beberapa perubahan. Lahan pertanian berubah menjadi area bangunan lembaga kursus atau rumah. Ada juga warga desa yang menjual tanahnya kepada pengembang atau investor lembaga kursus baik dari desa maupun dari luar desa mereka.

186 Joko Dian Ismail, *op.cit.*, hlm. 36-37, 63-64.

PERAN BANK INDONESIA DALAM MEMBANGUN KEDIRI

Salah satu perkembangan penting dalam peran yang dimainkan oleh Bank Indonesia pada era Orde Baru adalah ditinggalkannya fungsi komersial. Pengucuran kredit untuk perusahaan-perusahaan swasta tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia lebih diarahkan untuk membantu pemerintah sebagai agen pembangunan. Landasan yuridis bagi peran BI sebagai agen pembangunan adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1968. Dua tugas pokok BI sebagai agen pembangunan meliputi: (1) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat; (2) mendorong perbankan melakukan mobilisasi dana masyarakat untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.[187]

Peran penting Bank Indonesia dalam pembangunan diwujudkan dengan mendorong sektor perbankan membantu pembiayaan sektor usaha terutama sektor usaha kecil dan menengah. Keterbatasan sektor perbankan Indonesia dari segi permodalan terutama perbankan milik pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas tersebut mendorong Bank Indonesia melakukan penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kredit ini diberikan kepada sektor perbankan dengan tingkat suku bunga yang ringan untuk selanjutnya disalurkan bagi para pelaku dunia usaha. Kredit dalam skema KLBI terus ditingkatkan pada dekade 1970-an berkat peningkatan penerimaan pemerintah dari sektor minyak yang tengah *booming*.[188]

Sebagai kepanjangan tangan dari Bank Indonesia, Bank Indonesia Kediri menjalankan kebijakan dan program-program yang dicanangkan pusat di wilayah kerjanya. Melalui KLBI, sejumlah skim kredit diluncurkan di bawah kepemimpinan Gubernur Rachmat Saleh, sebagian dengan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skim kredit yang diluncurkan, antara lain Kredit Modal Kerja (Program Bimbingan Massal/

187 M. Dawam Rahardjo, dkk., *op.cit.*, hlm. 275-276.

188 Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Fragmen Sejarah Bank Sentral Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 170-171.

Bimas dan Intensifikasi Massal/Inmas), Kredit Investasi, dan beberapa program kredit lainnya. Berbagai skim kredit yang diluncurkan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan mendukung tercapainya target-target pemerataan pembangunan.[189]

Dalam pelaksanaan program yang dicanangkan pemerintah, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam pengucuran maupun pengawasan kredit. Program kredit bimas mulai diberikan sejak 1970 hingga tahun 1984 dan penyaluran dilakukan melalui BRI Unit Desa.[190] Program ini ditetapkan oleh pemerintah pusat yang kemudian dijabarkan oleh pimpinan daerah dari tingkat provinsi hingga sampai ke para petani sebagai pelaku produksi. Penunjukan petani diserahkan kepada para kepala desa. Dalam melaksanakan program ini, pamong praja bersinergi dengan instansi-instansi yang terkait dengan pertanian. Dalam penyaluran kredit Bimas, selain menyediakan kucuran dana KLBI, Bank Indonesia juga mengawasi tata cara penetapan petani penerima kredit, instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kredit, prosedur dan pihak yang menandatangani perjanjian kredit, penetapan jumlah kredit yang diberikan dan mekanisme penyaluran uang kepada penerima. Bahkan, Bank Indonesia juga melakukan pengawalan terkait dengan penggunaan dan pembayaran kembali kredit, termasuk instansi mana yang dilibatkan, juga terkait dengan jumlah pupuk dan nilainya yang telah diserahkan oleh P.N. Pertani, jumlah pupuk yang sudah didistribusikan, prosedur penyaluran pupuk, volume padi yang harus disetor, dan penyerahan kepada Depot Logistik.

Kredit Bimas disempurnakan menjadi Kredit Usaha Tani (KUT) yang mulai diberikan pada tahun 1985 hingga 1999. Berbeda dengan kredit Bimas yang fokus pada adopsi teknologi, sedangkan KUT lebih fokus pada bantuan permodalan bagi petani. Kedua jenis kredit ini sama-sama bersumber dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang disalurkan kepada petani (KUD) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak tahun

189 *Ibid.,* hlm. 171-172.

190 Bambang Sayaka dan Sahat M. Pasaribu, *Pembiayaan Usaha Tani Menunjang Diversifikasi Produksi Pangan* (Jakarta: Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, n.d.) hlm. 94.

1985 hingga 1989, penyaluran kredit KUT secara akumulatif mencapai sekitar 300 miliar.[191] Kajian mikro yang dilakukan atas masyarakat petani di Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri memperlihatkan bahwa penyaluran KUT berhasil meningkatkan pendapatan para petani sebesar lebih dari 40%. Kaum petani juga mendapatkan manfaat yang besar dari program KUT berkat prosedur peminjaman yang mudah, tingkat suku bunga pinjaman yang relatif rendah, serta pemberian pembinaan secara teratur.[192]

Peran Bank Indonesia dalam menunjang pembangunan di daerah Kediri juga diwujudkan dalam hal lain. BI Kediri berperan sebagai penyedia data statistik potensi ekonomi daerah seperti profil sektor perbankan dan pertumbuhan kredit per sektor di tingkat kabupaten. Data ini diolah oleh Bank Indonesia Kediri berdasarkan laporan bulanan yang dikirim oleh bank-bank di seluruh wilayah kerjanya. Hasil olahan data statistik ekonomi masing-masing kabupaten yang dihasilkan Bank Indonesia Kediri banyak mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan di daerah.[193]

Pemerintah daerah di wilayah Bank Indonesia Kediri sangat mengandalkan laporan yang diterbitkan Bank Indonesia Kediri sebagai masukan dan bahan rapat dinas untuk merencanakan pembangunan daerah. Tidak hanya untuk pemerintah daerah saja, pihak BI dalam berbagai kesempatan juga diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyajikan laporan-laporan yang diterbitkan di antaranya mengenai perbankan, pertumbuhan kredit per sektor, dan sektor usaha kecil. Laporan-laporan BI Kediri ini sangat diapresiasi DPRD karena menjadi bahan yang bermanfaat dalam kegiatan rapat evaluasi dengan pemerintah daerah. Laporan-laporan tersebut berguna untuk melihat perkembangan masing-masing daerah dan berbagai potensi yang dimilikinya, serta bahan untuk membandingkan dengan potensi dan

191 Sumaryanto dan Effendi Pasandaran, *Keragaan Kredit Usaha Tani dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan*, hlm. 11-12.

192 Siti Mukaromah, "Analisis Manfaat Pemberian Usaha Tani terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri 1998-1999", *Skripsi* (Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2000), hlm. 54.

193 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

perkembangan di daerah kabupaten lainnya di wilayah eks Keresidenan Kediri dan eks Keresidenan Madiun.[194]

Laporan yang diterbitkan Bank Indonesia Kediri juga menjadi rujukan model bagi cabang-cabang Bank Indonesia lainnya. Pada masa itu, pengolahan data belum banyak dilakukan. Data yang tersedia masih terbatas berupa laporan bulanan yang disampaikan oleh bank-bank kepada Bank Indonesia Kediri. Dalam rapat kerja setiap cabang menyajikan produk dalam bentuk laporan. Pada waktu itu, baru BI Kediri yang sudah mengembangkan kegiatan pengolahan data statistik, sedangkan cabang lain belum melakukan kegiatan semacam ini.[195]

Kegiatan penting berkenaan dengan perkreditan yang ditangani Bank Indonesia adalah proyek pengembangan pengusaha kecil. Dalam struktur BI, kegiatan ini diurus oleh seksi P3K dan seksi PK. Kedua seksi ini merancang program untuk meningkatkan jumlah nasabah dari kalangan pengusaha, yakni Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP). Melalui program ini pengusaha kecil mendapatkan bantuan kredit mini dan kredit candak kulak, serta menjadi nasabah KIK/KMKP. Dalam pelaksanaan program ini, Bank Indonesia melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan informasi yang berasal dari berbagai instansi pemerintah maupun usulan proyek bank-bank pelaksana KIK/KMKP. Selain itu, kegiatan promosi program KIK/KMKP juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengusaha kecil, serta penyelenggaraan kegiatan survei lapangan selama jangka waktu tertentu.

Secara khusus Bank Indonesia Kediri mendorong sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dorongan ini disampaikan, misalnya, melalui forum kegiatan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).[196] Forum ini merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Bank Indonesia Kediri dalam melakukan tugas pembinaan terhadap sektor perbankan. Baik perbankan milik pemerintah maupun perbankan swasta pada tahun 1970-an belum benar-benar profesional

194 Kesaksian Sempa A.H. Sitepu dan Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

195 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021

196 Kesaksian Sempa A.H. Sitepu dan Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

dan kuat dari segi permodalan sehingga mempunyai ketergantungan besar pada dana murah dari Bank Indonesia terutama bersumber dari KLBI. Dengan pembinaan yang dijalankan Bank Indonesia diharapkan sektor perbankan dapat beroperasi dengan semakin profesional sehingga jumlah bank-bank bermasalah dapat dikurangi dan diselesaikan. Secara umum, BI Kediri juga memfasilitasi sektor perbankan untuk tujuan penyaluran kredit dengan penyediaan laporan-laporan analisis kelayakan sektor usaha yang akan mendapatkan kredit perbankan.[197] Melalui Musyawarah Perbankan yang dilaksanakan secara rutin, BI Kediri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku dalam sektor perbankan.

Bank Indonesia Kediri juga berperan dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha di daerah. Salah satu problem utama yang dihadapi pelaku usaha di daerah adalah keterbatasan permodalan untuk mengembangkan usaha. Untuk membantu dalam mengatasi problem ini, Bank Indonesia Kediri memberikan fasilitasi untuk menghubungan para pelaku ekonomi dengan pemerintah dalam rangka memperoleh akses permodalan perbankan. BI Kediri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan penyuluhan untuk para pengusaha kecil dan menengah. Penyelenggaraan kegiatan ini sering dilakukan dengan mengundang keterlibatan pihak perbankan. Dengan cara ini problem yang dihadapi para pelaku dunia usaha dapat dicarikan langkah-langkah nyata sebagai solusi, sedangkan pihak perbankan sebagai penyedia jasa kredit dapat menyalurkan modal yang dikelola secara tepat sasaran. Bukan itu saja, pihak Bank Indonesia juga aktif mendampingi para pelaku dunia usaha dalam menyusun laporan keuangan secara baik sehingga dapat menjadi pedoman untuk mengelola dan mengembangkan usaha.[198]

Selain dengan pelaku usaha kecil dan menengah, BI Kediri juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah kerjanya. Peran Bank Indonesia Kediri dalam kerjasama ini diwujudkan misalnya dalam penyediaan uang kartal. Salah satu ilustrasi yang paling mencolok adalah yang dilakukan untuk Perusahaan Rokok Gudang Garam Kediri yang jumlah karyawannya mencapai puluhan ribu.

197 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

198 Kesaksian Sempa A.H. Sitepu dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

Skalanya yang besar membuat Gudang Garam digambarkan sebagai nafas utama Kediri. Setiap pagi, jalan raya Kediri dipenuhi kaum perempuan bersepeda yang berangkat ke pabrik untuk bekerja, sedangkan pada sore hari mereka memadati jalan raya meninggalkan pabrik Gudang Garam menuju tempat tinggal masing-masing. Pada saat menjelang hari raya terutama Lebaran, kebutuhan uang kartal perusahaan ini sangat besar untuk membayar upah dan tunjangan hari raya bagi para pekerjanya. Setiap tahun Bank Indonesia Kediri memfasilitasi Gudang Garam dalam menyediakan uang kartal yang dibutuhkan untuk tujuan ini.[199]

Sinergi antara Bank Indonesia Kediri dengan Gudang Garam juga terwujud melalui peristiwa tukar guling bangunan rumah dinas dengan perumahan dinas BI yang baru di Kompleks Chandra Kirana. Lokasi rumah dinas Bank Indonesia Kediri di pusat kota yang berdekatan dengan pabrik membuat pegawai yang menempatinya merasakan udara yang kurang segar karena bercampur dengan aroma tembakau dan bahan racikan campuran rokok secara terus menerus. Pada musim penghujan aromanya tercium menyengat lebih kuat sehingga kemudian terjadi kesepakatan tukar guling antara pihak Bank Indonesia Kediri dengan Gudang Garam. Rumah dinas Bank Indonesia diambil alih kepemilikannya oleh Gudang Garam dan sebagai gantinya Gudang Garam menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Bank Indonesia di kompleks perumahan Chandra Kirana. Perumahan ini tergolong sebagai kompleks perumahan Bank Indonesia yang paling bagus. [200]

Bank Indonesia Kediri juga membangun sinergi dan relasi dengan berbagai lembaga sosial keagamaan yang ada di wilayah Kediri. Lembaga sosial-keagamaan yang banyak dijumpai di wilayah Kediri adalah pondok pesantren, di antaranya adalah Pondok Pesantren Al Falah (Petok, Mojo), Pondok Pesantren Bustanul Arifin (Ploso, Mojo), Pondok Pesantren Al-Ishlah (Bandarkidul, Mojoroto), dan Pondok Pesantren Kedunglo (Bandarlor, Mojoroto).[201] Hubungan yang begitu dekat antara Bank Indonesia Kediri

199 Kesaksian Sempa A.H. Sitepu dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

200 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

201 Untuk penggambaran secara terperinci mengenai pondok pesantren di Kediri tersebut, lihat misalnya Tauhid Wijaya (ed), *Brantas dari Pesantren Hingga Lokalisasi (Laporan Jurnalistik Ekspedisi Brantas 2 Radar Kediri* (Kediri: Intermedia Pers, 2012), hlm. 1-106.

dengan kalangan pesantren tampak dari berbagai kegiatan silaturahmi, penyaluran bantuan, dan qurban yang rutin dilakukan oleh Bank Indonesia Kediri secara institusional maupun perorangan. Pada kesempatan tertentu, Bank Indonesia Kediri juga mengundang tokoh-tokoh ulama dari kalangan pesantren untuk menyampaikan siraman rohani pada acara pengajian yang digelar. Kedekatan pimpinan BI Kediri dengan tokoh-tokoh ulama besar di Kediri tergambarkan di antaranya dari kesaksian tentang penerimaan yang mudah dan akrab oleh berbagai tokoh ulama besar ketika mendapat kunjungan tanpa rencana dari pimpinan BI Kediri.[202]

Dalam kaitan dengan peredaran uang, Bank Indonesia Kediri terus mengupayakan agar uang yang beredar tetap layak pakai (*clean money policy*). Untuk mencapai tujuan ini, secara teratur Bank Indonesia Kediri melakukan penarikan uang-uang lusuh dari peredaran dan menggantikannya dengan menyuntikkan uang cetakan baru. Penarikan uang lusuh dilakukan dengan kegiatan kas keliling yang beroperasi tiga kali seminggu dengan menggunakan mobil operasional Bank Indonesia Kediri. Kegiatan kas keliling dijadwalkan secara teratur dengan wilayah operasi mencakup seluruh wilayah kerja Bank Indonesia Kediri yang meliputi dua wilayah eks keresidenan, yakni Kediri dan Madiun. Kegiatan ini melibatkan baik staf BI Kediri maupun petugas aparat keamanan (BRIMOB).[203] Uang lusuh yang terkumpul disortir dengan mesin sortir uang kertas untuk memisahkan uang kertas yang masih layak dan uang kertas yang sudah tidak layak. Uang kertas yang sudah tidak layak beredar oleh Bank Indonesia Kediri kemudian dimusnahkan dengan cara dicacah dan selanjutnya dimasukkan ke tungku pembakaran. Bank Indonesia juga melakukan upaya secara terus menerus untuk menekan dan memerangi peredaran uang palsu dalam masyarakat. Penemuan uang palsu ditindaklanjuti dengan penelusuran asal-usul uang dan pelaporan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses penyelidikan.[204]

202 Kesaksian Ahmad Buchori dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

203 Kesaksian Soebagijono dalam Wawancara tanggal 27 17 Agustus 2021.

204 Kesaksian Soebagijono dalam Forum Diskusi Kelompok pada 17 Agustus 2021.

BAB 6

Bank Indonesia Kediri Pada Masa Reformasi (1999-Kini)

Lengsernya Soeharto dari kursi Presiden RI tahun 1999 mengantarkan Indonesia pada Era Reformasi. Pada awalnya, era ini ditandai dengan banyaknya tuntutan, terutama dari mahasiswa, yang bersifat politis. Beberapa tuntutan yang paling lantang disuarakan adalah pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, pemberian otonomi daerah, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1999 memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (yang kemudian disempurnakan melalui UU No 32/2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah wujud dari dipenuhinya tuntutan itu, serta sekaligus wujud dari jiwa zaman reformasi yang memberi lebih banyak tempat dan perhatian pada daerah dan masyarakat daerah.

Berbagai produk hukum serta kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat pada masa reformasi memang banyak yang bersifat pro-daerah. Bahkan, hingga tingkat tertentu, pemerintah pusat terlihat sangat akomodatif terhadap daerah. Sejumlah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang keuangan, termasuk keberadaan Bank Indonesia dan kebijakan Bank Indonesia juga menyiratkan semangat reformasi yang pro-rakyat dan pro-daerah.

Bab ini membicarakan berbagai perubahan yang dialami oleh Bank Indonesia (BI) pada Era Reformasi. Perubahan demi perubahan itu sekaligus

memperlihatkan dinamisnya keberadaan lembaga keuangan ini serta sekaligus merepresentasikan posisinya dan tanggungjawabnya terhadap pemerintah pusat dan daerah. Pada bab ini juga akan dibicarakan secara lebih mendalam berbagai program atau kegiatan yang dilakukan oleh BI Kediri, perubahan-perubahan yang terjadi di Kediri sebagai hasil kerja BI Kediri dan hasil kerja sama BI Kediri dengan berbagai pihak yang ada di daerah itu. Mengacu pada judul bab, maka batasan waktu kajian pada bagian ini adalah pada masa Reformasi, yang berawal pada tahun 1999 hingga beberapa waktu belakangan.

Sebelum membahas keberadaan dan kiprah BI Kediri di daerah secara lebih mendalam, maka pada bagian berikut akan dibicarakan terlebih dahulu dinamika sejarah BI beberapa waktu sebelum hingga pada masa awal Reformasi.

EVOLUSI KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada umumnya, dasar pembukaan Kantor cabang BI adalah untuk menjalankan fungsi bank sentral di suatu daerah. Kantor cabang BI bertujuan untuk membantu Kantor Pusat BI dalam menjaga stabilitas rupiah, mengatur kredit dan dana perbankan, serta mengatur peredaran uang kartal dan uang giral. Pada tahun 1972, untuk pertama kali BI mulai mengambil langkah guna menata jaringan operasional melalui penerbitan Surat Keputusan terkait klasifikasi Kantor cabang BI.[1] Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa seiring dengan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di daerah, maka terdapat perbedaan pelaksanaan tugas dan kegiatan masing-masing Kantor Cabang BI baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga terdapat 4 (empat) klasifikasi kantor cabang yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prospek kepesatan perkembangan ekonomi suatu daerah, kondisi khusus yang terjadi pada

1 Surat Edaran No. 5/106 Rupa-Rupa tanggal 16 November 1972 yang menyampaikan Salinan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/26/KEP/UP/ tanggal 25 Oktober 1972 tentang Klasifikasi Kantor-Kantor Cabang Bank Indonesia

suatu daerah dan tingkat kesulitan berkomunikasi antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat.

Selang satu dekade, BI kembali melakukan penyempurnaan organisasi kantor cabangnya secara mendasar. Perubahan tersebut mempertimbangkan bahwa kantor cabang didirikan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu yang umumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas BI sebagai Bank Sentral. Oleh sebab itu, BI menyusun suatu konsep tentang fungsi dan manfaat dari suatu kantor cabang, yaitu:

- Memiliki tanggung jawab dengan wilayah kerjanya, yaitu dalam hal pengembangan ekonomi wilayah.
- Memiliki hubungan dengan kantor pusat dan kantor cabang lainnya yang mencerminkan adanya alur pelaporan, transaksi keuangan, pelaksanaan kebijakan, dan tugas bank sentral lainnya.
- Manajemen kantor cabang yang bersifat spesifik dan merupakan *management role model* bank sentral yang berbeda dengan manajemen model bank komersial pada umumnya.
- Memiliki sumber daya manusia yang handal dan mampu bersikap serta bertindak sebagai *central bankers*.
- Hubungan dengan pihak ketiga yang lebih terfokus kepada pelaksanaan tugas-tugas utama bank sentral.
- Status/kelas kantor cabang yang bersangkutan harus bersifat jelas dan membedakan dengan jaringan kantor bank komersial.

Mengacu pada pemikiran di atas maka BI menerbitkan SE No. 29/8 INTERN tanggal 5 Juni 1996 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor BI. Beberapa perubahan mendasar dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyebutan nama Kantor Cabang BI diubah menjadi Kantor BI;
b. Sebutan jabatan Pemimpin Cabang diubah menjadi Pemimpin BI;
c. Jabatan Wakil Pemimpin Cabang ditiadakan sehingga fungsi wakil pimpinan cabang dialihkan kepada jabatan di bawahnya;
d. Kantor BI diklasifikasikan menjadi Kantor BI Kelas I sampai dengan Kelas V;
e. Tujuh Kantor BI ditetapkan sebagai Kantor Koordinator BI.

Dengan penyempurnaan organisasi tersebut, BI mengklasifikasikan kantor cabangnya berdasarkan beban tugas di bidang ekonomi dan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, serta tugas koordinasi dengan beberapa kantor cabang lainnya. Kantor Bank Indonesia (KBI) pada periode ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- Empat KBI kelas I, terdiri dari KBI Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang.
- Delapan KBI kelas II, terdiri dari KBI Denpasar, Ujung Pandang, Padang, Palembang, Yogyakarta, Manado, Bandar Lampung, dan Banjarmasin.
- Sebelas KBI kelas III, terdiri dari KBI Pontianak, Pekanbaru, Malang, Samarinda, Solo, Cirebon, Banda Aceh, Mataram, Jambi, Ambon, dan Jayapura.
- Tiga belas KBI Kelas IV, terdiri dari KBI Kediri, Bengkulu, Kendari, Kupang, Palu, Dili, Palangkaraya, Tasikmalaya, Jember, Tegal, Purwokerto, Balikpapan, dan Pematang Siantar.
- Enam KBI kelas V, terdiri dari KBI Lhokseumawe, Batam, Sibolga, Ternate, Padang Sidempuan, dan Sampit.

Sejak penyempurnaan organisasi tersebut, maka Kantor Cabang Bank Indonesia Kediri disebut sebagai Kantor Bank Indonesia (KBI) Kediri, dan menjadi KBI kelas IV.

Penyempurnaan kelembagaan BI dilakukan, utamanya setelah BI ditetapkan sebagai bank sentral yang independen berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang BI yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004. Penyempurnaan organisasi bertujuan untuk penyesuaian arah dan strategi organisasi KBI yang mencakup misi, fungsi, dan tugas guna mendukung pencapaian kebijakan Kantor Pusat, serta menjadi lembaga yang terpercaya di daerah yang mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Tahun 2007 dilakukan penyempurnaan organisasi KBI. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada April 2007 mencakup KBI kelas I, KBI yang berkedudukan di Provinsi serta KBI yang berkedudukan di luar ibukota Provinsi, tetapi memiliki

wilayah kerja (wilker) Provinsi, yaitu KBI Batam.[2] Penyempurnaan tahap kedua yang pelaksanaannya ditetapkan pada Juli 2007 mencakup KBI yang memiliki adsfjkl;\ bukan Provinsi, termasuk di dalamnya KBI Kediri.[3]

Dalam penyempurnaan organisasi ini, BI menetapkan visi dan misi KBI yaitu sebagai berikut:

- Misi KBI adalah berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
- Visi KBI adalah menjadi KBI yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan kepada KBI.

Selanjutnya pada April 2012, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi secara keseluruhan, yang meliputi perubahan struktur atas level organisasi sehingga memerlukan penyesuaian jabatan, satuan kerja, dan unit kerja serta penerapan pangkat dan eselon. Penyempurnaan organisasi juga dilakukan dengan mengubah nama Kantor Bank Indonesia (KBI) menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia.[4] Dengan perubahan tersebut, maka KBI Kediri berubah penyebutan menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, BI beberapa kali melakukan reorganisasi untuk *refocusing* dan penguatan peran KPwBI di daerah agar dapat mendukung implementasi kebijakan BI di daerah.[5] Dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi KPwBI Dalam Negeri, terutama untuk mempertajam *alignment* dan sinergi dengan satuan kerja terkait di Kantor

---

2 Surat Edaran No. 9/12/INTERN tanggal 30 Maret 2007 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap I

3 Surat Edaran No. 9/24/INTERN tanggal 26 Juni 2007 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap II

4 Surat Edaran No. 14/10/INTERN tanggal 2 April 2012 tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan Kerja dan Unit Kerja di Bank Indonesia

5 Peraturan Dewan Gubernur Intern No. 22/39/PADG INTERN/2020 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok D

Pusat, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali fungsi KPwBI.

KPwBI Kediri merupakan KPwBI Dalam Negeri Kelompok D, sehingga dengan adanya penataan organisasi tersebut, terdapat beberapa penyesuaian tugas dan fungsi KPwBI Kediri termasuk visi dan misi KPwBI Kediri, yaitu:

- Visi: Menjadi KPwBI yang kredibel dalam mendukung kebijakan BI dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
- Misi: Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Dalam mendukung capaian visi dan misi tersebut diatas, KPwBI Kediri memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:[6]

a. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pengembangan ekonomi daerah, ekonomi syariah, dan kehumasan;
b. Melakukan implementasi kebijakan SP, PUR, dan KI di daerah melalui kegiatan operasional SP Non Tunai dan Implementasi SP Non Tunai;
c. Melakukan pengawasan, perizinan, serta perlindungan konsumen Sistem Pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan
d. Melakukan operasional PUR;
e. Menyusun rekomendasi terkait perkembangan ekonomi daerah, ekonomi syariah, kehumasan, implementasi kebijakan SPPUR, dan KI di daerah.
f. Melakukan asesmen;
g. Mengelola data dan informasi.

Dengan penataan organisasi tahun 2020 tersebut, maka KPwBI Kediri juga melakukan penataan pada aspek SDM, termasuk pemetaan

6 Peraturan Dewan Gubernur Intern No. 22/39/PADG INTERN/2020 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok D

dan penempatan kembali SDM sesuai dengan struktur jabatan melalui proses reposisi (rotasi) untuk mengoptimalkan SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan program kerja KPwBI Kediri.

PERAN BANK INDONESIA KEDIRI DALAM MENGGERAKKAN EKONOMI

KPwBI Kediri memiliki wilayah kerja yang meliputi tiga belas kabupaten/kota yaitu Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan dengan total luas wilayah 11.997,56km^2 dan jumlah penduduk 10.235.608 jiwa pada tahun 2020 atau sekitar 25% dari luas wilayah dan jumlah penduduk Jawa Timur[7].

Pada tahun 2020, kinerja ekonomi wilayah kerja KPwBI Kediri menyumbang 17,95% PDRB Jawa Timur atau secara nominal sebesar Rp269,7 triliun.[8] Perekonomian terutama didorong oleh kinerja tiga lapangan usaha utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama PDRB wilayah kerja KPwBI Kediri. Keberadaan salah satu produsen rokok nasional di Kota Kediri yaitu PT. Gudang Garam dan PT. Industri Kereta Api (INKA) yang berada di Kota Madiun, memiliki peran strategis bagi perekonomian wilayah kerja, baik dari kontribusi terhadap PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Kedepan, sektor industri pengolahan diperkirakan semakin berkembang seiring adanya tren migrasi industri padat karya ke wilayah eks Karesidenan Madiun sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut seperti pembangunan Tol Trans Jawa dan *double track railway*. Perkiraan tersebut juga didukung oleh kebijakan

7 Publikasi BPS "Jawa Timur Dalam Angka 2021"

8 Publikasi BPS "Jawa Timur Dalam Angka 2021" yang diolah berdasarkan nominal PDRB 13 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Kediri, dibandingkan dengan nominal PDRB Jawa Timur.

pemerintah yang pro-investasi dan membaiknya kinerja perusahaan-perusahaan existing.

Kinerja sektor pertanian di wilayah kerja KPwBI Kediri juga cukup menggembirakan dengan terdapatnya beberapa sentra produksi komoditas strategis. Beberapa di antaranya adalah sentra produksi padi di Kabupaten Ngawi, sentra produksi aneka cabai di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, sentra produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk, dan sentra produksi telur ayam ras dan daging ayam ras di Kabupaten Blitar.

Percepatan implementasi berbagai proyek strategis dan prioritas yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Wilayah kerja KPwBI Kediri memiliki beberapa proyek strategis yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun, antara lain: rencana pembangunan Bandara Internasional Kediri yang telah dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang terbentang dari Jawa Barat hingga Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, dan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo.

Selain proyek strategis tersebut, Pemerintah Jawa Timur telah menetapkan proyek prioritas pembangunan di Kawasan Selingkar Wilis. Pembangunan Kawasan Selingkar Wilis merupakan konsep pengembangan dan pembangunan terpadu yang memaksimalkan potensi budaya dan ekonomi terutama agrowisata di kawasan Gunung Wilis, yaitu: Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo. Proyek ini tentunya memiliki nilai penting dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun karena semakin terbukanya akses jalan yang tentunya diharapkan dapat memberi kemudahan dalam mobilitas orang dan barang.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN STRUKTURISASI KELEMBAGAAN TERHADAP PEREKONOMIAN

BI ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dirubah dengan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.[9] Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Kestabilan rupiah dilihat dari laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
- Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
- Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Perubahan tugas dan wewenang BI tersebut juga berdampak pada pelaksanaan tugas BI yang ada di daerah, di mana beberapa program harus disesuaikan, khususnya program BI dalam mendorong pengembangan ekonomi di daerah, termasuk di dalamnya program pengendalian inflasi dan pengembangan UMKM. Selanjutnya, dengan terbitnya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, di mana Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan, berdampak pada tugas dan wewenang BI dalam pengawasan bank.

Pengendalian Inflasi Wilayah Kerja Bank Indonesia Kediri

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter, yang menunjukkan keterkaitan yang erat antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga. Dalam kondisi normal, tingkat inflasi akan selaras dengan tingkat

9 Buku "Sejarah Bank Indonesia Periode VI: 2000-2003, Bank Indonesia Pada Masa Reformasi.

pertumbuhan suatu wilayah. Kenaikan jumlah uang beredar yang menjadi salah satu indikator peningkatan aktivitas ekonomi, yang secara normal berdampak pada meningkatnya tekanan harga yang berimplikasi pada peningkatan tekanan inflasi. Oleh karena itu, pada bulan tertentu terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sering terjadi peningkatan tekanan inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat.

Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas inflasi maka diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Sisi permintaan erat kaitannya dengan jumlah uang beredar, peningkatan konsumsi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Sementara, sisi penawaran terkait dengan masalah produksi, distribusi, kebijakan pemerintah, maupun faktor eksternal seperti terjadinya inflasi di negara lain (*imported inflation*). Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama dan sinergi program untuk memastikan dan mengawal inflasi agar tetap berada pada koridor kisaran target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perkembangan inflasi diukur dengan menggunakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Di Jawa Timur terdapat delapan kota/kabupaten yang dilakukan SBH, yaitu Surabaya, Madiun, Probolinggo, Malang, Kediri, Sumenep, Banyuwangi, dan Jember. Kota Kediri dan Kota Madiun merupakan kota SBH yang berada di wilayah kerja BI Kediri.

Inflasi Kota Kediri dan Kota Madiun utamanya didorong oleh tekanan harga pada kelompok *volatile foods* seiring dengan terbatasnya pasokan komoditas dan meningkatnya permintaan masyarakat. Khusus di Kota Kediri, terdapat risiko tekanan inflasi yang bersumber dari kelompok *administered price* sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas produk tembakau sebagai implikasi kebijakan kenaikan tarif cukai produk tembakau yang dilakukan secara bertahap. Pada Tahun 2008, inflasi Kota Kediri dan Madiun tercatat relatif tinggi, yaitu sebesar 11,06% (yoy) untuk Kota Kediri dan 13,27% (yoy) untuk Kota Madiun.[10]

10 Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Timur Bulan Desember 2008, diambil data khusus Kota perhitungan IHK di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Kediri, yaitu Kota Kediri dan Kota Madiun.

Namun demikian, semenjak tahun 2015, agregasi inflasi di Kota Kediri dan Kota Madiun terkendali dan berada dalam sasaran inflasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 4±1% dan terus terkendali sampai dengan tahun 2020. Realisasi inflasi di tahun 2020 masih berada di dalam sasaran inflasi pemerintah, yaitu 3,0±1%. Rata-rata inflasi tahunan Kota Kediri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) terpantau lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi tiga tahun Jawa Timur dan Nasional.[11] Terjaganya inflasi pada rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah, tidak terlepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, Kota Madiun, dan seluruh Kota/Kabupaten di wilayah kerja KPwBI Kediri dalam menjaga stabilitas harga. Program kegiatan dan kebijakan pengendalian inflasi mengacu pada strategi utama 4K, yaitu menjaga Kecukupan pasokan komoditas pangan, Keterjangkauan harga pangan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi publik yang efektif, sejalan dengan peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

Penguatan Kelembagaan TPID

Program ini dilakukan dengan pembentukan kelembagaan TPID di 13 kota/kabupaten di wilayah kerja KPwBI Kediri dan secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian inflasi, di antaranya melakukan rapat koordinasi teknis dan *High Level Meeting (HLM)* yang secara rutin membahas pergerakan dan sumber tekanan inflasi, melakukan perumusan kebijakan pengendalian inflasi serta evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi yang sedang berjalan.

11 Data Perkembangan Inflasi Tahunan Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (www.jatim.bps.go.id), diolah untuk Kota Kediri dan Kota Madiun dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur dan inflasi Nasional

Menjaga Kecukupan Pasokan Komoditas Pangan dan Menjaga Keterjangkauan Harga Pangan

Dalam upaya menjaga keterjangkauan harga di masyarakat, program pengendalian inflasi difokuskan untuk memastikan harga komoditas pangan strategis stabil dan tidak mengganggu kemampuan daya beli masyarakat Kota Kediri. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain: (i) Sidak/pemantauan harga dan kecukupan pasokan komoditas secara langsung ke sejumlah pasar, pedagang, gudang, distributor, agen, dan asosiasi; (ii) Operasi Pasar Murni (OPM) bekerjasama dengan produsen dan distributor utama seperti Bulog dengan menggelar kegiatan operasi pasar; (iii) Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pembinaan dan Pengelolaan Sektor Pertanian.

Menjaga Kelancaran Distribusi Komoditas Pangan

Upaya menjaga kelancaran distribusi komoditas dan pasokan pangan agar tetap aman serta untuk memastikan jalur utama yang dilalui kendaraan bermuatan komoditas pangan tetap lancar, secara rutin dilakukan operasi pemantauan jalur distribusi komoditas pasokan pangan, khususnya menjelang Ramadhan dan Idhul Fitri. Operasi ini dilaksanakan secara bersama atau gabungan dengan melibatkan beberapa instansi terkait, di antaranya dinas perhubungan, UPT. LLAJ Prov. Jawa Timur, Denpom, dan Kepolisian. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memantau kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan serta mendokumentasikan jenis muatan yang masuk/keluar Kota Kediri.

Komunikasi Efektif

Komunikasi memiliki peran yang strategis dalam penyampaian informasi kebijakan pengendalian inflasi daerah, mulai dari pembuat kebijakan (*policy makers*), baik kepada masyarakat maupun kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Informasi perlu disampaikan agar

masyarakat dan seluruh *stakeholders* mengetahui tujuan, arah, dan sasaran kebijakan serta memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam implementasi kebijakan. Di samping itu, komunikasi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk mengendalikan ekspektasi publik. Beberapa kegiatan komunikasi dalam rangka pengendalian inflasi yang dilakukan antara lain *press release*, ekspose/sosialisasi data inflasi dan siaran pantauan harga pangan pokok.

Berbagai program yang telah dilakukan dengan sangat baik dari TPID Kota Kediri, terbukti berdampak positif terhadap capaian inflasi khususnya di Kota Kediri yang tercatat rendah dan stabil. Kerjasama yang harmonis dan sinergitas kebijakan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, BI, Bulog, BPS, Kadin, dunia usaha, serta masyarakat mampu menjaga inflasi Kota Kediri tetap terkendali dan stabil. Komitmen Kepala Daerah beserta jajarannya, kerja keras serta sinergi seluruh anggota TPID Kota Kediri menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, berbagai inovasi kebijakan TPID Kota Kediri, di antaranya OPM dan Kerjasama Antar Daerah, turut berperan besar dalam pengendalian inflasi di Kota Kediri.

Sinergi dan kerja keras dari seluruh pihak dalam menjaga inflasi, memperoleh apresiasi dari Presiden RI, Joko Widodo, di mana Kota Kediri meraih penghargaan **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Bali** pada TPID Award selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dari tahun 2016-2018 dan menjadi nominator TPID Kota Terbaik pada tahun 2019.[12]

12 TPID Kota Kediri Tiga Kali Raih Penghargaan Terbaik se-Jawa Bali | beritajatim.com

Gambar 6.1. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar Menerima Penghargaan TPID Terbaik Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Bali Tahun 2017 dari Presiden RI, Joko Widodo

Gambar 6.2. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Musni Hardi Menerima Penghargaan TPID Terbaik Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Bali Tahun 2018

Selain Kota Kediri, Kabupaten Blitar juga merupakan daerah yang gencar mendorong stabilisasi harga pangan di wilayahnya. Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra produksi telur utama di Indonesia. Terdapat sekitar 4.300-4.500 peternak di Blitar dengan jumlah ayam petelur mencapai 22 juta ekor sehingga mampu memproduksi 1.150-1.200 ton telur perhari. Jumlah produksi tersebut merupakan 70% dari produksi telur di Jawa Timur dan mampu menyuplai 30% kebutuhan telur nasional. Pasar telur di Blitar terdistribusi ke pasar DKI 70%, Jatim 19%, dan 11% dijual ke luar Jawa.[13]

Oleh sebab itu, salah satu program pengendalian inflasi yang digagas oleh TPID Kabupaten Blitar adalah mendukung pemotongan rantai pasok telur melalui kerjasama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga telur nasional melalui kerjasama antar daerah antara Koperasi Putera Blitar dengan PT. Food Station. Pada tahun 2018, Koperasi mengeksekusi kerjasama antar daerah dengan PT. Food Station yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Kerjasama tersebut dalam rangka: (1). Mendukung Program Kartu Jakarta Pintar di DKI; (2). Mendukung penyediaan komoditas dalam rangka Program Bantuan Pangan Non Tunai; dan (3). Kerjasama *business to business* antara koperasi dengan BUMD untuk penyediaan telur komersial di pasar.

Kerjasama secara G to G dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kerja sama B to B antara Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar dengan PT. Food Station. Kerjasama berjalan baik dan berkesinambungan dengan rata-rata transaksi dalam sebulan mencapai 160-200 ton. Realisasi Kerjasama juga sudah dilaksanakan dengan beberapa daerah lain di Jatim dan Kabupaten Tasikmalaya. Program kerjasama antardaerah tersebut berdampak pada harga telur nasional menjadi lebih rendah volatilitasnya sehingga mendukung pencapaian Inflasi Nasional.

Atas prestasinya tersebut, TPID Kabupaten Blitar pada tahun 2018 dan 2019 tercatat sebagai nominator TPID Kota/Kabupaten Berprestasi wilayah Jawa Bali dan pada tahun 2020, TPID Kabupaten Blitar

13 Jawa Timur Jadi Produsen Terbesar Telur Ayam Ras pada 2019 | Databoks (katadata.co.id)

mendapatkan penghargaan sebagai TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020 wilayah Jawa Bali.[14]

Gambar 6.3. Penghargaan untuk Kabupaten Blitar sebagai TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Jawa Bali Tahun 2020 pada TPID Award 2021

Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

BI mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu pembiayaan UMKM, khususnya pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, BI Kediri bekerjasama dengan Bank Jatim, Bank BDI, untuk memberikan KLBI melalui skim KKPA, skim KUT dengan pola *channeling* dan *executing*, serta skim KPKM Bank Umum.[15]

Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang BI, BI tidak dapat lagi memberikan KLBI. KLBI adalah kredit yang diberikan oleh BI kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka menunjang program Pemerintah. Menunjuk Peraturan BI No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), pada pasal

14 Kabupaten Blitar Raih Penghargaan Terbaik 1 Kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020 Wilayah Jawa-Bali (blitarkab.go.id)

15 Buku "Sejarah Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil" yang diterbitkan tahun 2001 oleh Biro Kredit, Bank Indonesia

2 disebutkan bahwa Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK.

Dengan diterbitkannya UU No.23 Tahun 1999 tentang BI, maka dalam melakukan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM BI memokuskan kegiatannya pada program fasilitasi dan pemberian bantuan teknis.[16] Berdasarkan Peraturan BI tersebut, pasal 2 menyebutkan bahwa Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Yang dimaksud dengan memberikan "Kredit atau Pembiayaan UMKM" adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

Sementara itu, pada pasal 1 disebutkan bahwa Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan oleh BI dalam rangka pengembangan UMKM, dan pada pasal 7 disebutkan bahwa BI dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung pengembangan UMKM. Bantuan Teknis diberikan oleh BI untuk mendukung pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau pengendalian inflasi.

Adapun cakupan bantuan teknik yang dapat diberikan terdiri dari penelitian dan pelatihan kepada UMKM. Topik penelitian yang dapat diberikan antara lain:

a. Komoditas/produk/jenis usaha unggulan UMKM;
b. Pola pembiayaan untuk komoditas UMKM yang potensial dibiayai bank;
c. Pengembangan infrastruktur keuangan dan kelembagaan; dan
d. Topik lain yang terkait dengan upaya pengembangan UMKM.

Sementara itu pelatihan yang diberikan kepada UMKM dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

16 Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta mendorong Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM;

b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) untuk memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan akses terhadap kredit atau pembiayaan;

c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam rangka meningkatkan elijibilitas dan kapasitas UMKM.

Pelatihan dapat diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tergabung dalam klaster yang dibina oleh BI; atau

b. Berada di bawah pembinaan Kementerian atau Dinas Terkait atau anggota asosiasi usaha yang mempunyai kerjasama dengan BI.

Struktur ekonomi wilayah kerja Kantor BI Kediri yang banyak ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan, mengindikasikan bahwa struktur pelaku ekonomi di wilker Kantor BI Kediri banyak didominasi oleh pelaku UMKM.[17] Oleh sebab itu, program pengembangan ekonomi BI Kediri diprioritaskan untuk mendorong pengembangan UMKM baik di sektor pertanian maupun industri skala kecil. Berbagai program pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BI Kediri antara lain:

1. Bantuan teknis dalam rangka penyediaan informasi kepada *stakeholder* eksternal KBI Kediri selama tahun 2007-2020 yaitu:
    a. Penelitian Budidaya Nanas;
    b. Penelitian Gula Merah Tebu;
    c. Pola Pembiayaan Usaha Kecil (*Lending Model*) Budidaya Ikan Koi;
    d. Penelitian Pelaksanaan *Linkage* Program Bank Umum dan BPR Wilayah Kerja Kantor BI Kediri;
    e. Pola Pembiayaan Usaha Kecil (*Lending Model*) Kerajinan Tenun Ikat;

17 Tabel distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, 2020, release Badan Pusat Statistik, sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (bps.go.id)

f. Survei/Penelitian Potensi dan Permasalahan Pengembangan Peternakan Ayam Ras Pedaging;

g. Survei/Penelitian Potensi dan Permasalahan Pengembangan Peternakan Ayam Ras Petelur;

h. Pola Pembiayaan (*Lending Model*) Teh Rosela;

i. Penelitian Komoditas Jasa Produk Unggulan (KPJU) wilayah BI Kediri.

2. Bantuan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas UMKM melalui pola pengembangan klaster. Adapun klaster binaan BI Kediri adalah sebagai berikut:[18]

   a. Klaster Cabai di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dengan anggota klaster tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Horti Jaya. Program klaster binaan dimulai pada tahun 2011 karena mempertimbangkan cabai adalah komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Kediri sementara Kabupaten Kediri adalah sentra produksi komoditas cabai. Program klaster diharapkan dapat mendukung Kabupaten Kediri menjadi pusat agribisnis pertanian cabai mulai dari penyediaan saprodi, pemasaran cabai segar hingga pengolahan pascapanen untuk menunjang stabilitas harga cabai.

   b. Klaster Lele berlokasi di Desa Paron Kec. Ngasem Kabupaten Kediri dengan anggotanya tergabung dalam KSU Lele Organik "Joyoboyo". Program pendampingan dimulai tahun 2012 berdasarkan Perjanjian Kerjasama KBI Kediri dengan Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Kediri No. 14/1/DKBU/Kd dan No. 523/056/418.43/2012 tentang pengembangan klaster lele di Kabupaten Kediri. KSU Joyoboyo merupakan hasil program pendampingan klaster lele Kab. Kediri di tahapan penguatan kelembagaan. Koperasi berdiri tanggal 24 Juli 2012 dengan jumlah anggota delapan kelompok budidaya lele dan 311 orang anggota.

18 Informasi bersumber dari dokumen Nota Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Tahun 2019 dari Bapak Djoko Raharto kepada Bapak Musni Hardi K.A

c. Klaster Bawang Merah, Kabupaten Nganjuk mulai pendampingan pada 2016. Pemilihan komoditas bawang merah mempertimbangkan komoditas tersebut adalah komoditas penyumbang inflasi di Kota Kediri dan nasional, serta Kabupaten Nganjuk adalah salah satu sentra produksi bawang merah nasional. Klaster ini meraih prestasi sebagai juara ketiga lomba klaster pengendalian inflasi tingkat nasional kategori hortikultura yang diadakan oleh BI pada tahun 2017 dan diumumkan pada tahun 2018. Klaster bawang merah juga merupakan klaster pendampingan BI Kediri yang menjadi *pilot project* nasional *digital farming* pada tahun 2020.

Gambar 6.4. Pelatihan Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan, 2021

d. Klaster Kopi, Kabupaten Tulungagung yang mulai dilakukan pendampingan pada tahun 2017 dimana anggotanya tergabung dalam wadah UMKM Omah Kopi Mandiri. Fokus pengembangan komoditas kopi karena kopi merupakan komoditas ekspor yang potensial untuk dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani.

Gambar 6.5. Kegiatan Pengembangan Klaster dan Bantuan Sarana Prasarana kepada UMKM Omah Kopi

e. Klaster Padi Organik, Kabupaten Ngawi dengan mitra binaan adalah Komunitas Ngawi Organic Center (KNOC) yang mulai mendapat program pendampingan klaster pada tahun 2017. Selain bergerak di sektor pertanian organik, KNOC juga mendirikan sekolah padi organik sebagai salah satu upaya edukasi bagi para petani untuk mengubah pertanian konvensional menjadi organik. Klaster padi organik Ngawi memperoleh penghargaan Juara 1 dan Juara umum klaster komoditas ketahanan pangan-padi organik tingkat nasional pada tahun 2017.

Gambar 6.6. Pelatihan Petani Milenial di Komunitas Ngawi Organik Center (KNOC) yang dibuka langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Tahun 2021

f. Klaster Tenun Ikat Kota Kediri, mulai dilakukan pendampingan pada tahun 2017 dan merupakan produk unggulan Kota Kediri yang harus dilestarikan. BI Kediri memberikan bantuan teknis mulai dari peningkatan kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi sampai dengan pemasaran melalui keikutsertaan berbagai pameran nasional. Klaster binaan tenun ikat mendapatkan penghargaan OVOP (*One Village One Product*) bintang lima dari Kementerian Perindustrian RI.

Gambar 6.7. Pelatihan Pembuatan Produk Turunan Kain Tenun, 2021

g. Klaster Telur Ayam, Kabupaten Blitar mulai dilakukan pendampingan pada tahun 2017. Pada pertengahan tahun 2016 s.d pertengahan tahun 2017, harga telur sempat jatuh dikarenakan pasar kebanjiran telur DOC yang tidak ditetaskan dari Integrator (perusahaan besar) dan harga yang *volatile*. Oleh sebab itu, untuk penguatan kelembagaan maka dilakukan pendampingan untuk menyatukan peternak dalam wadah koperasi agar peternak melalui wadah koperasi tersebut memiliki daya tawar dalam pemasaran. Klaster binaan BI telah melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan berbagai daerah lain, terutama DKI Jakarta dan mendapatkan penghargaan sebagai klaster komoditas ketahanan pangan terbaik tingkat nasional pada tahun 2020.

Gambar 6.8 Bantuan Sarana Prasarana Teknologi *Feeder Layer* melalui Program Sosial Bank Indonesia untuk Efisiensi Pakan Ayam di Klaster Telur, Blitar

Selain pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui klaster, BI Kediri juga memiliki mitra binaan UMKM yang tergabung dalam wadah Wira Usaha Bank Indonesia (WUBI), pelatihan dan pemberian bantuan sarana prasarana untuk komunitas Pertakina (Perkumpulan Tenaga Kerja Purna), sebuah lembaga bergerak pada sektor Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna. Area kerja utama Pertakina adalah Kabupaten dan Kota Blitar secara khusus dan Jawa Timur secara umum khususnya di wilayah basis-basis Tenaga Kerja Indonesia.

Program pengembangan UMKM selalu disinergikan antara pelatihan dengan pemberian bantuan sarana prasarana melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Program pendampingan dan PSBI yang diberikan oleh Bank Indonesia Kediri antara lain program bantuan di Kampung Idiot, Desa Karangpatihan dengan melakukan kegiatan pelatihan peternakan lele, pelatihan batik ciprat, pemberian PSBI sumur bor, dan pembuatan Rumah Harapan Mulia.

Program lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pembangunan waduk mini (embung) seluas 6.000 m2 dengan kedalaman 3,5 m melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).[19] Pembangunan waduk

19 BI Kediri Bantu Pembangunan Embung Tadah Hujan di Desa Kebon Rejo – Super Radio (www.superradio.id/4434)

mini tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi masalah ketersediaan air bagi para petani pada awal musim tanam yang bertepatan dengan musim kemarau. Sebelum adanya waduk mini, pada musim kemarau petani di Desa Kebonrejo dan sekitarnya harus membeli air dengan harga Rp75.000,00-Rp100.000,00 per m3 untuk mengairi tanaman cabai yang merupakan komoditas utama di daerah tersebut.

Gambar 6.9. Peresmian Embung Kebonrejo oleh Anggota Dewan Gubernur BI Bidang VI ADG Rosmaya Hadi, 2018

Keberadaan waduk mini yang mampu mengairi 50 hektar lahan petani mampu menekan biaya kebutuhan air untuk pertanian hingga 75%. Dengan demikian, produksi cabai diharapkan dapat meningkat, stok komoditas di pasar cukup, dan pada gilirannya upaya tersebut mampu mengurangi gejolak harga cabai baik di pasar lokal maupun nasional. Pembangunan waduk mini tersebut sudah dimulai pada 4 November 2013 dan diselesaikan pada 30 Januari 2014. Namun, erupsi Gunung Kelud pada Februari 2014 membuatnya tidak berfungsi secara optimal. Mengingat keberadaannya yang sangat strategis bagi warga sekitar, Bank Indonesia Kediri berupaya untuk melakukan perbaikan pada 15 September 2017 dan

selesai pada 31 Januari 2018. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan pada mekanisme input air dan penguatan struktur bangunan. Selanjutnya, pada Minggu, 25 Februari 2018, infrastruktur penyimpan cadangan air tersebut diresmikan oleh Anggota Dewan Gubernur BI Bidang VI, Ibu Rosmaya Hadi, disaksikan oleh Wakil Bupati Kediri, Bapak Drs. H. Masykuri, M.M., Kepala Departemen Regional II, Bapak Dwi Pranoto, segenap kepala Kantor Perwakilan BI di Jawa Timur, dan anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Eva Kusuma Sundari. Selain mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar, keberadaan waduk mini tersebut juga menumbuhkan ide-ide inovatif a.l. penyusunan *standard operating procedure* (SOP) manajemen pemanfaatan air, pengembangan pariwisata tematik, pengembangan wisata edukasi budidaya cabai, dan pengembangan komoditas unggulan lain seperti durian.

Pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020, berdampak pada penyesuaian program-program pengembangan ekonomi. Fasilitasi akses pemasaran yang biasanya dilakukan melalui pameran nasional, tidak dapat lagi dilakukan. Sementara itu, perlambatan ekonomi berdampak langsung pada kinerja sektor UMKM yang menurun signifikan dan berupaya pulih di tengah berbagai tantangan dan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, wilayah kerja KPwBI Kediri yang meliputi 13 Kabupaten/Kota menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan program kerja yang dilakukan mampu menjangkau dengan optimal seluruh wilayah kerja khususnya pada kondisi pandemi. Profil SDM dan kinerja Kepala Daerah yang semakin meningkat berdampak signifikan terhadap tingginya tuntutan dan ekspektasi *stakeholder* terhadap kualitas advisory yang dihasilkan oleh Bank Indonesia serta rekomendasi program-program yang dapat dikolaborasikan dan disinergikan pada tingkat daerah.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPwBI Kediri terus meningkatkan komunikasi dan memperkuat sinergi untuk dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas. Sinergi dilakukan tidak hanya dengan Pemerintah Daerah, tetapi melibatkan perbankan, komunitas serta asosiasi, seperti KADIN sehingga dapat terwujud program kerja bersama yang memiliki *impact* dan *magnitude* lebih luas dalam mendorong ekonomi serta mendukung pelaksanaan tugas KPwBI Kediri.

Merespon hal tersebut, Bank Indonesia Kediri menyelenggarakan kegiatan **"UMKM Virtual Expo 2020".**[20] UMKM Virtual Expo 2020 merupakan pameran virtual yang digelar sepanjang tahun dan merupakan program terintegrasi mulai dari Pameran Virtual, Talkshow Interaktif serta Business Matching yang dapat diakses langsung melalui berbagai platform yaitu Youtube, Instagram, aplikasi "umkmkitabisa" di android, maupun melalui website www.umkmkitabisa.com. Kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- **UMKM Virtual Expo 2020 wilayah Kediri dan sekitarnya** dilaksanakan pada tanggal 30 Juli-2 Agustus 2020 dan dihadiri oleh Walikota Kediri. Kegiatan ini mencatatkan Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai **Expo UMKM secara Daring dengan Produk Terbanyak**.
- **UMKM Virtual Expo 2020 wilayah Madiun, Pacitan, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo**, dilaksanakan pada tanggal 16-18 Oktober 2020. *Launching* program dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, KaKPwBI Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Daerah yang terlibat.
- **UMKM Virtual Expo 2020 wilayah Blitar, Trenggalek, Tulungagung,** dan sekitarnya, dilaksanakan pada tanggal 26-28 November 2020. *Launching* program dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, KaKPwBI Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Daerah yang terlibat.

Penyelenggaraan UMKM Virtual Expo juga dirangkaikan dengan Pameran UMKM *offline* dengan metode pembelian tanpa kontak fisik yang bertempat di Kediri Town Square, Plaza Lawu Madiun, dan Blitar Square. Informasi harga dan spesifikasi produk dapat diperoleh pengunjung dengan melakukan pemindaian *scan barcode* barang. Dalam bertransaksi, pembeli memanfaatkan dukungan QRIS sehingga kontak fisik langsung dapat diminimalisasi. Selain itu, juga dilakukan peluncuran website www.kurasi.com yang merupakan ***platform*** **kurasi produk UMKM untuk tujuan pasar ekspor oleh Wakil Gubernur Jawa Timur**, yang akan

20 Website Resmi Pemerintah Kota Kediri (kedirikota.go.id), artikel "Walikota Kediri UMKM Virtual Expo 2020 yang Masuk Rekor Muri Indonesia"

dipergunakan oleh seluruh UMKM di Jawa Timur dengan pusat kurasi di Kota Kediri.

Gambar 6.10. Pameran "UMKM Virtual Expo 2020" yang digelar oleh BI Kediri, bekerjasama dengan Pemkot Kediri dan Kadin Kota Kediri, 2020

Di samping penyelenggaraan kegiatan expo, BI mendorong program sinergi antara KPwBI Kediri, Pemda, dan Kadin Kota Kediri untuk mendorong peningkatan ekspor produk UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan mengurangi *Current Account Deficit* melalui:

- Penandatanganan Kerjasama Pemasaran UMKM Kota Kediri dengan **Diaspora Australia dan Belanda** terkait pemasaran produk UMKM di luar negeri khususnya Eropa;
- Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait kerjasama pemasaran produk UMKM antara Kadin Kota Kediri dengan **Diaspora Mesir** disaksikan Gubernur Jatim;
- Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait kerjasama pemasaran produk UMKM antara Kadin Kota Kediri dengan **Diaspora Laos** disaksikan Gubernur Jatim;

- Penandatanganan kesepahaman **kontrak dagang senilai $500.134 antara Kadin Kota Kediri dengan Berdi Pty. Ltd. Perusahaan dari Australia** yang disaksikan oleh Konjen RI di Australia dan Walikota Kediri;
- Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait kerjasama pemasaran produk UMKM antara Kadin Kota Kediri dengan **Diaspora Amerika** yang dilakukan pada kegiatan PTBI Provinsi Jawa Timur 2020 pada tanggal 3 Desember 2020;
- Fasilitasi proses **pengiriman ekspor produk UMKM** Binaan KPwBI Kediri, Pemkot, dan Kadin Kota Kediri pada tanggal 26 Agustus 2020, **ke Belanda dan Australia**. Jumlah produk yang diekspor adalah sebanyak 170 jenis produk yang berasal dari 47 UMKM yang telah berhasil lolos dari tahapan kurasi yang dilakukan oleh KPwBI Kediri dan KADIN. Pengiriman produk ke Belanda dan Australia bekerjasama dengan Garuda Indonesia serta didukung oleh Bea dan Cukai Kota Kediri. Sinergi berbagai pihak berhasil mengantarkan produk UMKM di wilker Kediri menembus pasar ekspor.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan BI Kediri merupakan wujud upaya BI dalam mendorong pengembangan ekonomi termasuk akselerasi pemulihan ekonomi khususnya sektor UMKM di masa pandemi.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai

a. Sistem Pembayaran Tunai

Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan.[21] Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh BI ditujukan untuk menjamin tersedianya

21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Bab IV tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut di daerah, Kantor Bank Indonesia Kediri berupaya untuk mendorong terwujudnya *clean money policy* di masyarakat, melalui berbagai program, antara lain:

- Layanan Penukaran Uang Kartal, melalui kegiatan layanan setoran bayaran kepada perbankan untuk menjamin ketersediaan uang yang beredar dalam jumlah dan pecahan yang cukup. Selain itu, secara retail, Kantor BI Kediri juga melakukan layanan kegiatan penukaran uang rusak dan penukaran uang kecil. Penukaran Uang Pecahan Kecil (UPK) dilakukan melalui kegiatan kas keliling, yang menyasar pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, pusat keramaian, alun-alun, dan sebagainya. Saat ini, terdapat penyesuaian kebijakan terkait dengan layanan atau kegiatan kas keliling yang difokuskan pada kegiatan kas keliling secara *wholesale*, bukan retail. Hal ini untuk meminimalisasi terjadinya interaksi dan layanan penukaran yang dapat memicu terjadinya kerumunan yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Layanan *wholesale* ini bertujuan untuk memberikan layanan penukaran khususnya kepada perbankan dan atau komunitas-komunitas yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan dari BI dalam melakukan kegiatan penukaran.
- Penguatan Edukasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan rupiah. Pada tahun 2021, Kantor BI Kediri melakukan berbagai kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah dengan target sasaran edukasi adalah generasi milenial yaitu pelajar di tingkat SD, SMA, dan Mahasiswa di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. Selain itu, edukasi CBP juga dilakukan kepada UMKM, kasir toko, *teller* perbankan serta berbagai masyarakat secara umum. Penyelenggaraan acara juga

bertujuan agar pemahaman masyarakat terkait dengan Rupiah tidak lagi sebatas dari bagaimana cara mengenali ciri keaslian dan merawatnya, tetapi juga mengetahui peran Rupiah sebagai simbol negara dan identitas Bangsa, serta fungsi Rupiah dalam perekonomian secara menyeluruh.

b. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem Pembayaran Non Tunai mengacu pada instrumen atau alat pembayaran yang tidak menggunakan uang kartal, tetapi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, nota debit maupun uang elektronik (*card based dan server based*). Dalam memfasilitasi pelaksanaan layanan Sistem Pembayaran Non Tunai, maka Kantor BI Kediri memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kliring atau pertukaran warkat bagi perbankan yang ada di wilayah kerja BI Kediri.

Selain itu, BI Kediri juga turut aktif mendorong implementasi Gerakan Nasional Non Tunai, untuk mewujudkan *Cashless Society* atau masyarakat tanpa uang tunai sedang digalakkan di beberapa negara yang bertujuan agar transaksi keuangan di Indonesia lebih mudah, aman, dan efisien. Hal ini juga didukung adanya tren digitalisasi yang terus berkembang pesat di seluruh dunia, yang turut diakselerasi oleh pandemi Covid-19, tidak terkecuali pada sektor ekonomi, sistem pembayaran, dan pemerintahan.

Kantor BI Kediri secara penuh mendorong digitalisasi transaksi di berbagai aspek, baik kepada komunitas maupun transaksi pemerintah. Salah satunya adalah mendorong pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kota Kediri telah membentuk TP2DD pada 7 September 2020[22] dan Kabupaten Kediri pada 23 Maret 2021[23] sebagaimana amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satgas P2DD. Pembentukan TP2DD ini mendukung rencana memperluas digitalisasi pada ekosistem Pemda dan UMKM,

22 Surat Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/116/419.033/2020 tanggal 7 September 2020 tentang TP2DD

23 Surat Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/128/418.08/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan TP2DD Kabupaten Kediri

antara lain melalui perluasan ETP Pajak Daerah (PBB, PBHTHB, dan sebagainya), retribusi seperti e-parkir, serta penggunaan QRIS oleh koperasi, kantin, dan masjid di lingkungan kantor Pemda, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); para agen bank atau Lakupandai; ekosistem pendidikan (pondok pesantren dan universitas); tempat ibadah; lingkungan aparat penegak hukum; tenaga kesehatan (RSUD, Puskesmas, dan Apotek); tiket masuk obyek wisata; pelaku pariwisata; serta UMKM kuliner, kerajinan, dan pasar tradisional.

Selain itu, BI Kediri juga terus berupaya untuk mendorong implementasi *digital payment* khususnya melalui akuisisi merchant QRIS atau QR Indonesia Standard yang merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia pada berbagai komunitas. Sebagai wujud komitmen dan sinergi seluruh *stakeholder* untuk mendukung implementasi QRIS, maka Bank Indonesia Kediri menyelenggarakan **Pekan QRIS Nasional (PQN)** pada tanggal 2-15 Maret 2020, yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Bp. Sarmudji, Walikota Kediri, Wakil Walikota Madiun, Forkopimda Kota Kediri, Pimpinan Perbankan, dan 1000 orang peserta. Pada Pekan QRIS tersebut, telah dilakukan *launching* QRIS dan e-retribusi di Pasar di Pasar Pahing Kediri pada tanggal 11 Maret 2020. Penggunaan QRIS untuk retribusi pasar juga telah diperluas ke berbagai pasar lain di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri pada tahun 2021.

Gambar 6.11. Pekan QRIS Nasional dihadiri Anggota DPR, Wali Kota Kediri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Pimpinan Perbankan Kota Kediri, 2020

Selain itu, BI Kediri bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, dan perbankan menginisiasi program Kampung Digital Kampung Inggris Pare Kab. Kediri sebagai sebuah wisata edukasi dan ekosistem digital yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya.

Gambar 6.12. *Launching* Kampung Edukasi dan Kampung Digital Kampung Inggris Pare oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, 2021

HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN LEMBAGA PERBANKAN LAINNYA DI JAWA TIMUR

Perkembangan Data Perbankan

Perkembangan jumlah jaringan kantor bank umum di wilayah kerja Kantor BI Kediri mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi sehingga menarik minat perbankan umum untuk membuka jaringan, baik Kantor Cabang maupun penambahan fasilitas sarana prasarana pendukung seperti ATM. Pada tahun 2007, jumlah jaringan kantor Bank Umum di wilker Kantor Bank Indonesia Kediri yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Kas Mobil, *Payment Point*, dan Kantor Unit, tercatat sebanyak 570 unit dengan jumlah ATM sebanyak 233 unit. Jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 2009, di mana jumlah jaringan kantor menjadi sebanyak 607 unit dengan ATM sebanyak 287 unit.

Ditinjau berdasarkan sebaran lokasinya, jumlah jaringan kantor bank terbanyak di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri sebanyak 128 jaringan kantor dan 98 unit ATM, sementara untuk Kota dan Kabupaten Blitar tercatat memiliki 80 jaringan kantor dan 39 unit ATM, serta Kota dan Kabupaten Madiun memiliki 74 jaringan kantor dan 45 unit ATM. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran jaringan kantor perbankan umum di wilker KBI Kediri tersentralisasi pada pusat-pusat ekonomi daerah.

Perkembangan jumlah jaringan kantor terus meningkat, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di wilker KBI Kediri. Pada tahun 2019, jumlah jaringan kantor bank umum tercatat sebanyak 986 jaringan kantor dengan 1982 unit ATM yang tersebar di 13 Kota/Kabupaten di wilker KBI Kediri. Peningkatan jumlah jaringan kantor yang signifikan berasal dari meningkatnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas, untuk menjangkau layanan perbankan di daerah-daerah, khususnya pada level kecamatan.

Namun demikian, adanya pandemi COVID-19 yang melanda pada awal tahun 2020 dan masih bertahan sampai dengan saat ini, berdampak pada penutupan beberapa Kantor Cabang maupun kantor kas serta

jaringan ATM sebagai dampak efisiensi akibat adanya penurunan ekonomi. Hal ini terlihat dari jumlah jaringan kantor yang turun menjadi 944 kantor dan 1940 unit ATM pada bulan Juni 2021.

Tabel 6.1.
Jumlah Jaringan Kantor Wilker KBI Kediri

Jenis Kantor	2007	2009	2018	Jun 2021
Kantor Cabang	61	64	61	59
KCP	99	129	474	453
Kantor Kas	131	129	289	271
Kas Mobil	12	12	31	14
Payment Point	23	24	72	92
Kantor Unit	244	249	59	55
Jumlah	**570**	**607**	**986**	**944**
Jumlah ATM	**233**	**287**	**1982**	**1940**

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Sejalan dengan peningkatan jumlah jaringan kantor, pertumbuhan kinerja perbankan di wilker KBI Kediri juga menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari perkembangan 3 (tiga) indikator utama yaitu aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, aset perbankan di wilker KBI Kediri sebesar Rp18,19 triliun, DPK sebesar Rp16,57 triliun, dan penyaluran kredit perbankan sebesar Rp9,89 triliun. Sementara pada tahun 2019, total aset perbankan sebesar Rp90,42 triliun, DPK sebesar Rp76,44 triliun, dan penyaluran kredit sebesar Rp61,69 triliun.

Perlambatan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 turut berdampak pada kinerja perbankan di wilker KBI Kediri. Hal ini utamanya terlihat dari penyaluran kredit yang mengalami penurunan pada Juni 2021, dibandingkan Desember 2019. Berbagai pembatasan aktivitas seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang bertujuan untuk meminimalkan penyebaran Covid-19, ikut berdampak pada penurunan konsumsi dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut

membuat perbankan lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Di sisi lain, pelaku usaha juga membatasi untuk meningkatkan pinjaman di tengah kondisi ekonomi yang masih tidak menentu.

Tabel 6.2.
Perkembangan Kinerja Perbankan Umum di Wilker KBI Kediri (Rp juta)

Jenis Kantor	2007	2009	2019	Jun 2021
Aset	18,190,106	24,154,937	90,419,546	94,895,464
DPK	16,569,522	22,381,089	76,441,000	87,763,466
Kredit	9,888,288	13,475,289	61,690,990	60,338,036

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Pengawasan perbankan

Kantor BI Kediri melakukan pengawasan kepada BPR di 13 Kota/Kabupaten di wilayah kerjanya dengan total jumlah Kantor Pusat BPR sebanyak 80 BPR. Pengawasan bank dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Pengawasan Tidak Langsung dilakukan antara lain melalui pemeriksaan laporan bulanan yang salah satu *output*nya adalah tingkat kesehatan (TKS) BPR. Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap BPR baik yang bersifat umum/reguler (minimal satu tahun sekali per BPR) maupun khusus. Fokus pemeriksaan khusus dilakukan terhadap BPR yang mempunyai permasalahan dengan risiko cukup tinggi di antaranya NPL, Kredit, *Linkage* Program atau permasalahan struktural lain yang dinilai berdampak terhadap kinerja BPR. Selain pengawasan, BI Kediri juga berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kualitas kinerja BPR di wilkernya, melalui fasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain:

a. Pelatihan aplikasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
b. Pelatihan *Know Your Costumer* (KYC).
c. Pelatihan Komisaris BPR di Wilayah Kerja KBI Kediri.
d. Pelatihan Pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG).

Namun demikian, seiring dengan beralihnya fungsi pengawasan ke OJK berdasarkan amanat UU OJK No. 21 tertanggal 27 Oktober 2011, maka secara perlahan, Bank Indonesia melepaskan fungsi dan tugas pengawasan kepada OJK. Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2013, Kantor BI Kediri secara resmi melakukan serah terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabang Kediri. Penandatanganan pengalihan fungsi dan pengawasan bank dari BI Kediri ke Kantor OJK Kediri dilakukan PBI Kediri, Matsisno dengan Kepala cabang OJK Kediri Kuswandono. Dengan pengalihan tersebut maka fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan, dan pengawasan mikroprudensial bank yang selama ini berada di tangan BI telah beralih ke OJK. Sehingga fungsi-fungsi di BI akan lebih mengarah pada pengendalian, pengelolaan moneter, dan sistem pembayaran serta mikroprudensial sekaligus pengendalian stabilitas sistem keuangan. Oleh sebab itu, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia sudah tidak lagi melakukan fungsi pengawasan perbankan. Walaupun tidak lagi melakukan tugas pengawasan bank atau mikroprudensial, tetapi Bank Indonesia masih melakukan pengawasan makroprudensial.

Hubungan dengan OJK (TPAKD-TP2DD)

Dalam pelaksanaan tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Kantor BI Kediri dan OJK Kediri senantiasa beriringan dan bersinergi dalam melaksanakan berbagai tugas dan program di 13 Kabupaten/Kota, utamanya dalam mendorong peningkatan literasi keuangan, peningkatan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan serta berbagai program edukasi yang dilaksanakan bersama-sama.

Salah satu pelaksanaan sinergi program adalah melalui pembentukan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri) yang dibentuk pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/576/419.16/2016 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri. Adapun anggota TPAKD terdiri dari OJK, BI, Pemerintah Kota Kediri, Industri Jasa Keuangan, serta Perguruan Tinggi. Tujuan pembentukan TPAKD adalah untuk mewujudkan industri jasa

keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan. Program utama yang didorong oleh TPAKD adalah penguatan infrastruktur perluasan akses keuangan, perluasan akses keuangan, kegiatan asistensi atau pendampingan, serta peningkatan literasi keuangan. Program asistensi dan pendampingan yang telah dilakukan oleh TPAKD Kota Kediri antara lain pemberdayaan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri guna mendorong peningkatan akses keuangan di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo melalui *dropping* pinjaman dengan sasaran target adalah ibu rumah tangga di sekitar LKMS.

Program TPAKD Kota Kediri juga bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM agar UMKM Kota Kediri dapat berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.

Gambar 6.13. Kepala OJK Kediri dan Deputi Ka KPwBI Kediri Berfoto Bersama Peserta Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri, 2020

Selain itu, menunjuk **PERPRES No. 82 Tahun 2016** tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif terkait Aksi Keuangan Inklusif pada Pilar Pelayanan Keuangan di Sektor Pemerintah serta **SE MENDAGRI**

No.910/1866/SJ & No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 serta **SE MENDAGRI No.910/14003/SJ & No. 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019** tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kota/Kab, maka Kantor BI Kediri juga berperan aktif untuk mendukung implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Kota Kediri. Guna mendorong akselerasi implementasi ETP di Kota Kediri maka dibentuklah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kediri melalui Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor.188.45/116/419.033/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Ketua TP2DD Kota Kediri adalah Wali Kota Kediri, dengan Wakil Ketua adalah Kepala Perwakilan BI Kediri. Adapun OJK Kediri masuk sebagai anggota bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan daerah serta Bank Daerah yaitu BPD Jawa Timur. Pembentukan TP2DD juga didorong di seluruh Kota/Kabupaten yang ada di wilker Kantor BI Kediri guna mendorong percepatan implementasi digitalisasi transaksi khususnya di era pandemi Covid-19. Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD, maka per Juli 2021 terdapat sepuluh Kota dan Kabupaten yang telah membentuk TP2DD melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Dengan semakin masifnya respon pemerintah daerah untuk mengakselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), maka diharapkan dapat mendukung berbagai program Pemulihan Ekonomi serta memastikan transaksi penerimaan pemda dapat terus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Elektronifikasi transaksi penerimaan pemda sangat diperlukan karena mayoritas daerah di Indonesia masih sangat tergantung pada penerimaan pajak dan restribusi sebagai sumber utama dari PAD dengan kontribusi antara 50%-98%. Oleh sebab itu, di era digital sekarang ini, elektronifikasi transaksi menjadi suatu keniscayaan untuk menjaga stabilisasi dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi pandemi menjadi momentum yang sangat tepat untuk penerapan digitalisasi transaksi, dengan minimalisasi kontak dalam bertransaksi.

Beberapa program ETP yang sudah dilaksanakan di wilker Kantor BI Kediri antara lain:

a. Program e-retribusi pasar di Pasar Pahing Kediri telah dilaksanakan sebagai *pilot project* implementasi elektronifikasi transaksi di daerah dan di *launching* pada tanggal 11 Maret 2020.
b. Implementasi QRIS di RSUD Gambiran Kota Kediri dan RSUD Simpang Lima Gumul Kediri.
c. E-retribusi Pasar Induk Pare dan Pasar Papar Kabupaten Kediri.
d. E-retribusi lokasi wisata Kabupaten Kediri.
e. Elektronifikasi pembayaran uji KIR di Dishub Kota Kediri.
f. Elektronifikasi pembayaran pajak.

BAB 7

Morfologi Kota dan Transformasi Gedung Kantor Eks De Javasche Bank Kediri

PERKEMBANGAN MORFOLOGI KOTA KEDIRI

PERKEMBANGAN MORFOLOGI KOTANYA

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111°15'-112°03' Bujur Timur dan 7°,45'-7°,55' Lintang Selatan dengan luas 63,404 km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40 %.

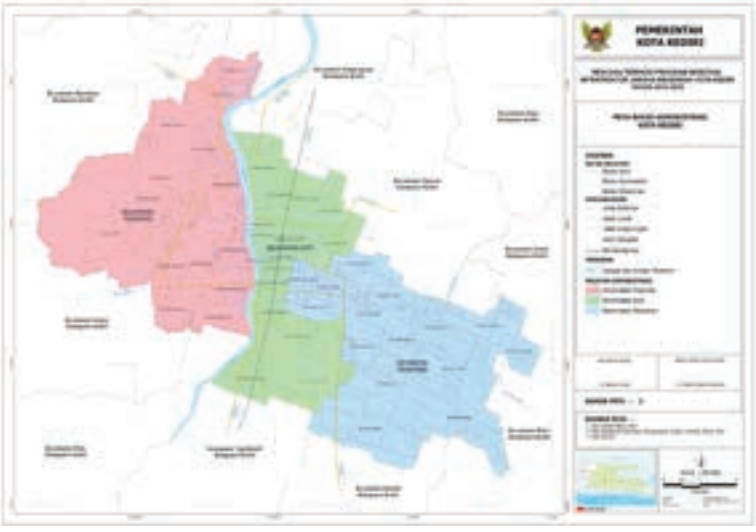

Gambar 7.1. Peta Kota Kediri 2012
Sumber: Pemkot Kediri

Kota Kediri berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Gampengrejo dan Kec. Grogol.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih, dan Kecamatan Ringin Rejo.
- Sebelah Timur: Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah.
- Sebelah Barat: Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen.

Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 km² terdiri dari 17 Kelurahan.
2. Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 km² terdiri dari 15 Kelurahan.
3. Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 km² terdiri dari 14 Kelurahan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Kediri, per September 2014 jumlah penduduk Kota Kediri adalah sebesar 279.245 jiwa.

Sejarah Singkat Kotanya

Kota Kediri mempunyai sejarah yang cukup panjang sampai mencapai bentuknya seperti sekarang. Menurut data, sejarah awal mula daerah Kediri dijadikan permukiman dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya pada tahun 1037 dari Kahuripan ke Dahanapura. Dahanapura (Kota Api) kemudian lebih dikenal dengan nama Daha.

Sepeninggal Airlangga (1042), wilayah Kerajaan Medang dibagi menjadi dua[1], yakni Panjalu di Barat dan Janggala di Timur. Daha dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu, sedangkan Kahuripan dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Janggala. Panjalu inilah yang nantinya dinamakan Kerajaan Kadiri atau Kediri. Luas wilayahnya diperkirakan meliputi Kabupaten Kediri[2] hingga Kabupaten Madiun sekarang. Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, Ibu Kota Daha diserang dan kota ini dijadikan kedudukan raja vazal, yang terus berlangsung hingga Majapahit, Demak, dan Mataram.

---

1 Pada tahun 1042 Airlangga turun takhta menjadi pendeta. Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Mpu Bharada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam *Serat Calon Arang*, *Nagarakretagama*, dan prasasti Turun Hyang II. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Kadiri berpusat di kota baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Janggala berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal**.** Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya, Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Berita ini sesuai dengan naskah *Serat Calon Arang* yang menyebut Airlangga sebagai raja Daha. Bahkan, *Nagarakretagama* juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha.

2 Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara 111° 47′ 05″ sampai dengan 112° 18′20″ Bujur Timur dan 7° 36′ 12″ sampai dengan 8° 0′ 32 Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah timur yang bersifat vulkanik dan Gunung Wilis di sebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilyah Kabupaten Kediri melintas Sungai Brantas yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian barat Sungai Brantas, perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok serta bagian timur Sungai Brantas.

Seperti halnya ibu kota kerajaan kuno dalam tradisi Jawa, inti Ibu Kota Kerajaan Kediri adalah keraton. Ibu kota Kerajaan Jawa selalu diibaratkan sebagai lampu pada malam hari. Makin terang lampunya, makin banyak serangga yang mengelilinginya. Tapi kalau lampunya mati maka semua serangga menghilang. Lampu di sini diibaratkan sebagai keraton dalam ibu kota Kerajaan Jawa. Makin terkenal rajanya, makin banyak pengikutnya, dan makin banyak pengikut yang ada di sekitar keraton. Tapi begitu rajanya meninggal atau jatuh karena sesuatu hal maka hilanglah sinar lampunya. Artinya lenyap dan hilanglah keratonnya atau ibu kotanya. Itulah sebabnya dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa banyak sekali ibu kota kerajaan yang hilang seperti Pajang, Singosari, dan sebagainya. Kalau sebuah kerajaan menyerang musuhnya, maka yang dihancurkan pertama adalah keratonnya. Itulah sebabnya Ibu Kota Kerajaan Kediri yang lama juga sulit untuk dijejaki.

Wilayah Keresidenan Kediri[3], sampai tahun 1830, termasuk salah satu bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dengan sebutan Mancanegara Wetan atau Mancanegara Timur. Akibat dari Perang Jawa (1825-1830), pemerintah Hindia Belanda menganeksasi wilayah Keresidenan Kediri. Maka, sejak tahun 1830, Keresidenan Kediri menjadi bagian dan dibawah kontrol dari pemerintah Hindia Belanda. Wilayah Karesidenan Kediri pada waktu itu memang cukup makmur. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya wilayah tersebut menjadi salah satu pelaksanaan *opiumpacht*[4] di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda.

Perkembangan Kota Kediri sendiri seperti halnya kota-kota di Jawa, mulai terbentuk secara permanen setelah tahun 1870 (setelah selesainya *Cultuurstelsel*) dan adanya UU Agraria (*Agrarischewet*) dan UU Gula (*Suikerwet*). Undang-undang Agraria memberikan kesempatan pada pihak swasta kemungkinan untuk menyewa tanah pemerintah, sampai maksimum 500 bau (1 bau setara dengan 7096,5 m^2), untuk selama 75 tahun. Oleh karena itu, sejak tahun 1870 kita dapat menyaksikan

3 Wilayah eks Keresidenan Kediri melingkupi: Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk (dahulu juga dinamakan Kabupaten Berbek), Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

4 Keresidenan Kediri dijadikan salah satu wilayah pemasaran dari perdagangan opium oleh pemerintah Hindia Belanda.sejak tahun 1833.

banyak sekali timbul "perusahaan-perusahaan perkebunan". Kota-kota pantai (Surabaya, Semarang, Pasuruan, dan sebagainya) serta sebagian kota pedalaman yang dikelilingi oleh daerah perkebunan (Malang, Kediri, dan sebagainya) bertumbuh dengan cepat. Tapi sebelum adanya UU Desentralisasi (tahun 1903, kemudian pelaksanaanya tahun 1905), kota-kota di Hindia Belanda dapat dikatakan kurang terurus, karena tidak ada perangkat administrasi dan dinas-dinas yang mengurus daerah perkotaan (sistem pemerintahan terpusat di Batavia).

Di daerah perkotaan, penduduk bertumbuh dengan cepat. Di Jawa Timur, misalnya, rata-rata pertumbuhan penduduk naik 30% sampai abad ke-20. Sedangkan sistem pemerintahan terpusat sangat menghambat penataan ruang kota. Struktur sistem pemerintahan seperti gambar di bawah menunjukkan tidak adanya sistem administrasi yang langsung mengurusi daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh semua perhatian difokuskan pada tempat-tempat produksi (pertanian dan perkebunan) untuk komoditas ekspor yang letaknya justru di luar kota-kota.

Tabel 7.1.
Kedudukan Kepala Pemerintahan dan Kekuasaan Wilayah Zaman Belanda sampai Tahun 1900

Pemerintah Eropa	Wilayah	Pemerintah Pribumi	Wilayah
Residen	Resensi	-	-
Asisten Residen	Afdeling	Bupati	Kabupaten
Kontrolir	Kontrole-afdeling	Patih	Distrik
Aspirant Kontrolir	-	Wedono	Onder Distrik
		Asisten Wedono	-

Sumber: Koleksi Pribadi

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut maka dikeluarkan UU Desentralisasi (*Decentralisatiewet*-1903) dan dilaksana secara efektif tahun 1905. Kota Kediri termasuk salah satu kota yang diberi status *Gemeente*.

Tabel 7.2.
Daftar Kota-kota yang ditetapkan sebagai Gemeente Tahun 1905 dan 1906

Tahun	Kota
1905	*Batavia* (Jakarta), *Meester Cornelis* (Jatinegara), *Buitenzorg* (Bogor)
1906	Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Magelang, Blitar, KEDIRI dan Palembang.

Sumber: Koleksi Pribadi

Perkembangan Kota Kediri sebagai swapraja dimulai ketika diresmikannya *Gemeente* Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan S*taasblad* (Lembaran Negara) No. 148 tertanggal 1 Maret 1906. *Gemeente* Kediri ini sekaligus dijadikan tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas. Kota Kediri juga mempunyai *Gemeente Raad* ("Dewan Kota"/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (*Europeanen*), empat orang Bumiputera (*Inlanders*), dan satu orang Bangsa Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*). Semuanya ini berdasarkan *Staasblad* No. 173 tertanggal 13 Maret 1906. Baru sejak tanggal 1 November 1928 berdasarkan *Staasblad* No. 498 tertanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri dijadikan *Zelfstandig Gemeenteschap* (Kota Swapraja) dengan otonomi penuh.

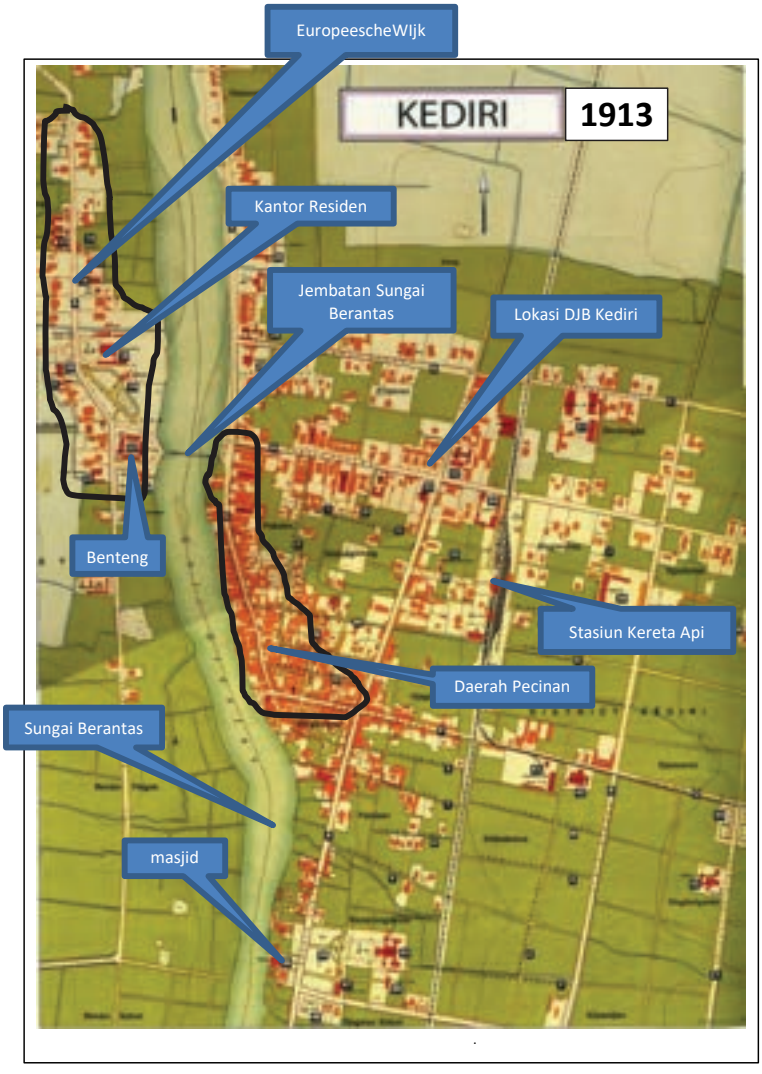

Gambar 7.2. Peta Kota Kediri 1913

Sumber: Koleksi Pribadi

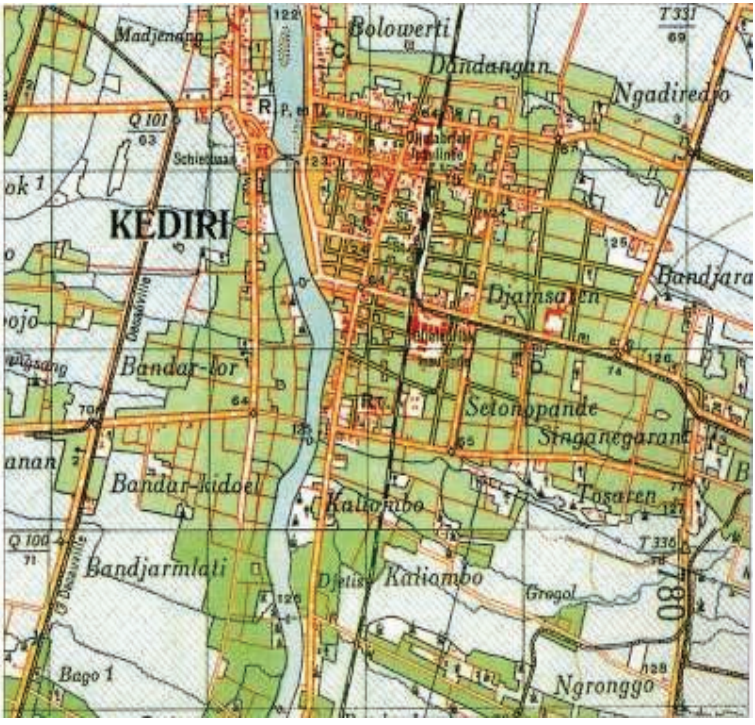

Dibandingkan dengan Peta Kediri tahun 1913, maka selama 25 tahun (antara tahun 1913-1938) Kediri tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Nama-nama daerah seperti Bandar Lor dan Bandar Kidul menunjukkan bahwa di tepi Sungai Berantas itu dahulu terdapat pelabuhan atau bandar untuk tempat perahu mendarat. Diperkirakan masuknya orang Tionghoak ke Kediri juga melalui bandar-bandar di tepi sungai Berantas tersebut. Nama nama seperti Setono Gedong, Setono Pande, Bolowerti, Pasar Pon, Pasar Paing, dlsb.nya menunjukkan tempat-tempat yang dahulu sesuai dengan fungsinya. Warna hijau pada peta menunjukkan daerah yang berpenduduk.

Gambar 7.3. Peta Kota Kediri 1938

Sumber: Koleksi Pribadi

Morfologi Kota Kediri

Secara geografis, Kota Kediri dibelah menjadi dua bagian oleh Sungai Brantas, menjadi Kediri Barat dan Timur. Kedua daerah tersebut pada tahun 1890 dihubungkan dengan jembatan permanen dari konstruksi

besi. Sebelumnya kedua daerah ini hanya dihubungkan dengan jembatan semi permanen dari kayu. Jembatan dari konstruksi besi ini merupakan salah satu yang tertua di Hindia Belanda. Di ujung jembatan sebelah barat dahulu didirikan Benteng Belanda. Di mulut gerbang jalan masuk dari benteng tersebut tertera angka tahun 1835. Berarti benteng tersebut didirikan oleh Belanda lima tahun setelah Kediri dianeksasi sepenuhnya oleh pemerintah Belanda.

Seperti kita ketahui bahwa apa yang dinamakan sebagai UU *Wijkenstelsel*[5] (Undang-undang Wilayah) yang berlaku di Jawa dan tentu juga berlaku bagi Kota Kediri. Sampai tahun 1900, kawasan sebelah barat Sungai Brantas merupakan daerah *Europeesche Wijk*.[5] Di sana terletak fasilitas pemerintahan kolonial (kantor dan rumah residen), sekolah (mulai dari sekolah rendah sampai MULO), gereja, lapangan tenis, serta rumah-rumah orang Belanda. Penduduk yang digolongkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai *Vreemde Oosterlingen* serta Bumiputera bermukim di sebelah timur Sungai Brantas. Tata kota seperti ini sangat tampak hingga tahun 1900. Baru setelah tahun 1910-an setelah tidak berlakunya lagi *Wijkenstelsel*, banyak kantor serta jasa keuangan, seperti bank mulai didirikan oleh orang Belanda pada jalan utama di sebelah timur Sungai Brantas. Termasuk De Javasche Bank (DJB) yang didirikan di jalan raya utama (*Grotepostweg*- sekarang Jl. Brawijaya).

Seperti kebanyakan kota-kota di Jawa, Kota Kediri juga mempunyai sebuah alun-alun. Dalam tatanan kota Jawa, alun-alun punya peran penting. Alun-alun Kediri dibangun sekitar tahun 1870-an, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Secara diagramatis, susunan alun-alun pada berbagai kota di Jawa dapat digambarkan sebagai berikut:

---

5 Pada zaman kolonial Belanda, masyarakat di Jawa dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan ras. Kelompok pertama adalah orang Eropa (yang didominasi oleh orang Belanda), kelompok kedua adalah Bumiputera, dan ketiga adalah kelompok Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), yang terdiri dari orang-orang Tionghoa, Arab, dan India yang lahir atau telah tinggal di Hindia Belanda selama 10 tahun. Untuk mempertegas pemisahan ini, pada tahun 1835, diadakan Undang-undang yang disebut sebagai *Wijkenstelsel* di Pulau Jawa. Kemudian disusul dengan surat edaran Raad van Indië No. 850 tanggal 25 Nopember 1838 kepada Gubernur Jendral, yang dimuat dalam Lembaran Negara 1842, lampiran No. 525, Peraturannya berbunyi: Orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yang menjadi penduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah di bawah pimpinan kepala mereka masing-masing. Meskipun peraturan ini dihapuskan pada tahun 1920, tapi berdampak pada jangka panjang, terutama keterpisahan (*separateness*) orang Tionghoa dari Bumiputera. Lea E. William, *Overseas Chineses Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movements in Indonesia 1900-1916* (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1960), hal. 31.

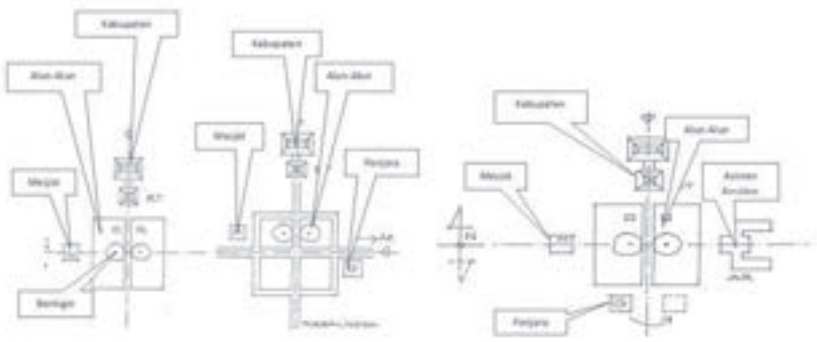

Gambar 7.4. Diagram Alun-alun Tradisional dan Perletakan Bangunan di Sekitarnya
Sumber: Koleksi Pribadi

Alun-alun Kota Kediri letaknya di sebelah timur Sungai Brantas. Alun-alun biasanya terletak di pusat kota, tapi alun-alun Kota Kediri terletak di sebelah selatan dari pusat kota. Dalam sejarah morfologi Kota Jawa, alun-alun lama letaknya terpisah dari bangunan penguasa Belanda (kantor residen atau asisten residen). Bentuk kota seperti itu dinamakan *Oud Indische Stad* (Kota Hindia Belanda Lama). Kalau di sekitar alun-alun, kantor kabupaten letaknya berhadapan dengan kantor penguasa Belanda (residen atau asisten residen) maka kotanya dinamakan *Nieuw Indische Stad* (Kota Hindia Belanda Baru).

Dari segi sejarah peletakan alun-alun di Jawa, Kota Kediri bisa digolongkan sebagai *Oud Indische Stad*, karena letak kantor penguasa Belanda terpisah dari alun-alun dan kantor kabupatennya.

Gambar 7.5. Benteng di Mulut Jembatan Kediri 1835
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 7.6. Rumah Kediaman Bupati Kediri di Alun-alun sekitar tahun 1930
Sumber: KITLV

Terletak di sebelah selatan Kota Kediri, dan timur Sungai Brantas menjadikan letak Alun-alun Kediri memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota lainnya. Alun-alun Kediri tidak menandakan letak penting perkembangan kota, dan saat ini terlihat lebih kecil luasnya dibanding tahun 1913.

Gambar 7.7. Alun-alun Kota Kediri sekitar Tahun 1938

Sumber: KITLV

Gambar 7.8. Peta Kota Kediri dan Daerah Sekitarnya

Sumber: Wereldculturen.nl

Pola Jalan

Secara geografis, Kota Kediri terletak di pedalaman. Seperti dijelaskan di atas bahwa produksi pertanian dan perkebunan di Jawa (termasuk Kediri) ditujukan ke pasar dunia. Maka, sejak tahun 1870, kota seperti Kediri yang dikelilingi oleh perkebunan tebu, kopi, dan pabrik gula dibentuk berdasarkan kepentingan komersial dan kepentingan ekspor. Perkebunan kolonial memperoleh bentuk baru sebagai sentra produksi, hasil perkebunan kemudian didistribusikan dan diperdagangkan ke daerah yang ada kota-kotanya. Secara tidak langsung bentuk dan struktur serta pola jalan Kota Kediri juga mengikuti arus seperti di atas.

Penataan struktur jalan Kota Kediri pada awalnya didasarkan atas kepentingan ekonomi seperti tersebut di atas. Daerah Kediri bagian timur Sungai Brantas polanya cenderung berbentuk grid yang disesuaikan dengan geografi dan jalan-jalan lama yang sudah ada. Jalan utamanya dinamakan *Grotepostweg*, yang merupakan bagian dari sistem jalan raya yang sudah dikembangkan oleh Daendels (1808-1811). *Grotepostweg* inilah yang menghubungkan Kota Kediri dengan kawasan luar kota lewat. Jadi, *Groteposweg* ini membentang mulai dari arah Minggiran terus ke selatan ke Jalan Semampir (sekarang Jl. May.Jen. Sungkono), kemudian berbelok ke Jalan Brawijaya (dulu namanya *Grotepostweg*), setelah perempatan belok ke arah selatan Jl. Dhoho, terus lurus menuju alun-alun (sekarang Jl. Panglima Sudirman). Di sebelah selatan kotanya, di mana terletak alun-alun dan kabupaten, jalannya bisa terus menuju luar kota (lihat gambar peta Kediri 1913 dan 1938). Jadi, masuk dan keluarnya jalan *Groteposweg* dari arah utara ke selatan selalu sejajar dengan aliran Sungai Brantas yang mengalir dari selatan menuju utara Kota Kediri. Jalan-jalan lainnya terbentuk sesuai dengan daerah permukiman penduduk, terutama daerah Pecinan, yang sudah sejak sebelum tahun 1830 (tahun saat mana Belanda menganeksasi Kediri) memang sudah ada. Jalan Pecinan (sekarang Jl. Yos Sudarso) sebagian besar sejajar dengan Sungai Brantas yang memasuki Kota Kediri. Orang Tionghoa memasuki Kediri memang lewat sungai. Dahulunya rumah-rumah di daerah Pecinan tersebut memang menghadap ke sungai. Terdapat sebuah kelenteng di daerah Pecinan yang dinamakan Kelenteng Tjoe Hwie Kiong. Di seberang

Pola jalan Kota Kediri th 1913 dijadikan dasar perkembangan Kota Kediri dewasa ini. Pola jalannya dikembangkan dari jalan yang menghubungkan Kediri dengan daerah luar yang berperan sebagai daerah produksi perkebunan. Jalan Utama tersebut adalah Grotepostweg (warna hitam) yang menghubungkan Kota Kediri dengan daerah luar kota. Jalan lainnya (berwarna merah) cenderung berpola grid yang menghubungkan daerah perumahan yang sudah ada (daerah Pecinan dan perumahan Bumiputera). Sedangkan garis hitam patah-patah adalah rel kereta api yang juga menghubungkan Kediri dengan daerah produksi perkebunan (terutama pabrik gula dan perkebunan tebu) yang terdapat di sekeliling kota. Dari peta pola jalan dapat dilihat pentingnya peran jembatan (dibangun th. 1870) yang menghubungkan daerah barat (Brang Kulon) dan daerah timur (Brang Wetan)

Gambar 7.9. Peta Pola Jalan di Kota Kediri 1913

Sumber: Koleksi Pribadi

sungai, di sebelah timur terdapat daerah yang dinamakan Bandar Kidul (Pelabuhan Selatan), sedangkan daerah tepi sungai di sebelah utaranya disebut Bandar Lor (Pelabuhan Utara). Jadi ini merupakan indikasi bahwa di tepi Sungai Brantas ini dulunya terdapat bandar sebagai tempat untuk berdagang.

Di bagian barat Kediri pola jalannya dihubungkan dengan jembatan besi. Pola jalannya cenderung berbentuk linier. Di sana terletak kantor residen. Permukiman Belanda ada di sebelah barat sungai. Setelah tahun 1910-an, bangunan Belanda banyak didirikan di sepanjang *Grotepostweg* (sekarang Jl. May. Jen. Sungkono, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, Jl. Panglima Sudirman). Jalan-jalan di Kota Kediri bagian timur sungai masih berpola grid dengan mengikuti pola *Grotepostweg*. Dari dasar pola jalan itulah Kota Kediri terus berkembang sampai sekarang peta pola jalan utama Kota Kediri dapat dilihat di Gambar 7.9.

Hubungan Kediri dengan Daerah Sekitarnya

Kota Kediri dikelilingi oleh daerah *onderneming*, yang juga berperan sebagai pusat pengolahan hasil perkebunan, di antaranya sebagai lokasi pengolahan (pabrik) gula. Ada banyak pabrik gula (*suikerpabriek*) di sekitar Kota Kediri, di antaranya Pabrik Gula Meritjan, Pabrik Gula Tegowangi, Pabrik Kawarasan, Pabrik Gula Pesantren, Pabrik Gula Purwosari, dan Pabrik Gula Minggiran. Kondisi ini menyebabkan Kota Kediri membutuhkan infrastruktur transportasi yang akan menghubungkannya dengan pusat-pusat produksi di kawasan sekelilingnya itu.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi kemajuan pesat dalam bidang infrastruktur di Pulau Jawa. Jaringan kereta api antar dan dalam kota dibangun di mana-mana, tidak terkecuali di Kota Kediri dan sekitarnya. Perusahaan transportasi swasta berbasis rel pun mulai mengendus peruntungan di daerah Kediri. Setelah melakukan studi kelayakan selama beberapa waktu, akhirnya pada tanggal 27 September 1895, berdirilah Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM). Perusahaan jasa transportasi kereta api ini membangun jaringan rel kereta di wilayah Kediri timur hingga Jombang. Pada awalnya, perusahaan KSM hanya

dirancang untuk melayani angkutan hasil perkebunan di daerah sekitar Kediri saja. Dalam perkembangannya, kereta trem tersebut tidak hanya hadir untuk mengakomodir angkutan perkebunan dan menunjang aktivitas pabrik gula saja, tetapi juga menjadi sarana transportasi massal dalam Kota Kediri. Selama berdiri sejak tahun 1895 sampai 1929, kereta trem tersebut terus melayani daerah Kota Kediri dan sekitarnya. Krisis ekonomi global sejak tahun 1929 hingga beberapa tahun berikutnya berimbas pada stabilitas pendapatan KSM. Penurunan pendapatan mulai terasa pada 1930. Waktu itu, KSM hanya meraup keuntungan sebesar *f* 167.122,27 dibanding tahun 1929 yang masih mencatatkan keuntungan mencapai *f* 182.316,58. Tahun 1930 adalah masa kemunduran bagi KSM. Dalam suasana krisis ekonomi, merosotnya barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik di sekitar Kediri berdampak langsung pada menurunnya kapasitas daya angkut KSM. Krisis finansial juga mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga menurunkan daya beli tiket trem. Perusahaan swasta tersebut mulai mengurangi jumlah pegawai, dari yang awalnya 420 orang (1929) ke 406 (1930). Stasiun Papar, Halte Tegowangi, dan Halte Kayangan yang kerap digunakan untuk pengangkutan barang terpaksa ditutup pada 1930. Sekarang rel-rel kereta tersebut sudah banyak yang hilang. Hal ini banyak terjadi pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1943. Rute bekas rel kereta api tersebut bisa dilihat pada peta dibawah ini.

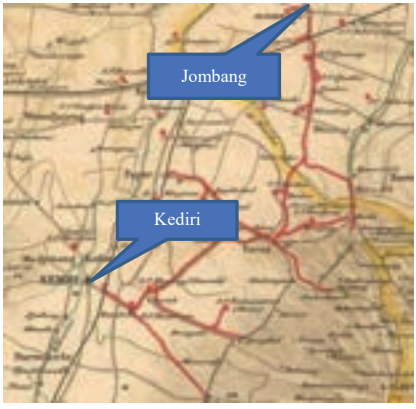

Pada 27 September 1895, berdirilah Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), perusahaan jasa transportasi kereta api yang membangun jaringan rel kereta di wilayah Kediri Timur hingga Jombang. Jaringan trem dan rel kereta api antara Kediri dengan daerah produksi di sekelilingnya. Terutama Kota Kediri dengan daerah sebelah timur kota seperti ditunjukkan dengan warna merah dalam peta di atas.

Warna merah menunjukkan jaringan trem dan kereta api di Kediri dan sekitarnya (terutama sebelah timur kota. Sedangkan di bagian bawah peta adalah jaringan trem dan kereta api di daerah Malang. Kedua kota, Kediri dan Malang sama-sama dikelilingi oleh daerah onderneming dimana pusat produksi berlangsung.

Gambar 7.10. Peta Rute Kediri Stoomtram Maatschappij dan Hubungan dengan Daerah Sekitarnya

Sumber: Koleksi Pribadi

FASILITAS UMUM KOTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA KEDIRI

Sebagai kota yang dikelilingi oleh *onderneming*, maka Kota Kediri (sampai tahun 1960-an) menjadi semacam oase bagi direksi sampai pekerja dari pabrik-pabrik gula di sekitarnya (Pesantren, Ngadiredjo, Mritjan, Purwoasri, dlsbnya). Hal ini terlihat jelas terutama pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Perkembangan ekonomi kelas atas dikuasai oleh orang orang

Belanda. Sedangkan ekonomi kelas menengah dan bawah dikuasai oleh orang Tionghoa (sebagai pedagang perantara, eceran, serta industri kecil). Penduduk Bumiputera, yang ekonomi mereka berbasis pada pertanian, banyak beraktivitas sebagai penjual hasil kebunnya di pasar tradisional.

Struktur ekonomi yang digambarkan di atas semuanya tercermin dalam penyediaan fasilitas umum yang ada di Kota Kediri. Gaya hidup dan kebutuhan rekreasi (*plezier*) dari sebagian orang Belanda, baik pejabat maupun yang bekerja di pabrik-pabrik gula, semuanya terpusat di kota Kediri. Hal ini berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi kota Kediri. Bahkan kehidupan ekonomi Kota Kediri yang bergantung pada *onderneming* di sekelilingnya, tidak saja terjadi pada zaman kolonial sampai tahun 1940-an (berhenti pada masa penajajahan Jepang 1942-1945), tapi terus berlangsung sampai tahun 1958 (di mana pabrik-pabrik gula milik Belanda tersebut kemudian di nasionalisasi).

Gaya hidup dan kebutuhan rekreasi (*plezier*) yang diperuntukkan bagi orang Belanda pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu rekreasi yang bersifat tertutup dan yang bersifat terbuka. Beberapa contoh fasilitas rekreasi tertutup adalah sebagai berikut:

Societeit De Brantas

Societeit de Brantas berada di Jl. Semampir. Sekarang gedung itu dikenal dengan Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jl. Maj.Jen Sungkono. Gedung ini letaknya di sebelah timur Sungai Brantas, dekat jalan menuju luar kota. Dinamakan De Brantas karena dekat sekali dengan Sungai Brantas. Ada dua fungsi utama yang melekat pada sebuah *Societeit*: fungsi sosial dan rekreasi. Fungsi sosial mencakup bertemunya dan saling bercakap-cakap antar orang Eropa, sebagai sesama perantau dari negeri jauh. *Societeit* juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, yakni tempat untuk mencari hiburan: permainan, kuliner, tempat berdansa, dan lainnya. Orang-orang Belanda yang selama seminggu bekerja di pabrik-pabrik gula di sekitar Kediri serta orang Belanda yang bekerja di pemerintahan pada hari Sabtu-Minggu serta hari-hari libur banyak yang mendatangi Gedung Societeit de Brantas ini untuk sekedar mengendorkan syaraf setelah selama seminggu bekerja.

Tapi biasanya yang datang ke *Societeit* ini hanya orang orang Belanda kelas atas (para pejabat tinggi serta direktur dan staf dari *onderneming* yang ada di sekitar Kota Kediri). Pada zaman Jepang (1942-1945) gedung ini ditutup. Setelah kemerdekaan, terutama setelah tahun 1958, gedung ini diambil alih oleh pemerintah kota dan dinamakan sebagai Gedung Nasional Indonesia (GNI).

Gambar 7.11. Tampak Depan Societeit De Brantas yang Terletak di Jalan Semampir Tahun 1938

Sumber: Wereldculturen.nl

Hotel, Restoran, dan Pertokoan

Banyak hotel sebagai fasilitas rekreasi dan penginapan di kota Kediri pada zaman Belanda. Selain berfungsi sebagai penginapan, hotel juga ditunjang dengan fasilitas hiburan lainnya, seperti restoran dan tempat santai lainnya. Dahulu, pada tahun 1930-an banyak terdapat hotel di sekitar stasiun kereta api Kediri. Karena banyak pabrik gula di sekitar Kediri yang dihubungkan dengan perusahaan KSM. Salah satu hotel yang terbesar dan sering dikunjungi oleh orang Belanda adalah Hotel Ritz yang didirikan tahun 1933. Hotel ini beroperasi dalam waktu yang tidak lama, karena pada tahun 1942 operasionalnya ditutup sebagai akibat masuknya bala tentara Jepang.

Setelah kemerdekaan namanya berganti menjadi Hotel Merdeka di Jl. Pocanan (sekarang Jl. Basuki Rachmad No.4, Kediri). Hotel Merdeka merupakan bangunan cagar budaya, karena selain dipergunakan untuk tempat tawanan pembesar Jepang di Kediri, juga dikabarkan pernah menjadi tempat menginap Muso saat kembali ke tanah air pada 11 Agustus 1948.

Gambar 7.12. Hotel Merdeka Kediri Tahun 2010
Sumber: Koleksi Pribadi

Tempat rekreasi tertutup lainnya di Kota Kediri pada tahun 1930-an kebanyakan terletak di sepanjang jalan utama *Groteposweg*. Di sepanjang jalan tersebut banyak terdapat tempat hiburan, restoran, dan pertokoan.

Gambar 7.13. Deretan Toko di Jalan Dhoho Kediri Tahun 1930

Sumber: KITLV

Pemandangan Jalan Dhoho sekarang. Sejak dari zaman kolonial sampai sekarang Jalan Dhoho merupakan urat nadi perekonomian Kota Kediri. Hampir semua fasilitas umum, jasa dan perdagangan terdapat di sepanjang Jalan Dhoho. Dulu di zaman kolonial banyak sekali orang-orang Belanda dari onderneming di sekeliling Kota Kediri belanja semua kebutuhannya di toko-toko sepanjang Jalan Dhoho ini. Terutama kalau malam minggu orang-orang yang bekerja di onderneming tersebut semuanya turun ke kota dan Jalan Dhoho menjadi penuh.

Gambar 7.14. Suasana Jalan Dhoho Kediri 2020

Sumber: Koleksi Pribadi

Beberapa Fasilitas Rekreasi Terbuka di Kota Kediri:

Taman Kota dan Lapangan Tenis

Tempat hiburan fasilitas umum terbuka di Kediri, terletak agak di pinggir kota. Letaknya umumnya berada di sebelah barat kota (daerah *Europeesche wijk*), seperti Taman Kota (sekarang jadi Taman Sekartaji) dan lapangan tenis (yang dulu merupakan sarana olah raga bagi kaum elite Belanda).

Gambar 7.15. Taman Kota di Kediri Tahun 1938-1939
Sumber: Wereldculturen.nl

Taman Rekreasi terbuka yang lain di Kediri adalah alun-alun, tapi taman ini biasanya jarang dikunjungi oleh orang Belanda di Kediri. Foto di atas adalah alun-alun Kediri yang diambil pada tahun 1910-an.

Gambar 7.16. Alun-alun Kediri Tahun 1910

Sumber: Tropenmuseum

Taman rekreasi terbuka di depan Kantor Residen Kediri yang dulu banyak ditanami pohon-pohon besar sehingga terkesan asri dan teduh. Suasana seperti ini sekarang sudah hilang. Foto di atas diambil pada tahun 1910-an

Gambar 7.17. Halaman Depan Rumah Residen Kediri sekitar Tahun 1892

Sumber: Wereldculturen.nl

Fasilitas umum terbuka lainnya di Kediri pada zaman kolonial adalah Pemandian Koak (sekarang Pemandian Tirtayasa) serta Stadion Olahraga (sekarang Stadion Brawijaya). Pemandian di Kota Kediri terletak di pinggir sebelah timur kota. Airnya berasal dari sumber alam yang terdapat di sana. Terutama pada hari Minggu dan hari-hari libur banyak sekali orang yang bekerja di *onderneming* sekitar Kediri berenang ke Pemandian "Koak" tersebut.

Gambar 7.18. Kolam Renang Tirtayasa Kediri Tahun 2010
Sumber: Koleksi Pribadi

Pemandian Pagora yang berdekatan dengan pemandian koak (Tirtayasa) dibangun setelah kemerdekaan.

Gambar 7.19. Pemandian Pagora Tahun 2010 Kediri
Sumber: Koleksi Pribadi

Daerah Perdagangan Orang Tionghoa di Kediri

Penduduk Tionghoa cukup banyak jumlahnya di Kediri dan mereka memainkan peran yang cukup penting dalam bidang ekonomi di Kota Kediri. Orang Tionghoa punya sejarah masa lalu yang cukup panjang di kota Kediri. Tidak ada catatan yang pasti tentang kapan datangnya orang Tionghoa ke Kediri. Dari peninggalan yang ada, seperti Kelenteng dan makam-makam Tionghoa[6], diperkirakan orang Tionghoa sudah ada di Kediri sejak abad ke-18. Mereka biasanya bermukim secara berkelompok dan daerah permukiman mereka biasanya disebut sebagai Pecinan. Daerah Pecinan biasanya ditandai dengan adanya bangunan peribadahan yang disebut Kelenteng. Sejak adanya UU *Wijkenstelsel* (1836-1920), permukiman orang Tionghoa di Kediri berlokasi di sekitar tepi sebelah timur Sungai Brantas, dulu bernama Chineesche Voorstraat (kemudian diganti dengan Jl. Kelenteng dan sekarang menjadi Jl. Yos Sudarso).

6 Tentang makam orang Tionghoa di Kediri lihat Franke, Wolfgang, Claudine Salmon & Anthony Siu (eds.), *Chinese Epigraphic Materials in Indonesia*, Volume 2 Part 2 Java (Singapore: South Seas Society, 1988).

Melihat geografis daerah Pecinan Kediri yang ada di pinggir sebelah timur Sungai Brantas dapat diduga bahwa orang Tionghoa datang ke Kota Kediri melalui Sungai Brantas bukan melalui jalan darat. Nama-nama daerah yang sekarang dinamakan Bandar Lor dan Bandar Kidul menunjukkan adanya pelabuhan sepanjang tepi Sungai Brantas. Kelenteng Tjoe Hwie Kiong sendiri berada di tepi sebelah timur Sungai Brantas.

Sebagian besar penduduk Tionghoa di Kediri merupakan pedagang perantara dan pedagang eceran. Catatan sejarah dari abad ke-19, sebagaimana disebut James R. Rush dalam bukunya *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar & Pecandu 1860-1910* (2013), menyebutkan bahwa "Kongsi Kediri" yang menguasai peredaran opium sejak tahun 1833 di Keresidenan Kediri dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Perkumpulan kematian GIE KIE KONG SOE yang cukup besar, yang berada di Jalan Monginsidi sudah berdiri sejak lama. Adanya plakat di gedung tersebut yang berisi nama penyumbang yang berangka tanggal 5 Januari 1890 membuktikan bahwa kehadiran orang Tionghoa sudah lama di Kediri. Makam orang Tionghoa yang cukup luas, yang terdapat di sebelah barat kota, di kaki Gunung Klotok juga menunjukkan bahwa kehadiran orang Tionghoa sudah ada di Kediri, setidaknya sejak abad ke-18.

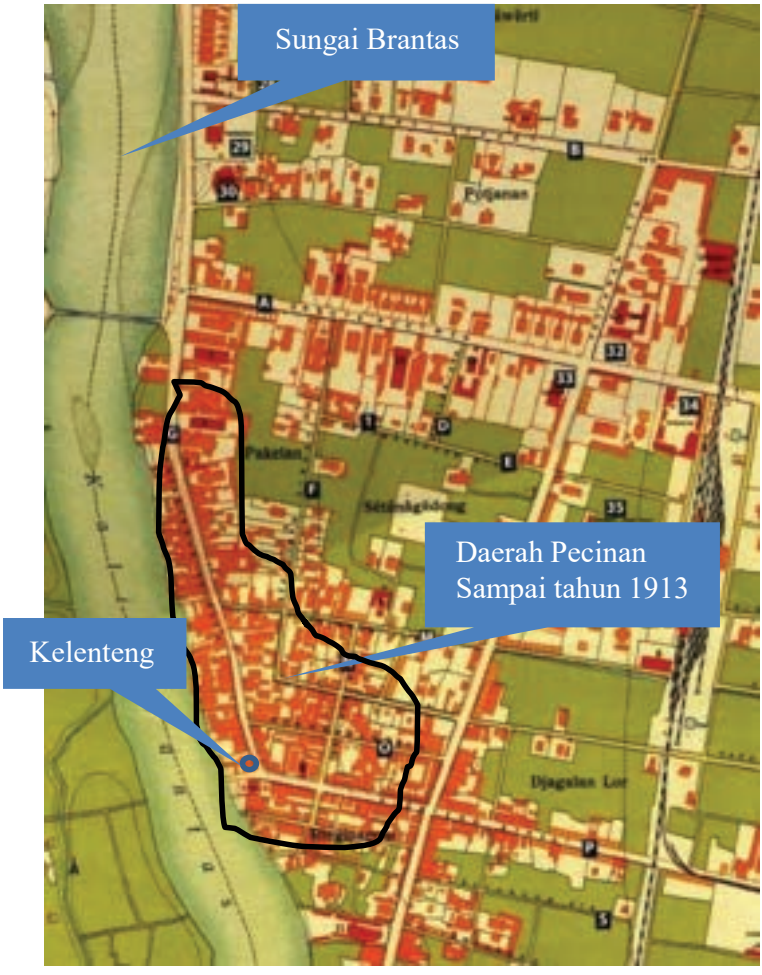

Jalan utama daerah Pecinan dulu dinamakan Chineesche Voor straat. Dari namanya sudah menunjukkan bahwa di daerah itu mayoritas penduduknya adalah orang China (Tionghoa).

Daerah Pecinan di Kediri sampai tahun 1913 ada di sekitar Jl. YosSudarso (dulu namanya Chineesche Voorstraat kemudian jadi Jl. Kelenteng), Jl. Kyaimojo, Jl. Setiabudi, Jl. Monginsidi dan sekitarnya, sampai tahun 1930-an terus berkembang ke Jl. Dhoho, Jl. Patimura dan sekitarnya.

Tapi awal dari daerah Pecinan ada di tepi Sungai Brantas yaitu yang sekarang terkenal dengan nama Jl. Yos Sudarso. Dengan kelenteng yang ada di tikungan jalan.

(lihat peta atas).

Gambar 7.20. Peta Daerah Pecinan Kediri Tahun 1913

Sumber: Koleksi Pribadi

Sejak tahun 1930-an, daerah Pecinan Kediri yang ada disekitar Jl. Yos Sudarso, Jl. Monginsidi, Jl. Setiabudi, Jl. Kyai Mojo, terus meluas sampai ke Jl. Patimura dan sekitar Jl. Dhoho. Julukan Kediri sebagai Kota Tahu erat hubungannya dengan orang Tionghoa di Kediri, karena pada awalnya semua pabrik tahu sebagian besar berada di daerah Pecinan, seperti Jl. Yos Sudarso (Pabrik Tahu POO dan Pabrik Tahu Kauw Long) dan Jl. Monginsidi (Pabrik Tahu Bah Kacung) serta di Jl. Patimura (Pabrik Tahu LTH), yang merupakan perluasan daerah Pecinan setelah tahun 1930-an. Sepeti disebut pada bab sebelumnya, pembuatan tahu memang berasal dari para pendatang orang Tionghoa di Kediri.

Pemandangan rumah-rumah di Jl. Yos Sudarso (daerah Pecinan) Kediri yang masih jelas sekali terlihat arsitektur gaya China.

Gambar 7.21. Rumah Orang Tionghoa Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri
Sumber: Koleksi Pribadi

Pemandangan salah satu rumah tinggal di Jl. Yos Sudarso (dulu bernaman Jl. Klenteng) di daerah Pecinan Kediri dengan gaya arsitektur campuran *Indische Empire*.

Gambar 7.22. Rumah Tinggal Orang Tionghoa Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri

Sumber: Koleksi Pribadi

Terlihat detail penyangga atap di sebuah rumah di daerah Pecinan Kediri, yang merupakan bentuk khas rumah orang Tionghoa

Gambar 7.23. Detail Penyangga Atap Rumah Orang Tionghoa Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri

Sumber: Koleksi Pribadi

Pemandangan pintu gerbang kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri yang letaknya tepat di belokkan Jl. Yos Sudarso. Di Klentengnya sendiri menghadap ke arah Sungai Brantas.

Gambar 7.24. Pintu Masuk Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Jalan Yos Sudarso Kediri

Sumber: Koleksi Pribadi

Teras depan bekas rumah orang Tionghoa kaya di Chineesche Voorstraat (kemudian menjadi Jl. Kelenteng dan sekarang Jl. Yos Sudarso) Kediri yang sekarang menjadi kantor kelurahan.

Gambar 7.25. Rumah Bekas Orang Tionghoa Kaya di Jalan Yos Sudarso Kediri

Sumber: Koleksi Pribadi

Demikianlah gambaran secara garis besar morfologi dan perkembangan fasilitas umum di Kota Kediri dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20, yang menjadi dasar terbentuknya Kota Kediri hingga menjadi seperti sekarang.

PERKEMBANGAN ARSITEKTUR DI KEDIRI PADA ZAMAN KOLONIAL

Secara hierarki Kediri adalah kota ketiga terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Sebagai kota pedalaman yang di kelilingi oleh *onderneming* Kediri juga meninggalkan beberapa bangunan arsitektur kolonial Belanda. Kota Kediri mulai berkembang kurang lebih tahun 1870-an setelah berakhirnya *Cultuurstelsel* dan mulai berlakunya UU Agraria dan UU Gula. Kedua Undang-undang ini mengundang banyak perusahaan perkebunan swasta masuk ke Hindia Belanda, termasuk ke Kediri. Ini pulalah sebabnya banyak perusahaan swasta, termasuk pabrik gula yang terdapat di sekitar Kediri. Hanya saja perusahaan perkebunan swasta tersebut tidak membangun fasilitas umum di Kota Kediri. Sebaliknya, mereka malah menggunakan fasilitas umum perdagangan dan jasa yang disediakan di Kediri, seperti gedung rekreasi, pertokoan, bank, serta fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar dan menengah. Sebagian bangunan fasilitas umum perdagangan dan jasa serta pendidikan itu sampai sekarang masih ada dan dikategorikan sebagai peninggalan arsitektur kolonial. Di samping gedung-gedung fasilitas umum, jasa dan perdagangan, serta pendidikan, peninggalan arsitektur pada zaman kolonial di kota Kediri juga terdiri dari perumahan, tempat ibadah, dan sebagainya.

Berikut ini akan dibahas tentang perkembangan arsitektur kolonial di Kota Kediri. Seperti juga perkembangan arsitektur kolonial di kota-kota besar lain di Jawa, perkembangan arsitektur di Kota Kediri tidak bisa lepas dari perkembangan arsitektur kolonial di Hindia Belanda pada zamannya.

Secara garis besar perkembangan gaya arsitektur di Hindia Belanda dari abad ke-18 sampai abad ke-20 bisa dibagi menjadi: Gaya *Indische*

Empire[7] dengan berbagai variasinya dan gaya arsitektur kolonial modern (yang disesuaikan dengan iklim setempat) dengan berbagai variasinya. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang perkembangan arsitektur di Kediri, berikut ini akan diberikan beberapa contoh bangunan yang dibangun sesuai dengan zamannya. Yang pertama, meskipun digolongkan sebagai bangunan sipil, tetapi kehadirannya tidak terlepas dari perkembangan kota Kediri adalah:

JEMBATAN BESI YANG MENGHUBUNGKAN ANTARA KOTA KEDIRI BARAT DAN KEDIRI TIMUR

Jembatan yang dibuat dari profil besi ini dibangun tahun 1890, untuk menggantikan jembatan sebelumnya yang terbuat dari kayu. Konon, jembatan ini merupakan salah satu jembatan besi tertua di Jawa. Jembatan ini layak disebut sebagai arsitektur kota Kediri, mengingat pentingnya sebagai penghubung Kota Kediri yang terbelah oleh Sungai Brantas pada zamannya.

7 Ciri-ciri arsitektur gaya *Indische Empire* dapat dijelaskan sebagai berikut: Denahnya simetri, temboknya tebal, langit-langitnya tinggi, lantainya dari marmer, di tengah ruangan terdapat 'central room' yang besar, yang berhubungan lansung dengan beranda depan dan beranda belakang. Beranda depan dan belakang tersebut terbuka tanpa tembok, yang biasanya sangat luas. Di ujung beranda tersebut terdapat barisan kolom Yunani (Doric, Ionic dsb.nya), berfungsi sebagai pendukung atap yang menjulang ke atas. Di samping kiri dan kanan 'central room' terdapat kamar-kamar tidur. Kadang-kadang 'central room' tersebut berhubungan dengan galeri samping, dapur, kamar mandi/WC dan fasilitas pelayanan lainnya seperti gudang dan sebagainya, yang merupakan bagian tersendiri di belakang dan dihubungkan dengan galeri. Di samping bangunan utama biasanya juga terdapat paviliun yang digunakan sebagai kamar tidur tamu. Keseluruhan bangunan biasanya terletak pada sebidang tanah yang cukup luas dengan kebun di depan, samping dan belakang rumah. Di bagian depan biasanya terdapat jalan yang melingkar untuk kendaraan yang di pinggirnya ditanami dengan pohon-pohon besar seperti beringin atau palm.

Gambar 7.26. Jembatan Sungai Brantas Kediri sekitar Tahun 1922
Sumber: Wereldculturen.nl

Contoh salah satu bangunan lain di Kota Kediri yang cukup tua adalah:

Pintu Gerbang Kota Kediri Sebagai Batas Kota Sebelah Utara

Pintu gerbang yang diperkirakan dibangun tahun 1870 tersebut sekarang sudah tidak ada. Letaknya di daerah Minggiran. Gayanya patut disebut sebagai gaya *Indische Empire*. Gerbang yang tidak beratap ini berfungsi sebagai penanda bagi orang yang ingin memasuki Kota Kediri dari arah utara. Gerbang kota dengan tiga lubang lengkung tersebut kelihatan sangat anggun.

Gambar 7.27. Pintu Gerbang antara Jalan Kediri dan Minggiran
Sumber: KITLV

Kantor dan Sekaligus Rumah Kediaman Residen Kediri

Gedung yang sekarang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. Kediri. Letaknya ada di sebelah barat Sungai Brantas, yang dulu termasuk daerah orang Eropa (*Europeesche Wijk*). Gedung ini diperkirakan dibangun tahun 1870. Letaknya sangat strategis menghadap ke Gunung Klotok yang ada di sebelah barat Kota Kediri. Gedung ini juga menyimpan sejarah masa lampau bagi Kota Kediri, karena waktu itu Kota Kediri merupakan ibu kota dari Keresidenan Kediri. Jadi kantornya terletak di Kota Kediri. Gedung megah ini merupakan contoh yang sempurna dari arsitektur gaya *Indische Empire*. Gedung tersebut sekarang masih berdiri, meskipun fungsinya sudah berubah menjadi Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Wilayah Kediri.

Gambar 7.28. Kantor Residen Kediri Tahun 1870
Sumber: Tropenmuseum

Bangunan Rumah Tinggal yang Sekarang Terletak di Jl. Brawijaya

Bangunan ini dulunya milik orang Tionghoa kaya di Kediri. Seperti dijelaskan di bagian lain dari tulisan ini, bahwa orang Tionghoa sudah lama ada di Kediri. Mereka sebagian besar merupakan pedagang perantara (*midle man minority*). Bahkan, kalau kita mengutip dari bukunya James R. Rush[8], bahwa sejak tahun 1833, zaman *opiumpacht,* orang-orang Tionghoa yang sering disebut sebagai "Kongsi Kediri" sudah merupakan bandar besar pengedar opium, yang mengalahkan bandar di kota-kota besar lainnya di Jawa seperti Semarang, Surabaya, dan Solo[9].

8 Lihat James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe* (Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2012).

9 Lihat Achmad Fathoni, Sarkawi B. Husain, "Pelaksanaan Opiumpacht Monopoli Perdagangan Opium Melalui Perantara Bandar di Karesidenan Kediri (1833-1900)", *Lembaran Sejarah*, Vol.6, No.1, April 2020, hlm. 48-61.

Gambar 7.29. Rumah Orang Tionghoa Kaya di Jalan Brawijaya Kediri
Sumber: Koleksi Pribadi

Bangunan Societeit De Brantas

Gedung dengan gaya *Indische Empire* yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-19 ini merupakan salah satu tempat hiburan bagi orang-orang yang bekerja di *onderneming* di sekitar Kota Kediri dan pejabat Belanda yang ada di Kediri.

Gambar 7.30. Gedung Societeit de Brantas yang dibangun pada Abad ke 19 di Kediri
Sumber: Wereldculturen.nl

Rumah Sakit Gambiran Kediri

Gaya arsitektur *Indische Empire* lain di Kota Kediri yang sekarang sudah tidak ada lagi adalah Rumah Sakit Gambiran (yang lama). Dari foto di bawah jelas terlihat teras depan yang didukung oleh barisan kolom gaya Yunani. Bangunan ini awalnya didirikan pada tahun 1875 sebagai tempat perawatan bagi orang sakit. Kemudian pada tahun 1928 ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Gambiran Kediri yang terletak di Jl KH. Wachid Hasyim 64, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sekarang Rumah Sakit Daerah Kediri sudah menempati gedung baru di Jl. Piere Tendean 16, Pakunden, Pesantren Kediri.

Ziekenverpleging van Kediri (Rumah Sakit Kediri) Rumah Sakit milik Pemerintah Daera Kota Kediri, yang secara historis dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1875 dan mulai dikembangkan pada tahun 1928 dan merupakan rumah sakit yang pertama di daerah Keresidenan Kediri, sehingga pada waktu itu menjadi pusat rujukan bagi semua orang yang sakit di daerah Kediri. Sejalan dengan bergulirnya waktu, gedung yang kuno ini sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang Rumah Sakit Daerah Kediri sudah dipindahkan ke gedung baru di Jl. Piere Tendean 16, Pakunden, Pesantren, Kediri.

Gambar 7.31. Rumah Sakit Gambiran Kediri Tahun 1875

Sumber: Tropenmuseum

Stasiun Kota Kediri

Letak Stasiun Kediri sangat strategis. Letaknya di Jl. Stasiun yang tegak lurus dengan Jl. Dhoho (jalan utama kota Kediri). Hal ini membuktikan peran kereta api yang sangat penting bagi Kota Kediri, terutama sekali dalam hubungannya dengan daerah produksi yang terletak di sekelilingnya. Pembangunan Stasiun Kediri diperkirakan bersamaan waktunya dengan pembangunan jalur rel kereta api dari Sembung-Kertosono-Kediri sepanjang 36 kilometer yang dikerjakan oleh Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Hindia Belanda, Staad Spoorwegen (SS) pada tahun 1881. Gaya bangunannya bisa digolongkan sebagai gaya *Indische Empire*. Letak gedungnya yang sangat strategis di ujung Jl. Stasiun menghadap ke arah barat mengakibatkan Gedung Stasiun ini punya kesan arsitektur monumental yang kuat sekali.

Gambar 7.32. Stasiun Kediri didirikan Tahun 1881 pada Tahun 1930
Sumber: KITLV

Gambar 7.33. Situasi Depan Stasiun Kediri yang didirikan Tahun 1881
Sumber: KITLV

Arsitektur Kolonial Modern yang Disesuaikan dengan Iklim Tropis di Kediri

Kota Kediri berkembang pesat setelah ditingkatkan statusnyan menjadi *Gemeente* tahun 1905. Sesuai dengan perkembangan kotanya, gedung-gedung baru didirikan di sepanjang jalan utama kotanya. Sesuai dengan zamannya, gaya arsitektur gedungnya pun mengalami perubahan dari gaya *Indische Empire* ke gaya arsitektur modern[10] yang tentunya disesuaikan dengan iklim setempat. Memang secara kuantitas terutama gedung fasilitas umum di Kediri pada zaman Belanda tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa, seperti Surabaya dan Malang. Contoh pertama, gedung yang dibangun dengan arsitektur kolonial modern ini adalah Gedung Sekolah MULO[11] di Jl. Klotok No.1 (Sekarang SMA negeri I, JL. Veteran No.1) Sekolah MULO yang didirikan tahun 1924 ini merupakan satu-satunya sekolah menengah lanjutan di Kediri pada zamannya. Gedung yang dibangun di daerah permukiman dan perkantoran orang Eropa (di sebelah barat Sungai Brantas) ini tampaknya masih berbentuk simetris dengan atap genteng. Di halamannya dulu banyak ditanam pohon cemara sehingga memberi kesan suasana yang teduh. Di bagian tengah kompleks gedungnya terdapat halaman yang dikelilingi oleh kelas-kelas dan sebuah aula. Seperti arsitektur kolonial modern lainnya, perhatian terhadap iklim tropis sangat terlihat pada gedung ini. Tidak diketahui dengan pasti siapa arsiteknya, tapi biasanya, sekolah-sekolah standar milik pemerintah selalu dirancang oleh BOW (Burgerlijke Openbare Werken- Jawatan Pekerjaan Umum) di Batavia. Gedung MULO Kediri ini jelas didesain dengan gaya arsitektur modern yang fungsional dan tanpa banyak ragam hias, memiliki lubang ventilasi yang cukup untuk penghawaan, serta perlindungan dari sinar matahari

10 Arsitektur modern adalah sebuah istilah yang ditujukan untuk gaya arsitektur yang muncul pada paruh pertama abad ke-20 dan menjadi dominan setelah Perang Dunia II. Ini berdasarkan pada teknologi pembangunan baru, terutama penggunaan kaca, baja dan beton, serta setelah penolakan dari gaya Beaux-Arts dan arsitektur neoklasik tradisional yang menjadi populer pada abad ke-19. Kata modern dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan setiap hal yang berkembang pada masa kini atau yang menunjukkan karakter kekinian. Untuk suatu hunian, hunian yang modern berarti hunian yang memiliki dan menunjukkan adanya ciri arsitektur modern. Hunian yang memiliki gaya arsitektur modern harus mampu menghadirkan gaya hidup masa kini di dalam bangunan.

11 *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama. Bahasa Belanda merupakan pengantar yang digunakan dalam MULO.

langsung dan tampias air hujan. Semuanya ini jelas disesuaikan dengan iklim tropis.

Gambar 7.34. Gedung MULO (Sekarang SMAN I) Kediri 1924
Sumber: Tropenmuseum

Gambar 7.35. Gedung SMAN I Kediri yang didirikan Tahun 1924
Sumber: Koleksi Pribadi

Gedung De Javasche Bank Cabang Kediri

Gedung yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 8 Mei 1929 ini dirancang oleh arsitek Theo Taen dari biro arsitek Fermont en Ed. Cuypers di Batavia. Gedung dua lantai dengan atap perisai serta pintu masuknya yang dilindungi oleh kanopi beton tersebut jelas-jelas mencerminkan gaya arsitektur kolonial modern. Desain tampak yang bersih dari hiasan, jendela-jendela tinggi untuk memasukkan sinar ke dalam interiornya serta lubang-lubang ventilasi untuk aliran udara mencermin desain modern yang fungsional.

Gambar 7.36. Gedung DJB Kediri Tahun 1929
Sumber: Norbruis (2020)

Di belakang gedung ini terdapat rumah direktur De Javasche Bank yang juga dirancang dengan gaya arsitektur kolonial modern oleh Theo Taen, arsitek kepala pada biro arsitek Fermont & Ed. Cuypers di Batavia. Rumah untuk direktur DJB tersebut diresmikan pada tahun 1929. Tampaknya yang bersih dengan menggunakan kanopi beton pada pintu masuknya merupakan gambaran arsitektur modern di Kediri waktu itu.

Gambar 7.37. Rumah Jabatan Direktur DJB Kediri Tahun 1929
Sumber: Norbruis (2020)

Rich Hotel (Sekarang Hotel Merdeka)

Tidak jauh dari Jl. Brawijaya, dimana cukup banyak gedung yang dirancang dengan arsitektur kolonial modern, terdapat sebuah bernama Hotel Merdeka. Hotel ini berlokasi di Jl. Pocanan (sekarang Jl. Basuki Rachmad No.4). Hotel Merdeka ini dulu bernama Hotel Ritz, kepunyaan orang Belanda. Hotel yang bergaya arsitektur kolonial modern ini tidak banyak memiliki ragam hias, tetapi bentuknya sangat fungsional. Tidak lama setelah pembangunannya, maka pada tahun 1942 hotel ini ditutup. Penutupan hotel ini disebabkan oleh pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, hotel ini kemudian berpindah kepemilikannya. Tidak diketahui dengan jelas siapa arsitek dari gedung tersebut, tapi bangunan nya sampai sekarang masih berfungsi sebagai hotel.

Gambar 7.38. Pintu Masuk Ritz Hotel (Sekarang Hotel Merdeka) yang dibangun Tahun 1933 dengan Gaya Arsitektur Modern

Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 7.39. Halaman Hotel Merdeka Sekarang (Dahulu Ritz Hotel) dengan Gaya Arsitektur Modern. Gaya Arsitektur *Indische Empire* dengan Kolom-Kolom yang Bercorak Yunani Sudah ditinggalkan

Sumber: Koleksi Pribadi

Di samping bangunan fasilitas umum, tentunya ada juga perumahan yang dibangun dengan gaya arsitektur kolonial modern. Perumahan yang termasuk kategori ini adalah rumah-rumah di Jl. Ringin Anom (sekarang Jl. Hayam Wuruk) yang dibangun tahun 1938 yang dimiliki oleh perusahaan

Olie Fabriek Insulinde (dulu namanya Max Olie Fabrik, kemudian menjadi Nabatiyasa), pabrik minyak goreng yang berbahan baku kopra. Rumah-rumah tersebut bergaya arsitektur modern. Rumah gaya lama, seperti *Indische Empire* sudah ditinggalkan. Zaman telah mengalami perubahan. Meskipun masih mengadopsi denah simetri tapi pilar-pilar besar gaya Yunani yang mengatapi teras depan dan belakang yang luas tersebut telah hilang. Diganti gaya modern yang lebih fungsional dan praktis. (lihat gambar dibawah).

Gambar 7.40. Rumah Direktur Max Olie, Jalan Hayam Wuruk Kediri Tahun 1938
Sumber: Tropenmuseum

Gambar 7.41. Rumah Direksi Max Olie Jalan Hayam Wuruk Kediri Tahun 1938
Sumber: Tropenmuseum

Gambar 7.42. Rumah Kuno di Jalan Yos Sudarso Kediri. Rumah dengan Model Seperti Ini Sudah Ketinggalan Zaman pada Tahun 1920-an
Sumber: Koleksi Pribadi

Di samping bangunan umum, juga terdapat gedung-gedung Pemerintah Belanda yang dibangun dengan gaya arsitektur kolonial modern. Salah satunya adalah bangunan Kantor Pos Kediri yang didirikan pada tahun 1930, yang terletak di Jl. Semampir. Bangunan tersebut sampai sekarang masih berdiri dengan baik. Tampak depannya yang sederhana dan lugas serta fungsional tanpa banyak hiasan yang tidak perlu, merupakan gambaran perkembangan zaman.

Gambar 7.43. Kantor Pos Kediri Tahun 1930
Sumber: Tropenmseum

Gedung pemerintah Belanda dengan gaya arsitektur kolonial modern di Kediri yang lain adalah:

Gedung DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kediri

Gedung ini terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 143 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kediri Kota. Lokasi gedung ini berada di selatan alun-alun Kota Kediri atau di belakang Dhoho Plaza. Peletakan di sebelah selatan alun-alun ini menunjukkan adanya rencana Belanda untuk menghadirkan bangunan penting pemerintahan di sekitar alun-alun. Bangunan Gedung DPU tersebut merupakan salah satu bangunan dari sekian bangunan peninggalan masa Hindia Belanda yang masih ada

dan cukup terawat di Kediri. Pada gevel tertulis dengan jelas angka secara vertikal. Di sebelah kiri tertulis angka 1929 dan sebelah kanan tertulis angka 1933. Sehingga, diperkirakan Gedung Kantor DPU Kabupaten Kediri dibangun pada tahun 1929, dan diresmikan pada tahun 1933.

Tampak depan Gedung DPU Kediri di Jl. Panglima Sudirman 143, Kediri. Gedung tersebut bergaya arsitektur modern yang dibangun pada tahun 1929 dan selesai tahun 1933. Atapnya berbentuk pelana dengan penutup atapnya genting terdapat *luifel* dari beton yang melindungi jendelanya dari tampias air hujan maupun sinar matahri yang langsung masuk ke dalam ruangan.

Gambar 7.44. Kantor DPU Kediri Mulai digunakan Tahun 1933

Sumber: Koleksi Pribadi

Setelah tahun 1920-an, kota Kediri berkembang semakin cepat. Salah satu jalan bekas *Groteposweg* yang kemudian menjadi Jl. Dhoho adalah jalan tengah kota yang paling ramai di Kediri. Banyak sekali bangunan pertokoan yang dibangun sepanjang jalan itu. Toko-toko tersebut umumnya dibangun dengan gaya arsitektur modern. Salah satu di antaranya adalah toko buku pertama dan terkenal di Kediri yang bernama "Toko Buku Tan Khoen Swie" yang dibangun pada tahun 1934. Toko ini dibangun dengan gaya arsitektur modern.

Toko Buku Tan Khoen Swie dengan kaca-kaca yang lebar menunjukkan gaya arsitektur modern yang berkembang sepanjang pertokoan Jalan Dhoho Kediri pada tahun 1934

Gambar 7.45. Toko Surabaya di Jalan Dhoho, Kediri tahun 1934

Sumber: Tropenmuseum

Toko Surabaya yang bersebelahan dengan toko buku Tan Khoen Swie dibangun tahun 1934 di Jalan Dhoho Kediri

Gambar 7.46. Toko Buku Tan Khoen Swie, Kediri tahun 1934

Sumber: Tropenmuseum

Pemandangan pertokoan di pertigaan Jalan Dhoho dan Jalan Stasiun pada tahun 1930-an sudah meninggalkan gaya arsitektur tahun 1900-an yang dinamakan gaya *Indische Empire*.

Gambar 7.47. Pertokoan di Jalan Dhoho Kediri Tahun 1930

Sumber: Tropenmuseum

Perempatan Jalan Dhoho Kediri sekarang Aries motor dibangun tahun 1938. Terlihat gaya arsitektur modern yang fungsional tanpa banyak hiasan muncul dimana-mana di Kota Kediri setelah tahun 1920 an. Benderanya masih bendera Belanda (merah-putih-biru)

Gambar 7.48. Perempatan Jalan Dhoho Kediri Tahun 1930

Sumber: Tropenmuseum

Arsitektur Bangunan Keagamaan Di Kediri

Terdapat berbagai macam bangunan keagamaan di Kota Kediri. Mulai dari Masjid, Gereja Katolik maupun Protestan, sampai Kelenteng ada di Kediri. Bahkan sejak dulu berbagai aliran kepercayaan kejawen tumbuh subur di daerah Kediri[12]. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu kota ini terbiasa dengan adanya keberagaman dan toleransi yang tinggi terhadap pemeluk berbagai agama.

Masjid Agung Kediri

Bangunan keagamaan yang penting di Kota Kediri adalah Masjid Agung. Bangunan masjid ini terletak di sebelah barat dari alun-alun di Jl. Panglima Sudirman. Dalam perjalanan waktu terjadi perubahan berkali-kali terhadap bangunan masjid ini. Tidak ada data yang jelas kapan masjid ini didirikan, tapi dari dikatakan bahwa pada tahun 1830 terjadi pemugaran masjid tersebut dan kemudian diteruskan kembali pada tahun 1841. Pemugaran selanjutnya dikerjakan pada tahun 1928. Pemugaran tahun 1928 ini berdasarkan ide serta perintah dari KRA Haryo Danudiningrat yang disebut

12 Toko Buku Tan Khoen Swie di Jl. Dhoho Kediri merupakan toko yang banyak menjual buku-buku aliran kejawen waktu itu.

Bupati ke-8 Kediri. Bentuk bangunan masjid yang simetris dan kubahnya berbentuk kubah bawang tersebut merupakan bentuk arsitektur masjid yang memang populer pada tahun-tahun 1930-an (lihat foto di bawah). Pada tahun 1976, bangunan masjid tersebut diberi tambahan menara yang dibangun di samping kanan bangunan. Sebelas tahun kemudian, pada tahun 1987, kubah yang rangka awalnya terbuat dari kayu diganti dengan material beton serta bentuknya menjadi bundar. Sekarang bangunan masjid tersebut disangga oleh 106 pilar dengan 15 pintu besar dan 12 pintu kecil. Terdapat 3 lantai, lantar dasar seluas 1.388,8 m², lantai dua seluas 1.335 m² dan lantai paling atas seluas 369,8 m².

Gambar 7.49. Masjid Agung Kediri sekitar Tahun 1935
Sumber: KITLV

Gereja Pohsarang Kediri

Salah satu bangunan gereja yang terkenal di Kediri adalah Gereja Pohsarang[13] yang letaknya di Kecamatan Semen. Gereja tersebut didirikan tahun 1935 dan awalnya dirancang oleh arsitek Belanda bernama Henri Maclain Pont[14]. Gaya arsitektur gereja ini terkenal karena memakai

13 Gereja Poh Sarang ini sekarang sudah diperluas dan sebagian bangunan aslinya masih dipertahankan.

14 Arsitek Henri Maclaine adalah perancang *Technische Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Teknik), yang sekarang jadi Institut Teknologi Bandung (ITB).

bahan-bahan bangunan setempat, seperti batu bronjol yang banyak terdapat di pinggir kali sekitar gereja serta atapnya mengambil ide dari bentuk arsitektur tradisional. Eksperimen Maclaine Pont terhadap Gereja Pohsarang dengan mengambil bentuk tradisional serta bahan setempat ini membuat nama Gereja Pohsarang ini menjadi terkenal di Hindia Belanda, bahkan hingga sesudah kemerdekaan di Indonesia. Kompleks gereja yang dulunya tidak begitu luas tersebut dikembangkan menjadi besar dan sekarang malah menjadi tujuan wisata keagamaan.

Gambar 7.50. Kompleks Gereja Pohsarang
Sumber: Koransulindo.com

Gereja Protestan GBIP Immanuel Kediri

Bangunan Gereja GPIB ini terletak di sebelah barat Sungai Brantas, tepatnya di Jl. KDP Selamet No.43, Kediri. Bangunan ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 21 Desember 1904. Gereja ini terkenal dengan sebutan Gereja Merah. Awalnya berwarna putih, tapi pada tahun 1969 dindingnya dicat merah dan dipertahankan sampai sekarang. Letaknya memang di dekat Kantor Residen yang dahulunya di daerah orang Eropa. Bentuk arsitektur gedungnya mirip dengan gereja-gereja

Eropa dengan bentuk simetri dan atap yang curam dan plafon yang tinggi. Bentuknya seperti gereja neo Gothik yang disederhanakan. Kalau diamati lebih mirip gaya gereja pedesaan di Eropa dengan ketinggian dan sudut atap yang curam (supaya salju cepat turun). Gereja ini sampai sekarang masih dalam keadaan baik, dan masih digunakan untuk ibadah. Interior gereja ini rupanya juga masih asli dengan dekorasi.

Gambar 7.51. Gereja Merah (GPIB) Kediri Tahun 2010
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 7.52. Gereja Protestan (GPIB) Tahun 1904
Sumber: Tropenmuseum

Kelenteng Tjoe Hwie Kiong

Kelenteng yang terletak di Jl Yos Sudarso ini memang terletak di daerah Pecinan Kediri. Jl. Yos Sudarso ini dulunya bernama Jl. Kelenteng, karena di jalan tersebut terdapat kelenteng. Arsitektur gedungnya memang khas berbentuk arsitektur Tiongkok, seperti bentuk atap yang khas, di ujungnya yang melengkung ke atas dan di atasnya terdapat sepasang naga yang berebut mutiara surga adalah ciri khas bangunan kelenteng. Warna-warna merah dan kuning emas yang mendominasi gedungnya serta detail-detail dari konstruksi atapnya yang diperlihatkan interiornya menjadi ciri khas arsitektur kelenteng.

Kelenteng ini dibangun pada abad ke-18 saat mana orang-orang Tionghoa sudah mulai menetap di Kediri. Letaknya yang dekat dengan Sungai Brantas menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Sungai Brantas dengan kedatangan orang Tionghoa di Kediri. Singkat kata orang Tionghoa datang ke Kediri jauh sebelum orang Belanda mengusai Kediri (1830).

Gambar 7.53. Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri Tahun 2000
Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 7.54. Kelenteng Tjoe Hwie Kiong yang Menghadap ke Sungai Brantas Kediri
Sumber: Koleksi Pribadi

Dengan pembahasan tentang arsitektur di zaman kolonial di Kediri tersebut di atas diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang perkembangan arsitektur pada masa kolonial di Kediri mulai dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20.

ARSITEKTUR GEDUNG DJB KEDIRI

Hubungan De Javasche Bank dan Biro Arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers

Sejak tahun 1907, guna menyambut abad ke-20, Direksi De Javasche Bank membuat kebijakan membangun baru kantor pusat serta cabang-cabangnya di seluruh Hindia Belanda (termasuk gedung baru DJB cabang Kediri). Semua gedung baru DJB sejak tahun 1907 sampai 1935 tersebut ternyata dirancang oleh sebuah biro arsitek saja, yaitu biro arsitek Hulswit-Fermont & Ed. Cuypers (sejak tahun 1927 namanya berubah menjadi biro arsitek Fermont & Cuypers). Di bawah ini dijelaskan asal mula hubungan

antara perusahaan DJB dengan biro arsitek Hulswit-Fermont & Ed. Cuypers.

Hubungan ini bermula dari Kantor Arsitek Peter Josephus Hubertus (P.J.H.) Cuypers (1827-1921) di Amsterdam. P.J.H. Cuypers adalah arsitek neo-gothik yang terkenal di Eropa waktu itu. Karya-karya monumentalnya seperti Rijkmuseum di Amsterdam (1876-1885) dan Amsterdam Central Stasiun (1881-1889) sangat dikagumi di seluruh Eropa pada zamannya. Di kantor P.J.H. Cuyper, bekerja dua orang arsitek muda, yang pertama adalah keponakannya sendiri, Eduard Cuypers (1859-1927) dan yang kedua adalah seorang pemuda lulusan Quellinus School yang bernama Marius J. Hulswit (1862-1921). Kedua orang inilah kelak menjadi benang merah hubungan arsitektur modern di Belanda dengan Hindia Belanda. Kedua orang tersebut bersama A.A. Fermont pada tahun 1910, mendirikan biro arsitek yang terkemuka di Hindia Belanda yang bernama N.V. Architecten-ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden[15] en Ed. Cuypers te Amsterdam.

Eduard Hendrik Gerard Hubert Cuypers (Eduard Cuypers)[16] bekerja di kantor pamannya (P.J.H. Cuypers) sejak usia 15 tahun, pada tahun 1874 sampai 1878. Setelah itu ia mendirikan sendiri kantornya di Amsterdam. Pada tahun 1908, Eduard Cuypers melakukan perjalanan ke Hindia Belanda. Di Batavia, ia bertemu dengan teman lamanya Mr. Gerard Vissering,[17] seorang pengacara terkenal di Amsterdam yang

15 Weltevreden sekarang adalah Jatinegara, bagian dari Jakarta (Batavia).

16 Eduard Cuypers lahir pada tanggal 18 April 1859 di Roermond dan meninggal tanggal 1 Juni 1927 di Den Haag. Kantornya di Amsterdam didesain menjadi semacam atelier. Di dalam kantornya disediakan perpustakaan yang lengkap. Pegawainya diberi kebebasan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi arsitektur di luar kantor. Ia juga penganut gerakan "*Art and Craft*" nya William Moris dan John Ruskin. Itulah sebabnya perencanaan kantornya juga mendesain interior menjadi satu kesatuan dengan bangunannya. Di kantornya bekerja arsitek muda seperti Michael de Klerk, J.M. van der May, G.F. la Croix, J. Boterenbrood dsb.nya. Arsitek-arsitek muda tersebut kelak menjadi pelopor arsitektur modern di Belanda. Michael de Klerk adalah pemimpin aliran Amsterdam School yang terkenal dalam dunia arsitektur.

17 G. Vissering menjadi Presiden direktur DJB mulai tahun 1906-1912. Vissering menulis pertemuan tersebut pada obituari tentang Eduard Cuypers. Lihat: G. Vissering, Bloementhal, *Die Clinghe*, 4 June, 1927; "Eduard Cuypers", *Nederlandsch Indië Oud & Nieuw*, No.3, July, 1927 hal. 66-69; *Het Nederlandsch Indië Oud & Nieuw* (NIHON – Th.1913-1916), diterbitkan oleh Eduard Cuypers. Pada th. 1917 majalah ini berganti nama menjadi *Nederlandsch Indië Oud & Nieuw* (NION Th.1917-1934). Sebagian dari nomor-nomor penerbitannya sekarang masih ada di Perpustakaan Museum Nasional di Jakarta.

kemudian menjadi Presiden Direktur DJB di Batavia. Rupanya dari sinilah bermula koneksi tentang pembangunan gedung-gedung DJB terjadi, yaitu merupakan jaringan orang-orang asal Amsterdam. Eduard Cuypers selanjutnya mengajak rekannya yang sudah dikenal waktu mengerjakan proyek Rijkmuseum di Amsterdam (1876-1885), yaitu Marius J. Hulswit, juga dari Amsterdam, yang kemudian membentuk biro arsitek dengan nama Architectenbureau Ed. Cuypers en Hulswit te Weltevreden[18].

Peter Josephus Hubertus (P.J.H.) Cuypers (1827-1921). Arsitek Belanda terkenal dapat dikatakan cikal bakal dari biro arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers yang merancang seluruh gedung De Javasche Bank

Gambar 7.55. PJH Cuypers

Sumber: Tropenmuseum

Mr. Gerard Vissering (Presiden direktur De Javasche Bank Th. 1906-1912.) asal Amsterdam yang merupakan benang merah hubungan antara dirinya sebagai Presiden Direktur De Javasche Bank dengan Eduward Cuypers dari biro arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers.

Gambar 7.56. Gerard Vissering Presiden Pertama De Javasche Bank

Sumber: Tropenmuseum

18 Pada th.1910 bironya bernama N.V. Architecten-ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam, karena A.A. Fermont ikut bergabung. Setelah meninggalnya Hulswit th. 1921, biro ini berubah nama menjadi N.V. Architecten-Ingenieurbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam.

Tidak banyak yang diketahui tentang arsitek Marius J. Hulswit[19]. Ia adalah lulusan Quellinus School, sekolah desain yang terkemuka di Amsterdam. Pada tahun 1876 ia bekerja di Kantor P.J.H. Cuypers, pada saat pembangunan Rijkmuseum di Amsterdam (1876-1885). Di sanalah ia bertemu dengan Eduard Cuypers. Pada tahun 1880, sebelum selesainya pembangunan Rijkmuseum Amsterdam, ia pergi ke Hindia Belanda, dan menetap di sana sampai tahun 1885. Sesudah itu ia kembali ke Belanda untuk waktu sekitar lima tahun. Selama di Belanda ia bekerja pada Architectenbureau van Rosum en Kuyk di Amsterdam. Pada tahun 1890, ia kembali ke Hindia Belanda dan menetap di sana sampai meninggalnya di Batavia tahun 1921.

Biro arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers kemudian berkembang menjadi biro arsitek terbesar di Hindia Belanda. Ada ratusan bangunan karyanya di seluruh Hindia Belanda. Selain semua gedung DJB, kantornya juga merancang bank-bank besar di Hindia Belanda seperti: Nederlandsch-Indische Escompto Mij, NHM (Nederlandsch Handels Maatschappij) di berbagai kota di Hindia Belanda, serta gedung-gedung perusahaan besar di Hindia Belanda, seperti kantor HVA (Handelsvereeniging Amsterdam), Lindetevis-Stokvis, Socony-KPM, dan sebagainya.

Semua gedung baru *De Javasche Bank* setelah awal abad ke-20 (1907) dirancang oleh biro arsitek N.V. Architecten-ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te msterdam ini. Biro arsitek ini merancang semua kantor DJB, mulai dari kantor pusatnya di Batavia sampai seluruh kantor cabangnya yang berada di Hindia Belanda. Tentunya juga termasuk gedung DJB cabang Kediri yang sekarang menjadi Gedung BI Kediri.

19 M.J. Hulswit dilahirkan di Amsterdam tahun 1862, dan meninggal di Batavia pada tahun1921. Tentang Hulswit baca juga M.J. Hulswit di *NederlandschIndie Oud & Nieuw*, No.5, September, 1922, hal. 130-133.

Lambang biro arsitek Hulswit - Fermont & Ed. Cuypers, yang sering dicantumkan pada bangunan karya mereka.

Gambar 7.57. Lambang Biro Arsitek Hulswit, Fermont en Ed. Cuypers
Sumber: Koleksi Pribadi

Ir Arthur Amandus Fermont (1882-1954). Sejak ia bergabung pada tahun 1910 secara resmi nama biro nya berubah menjadi Architecten- & Ingenieursbureau Hulswit & Fermont Weltevreden en Ed. Cuypers Amsterdam.

Gambar 7.58. Ir. A.A. Fermont
Sumber: Tropenmuseum

Eduard Cuypers (18 April 1859 di Roermond 1 Juni 1927) di The Hague

Gambar 7.59. Eduard Cuypers
Sumber: Tropenmuseum

Marius Jan Hulswit (1862-1921

Gambar 7.60. M.J. Hulswit
Sumber: Oud Soerabaja

Gedung DJB Kediri

Gedung De Javasche Bank Kediri

Gedung DJB adalah Agentschap DJB yang ke-20 dan didirikan tanggal 2 Juli 1923. Pendirian kantor adalah tindak lanjut dari izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral No.49 tanggal 26 Maret 1922, yang berisi bahwa DJB dapat mendirikan kantor cabang di Kediri. Setelah melakukan persiapan yang cukup, akhirnya pihak Direksi DJB memutuskan untuk memilih lokasi gedungnya di pojok *Grotepostweg*.

Seperti yang disebut pada bab sebelumnya, pada awalnya DJB cabang Kediri membeli tanah berikut gedung bekas milik De Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (Escompto Bank) seluas 2098 m². Gedung lama bekas Escompto Bank ini didirikan sebelum tahun 1900. Seperti diketahui bahwa bangunan lama tersebut bergaya arsitektur *Indische Empire* dengan kolom-kolom gaya Yunani di depannya. (lihat foto di bawah). Pada awal perkembangannya tidak begitu banyak pegawai yang ada pada gedung tersebut. Pada tanggal 14 Mei 1924 tercatat tenaga inti dari DJB Cabang Kediri ini adalah sebagai berikut:

1. L.G. Wiemans : Pemimpin Cabang
2. H. Calicher : Pejabat pemegang buku
3. Tan Ping Hwie : Pegawai T.U.
4. Djie Han Kiet : Kasir I
5. Njo Thian Lok : Kasir II.

Gambar 7.61. Gedung DJB Lama (1923-1928)
Sumber: Tropenmseum

Iklim usaha yang terus berkembang di derah Kediri dan sekitarnya, mengakibatkan pihak DJB Kediri harus memikirkan perluasan gedungnya. Untuk kepentingan perluasan pihak direksi kemudian membeli tanah lagi. Tanah yang dibeli bersebelahan lokasinya dengan tanah milik DJB yang sudah ada. Tanah yang baru dibeli tersebut bekas milik perkebunan Badek seluas 2.047 m², dibeli dengan Akta Jual Beli No. 3 tanggal 17 Januari 1928. Sebelum itu pihak DJB juga membeli tanah yang letaknya di sudut Jl. Lonceng (sekarang Jl. Basuki Rachmad) dan Jl. Ringin Sirah (sekarang Jl. Hayam Wuruk). Letaknya berseberangan dengan tanah milik DJB sebelumnya, seluas 1.223 m². Tanah yang sudah lebih dulu dibeli pada tahun 1923 tersebut bekas milik pabrik minyak goreng "Insulinde" (kemudian berganti nama menjadi Mexolie, dan setelah kemerdekaan berganti nama menjadi Nabatiyasa).

Dengan demikian tanah milik DJB Kediri sejak tahun 1928 adalah sebagai berikut: Dua kaveling tanah (yang dijadikan satu) di Jl. Brawijaya seluas (2047 m² + 2.049 m²) dan tanah seluas 1.223 m² yang terletak di pojok Jl. Basuki Rachmad dan Jl. Hayam Wuruk (lihat gambar di bawah).

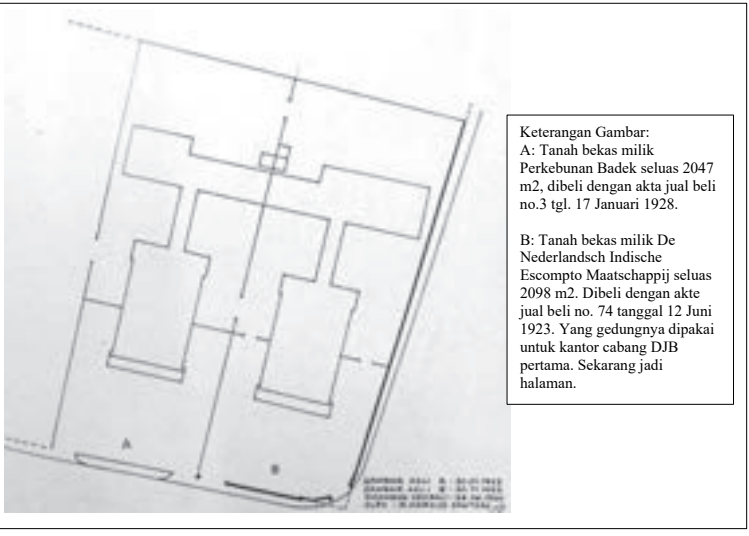

Gambar 7.62. Sketsa Tanah yang dibeli DJB Kediri Tahun 1928
Sumber: Santoso

Di atas kedua kaveling (A dan B) inilah kemudian didirikan Gedung DJB Kediri berikut dengan rumah direktur di bagian belakangnya (lihat gambar di bawah). Sejak tahun 1928, dimulailah pembangunan kantor dan rumah dinas tersebut. Bangunan kantor diresmikan pada tanggal 8 Mei 1929. Berikut adalah sketsa bangunan kantor dan rumah direktur DJB Kediri.

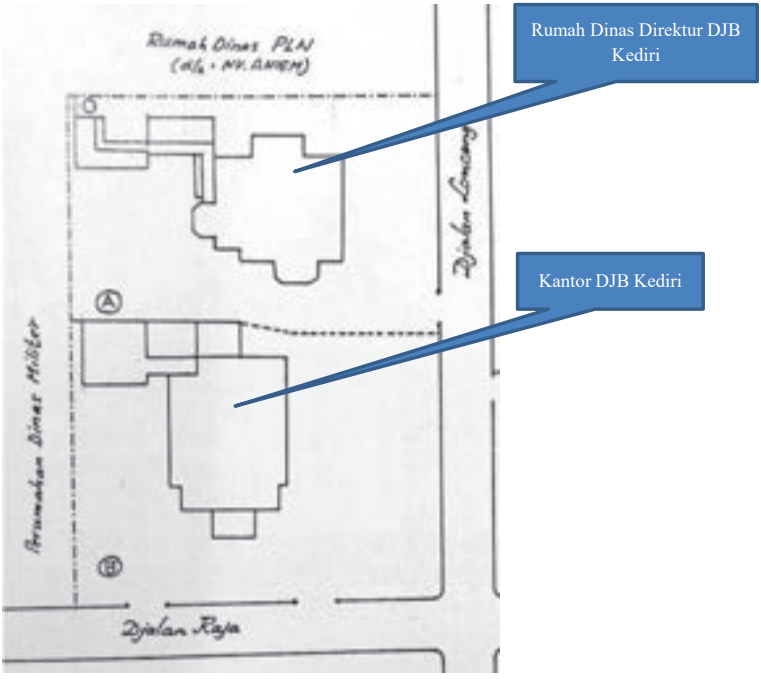

Kantor DJB Kediri aslinya dulu terdiri dari dua bangunan. Di Kaveling B (2098 m2) ditempati untuk Kantor dan kaveling A (2047 m2) ditempati untuk rumah dinas Kepala DJB Cabang Kediri. Bangunan yang dulu ditempati oleh Kepala DJB sudah dirobohkan dan di atasnya sekarang dibangun perluasan kantor BI Kediri.

Kantornya menghadap ke Jl. Raya (sekarang Jl. Brawijaya no.2). Sedangkan rumah dinasnya menghadap ke Jl. Lonceng (kemudian jadi Jl. Pocanan dan sekarang Bernama Jl. Basuki Rachmad)

Gambar 7.63. Sketsa Tanah Milik DJB Jalan Brawijaya Kediri

Sumber: Santoso

Fisik Bangunannya

Pada tanggal 2 Juli 1923, cabang baru DJB Kediri mulai menjalankan usahanya di sebuah gedung lama bekas Escompto. Sesudah selesainya pembangunan gedung baru DJB, maka gedung lama bekas Escompto Bank dibongkar dijadikan parkiran. Pada 8 Mei 1929, diadakan peresmian gedung bank yang baru. Bangunan inilah yang sampai sekarang berfungsi sebagai bangunan depan dari kompleks Gedung BI Kediri, sedangkan

rumah yang diperuntukkan bagi Direktur DJB yang terletak di belakangnya sekarang sudah hilang. Bank dan rumah direktur ini membentuk suatu perpaduan yang serasi dan menarik. (lihat foto di bawah).

De Javasche Bank (DJB) cabang Kediri setelah diresmikan pada tahun 1929. Tampak depan ini diambil dari Jl. Grotepostweg (sekarang Jl. Brawijaya 2). Tampak pada foto rumah dinas direktur yang bentuknya sangat serasi dengan bangunan bank yang ada di depannya.

Gambar 7.64. Gedung DJB Kediri Tahun 1929

Sumber: Santoso

Bangunan bank lama berfungsi sebagai bangunan bersejarah sekarang. Bangunan kantornya menghadap ke Jl. Raya (Jl. Brawijaya) ke arah selatan. Sedangkan bangunan rumah direkturnya menghadap ke Jl. Lonceng (Jl. Basuki Rachmad) ke arah timur. Jadi bangunan utama kantornya menghadap ke arah utara-selatan.

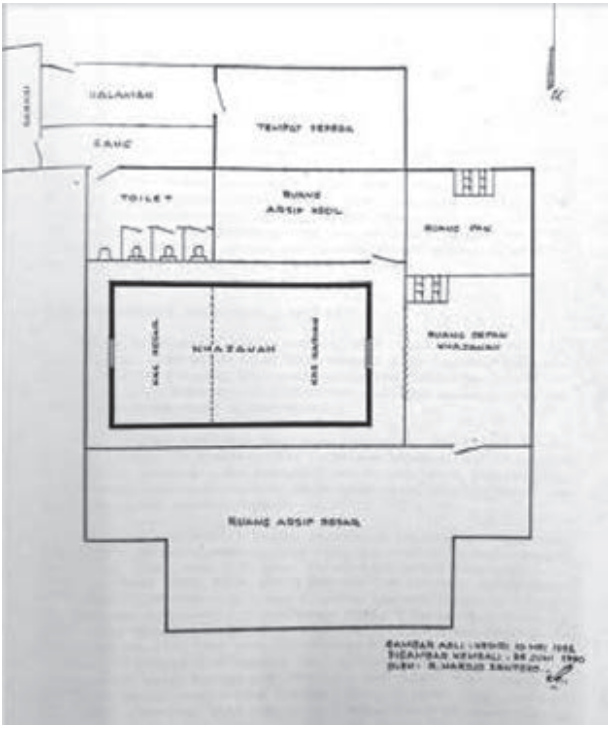

Denah Lantai 1 Bangunan DJB Kediri yang terletak 2.00 m di bawah tanah

Gambar 7.65. Denah Awal Lantai 1 Gedung DJB Kediri

Sumber: Santoso, 1990: 13

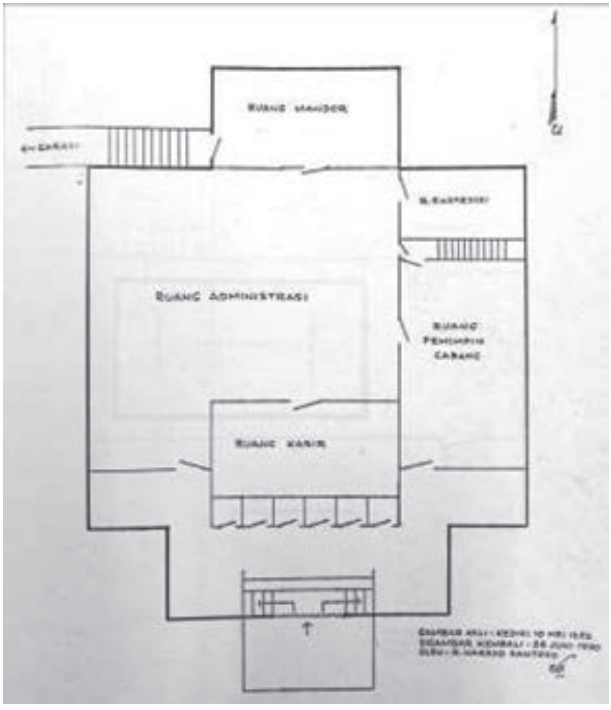

Denah Lantai II Bangunan DJB Kediri

Gambar 7.66. Denah Awal Lantai 2 Gedung DJB Kediri
Sumber: Santoso, 1990: 12

Denah Kantor DJB Kediri

Denah bangunannya terdiri dari dua lantai. Lantai pertama merupakan *basement* dengan kedalaman 2,00 m dari permukaan tanah. Sedangkan lantai duanya naik kurang lebih dua meter dari permukaan tanah. Setiap pengunjung yang akan memasuki bangunan bank ini harus langsung naik tangga untuk mencapai lantai dua. Di depan pintu masuk lantai dua terdapat *luifel* dari konstruksi beton dengan atap datar yang kokoh, sebagai tanda pintu masuk utama (*entrance*) dari gedung tersebut. *Luifel* beton ini didukung oleh empat buah kolom. Denah bangunan utamanya berbentuk bujur sangkar (18,00 x 18,00 m) dengan tambahan panjang 5,00 m ke depan dan 5,00 m ke belakang. Sehingga panjang bangunan

secara keseluruhan adalah 28,00 m (menghadap timur-barat) dan lebarnya 18,00 m (lihat gambar denah).

Seperti *typology* dari bank-bank yang dirancang oleh kantor Hulswit-Fermont & Cuypers yang lain, publik yang akan memasuki kantor bank langsung harus naik tangga menuju lantai dua. Di lantai dua ini merupakan ruang publik dimana terdapat enam buah ruang yang bisa berhubungan langsung dengan kasir, di mana ruang kasir terletak dibagian belakang. Di samping kiri dan belakang ruang kasir terdapat ruang administrasi. Terdapat sebuah pintu di mana publik (umum) bisa memasuki ruang administrasi ini bila diperlukan. Di samping kanan ruang administrasi ini terdapat ruang pimpinan cabang. Terdapat tiga buah pintu di ruang pimpinan cabang tersebut. Pintu pertama terletak di depan di mana publik tertentu bisa masuk menemui pimpinan cabang bila diperlukan. Pintu kedua ada di samping yang berhubungan dengan ruang administrasi, dan pintu ketiga ada di belakang berhubungan dengan tangga yang berhubungan dengan lantai satu. Sedangkan di bagian belakang terdapat ruang ekspedisi dan ruang mandor. Dari denah lantai dua ini terdapat pembagian yang jelas mana daerah publik dan mana daerah privat bank (ruang administrasi, ruang kasir, dan ruang pimpinan bank).

Lantai satu hanya bisa dicapai dari lantai dua. Terutama dari ruang pimpinan bank dan dari ruang administrasi (dengan kontrol dari ruang pimpinan bank). Tentunya tidak semua orang boleh masuk ke lantai satu ini, karena di lantai satu terletak khazanah (*kluis*) untuk penyimpanan ruang. Jadi, kalau kita masuk ke khazanah ini seolah-olah masuk ruang di dalam ruang. Ini dimaksudkan untuk keamanan.

Ada dua tangga menuju ke ruang bawah tanah (lantai satu). Ruang bawah tanah ini terdiri dari beton, di mana dinding, lantai, dan langit-langitnya memiliki ketebalan setengah meter. Machinefabriek de Nijverheid di Kediri membuat kerangka besinya untuk melindungi khazanah tersebut dari perampokan. Ada baja purlin di atap. Kusen jendela baja berasal dari Semarang. Hollands Beton Maatschappij mengerjakan konstruksi beton.

Selain khazanah, di lantai bawah tanah (lantai satu) ini terdapat ruang arsip besar, ruang arsip kecil, serta ruang depan khazanah yang dipergunakan sebagai ruang kontrol dan untuk persiapan sebelum masuk

ke dalam khazanah. Terdapat KM/WC di lantai ini, tapi hanya bisa dicapai dari luar karena pintu hanya bisa dibuka dari luar. Jadi sama sekali tidak berhubungan dengan ruang-ruang lainnya (lihat gambar denah lantai satu).

Tampak Kantor Gedung DJB Kediri.

Secara keseluruhan tampak depannya terlihat simetri penuh dengan barisan jendela yang berbentuk empat persegi panjang, terletak di tengah dan samping kiri dan kanan. Tepat di atas jendela tengah terdapat tulisan 'De Javasche Bank', yang jelas terlihat dari jalan. Bangunan yang terdiri dari dua lantai tersebut kelihatan hanya satu setengah lantai (karena yang setengah lantainya masuk ke dalam tanah). Pintu masuk utamanya terlihat jelas karena dilindungi oleh *luifel* beton dengan empat buah kolom yang sangat kokoh. Tampak depannya mempunyai lebar 18,00 m, Di depan denah utama terdapat tambahan ruang 5,00 m ke depan. Sehingga pada tampaknya selain atap utama (yang mengatapi denah 18,00 x 18,00 m) terdapat atap tambahan depannya, sehingga terjadi jurai dalam yang sekaligus dipergunakan sebagai talang (lihat foto bangunannya).

Penutup atapnya dari genting dengan sudut kemiringan yang cukup curam, kurang lebih 35 derajat. Di puncak atap induknya terdapat semacam menara yang ditinggikan yang bisa dipergunakan sebagai ventilasi atap. Rupanya menara di atas puncak atap ini merupakan ciri khas dari kantor-kantor DJB dengan gaya modern seperti juga ada di Banjarmasin (1923), Pematang Siantar (1923), Padang (1925), serta Pontianak (1928). Memang kantor-kantor DJB di kota-kota tersebut punya kemiripan satu sama lain karena arsiteknya adalah Theo Thaen, kepala kantor sekaligus arsitek kepala dari kantor Fermont en Ed. Cuypers di Batavia (Jakarta), yang bekerja disana sejak tahun 1921-1941.

Gambar 7.67. Gedung DJB Kediri Tahun 1929
Sumber: Norbruis

Tampak samping bangunannya mempunyai panjang 28,00 m. Seperti halnya tampak depannya, di tampak samping juga terdapat jendela yang cukup tinggi (karena plafon dalamnya lebih dari 5,00 m). Jendela kaca timah yang terbagi menjadi dua bagian dan dapat dibuka berfungsi ganda, selain untuk ventilasi bagi ruang dalam juga berfungsi untuk memasukkan sinar ke dalam interiornya. Di tampak sampingnya terdapat lubang ventilasi dan untuk memasukkan sinar untuk lantai satu, yang letaknya dekat dengan tanah.

Lisplang dan talang datarnya terdiri dari beton. Semua pekerjaan beton dikerjakan oleh Holland Beton Maatschappij (sekarang Hutama Karya). Tampak depan di kelilingi oleh jendela kaca yang bisa dibuka. Kacanya terdiri dari kaca timah tersebut dikerjakan di Semarang.

Secara keseluruhan tampak bangunannya terkesan sederhana dan modern, sesuai dengan zamannya. Tidak ada hiasan berupa ukiran-ukiran atau mural pada temboknya, seperti yang terdapat pada bangunan klasik DJB di Medan (1908), Solo (1910), Makassar (1910-sudah hilang), Surabaya (1912), Jakarta (1913), Yogyakarta (1915), Manado (1916), Banda Aceh (1918), Bandung (1918), dan Cirebon (1921)[20]. Hal ini disebabkan oleh

20 Palembang (1922) dan Malang (1922) sudah menganut gaya arsitketur modern yang dikerjakan oleh Henri Estourgie (arsitek muda kepada cabang kantor Hulswit-Fermont en Ed. Cuypers di Surabaya.

desain arsitektur dari gedung-gedung DJB tersebut dikerjakan di Belanda oleh Ed. Cuypers sendiri di Amsterdam.

Secara keseluruhan bangunan DJB Kediri diresmikan pada tahun 1929, saat mana gaya arsitektur modern sudah masuk di Hindia Belanda waktu itu, dan arsitek generasi muda (Theo Taen, Henri Estourgie. Laurent Logemann, dan sebagainya) di kantor Hulswit-Fermont en Ed. Cuyper sudah mengambil alih dari peran generasi tuanya.

Interior Gedung DJB Kediri (1929)

Suasana interior yang diutamakan adalah di lantai dua, sedangkan interior lantai satu lebih fokus pada ruang khazanah, terutama dari segi keamanannya. Suasana interior di lantai dua dibagi menjadi bagian umum (untuk mencapai lantai dua harus menaiki tangga) dan ruang kerja, serta ruang pimpinan bank. Diatarbelakngi oleh denah bangunan utamanya yang cukup gemuk (18,00 x 18,00 m), maka diperlukan banyak pembukaan dari jendela depan dan samping dengan bentuk empat persegi panjang yang tinggi. Jadi, sinar matahari (tidak langsung) bisa menerangi ruang dalamnya. Pembatas antar ruang kerja dibuat dari kaca supaya antar ruang tembus cahaya. Berhubung waktu itu (1929) belum terdapat AC, maka plafon ruangannya dibuat cukup tinggi, kurang lebih 5,00 m, supaya aliran udara (kros ventilasi) bisa berlangsung dengan baik (di tembok bagian atas ruangan juga terdapat lubang-lubang kecil di mana udara bisa lewat). Semua jendela diberi teralis untuk pengamanan. Interiornya dibuat dengan tujuan keamanan, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga ada kesan tertutup pada interior bank tersebut. Warna yang dominan coklat dengan banyak unsur kayu memberi kesan tenang pada interiornya.

Gambar 7.68. Suasana Interior Gedung DJB Kediri Tahun 1929

Sumber: Norbruis 2020

Model jendela pada bangunan DJB Kediri. Bentuk empat persegi panjang yang dilindungi dengan teralis untuk keamanan, kacanya berhias yang disebut *Stain Glass.* Kaca ini dibuat di Semarang (waktu itu).

Gambar 7.69. Model Jendela Gedung DJB Kediri Tahun 1929

Sumbr: Norbruis 2020

Rumah Dinas Direktur Bank

Rumah Dinas Direktur Bank terletak di sebelah belakang kantor. Gaya arsitekturnya sangat modern pada zamannya.

Tampak depan Rumah Dinas Direktur DJB Cabang Kediri yang letaknya di bagian belakang Kantor DJB, diresmikan tahun 1929. Gaya arsitekturnya modern sekali. Berbeda dengan gaya arsitektur *Indische Empire*. Atap Perisai yang sangat menonjol menghiasi tampak depannya.

Gambar 7.70. Tampak Depan Rumah Dinas Direktur DJB Kediri Tahun 1929

Sumber: Norbruis 2020.

Gambar 7.71. Cetak Biru Rumah Dinas Direktur DJB Kediri 1929

Sumber: Arsip BI

Rumah dinas direktur DJB cabang Kediri ini mempunyai dua muka, salah satunya menghadap ke Jl. Pocanan (sekarang Jl. Basuki Rachmad). Sayang sekali bahwa rumah dinas yang didirikan tahun 1929 tersebut sekarang sudah dibongkar (pada tahun 1980). Diatasnya sekarang dibangun gedung baru BI Kediri berlantai lima yang selesai dibangun pada tahun 1985.

Kita tidak bisa membicarakannya lebih jauh karena rumah ini sekarang sudah dibongkar dan tidak ada lagi. Sesungguhnya rumah ini merupakan satu contoh arsitektur rumah tinggal dengan gaya kolonial modern yang sangat menarik karena jarang pada waktu itu di Kediri sebuah rumah tinggal dirancang oleh seorang arsitek. Kita tahu bahwa arsitek rumah ini adalah Theo Taen dari biro arsitek Fermont- Ed. Cuypers cabang Batavia. Jadi, desainnya satu paket dengan kantor DJB yang ada di depannya. Tidak heran kalau gayanya sangat serasi dengan kantor DJB

Arsitektur dan Gaya Arsitektur Gedung DJB Kediri

Gedung DJB Kediri bergaya arsitektur kolonial modern yang disesuaikan dengan iklim tropis. Kalau kita membicarakan tentang gaya arsitektur dari Gedung DJB di Hindia Belanda sebenarnya tidak bisa lepas dari kantor perencananya sendiri, yaitu biro arsitek Hulswit Fermont & Ed. Cuypers, yang berkantor di Amsterdam dan Batavia (Jakarta). Seperti diketahui oleh umum bahwa desain-desain kantor baru DJB yang didirikan pada tahun 1908 sampai 1921 (Surabaya, Batavia, Surakarta, Cirebon, dan sebagainya), mempunyai gaya arsitektur yang sering disebut sebagai neo klasik[21]. Setelah tahun 1921 terdapat perubahan gaya dalam desain kantor-kantor DJB di Hindia Belanda, hal ini terlihat pada Kantor DJB di Padang, Pematang Siantar, Pontianak, Banjarmasin, termasuk Kediri.

21 Arsitektur neoklasik adalah sebuah gaya arsitektur yang dihasilkan oleh gerakan neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Dalam bentuk termurninya, gaya arsitektur tersebut merupakan gaya yang secara prinsip berasal dari arsitektur zaman klasik, prinsip-prinsip vitruvian dan arsitektur arsitek Italia Andrea Palladio. Gedung DJB (1908-1921) yang dirancang oleh Eduard Cuypers cenderung memakai gaya neo klasik dengan yang disesuaikan dengan fungsinya.

Semarang 1908 | Medan 1909 | Makassar 1910 | Surakarta 1910 | Batavia 1913

Surabaya 1912 | Jogjakarta 1915 | Banda Aceh 1918 | Bandung 1918 | Cirebon 1921

ARSITEKTUR GEDUNG DJB DI BERBAGAI KOTA DI INDONESIA DENGAN GAYA NEO KLASIK (1908-1921). ARSITEKNYA ADALAH EDUARD CUYPERS DARI BIRO ARSITEK: HULSWIT- FERMONT & ED. CUYPERS, AMSTERDAM DAN BATAVIA

Gambar 7.72. Gedung DJB di Indonesia Tahun 1908-1921

Sumber: Norbruis 2020

Pematang Siantar 1923 | Padang 1925 | Banjarmasin 1926 | Pontianak 1928 | Kediri 1929

ARSITEKTUR GEDUNG DJB DI BERBAGAI KOTA DI INDONESIA (1923-1929) DENGAN GAYA ARSITEKTUR KOLONIAL MODERN. ARSITEKNYA ADALAH THEO TAEN DAN BIRO ARSITEK HULSWIT-FERMONT & ED. CUYPERS BATAVIA.

Gambar 7.73. Gedung DJB di Indonesia Tahun 1923-1929

Sumber: Norbruis 2020

Setelah dikaji dengan mendalam, ternyata masalahnya selain adanya pergantian zaman dan gaya arsitektur, ternyata pengaruh yang paling besar ada di dalam kantor Hulswit-Fermont en Ed. Cuypers sendiri.

Sepeninggal Marius Hulswit (10 Januari 1921)[22], terjadi kevakuman akan tenaga arsitek yang handal pada kantor Hulswit-Fermont & Ed.

22 Pada awalnya, setelah Hulswit meninggal pada tahun 1921, Fermont ingin nama Hulswit dihilangkan dari nama kantor, tetapi Cuypers menentangnya. Karena itu, kantor tersebut tetap memakai Hulswit, Fermont & Cuypers. Akan tetapi, akhirnya tahun 1927 nama kantor tersebut berubah menjadi biro arsitek Fermont & Ed. Cuypers, dan kantor ini tetap beroperasi hingga 1957.

Cuypers di Batavia. Seperti diketahui bahwa sebelum meninggal, Hulswit merupakan tulang punggung pada kantor perancangan ini. Kematian Hulswit jelas merupakan kehilangan besar bagi kantor tersebut. Setelah mempertimbangkan dari berbagai segi, Eduard Cuypers sebagai kepala kantor di Amsterdam mengutus keponakannya yaitu Theo Taen dan seorang arsitek yang bekerja pada kantornya di Amsterdam namanya Henri Estourgie untuk pergi ke Hindia Belanda guna memperkuat tenaga arsitek pada cabangnya di Hindia Belanda.

Supaya bisa bekerja dengan tenang di Hindia Belanda, kedua arsitek muda itu dikirim oleh Eduard Cuypers bersama keluarganya (istri dan anaknya). Theo Taen ditempatkan sebagai arsitek kepala pada kantor pusat di Batavia, sedangkan Henri Estourgie ditempatkan pada kantor cabangnya di Surabaya. Pilihan Eduard Cuypers atas kedua arsitek muda tersebut ternyata tidak keliru, karena nantinya mereka membuktikan diri sebagai arsitek muda yang sangat berbakat. Karena kita akan membicarakan tentang desain DJB Kediri maka penjelasan berikut akan difokuskan kepada arsitek dari DJB Kediri yaitu Theo Taen.

Arsitek Gedung DJB Kediri

Arsitek gedung DJB Kediri adalah Theo Taen (dibantu oleh Laurent Logemann) dari Kantor Arsitek Fermont & Ed. Cuypers di Batavia. Keluarga Theo Taen[23] tiba di Jakarta pada tahun 1921. Selanjutnya Taen yang diangkat menjadi kepala kantor Hulswit Fermont & Ed. Cuypers

23 Nama lengkapnya adalah Theodorus Josephus Taen Err Toung (lahir di Berlin 12 Desember 1889, meninggal di Boxtel, 30 Oktober 1970). Theo Taen adalah cucu dari PJH Cuypers dan anak ketiga dari empat bersaudara dari putrinya Maria ('Mia'). Maria menikah pada tahun 1886 dengan FG Taen Err Toung. Ayah Theo Taen (FG Taeb Err Toung) adalah keturunan China dan memiliki bisnis yang mengkhususkan diri pada produk makanan Jepang dan Cina, kertas oriental, dan barang-barang seni oriental. Pernikahan ayah dan ibunya putus pada tahun 1897, ketika itu Theo masih berumur 8 tahun. PJH Cuypers (kakek Theo Taen) kemudian membawa cucunya dari Limburg. Pada tahun 1898 Taen tinggal bersama kakeknya (PJH Cuyper) sampai menamatkan sekolah menengahnya. Pada tahun 1915, Taen memasuki sekolah Baugewerbeshcule (Construction College) di Aachen (Jerman). Setelah menamatkan pendidikanya itu tahun 1917, Taen pergi ke Utrecht (Belanda) untuk bekerja pada arsitek H. Bijlard. Tidak lama kemudian dia kembali ke Amsterdam untuk menikah dengan Elizabeth Bernadina de Sain pada tanggal 2 Januari 1918. Selama di Amsterdam Taen tinggal di rumah pamannya seorang arsitek terkenal yaitu Ed. Cuyper. Dari sinilah nantinya Taen kemudian berkenalan dengan Hindia Belanda (Indonesia), di mana ia kemudian menghabiskan sebagian dari hidupnya tinggal di Jakarta selama 24 tahun (1921-1945). Sebelum ke Indonesia, dari tahun 1919 sampai tahun 1921, Taen bekerja sebagai arsitek di kantor pamannya Eduard Cuypers di Amsterdam.

sejak tahun 1921 menangani hampir semua bangunan DJB yang menjadi langganan tetap kantor tersebut[24].

Gambar 7.74. Arsitek DJB Kediri Theo Taen (1889-1970)
Sumber: Norbruis 2020

ARSITEK THEO TAEN (TENGAH- YANG JUGA SEBAGAI ARSITEK GEDUNG DJB KEDIRI) PEMIMPIN BIRO ARSITEK HULSWIT - FERMONT & ED. CUYPER CABANG BATAVIA (1921-1942)

Gambar 7.75. Pegawai Kantor Arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers di Batavia Tahun 1921-1942
Sumber: Norbruis 2020

24 Hanya dua Kantor DJB yang tidak ditangani Taen, yakni DJB Malang (1922) dan Palembang (1922). Kedua kantor ini ditangani oleh Henri Estourgie, pemimpin kantor biro arsitek Hulswit-Fermont & Ed. Cuypers Cabang Surabaya.

Pada tahun 1921, ketika Theo Taen dikirim kantornya di Amsterdam ke Batavia oleh Eduard Cuypers, ia membawa gambar rencana Gedung DJB Pematang Siantar dan Padang. Gambarnya dirancang sendiri oleh Eduard Cuypers, tapi Taen menganggap proposal sketsa Eduard Cuypers tersebut terlalu berat dan terlalu dekoratif. Sehingga dalam pelaksanaannya (Gedung DJB Pematang Siantar diresmikan tahun 1923 dan Padang diresmikan tahun 1925) ia rubah menjadi lebih modern dan sederhana (lihat gambar di bawah). Dari sini bisa dilihat bahwa Taen pada hakekatnya adalah arsitek dari generasi abad ke-20 yang berbeda dengan generasinya Hulswit dan Eduard Cuypers. Pendidikan dan pengalamannya dalam mendesain bangunan cenderung lebih mengikuti zaman modern sesudah tahun 1915-an yang berkembang di Eropa.

Gambar perspektif Gedung DJB Pematang Siantar yang dirancang oleh Eduard Cuypers (gambarnya dibawa tahun 1921 ke Batavia oleh Theo Taen)

Gambar 7.76. Sketsa Rencana Gedung DJB Pematangsiantar Tahun 1921
Sumber: Norbruis (2019)

Gedung DJB Pematang Siantar diresmikan tahun 1923.
Dirancang kembali oleh Theo Taen berdasarkan sketsa dari Eduard Cuypers.

Gambar 7.77. Gedung DJB Pematangsiantar Tahun 1923
Sumber: Norbruis (2019)

Sketsa perspektif rencana Gedung DJB Padang karya arsitek Eduard Cuypers yang dibawa oleh Theo Taen pada tahun 1921 ke Hindia Belanda

Gambar 7.78. Sketsa Rencana Gedung DJB Padang Tahun 1921
Sumber: Norbruis (2019)

Gedung DJB Padang yang diresmikan tahun 1925. Rancangan Gedung DJB Padang ini dibuat oleh arsitek Theo Taen berdasarkan sketsa dari Eduard Cuypers pada gambar samping.

Gambar 7.79. Gedung DJB Padang Tahun 1925
Sumber: Norbruis (2019)

Ciri-Ciri Gedung DJB Yang Dirancang Oleh Arsitek Theo Taen (Termasuk DJB Kediri)

Gaya arsitektur dari Gedung DJB karya Theo Taen (termasuk DJB Kediri), dapat ditengarai sebagai berikut:

- Atapnya berbetuk perisai dengan sudut kemiringan kurang lebih 35 derajat. Pada puncak atapnya selalu diberi semacam kubah kecil yang diangkat sehingga terdapat ruang untuk ventilasi atapnya. Talangnya umumnya terbuat dari beton. Bentuk atap yang menonjol ini berbeda dengan gaya arsitektur neo klasik yang lebih menonjolkan gevel pada tampaknya.
- Tampaknya berbentuk simetri, bersih dari ragam hias atau ukiran-ukiran, sehingga memberi kesan lebih 'clean' dan fungsional. Sesuai dengan tampak gaya arsitektur modern yang terkesan lugas.
- Taen menggunakan konstruksi beton untuk lantainya dan kanopi untuk pintu masuk utamanya (lihat foto Gedung DJB Pematang Siantar, Padang, maupun Kediri). Atap kanopinya berbentuk datar dari beton yang di dukung oleh 4 buah kolom.
- Jendelanya yang berbentuk empat persegi panjang yang jumlahnya tiga berjejer atau kadang-kadang dua berjejer adalah ciri khas dari desain karya Taen. Bentuk denah yang cukup gemuk (lebarnya lebih dari 10,00 m) membutuhkan pencahayaan sinar matahari yang cukup, baik dari jendela samping maupun depan. Itulah sebabnya Taen senang menggunakan bentuk jendela empat persegi panjang yang tinggi daripada bentuk kotak.
- Di atas jendela terdapat lubang ventilasi yang dimensinya kecil tapi banyak. Dimensi yang cukup kecil ini beralasan untuk keamanan bank dari luar. Bahkan semua jendela kaca juga diberi teralis untuk keamanan.
- Bentuk denah ruang kerjanya kelihatan lebih modern dengan tidak banyak sekat-sekat. Apabila terpaksa ada sekat maka sekat-sekat ruangan tersebut terbuat dari kaca *opaque* yang masih tembus cahaya. Bentuk denahnya terdiri dari dua lantai. Kalau lantai pertama dibuat semi basemen, maka masih ada jendela untuk memasukkan sinar di atas tanah pada lantai semi basemen.

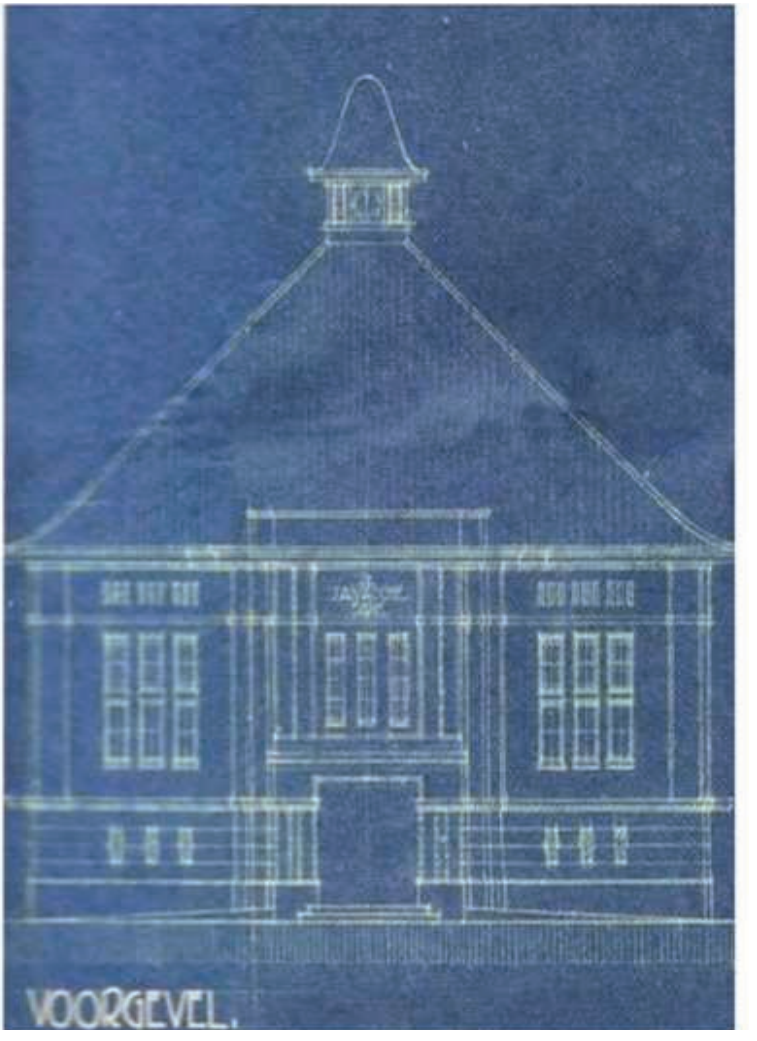

Gambar 7.80. Cetak Biru Tipologi Tampak Depan Gedung DJB Tahun 1925
Sumber: Norbruis 2020

Gambar 7.81. Tampak Samping Gedung DJB Kediri Tahun 1929
Sumber: Norbruis 2020

PEMANFAATAN DAN UPAYA PELESTARIAN GEDUNG EKS DE JAVASCHE BANK KEDIRI

PERUBAHAN PADA BANGUNAN LAMA

Pesatnya kemajuan dalam bidang perbankan di Kediri, berakibat langsung pada penyediaan ruang pada gedungnya. Gedung lama tidak dapat menampung lagi semua kegiatan yang ada. Karena itu, pada tahun 1980 dibangun gedung baru di lingkungan site yang sama, dan selesai tahun 1985. Pembangunan gedung yang baru tersebut mengorbankan rumah dinas bekas direktur DJB yang lama, rumah yang dibangun tahun 1929 itu terpaksa dirobohkan. Di atas tanah tersebut kemudian dibangun gedung yang baru berlantai lima. Sedangkan kantor DJB yang lama tetap dipertahankan keberadaanya.

Denah dan Tampak bangunan

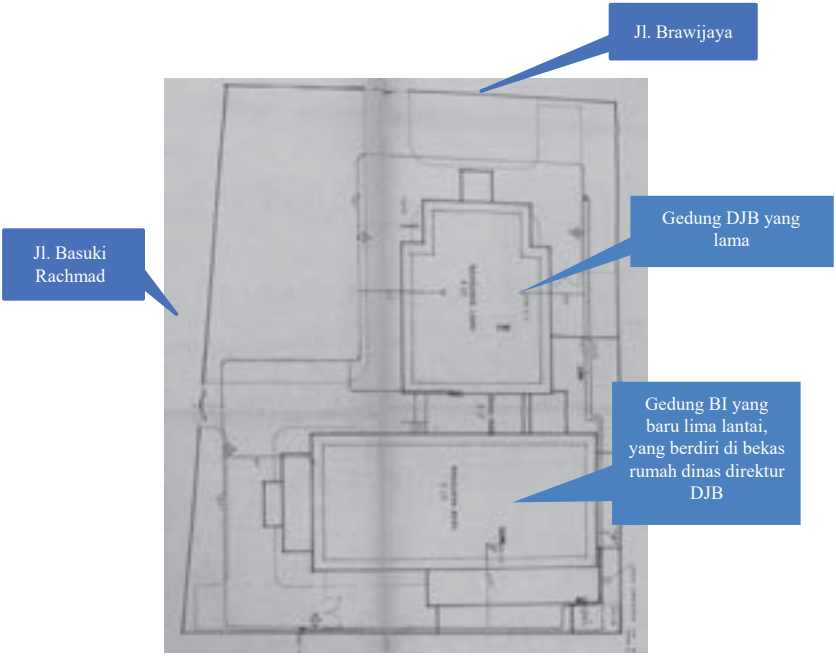

Gambar 7.82. Denah Posisi Bangunan Lama dan Baru di Gedung DJB Kediri
Sumber: Arsip BI

Kantor DJB yang lama pada prinsipnya tidak mengalami perubahan (terutama pada tampak bangunannya). Karena dirikan pada tahun 1929, pada prinsipnya gedung lama ini bisa digolongkan sebagai bangunan cagar budaya[25].

Akibat adanya bangunan baru[26] di belakang kantor DJB lama tersebut maka secara otomatis terjadi perubahan pada tampaknya (baik tampak depan maupun tampak samping). Pada tampak depannya (kalau dilihat dari Jl. Brawijaya) bangunan lama menjadi *foreground* (latar depan

25 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

26 Bangunan baru tersebut di rancang oleh biro arsitek "Perencana Jaya" dari Jakarta.

dari komposisi tampaknya). Sebaliknya, bangunan baru seolah-olah menjadi *background* (latar belakang pada komposisi tampaknya). Kalau dilihat dari samping tampak seperti adanya gradasi yang tinggi ke arah yang lebih rendah. Secara komposisi bentuk, tampaknya bangunan yang baru berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan gedung lama. Seperti adanya atap perisai yang ada di puncak gedung bertingkat yang baru dan jendela kaca yang tampak berderet sepanjang tampaknya. Ada interval waktu yang cukup panjang dari pembangunan gedung yang lama dan baru (lebih dari 50 tahun), sehingga hal ini cukup menyulitkan bagi perancang untuk menyesuaikan dengan gaya bangunan yang lama.

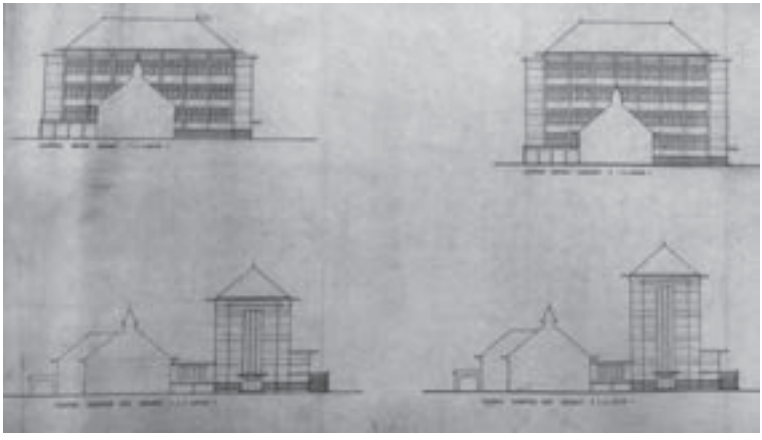

Gambar 7.83. Komposisi Tampak Bangunan Baru terhadap Bangunan Lama Gedung DJB Kediri

Sumber: Arsip BI

Ruang Dalam (interior)

Denah interior lantai dua Gedung DJB lama yang sudah tidak dapat menampung kegiatan perbankan yang semakin meningkat di Kediri

Gambar 7.84. Denah Gedung DJB Kediri Lantai Dua

Denah lantai satu yang bersifat privat dimana terletak khazanah, yang dulu merupakan jantungnya sebuah bank

Gambar 7.85. Denah Gedung DJB Kediri Lantai Satu

Secara garis besar zoning dari ruang dalam (interior) pada gedung lama tidak mengalami banyak perubahan. Lantai dua bagian depan masih berfungsi sebagai daerah publik untuk melayani masyarakat. Sedang di belakangnya daerah publik ini terletak daerah pelayanan. Pada lantai satu tetap bersifat privat di mana terletak khazanah yang masih dipertahankan.

PEMANFAATAN GEDUNG LAMA

Gedung lama DJB, baik secara tampak dan interiornya, tidak mengalami banyak perubahan. Demkian juga secara konstruksi kelihatannya masih sangat baik dan layak untuk dipertahankan. Gedung DJB dapat dikatakan sebagai pelopor bangunan yang berarsitektur kolonial modern di Kota Kediri. Ada usulan untuk masa depan bagi Gedung DJB lama ini, diusulkan agar gedung ini dijadikan semacam museum perbankan bagi kota Kediri.

Ada nilai-nilai yang patut dipertahankan pada bangunan DJB lama ini. Pertama adalah nilai kepeloporan kegiatan perbankan di Kota Kediri. Di sini para siswa dapat belajar dan mengetahui bagaimana awal kegiatan perbankan dilakukan pada masa lalu. Bahkan mahasiswa akademi perbankan bisa mengunjungi gedung ini untuk mengetahui bagaimana administrasi perbankan di masa lalu dilakukan. Bagi masyarakat umum, selain interior, tampak luar gedung yang sudah menjadi semacam tetenger bagi lingkungan di sudut antara Jl. Raya (sekarang Jl. Brawijaya) dan Jl. Pocanan (sekarang Jl. Basuki Rachmad), sudah dianggap sebagai bagian dari lanskap kota yang tidak mudah untuk dilupakan. Juga bagi para perantau asal Kediri yang kembali mengunjungi kotanya, tentunya tidak akan lupa pada pemandangan bagian kota Kediri dengan gedung lama ini sebagai kenang-kenangan di masa lalu.

Kedua atau terakhir, bagi siswa dan mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang bangunan, dapat melihat dari dekat bagaimana bangunan pada masa kolonial berikut aksesorisnya dibangun, yang tentunya merupakan pelajaran yang berharga bagi mereka.

Sebagai kesimpulan terakhir Gedung DJB lama yang dibangun tahun 1929 tersebut sangat layak untuk dijadikan sebagai bangunan cagar budaya bagi Kota Kediri.

BAB 8
Epilog

Wilayah Kediri menjelang kehadiran DJB Kediri merupakan panggung pedalaman Jawa Timur yang dinamis. Dimulai dengan kedudukannya yang strategis sebagai pusat kekuasaan politik pra-kolonial, Kediri merosot hingga tinggal sebagai wilayah yang dibawahkan secara silih berganti oleh pusat-pusat kekuasaan politik besar yang berdiri di Tanah Jawa dari Singasari, Majapahit, hingga menjadi bawahan Mataram. Meskipun tenggelam dalam bayang-bayang kejayaan kekuasaan politik lain, perannya tidak sama sekali hilang. Dalam beberapa kesempatan, terutama ketika pusat-pusat kekuasaan politis utama melemah, penguasa lokal Kediri mampu membalik arus sejarah dan mengalahkan pusat-pusat politis utama yang tengah mengalami disintegrasi, meskipun tampilnya kembali Kediri tidak bertahan lama.

Integrasi Kediri ke dalam wilayah kekuasaan Belanda secara umum menenggelamkan peran Kediri sebagai pusat kekuasaan politik yang penting. Di bawah kekuasaan Hindia Belanda Kediri ditetapkan sebagai wilayah keresidenan yang meliputi empat Afdeling atau Kabupaten, yakni Kediri, Tulungagung, Berbek (Nganjuk), dan Blitar. Di bawah rezim kolonial pedalaman Kediri bertransformasi menjadi wilayah implementasi kebijakan kolonial yang bertujuan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya melalui pengembangan sistem produksi komoditas untuk pasar dunia. Kurang lebih selama sembilan puluh tahun pertama sejak dikuasai langsung oleh Belanda sejak 1830, implementasi politik ekonomi kolonial telah mengubah Kediri sebagai panggung pedalaman yang mementaskan dinamika sosio-ekonomi yang menarik. Dinamika ini hadir dalam beragam sektor ekonomi yang tidak melulu merupakan prakarsa pemerintah, melainkan juga melibatkan berbagai kelompok sosial baik

kelompok Timur Asing, khususnya Tionghoa dan juga Jepang, untuk beberapa waktu, serta kelompok masyarakat bumiputera. Mereka terlibat secara aktif dalam interaksi sosio-ekonomi dalam wujud sinergi maupun kompetisi untuk mewujudkan harapan akan kemakmuran.

Kehadiran De Javasche Bank Agentschap Kediri menandai fase baru dalam dinamika sosial-ekonomi wilayah Kediri. Kedudukan Kediri sebagai sentra perekonomian kolonial terkemuka berbasis perkebunan semakin dimantapkan berkat kehadirannya. Sebelum kehadiran DJB, perkembangan pedalaman Kediri secara kapital sangat tergantung pada Surabaya. Modal yang diinvestasikan di wilayah ini sebagian besar disalurkan melalui Surabaya sebagai pintu masuk ke berbagai daerah pedalaman Jawa Timur. Ketergantungan pada Surabaya secara terus menerus pada beberapa aspek dipandang tidak menguntungkan ketika pedalaman Kediri memasuki awal kejayaan sistem perkebunan komersial. Kebutuhan akan transaksi keuangan dengan volume yang lebih besar dan kebutuhan akan akses layanan keuangan yang lebih cepat bagi perusahaan dan para pelaku dunia usaha menjadi alasan pentingnya De Javasche Bank menghadirkan Agentschap di Kediri. DJB Agentschap Kediri menjadi institusi yang berperan penting dalam mengintegrasikan kawasan Kediri dalam jejaring kapital secara langsung untuk menopang sistem produksi yang berorientasi global. Keberadaan De Javasche Bank Agentschap Kediri meningkatkan layanan perbankan dan melancarkan aliran dana yang menggerakkan perekonomian masyarakat Kediri dan menandainya sebagai salah satu pusat pertumbuhan terkemuka di Jawa Timur sejak masa kolonial.

Pentingnya peran De Javasche Bank Kediri tidak hanya berlangsung ketika perekonomian mengalami pertumbuhan, tetapi juga pada waktu kemunduran. Dengan menggunakan kehadiran DJB Agentschap Kediri sebagai penanda, dinamika perekonomian wilayah Kediri dapat dibedakan ke dalam beberapa fase, yakni: perintisan dan ekspansi (1870-1923), kejayaan (1923-1930), kemerosotan (1930-1950), rehabilitasi dan rekonstruksi (1950-1968), dan pemantapan (1968-2020). Pembabakan ini kiranya dapat membantu untuk memahami dinamika perekonomian Kediri dalam kurun waktu yang panjang secara lebih baik, meskipun

kenyataan sejarah seringkali jauh lebih kompleks dan tidak mudah disimplifikasi dalam sebuah konstruksi teoritis.

Ketika DJB Agentschap Kediri hadir pada tahun 1923, perekonomian Kediri berbasis perkebunan telah bertransformasi dari perintisan ke fase ekspansi. Fase ekspansi perekonomian Kediri berbasis perkebunan ditandai dengan perluasan area tanaman perkebunan. Selain itu, sektor perkebunan juga telah ditopang oleh beragam komoditas. Pada mulanya, tebu dan kopi menjadi komoditas utama pada masa tanam paksa, disusul dengan tembakau, karet, agave, dan bahkan kemudian juga ketela. Pada fase ekspansi inilah kawasan Kediri telah menjelma sebagai sentra perkebunan terkemuka. Keterbatasan pengangkutan akibat ketergantungan pada angkutan darat dan sungai diperbaiki dengan pembangunan jaringan transportasi kereta api dan trem pada akhir abad Ke-19 dan awal abad Ke-20. Wilayah Kediri menjadi semakin terbuka dan mudah diakses baik untuk mobilitas penumpang maupun barang. Kehadiran moda transportasi kereta api juga telah melipatgandakan volume barang yang diangkut, demikian pula barang-barang yang dikirim lebih cepat mencapai tempat tujuan, mengurangi resiko kerusakan dan kerugian karena lamanya pengangkutan.

Pendirian DJB Agentschap Kediri dapat menjadi penanda masuknya perekonomian Kediri berbasis perkebunan ke masa kejayaan. Produk-produk ekspor yang dihasilkan dari wilayah Kediri mengalir dalam volume besar ke Surabaya sebagai gerbang ekspor dari pedalaman Jawa Timur menuju pasar dunia. Keuntungan ekonomi dengan proporsi yang berbeda-beda dinikmati tidak hanya oleh mereka yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi, melainkan juga mereka yang bekerja pada berbagai institusi dan sektor yang terkait. Orang-orang Eropa, Tionghoa, kalangan bumiputera dari kalangan elite, maupun masyarakat kebanyakan dengan peran masing-masing menjadi bagian dan berkontribusi terhadap dinamika perekonomian Kediri pada era kejayaan perkebunan. Respons positif kalangan penduduk tampak dari perkembangan komoditas komersial yang mereka usahakan atas prakarsa sendiri khususnya tebu dan tembakau rakyat. Bukan itu saja, budidaya tanaman padi dan palawija secara umum juga mengalami tren peningkatan dari segi area,

meskipun dari sisi produktivitas tidak mengalami peningkatan signifikan. De Javasche Bank Agentschap Kediri memainkan peran penting dalam dinamika ini baik melalui penyaluran kredit bagi para pelaku dunia usaha maupun memperlancar aliran dana dan transaksi keuangan yang keluar masuk wilayah Kediri. Fase kejayaan perekonomian Kediri berbasis perkebunan berlangsung hingga menjelang badai depresi 1930-an.

Depresi mengguncang keras perekonomian Kediri yang berbasis perkebunan. Semua sektor ekonomi merasakan efek-efek buruk depresi, tetapi pukulan paling keras dan dampak paling buruk dirasakan oleh sektor perkebunan yang sangat bergantung pada pasar dunia. Karena produk-produk perkebunan tidak laku di pasar, banyak perusahaan perkebunan jatuh bangkrut dan gulung tikar. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang masih dapat bertahan terpaksa menghentikan operasi untuk sementara agar tidak menderita kerugian lebih parah. Akibatnya, terjadi peningkatan luar biasa jumlah pengangguran. Intervensi dilakukan pemerintah kolonial untuk meringankan beban orang-orang yang terpuruk hidupnya akibat hilangnya sumber penghasilan. Intervensi diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti penyaluran bantuan baik pangan maupun uang, pemberian keringanan pajak, serta penyelenggaraan kursus-kursus. Aksi penggalangan dana juga banyak dilakukan untuk mengumpulkan sumbangan dari kalangan korporasi, karyawan, maupun individu untuk disalurkan kepada mereka yang tidak lagi mempunyai pekerjaan dan penghasilan.

Berbeda dengan sektor perkebunan yang terpuruk dan melahirkan banyak pengangguran, sektor pertanian rakyat justru memperlihatkan tren sebaliknya. Sektor pertanian rakyat memperlihatkan kemampuan yang tinggi dalam meredam dampak krisis. Menyikapi kondisi yang sulit karena hilangnya pendapatan dari upah kerja dan sewa lahan, kaum petani kembali menggunakan lahan-lahan yang dikembalikan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk memproduksi tanaman pangan. Respons ini tampak jelas dalam peningkatan luas tanaman dan produksi padi pada tahun-tahun krisis. Peningkatan mulai terjadi pada 1931 dan mencapai puncak pada 1934, demikian pula luas penanaman palawija tetap tinggi pada paruh kedua 1930-an dan terus merangkak hingga mengalami

puncak peningkatan kedua pada 1941. Peningkatan produksi padi pada tahun 1930-an berkontribusi besar terhadap pencapaian Jawa sebagai eksportir beras pada 1939 dan pencapaian swasembada beras di Hindia Belanda pada 1941. Melalui penyaluran kredit produk yang banyak diberikan kepada para pengusaha Tionghoa, De Javache Bank Agentschap Kediri ikut memainkan peranan penting dalam penguatan perdagangan beras. Keberuntungan di tengah krisis juga tampak pada industri rokok kretek. Produksi rokok kretek Kediri justru mengalami peningkatan pada masa depresi. Penurunan daya beli akibat hantaman krisis memaksa orang beralih ke produk-produk berharga murah dan rokok kretek Kediri adalah pilihan produk untuk tujuan ini. Keberuntungan serupa juga dinikmati produsen dan para penyalur barang-barang murah dari Jepang.

Kemerosotan kondisi perekonomian secara umum berlanjut pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Kemerosotan perekonomian Kediri pada masa Jepang tampak dari penurunan secara drastis luas area dan produksi tanaman perkebunan, dan kerusakan alat-alat produksi. Demikian pula, sektor pertanian rakyat juga memperhatikan kecenderungan menurun dari segi luas area penanaman dan produksinya meskipun pemerintah pendudukan Jepang menjalankan propaganda pelipatgandaan produksi pangan terutama padi. Perekonomian Kediri yang berorientasi ekspor pada masa Hindia Belanda, di bawah rezim pendudukan Jepang dipaksa berubah haluan untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Surplus produksi yang pada masa terdahulu dilepas ke pasar untuk menghasilkan keuntungan, oleh pemerintah pendudukan Jepang diambil secara paksa untuk memenuhi kebutuhan logistik Jepang atau kalaupun dibeli harganya ditetapkan otoritas Jepang secara sepihak. Pemerintah pendudukan militer Jepang juga mengontrol lalu lintas barang antar daerah, bahkan barang-barang tertentu dilarang untuk dikirim keluar kecuali untuk kepentingan Jepang. Pembatasan dan pengawasan secara ketat terhadap pasar dan lalu lintas barang membuat pasar pada masa pendudukan Jepang kehilangan daya tariknya. Selama pendudukan Jepang, De Javasche Bank (DJB) Agentschap Kediri yang disita Jepang dan berubah menjadi Yokohama Specie Bank berperan menjadi alat Jepang terutama untuk menarik pengembalian semua pinjaman yang telah disalurkan DJB menjelang kedatangan Jepang.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kediri yang buruk pada masa pendudukan Jepang terus berlanjut pada periode revolusi. Transisi kekuasaan pada paruh kedua 1940-an yang diwarnai kekerasan dan konflik bersenjata yang menyeret kondisi perekonomian dan masyarakat Kediri dalam kesulitan dan ketidakpastian. Produksi komoditas perkebunan mengalami kemunduran lebih jauh pada masa revolusi. Industri gula di Kediri secara praktis tidak beroperasi. Bangunan pabrik dan perlengkapan mesinnya banyak yang rusak dan mangkrak, hanya sebagian kecil pabrik gula masih tetap dapat berfungsi. Nasib serupa dialami perkebunan tanaman pegunungan. Setelah proklamasi, banyak aset perkebunan pegunungan yang berpindah tangan. Banyak pabrik dalam kondisi hancur dan tegakan-tegakan tanaman perkebunan yang ada di lahan sebagian besar telah rusak atau bahkan hilang dari lahan.

Berbeda dengan sektor perkebunan yang umumnya lumpuh akibat rusaknya infrastruktur produksi, sektor pertanian rakyat di wilayah Kediri setelah penyerahan Jepang mulai meningkat kembali. Luas panen tanaman rakyat bertambah, dibarengi pula dengan peningkatan signifikan volume produksi. Kebijakan Jepang dan euforia kemerdekaan menyebabkan banyak lahan perkebunan diduduki oleh rakyat dan digunakan untuk lahan budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan menjadi pilihan karena produknya memberikan jaminan kepastian akan tercukupinya kebutuhan pangan. Tanaman pangan lebih disukai dibanding dengan tanaman komersial yang masih banyak diselimuti ketidakpastian dan kesulitan pemasaran di tengah-tengah perang yang masih berkecamuk dan belum jelas kapan akan usai. Orientasi pada produksi tanaman pangan selama masa revolusi juga telah memungkinkan dukungan logistik yang lebih kuat bagi kepentingan perjuangan di pihak republik.

Meskipun persediaan bahan pangan membaik, kelangkaan barang lainnya terjadi di Kediri dan begitu terasa terutama ketika terjadi blokade-blokade lalu lintas barang seiring Agresi Militer Belanda ke II Kekuatan militer Belanda dan Republik berhadapan langsung di wilayah Kediri dalam kontak-kontak bersenjata dan kedua belah pihak juga berusaha mengontrol arus keluar-masuk barang sebagai bagian dari strategi perang. Meskipun lalu-lintas perdagangan antar desa-kota masih tetap berlangsung, tetapi skalanya relatif terbatas. Kendala dalam lalu lintas

barang dan transaksi perdagangan juga datang dari terjadinya kekacauan akibat pertarungan dua mata uang yang berbeda, Uang ORI dan Uang NICA. Baik pihak Belanda maupun Republik berusaha keras menjadikan mata uang masing-masing sebagai alat transaksi, sekaligus untuk melemahkan satu sama lain. De Javasche Bank Agentschap Kediri yang beroperasi kembali seiring masuknya militer Belanda atas kota Kediri dan Bank Negara Indonesia 1946 yang merepresentasikan kepentingan Indonesia menjadi bagian penting dalam perang uang ini. Untuk mendukung pemulihan operasinya DJB Kediri berusaha membangun kontak dengan para relasi DJB yang lama, serta banyak melaporkan kondisi aset-aset dan infrastruktur ekonomi di wilayah Kediri.

Penyelesaian politik yang tercapai melalui Konferensi Meja Bundar membuka fase rekonstruksi dan pemulihan (1950-1968). Perubahan penting pada fase ini adalah terjadinya nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) yang menghasilkan munculnya Bank Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1953. Proses nasionalisasi ini menunjukkan bahwa institusi De Javasche Bank tidak dapat dipisahkan dari Bank Indonesia karena DJB merupakan embrionya. Dengan demikian, DJB Agentschap Kediri merupakan embrio Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri. Peralihan pucuk pimpinan DJB/Bank Indonesia Kediri dari orang Belanda ke orang Indonesia berlangsung dengan penggantian dari J.G. Spaan kepada Soekarno.

Fase rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perkembangan perekonomian Kediri ditandai beragam fenomena. Dalam sektor perkebunan besar terjadi proses pengembalian sejumlah asset kepada para pemilik lama. Sebagian aset yang tidak diklaim kembali oleh pemilik lama tetap dikuasai pihak Indonesia. Sebagian perusahaan mulai beroperasi kembali, dan sebagian lainnya dalam proses direhabilitasi karena infrastruktur produksi telah hancur selama periode perang. Namun demikian, pemulihan produksi sektor perkebunan secara penuh menjadi semakin sulit dicapai karena menghadapi masalah alotnya pengembalian sebagian aset perusahaan khususnya lahan-lahan perkebunan yang terlanjur dikuasai dan digunakan oleh rakyat. Sementara itu, dengan mengandalkan keunggulannya pada kebutuhan modal yang kecil, sektor pertanian rakyat mampu pulih dan berkembang lebih cepat. Baik

budidaya tanaman pangan maupun tanaman komersial khususnya tebu mengalami peningkatan signifikan bahkan ikut menyuplai kebutuhan tebu pabrik-pabrik besar. Jalan buntu dalam penyelesaian sengketa Irian Barat mendorong terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda termasuk di wilayah Kediri. Dari aspek performansi capaian ini tidak paralel dengan peningkatan kinerja perusahaan perkebunan karena kelemahan manajemen dan menguatnya pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam operasi produksi perkebunan seiring dengan perkembangan aktivisme politik dalam masyarakat.

Memasuki periode awal 1960-an, rekonstruksi perekonomian Kediri menghadapi banyak hambatan. Berbagai program yang dicanangkan pemerintah dalam konteks kebijakan ekonomi terpimpin di wilayah Kediri tidak berjalan lancar dan sulit mencapai target. Pelaksanaan program kemandirian ekonomi di wilayah Kediri sebagai implementasi kebijakan Deklarasi Ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat banyak menghadapi kendala. Pembangunan kemandirian dalam sektor sandang terkendala suplai benang tenun yang sangat terbatas, sedangkan kemandirian dalam sektor pangan terhambat problem keterbatasan persediaan pupuk. Hanya sektor industri rokok kretek Kediri yang mampu berkembang dengan baik. Berbagai usulan disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kediri terkait dengan proyek-proyek rintisan untuk menggerakkan ekonomi melalui sektor perkebunan, industri, dan infrastruktur, termasuk usulan pembukaan cabang-cabang bank yang baru. BI Kediri juga ikut terlibat dalam pembiayaan proyek, di antaranya proyek jarak di Trenggalek dan kredit peremajaan tanaman kopi perkebunan di Kediri. Secara umum fase rekonstruksi pada tahun-tahun terakhir masa Ekonomi Terpimpin di wilayah Kediri diwarnai dengan inflasi yang mengkhawatirkan, harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung, dan ketegangan sosial yang meningkat. Problem yang begitu kompleks ini tampaknya menjadi tanda-tanda zaman yang menengarai datangnya fase yang berbeda.

Fase baru dalam dinamika perekonomian Kediri di sini disebut sebagai fase pemapanan, dimulai sejak pencanangan program pembangunan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam konteks kelembagaan Bank Indonesia (BI),

fase ini ditandai dengan perubahan kedudukan dan fungsi Bank Indonesia. Selain diposisikan sebagai bank sentral, BI juga berfungsi sebagai agen pembangunan dengan mandat tambahan menjaga stabilitas nilai rupiah, mendorong produksi, dan kesempatan kerja. Dalam kedudukannya yang baru, BI tidak lagi menjalankan fungsi komersial. Perkembangan perekonomian di Kediri ditandai terutama dengan peningkatan produksi padi sebagai implementasi revolusi hijau. Peningkatan produksi terutama bersumber dari perbaikan produktivitas padi di lahan sawah berkat aplikasi pupuk dan input kimiawi lainnya, penggunaan varietas padi unggul, dan perbaikan sarana irigasi. Selain padi, peningkatan signifikan juga terjadi pada komoditas kedelai, yang menjadi bahan utama industri tahu yang banyak berkembang dan menjadi ciri khas Kediri.

Sektor perkebunan Kediri pada masa Orde Baru masih bersandar terutama pada komoditas tebu dan kopi. Perkebunan tebu yang menjadi penopang industri gula dikembangkan melalui penerapan sistem baru yang dikenal dengan nama Tebu Rakyat Indonesia (TRI). Dalam sistem ini petani didorong menanam tebu di lahan mereka, sedangkan pabrik gula sebagai perusahaan milik negara berperan sebatas sebagai unit pemroses. Melalui sistem ini produksi gula berhasil ditingkatkan karena pabrik tidak lagi menemui kendala dalam pengadaan lahan tebu. Sementara itu, perkebunan dataran tinggi masih mengandalkan kopi dan karet sebagai komoditas utama, meskipun proses diversifikasi juga berjalan. Tanaman perkebunan pegunungan yang meningkat posisinya sebagai bagian dari proses diversifikasi tanaman perkebunan terutama adalah cengkih, yang produknya banyak dibutuhkan industri rokok kretek.

Reputasi yang dimiliki Kediri sebagai kota tahu dan kota kretek yang diakui secara luas menegaskan perkembangan sektor industri yang mengesankan pada masa Orde Baru. Perkembangan sektor industri di Kediri secara umum telah menempatkan wilayah Kediri khususnya Kota Kediri pada peringkat keenam di Jawa Timur untuk keseluruhan industri, dan peringkat ketiga untuk industri skala besar dan menengah. Menarik pula untuk dicatat bahwa kemajuan yang dicapai dalam sektor industri rokok kretek dan tahu mendapatkan kontribusi besar dari kalangan kelompok pengusaha Tionghoa. Reputasi Kediri sebagai kota kretek

tidak terpisahkan dari Pabrik Rokok Gudang Garam yang pada masa Orde Baru mampu menjelma sebagai pabrik rokok terbesar di seluruh Indonesia. Kontribusi Gudang Garam yang begitu besar bagi Kediri membuat perusahaan ini juga disebut sebagai nafas utama perekonomian Kediri dan tanpa ada Gudang Garam, Kota Kediri mungkin hanyalah kota pedalaman yang biasa saja.

Peran yang dimainkan BI Kediri pada era pembangunan tampak dalam beragam fungsi. Penyaluran dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada sektor perbankan di Kediri merupakan fungsi yang dijalankan sebagai implementasi kebijakan pusat. Kucuran dana KLBI ini oleh perbankan kemudian disalurkan dalam berbagai skim seperti kredit modal kerja (program Bimas dan Inmas), kredit investasi dan beberapa program kredit lainnya. Dalam pelaksanaan program tersebut, Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan kapasitas perbankan, pengaturan dan pengawasan pengucuran kredit, penyediaan data dan analisis statistik potensi ekonomi daerah, fasilitasi pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses kredit maupun pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam kaitan dengan peredaran uang, BI Kediri mengupayakan agar uang yang beredar dalam masyarakat tetap layak pakai dengan menjalankan operasi penarikan uang lusuh dan penyuntikan uang baru ke dalam peredaran, serta menjamin keamanan dengan memerangi peredaran uang palsu.

Siginifikansi BI bagi daerah dan masyarakat Kediri semakin terasa pada era Reformasi. Pada kurun waktu yang ditandai dengan adanya desentralisasi pemerintahan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah ini, keberadaan dan peran KPwBI Kediri semakin dirasakan, apalagi dengan semakin dinamisnya ekonomi daerah. Berbagai program diperkenalkan oleh KPwBI Kediri untuk merespon geliat ekonomi daerah pada masa Reformasi. Kehadiran dan keterlibatan KpwBI Kediri semakin terasa karena semakin derasnya perubahan dalam dunia perbankan serta transaksi keuangan, dan perubahan-perubahan itu melibatkan, tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga pemerintah daerah. Dalam hubungan inilah keberadaan KPwBI Kediri sangat dirasakan kehadiranya di era otonomi daerah dewasa ini.

KPwBI Kediri dewasa ini memiliki dua gedung utama, satu gedung lama yang mulai ditempati tahun 1929 dan satu gedung baru yang selesai dibangun tahun 1985. Gedung lama, yang saat sekarang masih difungsikan, memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nilai sejarah gedung itu tidak saja terlihat dari fungsinya sebagai pusat aktivitas DJB *Agentschap* Kediri atau Kantor Cabang BI Kediri atau KPwBI sejak dia pertama ditempati, tetapi juga dari peran yang dimainkannya sebagai pelopor bangunan beraksitektur kolonial modern di kota Kediri. Peran terakhir yang dimainkannya ini telah menjadikan gedung lama KPwBI Kediri ini sebagai suatu *heritage* yang sangat menarik, sehingga sangat layak untuk dijadikan sebagai bangunan cagar budaya bagi kota Kediri. Di samping itu, nilai historis yang dimilikinya juga akan semakin tinggi nilai gunanya, terutama nilai edukasinya, bila suatu saat kelak gedung ini dijadikan sebagai museum perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen

ANRI, Arsip Koleksi Mr Bodan No 667.

Arsip Bank Indonesia, *Koleksi laporan Agentschap Kediri 1949*.

Arsip Bank Indonesia Kediri, *Koleksi Arsip Foto Bank Indonesia Kediri 1950-2019*.

Arsip Bank Indonesia, "Vertrouwelijk brieven No. 104/32: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 30 November 1931."

_____. "Vertrouwelijk brieven No. 104/32: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 19 Januari 1933."

_____. "Vertrouwelijk brieven No. 105/13: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 9 Januari 1931".

_____. "Vertrouwelijk brieven No. 105/13: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 10 Oktober 1931."

_____. "Vertrouwelijk brieven No. 106/3: De Agent van De Javasche Bank Kediri aan President en Directeuren van De Javasche Bank Batavia 10 Oktober 1931."

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "Surat H. Tokunaga kepada Toean Kediri Guntyo 13 Januari 2603".

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "Surat H. Tokunaga kepada Grogol Sontyo 22 Desember 2602 [1942]".

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "Surat H. Tokunaga kepada Papar Guntyo 13 Januari 2603 [1943]".

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "Surat H. Tokunaga kepada Modjo Sontyo 13 Januari 2603 [1943]".

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "SuratTekisan Kanribu Kediri Shibu kepada Pare Guntyo tanggal 13 Januari 2603 [1943]".

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "Kangdjeng-Boepati Kediri-Ken-Tyoo R.A.A. Danoediningrat kepada Kepala Tekisan Kanribu Kediri Shibu tanggal Syowa 18 Itigatu 19".

_____. Brieven Vetrouwelijk van/aan Hooddkantoor Kediri, "Tekisan Kanribu Kediri Shibu, H Tokunaga to The Head-Office of zzde Javasche Bank, Djakarta Kota, 27 Maret 2603 [1943]".

_____. Kode KS 0104, JR P, *Laporan Pemimpin Tjabang Surabaya, Malang, Kediri, Djember pada Konperensi Para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat pada tgl. 25 Nopember 1963-30 Nopember 1963* (Djakarta: Bank Indonesia).

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Jaarverslag van De Javasche Bank 1946/1947*.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Jaarverslag van De Javasche Bank 1948/1949*.

_____. KS.01.04, *Laporan Singkat Bank Indonesia Tjabang Kediri Pada Rapat Kerdja Pemimpin2 Tjabang Pada Tanggal 24 Maret s/d 29 Maret 1969* (Djakarta: bank Indonesia, 1969).

_____. *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri Dalam Konperensi Kerja di Djakarta Tanggal 4 s/d 8 Mei 1965* (Djakarta: Bank Indonesia*)*.

_____. *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*

Arsip BI KPw Kediri, "Surat Keterangan Direktorat Djenderal Keuangan No. Ket-080/DDK/II/4/72 tanggal 19 April 1972".

Arsip Koleksi Bank Indonesia, "Vertrouwelijk Brieven Kediri 1459, No. 100/23 geheim: President & Directeuren De Javasche Bank Batavia aan De Agent DJB Kediri 20 Januari 1928".

_____. "Vertrouwelijk Brieven Kediri 1459: Soerat Tan Tiong Him, 28 November 1927".

_____. "Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan President & Directeuren De Javasche Bank Batavia 28 Mei 1928".

_____. "Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan President & Directeuren De Javasche Bank Batavia 28 Mei 1923".

_____. "Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan Pres. & Directeuren De Javasche Bank Batavia, No. 96/14 Vertrouwelijk, 10 Agustus 1923".

_____. "Vertrouwelijk Brieven Kediri: President & Directeuren De Javasche Bank Batavia aan De Agent DJB Kediri 20 Oktober 1927".

_____. "Vertrouwelijk Brieven Kediri: Vertrouwelijk Brieven Kediri: aan Pres. & Directeuren De Javasche Bank Batavia, No. No.100/18 geheim, 5 Desember 1927".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 21 Januari 1949, No. 121/2".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 24 Januari 1949, No. 121/3".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 2 Februari 1949, No. 121/4".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 8 Februari 1949, No. 121/6".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1 Vertrouwelijk".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 18 Januari 1949, No. 121/8 Vertrouwelijk".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 4 April 1949, No. 122/8 Vertrouwelijk".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 8 Februari 1949, No. 121/6". Bijlage.

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 20 Januari 1949, No. 121/1 Vertrouwelijk".

_____. Brieven Vertouwelijk 1462, "De Agent van De Javasche Bank, H.G. Nauta aan President en Directeuren De Javasche Bank Batavia, 24 Januari 1949, No. 121/3".

Arsip Koleksi BI KPw Kediri, "Laporan Pengurus KBPR-Kandat kepada Pimpinan Bank Indonesia Kediri Perihal Mulai Melaksanakan Kegiatan Usaha Bagi KBPR Kandat tanggal 29 Februari 1992".

Arsip Nasional Republik Indonesia, No. Inventaris 2571, Koleksi Arsip Kabinet Perdana MenteriRI Tahun 1950-1959, "Surat Sekjen Kementerian Kemakmuran kepada Semua Menteri RIS dan RI 8 Agustus 1950 mengenai Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Milik Musuh Sekutu. Berkas mengenai pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia"; Wasino, dkk. *Sejarah Nasionalisasi.*

_____. "Pendaftaran Orang Indonesia Terkemoeka Jang Ada di Djawa D.357."; Tentang para bupati Kediri Jaman Belanda hingga tahun 1830-1930 dapat ditemukan dalam, Heather Sutherland, "Notes on Java's Regent Family Part II, *Indonesia.*

_____. Koleksi Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No. Inventaris 1067: "De Administratur Djengkol kepada Kepala Bg Staf "K" d/p Sekretariat Perdana Menteri Tanggal 4 Januari 1952".

Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1960 – 1965*. Lihat pula Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Pembukaan 1959 – 1960*.

_____. *Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965*.

_____. *Report of the Governor of the Bank Indonesia for the Financial Year 1959-1960* (Djakarta: Bank Indonesia).

Bank Negara Indonesia (Unit I), *Laporan Tahun Pembukuan 1968*

_____14 Agustus 1941

_____. 1946, *35 Years bank Negara Indonesia 1946 5 Juli 1946 –1981* (Jakarta: 1981).

Bataviaasch nieuwsblad 20 Juni 1923

Disbudpar Kabupaten Kediri, *Profil Kebudayaan Informasi Nilai-nilai Budaya dan Legenda Kabupaten Kediri*, 2010.

Djati, Tidor Arif T. dkk. 2013. *Kebijakan Perkebunan di Jawa Timur Masa Hindia Belanda.* Surabaya: Seri Naskah Sumber Arsip No. 15, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Fasseur, Cees. 1992. *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch and the Cultivation System.* Ithaca: Cornell University Press.

Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Amsterdam: J.H. de Bussy, 1940.

Koleksi Arsip Bank Indonesia No, Inventaris:3234: Stukken Inzake de Nationalisatie van De Javasche Bank, 1951-1952,

Landbouwatlas van Java en Madoera (Weltevreden: Department van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1926).

Melangkah ke Depan, dengan Kearifan Masa Lalu: Bank BNI 50 Tahun Emas (Jakarta: PT. Bank Negara Indonesia, 1996).

Nota Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Tahun 2019 dari Bapak Djoko Raharto kepada Bapak Musni Hardi K.A

Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid I (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989)

Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994*, Jilid IIA (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989)

Pemda Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993-1994,* Jilid III (Kediri: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, 1989)

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri, *Rencana Pembangunan Lima Tahun (Kelima) Tahun 1989-1990-1993/1994*, Non-publikasi, 30 Maret 1989

Pemerintah Kabupaten Kediri, "Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993/1994", *Laporan IIB* (Kediri: Pemerintah Kabupaten Kediri, 1989).

Provinsi Jawa Timur, *Pembangunan Lima Tahun di Provinsi Jawa Timur 1969-1988* (Surabaya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 1999)

R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Masa Peperangan*, Laporan tidak terbit (Arsip Bank Indonesia).

_____. *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri* (Jakarta: Arsip BI, 1990).

R. Soeparto Wignjasubrata, *Laporan Pemimpin Tjabang Kediri* (Djakarta: Arsip Bank Indonesia, 1965).

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, Eerste Gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Nederlandsch-Indie en Bijlagen. Batavia: Landsdrukkerij, 1909.

Santoso, R.H, 1990, *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri*, Jakarta: Arsip BI.

Sartono Kartodirdjo, dkk. Memori Serah Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan Tanah Kerajaan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia,1978,

Sejarah Bank Indonesia: Kelembagaan Periode 1953-1959.

Surat Edaran No. 5/106 Rupa-Rupa tanggal 16 November 1972 yang menyampaikan Salinan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/26/KEP/UP/ tanggal 25 Oktober 1972 tentang Klasifikasi Kantor-Kantor Cabang Bank Indonesia

Surat Edaran No. 9/12/INTERN tanggal 30 Maret 2007 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap I

Surat Edaran No. 14/10/INTERN tanggal 2 April 2012 tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan Kerja dan Unit Kerja di Bank Indonesia

Surat Kabar dan Majalah

Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 15 Januari 1936.

_____. 13 Februari 1895.

Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1923

_____. 16 Januari 1940.

De Express, 23 Maret 1922.

De locomotief 22 April 1936

De Indische Courant, 24 Maret 1922

_____. 10 September 1937

_____. 18 September 1922.

_____. 25 Juli 1928.

_____. 8 Mei 1929.

_____. 13 Maret 1933.

_____. 7 November 1934.

_____. 19 November 1934

_____. 13 November 1934.
_____. 24 November 1934.
_____. 20 Desember 1934.
_____. 17 Januari 1935.
_____. 26 Juli 1935.
_____. 12 November 1935.
_____. 20 Februari 1937.
_____. 1 September 1937.
_____. 10 September 1937.
_____. 27 September 1937.
_____. 25 Februari 1938.
_____. 16 Februari 1940.
_____. 23 Februari 1940.
_____. 21 Februari 1942.
De Indische Mercuur, 25 April 1928.
_____. 8 Mei 1929.
De Kedirische Courant, 13 Januari 1928.
De Locomotief, 1 Agustus 1901.
_____. 23 Juli 1928.
_____. 25 Oktober 1934
_____. 13 Februari 1935.
_____. 1 Oktober 1937.
_____. 1 Maret 1940.
De Nieuwe Vorstenlanden, 26 Februari 1923.
De Sumatra Post, 28 Juni 1915.
_____. 24 April 1922.
_____. 29 September 1937.
Deli Courant, 9 April 1938.
Djawa Baroe, Edisi 2605 (1945)
Het Algemeen Handelsblad, 30 Maret 1938.
Het Nieuws van Dag, 23 Maret 1922.
Het Nieuws van den Dag voor Ned-Indie, 23 Juni 1923.
_____. 17 November 1934.
_____. 18 Juni 1935.
_____. 30 Juli 1935.
Het Nieuws van den Dag: Kleine Courant, 5 Maret 1891.
Het Vaderland, 24 Juni 1928.

Java Bode, 24 Mei 1954.

Kan Po, No. 1 Edisi Agustus 2602 (1942)

_____. No. 1 Edisi 10 Desember 2602 (1942)

_____. No. 14, II (3), 2603 (1943)

Merdeka, 9 Juli 1953.

Soerabaiasch Handelsblad, 2 Januari 1929.

_____. 4 Juli 1933.

_____. 17 Agustus 1933.

_____. 19 Januari 1934.

_____. 14 November 1934.

_____. 17 November 1934.

_____. 29 November 1934.

_____. 5 Mei 1937.

_____. 1 Oktober 1937.

_____. 15 April 1941.

Buku dan Artikel

Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Abubakar, Arlyana dkk. 2019. *Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan.* Jakarta: bank Indonesia Institute.

Allen, G.C. dan Audrey G. Donnithorne. 1957. *Western Enterprises in Indonesia and Malaya.* New York: Macmillan Company.

Anwar, M. Arsjad Thee Kian Wie., dan Iwan Jaya Azis (ed). 1992. *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ardhana, I Ketut. I Ketut Setiawan., dan Sulanjari. 2016. *Religi, Ritual, dan Sistem Kerajaan di Jawa Timur Berdasarkan Tinggalan Arkeologi dan Kesejarahan Masa Raja Erlangga.* Denpasar: Pusat Kajian Bali Universitas Udayana.

Asmara, Hendra (ed). 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei Untuk Menghormati 70 Tahun Sumitro Djojo Hadikusumo.* Jakarta: Gramedia.

Astuti, Meta Sekar Puji. 2008. *Apakah Mereka Mata-Mata?: Orang-Orang Jepang di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Aziz, M.A. 1955. *Japan's Colonialism and Indonesia.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Baudet, H. dan I.J. Brugmans. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Blink, H. 1907. *Nederlandsch Oost en West Indie, Geographisch en Economisch Beschreven II.* Leiden: E.J. Brill.

Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah.* Jakarta: Mizan.

Boomgaard, P. dan J.L. van Zanden. 1990. *Changing Economy in Indonesia, Vol 10: Food Crops and Arable Lands, Java, 1815-1942.* Amsterdam: Royal Tropical Institute.

_____. *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880.*

Booth, Anne. 1988. *Agricultural Development of a Frontier Region of Java.* Sydney: Allen and Unwin.

_____. William J. O'Malley., dan Anna Weidemann (ed.). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Broersma, R. 1912. *Besoeki: Een Gewest in Opkomst.* Amsterdam: Scheltema.

Budiman, Amen dan Onghokham. 1987. *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara.* Kudus: PT Djarum Kudus.

Buku "Sejarah Bank Indonesia Periode VI: 2000-2003, Bank Indonesia Pada Masa Reformasi.

Buku "Sejarah Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil" yang diterbitkan tahun 2001 oleh Biro Kredit, Bank Indonesia

Clemens, A., J. Th. Lindblad., dan J. Touwen. 1992. *Changing Economy in Indonesia, Vol 12b: Regional Patterns in Foreign Trade, 1911-1940.* Amsterdam: Royal tropical Institute.

Creutzberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Cuypers, E. 1927. *Nederlandsch Indië Oud & Nieuw*.

_____. *Nederlandsch Indië Oud & Nieuw* (NIHON – Th.1913-1916)

Darsono, dkk. 2016. *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

_____. dkk. 2017. *Berjuang Dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera.* Jakarta: Bank Indonesia Institute.

De Boer, A.J. 1978. *Sugarcane Production and the Sugar Industries in Asia.* Tokyo: Asian Productivity Organization.

De Bree, L. 1928. *Gedenkboek van De Javasche Bank 1828-24 Januari 1928, Deel II.* Weltevreden: G. Kolff & Co.

De Vries, Egbert. 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia.

De Yong, L. 2002. *The Collapse of a Colonial Society: The Dutch in Indonesia during the Second World War.* Leiden: KITLV Press.

Dick, Howard et.al. 2002. *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-200.* Honolulu: University of Hawai'I Press.

Dick, Howard. James J. Fox., dan Jamie Mackie (ed). 1997. *Pembangunan Yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Djie, Liem Twan. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi.* Jakarta: PT Gramedia dan Perwakilan KITLV.

Djiwandono, J. Soedradjad dkk. 2005. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1949* Jakarta: Bank Indonesia.

_____. dan Binhadi et.al (ed). 2005.*Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959 – 1966, Bank Indonesia Pada Masa Ekonomi Terpimpin.* Jakarta: Bank Indonesia.

Djojohadikoesoemo, Margono. 1970. *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis.* Jakarta: Indira.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Profesor Sumitro Mengenang Masa Lalu.* Jakarta.

_____. 1989. *Kredit Rakyat di Masa Depresi.* Jakarta: LP3ES.

Djumhana, Muhammad.1996. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

DM, Abhisam. Hasriadi Ary dan Miranda Harlan. 2012. *Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek.* Jakarta: Penerbit Kata-Kata.

Elson, R.E. 1994. *Village Java under the Cultivation System 1830-1870.* Sydney: Allen and Unwin.

Ertsen, Maurits Willem. 2005. *Prescribing perfection. Emergence of an engineering irrigation design approach in the Netherlands East Indies and its legacy 1830 – 1990*. Rotterdam: Optima Grafische Communicatie.

Fowler, John A. 1923. *Netherlands East Indies and British Malaya: A Commercial and Industrial Handbook*. Washington: Government Printing Office.

Furnivall, J.S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy.* Cambridge: Cambridge University Press.

Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia.* Berkeley: University of California Press.

_____. 1963. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Town.* Chicago: The University of Chicago Press.

_____. 1965. *The Social History of an Indonesian Town.* Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

_____. 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa.* Jakarta: Grafiti Pers.

Glassburner, Bruce (ed). 1971. *The Economy of Indonesia: Selected Readings.* Ithaca: Cornell University Press.

Gooszen, Hans. 1999. *A Demographic History of the Indonesian Archipelago 1880-1942.* Leiden: KITLV Press.

Gunawan, Restu. (ed). 2008. *Sungai sebagai Pusat Peradaban*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah.

Hagen, J. 1917. *De Koffiecultuur.* Haarlem: Tjeenk Willink.

Hall, C.J.J. dan C. van de Koppel (ed). 1946. *De Landbouw in den Indischen Archipel.* The Hague: W. van Hoewe.

Ham, Djie Ting. 1926. *De Algemene Banken in Ned-Indie.* Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.

Henley, David. 1996. *Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies.* Leiden: KITLV Press.

Hartono, Noek. 1976. *Bank Indonesia Sejarah lahir dan Pertumbuhannya.* Jakarta: Bank Indonesia.

_____. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia, Vol. 1.* Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya.

Higgins, Binjamin. 1957. *Indonesia's Economic Stabilization and Development.* New York: Institute of Pacific Relations.

Hill, Hal. 1988. *Foreign Investment and Industrialization in Indonesia.* Singapore: Oxford University Press.

Hulswit, M.J. 1922. *NederlandschIndie Oud & Nieuw*.

_____. 1988. *Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Murai Kencana.

Indisch Verslag 1935 Vol II. Batavia: Landsdrukkerij.

_____. *1935,* Vol I.

_____. *1939 Vol II.* Batavia: Landsdrukkerij.

Irna H.N. Hadi Soewito. 1994. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan.* Jakarta, Grasindo.

Joint Publications Research Service. 1968. *Japanese Military Administration in Indonesia.* Washington: US Department of Commerce.

Kahin, George McT. 1970. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* New York: Cornell University Press.

Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.* Jakarta: Sinar Harapan.

Kartoatmodjo, M.M. Sukarto. 1985. "Sekitar Masalah Sejarah Kadiri Kuna" *Hari Jadi Kediri.* Kediri: Lembaga Javanologi dan Universitas Kadiri.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Surjo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta: Aditya Media.

Kartodirdjo, Sartono et.al. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II.* Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta: PT Gramedia.

Kocht, L. 1934. *Cassaveselectie.* Wageningen: Veenman.

Koleksi Perpustakaan P3GI Pasuruan, Jaarboek voor Suikerfabriekanten op Java jaargang 1913/1914

Kramer, P.J.S. 1950. *Koffie.* Chronica Naturae, 106, 6

Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____. 2017. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura 1850-1940.* Yogyakarta: IRCiSod.

Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa.* Jakarta: Grasindo & Yayasan Karti Sarana.

_____. dan Mitsuko Nanke. 2018. *Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kusuma, Erwien. 2014. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indoensia.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Leirissa, R.Z. G.A. Ohorella dan Yudha B Tangkilisan. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Lindblad, J. Thomas. (ed.). 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru.* Jakarta: LP3ES.

_____. (ed.). 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* (Nawiyanto, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lloyd, Grayson and Shannon Smith (ed). 2001. *Indonesia Today-Challenges of History.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa Silang Budaya, Vol 2: Jaringan Asia.* Jakarta: PT Gramedia.

Mackie, J.A.C. 1963. *Sedjarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern.* Djakarta: PT Pembangunan.

Maddison, Angus dan Ge Prince (eds). 1989. *Economic Growth in Indonesia, 1820-1940.* Dordrecht-Holland: Foris Publications.

Makagiansar, M. (ed). 1965. *Research di Indonesia 1945-1965.* Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia.

Margana, Sri dkk. 2010. *Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan dari Masa Kolonial sampai Reformasi.* Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Morren, F.W. 1896. *Werkzaamheden op eene Koffie Onderneming.* Amsterdam: J.H. de Bussy.

Maschut, H.A. 2003. *Dinamika Pembangunan Kota Kediri: Himpunan Laporan Wali Kota.* Malang: Pustaka Bayan.

Mubyarto dan Daryanti. 1991. *Gula: kajian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta: Aditya Media.

Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 2: Diplomasi Atau Bertempur.* Disjarah-AD-Angkasa.

_____. 1982. *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 1: Kenangan Masa Muda.* Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Nawiyanto. 2010. *Matahari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang-Cina di Jawa Pada Masa Krisis 1930-an dan 1990-an.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

_____. 2019. *Perekonomian Keresidenan Besuki Masa Pendudukan Jepang.* Yogyakarta: Laksbang Pressiondo.

Nederlandsch-Indie. 1922. *Uitkomsten der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling, Deel II.* Batavia: Drukkerijen Ryugrok & Co.

Notosusanto, Nugroho. 1979. *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

_____. 1981. *30 Tahun Indonesia Merdeka.* Cet. Ke-5. Jakarta: PT Intermasa.

Oey Beng To. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia 1945 - 1958 Jilid 1.* Jakarta: LPPI.

Ohorella, G.A. Restu Gunawan., dan Suryo Haryono. 2001. *Penulisan Sejarah Lokal: Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada Masa Perang Kemerdekaan.* Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional: Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.

Paulus, J. 1923. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* (Vol. 1.). Leiden: Martinus Nijhoff.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN, Balai Pustaka.

Post, Peter. and E. Touwen-Bouwsma (ed). 1997. *Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities.* Leiden: KITLV Press.

_____. dan William H. Frederick, *et al* (ed). 2010. *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War.* Leiden: E.J. Brill.

Postma, T.F.H. J.W. d'Hane dan J.A. von Meijenfeldt. 1946. *De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche Bezetting.* Batavia: Mededeelingen van Het Departement van Economische Zaken in Nederlandsch-Indie.

Presiden Sukarno: Soal Hidup atau Mati. Almanak Pertanian 1953. Jakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian.

Raap, Oliver Johannes. 2017. *Kota di Jawa Tempo Doeloe.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Raffles, Thomas Stamfford. 1978. *The History of Java, Vol. 1.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

_____. 2008. *The History of Java.* Yogyakarta: Penerbit Narasi.

Rahardjo, M. Dawam dkk. 1995. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa.* Jakarta: LP3ES.

Rahardjo, M. Dawam dan Aswab Mahasin, dkk. 1995. *Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Rahardjo, Pamoe. 1984. *Tentara PETA (Pembela Tanah Air): Mengawal Proklamasi 17 Agustus Mulai Rengasdengklok.* Jakarta: Yayasan Peta.

Rahman, Fadly. 2016. *Jejak Rasa Nusantara; Sejarah Makanan Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Reid, Anthony J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Republik Indonesia: Propinsi Djawa Timur. 1953 Jakarata: Kementerian Penerangan.

Retnandari, N.D. dan Moeljarto Tjokrowinoto. 1991. *Kopi: Kajian Sosial Ekonomi* Yogyakarta: Aditya Media.

Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Robinson, Richard. 1987. *Indonesia: The Rise of capital.* Wellington: Allen and Unwin in association with Asian Studies Association of Australia.

_____. 2009. *Indonesia: The Rise of Capital in Indonesia.* Kuala Lumpur: Equinox.

Rohman, Agus Saefur. 2018. *Ayo Berwisata ke Kediri.* Surabaya: Mandiri Publishing.

Rosidi, Ajip. 1986. *Sjafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah Swt.* Jakarta: Idayu Press.

Rush, James R. 1990. *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Interprises in Colonial Indonesia 1860-1910.* Ithaca: Cornell University Press.

_____. 2012. *Candu Tempo Dulu.* Jakarta: Komuitas Bambu.

Sajogyo dan William L. Collier. 1986. *Budidaya Padi di Jawa.* Jakarta: PT Gramedia dan Yayasan Obor Indonesia.

Santoso, R. Hardjo. 1990. *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Kediri.* Jakarta: Arsip BI, 1990.

Sasmita, Nurhadi. 2018. *Mesin Uang di Pedalaman: Industri Perkebunan di Blitar,* 1900-1942. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Sato, Shigeru *War, Nationalism and Peasant: Java under the Japanese Occupation, 1942-1945.* Sydney: Allen and Unwin, 1994,

Sayaka, Bambang dan Sahat M. Pasaribu. *Pembiayaan Usaha Tani Menunjang Diversifikasi Produksi Pangan.* Jakarta: Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, n.d.

Setiawan, H. 2002. *Negara Madiun?*. Tanpa Kota Terbit: FUSPAD

Schutte, G.J. (ed). 1994. *State and Trade in the Indonesian Archipelago.* Leiden:KITLV Press.

Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang yang Kalah.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Simorangkir, Iskandar. (ed). 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

Siswoputranto, P.S. 1978. *Perkembangan Teh, Kopi, Cokelat Internasional.* Jakarta: PT Gramedia.

Soepangkat Martodarsono. 1958. *Sepuluh Tahun Suka Duka dengan Padi Bengawan di Banjuwangi*. *Pertanian,* 1, 9.

Soepeno, Sri Saadah. M.A. Dewi Inderawati dan Syamsidar. 1993. *Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja: Kasus Pabrik Rokok di Jawa Timur.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sudarno dkk. 1993. *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950.* Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyama, Shinya dan Milagros C. Guerrero (ed). 1994. *International Commercial Rivalry in Southeast Asia in the Interwar Period.* New Haven: Yale Southeast Asian Studies.

Sukarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi,* Djilid Pertama. Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan, Jombang-Kediri 1965-1966.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Sulistyo, Hermawan. 2003. *Palu Arit di Ladang Tebu.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Sumaryanto dan Effendi Pasandaran. *Keragaan Kredit Usaha Tani Dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan.*

Suryadinata, Leo (ed). 2006. *Southeast Asia's Chinese Bussinesses in an Era of Globalization.* Singapore: ISEAS.

Suyami, Taryati dan Sumarno. 2015. *Kajian Kebencanaan Dalam Naskah Pajeblugipun Redi Kelud.* Yogyakarta: Kepel Press.

Thee Kian Wie (ed). 2005. *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan Freedom Institute.

Tim Penulis Bank Indonesia. 1965. *Menudju Bank Berdjoang Tunggal.* Jakarta: Bank Indonesia Bagian Hubungan Masyarakat.

_____. 2007. *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia.* Jakarta: Museum Bank Indonesia

Tim Telaga Bakti Nusantara. 1997. *Sejarah Perkeretaapian Indonesia.* Bandung: Penerbit Angkasa.

Turner, Jack. 2011. *Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme.* Jakarta: Komunitas Bambu.

Twang Peck Yang. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan.* Jogjakarta: Niagara.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Van Anrooij, Francien. 2014. *De Koloniale Staat (Negara Kolonial) 1854-1942.* Leiden: Nationaal Archief.

Van Broek, P.W. Palmer . 1904. *De Geschied van het Rijk Kediri.* Leiden: E.J. Brill.

Van der Eng, Pierre "Food Supply in Java during War and Decolonisation 1940-1950", *MPRA*

Van der Eng, Pierre. 1992. *The Real Domestic Product of Indonesia, 1880-l 989.* Explorations in Economic History, 29.

_____. 1996. *Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880.* Houndsmill: Mamillan.

Van der Meer, N.C. van Setten. 1979. *Sawah Cultivation in Ancient Java: Aspects of Development during the Indo-Javanese Period, 5th to 15th Century.* Canberra: Orintal Monograph Series No. 22, Faculty of Asian Studies, The Australian National University.

Van Deventer, C.Th. 1904. *Overzicht van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Van Hall, C.J.J. dan C van de Koppel (ed). 1949. *De Landbouw in de Indische Archipel.* 's-Gravenhage: W van Hoeve.

Van Zanden, Jan Luiten dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Vink, G.J. 1984. *Dasar Dasar Usaha Tani di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Vissering, G. dan Bloementhal. 1927. *Die Clinghe*.

Wasino, dkk. 2014. *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional.* Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Whitten, Tony. Roehayat Emon Soeriaatmadja., dan Soeraya Afiff. 2000. *The Ecology of Java and Bali.* Singapore: Periplus.

Wibisono, Nuran. 2013. *Dunia Iskandar: Tembakau, Humanisme, Kepemimpinan.* Jakarta: Indonesia Berdikari.

Wijaya, Tauhid. (ed). 2012. *Brantas dari Pesantren Hingga Lokalisasi (Laporan Jurnalistik Ekspedisi Brantas 2 Radar Kediri.* Kediri: Intermedia Pers.

William, Lea. E. 1960. *Overseas Chineses Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movements in Indonesia 1900-1916*. Glencoe, Illinois: The Free Press.

Wirodihardjo, Saroso. 1951. *De Contingenteeringspolitiek en Hare Invloed op de Indonesische Bevolking.* Djakarta: Indira.

Zentgraaff, Henri Carel. 1928. *Op het Idjen-Hoogland.* Tanpa tempat: Tanpa Penerbit, 1926.

Zorab, A.A. 1954. *De Japanse Bezetting van Indonesie en Haar Valkenrechtelijke Zijde.* Leiden: Leiden University Press.

Artikel Jurnal

Agustin, D. & Liana, C. 2020. *Dinamika Perkebunan Ngrangkah ke Perkebunan Ngrangkah-Soembar Glatik di Kediri Tahun 1891-1932. Avatara, 9(2).*

Algemeen Handelsblad, 17 Oktober 1949.

Arnez, M. 2009. *Tobacco and Kretek: Indonesia Drugs in a Historical Change. ASEAS: Austrian Journal of Southeaat Asean Studies,* 2(1). 56.

Basundoro, P. 2012. *Penduduk dan Hubungan antaretnis di Kota Surabaya pada Masa Kolonial. Jurnal Paramita, 22(1).* 3.

Damaya, M.W. & Santoso, E.B. 2016. *Perkebunan Cengkih Branggah Banaran Kabupaten Blitar Tahun 1961-1998. Verleden: Jurnal Kesejarahan, 9(2)*. 143.

Faizin, M. & Kesuma, G. 2017 *Dinamika Pabrik Gula Meritjan di Kediri Tahun 1930-1945. Verleden: Jurnal Kesejarahan, 11(2)*.

Fathoni, A. & Husain, S. 2020. *Pelaksanaan Opiumpacht: Monopoli Perdagangan Opium Melalui Perantara Bandar di Keresidenan Kediri, 1833-1900*. *Lembaran Sejarah, 16(1).*

Geoogste Uitgestrektheden en Productie van voornaamste Voedingsgewassen op Java en Madura 1937-1946. Jakarta: Centraal Kantoor voor Statistiek, 1947.

Gonarsah, I. 1998. *Kebijakan Tata Niaga Cengkih Dalam Perspektif: Tinjauan Teoretis dan Temuan Empiris. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, XLVI(1)*. 37.

Gunawan, A.S., Djamhur Hamid, Maria Goretti W., & Endang N.P. 2016. *Analisis Pengembangan Pariwisata terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat: Studi pada Wisata Religi Puhsarang Kediri. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 32(1)*. 2

Khotimah, A.H. & Dwikurniarini, D. 2019. *Perkembangan Pabrik Gula Pesantren di Kediri 1935-1956. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah FIS Universitas Negeri Yogyakarta, 4(2).* 239.

Knight, G. R. 2012. *From Merdeka to Massacre: The Politics of Sugar in the Early Years of the Indonesian Republic. Journal of Southeast Asian Studies, 43(3)*. 414.

Kristyowidi, B.I. 2020. *Multikulturalisme Dalam Terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie 1916-1953. Kenosis, 6(1).*

Maeno, F & Nakada, S. et al. *2019. Eruption Pattern and a Long-Term Magma Discharge Rate over the Past 100 Years at Kelud Volcano, Indonesia. Journal of Disaster Research*, *14(1).* 28.

Muryantoro, H. 2011. *Kediri Pada Masa Revolusi 1945-1949. Jurnal Patrawidya, 12(1)*. 63.

_____. 2008. Gereja Katolik Santa Maria Puh Sarang dalam Perjalanan Sejarah 1936-1986. Jurnal *Patrawidya*, 9(3). 531.

Nawiyanto & Sasmita, N. 2018. *The Eruption of Mount Kelud in 1919: Its Impact and Mitigation Efforts. Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (ASSEHR), *Volume 208 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS).*

Nawiyanto. 2013. *The Politics of Food and Food Security during Indonesia's Old Order. Lembaran Sejarah, 10(1)*. 67.

Prabowo, Y.E. & Rahayu, D.I.S. 2018. *Ubi Kayu di Keresidenan Kediri Pada Awal Abad Ke-20 Hingga 1940. Verleden: Jurnal Kesejarahan, 13(2).* 180.

Pradana, H.R. 2018. *Perkembangan Kediri Stoomtram Maatschappij pada Tahun 1895-1930. Avatara, 6(2).* 210.

Ridhoi, R. & Adlani, M.N. 2020. *Pokok Ngudud Keretek: Kebiasaan Ngudud dan Munculnya Pabrik Keretek di Kediri Jawa Timur 1970-an. Jurnal Handep, 4(1).* 5.

Sukarman, W. 2005. *Upaya Membentuk Perbankan Nasional: Peran Bank BNI pada tahun 1950an. Lembaran Sejarah*, *8(2)*. 53.

Sutherland, H. 1974. *Notes on Java's Regent Families: Part II. Indonesia, 17.* Apr.

Swardana, A., Tjahjono, B., & Barus, B. 2017. *Studi Geomorfologi Kabupaten Kediri dan Pemetaan Bahaya dan resiko Aliran Lahar Gunungapi Kelud. Bulettin Tanah dan Lahan, 1(1).* 11.

Terra, G.J.A. 1958. *Farm System in Southeast Asia. The Netherlands Journal of Agriculture Science, 6, 3*. 165-166.

Thee Kian Wie. 2010. *Understanding Indonesia: The Role of Economic Nationalism. Journal of Indonesian Sciences and Humanities*, *3*. 59.

Van der Eng, P. 1998. *Cassava in Indoensia: A Historical Re-Appraisal of an Enigmatig Food Crop. Southesat Asian Studies, 36(1)*. 6.

Van der Eng, P. 2002. *Bridging a Gap: A Reconstruction of Population Patterns in Indonesia 1930-1961. Asian Studies Review, 26(4).* 499.

Van der Eng, P. *Market Responses to Climete Stress: Rice in Java in the 1930s. Australian Economic History Review*, *50(1).* 66.

Wardodjo, W.W. 2018. *Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949. Indonesian Historical Studies*, *2(2).* 103.

Wiretno, E.B.S. 2017. *Kediri-Syuu Masa Pendudukan Jepang: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang terhadap Kehidupan Sosial Tahun 1942-1945. Verleden: Jurnal Kesejarahan*, *10(1).* 24-25.

Wisnu. 2019. *Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri: The Agent of Javanese Culture*. *Paramita: Historical Studies Journal, 29(1)*.

Wolfgang, Franke, dkk. 1988. *Chinese Epigraphic Materials in Indonesia*. *Java* 2(2). Singapore: South Seas Society.

Yanuarita, H.A. 2018. *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi tentang Pengembangan Wisata Gua Selomangleng di Kota Kediri. Jurnal Ilmu Administrasi*. 138-139.

Artikel Internet

Bank Indonesia, "Kantor Perwakilan BI Kediri M. Choirur Rafiq", https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/Pages/Kantor-Perwakilan-BI-Kediri.aspx, diakses pada 19 Mei 2022

Chusna, Asmaul, "Kepala BI Kediri Dikukuhkan". 7 Februari 2020. Jawa Timur: jatim.antaranews. diakses melalui https://jatim.antaranews.com/berita/349934/kepala-bi-kediri-dikukuhkan, diakses pada 19 Mei 2022

Suwarno, Dodik, "Halal Bihalal bersama BI Cabang Kediri Veteran RI", 14 Juli 201, https://www.plimbi.com/news/168098/halal-bihalal-bersama-bi-cabang-kediri-veteran-ri, diakses pada 19 Mei 2022

Posmetro, "Kepala perwakilan Kepri berganti", 24 Januari 2020, ttps://posmetro.co/2020/01/24/kepala-perwakilan-bi-kepri-berganti/, diakses pada 20 Mei 2022

Kediri Nusantara, "Selamat Datang Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Musni Hardi Kusuma Atmaja", https://kedirinusantara.com/15/03/2019/selamat-datang-kepala-perwakilan-bank-indonesia-kediri-musni-hardi-kasuma-atmaja/, diakses pada 20 Mei 2022

Kurniawan, Arif, "Kepala BI Kediri Berganti, Deputi Gubernur BI Siapkan Tiga PR", 15 Maret 2019, https://www.bangsaonline.com/berita/55683/kepala-bi-kediri-berganti-deputi-gubernur-bi-siapkan-tiga-pr, diakses pada 20 Mei 2022

Sandy, Kunthi Fahmar, "BI Kediri Dorong Transaksi Non Tunai". 27 Maret 2015, https://ekbis.sindonews.com/berita/982121/178/bi-kediri-dorong-transaksi-non-tunai

Koloniale Monumenten, Koningin Wlhelmina Kediri 1939, www.kolonialemonumenten.com, diakses pada 22 Mei 2022

Sejarah Berdirinya Pabrik Gudang Garam di Kediri https://m.liramedia.co.id/read/cikal-bakal-pt-gudang-garam-tbk-si-raksasa-rokok-dari-kediri, diakses pada 22 Mei 2022

"Asal Usul Tahu Kediri yang Mendunia", dalam https://www.goodnessfromingindonesia.id, diakses pada 21 Juni 2021).

"Kenapa disebut sebagai Tahu Takwa,?" dalam https://nusadaily.com, diakses pada 20 Juni 2021

"Profil PT BPR Dhaha Ekonomi", https://bprkediri.wixsite.com/dhahaekonomi/profil, diakses pada 18 Agustus 2021.

"Sejarah Perusahaan", http://www.bprberkahpakto.co.id/, diakses pada 18 Agustus 2021

Arsip Koleksi BI KPw Kediri, "Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-185/Km.13/1991 tertanggal 8 Juli 1991"; Sumber lain menyebutkan bahwa memulai operasi dengan status koperasi, BPR Artha Samudera pada tahun 2006 berencana mengubah status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. BPR Artha Samudera Indonesia. Status baru sebagai PT mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan nomor AHU-39872.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009. "PT. BPR Artha Samudera Indonesia", **https://bprarsindo.co.id/Profil**, diakses pada 18 Agustus 2021; ".

Aulia Akbar**, "**Dulu Usaha Rumahan Kini Laba Triliunan, Ini Cerita Gudang Garam", https://lifepal.co.id/media/gudang-garam-jadi-raksasa/, diakses pada 12 Juni 2021.

Bangunan-bangunan tersebut sampai saat ini (2021) masih berdiri dan menjadi bangunan Cagar Budaya yang dapat dilacak di sekitar Jalan KDP. Slamet, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lihat, radarkediri.jawapos.com/read/2021/03/11/11, diakses pada 21 Maret 2021

Bank Indonesia, "Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1999-2005" https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx, diakses pada 21 Maret 2021

Bapersip Jawa Timur, "Pusaka Jawatimuran: Masjid Auliya'Setono Gedong, Kota Kediri" https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id, diakses pada 21 Maret 2021

Beberapa bangunan pabrik gula yang ditinggalkan Jepang di Keresidenan Kediri seperti: Pabrik Gula Merican, Pabrik Gula Tegowangi (Desa Bendo, Kecamatan Pare), Pabrik Gula Karawasan, Pabrik Gula Pesantren, Pabrik Gula Purwoasri, Pabrik Gulo Minggiran, Pabrik Gulo Ngadirejo. Diunduh dari amp-tirto.id.cdn.ampproject.org, 1 Mei 2021. Atau lihat "Ekspedisi Kali Serinjing, Telusur Sejarah Terbentuknya Kediri, dalam radarkediri.jawapos.com, diakses pada 1 Mei 2021

BI Kediri Bantu Pembangunan Embung Tadah Hujan di Desa Kebon Rejo – Super Radio (www.superradio.id/4434), diakses pada 1 Mei 2021

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Timur Bulan Desember 2008, diambil data khusus kota perhitungan IHK di wilayah kerja

Kantor Bank Indonesia Kediri, yaitu Kota Kediri dan Kota Madiun.(BPS Provinsi Jawa Timur) diakses pada 21 Maret 2021

Brug Oer den Brantas te Kediri sampai saat ini (2021) dikenal sebagai Jembatan Lama Kediri, dan jembatan ini dijadikan sebagai benda cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. radarkediri.jawapos.com/read/2021/03/11/11, diakses pada 21 Maret 2021

Data Perkembangan Inflasi Tahunan Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (www.jatim.bps.go.id), diolah untuk Kota Kediri dan Kota Madiun dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur dan inflasi Nasional, diakses pada 21 Maret 2021

Fikri, "PT Gudang Garam Tbk", (https://fikrinm93.wordpress.com/2015/10/18/), diakses pada 21 Maret 2021

Jawa Timur Jadi Produsen Terbesar Telur Ayam Ras pada 2019 | Databoks (katadata.co.id)

Kabupaten Blitar Raih Penghargaan Terbaik 1 Kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020 Wilayah Jawa-Bali (blitarkab.go.id)

Kantor Afdeling Bank pada saat ini (2021) difungsikan sebagai Kantor Cabang BRI, Kediri. Lihat, radarkediri.jawapos.com/read/2021/03/11/11. Diunduh pada 21 Maret 2021.

Latif Kusairi, "Perang Memori dan Historiografi Indonesia: Studi Penyebutan Terowongan Neyama di Tulungagung Jawa Timur" Jurnal Widya Citra, Vol 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 40; Hendri F. Isnaeni "Terowongan Neyama Romusha", https://historia.id/urban/articles/terowongan-neyama-romusha-PRkO6/page/1 14 April 2012 diakses pada 1 Juni 2021

Publikasi BPS "Jawa Timur Dalam Angka 2021" yang diolah berdasarkan nominal PDRB 13 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Kediri, dibandingkan dengan nominal PDRB Jawa Timur. (BPS Provinsi Jawa Timur), diakses pada 1 Juni 2021

Putu Elmira. 6 Kampung Inggris yang Ada Di Indonesia diakses pada 28 Mei 2021 dalam https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4031145/6-kampung-inggris-yang-ada-di-indonesia-mau-coba-kursus-di-salah-satunya

Sejarah Berdirinya Kampung Inggris Pare Kediri. Diakses tanggal 28 Mei 2021 pada https://lenterakecil.com/kampung-inggris-pare-kediri/

Sejarah BPR Pare Artorejo http://bprartorejopare.com/tentang-kami/, diakses tanggal 18 Agustus 2021

Tabel distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, 2020, release Badan Pusat Statistik, sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (bps.go.id)

TPID Kota Kediri Tiga Kali Raih Penghargaan Terbaik se-Jawa Bali | beritajatim.com

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri, dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 28 Mei 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Bab IV tentang Pengelolaan Uang Rupiah, dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 28 Mei 2021

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 28 Mei 2021

Wawancara dengan Lauw Sing Hian (Cucu Mbah Kacung), dalam "Kediri Modern dikenal sebagai Kota Tahu; Inilah Orang Pertama Yang Membikinnya," (https://nusadaily.com), diakses pada 08 Juni 2021.

Wawancara Liem Djang Yen dengan detiksurabaya.com di Jl. Yos Sudarso Kediri, dalam "Mengungkap Rahasia di Balik Julukan Kota Tahu untuk Kediri," (https://news.detik.com), diakses pada 08 Juni 2021.

Website Resmi Pemerintah Kota Kediri (kedirikota.go.id), artikel "Walikota Kediri UMKM Virtual Expo 2020 yang Masuk Rekor Muri Indonesia" diakses pada 08 Juni 2021.

Zakaria, Nur. (2017, 14 Maret) "Pesta Terakhir Oei Tiong Ham. Orang terkaya Asia Tenggara Asal Semarang". https://poentjakweg.com, diakses pada 14 Februari 2022.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ayu, P.W. 2012. *Etnis Tionghoa, Tahu dan Kota.* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta).

Baroroh, S.N. 2015. *Peningkatan Sistem Produksi Gula Di Pabrik Gula Pesantren-Kediri Tahun 1890-1940*. (Tesis. Fakultas Ilmu Budaya).

Faizin, M. 2016. *Dinamika Pabrik Gula Mrican di Kediri Tahun 1938-1945*. (Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmua Budaya , Universitas Airlangga Surabaya).

Ilma, A. 2020. *Tahu Takwa Kediri Pada Masa Orde Baru (Perkembangan Tahu Takwa sebagai Identitas Budaya Etnis Tionghoa dan Kuliner Khas Kediri).* (Skripsi, Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusantara Kediri).

Indriyanto. 2015. *Menjadi Pusat Pelayaran dan Perdagangan Interregional: Pelabuhan Surabaya 1900-1940.* (Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada).

Ishmata, A. 2016. *Penggunaan Citra Tandem-X untuk Studi Potensi Genangan Dengan Prakiraan Debit Sungai Menggunakan Metode Rasional.* (Skripsi, Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya).

Ismail, J.D. 2018. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Kampung Inggris Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 1995-2014*. (Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember).

Jannah, I. 2017. *Analisis Produktivitas Pada Pabrik Tahu dengan Menggunakan Pendekatan Green Productivity: Studi Kasus UD. Gudange Tahu Takwa (GTT)*. (Skripsi, Jurusan Teknologi Industri Pertanian Unibra, Malang).

Mukaromah, S. 2000. *Analisis Manfaat Pemberian Usaha Tani Terhadap Peningkatan Pendapatan Petan di Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri 1998-1999.* (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

Nawiyanto. 2007. *Environmental Change in a Frontier Region of Java.* (PhD Thesis, The Australian National University).

Post, P. 1992. *Japanse Bedrijvigheid in Indonesie 1868-1942: Structurele Elementen van Japan's Economische Expansie in Zuidoost Azie.* (Disertasi, Vrije Universiteit).

Puspitasari, W.A. 2012. *Etnis Tionghoa, Tahu dan Kota: Terbangunnya Identitas Kota Kediri.* (Skripsi, Prodi Sosiologi, FISIP Universitas Sebelas Maret).

Saichurrahman, M. 2015. *Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri*. (Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga).

Sukaringtyas, Etty. 1991. *Dampak Sosial Industri Rokok PT Gudang garam Kediri Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Desa Blimbing dan Sidomulyo Kediri Tahun 1980-198.* (Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember).

Sutter, J.O. 1959. *Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institutions of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of of the General Elections.* (Ph.D. Thesis, Ithaca: Cornell University).

Utomo, D.M. 2019. *Etnis Tionghoa Kediri dalam Penerapan SBKRI 1969-1996.* (Skripsi, Prodi Ilmu Sejarah, FIB Universitas Airlangga, Surabaya).

Wawancara

Forum Diskusi Grup pada 17 Agustus 2021. Ahmad Buchori, Soebagijono, Sempa A.H. Sitepu.

Kesaksian Ir. Handinoto, M.T., dalam *Forum Group Discussion* pada tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan Sutaji (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

_____. Sujoto (87 tahun), Kediri, 22 Maret 2021.

_____. Theresia Titah, pedagang (82 tahun), Kediri 23 Maret 2021.

_____. Sutaji, Eks TRIP, Pensiuanan Guru (89 tahun), Kediri, 21 Maret 2021.

_____. Dwi Sunaryati (58 tahun), Kediri 28 Juni 2021.

_____. Supriono (60 tahun), Kediri 20 Juni 2021.

_____. Theresia Titah (82 tahun), 14 Agustus 2021.

_____. J. Harry Setiono (74 tahun), 15 Agustus 2021.

Perundang-undangan

Pasal Tambahan Undang-Undang No. 28 Tahun 1942.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Dewan Gubernur Intern No. 22/39/PADG INTERN/2020 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok D

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda yang dikenai nasionalisasi.

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan yang Dikenakan Nasionalisasi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 31*

Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 7.*

Surat Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/128/418.08/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan TP2DD Kabupaten Kediri.

Surat Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/116/419.033/2020 tanggal 7 September 2020 tentang TP2DD.

LAMPIRAN
DAFTAR NAMA KEPALA BI KEDIRI

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	L. G. Wiemans	1923 – 1925
2.	F. J. A. Blokbergen	1925 - 1936
3.	R. W. G. B. R. Wagner	1936 - 1937
4.	P. W. Bast	1937 – 1941
5.	H.G Nauta	1949
6.	J.G. Wallies de Vries	1949 - 1950
7.	L. Martijn	1950 - 1953
8.	J.G Spaan	1953 - 1957
9.	Soekarno	1957 - 1959
10.	R. Soejatno Soemardjo	1959 - 1961
11.	Achmad Sirod	1961 - 1963
12.	Soeparto Wignjasubrata	1963 - 1965
13.	Oesman Ibrahim	1965 - 1966
14.	M.A. Soerjadi	1966 - 1968
15.	Soeroto Dono	1969
16.	R. Hardjo Santoso	1969 - 1971
17.	Wahju Handojo	1971- 1974
18.	R. Masherman	1974 - 1975
19.	R. Soenoekarto Darsopanambang	1975 - 1977
20.	Purtomo	1977 - 1981
21.	Soediarto	1982 - 1985
22.	Jusup Kartadibrata	1985 - 1986
23.	Soediono	1986 - 1992
24.	Kokrosono Sadhan	1992 - 1996
25.	Nugroho Endropranoto	1996 - 1998
26.	Djoko Raharto	2014-2019
27.	Musni Hardi Kasuma Atmaja	2019 -2020
28.	Sofwan Kurnia	2020 – 2022
29.	M. Choirur Rofiq	2022 - Sekarang

SERI BUKU SEJARAH DAN HERITAGE KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

1. **BERJUANG DENGAN UANG MEMPERTAHANKAN DAN MEMAJUKAN REPUBLIK INDONESIA: SEMANGAT JUANG OTORITAS DAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA**

Sumatera timur pada abad ke-19 merupakan pusat perkebunan dengan komoditas bernilai jual tinggi. Namun, intensitas eksporimpor dalam perdagangan berimbas pada maraknya peredaran uang asing. Sejak masa kolonial, setidaknya ada sembilan mata uang asing yang beredar dan lebih populer dibanding mata uang gulden. Buku ini bercerita sejarah peredaran mata uang di sumatera timur yang tidak hanya dijadikan sebagai sekadar alat tukar, namun memberikan kita pemahaman baru bahwa uang sebagi alat perjuangan.

2. **MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI: DINAMIKA KOTA SURABAYA DAN JAWA TIMUR SEBAGAI PENYANGGA EKONOMI BANGSA**

Sejak ratusan tahun berdirinya Surabaya, kota ini telah menjadi daerah strategis, baik dalam perdagangan maupun pertahanan. Pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Surabaya dijadikan sebagai kota pertahanan, ditandai dengan berdirinya benteng serta pabrik senjata. Surabaya juga menjadi kota pertama bagi Belanda untuk mendirikan pabrik pencetakan uang logam di Nusantara. Buku berjudul "Membangun Infrastruktur, Memperkuat Ketahanan Ekonomi: Dinamika Kota Surabaya dan Jawa Timur sebagai Penyangga Ekonomi Bangsa" ini menjelaskan sejarah Perokonomian Kota Surabaya dan Jawa Timur serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di kota ini.

3. **MENGAWAL SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN: PERAN SAUDAGAR DALAM MEMAJUKAN RODA EKONOMI SUMATERA BARAT**

Buku "Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peran Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat" mengangkat sejarah perekonomian dan kisah perjuangan para saudagar Minang yang menjadi aktor ekonomi bersanding dengan pengusaha-pengusaha Belanda dan Tionghoa di Sumatera Barat. Perdagangan yang marak terjadi di Sumatera Barat sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Belanda. Pada masa klasik itu, Pantai Barat Sumatera mendatangkan komoditas-komoditas langka berkualitas, seperti kamfer, kemenyan dan emas. Kedatangan pedagang Arab, Tionghoa

dan Tamil membuka gerbang yang lebih luas bagi pedagang Minang untuk berjejaring dengan negeri luar dan semangat merantau.

4. MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT

Sebagai salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang luasnya seperlima pulau tersebut, Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke jalur perdagangan maritim dunia, yakni Selat Malaka dan Laut China Selatan. Berdasarkan kondisi demografisnya, perekonomian wilayah barat dari bumi Kalimantan ini digerakkan oleh jaringan perdagangan dari hulu ke hilir melalui wilayah pedalaman ke pesisir pantai. Karakteristik wilayah dengan sungai yang panjang, lebar dan dalam menjadi moda transportasi andalan, di samping keberadaan pelabuhan di pesisir pantai yang ramai disinggahi pedagang dan pelaut asing. Kekayaan hasil bumi dan tambang telah menjadi magnet yang mendatangkan para penambang dari Cina dan pedagang dari Eropa.

5. HARMONI DALAM PERBEDAAN: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA EKONOMI SOLO RAYA

Buku "Harmoni dalam Perbedaan: Bank Indonesia dalam Dinamika Ekonomi Solo Raya" ini merupakan hasil kajian terhadap sejarah ekonomi Solo yang sarat akan kearifan lokal. Buku ini sekaligus menjadi kontribusi Bank Indonesia melalui knowledge asset yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan pembangunan daerah yang didasari oleh kearifan lokal. Kehadiran buku ini juga sekaligus melengkapi keberadaan tangible asset dalam bentuk museum sebagai *heritage* eks Kantor De Javasche Bank Solo.

6. PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN

Makassar lekat dengan identitas sebagai pusat ekonomi maritim sejak berabad lalu, berkat keberadaan bandar niaga yang selalu ramai. Aktivitas perdagangan yang ramai mampu menstimulus perekonomian Makassar untuk berkembang menjadi yang paling maju di wilayah timur Nusantara. Untuk memperluas jaringan operasinya, DJB melebarkan sayap dengan membuka kantor-kantor cabang di seluruh Hindia Belanda, salah satunya di Makassar pada tahun 1864. Pertimbangan utama pembukaan De Javasche Bank Agentschap Makassar adalah keberadaan pelabuhan yang ramai, yang tentunya terjadi peredaran uang yang besar.

7. GELIAT KOTA BANDUNG: DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MODERN

Sejak awal pendiriannya, Kota Bandung telah menjadi pedoman dalam pengembangan dan perencanaan tata kota. Berada di wilayah pedalaman, letak geografis Kota Bandung telah mendukung kota ini yang sempat diusulkan sebagai ibu kota Hindia Belanda menggantikan Batavia pada masa kolonial. Bandung terus berbenah diri, pasca pengakuan kedaulatan, Bandung mendadak sibuk manakala kota ini dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Zaman terus berganti, Kota Bandung terus bertransformasi. Buku berjudul "Geliat Kota Bandung Dari Kota Tradisional Menuju Modern" menjabarkan sisi lain Kota Bandung dalam lintasan sejarah, mulai dari perekonomian Kota Bandung dan Jawa Barat serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di kota ini.

8. BERSINERGI DALAM KEISTIMEWAAN: PERAN BANK INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI YOGYAKARTA

Berada di jantung wilayah Jawa sekaligus sebagai pusat dari kebudayaan Jawa, Yogyakarta tampil begitu istimewa. Di bidang ekonomi, perkebunan tumbuh menjadi basis perekonomian Yogyakarta pada masa kolonial. Sempat menjadi ibu kota revolusioner Republik Indonesia di awal kemerdekaan, Yogyakarta memainkan peran penting sebagai lokasi yang tepat guna menyempurnakan organisasi dalam negeri. Keunikan kebudayaan dan kreativitas masyarakatnya telah berhasil mengubah perekonomiannya dari ekonomi kolonial perkebunan menjadi ekonomi lokal yang mandiri berbasis kerakyatan. Buku berjudul "Bersinergi Dalam Keistimewaan: Peran Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta"menguraikan sejarah perekonomian Yogyakarta serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di era kontemporer.

9. OEDJAN MAS DI BUMI SRIWIJAYA: BANK INDONESIA DAN *HERITAGE* DI SUMATRA SELATAN

Dikenal sebagai budaya maritim warisan Kerajaan Sriwijaya, Sumatra Selatan hadir dengan kekayaan alamnya dan menjadi salah satu kantung ekonomi Pemerintah Hindia Belanda. Kemajuan ekonomi membawanya pada puncak kemakmuran atau masa "Oedjan Mas." Riuhnya aktivitas perekonomiannya melandasi pendirian De Javasche Bank Agentschap Palembang yang menjadi cikal bakal kehadiran Bank Indonesia di Sumatra Selatan. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.

10. DARI RIMBA MENJADI KOTA: BANK INDONESIA DALAM EVOLUSI MALANG RAYA

Malang merupakan wilayah yang mulanya kurang dianggap penting oleh pemerintah kolonial. Evolusi ekonomi di sektor perkebunan membawanya menjadi salah satu wilayah penopang ekonomi di Jawa Timur dan berhasil menjawab keraguan pemerintah kolonial sebagai salah satu wilayah yang diperhitungkan. Perkembangan ekonomi wilayah yang masif menginisiasi berdirinya De Javasche Bank Agentschap Malang pada 1916 dan menjadi awal mula lahirnya Bank Indonesia di Kota Malang. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.

11. MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH MODAL: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN ACEH

Posisi geografis, potensi alam yang melimpah, serta kegigihan perjuangan rakyat Aceh terangkum dalam rangkaian kisah dan peristiwa yang telah tercatat dalam sejarah. Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam telah berhasil menjelma menjadi satu kekuatan politik dan ekonomi di Selat Malaka dan Lautan Hindia. Seiring perkembangannya, Aceh era Revolusi menjadi satu-satunya wilayah yang gagal dikuasai kembali oleh Belanda sekaligus menjadi tumpuan harapan bagi Republik. Berbagai bantuan fisik maupun materi diberikan rakyat Aceh, salah satunya sumbangan untuk pembelian pesawat pertama Republik Indonesia. Atas segala kontribusi yang diberikan, Sukarno pun menjuluki Aceh sebagai "daerah modal". Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir guna memperkaya referensi akademis di bidang ilmu sejarah ekonomi.

12. SEMARANG SEBAGAI SIMPUL EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN JAWA TENGAH

Sejak abad ke-8 M Semarang telah menjelma sebagai Kota Dagang. Letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah telah mengantarkan Semarang terhubung dengan kota-kota pantai utara Jawa sejak era Kerajaan Majapahit. Dalam perkembangannya, Semarang tumbuh sebagai pelabuhan penting di Jawa dan turut berimplikasi terhadap ramainya aktivitas perekonomian dan perdagangan di wilayah tersebut. Keberhasilan Semarang di bidang ekonomi telah nampak melalui interaksi yang terjalin antara wilayah pedalaman dan pesisir yang mampu membawa Semarang dikenal

sebagai wilayah simpul ekonomi. Bergeliatnya perekonomian dan perkembangan yang begitu masif berhasil mendatangkan atensi khusus bagi Direksi DJB untuk mendirikan kantor cabang pertamanya di Semarang pada 1 Maret 1829. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir guna memperkaya referensi akademis di bidang ilmu sejarah ekonomi.

Abdullah Abu Bakar, S.E.

(Walikota Kediri 2014-sekarang)

Keberhasilan Kediri sebagai kota industri yang menopang perekonomian Jawa Timur tidak terlepas dari proses dan perjalanan evolusi ekonomi yang panjang. Sektor perkebunan yang telah dirintis sejak awal abad ke-19 berhasil mengubah wajah Kediri menjadi kota industri modern sehingga meneguhkan Kediri sebagai "harta karun Jawa". Perkembangan infrastruktur dan konektivitas yang semakin berkembang terlihat pada pembangunan transportasi berbasis jaringan rel yang sangat mendukung mobilitas distribusi komoditas perkebunan dan penumpang. Selain itu juga ditunjang dengan tingginya dukungan aktivitas perbankan, sehingga berhasil mengantarkan Kota Kediri sebagai sentra perkebunan terkemuka di Jawa Timur. Melalui gambaran riwayat sejarahnya, sejak masa kolonial hingga hingga masa kontemporer, Kota Kediri terus menampilkan diri sebagai kota industri dan dagang yang penting di Jawa Timur. Seiring perkembangan zaman, Kediri tetap konsisten dengan aktivitas ekonominya yang ramai. Selain tumbuh dengan industri, Kota Kediri juga memposisikan dirisebagai kota jasa dan perdagangan, sehingga UMKM dan pelaku ekonomi kreatif semakin bertumbuh. Oleh karena itu, kerjasama sinergis Pemerintah Kota Kediri dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam mengawal laju perekonomian dilaksanakan secara selaras melalui berbagai program, antara lain peningkatkan literasi keuangan, pembinaan pelaku usaha menuju pasar ekspor, pengendalian inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berhasil meraih predikat TPID terbaik di wilayah Jawa Bali selama 2016-2019, serta berbagai program edukasi yang bertujuan untuk kemajuan Kota Kediri. Dari berbagai kajian tentang Kediri, terdapat kekosongan yang terasa mengenai langkanya kajian tentang dinamika historis perekonomian Kediri dalam jangka panjang. Buku yang berjudul **"Membangun Kemakmuran Di Pedalaman: Bank Indonesia Dalam Perkembangan Ekonomi Kediri,"** hadir menceritakan sejarah masyarakat Kediri dalam menggerakkan ekonominya. Melalui sajian kisah masa lalu yang kaya akan pembelajaran, baik untuk masa kini maupun masa depan, kisah kemakmuran Kediri sudah sepatutnya menjadi inspirasi pemerintah daerah dan lintas sektoral untuk menyusun kebijakan dalam upaya peningkatan ekonomi. Saya sampaikan apresiasi pada Bank Indonesia Institute atas peluncuran buku ini. Saya berharap buku ini bisa menjadi literatur edukatif untuk melahirkan inovasi dan peluang menumbuhkan kembali Kediri sebagai salah satu roda perekonomian di Jawa Timur.

Dr. Ir. Pramono Anung, M.M.

(Sekretaris Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2015-sekarang)

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dapat dikatakan cukup baik dari tahun ke tahun, ditandai dengan iklim bisnis yang kondusif dan pembangunan infrastruktur yang masif. Kediri dinobatkan sebagai kota terkaya ke-3 di Indonesia pada tahun 2018 dengan PDRB mencapai 291,48 juta per kapita, dan tumbuh 2,50 persen di tahun 2022 sebagai penyumbang PDRB terbesar ke-5 di Jawa Timur. Sektor paling berpengaruh dalam kemajuan Kota Kediri diantaranya sektor Industri skala besar, kecil, dan menengah. Sejarah mencatat peran penting Kediri berawal dari panggung pedalaman yang kaya akan perkembangan ekonomi serta dinamika sosial masyarakatnya. Sebagai sentra perkebunan sejak masa Hindia-Belanda, Kediri berkembang menjadi wilayah industri dengan infrastruktur yang maju berhasil menjadi kota kolonial modern. Buku berjudul **"Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri"**, menarasikan secara informatif, lugas, dan edukatif kisah perjalanan Kota Kediri dalam perspektif historis yang tersaji secara eksplanatif, dan kaya akan hikmah masa lalu. Buku ini kiranya menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan penting dari Bank Indonesia dalam rangka menumbuhkan kembali semangat untuk membawa Kota Kediri tampil menjadi kota industri utama di Indonesia. Dalam nilai-nilai pendidikan, sudah sepatutnya sejarah panjang Kediri menjadi pembelajaran dan referensi bagi para pembuat kebijakan demi tercapainya kemajuan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Prof. Dr. Purnawan Basundoro, M.Hum.

(Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Airlangga)

Kediri telah hadir secara menonjol dalam panggung sejarah jauh sejak masa pra-kolonial. Kondisi ekologis di kawasan ini memberikan daya dukung yang kokoh bagi kelangsungan hidup penduduk yang mendiaminya. Kediri mempunyai kesuburan tanah yang tinggi dan suplai irigasi yang terjamin, sehingga wilayahnya yang subur mendukung sektor pertanian dan perkebunan. Peran geostrategis yang semakin mementaskan kondisi sosial ekonomi yang menarik, dan memposisikan Kediri sebagai produsen komoditas yang menopang kebutuhan pasar internasional. Urgensi Kediri sebagai penopang ekonomi Jawa Timur semakin terlihat dalam era industrialisasi perkebunan. Ketergantungan pada fasilitas perbankan di Surabaya dinilai tidak menguntungkan, karena semakin tingginya biaya-biaya perdagangan yang harus ditekan, sehingga Kediri membutuhkan kehadiran lembaga perbankan yang kredibel untuk menangani transaksi keuangan dengan volume yang besar dan akses keuangan yang lebih cepat. Maka, kehadiran De Javasche Bank (DJB) Agentschap Kediri tahun 1923 merupakan bagian penting dari perkembangan perekonomian di wilayah Kediri. Keberadaan DJB pula yang memicu peningkatan peredaran uang, serta aliran kredit yang menunjang kegiatan ekonomi bagi para pengusaha di wilayah Kediri. Dinamika perekonomian di Kota Kediri turut mengembangkan laju perekonomian dari sektor pertanian menuju industrialisasi skala besar dan menengah. Sejarah wilayah Kediri yang makmur tergambarkan secara holistik dalam buku berjudul **"Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri."** Kehadiran buku ini diharapkan bermanfaat sebagai sebuah referensi yang kaya akan nilai edukatif dan rekreatif bagi khalayak umum, serta dapat menjadi bahan penentu kebijakan guna membangun kembali kemakmuran Kediri di lingkup nasional maupun internasional.

BI INSTITUTE
www.bi.go.id/id/institute